PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2014

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

351.077
Ind
p

PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2014

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2015

351.077 Ind p

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal
Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014. --
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2015

ISBN 978-602-235-911-1
1. Judul I. HEALTH STATISTICS

Buku ini diterbitkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950
Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168
Fax no: 62-21-5277168
E-mail: statkes@kemkes.go.id
Website: http://www.kemkes.go.id

TIM PENYUSUN

Pengarah
dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua
drg. Oscar Primadi, MPH
Kepala Pusat Data dan Informasi

Editor
Yudianto, SKM, M.Si
Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes
Boga Hardhana, S.Si, MM
drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes

Anggota
Ir. Zulfi, MM; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM;
Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Athi Susilowati Rois, SKM, MKM
Budi Prihantoro, S.Si; Margiyono, S.Kom; Dewi Roro Kumbini, S.Pd, MKM;
Annisa Harpini, SKM, MKM; Sarinah Bintang, SKM;
Diah Puspitasari, SKM, MKM; Eka Satriyani Sakti, SKM;
dr. Yoeyoen Aryantin Indrayani; Sri Hartati, S.Si;
B.B. Sigit; Hellena Maslinda; Hadi Nuramsyah

Kontributor
Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Kepegawaian; Biro Keuangan dan BMN;
Pusat Promosi Kesehatan; Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
Set. Ditjen Bina Upaya Kesehatan; Dit. Bina Upaya Kesehatan Dasar;
Dit. Bina Upaya Kesehatan Rujukan; Set. Ditjen Bina Gizi dan KIA; Dit. Bina Kesehatan Ibu;
Dit. Bina Kesehatan Anak; Dit. Bina Gizi; Set. Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
Set. Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; Dit. Surveilans Imunisasi,
Karantina, dan Kesehatan Matra; Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
Dit. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; Dit. Penyehatan Lingkungan
Set. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; Set. Badan PPSDM Kesehatan;
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan; Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia;
Konsil Kedokteran Indonesia; Badan Pusat Statistik; Kementerian Dalam Negeri;
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2014. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2014 ini.

Profil Kesehatan Indonesia merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang berisi situasi dan kondisi kesehatan yang cukup komprehensif. Profil Kesehatan Indonesia disusun berdasarkan ketersediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang bersumber dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dalam Profil Kesehatan Indonesia 2014 ini, pembaca dapat memperoleh data dan informasi mengenai Demografi, Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Ibu dan Kesehatan Anak, serta Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat membantu dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

Buku Profil Kesehatan Indonesia 2014 ini disajikan dalam bentuk cetakan dan *soft copy* yang dapat diunduh melalui *website* www.kemkes.go.id. Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang.

Jakarta, September 2015
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

MENTERI KESEHATAN RI

Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tingginya disparitas dan perlunya percepatan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengelolaan pembangunan kesehatan menjadi penting.

Saya menyambut gembira atas terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2014 sebagai publikasi data dan informasi kesehatan yang komprehensif. Publikasi seperti ini agar digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan. Selain itu Profil Kesehatan juga merupakan pemenuhan hak terhadap akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Saya berharap upaya peningkatan kualitas Profil Kesehatan Indonesia terus dilakukan, baik dari segi ketepatan waktu, validitas, kelengkapan, dan konsistensi data, sehingga di masa mendatang Profil Kesehatan Indonesia dapat terbit lebih cepat. Penguatan komitmen terhadap integrasi data dan informasi serta koordinasi antara pusat dan daerah juga harus ditingkatkan.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi, khususnya pengelola data di pusat, daerah, dan lintas sektor dalam penyusunan Profil Kesehatan 2014. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan yang berbasis data.

Jakarta, September 2015
Menteri Kesehatan RI

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek Sp.M (K)

DAFTAR SINGKATAN

3M Plus	:	Menguras, Menutup, Mengubur, plus Menghindari gigitan nyamuk
ABH	:	Anak yang Berhadapan Hukum
ABJ	:	Angka Bebas Jentik
ACT	:	*Artemisinin-based Combination Therapy*
ADB	:	*Asian Development Bank*
ADD	:	Anak Dengan Disabilitas
AFP	:	*Acute Flaccid Paralysis*
AHH	:	Angka Harapan Hidup Jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang
AIDS	:	*Acquired Immune Deficiency Syndrome*
AKABA	:	Angka Kematian Balita
AKB *- Infant Mortality Rate (IMR)*	:	Angka Kematian Bayi
AKI *- Maternal Mortalite Rate (MMR)*	:	Angka Kematian Ibu
AKN *- Neonatal Mortality Rate*	:	Angka Kematian Neonatal
ALKES	:	Alat Kesehatan
AMH	:	Angka Melek Huruf
AMP	:	Audit Maternal Perinatal
Andikpas	:	Anak didik pemasyarakatan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	:	*Annual Parasite Incidence*
APK	:	Angka Partisipasi Kasar

APM	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	:	*Association of Southeast Asian Nations*
ASI Eksklusif	:	Pemberian Air Susu Ibu saja tanpa tambahan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan.
BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
BASNO	:	Buang Air Sembarangan No
BB/TB	:	Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Tinggi Badan
BB/U	:	Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Umur
BBLR	:	Berat Bayi Lahir Rendah
BCG	:	*Bacille Calmette-Guérin*
BJP	:	Bukan Jaringan Perpipaan
BOK	:	Biaya Operasional Kesehatan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BTA +	:	Basil Tahan Asam positif
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CBE	:	*Clinical Breast Examiniation*
CBR	:	*Crude Birth Rate* = Angka Kelahiran Kasar
CDR	:	*Case Detection Rate*
CFR	:	*Case Fatality Rate*
CNR	:	*Case Notification Rate*
CR	:	*Cure Rate* = Angka Kesembuhan
CRPD	:	*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*
CSR	:	*Corporate Social Responsibility*
CTKI	:	Calon Tenaga Kerja Indonesia

D/S	:	Cakupan penimbangan balita di posyandu
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DBD	:	Demam Berdarah Dengue
DBK	:	Daerah yang Bermasalah Kesehatan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktoran Jenderal Anggaran
DJPB	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJJ	:	Denyut Jantung Janin
DO Rate	:	*Drop Out Rate*
DPT	:	*Diphteri Pertusis Tetanus*
DPT-HB	:	Diphteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis B
DTPK	:	Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
EKG	:	Elektrokardiogram
EMAS	:	*Expanding Maternal and Neonatal Survival*
FCP	:	*Female Cancer Program*
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKRTL		Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
FGD	:	*Focus Group Discussion*
GHPR	:	Gigitan Hewan Penular Rabies
HAM	:	Hak Asasi Manusia
Hb	:	Hemoglobin
HDI	:	*Human Development Index*
HDK	:	Hipertensi Dalam Kehamilan
HIV	:	*Human Immunodeficiency Virus*
IBI	:	Ikatan Bidan Indonesia
ICCP	:	*Indonesian Cancer Control Progam*
ICWRMIP	:	*Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program*

IDAI	:	Ikatan Dokter Anak Indonesia
IDU	:	*Injecting Drug User*
IEBA	:	Industri Ekstrak Bahan Alam
IFK	:	Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
IGD	:	Instalasi Gawat Darurat
IMD	:	Inisiasi Menyusu Dini
IMS	:	Infeksi Menular Seksual
IMT – *Body Mass Index (BMI)*	:	Indeks Massa Tubuh
IMT/U	:	Status gizi berdasarkan Indeks Massa Tubuh menurut Umur
IOT	:	Industri Obat Tradisional
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPKM	:	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IR	:	*Incidence Rate*
ISPA	:	Infeksi Saluran Pernafasan Akut
IVA	:	Inspeksi Visual dengan Asam Asetat
IUD	:	*Intra Uterine Device*
Jamkesmas	:	Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jamkesda	:	Jaminan Kesehatan Daerah
Jampersal	:	Jaminan Persalinan
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JMP	:	*Joint Monitoring Program*
Jumantik	:	Juru Pemantau Jentik
K1	:	Kunjungan baru ibu hamil, yaitu kunjungan ibu hamil pertama kali pada masa kehamilan.
K4	:	Kontak minimal empat kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, satukali pada trimester kedua dan duakali pada trimester ketiga.

KB	:	Keluarga Berencana
KEA	:	Komunitas Ekonomi Asean
KF 3	:	Kunjungan Nifas; Pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB pasca persalinan.
KIA	:	Kesehatan Ibu dan Anak
KIE	:	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KKI	:	Konsil Kedokteran Indonesia
KKP	:	Kantor Kesehatan Pelabuhan
KKS	:	Kabupaten/Kota Sehat
KLB	:	Kejadian Luar Biasa
KMS	:	Kartu Menuju Sehat
KN1	:	Kunjungan Neonatus 1; pelayanan kesehatan neonatal dasar, kunjungan ke-1 (pertama) pada 6-24 jam setelah lahir.
KN Lengkap	:	Kunjungan Neonatus Lengkap ; pelayanan kesehatan neonatal dasar meliputi ASI ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 bila tidak diberikan pada saat lahir, dan manajemen terpadu bayi muda. Dilakukan sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada -28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.
KOMNAS	:	Komisi Nasional
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPDT	:	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
KT	:	Konseling dan Tes HIV
KtA	:	Kekerasan Terhadap Anak
KTR	:	Kawasan Tanpa Rokok
KUHAP	:	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KVA	:	Kekurangan Vitamin A

Lapas	:	Lembaga Pemasyarakatan
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
LIL	:	Lima Imunisasi Dasar Lengkap
LILA	:	Lingkar Lengan Atas
LKSA	:	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
LMKM	:	Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui
LP/LS	:	Lintas Program / Lintas Sektor
LPA	:	Lembaga Perlindungan Anak
LPP	:	Laju Pertumbuhan Penduduk
LSL	:	Lelaki Seks dengan Lelaki
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	:	Madrasah Aliyah
MAK	:	Manajemen Aktif Kala
MB	:	Multi Basiler
MDGs	:	*Millenium Development Goals*
MI	;	Madrasah Ibtida'iyah
MOP	:	Metode Operatif Pria; cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran sperma pria.
MOW	:	Metode Operatif Wanita; cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran telur wanita.
MP ASI	:	Makanan Pendamping Air Susu Ibu
MTBM	:	ManajemenTerpadu Balita Muda; suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana bayi umur 1 hari – 2 bulan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang datang ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan neonatal.
MTBS	:	ManajemenTerpadu Balita Sakit; suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-59 bulan (balita) secara menyeluruh. MTBS bukan merupakan suatu program kesehatan tetapi suatu pendekatan/cara menatalaksana balita sakit.

MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
MTKI	:	Majelis tenaga Kesehatan Indonesia
NAPZA	:	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain
NCDR	:	*Newly Case Detection Rate*
NSPK	:	Norma Standar Prosedur Kriteria
P4K	:	Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
PAK	:	Penyakit Akibat Kerja
PAK	:	Penyalur Alat Kesehatan
PAMSTBM	:	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBF	:	Pedagang Besar Farmasi
PBI	:	Peserta Penerima bantuan Iuran
PD3I	:	Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PEMDA	:	Pemerintah Daerah
Perpres	:	Peraturan Presiden
PET	:	Post Exposure Treatment
PHBS	:	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PJB	:	Pemantau Jentik Berkala
PJK	:	Penyakit Jantung Koroner
PJPD	:	Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
PK	:	Penanganan Komplikasi Maternal
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKHS	:	Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat
PKK	:	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKPR	:	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
PKRT	:	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

PKT	:	Pusat Krisis Terpadu
PMS	:	Penyakit Menular Seksual
PN (Salinakes)	:	Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
POGI	:	Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia
Polindes	:	Pondok Bersalin Desa
POLRI	:	Polisi Republik Indonesia
Poltekkes	:	Politeknik Kesehatan
POMP	:	Pemberian Obat Massal Pencegahan; program untuk filariasis
PONED	:	Pelayanan emergensi Obstetrik dan Neonatal Dasar
PONEK	:	Pelayanan emergensi Obstetrik dan Neonatal Komprehensif
Posbindu	:	Pos Pembinaan Terpadu
Poskesdes	:	Pos Kesehatan Desa
Posyandu	:	Pos Pelayanan Terpandu
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPDS		Program Pendidikan Dokter Spesialis
PPDGS		Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
PPA	:	*Project Partnership Agreement*
PPT	:	Pusat Pelayanan Terpadu
PSN	:	Pemberantasan Sarang Nyamuk
PTM	:	Penyakit Tidak Menular
PTT	:	Pegawai Tidak Tetap
PUS	:	Pasangan Usia Subur
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	:	Puskesmas Pembantu
RAN	:	Rencana Aksi Nasional
Renstra	:	Rencana Strategis

Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
RITL	:	Rawat Inap Tingkat Lanjut
RITL	:	Rawat Inap Tingkat Lanjut
RITP	:	Rawat Inap Tingkat Pertama
RJTL	:	Rawat Jalan Tingkat Lanjut
RJTP	:	Rawat Jalan Tingkat Pertama
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPSA	:	Rumah Perlindungan Sosial Anak
RPTC	:	Rumah Perlindungan Trauma Center
RSIA	:	Rumah Sakit Ibu Anak
RSK	:	Rumah Sakit Khusus
RSU	:	Rumah Sakit Umum
Rutan	:	Rumah Tahanan
Satker	:	Satuan Kerja
SD	:	Sekolah Dasar
SDIDTK	:	Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang
SDKI	:	Survei Demografi Kesehatan Indonesia
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SEARO	:	*WHO South-East Asia Regional*
Sentra P3T	:	Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional
SJSN	:	Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
SK	:	Surat Keputusan
SKRT	:	Survei Kesehatan Rumah Tangga
SLB	:	Sekolah Luar Biasa
SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama

SPAL	:	Sistem Pengolahan Air Limbah
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SR	:	*Success Rate* = Angka Keberhasilan Pengobatan
SpOG	:	Spesialis Obstetri Ginekologi/ Spesialis Kebidanan dan Kandungan
Srikandi	:	Sistem Registrasi Kanker di Indonesia
STBM	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
STBP	:	Survei Terpadu Biologis dan Perilaku
STR	:	Surat Tanda Registrasi
STRA	:	Surat Tanda Registrasi Apoteker
STRTTK	:	Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
STTB	:	Surat Tanda Tamat Belajar
Susenas	:	Survei Sosial Ekonomi Indonesia
TB	:	Tuberkulosis
TB	:	Tinggi Badan
TB/U	:	Status gizi berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur
THT	:	Telinga, Hidung, dan Tenggorokan
TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
Toga	:	Tokoh Agama
Toma	:	Tokoh Masyarakat
TOT	:	*Training of Trainer*
TP	:	Tugas Pembantuan
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPM	:	Tempat Pengelolaan Makanan
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TT	:	*Tetanus Toksoid*
TTU	:	*Tempat-Tempat Umum*

UCI	:	*Universal Child Immunization;* tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar rneliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.
UHC	:	*Universal Health Coverage*
UKBM	:	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; Bentuk UKBM yang adalah Poskesdes, Polindes, Pos UKK, Poskestren, TOGA, Saka Bhakti Husada, dan lain-lain.
UKGS	:	Usaha Kesehatan Gigi Sekolah
UKM	:	Upaya Kesehatan Masyarakat
UKOT	:	Usaha Kecil Obat Tradisional
UKP	:	Upaya Kesehatan Perseorangan
UKS	:	Usaha Kesehatan Sekolah
UMOT	:	Usaha Mikro Obat Tradisional
UNDP	:	United Nations Development Programme
UNICEF	:	*United Nations Children's Fund*
UPPA	:	Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
VAR	:	Vaksin Anti Rabies
VCT	:	*Voluntary, Counseling, and Testing*
WDF	:	*World Diabetes Foundation*
WHO	:	*World Health Organization*
WNA	:	Warga Negara Asing
WUS	:	Wanita Usia Subur; keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun.

DAFTAR GAMBAR

BAB I. DEMOGRAFI

GAMBAR 1.1 JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2010 – 2014 2

GAMBAR 1.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 2

GAMBAR 1.3 PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2014 3

GAMBAR 1.4 PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2014 4

GAMBAR 1.5 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2012 – 2014 (DALAM PERSEN) 7

GAMBAR 1.6 GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2014 8

GAMBAR 1.7 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 ... 9

GAMBAR 1.8 PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2014 11

GAMBAR 1.9 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN KONDISI AGUSTUS 2014 12

GAMBAR 1.10 RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS (DALAM TAHUN) TAHUN 2010 - 2014 13

GAMBAR 1.11 PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KEATAS MENURUT KEPEMILIKAN IJAZAH/STTB TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2014 14

GAMBAR 1.12 ANGKA MELEK HURUF (DALAM PERSEN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 15

GAMBAR 1.13 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2011 - 2014 16

GAMBAR 1.14 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN TAHUN 2011 - 2014 17

GAMBAR 1.15 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2011 - 2014 18

GAMBAR 1.16 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 209 - 2013 18

GAMBAR 1.17 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 19

GAMBAR 1.18 ANGKA HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (DALAM TAHUN) TAHUN 2013 20

BAB II. SARANA KESEHATAN

GAMBAR 2.1 JUMLAH PUSKESMAS TAHUN 2010 – 2014 24

GAMBAR 2.2 RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK TAHUN 2010 – 2014 24

GAMBAR 2.3 RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK TAHUN 2014 25

GAMBAR 2.4 JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP TAHUN 2010 – 2014 26

GAMBAR 2.5 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI SYARAT MINIMAL 4 PUSKESMAS PONED DI INDONESIA TAHUN 2014 27

GAMBAR 2.6 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DI INDONESIA TAHUN 2010 - 2014 28

GAMBAR 2.7 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA DI INDONESIA TAHUN 2010 - 2014 29

GAMBAR 2.8 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI TENAGA KESEHATAN TERLATIH PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA TAHUN 2014 30

GAMBAR 2.9 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2014 32

GAMBAR 2.10 PERSENTASE RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2014 33

GAMBAR 2.11 RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2010 - 2014 34

GAMBAR 2.12 RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 34

GAMBAR 2.13 PERSENTASE RUMAH SAKIT MENURUT KELAS DI INDONESIA TAHUN 2014 35

GAMBAR 2.14 JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2014 36

GAMBAR 2.15 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2014 37

GAMBAR 2.16 PERSENTASE RATA-RATA PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2014 38

GAMBAR 2.17 PERSENTASE DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF DI INDONESIA TAHUN 2014 39

GAMBAR 2.18 PERSENTASE POSYANDU MENURUT STRATA DI INDONESIA TAHUN 2014 40

GAMBAR 2.19 RASIO POSYANDU TERHADAP DESA/KELURAHAN DI INDONESIA TAHUN 2014 41

GAMBAR 2.20 JUMLAH PROGRAM STUDI POLTEKES DIPLOMA III DAN IV DI INDONESIA TAHUN 2014 42

GAMBAR 2.21 JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLTEKES DI INDONESIA TAHUN 2014 43

BAB III. TENAGA KESEHATAN

GAMBAR 3.1 JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMPUNYAI SURAT TANDA REGISTRASI DI INDONESIA TAHUN 2014 48

GAMBAR 3.2 JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMPUNYAI SURAT TANDA REGISTRASI DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2014 50

GAMBAR 3.3 JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG BEKERJA SESUAI DENGAN FUNGSINYA DI INDONESIA TAHUN 2014 51

GAMBAR 3.4 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2014 52

GAMBAR 3.5 RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2014 53

GAMBAR 3.6 RASIO PERAWAT DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2014 53

GAMBAR 3.7 RASIO BIDAN DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2014 54

GAMBAR 3.8 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2014 55

GAMBAR 3.9 RASIO DOKTER SPESIALIS TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 57

GAMBAR 3.10 RASIO DOKTER UMUM TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 57

GAMBAR 3.11 RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 58

GAMBAR 3.12 RASIO BIDAN TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 59

GAMBAR 3.13 JUMLAH DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER TAHUN 2014 61

GAMBAR 3.14 JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2014 62

GAMBAR 3.15 JUMLAH KEBERADAAN AKTIF TENAGA RESIDEN DAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS DIPLOMA III KESEHATAN DI KABUPATEN PRIORITAS DTPK DAN DBK PER 31 DESEMBER TAHUN 2014 63

GAMBAR 3.16 JUMLAH PENGANGKATAN TENAGA RESIDEN DAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS D-III KESEHATAN DI KABUPATEN PRIORITAS DTPK DAN DBK TAHUN 2014 64

GAMBAR 3.17 JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2014 65

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

GAMBAR 4.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2009 – 2014 69

GAMBAR 4.2 PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP APBD MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2014 71

GAMBAR 4.3 REALISASI DANA DEKONSENTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2014 72

GAMBAR 4.4 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2014 73

GAMBAR 4.5 CAKUPAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN PER 31 DESEMBER 2014 75

GAMBAR 4.6 JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) YANG BEKRJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER DESEMBER 2014 76

GAMBAR 4.7 JUMLAH FKTP DAN JUMLAH FKRTL YANG BEKRJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER DESEMBER 2014 77

GAMBAR 4.8 JUMLAH JENIS FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) YANG BEKRJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER DESEMBER 2014 77

GAMBAR 4.9 JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) YANG BEKRJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER DESEMBER 2014 78

GAMBAR 4.10 PERSENTASE JENIS FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) YANG BEKRJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER DESEMBER 2014 79

GAMBAR 4.11 PERSENTASE PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 80

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

GAMBAR 5.1 ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 1991 - 2012 86

GAMBAR 5.2 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2005 - 2014 88

GAMBAR 5.3 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 89

GAMBAR 5.4 CAKUPAN PEMBERIAN 90 TABLET TAMBAH DARAH (ZAT BESI) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 91

GAMBAR 5.5 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2005 - 2014 92
GAMBAR 5.6 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 92
GAMBAR 5.7 PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 93
GAMBAR 5.8 CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K4 DAN CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN (PN) DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2014 94
GAMBAR 5.9 PROPORSI PENOLONG PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERTINGGI DI INDONESIA, RISKESDAS TAHUN 2013 95
GAMBAR 5.10 PROPORSI PERSALINAN SESAR DARI KELAHIRAN PERIODE 1 JANUARI 2010 SAMPAI SAAT WAWANCARA MENURUT KARAKTERISTIK DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 95
GAMBAR 5.11 CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA TAHUN 2008 - 2014 96
GAMBAR 5.12 CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 97
GAMBAR 5.13 CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN (PN) DI INDONESIA TAHUN 2008 - 2014 98
GAMBAR 5.14 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DI INDONESIA TAHUN 2008 - 2014 99
GAMBAR 5.15 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 99
GAMBAR 5.16 PENYEBAB KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2010 - 2013 100
GAMBAR 5.17 PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA TAHUN 2014 102
GAMBAR 5.18 PERSENTASE PEMAKAIAN ALAT/CARA KB PADA WANITA USIA SUBUR (15 – 49 TAHUN) YANG BERSTATUS KAWIN DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 103
GAMBAR 5.19 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSIDI INDONESIA TAHUN 2014 103
GAMBAR 5.20 PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI TAHUN 2014 104
GAMBAR 5.21 CAKUPAN PESERTA KB BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 105
GAMBAR 5.22 CAKUPAN PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI TAHUN 2014 105
GAMBAR 5.23 PERSENTASE PUS BUKAN PESERTA KB (*UNMET NEED*) MENURUT PROVINSI HASIL PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2014 106
GAMBAR 5.24 TREN ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA 107

GAMBAR 5.25 PERSENTASE BERAT BAYI LAHIR RENDAH MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 108
GAMBAR 5.26 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 109
GAMBAR 5.27 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 110
GAMBAR 5.28 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 111
GAMBAR 5.29 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2014 112
GAMBAR 5.30 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 113
GAMBAR 5.31 CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0 – 6 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 114
GAMBAR 5.32 CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6 – 59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 115
GAMBAR 5.33 TREN CAKUPAN PENIMBANGAN BALITA (D/S) DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2014 116
GAMBAR 5.34 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 118
GAMBAR 5.35 CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 119
GAMBAR 5.36 ANGKA *DROP OUT* CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB-1 CAMPAK PADA BAYI TAHUN 2007 – 2014 120
GAMBAR 5.37 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 .. 121
GAMBAR 5.38 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 122
GAMBAR 5.39 CAKUPAN SEKOLAH DASAR/SETINGKAT YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/SETINGKAT KELAS 1 MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 123
GAMBAR 5.40 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA PKPR MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 125
GAMBAR 5.41 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 127

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

GAMBAR 6.1 PROPORSI KASUS BARU BTA + MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2014 134
GAMBAR 6.2 PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU DI INDONESIA TAHUN 2008-2014 134

GAMBAR 6.3 PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 135
GAMBAR 6.4 ANGKA NOTIFIKASI KASUS BTA+ DAN SELURUH KASUS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2014 136
GAMBAR 6.5 ANGKA NOTIFIKASI KASUS TB PARU BTA+PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 136
GAMBAR 6.6 ANGKA KESEMBUHAN DAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TB BTA+DI INDONESIA TAHUN 2008-2014 137
GAMBAR 6.7 JUMLAH KASUS BARU HIV POSITIF DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2014 139
GAMBAR 6.8 PETA EPIDEMI HIV DI INDONESIA TAHUN 2014 139
GAMBAR 6.9 JUMLAH KASUS BARU AIDS SAMPAI TAHUN 2014 140
GAMBAR 6.10 PROPORSI KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2014 140
GAMBAR 6.11 PERSENTASE KASUS BARU AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2014 141
GAMBAR 6.12 PERSENTASE KASUS AIDS MENURUT FAKTOR RISIKO DI INDONESIA TAHUN 2014 141
GAMBAR 6.13 ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2004-2014 142
GAMBAR 6.14 *PERIOD PREVALENCE* PNEUMONIA MENURUT PROVINSI RISKESDAS 2007 DAN 2013 143
GAMBAR 6.15 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2008-2014 143
GAMBAR 6.16 ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2008-2014 144
GAMBAR 6.17 ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 145
GAMBAR 6.18 ANGKA CACAT TINGKAT II PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2014 146
GAMBAR 6.19 ANGKA CACAT TINGKAT II KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2014 146
GAMBAR 6.20 PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2008-2014 147
GAMBAR 6.21 *PERIOD PREVALENCE* DIARE (> 2 MINGGU – 1 BULAN SEBELUM WAWANCARA)MENURUT GEJALA, RISKESDAS 2013 148

GAMBAR 6.22 *INCIDENCE RATE (IR)* CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2014 150
GAMBAR 6.23 PROPORSI KASUS CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2014 150
GAMBAR 6.24 PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2014..... 151
GAMBAR 6.25 *NON POLIO AFP RATE* PER 100.000 ANAK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2014 152
GAMBAR 6.26 PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 153
GAMBAR 6.27 ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2014 154
GAMBAR 6.28 ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2014..... 154
GAMBAR 6.29 JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2008-2014 155
GAMBAR 6.30 ANGKA BEBAS JENTIK DI INDONESIA TAHUN 2010-2014 156
GAMBAR 6.31 JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2010-2014 157
GAMBAR 6.32 JUMLAH KASUS KLINIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2014 158
GAMBAR 6.33 CAKUPAN POPM FILARIASIS TAHUN 2010-2014 158
GAMBAR 6.34 PETA ENDEMISITAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2013 DAN 2014.. 159
GAMBAR 6.35 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITAS TAHUN 2012-2014 159
GAMBAR 6.36 ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANUALPARACITE IN INCIDENCE/API) PER 100.000 PENDUDUK BERISIKO TAHUN 2005-2014 160
GAMBAR 6.37 SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2009-2014 161
GAMBAR 6.38 SEBARAN KASUS GHPR DAN KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2014 162
GAMBAR 6.39 SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2008-2014 163
GAMBAR 6.40 JUMLAH KASUS DAN CFR ANTRAKS DI INDONESIA TAHUN 2008-2014. 164
GAMBAR 6.41 JUMLAH KASUS, KEMATIAN, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) FLU BURUNG DI INDONESIA TAHUN 2005-2014 165

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

GAMBAR 7.1 PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2014 170
GAMBAR 7.2 PENCAPAIAN RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) TAHUN 2014 172

GAMBAR 7.3 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA KABUPATEN/ KOTA SEHAT (KKS) TAHUN 2014 173

GAMBAR 7.4 PERSENTASE KUALITAS AIR MINUM YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2014 174

GAMBAR 7.5 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK TAHUN 2014 175

GAMBAR 7.6 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK TAHUN 2014 177

GAMBAR 7.7 PERSENTASE RUMAH YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2014 179

GAMBAR 7.8 PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2014 180

GAMBAR 7.9 PERSENTASE TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2014 182

GAMBAR 7.10 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN PEMBINAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014 183

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	JUMMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF DI INDONESIA TAHUN 2014	5
TABEL 1.2	PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2014	6
TABEL 1.3	PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2012 - 2014	9
TABEL 1.4	PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJA, DAN PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2012 - 2014	12
TABEL 2.1	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KEPEMILIKAN DI INDONESIA TAHUN 2012 – 2014	32
TABEL 6.1	ESTIMASI INSIDENS, PREVALENSI, DAN MORTALITAS PER 100.000 TAHUN 1990 DAN 2013	138
TABEL 6.2	SITUASI KEJADIAN LUAR BIASA DIARE TAHUN 2014	148
TABEL 6.3	DISTRIBUSI KASUS LEPTOSPIROSIS DI 6 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN TAHUN 2005-2014	163

****

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. DEMOGRAFI

Lampiran 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 1.2 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 1.3 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Lampiran 1.4 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 1.5 Estimasi Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Bayi (0 Tahun), Jumlah Batita (0-2 Tahun), Jumlah Anak Balita (1 - 4 Tahun), Jumlah Balita (0 - 4 Tahun) Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 1.6 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Penduduk Usia Muda, Usia Produktif dan Usia Non Produktif Menurut Jenis Kelamin Provinsi Tahun 2014

Lampiran 1.7 Estimasi Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 Tahun), WUS Imunisasi (15 - 39 Tahun), Ibu Hamil, Ibu Bersalin Dan Ibu Nifas Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 1.8 Estimasi Jumlah Anak Pra Sekolah, Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat, dan Jumlah Anak Usia SD/Setingkat Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 1.9 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2000 - 2014

Lampiran 1.10 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Tipe Daerah Tahun 2014

Lampiran 1.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 1.12 Indeks Gini Menurut Provinsi Tahun 2010 – 2014

Lampiran 1.13 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Tahun 2014

Lampiran 1.14 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Bukan Makanan Perkapita Perbulan Tahun 2014

Lampiran 1.15 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tahun 2014

Lampiran 1.16 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Lampiran 1.17 Persentase Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki (Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan) Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Lampiran 1.18 Angka Melek Huruf (Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Yang Melek Huruf) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2011 – 2014

Lampiran 1.19 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi Tahun 2011 – 2014

Lampiran 1.20 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Lampiran 1.21 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2011 – 2014

Lampiran 1.22 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2011 – 2014

Lampiran 1.23 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2011 – 2014

Lampiran 1.24 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Provinsi Tahun 2012 - 2013

BAB II. SARANA KESEHATAN

Lampiran 2.1 Jumlah Puskesmas dan Rasionya Terhadap Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2010 – 2014

Lampiran 2.2 Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Provinsi Tahun 2010 - 2014

Lampiran 2.3 Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Pelayanan Pengembangan Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 2.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Nakesnya Dilatih Kesehatan Tradisional, Alternatif Dan Komplementer Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 2.5 Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Pengelola dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 2.6 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola Tahun 2010 - 2014

Lampiran 2.7 Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidur Per Menurut Jenis Rumah Sakit Tahun 2010 - 2014

Lampiran 2.8 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur , Dan Rasio Tempat Tidur Per 100.000 Penduduk Menurut Kelas Rumah Sakit dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 2.9 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Menurut Kelas Perawatan dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 2.10 Jumlah Layanan HIV Aids dan Infeksi Penyakit Menular Seksual (IMS) Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 2.11 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 2.12 Jumlah RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Serta Posyandu Menurut Provinsi dan Tingkatan (Strata) di Indonesia Tahun 2014

Lampiran 2.13 Jumlah Program Studi Diploma IV Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Sampai dengan Desember Tahun 2014

Lampiran 2.14 Jumlah Jurusan/Program Studi Diploma III Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Jurusan dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 2.15 Jumlah Perserta Didik Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2012/2013 Sampai Dengan 2014/2015

Lampiran 2.16 Jumlah Peserta Didik Program Diploma III Poltekkes Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2014

Lampiran 2.17 Jumlah Peserta Didik Program Diploma IV Poltekkes Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2014

Lampiran 2.18 Jumlah Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menururt provinsi Tahun 2012 - 2014

Lampiran 2.19 Jumlah Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2012 - 2014

Lampiran 2.20 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Indonesia Sampai Dengan Bulan November 2014

Lampiran 2.21 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Indonesia Sampai Dengan Bulan November 2014

Lampiran 2.22 Penggunaan Obat Generik pada Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2014

BAB III. TENAGA KESEHATAN

Lampiran 3.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Menurut Jenis Tenaga dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 3.2 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis Tenaga dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 3.3 Rasio Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, dan Bidan Terhadap Jumlah Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 3.4 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Rumah Sakit Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 3.5 Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Menurut Provinsi Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2014

Lampiran 3.6 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Menurut Provinsi Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2014

Lampiran 3.7 Jumlah tenaga kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 3.8 Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi per 31 Desember Tahun 2014

Lampiran 3.9 Jumlah Dokter Umum Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Per 31 Desember Tahun 2014

Lampiran 3.10 Jumlah Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Per 31 Desember 2014

Lampiran 3.11 Jumlah Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Kondisi 31 Desember 2014

Lampiran 3.12 Jumlah Pengangkatan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 3.13 Jumlah Pengangkatan Dokter Umum Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah Dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 3.14 Jumlah Pengangkatan Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah Dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 3.15 Jumlah Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 3.16 Jumlah Keberadaan Aktif Tenaga Residen Dan Tenaga Penugasan Khusus D-III Kesehatan di Kabupaten Prioritas DTPK dan DBK Menurut Provinsi Per 31 Desember Tahun 2014

Lampiran 3.17 Jumlah Pengangkatan Tenaga Residen Dan Tenaga Penugasan Khusus D-III Kesehatan di Kabupaten Prioritas DTPK dan DBK Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 3.18 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2012-2014

Lampiran 3.19 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Program Studi Tahun 2012-2014

Lampiran 3.20 Jumlah Lulusan Program Diploma IV Poltekkes Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2014

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Lampiran 4.1 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan RI Menurut Eselon I Tahun 2014

Lampiran 4.2 Laporan realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Kondisi Per 31 Desember 2014 Berdasarkan Jenis Belanja

Lampiran 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2014 Kondisi Per 31 Desember Berdasarkan Sumber Dana

Lampiran 4.4 Realisasi Dana Dekonsentrasi Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 4.5 Alokasi Dan Realisasi Tugas Pembantuan Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 4.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Menurut Fungsi Kesehatan Dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 4.7 Alokasi Dan Realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 4.8 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Per 31 Desember Tahun 2014

Lampiran 4.9 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan Per Desember 2014

Lampiran 4.10 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan Per Desember Tahun 2014

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

Lampiran 5.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.2 Cakupan Pemberian 90 Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.3 Cakupan Imunisasi TT Pada Wanita Usia Subur Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.4 Cakupan Imunisasi TT Pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.5 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.6 Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.7 Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.8 Persentase Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.9 Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.10 Persentase Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.11 Jumlah Tempat Pelayanan KB Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.12 Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Pasca Persalinan/Pasca Keguguran (PP/PK) Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2014

Lampiran 5.13 Jumlah dan Persentase PUS Bukan Peserta KB (*UNMET NEED*) Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2014

Lampiran 5.14 Persentase Balita (0-59 Bulan) Menurut Berat Badan lahir dan Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.15 Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.16 Cakupan Penanganan Neonatal Dengan Komplikasi Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.17 Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.18 *Drop Out Rate* Cakupan Imunisasi DPT/HB(1)- Campak dan Cakupan Imunisasi DPT/HB(1)- DPT/(HB(3) Pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2012 - 2014

Lampiran 5.19 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Imunization* (UCI) Menurut Provinsi Tahun 2012 - 2014

Lampiran 5.20 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak balita Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.21 Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.22 Cakupan Pemberian kapsul Vitamin A Pada Balita 6 – 59 Bulan Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.23 Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi 0 – 6 Bulan Menurut Provinsi, Tahun 2014

Lampiran 5.24 Cakupan Balita Ditimbang Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.25 Kasus Gizi Buruk Pada Balita Ditemukan dan Mendapat Perawatan Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.26 Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.27 Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.28 Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pembinaan Kesehatan Anak Di Panti Anak Terlantar Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.29 Cakupan Sekolah Dasar (SD) Yang Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/MI Kelas 1 Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.30 Puskesmas Membina Lapas/Rutan Anak Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 5.31 Puskesmas Membina Kesehatan Anak Penyandang Cacat Melalui Program UKS Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Sampai Dengan Tahun 2014

Lampiran 5.32 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.33 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.34 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.35 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur Dan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (TB/U Dan BB/TB) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.36 Prevalensi Status Gizi Penduduk Dewasa (>18Tahun) Berdasarkan Kategori Indeks Masa Tubuh (IMT) dan Provinsi, Riskesdas 2013

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

Lampiran 6.1 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.2 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.3 Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit TB Paru Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.4 Cakupan TB Paru BTA Positif Sembuh, Pengobatan Lengkap dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.5 Jumlah Kasus Baru Aids dan Kasus Kumulatif Aids Menurut Provinsi sampai dengan Desember 2014

Lampiran 6.6 Jumlah Kasus Baru Infeksi HIV Menurut Provinsi Tahun 2012-2014

Lampiran 6.7 Jumlah Dan Persentase Kasus Aids pada Pengguna Napza Suntikan (IDU) Menurut Provinsi Sampai Dengan Desember 2014

Lampiran 6.8 Jumlah Layanan dan Kunjungan Konseling Dan Tes HIV Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.9 Jumlah Kasus Pneumonia Pada Balita Menurut Provinsi Dan Kelompok Umur Tahun 2014

Lampiran 6.10 Case Fatality Rate Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2014

Lampiran 6.11 Penemuan Kasus Diare Ditangani Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.12 Jumlah Kasus Baru Kusta dan Case Detection Rate (CDR) Per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Lampiran 6.13 Proporsi Kecacatan Kusta dan Kasus Kusta pada Anak 0-14 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.14 Jumlah Kasus Kusta Yang Tercatat Dan Angka Prevalensi Per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi Dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Lampiran 6.15 Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.16 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Incidence Rate (IR) Campak Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.17 Jumlah Kasus Campak dan Kasus Campak yang Divaksinasi Menurut Kelompok Umur dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.18 Frekuensi KLB Dan Jumlah Kasus pada KLB Campak Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.19 KLB Campak Berdasarkan Konfirmasi Laboratorium Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.20 Jumlah Kasus Difteri Menurut Kelompok Umur Dan Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.21 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun dan Persentase Spesimen Adekuat Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.22 Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 Penduduk Berisiko Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.23 Annual Parasite Insidence (API) Malaria Menurut Provinsi Tahun 2011-2014

Lampiran 6.24 Jumlah Penderita, Incidence Rate Per 100.000 Penduduk, Kasus Meninggal, dan Case Fatality Rate (%) Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF) Menurut Provinsi Tahun 2014

Lampiran 6.25 Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terjangkit Demam Berdarah Dengue Menurut Provinsi Tahun 2012 - 2014

Lampiran 6.26 Situasi Rabies Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2014

Lampiran 6.27 Jumlah Penderita Filariasis Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014

Lampiran 6.28 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Case Fatality Rate (CFR) Leptospirosis Menurut Provinsi Tahun 2012 – 2014; Situasi Antraks Pada Manusia Menurut Provinsi Tahun 2012 – 2014

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

Lampiran 7.1 Jumlah Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2012 – 2014

Lampiran 7.2 Pencapaian Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Tahun 2014

Lampiran 7.3 Jumlah Kabupaten/Kota Penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Di Indonesia Tahun 2014

Lampiran 7.4 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Tahun 2013 – 2014

Lampiran 7.5 Persentase Kualitas Air minum Yang Memenuhi Syarat Tahun 2014

Lampiran 7.6 Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Tahun 2013 – 2014

Lampiran 7.7 Persentase Rumah Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2014

Lampiran 7.8 Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2014

Lampiran 7.9 Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2014

Lampiran 7.10 Persentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Tahun 2014

***

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iv
Kata Sambutan v
Daftar Singkatan vi
Daftar Gambar xvii
Daftar Tabel xxvi
Daftar Lampiran xxvii
Daftar Isi xxxv

BAB I DEMOGRAFI

A. KEADAAN PENDUDUK 1
B. KEADAAN EKONOMI 6
C. KEADAAN PENDIDIKAN 13
D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 18

BAB II SARANA KESEHATAN

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 23
   1. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 26
   2. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja 28
   3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga 29
   4. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer 30
B. RUMAH SAKIT 31
   1. Jumlah dan Jenis Rumah Sakit 31
C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 35
   1. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 35
   2. Ketersediaan Obat dan Vaksin 37
   3. Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 38
D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT 39
E. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLTEKKES 41
   1. Jumlah Poltekkes 41
   2. Peserta Didik 42

BAB III TENAGA KESEHATAN

A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN 47
   1. Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat 51
   2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit 55
B. RASIO TENAGA KESEHATAN 56
C. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PEGAWAI TIDAK TETAP 60
D. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PENUGASAN KHUSUS 62
E. JUMLAH LULUSAN POLITEKNIK KESEHATAN 64

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN 69
B. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KESEHATAN 70
C. ALOKASI DAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014 71
D. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 74
E. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN 79

BAB V KESEHATAN KELUARGA

A. KESEHATAN IBU 85
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 87
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 91
3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 96
4. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Kebidanan 98
5. Pelayanan Kontrasepsi 101
B. KESEHATAN ANAK 106
1. Berat Badan Lahir Bayi 107
2. Penanganan Komplikasi Neonatal 108
3. Pelayanan Kesehatan Neonatal 109
4. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi 112
5. Pemberian ASI Eksklusif 113
6. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita usia 6 – 59 Bulan 114
7. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S) 116
8. Imunisasi 117
9. Pelayanan Kesehatan Anak Balita 121
10. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat 122
11. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 124
12. Pelayanan Kesehatan Pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) 125
13. Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar dan Anak Jalanan di Panti 128
14. Pelayanan Kesehatan Anak Dengan Disabilitas (ADD) 129
15. Pelayanan Kesehatan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) 130

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

A. TUBERKULOSIS 133
1. Kasus Baru BTA Positif (BTA+) 133
2. Proporsi pasien baru BTA positif diantara semua kasus TB 134
3. Angka notifikasi kasus atau case notification rate (CNR) 135
4. Angka keberhasilan pengobatan 137
5. Prevalensi tuberkulosis 137
B. HIV & AIDS 138
1. Jumlah kasus HIV positif dan AIDS 138
2. Angka kematian akibat AIDS 142
C. PNEUMONIA 142
D. KUSTA 144
1. Angka prevalensi dan angka penemuan kasus baru 144
2. Angka cacat tingkat II 145
3. Proporsi kusta MB dan proporsi penderita kusta pada anak 147

E. DIARE 147
F. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) 149
1. Tetanus Neonatorium 149
2. Campak 149
3. Difteri 151
4. Polio dan AFP (*Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut*) 152
G. DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) 153
1. Incidence Rate dan Case Fatality Rate 153
2. Kabupaten/Kota terjangkit DBD 155
3. Angka Bebas Jentik 155
H. CHIKUNGUNYA 156
I. FILARIASIS 157
J. MALARIA 159
1. Angka Kesakitan Malaria 160
2. Pengobatan Malaria 160
K. RABIES 161
L. LEPTOSPIROSIS 162
M. ANTRAKS 164
N. FLU BURUNG 164

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

A. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 169
B. PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) 171
C. PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 172
D. AIR MINUM 174
E. SANITASI LAYAK 176
F. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYEHATAN PEMUKIMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM 178
1. Rumah Sehat 178
2. Tempat-Tempat Umum (TTU) 180
G. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYEHATAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN 181
H. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS 182

GAMBAR

I

DEMOGRAFI

1 DEMOGRAFI

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Benua Asia dan Australia, di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara astronomis Indonesia terletak antara 6^{o} Lintang Utara sampai 11^{o} Lintang Selatan dan 95^{o} sampai 141^{o} Bujur Timur yang meliputi rangkaian pulau antara Sabang sampai Merauke. Data yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 13.466, luas daratan sebesar 1.922.570 km^{2} dan luas perairan sebesar 3.257.483 km^{2}.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, secara administratif wilayah Indonesia terbagi atas 34 provinsi, 514 kabupaten/kota (416 kabupaten dan 98 kota), 7.094 kecamatan, 8.412 kelurahan dan 74.093 desa. Jumlah provinsi bertambah satu dari tahun 2013, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, dengan 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Malinau, Bulungan, Tana Tidung, Nunukan dan Kota Tarakan. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan menurut provinsi pada tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 1.1.

Pada Bab ini akan diulas mengenai keadaan penduduk, ekonomi, pendidikan dan indeks pembangunan manusia (IPM).

A. KEADAAN PENDUDUK

Hasil estimasi jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 252.124.458 jiwa, yang terdiri atas 126.921.864 jiwa penduduk laki-laki dan 125.202.594 jiwa penduduk perempuan. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dengan bimbingan dari Badan Pusat Statistik dengan menggunakan metode geometrik. Metode ini menggunakan prinsip bahwa parameter dasar demografi yaitu parameter fertilitas, mortalitas, dan migrasi per tahun tumbuh konstan. Metode ini lebih mudah dilakukan dengan mengkaji pertumbuhan penduduk di dua atau lebih titik waktu yang berbeda.

Gambar 1.1 memperlihatkan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tahun 2010 hingga 2014. Peningkatan ini relatif cepat, diperlukan kebijakan untuk mengatur atau membatasi jumlah kelahiran agar kelahiran dapat dikendalikan dan kesejahteraan penduduk makin meningkat. Rasio jenis kelamin pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 101, yang artinya terdapat 101 laki-laki diantara 100 perempuan.

GAMBAR 1.1
JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2010 – 2014

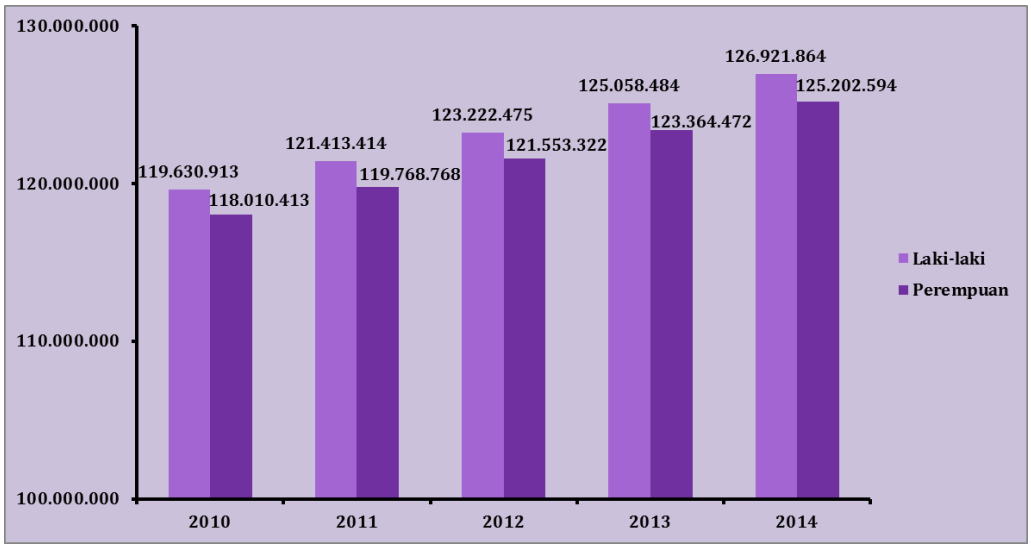

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, Hasil Sensus Penduduk;
Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014, Hasil Estimasi

Pada Gambar 1.2, berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 46.300.543 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk sebesar 877.437 jiwa. Posisi urutan penduduk tertinggi hingga terendah ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2013, yang berbeda hanya Sumatera Selatan dan Lampung, serta Papua dan Jambi yang bertukar posisi. Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan provinsi serta rasio jenis kelamin terdapat pada Lampiran 1.2.

GAMBAR 1.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

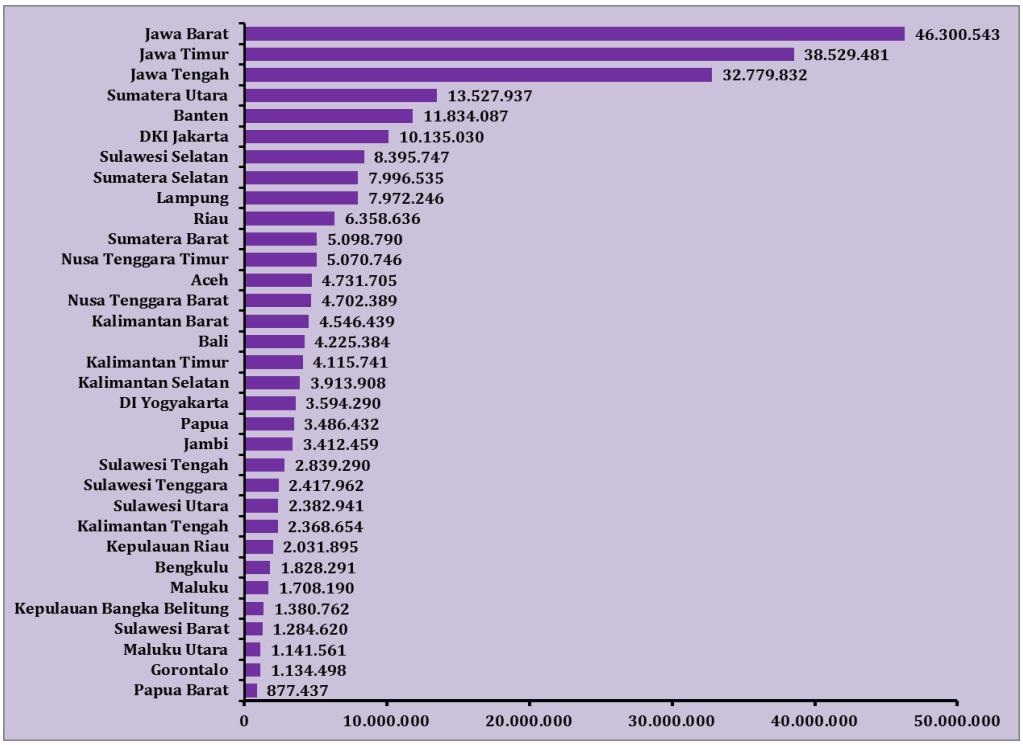

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014, Hasil Estimasi

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk, dapat disusun sebuah piramida penduduk tahun 2014. Dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk, badan piramida bagian kiri menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan badan piramida bagian kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

GAMBAR 1.3
PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2014

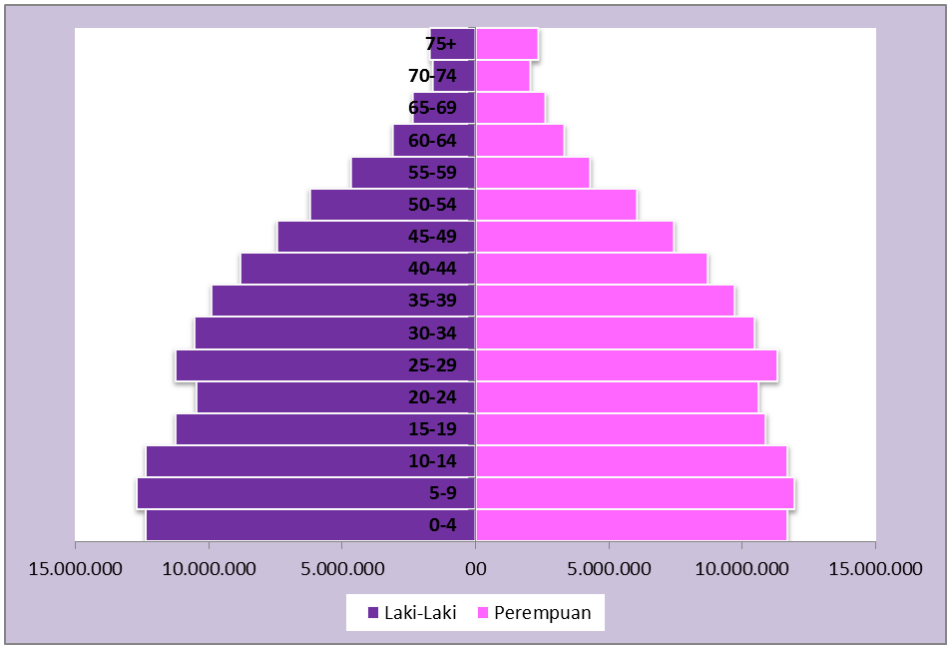

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014, Hasil Estimasi

Pada Gambar 1.3 ditunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat diketahui dari jumlah penduduk usia muda yang masih banyak. Badan piramida besar, ini menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 25-29 tahun dan 30-34 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah golongan penduduk usia tua juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya kondisi kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi.

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia berdasarkan hasil estimasi sebesar 132 jiwa per km^2, keadaan ini meningkat dari tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 1.4.

GAMBAR 1.4
PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014

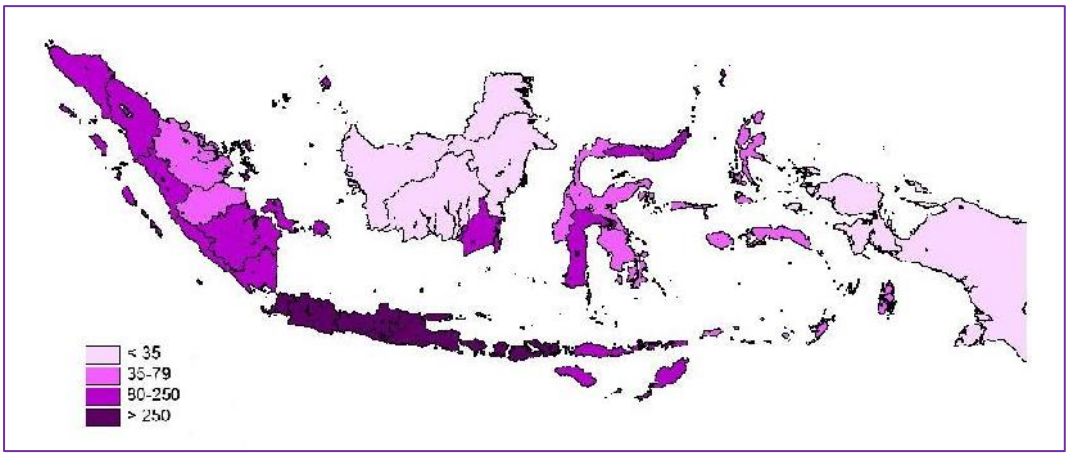

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014, Hasil Estimasi

Pada Gambar 1.4, kepadatan penduduk di Indonesia belum merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 15.263 jiwa per km^2. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 9 jiwa per km^2. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya. Dalam rangka pemerataan penduduk, pemerintah melaksanakan beberapa cara, antara lain: (1) transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya; (2) pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri, terutama untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa; (3) pengendalian jumlah penduduk dengan menurunkan jumlah kelahiran melalui program keluarga berencana atau penundaan umur nikah pertama.

Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Tanggungan atau *Dependency Ratio*. Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur produktif (umur 15–64 tahun). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada Tabel 1.1, Angka Beban Tanggungan penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 51,3. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung 51,3 orang yang tidak produktif. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan antar jenis kelamin, maka Angka Beban Tanggungan perempuan sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2014, angka beban tanggungan perempuan sebesar 51,4, yang berarti bahwa 100 orang penduduk perempuan yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, akan menanggung beban 51,4 penduduk perempuan yang tidak produktif.

TABEL 1.1
JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF
TAHUN 2014

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
1	0 – 14 Tahun	37.439.660	35.337.708	72.773.368
2	15 – 64 Tahun	83.775.296	82.831.529	166.606.825
3	65 Tahun ke atas	5.706.908	7.033.357	12.740.265
	Jumlah	126.921.864	125.202.594	252.120.458
	Angka Beban Tanggungan	51,5	51,4	51,3

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014, Hasil Estimasi

Penduduk sebagai determinan pembangunan perlu mendapat perhatian yang serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Kesehatan merupakan hak semua penduduk, sehingga ditetapkan target dan sasaran pembangunan kesehatan. Tabel 1.2 memperlihatkan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2014 menurut jenis kelamin.

Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan diperlukan bagi pengelola program terutama untuk menyusun perencanaan serta evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2014 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 1.5, 1.6, 1.7 dan 1.8.

TABEL 1.2
PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2014

No	Sasaran Program	Kelompok Umur/Formula	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Lahir Hidup	-	2.47.130	2.339.174	4.809.304
2	Bayi	0 Tahun	2.396.024	2.269.001	4.665.025
3	Batita	0 – 2 Tahun	7.313.483	6.915.434	14.228.917
4	Anak Balita	1 – 4 Tahun	9.973.365	9.415.426	19.388.791
5	Balita	0 – 4 Tahun	12.369.408	11.684.408	24.053.816
6	Pra Sekolah	5 – 6 Tahun	4.983.345	4.696.136	9.679.481
7	Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat	7 Tahun	2.541.878	2.394.269	4.936.147
8	Anak Usia SD/Setingkat	7 – 12 Tahun	15.186.763	14.309.627	29.496.390
9	Penduduk Usia Muda	< 15 Tahun	37.439.660	35.337.708	72.777.368
10	Penduduk Usia Produktif	15 – 64 Tahun	83.775.296	82.831.529	166.660.825
11	Penduduk Usia Lanjut	≥ 60 Tahun	8.795.184	10.347.677	19.142.861
12	Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi	≥ 70 Tahun	3.329.069	4.406.341	7.735.410
13	Wanita Usia Subur	15 – 49 Tahun	-	69.148.825	69.148.825
14	Wanita Usia Subur Imunisasi	15 – 39 Tahun	-	53.017.364	53.017.364
15	Ibu Hamil	1,1 X lahir hidup	-	5.290.235	5.290.235
16	Ibu Bersalin/Nifas	1,05 X lahir hidup	-	5.049.771	5.049.771

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014, Hasil Estimasi

B. KEADAAN EKONOMI

Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Berdasarkan data BPS, besaran pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 10.542,7 triliun. Atas dasar harga konstan (tahun 2010) Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2014 sebesar Rp 8.568,1 triliun.

Produk Domestik Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam kurun waktu 2010–2014, Produk Domestik Bruto per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, tahun 2010 sebesar Rp 28,8 juta, tahun 2011 sebesar Rp 32,4 juta, tahun 2012 sebesar Rp 35,1 juta, tahun 2013 sebesar Rp 38,3 juta, dan tahun 2014 sebesar Rp 41,8 juta.

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2014 sebesar 5,02%, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada dua tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan masih terjadi krisis pada perekonomian global, walaupun pemulihan terus berlangsung di berbagai ekonomi utama dunia namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata, dan diperberat dengan berbagai permasalahan struktural pada perekonomian domestik yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan struktural tersebut antara lain ekspor yang masih didominasi produk berbasis SDA (sumber daya alam), ketahanan pangan dan energi yang masih rendah, pasar keuangan yang masih dangkal serta ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang meningkat.

GAMBAR 1.5
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2012 – 2014
(DALAM PERSEN)

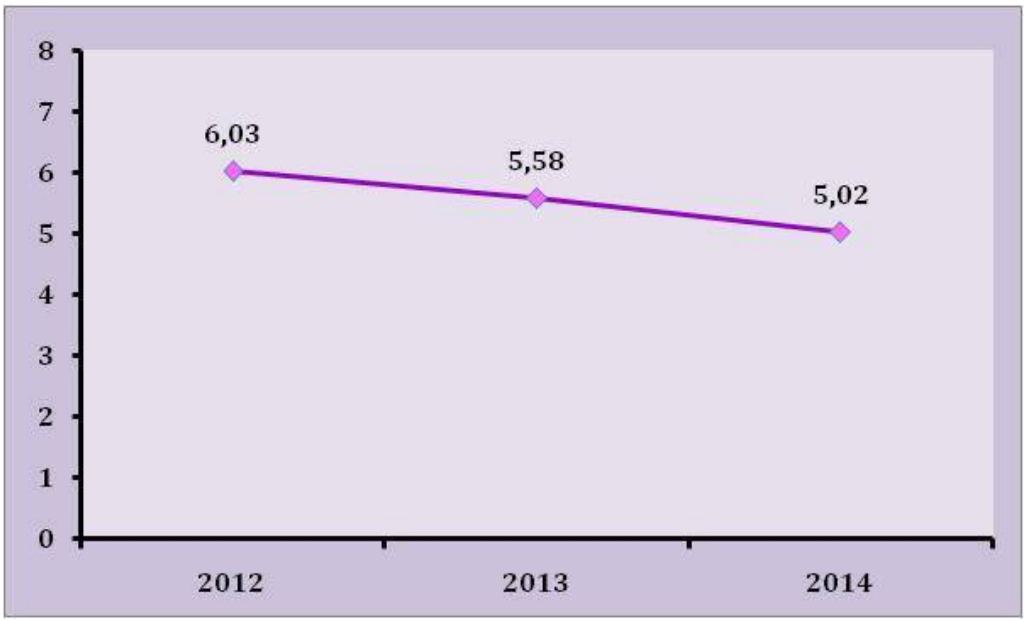

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pada tahun 2014 beberapa kebijakan telah ditempuh pemerintah untuk memperbaiki fundamental perekonomian agar tercipta fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi. Ke depannya, perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin baik, dengan kondisi makroekonomi yang semakin kokoh, laju reformasi struktural yang semakin cepat, dan fundamental ekonomi yang semakin kuat. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan pada kisaran 5,4-5,8% dan tahun 2019 diperkirakan mencapai 6,5%. Namun perlu dicermati pemulihan ekonomi dunia yang diperkirakan masih akan berjalan lambat dan tidak merata serta tantangan baru di tingkat regional seiring dengan diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada akhir tahun 2015.

BPS melakukan pengukuran kemiskinan menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan juga dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dari pengeluaran. Distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Namun karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan menggunakan pendekatan data pengeluaran.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun untuk non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis pembatas tersebut yang sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari atau di bawah garis kemiskinan dikategorikan miskin.

GAMBAR 1.6
GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA
TAHUN 2010 – 2014

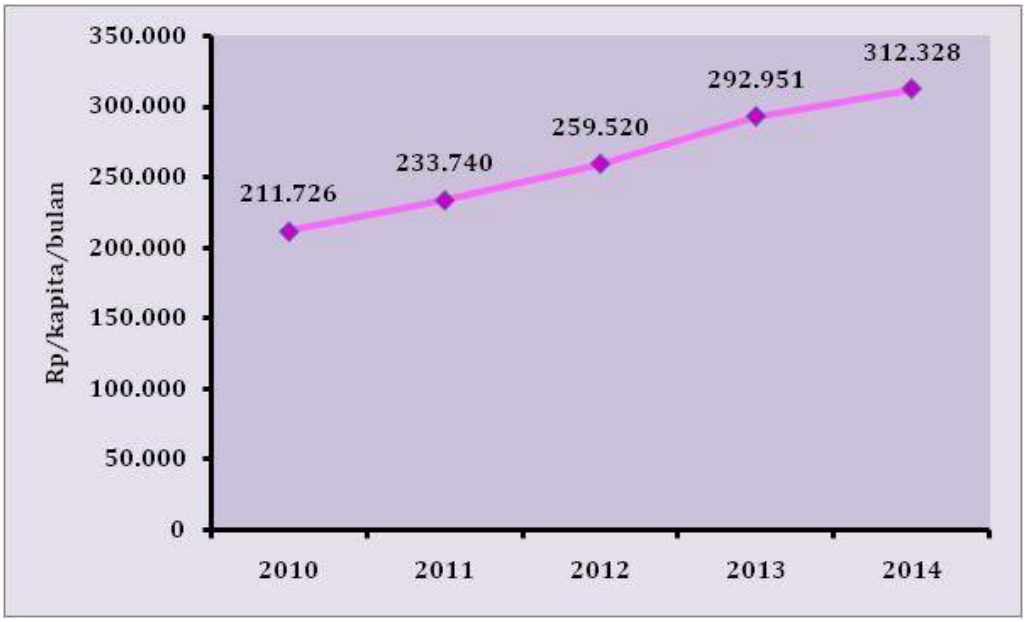

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Gambar 1.6 menunjukkan peningkatan garis kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2014. Batas kemiskinan atau tingkat pengeluaran per kapita per bulan tahun 2014 sebesar Rp 312.328. BPS mengukur kemiskinan pada bulan Maret dan September. Kondisi September 2014 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 27,73 juta orang (10,96%) berkurang 0,55 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25%). Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi Maret-September 2014 yaitu laju inflasi umum cenderung rendah, secara nominal rata-rata upah buruh tani dan buruh bangunan meningkat, harga eceran beberapa komoditas bahan pokok mengalami penurunan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,52%. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang lebih banyak dibandingkan di daerah perkotaan.

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8-10% pada akhir tahun 2014. Angka kemiskinan sebesar 10,96% yang dicapai pada tahun 2014 belum mencapai target namun sudah mendekati. Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia yaitu perbedaan yang besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis. Jika dalam pengertian absolut lebih dari setengah jumlah total penduduk miskin berada di Pulau Jawa (54,6%). Namun dalam pengertian relatif, provinsi-provinsi di Indonesia Timur menunjukan nilai kemiskinan yang lebih tinggi, yaitu Provinsi Papua (27,80%), Papua Barat (26,26%), Nusa Tenggara Timur (19,60%), Maluku (18,44%), dan Gorontalo (17,41%).

GAMBAR 1.7
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

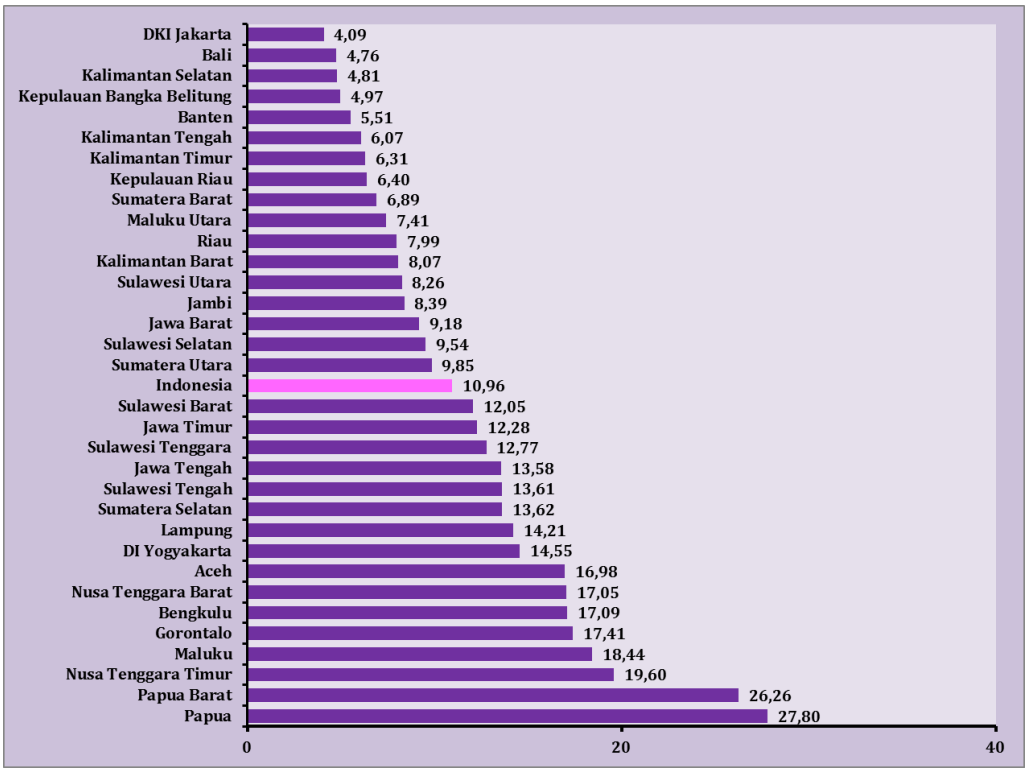

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

TABEL 1.3
PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN
MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2012 – 2014

No	Kelompok Pulau	2012		2013		2014	
		Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%
1	Sumatera	6.177,2	21,6	6.190,1	21,7	6.070,4	21,9
2	Jawa	15.882,6	55,3	15.546,9	54,4	15.143,8	54,6
3	Kalimantan	932,9	3,3	978,7	3,4	972,9	3,5
4	Bali dan Nusa Tenggara	1.989,6	7,0	1.998,1	7,0	2.004,5	7,2
5	Sulawesi	2.045,6	7,1	2.139,6	7,5	2.054,9	7,4
6	Maluku dan Papua	1.626,8	5,7	1.700,5	6,0	1.481,4	5,3
Indonesia		**28.594,7**	**11,66**	**28.553,9**	**11,47**	**27.727,8**	**10,96**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pada tabel 1.3 memperlihatkan persebaran jumlah dan proporsi penduduk miskin berdasarkan kelompok pulau tahun 2012-2014 dan Gambar 1.9 memperlihatkan persentase penduduk miskin menurut provinsi tahun 2014. Di Pulau Sumatera, persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Provinsi Aceh (16,98%) dan terrendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4,97%). Di Pulau Jawa, persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (14,55%) dan terrendah di Provinsi DKI Jakarta (4,09%). Penduduk

miskin di Pulau Kalimantan relatif kecil dan rata (6,07-8,07%). Secara lengkap jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2000-2014 terdapat pada Lampiran 1.9. dan rincian menurut provinsi tahun 2014 terdapat pada Lampiran 1.10.

Masalah kemiskinan juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan secara nasional tahun 2014 sebesar 1,75. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan secara nasional tahun 2014 sebesar 0,44. Rincian mengenai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.11.

Ukuran yang dapat menggambarkan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini/Indeks Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Apabila nilai indeks Gini 0 artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Rincian mengenai indeks Gini dapat dilihat pada Lampiran 1.12.

Pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Menurut hukum ekonomi (Ernest Engel, 1857) bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Dengan demikian secara umum semakin meningkat pendapatan (kesejahteraan), semakin berkurang persentase pengeluaran untuk makanan.

Pada Gambar 1.8, berdasarkan hasi Susenas Maret 2014, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan (50,04%) masih lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk non makanan (49,96%). Tiga pengeluaran terbesar yaitu untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (20,75%), makanan dan minuman jadi (13,37%) dan pengeluaran untuk barang dan jasa (12,35%). Sedangkan pengeluaran untuk kesehatan sebesar 3,29% dari total pengeluaran sebulan. Persentase rata-rata pengeluaran kesehatan tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan terhadap pengeluaran untuk tembakau dan sirih sebesar 6,33%.

GAMBAR 1.8
PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN
TAHUN 2014

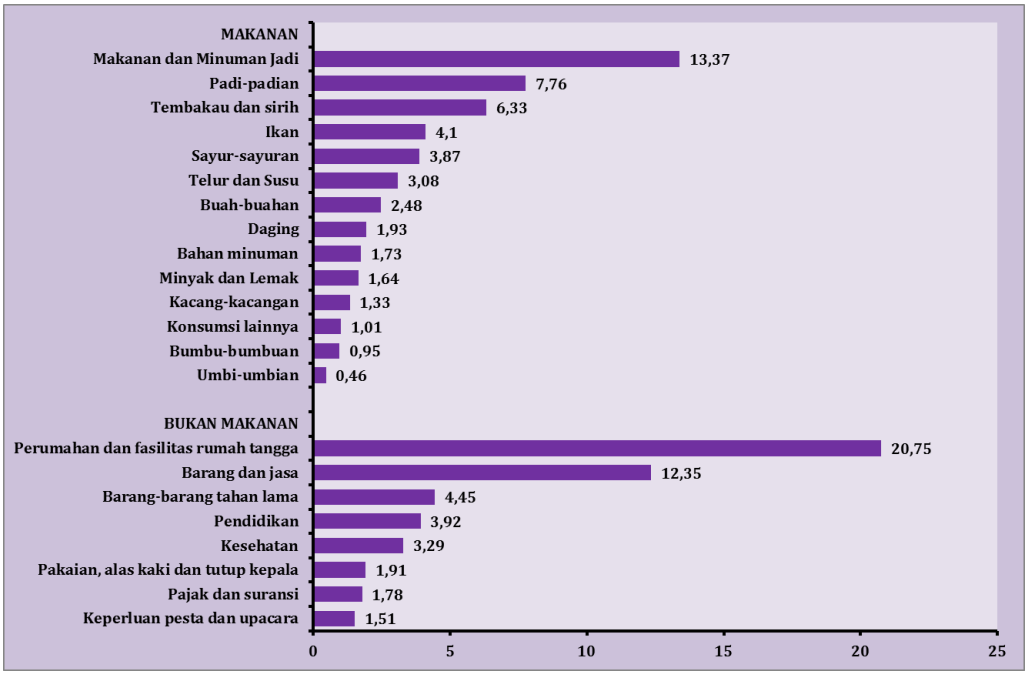

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja di Indonesia. Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja, namun hanya penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) yang dapat menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Pada Tabel 1.4 menunjukkan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2012-2014. Pada periode Agustus 2013 hingga Agustus 2014 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja, serta terjadi penurunan jumlah pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2013 sebesar 120,2 juta orang, meningkat menjadi 121,9 juta orang pada Agustus 2014. Terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 66,77% pada Agustus 2013 menjadi 66,60% pada Agustus 2014. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TABEL 1.4
PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJA, DAN PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2012– 2014

Angkatan Kerja	2012		2013		2014	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja	121.819.813	119.849.734	123.170.509	120.172.003	125.316.991	121.872.931
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,59	67,76	69,15	66,77	69,17	66,60
Jumlah penduduk yang bekerja	114.061.982	112.504.868	115.929.612	112.761.072	118.169.922	114.628.026
Jumlah pengangguran terbuka	7.757.831	7.344.866	7.240.897	7.410.931	7.147.069	7.244.905
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,37	6,13	5,88	6,17	5,70	5,94

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015
Keterangan : Data tahun 2012-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Dalam kurun waktu setahun terakhir, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia berkurang sekitar 166 ribu orang, dari 7.410.931 pada Agustus 2013 turun menjadi 7.244.905 pada Agustus 2014. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 6,17% pada Agustus 2013 menjadi 5,94% pada Agustus 2014. TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja, atau perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Angka pengangguran yang terus menurun hingga pada tahun 2014 berada di bawah 6% ini menunjukan bahwa target pengurangan angka pengangguran 5-6% pada tahun 2014 yang ditetapkan dalam RPJM 2010-2014 telah terpenuhi.

GAMBAR 1.9
PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN KONDISI AGUSTUS 2014

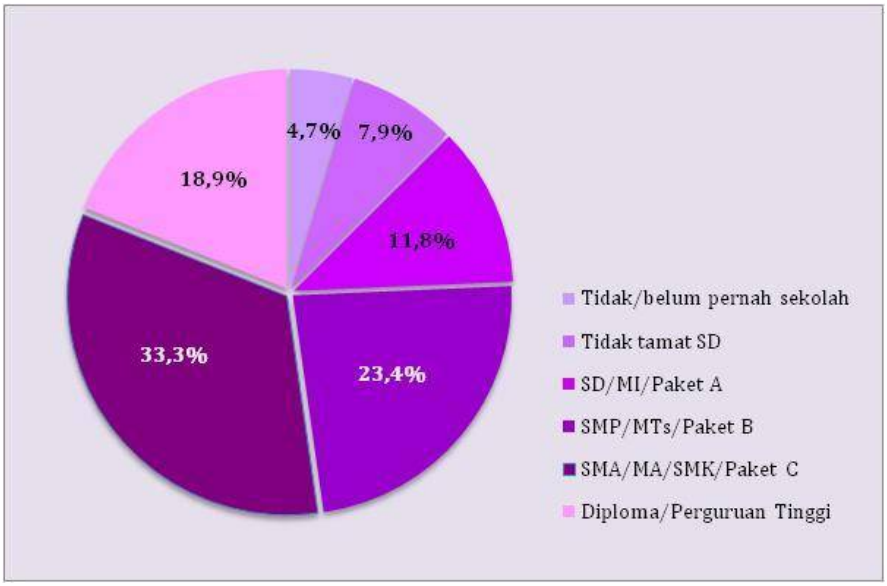

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pengangguran dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran perubahan permintaan tenaga kerja. Gambar 1.7 menunjukkan bahwa pada Agustus 2014 penduduk dengan pendidikan SMA/sederajat berkontribusi paling besar terhadap total pengangguran di Indonesia, yaitu sebesar 33,3%, atau bisa dikatakan bahwa satu dari tiga penganggur di Indonesia, berpendidikan SMA/sederajat. Pengangguran tertinggi kedua terdapat pada penduduk dengan tingkat pendidikan SMP/sederajat yaitu sebesar 23,4%. Sementara itu kontribusi penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD terhadap total penganggur justru paling kecil dibanding kelompok penduduk yang lebih tinggi tingkat pendidikannya, yaitu masing-masing sebesar 4,7% dan 7,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pengangguran didominasi oleh penduduk yang berpendidikan relatif tinggi (SMA ke atas). Namun demikian, penduduk dengan latar belakang pendidikan yang relatif tinggi cenderung mencari pekerjaan secara aktif untuk memenuhi kriteria lowongan pekerjaan yang lebih baik. Rincian mengenai persentase tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.15.

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Komponen pengukuran tingkat pembangunan manusia suatu negara yang cukup berpengaruh yaitu komponen pendidikan. Perubahan yang terjadi secara terus menerus pada perilaku masyarakat disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu syarat mutlak pencapaian tujuan pembangunan manusia, dan merupakan target pembangunan sekaligus sarana pembangunan nasional.Pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu rata-rata lama sekolah.

GAMBAR 1.10
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS (DALAM TAHUN)
TAHUN 2010 - 2014

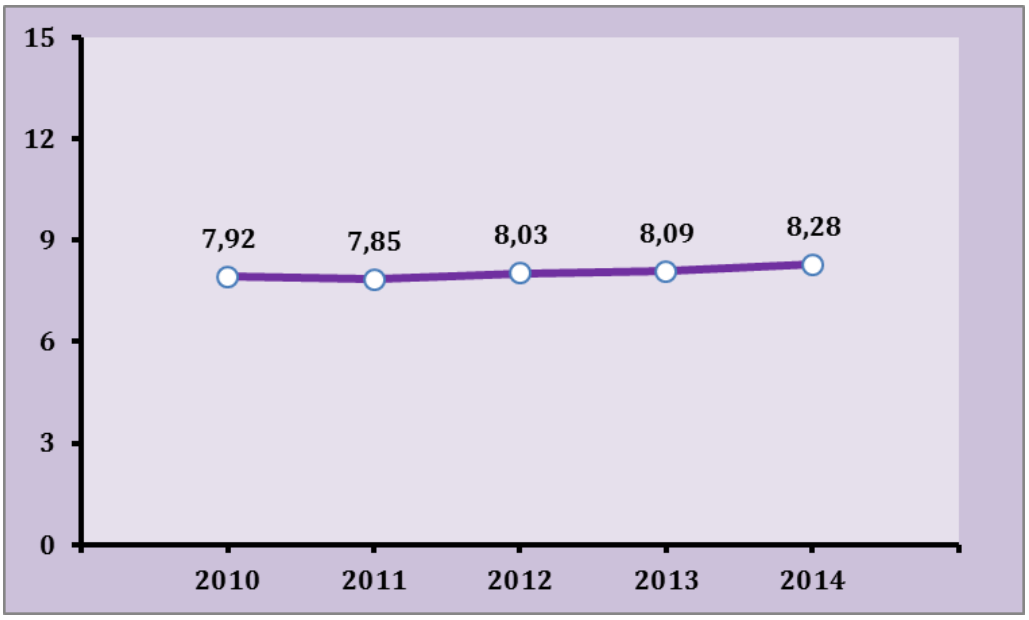

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas sejak tahun 2011 cenderung meningkat, yaitu 7,85 tahun pada tahun 2011 menjadi 8,28 tahun pada tahun 2014. Namun begitu angka ini belum memenuhi tujuan program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2014,

terlihat kecenderungan rata-rata lama sekolah di perkotaan (9,7 tahun) lebih besar dibandingkan di perdesaan (7,03 tahun). Hal ini terkait dengan keberadaan fasilitas sekolah yang lebih banyak di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Menurut jenis kelamin, laki-laki (8,76 tahun) cenderung lebih lama bersekolah dibandingkan perempuan (8,04 tahun). Sebanyak sembilan provinsi telah mencapai program wajib belajar 9 tahun, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, Aceh, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Rata-rata lama bersekolah yang paling rendah di Provinsi Papua sebesar 6,32 tahun dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,98 tahun. Rincian rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 1.16.

Salah satu capaian dalam bidang pendidikan yaitu kepemilikan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang pada akhirnya akan menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menjadi dasar untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Selain itu, ijazah/STTB biasanya juga menjadi tolok ukur dalam pergaulan atau hubungan sosial. Terkait dengan kualitas hidup manusia, ada kecenderungan semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki maka pengetahuan pun semakin banyak dan berakibat pada meningkatnya kualitas hidup terutama di bidang kesehatan dan perumahan.

GAMBAR 1.11
PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KEATAS
MENURUT KEPEMILIKAN IJAZAH/STTB TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2014

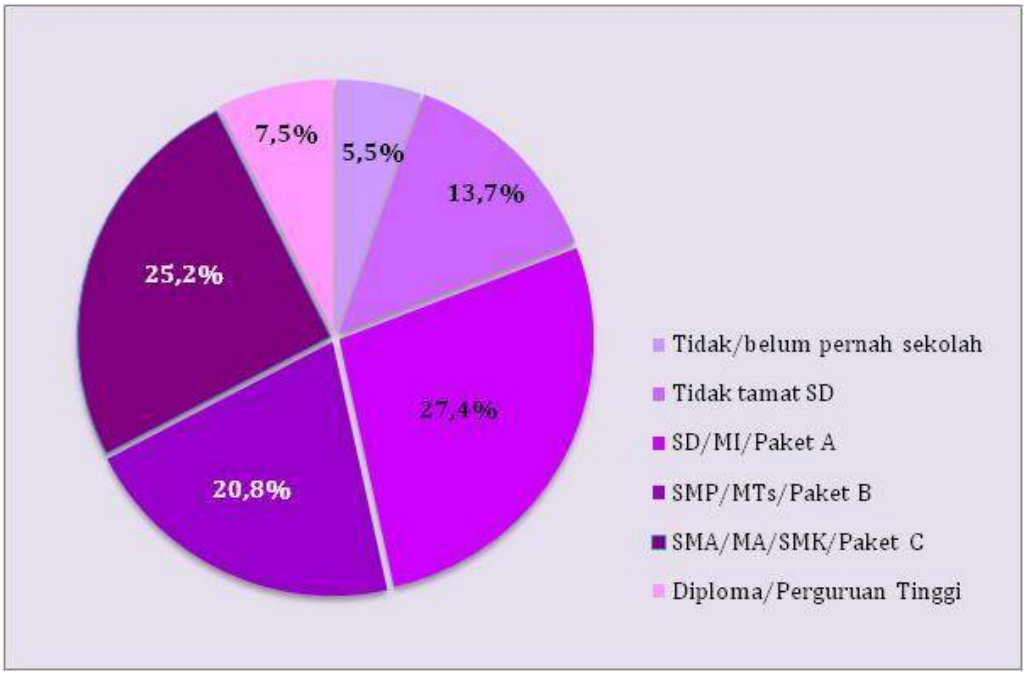

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pada tahun 2014, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah/STTB minimal SMA/sederajat sekitar 32,64%, sedangkan yang memiliki ijazah/STTB SD/sederajat dan SMP/sederajat sekitar 48,23% dan yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak tamat SD (tidak memiliki ijazah/STTB) sekitar 19,14%. Apabila dibandingkan menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang mempunyai ijazah/STTB minimal SD/sederajat relatif lebih tinggi daripada penduduk perempuan.

Hal mendasar yang dibutuhkan oleh penduduk untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera yaitu kemampuan membaca dan menulis. Penduduk yang bisa membaca dan menulis secara umum memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan

penduduk yang tidak memiliki kemampuan tersebut, sehingga peluang untuk hidup lebih sejahtera dimiliki oleh penduduk yang bisa membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf dan angka buta huruf.

Angka buta huruf menjadi dasar pelaksanaan program pemberantasan buta huruf, dan diharapkan angka buta huruf terus menurun. Tahun 2014 angka buta huruf sebesar 4,88% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 6,08%. Angka melek huruf (AMH) merupakan kebalikan dari angka buta huruf. AMH merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf menunjukan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat.

GAMBAR 1.12
ANGKA MELEK HURUF (DALAM PERSEN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

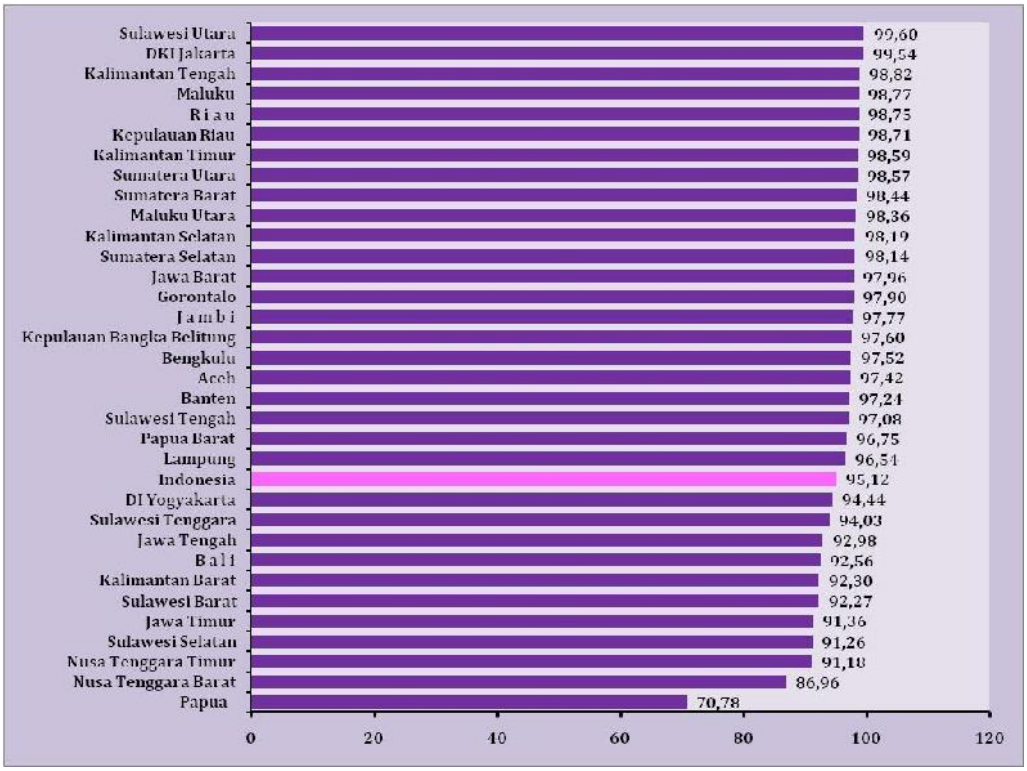

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pada Gambar 1.12, AMH secara nasional tahun 2014 sebesar 95,12%. Kondisi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tahun 2014 sebesar 1,19% dari tahun 2013. Provinsi Sulawesi Utara memiliki angka melek huruf tertinggi (99,60%) dan terendah di Provinsi Papua (70,92%). Secara umum di 33 provinsi, AMH laki-laki lebih tinggi dari perempuan, kecuali di Provinsi Gorontalo. Disparitas angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan berkisar antara 0,36% sampai dengan 12, 57%, terendah di Provinsi Sulawesi Utara dan tertinggi di Provinsi Papua. Rincian angka melek huruf (persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf) menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 1.18.

Indikator angka partisipasi merupakan indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Ada tiga jenis indikator yang memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah

yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM).

APS merupakan persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang masih bersekolah di semua jenjang pendidikan. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah.

GAMBAR 1.13
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2011 – 2014

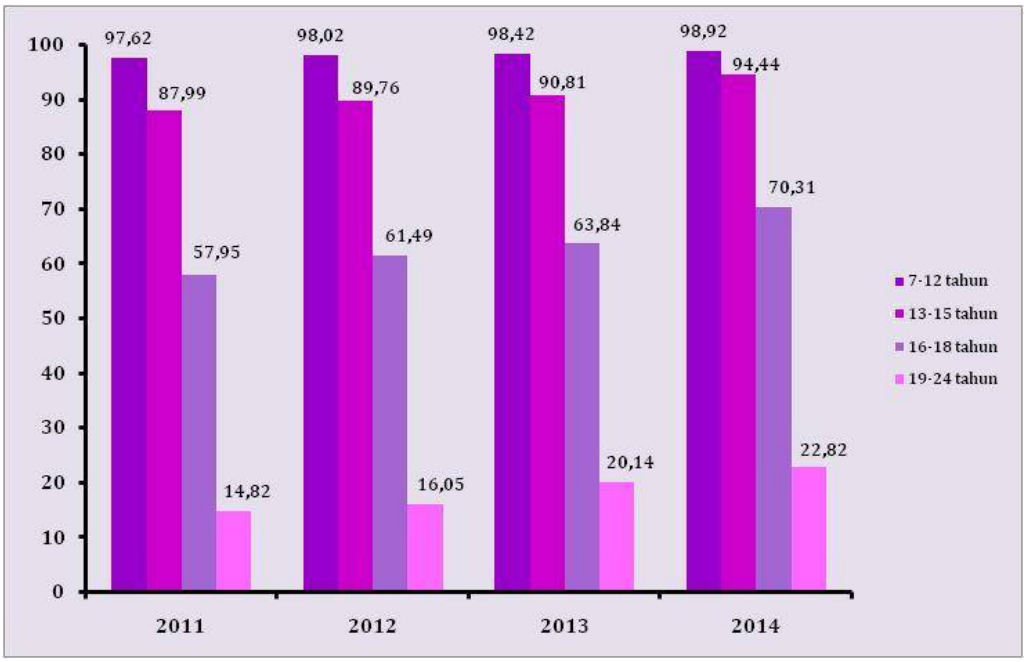

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Gambar 1.13 memperlihatkan APS tahun 2011 sampai dengan 2014 untuk tiap kelompok umur sekolah cenderung meningkat. Semakin tinggi kelompok umur maka tingkat partisipasi sekolahnya semakin kecil, hal ini dimungkinkan pada kelompok umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun telah masuk dalam angkatan kerja dan bekerja. Peningkatan terbesar terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun atau kelompok umur SMA/sederajat, hal ini sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun. Peningkatan APS pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun juga terjadi dan sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun yang mendahului program wajib belajar 12 tahun. Rincian APS menurut provinsi dan kelompok umur tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Lampiran 1.19, sedangkan rincian APS menurut provinsi, jenis kelamin, dan kelompok umur tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 1.20.

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah

tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Pada Gambar 1.14 diketahui nilai APK untuk SD/MI tahun 2011-2014 melebihi 100 persen yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk usia dibawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/sederajat). Pada tahun 2014 nilai APK untuk SD/sederajat sebesar 108,87%, SMP/sederajat sebesar 88,63%, SMA/sederajat sebesar 74,26% dan perguruan tinggi sebesar 25,76%. Kondisi pada tahun 2014 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2013 pada semua jenjang pendidikan. Rincian APK menurut provinsi tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Lampiran 1.21. Secara umum APK penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki di semua jenjang pendidikan, kecuali SD/sederajat. Hal ini menunjukan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Rincian APK menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2014 terdapat pada Lampiran 1.22.

GAMBAR 1.14
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN TAHUN 2011 – 2014

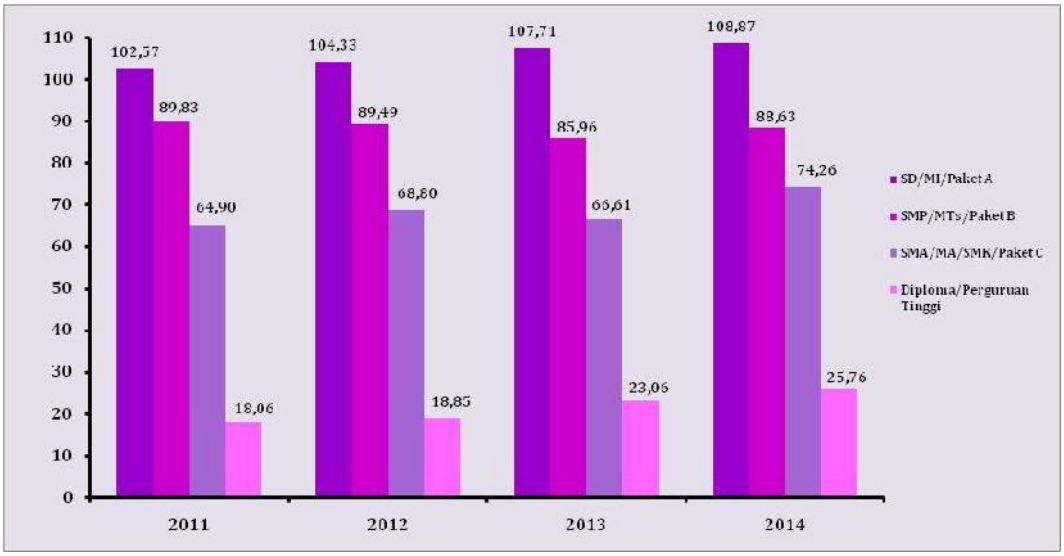

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Indikator pendidikan lainnya yaitu angka pendidikan murni (APM). APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungjkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Pada Gambar 1.15, tahun 2014 nilai APM untuk SD/sederajat sebesar 96,45%, SMP/sederajat sebesar 77,53% dan SMA/sederajat sebesar 59,35%. Kondisi ini terus meningkat pada semua jenjang pendidikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nilai APM lebih mencerminkan kondisi partisipasi sekolah dibandingkan nilai APK. Rincian APM menurut provinsi tahun 2011-2014 terdapat pada Lampiran 1.23.

GAMBAR 1.15
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2011 – 2014

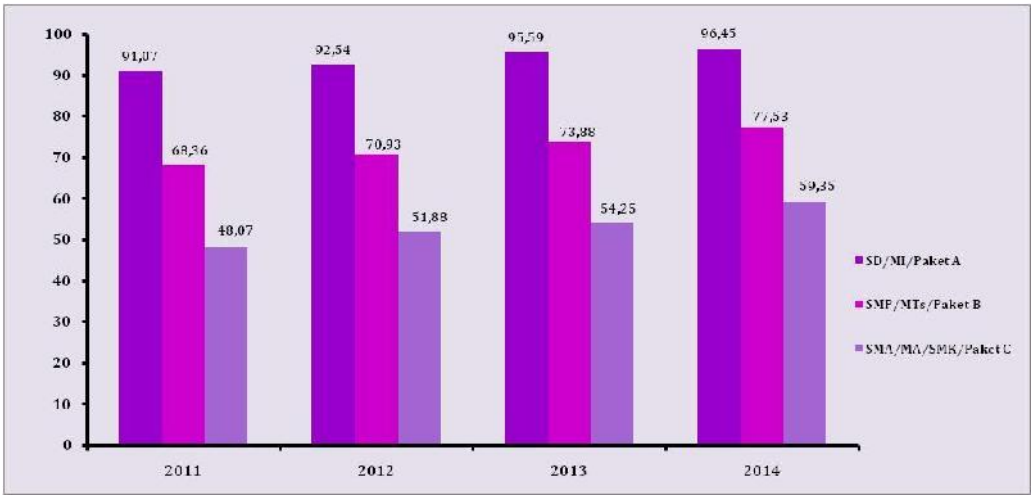

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Menurut United *Nations Development Programme* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, sebagai ukuran kualitas hidup, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat (dimensi kesehatan) digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak, digunakan indikator kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Berdasarkan skala internasional, capaian/nilai IPM dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu kategori tinggi (IPM ≥80), kategori menengah atas (65≤IPM<80), kategori menengah bawah (50≤IPM<66) dan kategori rendah (IPM<50).

GAMBAR 1.16
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2009 - 2013

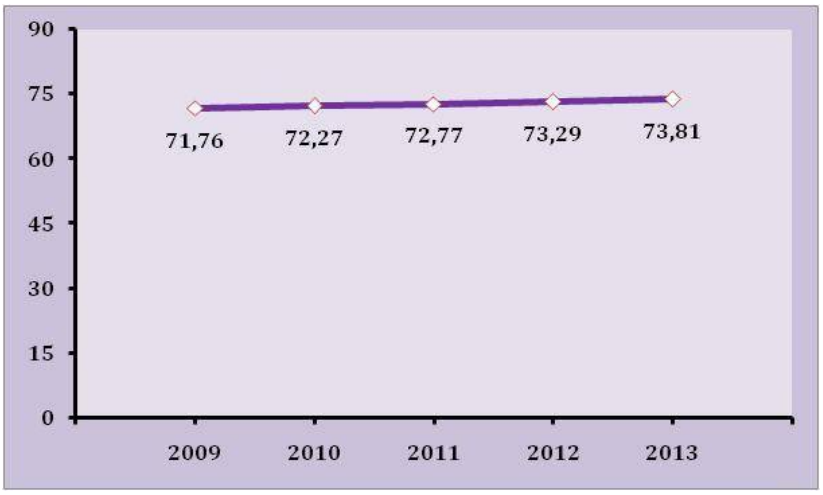

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2009-2013, nilai IPM Indonesia telah meningkat 2,05 poin, yaitu dari 71,76 menjadi 73,81. Peningkatan ini masih menempatkan Indonesia pada level pembangunan manusia menengah atas. Peningkatan nilai dari indikator pembentuk IPM akan meningkatkan nilai IPM, peningkatan terbesar terjadi pada indikator angka melek huruf dan indikator kemampuan daya beli (rata-rata pengeluaran riil per kapita). Peningkatan nilai IPM selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.16.

GAMBAR 1.17
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

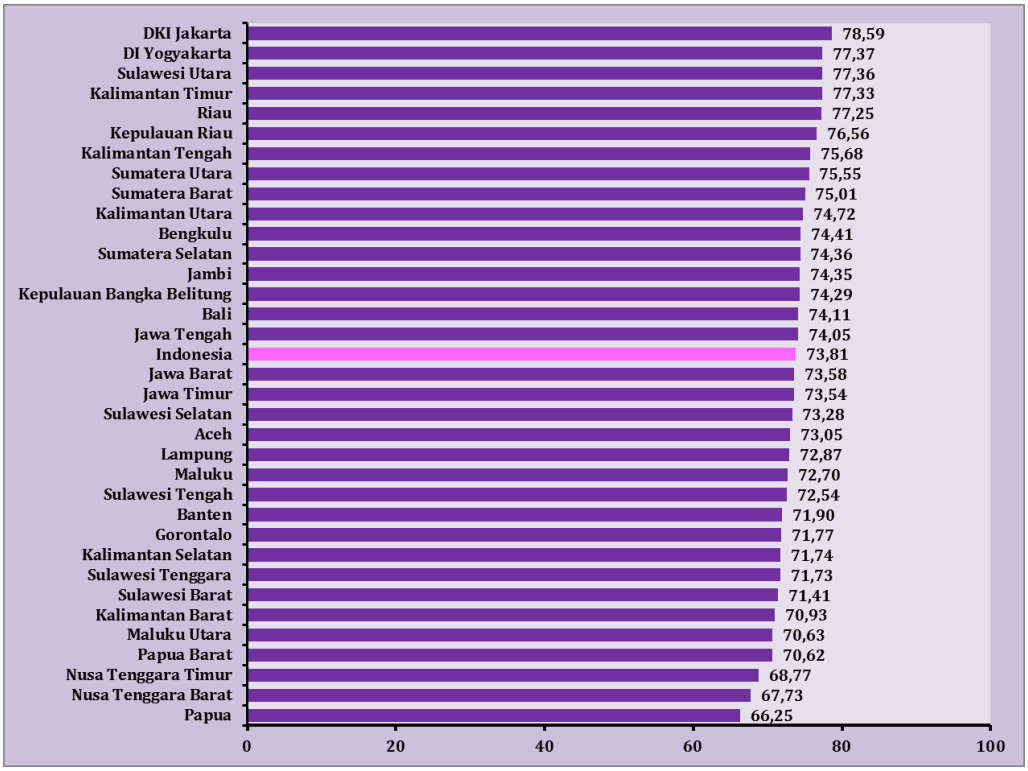

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Gambar 1.17 menunjukkan nilai IPM menurut provinsi tahun 2013. Berdasarkan pembagian tersebut, belum ada provinsi di Indonesia yang mempunyai nilai IPM kategori tinggi, semua provinsi di Indonesia masuk dalam kategori pembangunan manusia 'menengah atas' (65≤IPM<80). Provinsi DKI Jakarta mempunyai nilai IPM tertinggi sebesar 78,59 dan Provinsi Papua mempunyai nilai IPM terendah sebesar 66,25. Tahun 2013 sudah terdapat nilai IPM untuk Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar 74,72. Pada Gambar 1.18 terlihat pula kesenjangan capaian pembangunan manusia di wilayah barat dan timur Indonesia. Provinsi di wilayah timur masih terlihat tertinggal daripada provinsi di wilayah barat. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemajuan pembangunan khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari capaian IPM di suatu wilayah, tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi *shortfall* per tahun. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal karena reduksi *shortfall* merupakan gambaran laju pergerakan IPM untuk mencapai nilai idealnya. Kecepatan Indonesia untuk mencapai IPM ideal tahun 2012-2013 yaitu 1,97, sedikit lebih cepat dibandingkan tahun 2011-2012. Dari 34 provinsi, reduksi

shortfall terendah di Provinsi Kalimantan Tengah (0,88) dan tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (2,67).

Indikator terkait bidang kesehatan yang mempengaruhi nilai IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). AHH adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. AHH merupakan angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Selain itu, AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

GAMBAR 1.18
ANGKA HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (DALAM TAHUN) TAHUN 2013

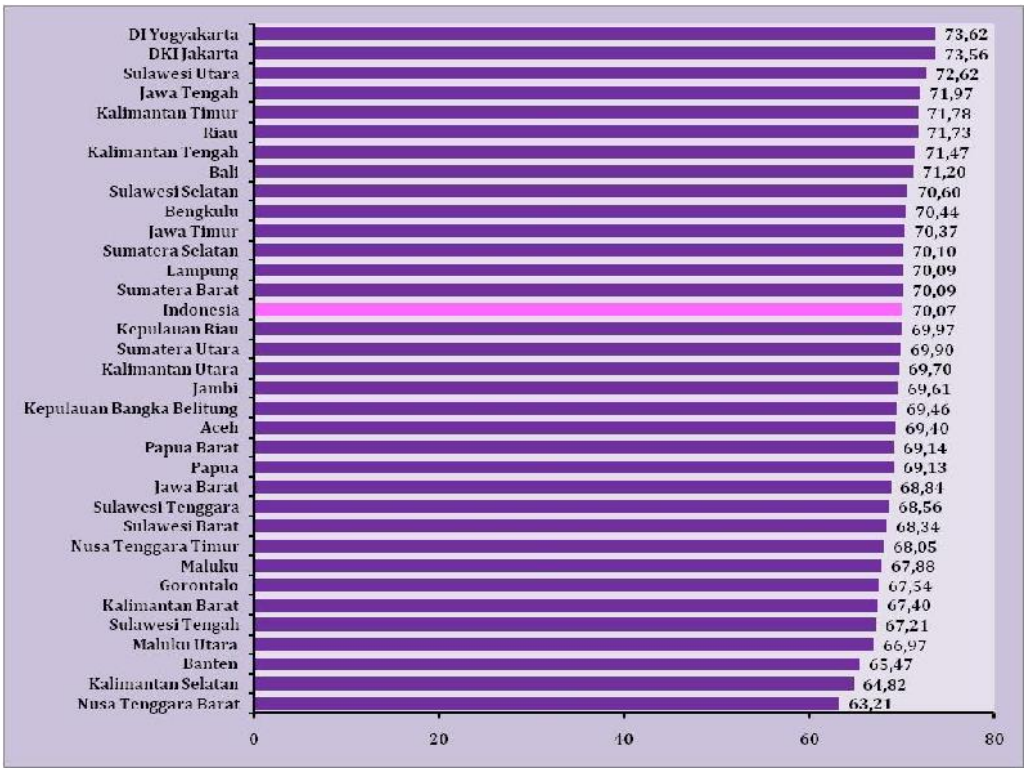

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pada tahun 2013, nilai AHH Indonesia mencapai 70,07 tahun lebih tinggi dari nilai AHH tahun 2012 (69,87 tahun). Gambar 1.18 menunjukkan nilai AHH menurut provinsi di Indonesia tahun 2013. Provinsi dengan nilai AHH tertinggi yaitu DI Yogyakarta sebesar 73,62 tahun dan provinsi dengan nilai AHH terendah yaitu Nusa Tenggara Barat sebesar 63,21 tahun. Tahun 2013 nilai AHH untuk Provinsi Kalimantan Utara (pemekaran dari Kalimantan Timur) sebesar 69,70. Rincian komponen IPM menurut provinsi tahun 2012-2013 dapat dilihat pada Lampiran 1.24.

***

II

SARANA KESEHATAN

II

SARANA KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang diulas pada pada bagian ini terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik pemerintah yang menghasilkan tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibahas pada bagian ini terdiri dari : puskesmas, rumah sakit, dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upayakesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untukmencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Selain melaksanakan tugas tersebut, puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sertamencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan denga sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanankesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Jumlah puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2014 sebanyak 9.731 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 3.378 unit puskesmas rawat inap dan 6.353 unit puskesmas non rawat inap. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 9.655 unit. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah puskesmas mengalami peningkatan seperti yang terdapat pada gambar berikut.

GAMBAR 2.1
JUMLAH PUSKESMAS TAHUN 2010 – 2014

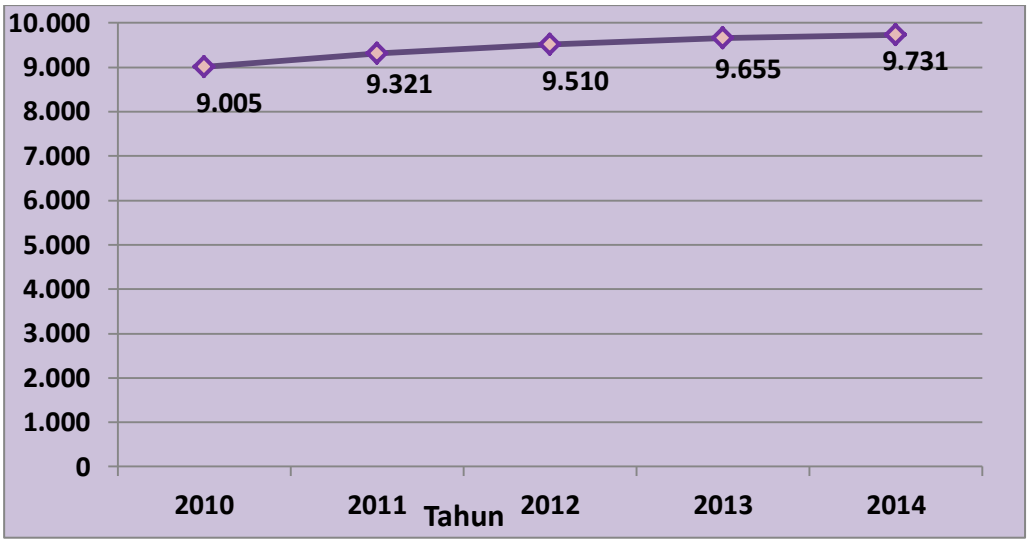

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah puskesmas meningkat sejak tahun 2010 sebesar 9.005 unit menjadi 9.731 unit pada tahun 2014. Namun demikian, peningkatan jumlah puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat digambarkan secara umum oleh indikator rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Peningkatan jumlah puskesmas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, ternyata sejalan dengan peningkatan rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk, yaitu dari 1,14 menjadi 1,16.

GAMBAR 2.2
RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK
TAHUN 2010–2014

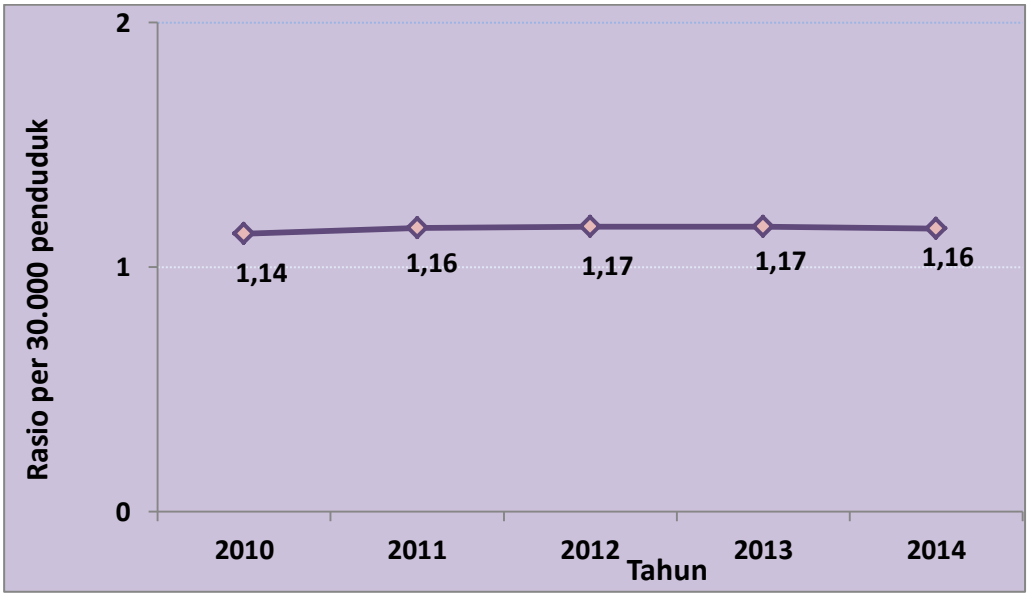

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Rasio puskesmas per 30.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 1,16. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 1,17. Hal ini disebabkan laju pertambahan jumlah puskesmas lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk.

Provinsi dengan rasio tertinggi yaitu Papua Barat sebesar 5,09 per 30.000 penduduk, sedangkan Provinsi Banten memiliki rasio terendah sebesar 0,59 per 30.000 penduduk. Rasio puskesmas per 30.000 penduduk belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Sebagai contoh, tiga provinsi dengan rasio tertinggi seluruhnya berada di wilayah timur yaitu Papua Barat, Maluku, dan Papua. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah penduduk yang relatif sedikit sedangkan wilayah kerja yang luas.

GAMBAR 2.3
RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK DI INDONESIA
TAHUN 2014

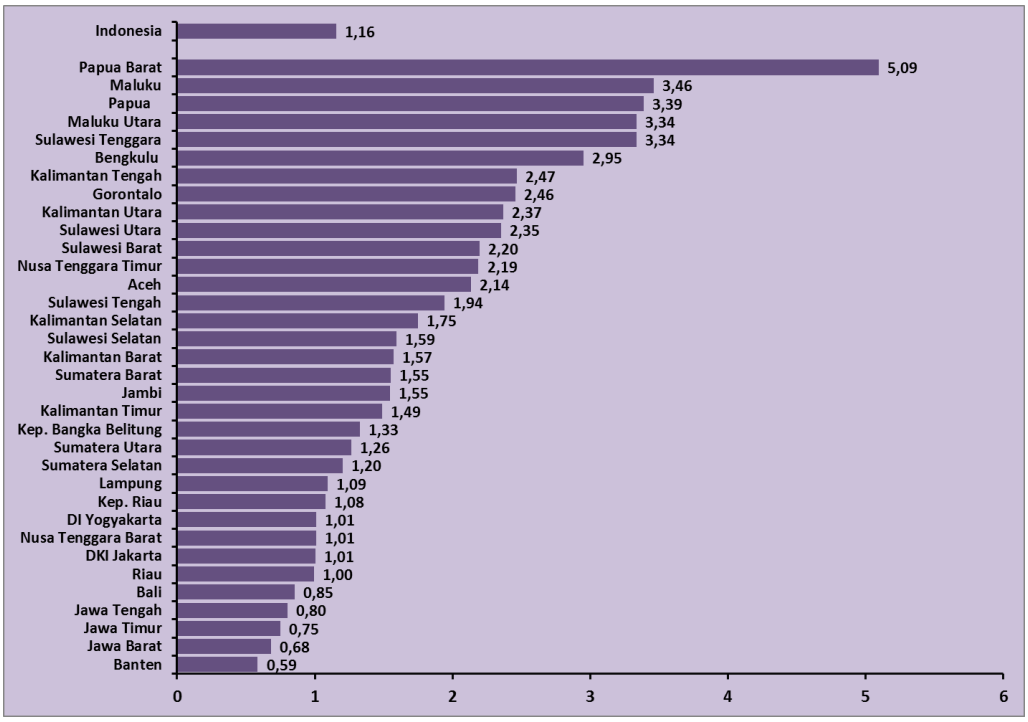

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Pada gambar di atas nampak bahwa selain Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur juga memiliki rasio rendah yaitu sebesar 0,68 dan 0,75 per 30.000 penduduk. Selain 3 provinsi tersebut, seluruh provinsi di Pulau Jawa memiliki rasio puskesmas yang rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah dan kepadatan populasi yang tinggi. Namun demikian,ketersediaan pelayanan kesehatan dasar pada provinsi di Pulau Jawa relatif cukup karena selain berasal dari sektor pemerintah, juga didukung oleh sektor swasta.Kondisi seperti ini sebetulnya tetap harus diperhatikan, karena meskipun kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat dipenuhi oleh sektor swasta, suatu wilayah tetap membutuhkan entitas yang berperan sebagai penanggungjawab upaya kesehatan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, puskesmas melaksanakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari puskesmas, pelayanan kesehatan perseorangan juga menjadi perhatian dari pemerintah. Bagi daerah yang termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK), Dana Alokasi Khusus (DAK) digelontorkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota untuk pembangunan puskesmas pembantu (pustu) dan puskesmas serta peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap. Bagi daerah di luar kategori DTPK, DAK bisa

digunakan untuk rehabilitasi puskesmas/rumah dinas, dan peningkatan kemampuan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

Berikut ini disajikan perkembangan jumlah puskesmasrawat inap dan non rawat inap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

GAMBAR 2.4
JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP
TAHUN 2010 – 2014

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Pada gambar di atas diketahui bahwa jumlah puskesmasnon rawat inap meningkat dari 6.085unit pada tahun 2010 menjadi 6.353unit pada tahun 2014. Meskipun demikian, terjadi penurunan dari 6.358 unit pada tahun 2012 menjadi 6.338 unit pada tahun 2013. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perubahan status dari puskesmasnon rawat inap menjadi puskesmasrawat inap. Peningkatan jumlah juga terjadi pada puskesmasrawat inap yaitu dari 2.920 unit pada tahun 2010 menjadi 3.378 unit pada tahun 2014. Dapat dikatakan bahwa terdapat 34,71% puskesmas rawat inap pada tahun 2014.

Puskesmas juga berkomitmen terhadap penurunan AKI dan AKB melalui upaya kesehatan kesehatan ibu, anak, gizi, promosi kesehatan serta penyelenggaraan puskesmas PONED. Bentuk pelayanan lain yang juga diberikan terkait dengan program kesehatan yaitupelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olahraga, dan tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA). Bentuk pelayanan kesehatan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah kerja. Sebagai contoh upaya kesehatan kerja dibutuhkan pada puskesmas dengan wilayah kerja yang memiliki banyak pusat industri. Gambaran lebih rinci tentang jumlah dan jenis puskesmas menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.2.

1. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

Salah satu upaya pengembangan puskesmas yang penting adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Upaya kesehatan ini dilakukan untuk mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Akses

masyarakat yang semakin mudah terhadap pelayanan kegawatdaruratan diharapkan dapat berkontribusi pada penurunanAKI danAKB.

Badan kesehatan dunia (WHO) menargetkan agar minimal terdapat empat Puskesmas PONED di tiap kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2014 jumlah kumulatif Puskesmas PONED sebanyak 2.855 unit. Terdapat 347 kabupaten/kota (67,77%) yang telah memenuhi syarat minimal tersebut. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 333 kabupaten/kota (67%). Pada tahun 2014, jumlah kabupaten/kota yang hanya memiliki satu sampai dengan tiga Puskesmas PONED sebanyak 130 dan terdapat 34 kabupaten/kota yang belum memiliki Puskesmas PONED.

Terdapat tiga provinsi dengan persentase kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat minimal empat Puskesmas PONED sebesar 100%, yaitu Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua sebesar 10,34%, Papua Barat sebesar 15,38%, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 28,57%. Persentase kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat minimal 4 Puskesmas PONED terdapat pada gambar berikut.

GAMBAR 2.5
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
YANG MEMENUHI SYARAT MINIMAL 4 PUSKESMAS PONED
DI INDONESIA TAHUN 2014

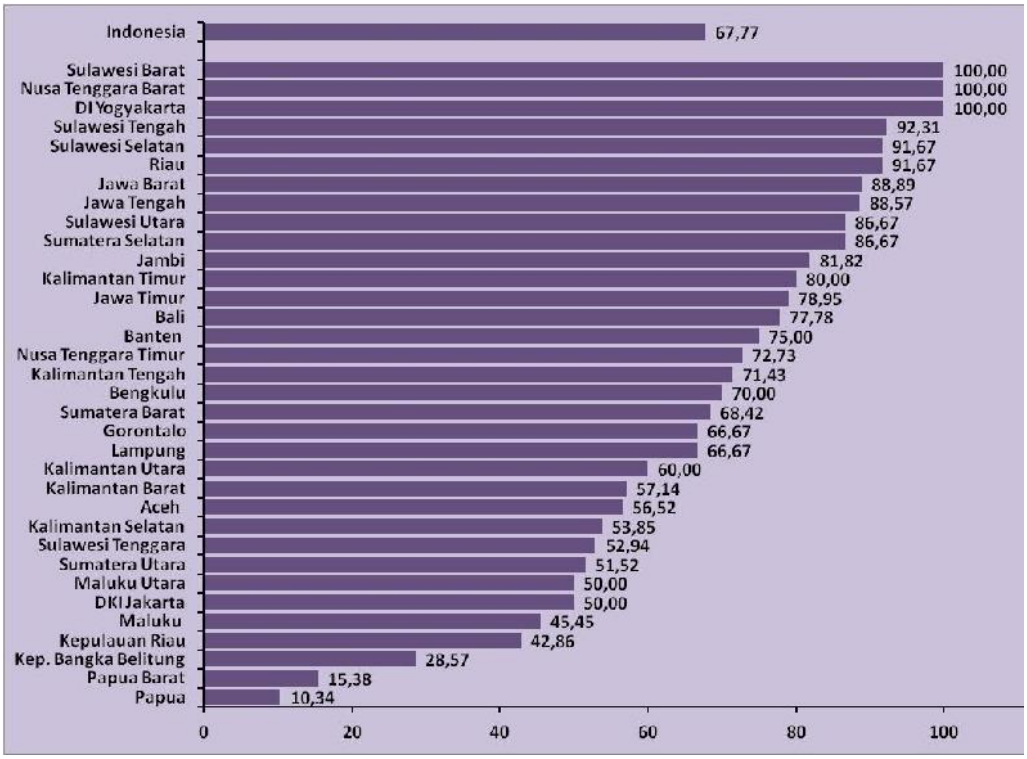

Sumber: Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Konsep rawat inap yang digunakan dalam Puskesmas PONED berbeda dengan konsep yang digunakan puskesmas rawat inap. Konsep rawat inap pada Puskesmas PONED adalah perawatan inap kepada pasien pasca tindakan emergensi (*one day care*). Dengan demikian, puskesmas non rawat inap yang memiliki tempat tidur dan mampu melakukan tindakan emergensi obstetri dan neonatal dasar, dapat menyelenggarakan PONED.

2. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab XII Kesehatan Kerja Pasal 164-166 menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Selain itu, pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan baik pada sektor formal (usaha besar dan menengah) maupun sektor informal (usaha mandiri/individu, rumah tangga, mikro dan kecil).

Puskesmas memiliki peran strategis dalam upaya kesehatan kerja kedua sektor tersebut, utamanya pada sektor informal. Upaya kesehatan kerja di puskesmas diselenggarakan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di wilayah puskesmas atau spesifik lokal. Dengan demikian sampai saat ini upaya kesehatan kerja di puskesmas lebih dititikberatkan pada wilayah industri.

Pembinaan upaya kesehatan kerja dilaksanakan melalui kegiatan penguatan pelayanan kesehatan kerja, yaitu :

1. Pelatihan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam bidang kesehatan kerja,
2. Pelatihan diagnosa Penyakit Akibat Kerja (PAK),
3. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bidang kesehatan kerja,
4. Gerakan pekerja perempuan sehat dan produktif termasuk kesehatan reproduksi di tempat kerja dan pembinaan pelayanan kesehatan kerja di sektor informal dan formal termasuk perkantoran.
5. Pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan fokus kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Indikator upaya kesehatan kerja pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 adalah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja. Terdapat peningkatan jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, sebanyak 1.112 puskesmasmelaksanakan kesehatan kerja yangtersebar di dua puluhprovinsi. Perkembangan jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja pada tahun 2010-2014 terdapat pada gambar berikut.

GAMBAR 2.6
JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DI INDONESIA TAHUN 2010-2014

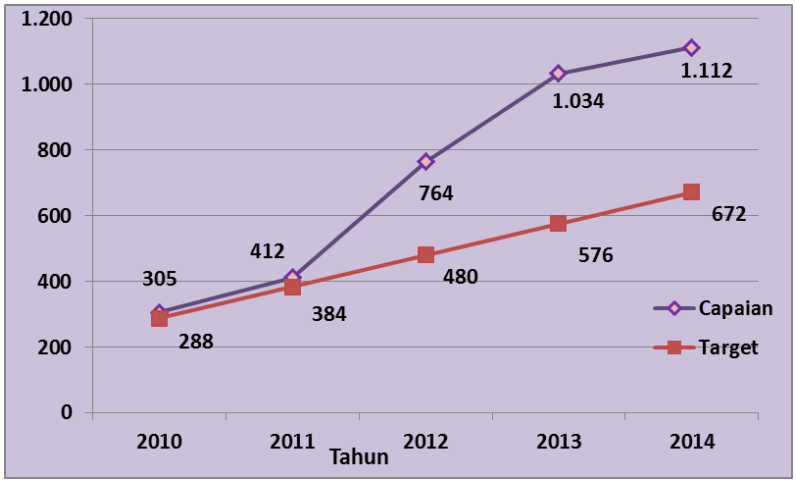

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Pada gambar 2.6 dapat diketahui bahwa indikator jumlah puskesmas melaksanakan upaya kesehatan kerja pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatandan melampui target yang ditetapkan.

3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga

Upaya kesehatan olahraga diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Kesehatan olahraga merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi olahraga melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009. Upaya kesehatan olahraga dapat dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Upaya kesehatan olahraga yang diselenggarakan di puskesmas meliputipembinaan dan pelayanan kesehatan olahraga. Pembinaan kesehatan olahraga berupa pendataan kelompok, pemeriksaan kesehatan, dan penyuluhan kesehatan olahraga. Pembinaan tersebut ditujukan pada kelompok olahraga di sekolah, klub jantung sehat, posyandu usia lanjut, kelompok senam ibu hamil, kelompok senam diabetes, kelompok senam pencegahan osteoporosis, pembinaan kebugaran jasmani jemaah calon haji, *fitness center,* dan kelompok olahraga/latihan fisik lain. Pelayanan kesehatan olahraga berupa konsultasi kesehatan olahraga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani, penanganan cedera olahraga akut, dan sebagai tim kesehatan pada *event* olahraga.

Terdapat 879 puskesmas yang telah menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga sampai dengan tahun 2014. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah puskesmas sebanyak 671 unit.Dalam hal jumlah provinsi, juga terdapat peningkatan yaitu dari 20 provinsi pada tahun 2013 menjadi 21 provinsi pada tahun 2014.Capaian indikator Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga pada tahun 2010-2014 terdapat pada gambar berikut.

GAMBAR 2.7
JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA DI INDONESIA TAHUN 2010-2014

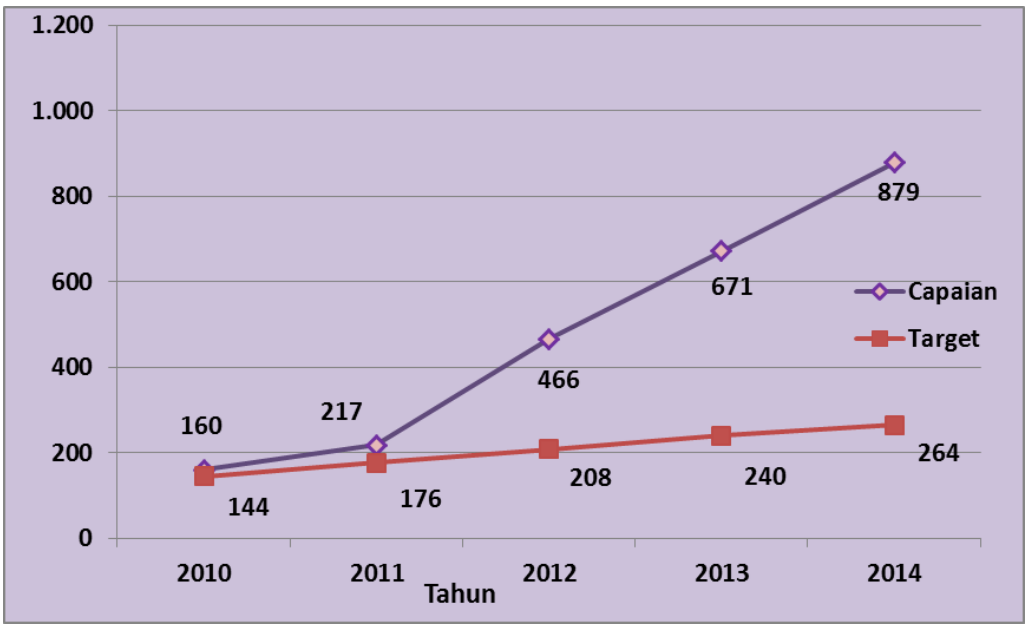

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2010, jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan olahraga sebanyak 160 unit. Jumlah ini meningkat menjadi 879 puskesmas pada tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan olahraga berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Data dan informasi lebih detail tentang jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga tahun 2014 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.3.

4. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer

Pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tradisional dengan meningkatkan kelembagaan struktur yang menangani bidang pelayanan kesehatan tradisional melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Per/Menkes/2010, yaitu Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer.

Pelayanan kesehatan tradisional berperan dalam siklus kehidupan atau *continuum of care* sejak dalam masa kandungan sampai usia lanjut, baik dengan metode keterampilan maupun ramuan. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang komprehensif dan sistematis dalam rencana aksi sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019.

Pada tahun 2014 terdapat 1.167 puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan terlatih yang tersebar di 289 kabupaten/kota. Persentase kabupaten/kota dengan tenaga kesehatan puskesmas terlatih adalah 56,2%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 yaitu 44,27% kabupaten/kota dengan tenaga kesehatan puskesmas terlatih.

GAMBAR 2.8
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI TENAGA KESEHATAN TERLATIH PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA TAHUN 2014

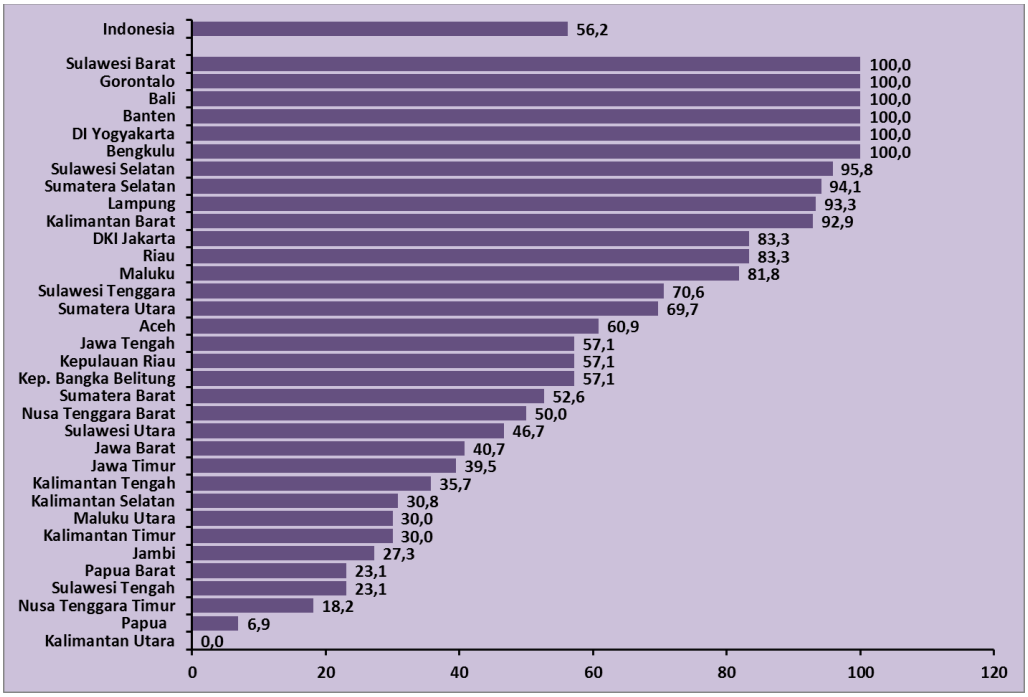

Sumber: Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Terdapat enam provinsi dengan persentase kabupaten/kota yang memiliki tenaga kesehatan terlatih sebesar 100% pada tahun 2014, yaitu Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Jumlah provinsi dengan persentase 100% pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah provinsi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 4 provinsi. Angka 100% artinya seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut telah

memiliki puskesmas dengan tenaga kesehatan terlatih, meskipun belum semua puskesmas yang ada di kabupaten/kota tersebut memiliki tenaga kesehatan terlatih. Selain puskesmas, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan pelatihan akupunktur dan herbal kepada 101 rumah sakit di 33 provinsi di Indonesia.

Gambaran menurut provinsi mengenai jumlah puskesmas, kabupaten/kota, dan persentase kabupaten/kota dengan tenaga kesehatan terlatih dapat dilihat pada Lampiran 2.3 dan Lampiran 2.4.

B. RUMAH SAKIT

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga diperlukan upaya kuratif dan rehabilitatif selain upaya promotif dan preventif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh bahan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

1. Jumlah dan Jenis Rumah Sakit

Rumah sakit publik di Indonesia dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, kementerian lain serta swasta non profit (organisasi keagamaan dan organisasi sosial). Jumlah rumah sakit publik di Indonesia sampai dengan tahun 2014 sebanyak 2.406 unit, yang terdiri atas Rumah Sakit Umum (RSU) berjumlah 1.855 unit dan Rumah Sakit Khusus (RSK) berjumlah 551 unit.

Berbeda dengan rumah sakit publik, rumah sakit privat dikelola oleh BUMN dan swasta (perorangan, perusahaan dan swasta lainnya). Pada tahun 2014 terdapat 807 unit rumah sakit privat di Indonesia yang terdiri dari 545 unit RSU dan 262 unit RSK.

Jumlah rumah sakit publik maupun privat menunjukkan peningkatan pada kurun waktu 2012 sampai dengan 2014 seperti yang disajikan pada tabel 2.1.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KEPEMILIKAN
DI INDONESIA TAHUN 2012 – 2014

No	Pengelola/Kepemilikan	2012	2013	2014
1	**Publik**			
	Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	656	676	687
	TNI/Polri	154	159	169
	Kementerian Lain	3	3	7
	Swasta Non Profit	727	724	736
Jumlah Publik		1.406	1.540	1.599
2	**Privat**			
	BUMN	75	67	67
	Swasta	468	599	740
Jumlah Privat		315	543	807
Jumlah		**1.721**	**2.083**	**2.406**

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus pada tahun 2014 adalah 1.855 unit dan 551unit. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 yang masing-masing sebesar 1.725 dan 503. Gambar berikut ini menggambarkan perkembangan jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam lima tahun terakhir.

GAMBAR 2.9
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS
DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2014

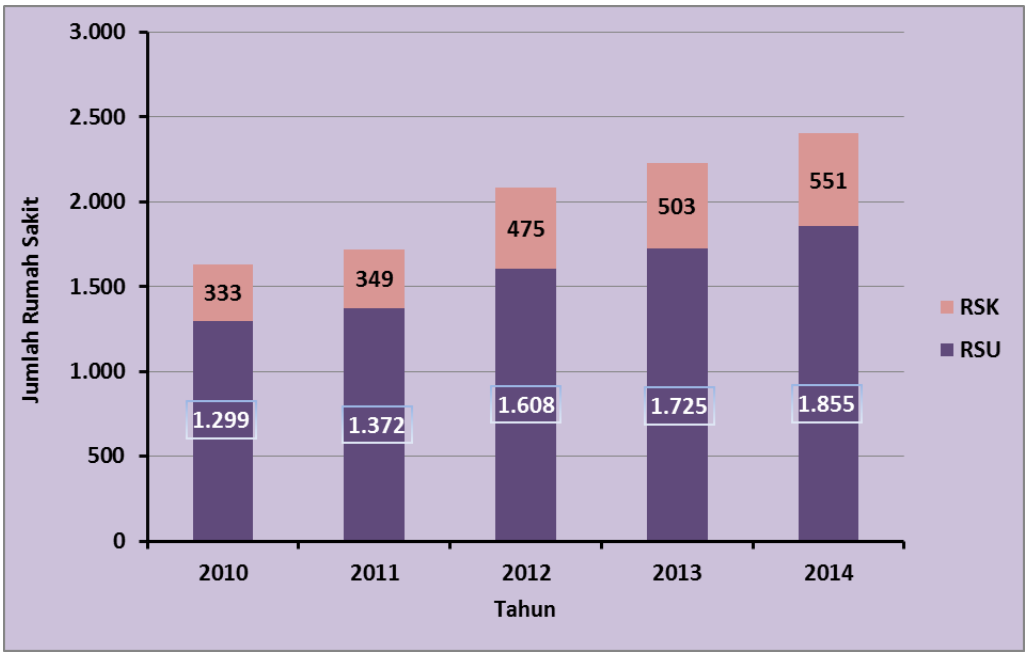

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Jumlah RSK pada tahun 2013 sebagian besar adalah rumah sakit ibu dan anak berjumlah 233 unit dengan persentase 42,29%. Proporsi jenis RSK di Indonesia pada tahun 2014 terdapat pada gambar berikut.

GAMBAR 2.10
PERSENTASE RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK)
MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2014

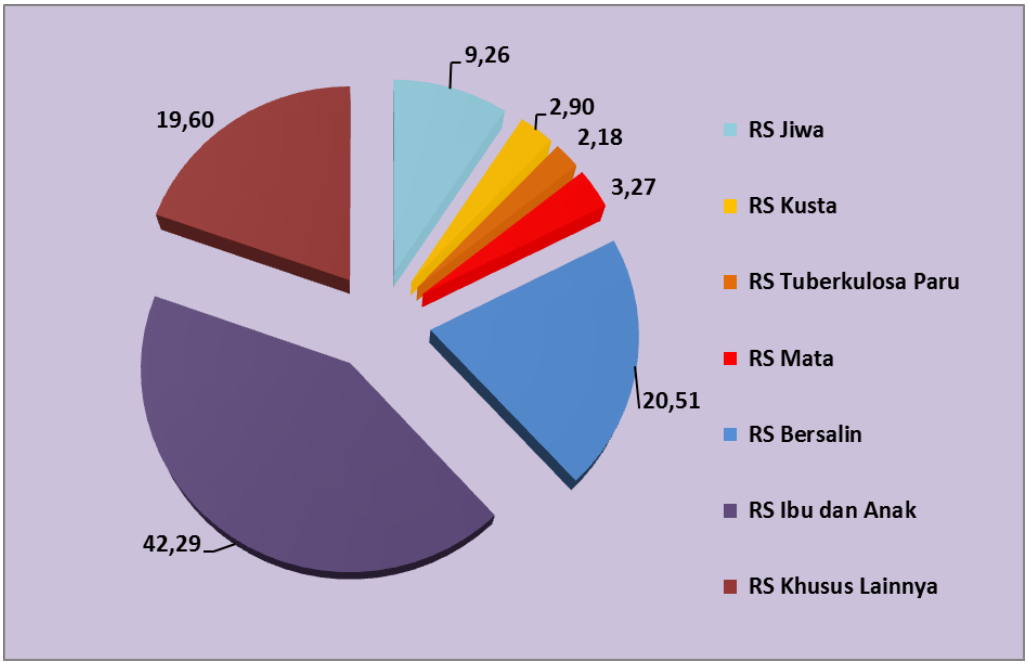

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa persentase jenis RSK tertinggi yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak. Persentase rumah sakit bersalin juga memiliki proporsi yang besar yaitu 20,51%.

Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 1,07 per 1.000 penduduk. Rasio ini lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar 1,12 per 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ditampilkan pada Gambar 2.11.

Jika dilihat secara nasional, pada tahun 2014 jumlah tempat tidur telah mencukupi, namun masih terdapat beberapa provinsi dengan rasio kurang dari 1 tempat tidur per 1.000 penduduk, yaitu sebanyaktiga belas provinsi.

GAMBAR 2.11
RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2014

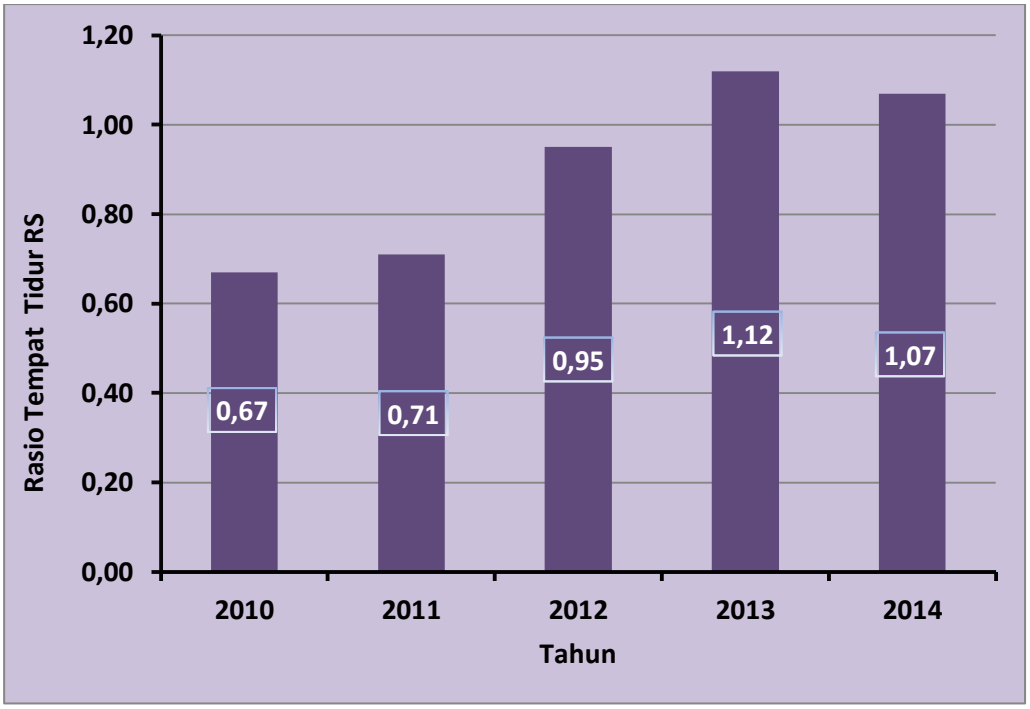

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Rasio tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 2,82, DKI Jakarta sebesar 2,11, dan Sulawesi Utara sebesar 2,1. Sedangkan provinsi dengan rasio terendah yaitu Nusa Tenggara Barat sebesar 0,64, Lampung sebesar 0,71, dan Jawa Barat sebesar 0,72.

GAMBAR 2.12
RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014

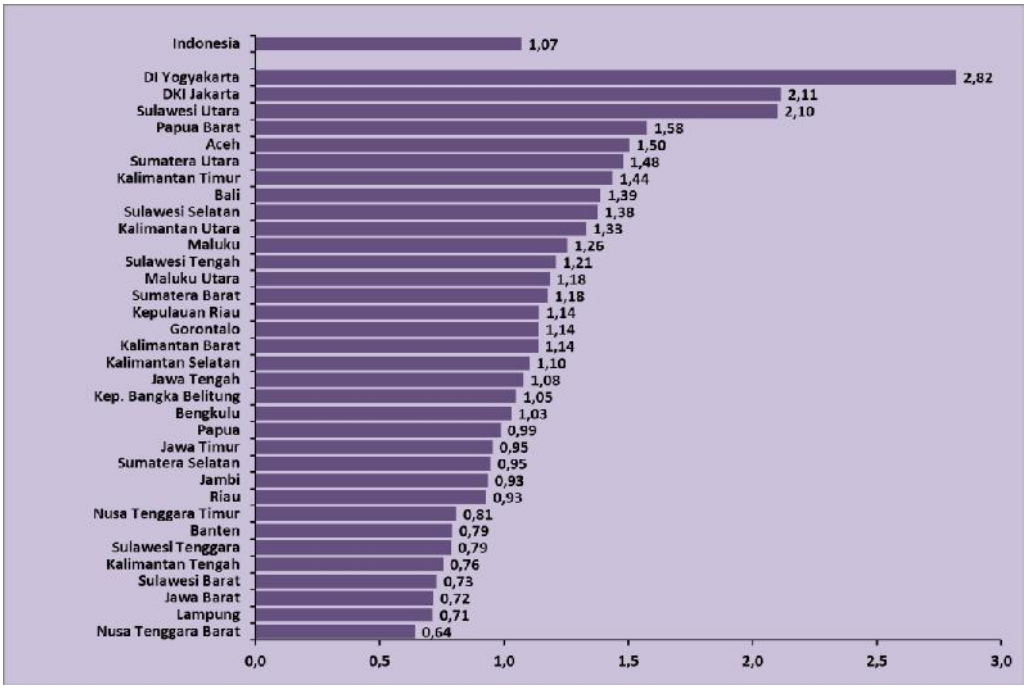

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Rumah sakit juga dikelompokkan menurut kelas berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan menjadi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Pada tahun 2014, terdapat 60 unit RS kelas A, 308 unit kelas B, 803 unit RS kelas C, 537 unit RS kelas D, dan sebanyak 700 unit RS lainnya belum ditetapkan kelas.

GAMBAR 2.13
PERSENTASE RUMAH SAKIT MENURUT KELAS
DI INDONESIA TAHUN 2014

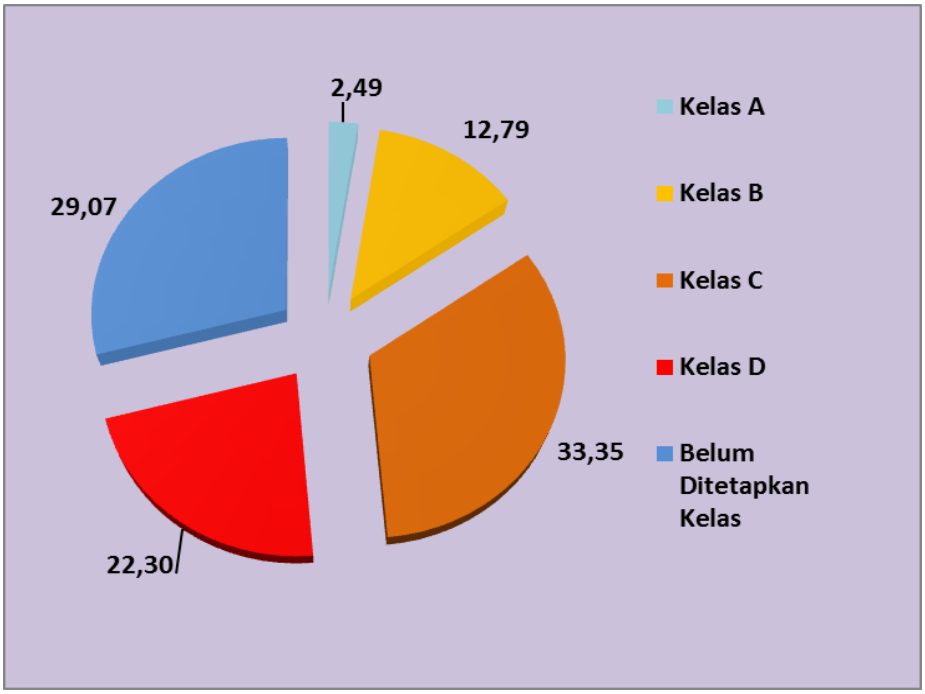

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Pada Gambar 2.13 dapat diketahui bahwa rumah sakit kelas C memiliki persentase tertinggi sebesar 33,35%. Sedangkan persentase terendah adalah rumah sakit kelas A sebesar 2,49%. Informasi lebih rinci tentang rumah sakit menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9.

C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam pelayanan kesehatan. Akses masyarakat terhadap obat khususnya obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun privat. Sebagai komoditi khusus, semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu obat hingga diterima konsumen adalah menyediakan sarana penyimpanan obat dan alat kesehatan yang dapat menjaga keamanan secara fisik serta dapat mempertahankan kualitas obat di samping tenaga pengelola yang terlatih.

Salah satu kebijakan dalam Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yaiyumeningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat

kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan atau penggunaan yang salah/tidak tepat serta tidak memenuhi mutu keamanan dan pemanfaatan yang dilakukan sejak proses produksi, distribusi hingga penggunaannya di masyarakat. Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT)/Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Kosmetika, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)/Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Sarana produksi dan distribusi di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal persebaran jumlah. Sebagian besar sarana produksi maupun distribusi berlokasi di Indonesia bagian barat yaitu Sumatera dan Jawa sebesar 94,7% sarana produksi dan 77,0% sarana distribusi. Ketersediaan ini terkait dengan sumberdaya yang dimiliki dan kebutuhan pada wilayah setempat. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia bagian tengah dan timur, sehingga terjadi pemerataan jumlah sarana tersebut di seluruh Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka akses keterjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Jumlah sarana produksi pada tahun 2014 sebesar 2.817 sarana. Pada tahun 2014 terdapat 11 provinsi yang tidak memiliki seluruh jenis industri kefarmasian dan alat kesehatan yang disebutkan di atas. Provinsi dengan jumlah sarana produksi terbanyak adalah Jawa Barat sebesar 762 sarana.Hal ini dapat disebabkan karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas. Jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2014 terdapat pada gambar berikut.

GAMBAR 2.14
JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2014

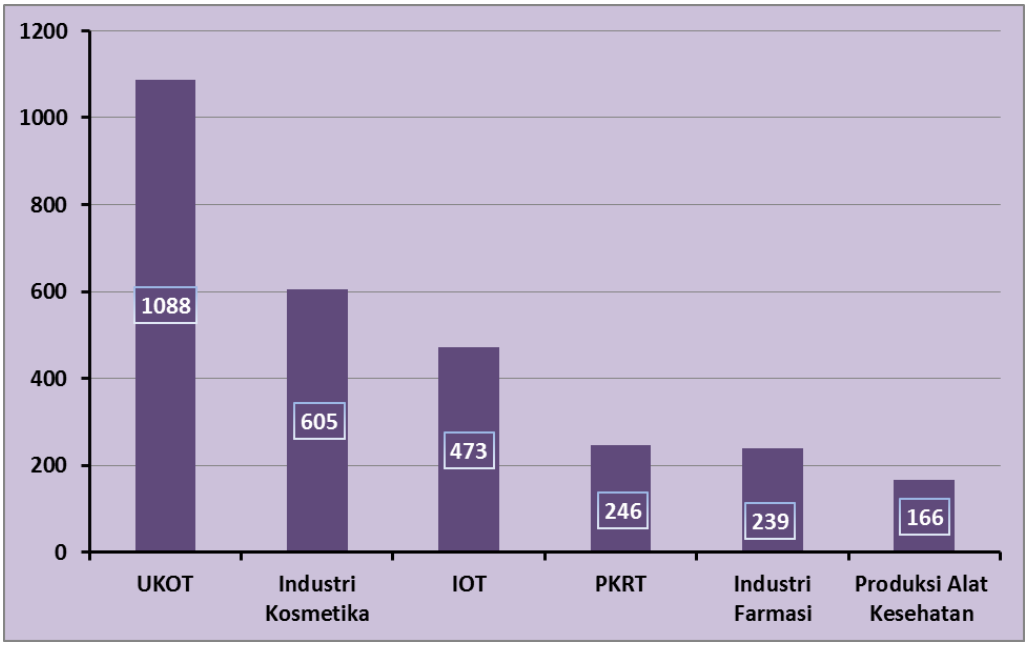

Sumber: Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya oleh Ditjen Binfar dan Alkes antara lain yaitu: Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2014 sebesar 35.566 sarana. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 33.731 sarana. Gambar berikut menyajikan jumlah sarana distribusi kefarmasian pada tahun 2014. Data lebih rinci menurut provinsi mengenai jumlah sarana produksi dan distrbusi kefarmasian terdapat pada Lampiran 2.18 dan Lampiran 2.19.

GAMBAR 2.15
JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2014

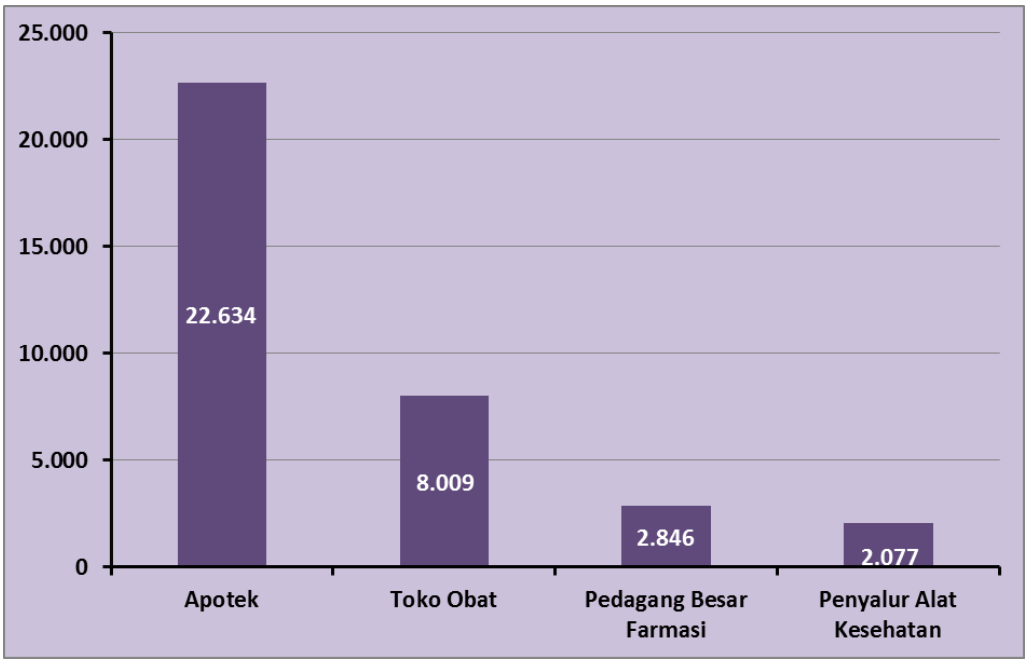

Sumber: Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

2. Ketersediaan Obat dan Vaksin

Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dengan jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan bermutu dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis tahun 2010-2014 terkait program kefarmasian dan alat kesehatan, yaitu meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut padatahun 2014 yaitu persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%. Dalam rangka mencapai target tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar.

Pemantauan ketersediaan obat digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di berbagai unit sarana kesehatan seperti Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Di era otonomi daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke kabupaten/kota, akibatnya sulit bagi pemerintah pusat untuk mengetahui kondisi ketersediaan obat di seluruh Indonesia. Dengan tidak adanya laporan secara periodik yang

dikirim oleh provinsi, maka relatif sulit bagi pemerintah pusat untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau kabupaten/kota akan mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program di masa yang akan datang.

Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Indonesia, dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat yang dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Jumlah *item* obat yang dipantau adalah 144 *item* obat dan vaksin yang terdiri dari 135 *item* obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan 9 jenis vaksin untuk imunisasi dasar.

Indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin tahun 2014 memiliki target sebesar 100%, dari data dan perhitungan yang dilakukan oleh Ditjen Binfar dan Alkes didapatkan persentase ketersediaan rata-rata nasional pada tahun 2014 sebesar 100,51%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka capaian kinerja indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin tersebut adalah sebesar 100,51%. Data dan informasi lebih rinci mengenai ketersediaan obat dan vaksin 144 *item* terdapat pada Lampiran 2.20 dan 2.21.

3. Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan juga memantau pemanfaatan obat generik melalui indikator persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu di puskesmas dan rumah sakit. Rata-rata penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2014 sebesar 85,89%. Penggunaan tersebut telah memenuhi target tahun 2014 yaitu sebesar 80%.

GAMBAR 2.16
PERSENTASE RATA-RATA PENGGUNAAN OBAT GENERIK
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2014

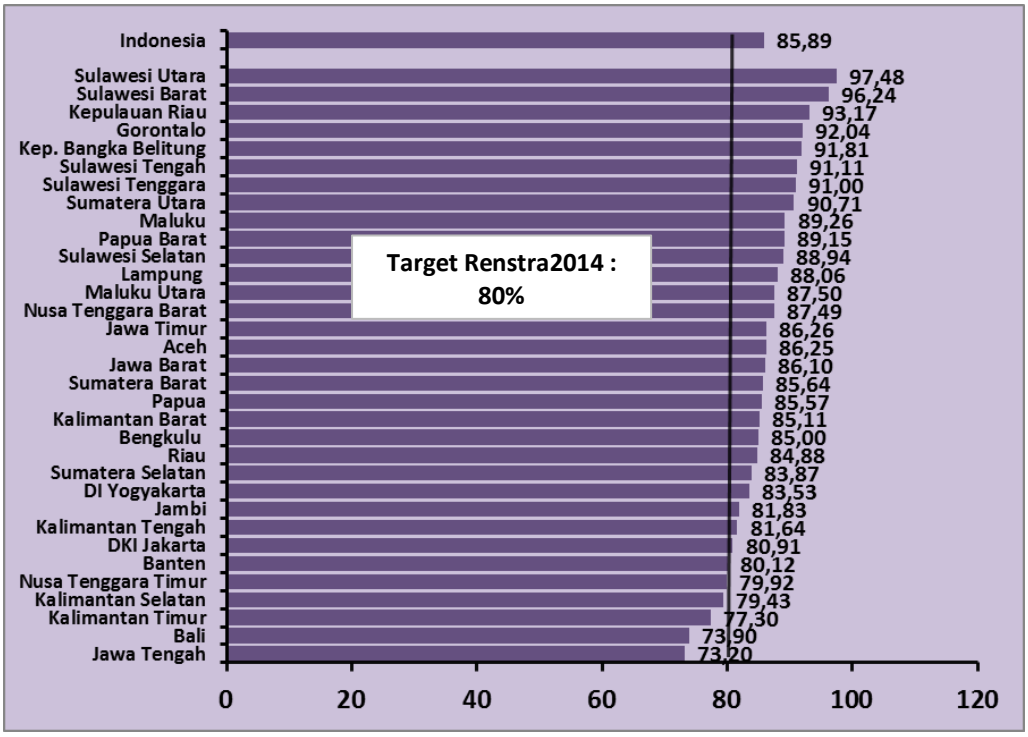

Sumber : Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi telah memenuhi target 80%, yaitu 28 provinsi (84,85%). Provinsi dengan rata-rata penggunaan tertinggi adalah Sulawesi Utara sebesar 97,48% diikuti oleh Sulawesi Barat sebesar 96,24% dan Kepulauan Riau sebesar 93,17%. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Jawa Tengah sebesar 73,2% diikuti oleh Bali sebesar 73,9% dan Kalimantan Timur sebesar 77,3%. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai penggunaan obat generik terdapat pada Lampiran 2.22.

D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

Pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya juga memerlukan peran masyarakat. Melalui konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan RW/desa/kelurahan siaga aktif.

Desa/kelurahan/nagari siaga aktif adalah desa/kelurahan/nagari yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Jumlah desa/kelurahan/nagari siaga aktif di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 58.849, dengan persentase terhadap jumlah seluruh desa/kelurahan/nagari sebesar 69,51%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Jawa Tengah sebesar 99,99% diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 98,86, dan Jawa Barat sebesar 98,41%. Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Barat sebesar 1,81%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 15,36% dan Papua sebesar 19,44%.

GAMBAR 2.17
PERSENTASE DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF DI INDONESIA
TAHUN 2014

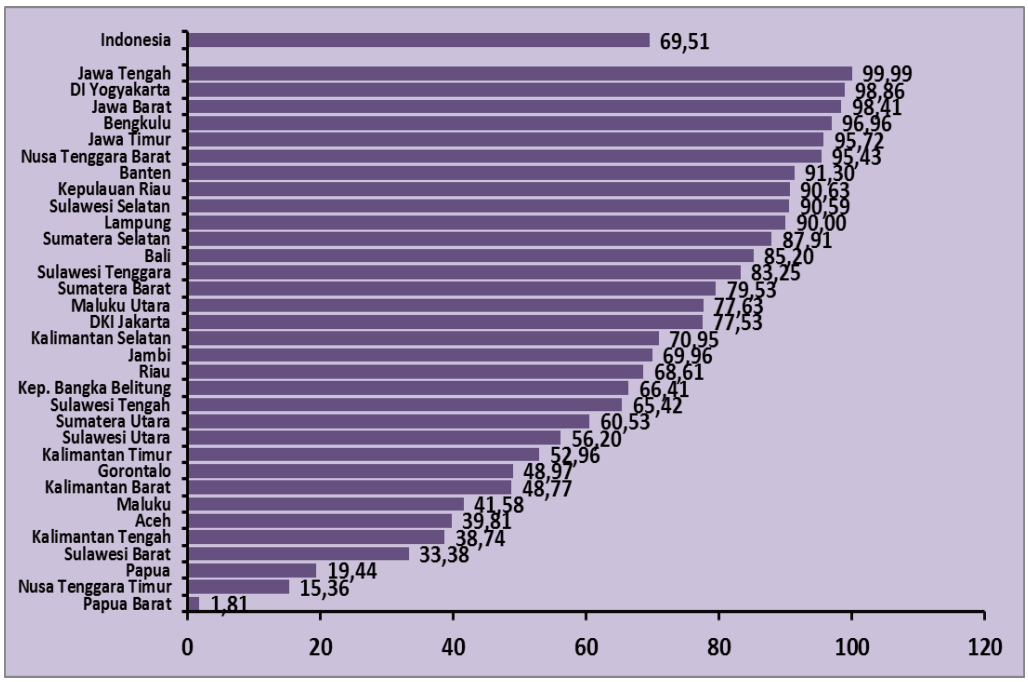

Sumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Jenis UKBM lainnya adalah Poskesdes, yaitu UKBM yang dibentuk di desa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa sehingga mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan utama poskesdes yaitu pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa berupa pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu menyusui, pelayanan kesehatan anak, pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans penyakit, surveilans gizi, surveilans perilaku berisiko, surveilans lingkungan dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Jumlah poskesdes yang beroperasi pada tahun 2014 sebanyak 55.517 unit. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 54.731 unit.

Salah satu UKBM yang memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah posyandu. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat terutama ibu, bayi, dan anak balita. Posyandu memiliki 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare.

Terdapat 289.635 Posyandu pada tahun 2014 di Indonesia. Dari jumlah tersebut, posyandu pratama sebanyak 13,06%, madya sebanyak 27,74%, purnama sebanyak 31,6%, dan mandiri sebanyak 8,71%.

GAMBAR 2.18
PERSENTASE POSYANDU MENURUT STRATA DI INDONESIA TAHUN 2014

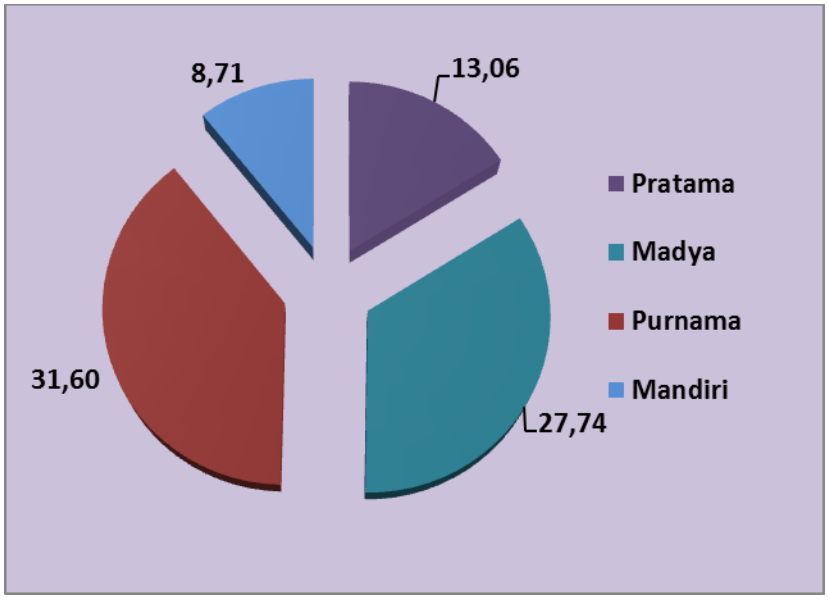

Sumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa proporsi tertinggi adalah posyandu purnama dan proporsi terendah adalah posyandu mandiri. Dengan demikian diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan jumlah posyandu mandiri. Dalam menjalankan fungsinya, perlu diketahui rasio kecukupan posyandu terhadap masyarakat yang ada. Pada tahun 2014, rasio posyandu terhadap jumlah desa/kelurahan adalah 3,42. Pada tingkat nasional, rasio posyandu terhadap jumlah desa/keluarahan memang nampak telah mencukupi yaitu lebih dari satu. Namun jika dilihat pada tingkat provinsi terdapat dua provinsi yang memiliki rasio kurang dari satu, yaitu Papua dan Papua Barat.

GAMBAR 2.19
RASIO POSYANDU TERHADAP DESA/KELURAHAN
DI INDONESIA TAHUN 2014

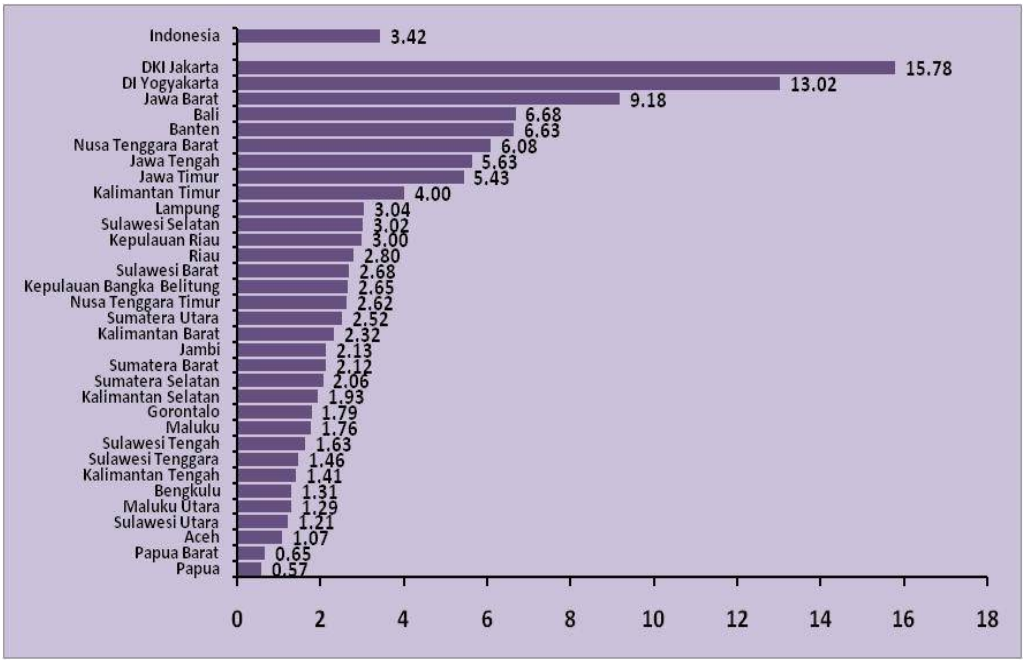

Sumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Gambar di atas menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki rasio tertinggi sebesar 15,78. Papua dan Papua Barat memiliki rasio kurang dari satu, masing-masing sebesar 0,57 dan 0,65. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan juga memerlukan peran serta kader dan tokoh masyarakat/agama. Sampai dengan dengan tahun 2014 terdapat 569.477 kader/toma/toga terlatih. Data/informasi lebih rinci mengenai jumlah UKBM menurut provinsi tahun 2014 terdapat pada Lampiran 2.11, dan Lampiran 2.12.

E. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLTEKKES

1. Jumlah Poltekkes

Pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jenis, jumlah maupun kualitas. Untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas tentu saja dibutuhkan proses pendidikan yang berkualitas pula. Kementerian Kesehatan RI merupakan institusi dari sektor pemerintah yang berperan di dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas tersebut.

Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes). Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan terhadap institusi Poltekkes. Sampai dengan Desember 2014, terdapat 38 Poltekkes di Indonesia yang terdiri dari program studi strata Diploma IV sebanyak 133 jurusan/program studi, dan strata Diploma III terdiri dari 262 jurusan/program studi. Terdapat 6 kelompok jurusan/program studi di poltekkes yaitu :

1. Keperawatan yang terdiri dari keperawatan, kebidanan, dan keperawatan gigi
2. Kefarmasian yang terdiri dari farmasi, analis farmasi & makanan, dan jamu
3. Kesehatan masyarakat yang terdiri dari kesehatan lingkungan
4. Gizi

5. Keterapian fisik yang terdiri dari fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, dan akupunktur
6. Keteknisan medis terdiri dari analis kesehatan, teknik gigi, teknik radiodiagnostik dan radioterapi, perekam informasi kesehatan, teknik elektromedik, dan ortotik prostetik.

GAMBAR 2.20
JUMLAH PROGRAM STUDI POLTEKKES DIPLOMA III DAN IV
DI INDONESIA TAHUN 2014

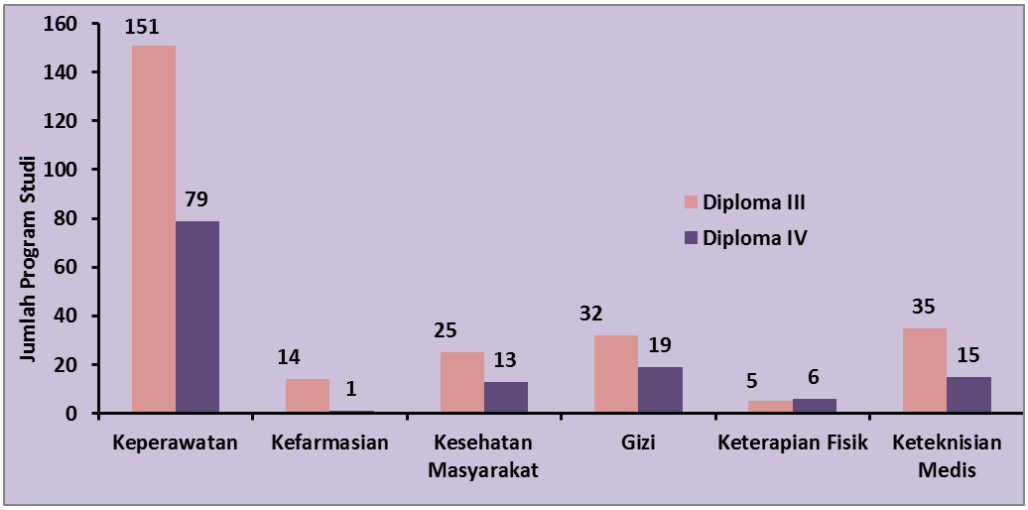

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah jurusan/program studi terbanyak adalah keperawatan dengan jumlah Diploma III sebanyak 151 program studi atau 57,6% dan diploma IV sebanyak 79 program studi atau 59,4%. Jumlah Jurusan/program studi terendah diploma III adalah keterapian fisik dengan jumlah sebanyak 5 program studi atau 1,9% dan diploma IV adalah kefarmasian sebanyak 1 program studi atau 0,8%.

2. PesertaDidik

Peserta didik pada Diploma III yang dimiliki oleh Poltekkes di Indonesia pada tahun 2014 terdiri dari peserta didik tingkat I (tahun ajaran 2014/2015), tingkat II (tahun ajaran 2013/2014), dan tingkat III (tahun ajaran 2012/2013) yaitu berjumlah 60.158. Jumlah terbesar berasal dari program studi keperawatan sebanyak 39.275 mahasiswa, dan program studi keterapian fisik memiliki jumlah peserta didik terendah yaitu 563 mahasiswa. Pola yang sama terjadi pada program diploma IV dengan jumlah peserta didik tertinggi adalah program studi keperawatan sebanyak 5.963 mahasiswa dan program studi keterapian fisik memiliki jumlah peserta didik terendah sebanyak 739 mahasiswa.

GAMBAR 2.21
JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2014

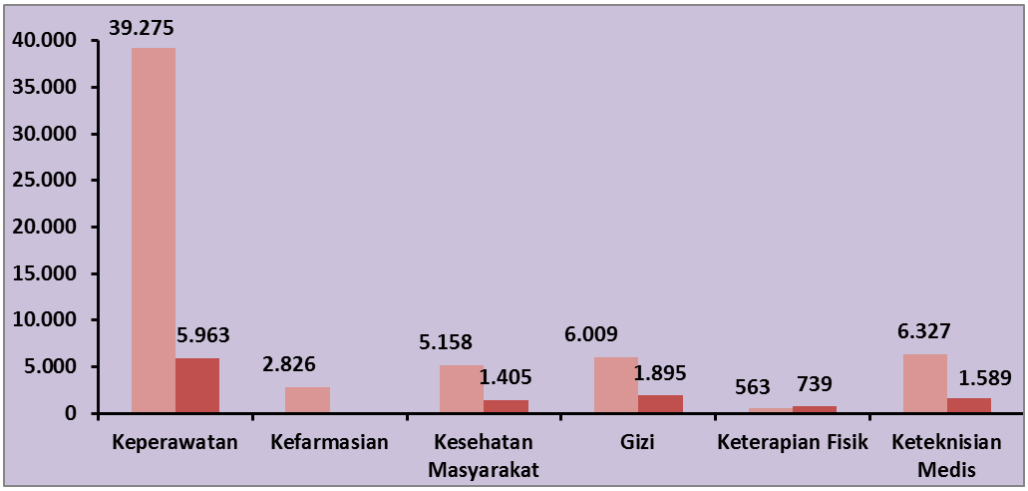

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Data dan informasi lebih rinci mengenai jumlah peserta didik di institusi Poltekkes terdapat pada Lampiran 2.16 dan 2.17.

***

III

TENAGA KESEHATAN

III TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam tiga belas jenis, yang terdiri atas: tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya.

A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Tenaga kesehatan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Jumlah tenaga kesehatan diperlukan untuk mengetahui ketersediaan dan kekurangan tenaga kesehatan di Indonesia. Pendataan jumlah tenaga kesehatan menggunakan pendekatan registrasi yang dilaksanakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia untuk registrasi tenaga medis, Komite Farmasi Nasional untuk registrasi tenaga kefarmasian dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk registrasi tenaga kesehatan selain tenaga medis dan kefarmasian.

Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Registrasi tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Untuk mendapatkan STR, tenaga kesehatan harus memiliki

ijazah dan sertifikat kompetensi. STR berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun.

Pendataan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menggunakan pendekatan jumlah tenaga medis (dokter/dokter spesialis, dokter gigi/dokter gigi spesialis) yang mempunyai STR. Berdasarkan pendataan dari KKI dapat diketahui jumlah tenaga medis di Indonesia yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut ini.

GAMBAR 3.1
JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMPUNYAI SURAT TANDA REGISTRASI DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2014

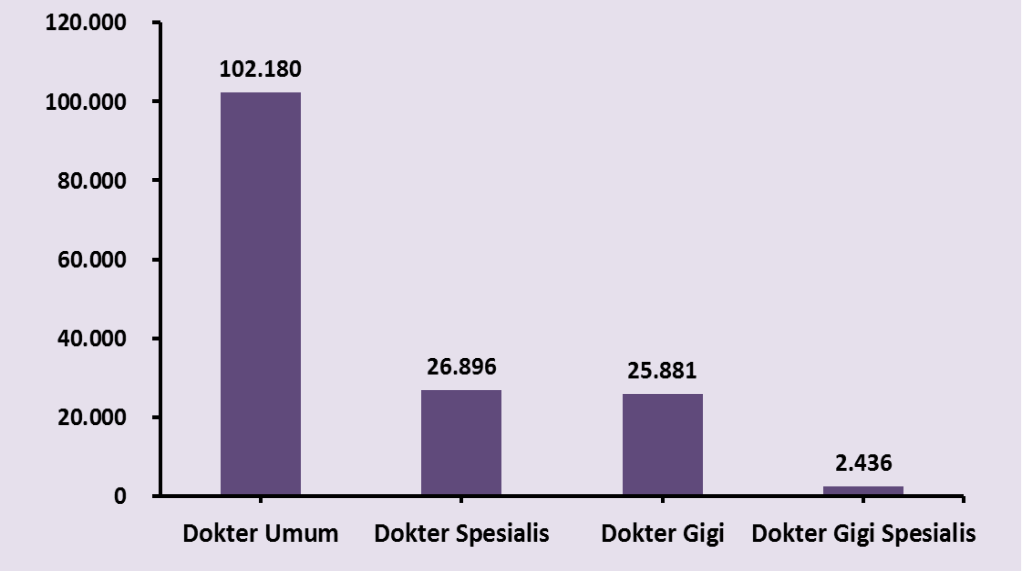

Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Kemenkes RI, 2015

Jumlah tenaga medis yang mempunyai STR pada tahun 2014 di Indonesia berjumlah 157.393 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah dokter umum berjumlah 102.180, dokter spesialis di Indonesia berjumlah 26.896, dokter gigi spesialis 2.436 dan jumlah dokter gigi sebesar 25.881 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang mempunyai STR dapat dilihat pada Lampiran 3.5.

Jumlah tenaga medis terbanyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 27.721, Jawa Barat sebanyak 24.171 dan Jawa Timur sebanyak 21.022 tenaga medis. Jumlah tenaga medis terkecil terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 201, Maluku Utara sebanyak 253 dan Kalimantan Utara sebanyak 285 tenaga medis. Tenaga dokter umum terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 16.092, Jawa Barat sebanyak 15.892 dan Jawa Timur sebanyak 12.738 tenaga dokter, sedangkan jumlah dokter terkecil terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 111, Maluku Utara sebanyak 181 dan Kalimantan Utara sebanyak 189 tenaga dokter.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perkonsil Nomor 1/KKI/PER/I/2010 Tentang Registrasi Dokter Program Internsip dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip, menyebutkan bahwa terhadap dokter lulusan program pendidikan kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi diperlukan proses pemahiran dan/atau untuk memantapkan mutu profesi dokter yang baru lulus program studi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi diselenggarakan melalui program internsip setelah memperoleh sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Primer

Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2014, total STR Dokter Peserta Internsip yang telah diterbitkan KKI ada sejumlah 16.804 STR, selama tahun 2014 telah diterbitkan 6.522 STR dokter peserta internsip.

Sesuai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, disebutkan bahwa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. STR PPDS/PPDGS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter dan dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang telah diregistrasi. Sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah STR Dokter peserta PPDS/Dokter Gigi peserta PPDGS yang telah diterbitkan sebanyak 224.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA), STR sementara diberikan kepada dokter WNA dan dokter gigi WNA yang diakui secara hukum untuk melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. STR bersyarat diberikan kepada dokter WNA dan dokter gigi WNA yang diakui secara hukum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran spesialis atau kedokteran gigi spesialis di Indonesia. Selama tahun 2014, penerbitan STR dokter dan dokter gigi WNA untuk STR sementara tidak ada (total 8 STR sejak tahun 2010) dan STR bersyarat sebesar satu STR (total 13 STR Bersyarat sejak tahun 2010).

Registrasi tenaga kefarmasian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.

Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi, yang disebut dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK). STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada apoteker yang telah diregistrasi, STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi. Kedua tanda registrasi tersebut berlaku selama lima tahun. Surat tanda registrasi juga diperlukan untuk apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian di Indonesia yang disebut dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker Khusus (STRA Khusus). STRA, STRTTK dan STRA Khusus dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional.

Pendataan tenaga kesehatan, selain tenaga medis dan kefarmasian, dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) Kementerian Kesehatan RI. Pendataan meliputi tenaga perawat, bidan, fisioterapi, perawat gigi, refraksionis optisien, terapis wicara, radiografer, okupasi terapis, tenaga gizi, rekam medis, teknisi gigi, kesehatan lingkungan, elektromedis, teknologi laboratorium, perawat anestesi, tenaga akupuntur, fisika medis, ortotis prostetis dan teknisi transfusi darah. Pendataan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan jumlah

tenaga kesehatan yang telah mempunyai STR. Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai STR sampai tahun 2014 terlihat pada Gambar 3.2 berikut ini.

GAMBAR 3.2
JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMPUNYAI SURAT TANDA REGISTRASI DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2014

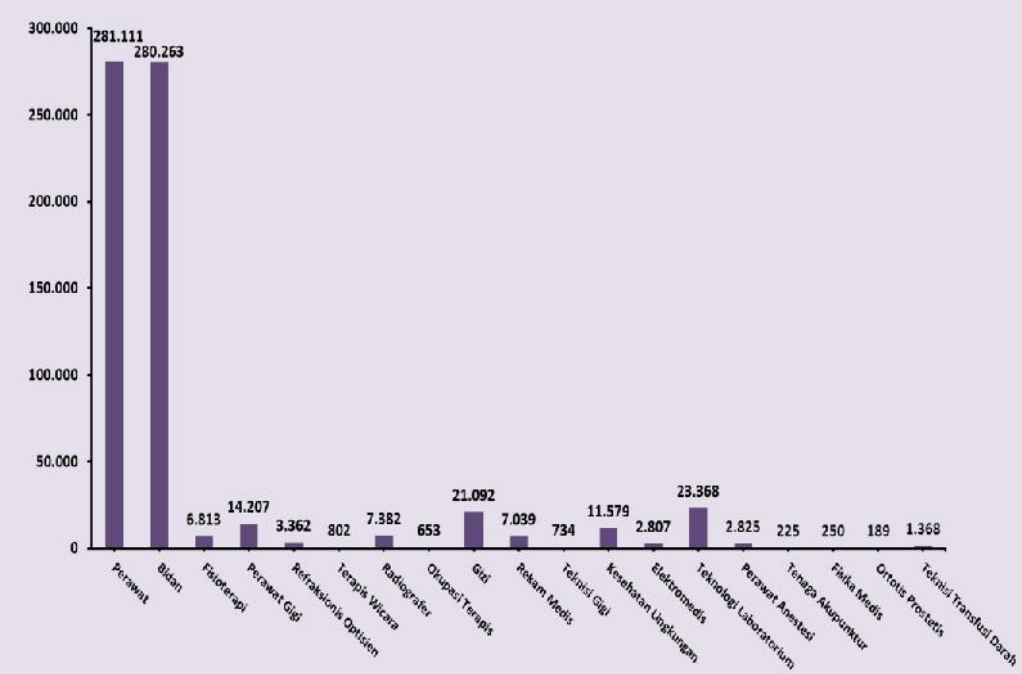

Sumber : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2015

Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai STR hasil pendataan MTKI sampai tahun 2014 berjumlah 666.069 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Jumlah terbanyak tenaga kesehatan pada jenis tenaga perawat dan bidan. Sampai tahun 2014, jumlah perawat yang mempunyai STR di Indonesia sebesar 281.111, bidan yang mempunyai STR sebesar 280.263, tenaga gizi sebesar 21.092. Rincian lengkap mengenai jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai STR dapat dilihat pada Lampiran 3.6.

Data jumlah tenaga kesehatan dikumpulkan oleh Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan menggunakan pendekatan tenaga kesehatan yang menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, pada tahun 2014 jumlah sumber daya manusia kesehatan yang tercatat sebesar 772.078 yang terdiri atas 576.634 tenaga kesehatan dan 195.444 tenaga penunjang (non tenaga kesehatan).

Jumlah tenaga kesehatan di Indonesia terbesar ada di tenaga perawat dan bidan. Pada Gambar 3.3, jumlah perawat pada tahun 2014 sebesar 237.181 dan jumlah bidan sebesar 124.948. Jumlah dokter spesialis sebesar 46.994 lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah dokter umum yang sebesar 40.787. Hal ini dimungkinkan karena dokter umum lebih banyak bekerja tidak sesuai dengan fungsinya, dokter umum lebih banyak berada di kegiatan manajemen, sedangkan dokter spesialis lebih banyak bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai dokter spesialis. Rincian lengkap mengenai rekapitulasi sumber daya manusia kesehatan menurut jenis tenaga dapat dilihat pada Lampiran 3.1.

GAMBAR 3.3
JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG BEKERJA SESUAI DENGAN FUNGSINYA
DI INDONESIA TAHUN 2014

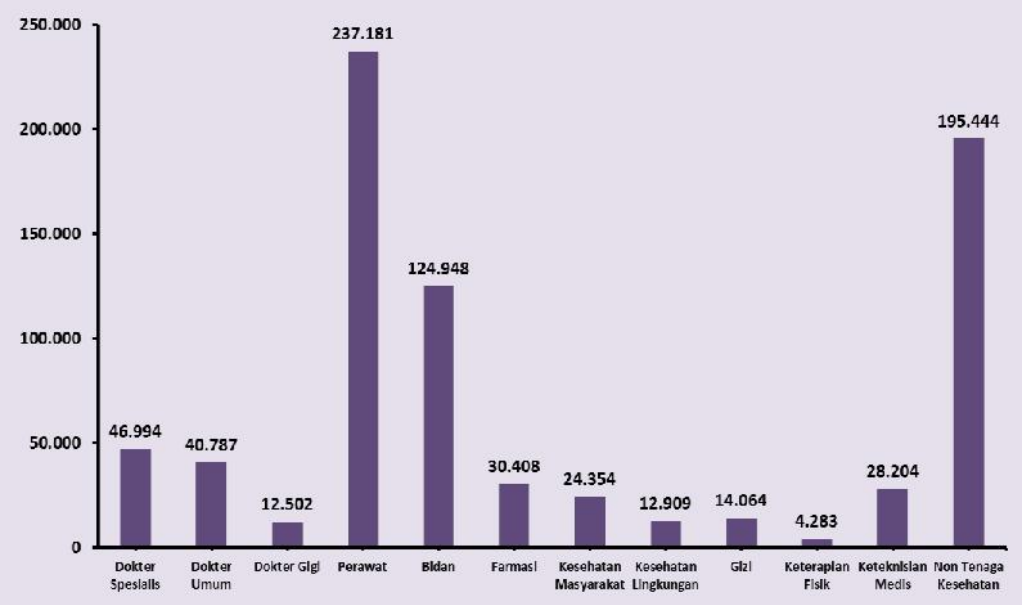

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

1. Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Sumber daya manusia puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga penunjang (non tenaga kesehatan). Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.

Jenis tenaga kesehatan di puskesmas paling sedikit terdiri atas: dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Tenaga kesehatan di puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.

GAMBAR 3.4
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2014

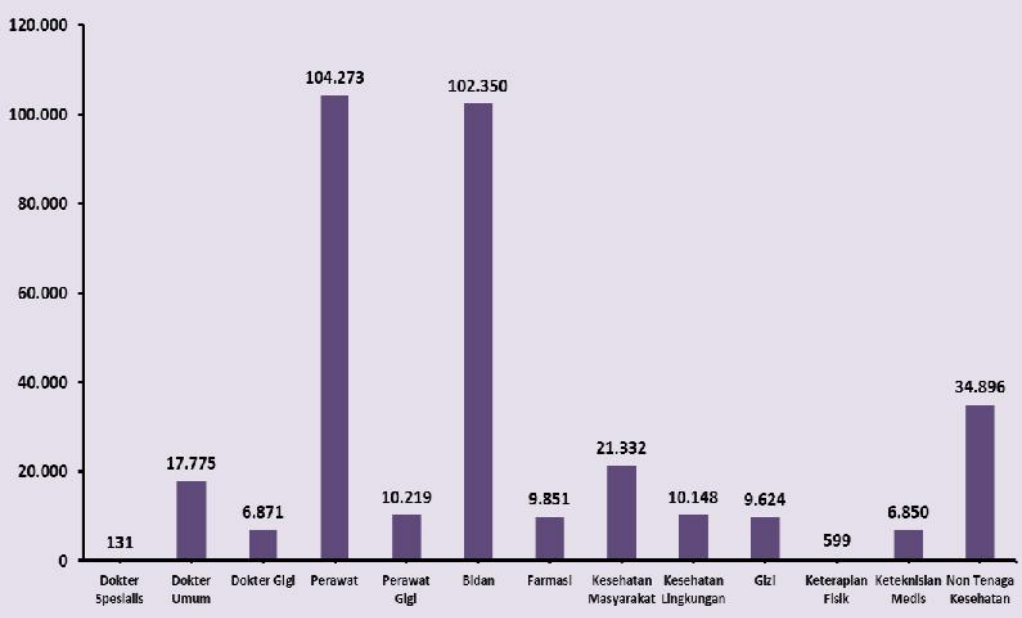

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Standar ketenagaan puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, untuk puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas kawasan perdesaan dan puskesmas kawasan terpencil/sangat terpencil disyaratkan untuk puskesmas rawat inap jumlah minimal sebanyak dua dokter dan untuk puskesmas non rawat inap jumlah minimal sebanyak satu dokter. Pada tahun 2014, jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia sebesar 9.731. Dengan menggunakan jumlah puskesmas dan jumlah tenaga dapat disusun rasio tenaga kesehatan terhadap puskesmas. Rasio dokter umum terhadap puskesmas dapat digunakan untuk mengetahui ketersediaan dokter di puskesmas. Rasio dokter umum di puskesmas terhadap jumlah puskesmas tahun 2014 menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Pada tahun 2014 rasio dokter umum per puskesmas sebesar 1,83. Secara umum jumlah dokter yang bekerja di puskesmas telah tercapai, tetapi persebarannya yang belum merata. Rasio dokter umum terhadap puskesmas tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,21 dokter umum per puskesmas, DI Yogyakarta sebesar 3,02 dokter umum per puskesmas dan Kalimantan Utara sebesar 2,85 dokter umum per puskesmas. Rasio dokter umum per puskesmas terendah terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 0,4 dokter umum per puskesmas, Sulawesi Tenggara sebesar 0,99 dokter umum per puskesmas dan Papua sebesar 1,00 dokter umum per puskesmas. Rincian lengkap mengenai rasio dokter umum terhadap jumlah puskesmas menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.3.

GAMBAR 3.5
RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2014

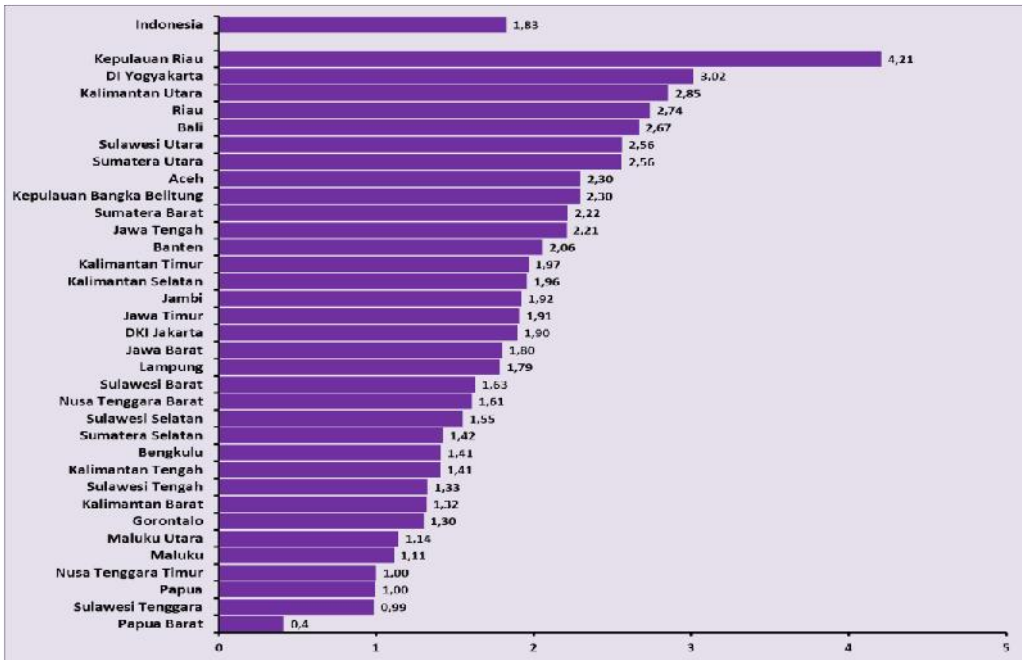

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015; Pusdatin, Kemenkes RI, 2014

Rasio perawat terhadap puskesmas dapat digunakan untuk mengetahui ketersediaan perawat di puskesmas. Rasio perawat di puskesmas terhadap jumlah puskesmas tahun 2014 menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.6.

GAMBAR 3.6
RASIO PERAWAT DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2014

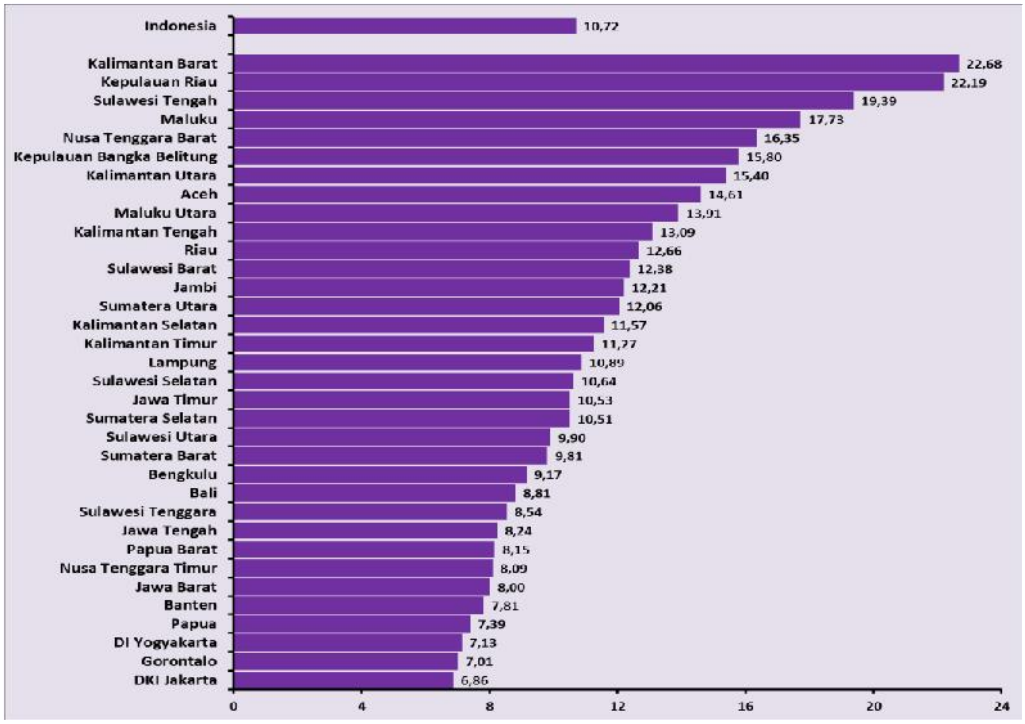

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015; Pusdatin, Kemenkes RI, 2014

Rasio perawat di puskesmas terhadap jumlah puskesmas terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 22,68 perawat per puskesmas, Kepulauan Riau sebesar 22,19 perawat per puskesmas dan Sulawesi Tengah sebesar 19,39 perawat per puskesmas. Rasio perawat di puskesmas terhadap jumlah puskesmas terkecil terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,86 perawat per puskesmas, Gorontalo sebesar 7,01 perawat per puskesmas, dan DI Yogyakarta sebesar 7,13 perawat per puskesmas. Rincian lengkap mengenai rasio perawat terhadap jumlah puskesmas menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.3.

Rasio bidan terhadap puskesmas dapat digunakan untuk mengetahui ketersediaan bidan di puskesmas. Rasio bidan di puskesmas terhadap jumlah puskesmas tahun 2014 menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut ini.

Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014, jumlah minimal tenaga perawat adalah lima perawat untuk puskesmas non rawat inap dan delapan perawat untuk puskesmas rawat inap. Rasio perawat di puskesmas terhadap jumlah puskesmas di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 10,72 perawat per puskesmas. Secara nasional jumlah perawat telah mencapai target, tetapi persebaran per provinsi yang belum merata.

GAMBAR 3.7
RASIO BIDAN DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2014

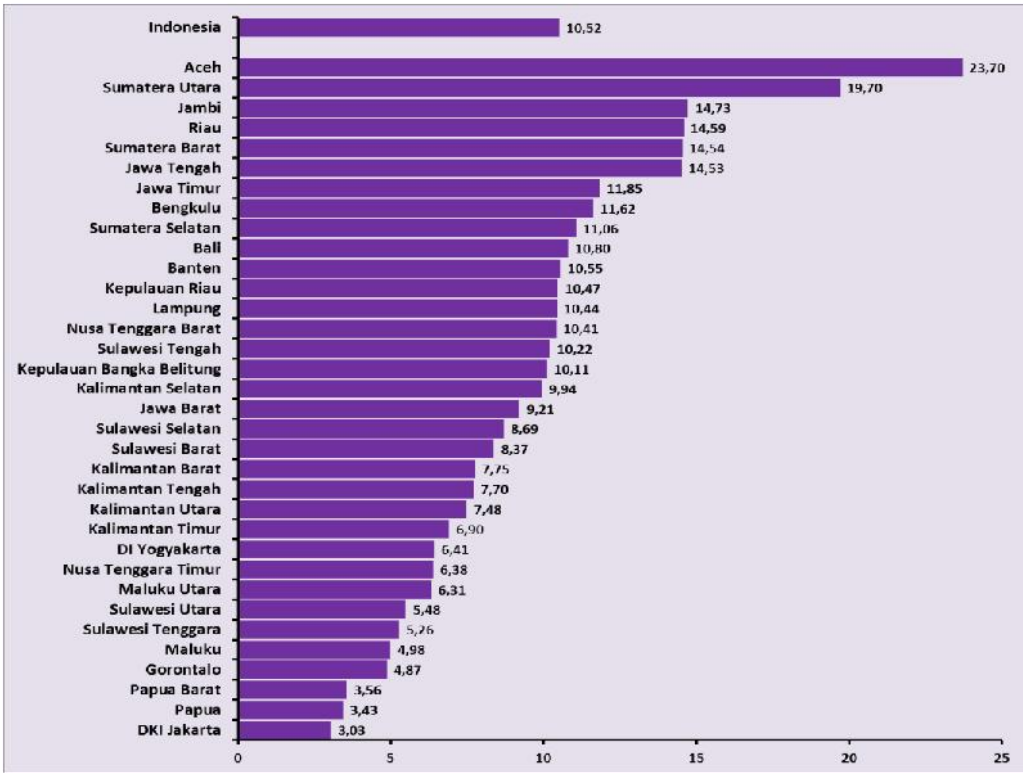

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015; Pusdatin, Kemenkes RI, 2014

Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014, jumlah minimal tenaga bidan adalah empat bidan untuk puskesmas non rawat inap dan tujuh bidan untuk puskesmas rawat inap. Rasio bidan di puskesmas terhadap jumlah puskesmas di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 10,52 bidan per puskesmas. Secara nasional jumlah bidan telah mencapai target, tetapi persebaran per provinsi yang belum merata.

Rasio bidan terhadap jumlah puskesmas terbesar terdapat di Provinsi Aceh sebesar 23,70 bidan per puskesmas, Sumatera Utara sebesar 23,70 bidan per puskesmas dan Jambi sebesar 14,73 bidan per puskesmas. Rasio bidan terhadap jumlah puskesmas terkecil terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,03 bidan per puskesmas, Papua sebesar 3,43 bidan per puskesmas, dan Papua Barat sebesar 3,56 bidan per puskesmas. Rincian lengkap mengenai rasio perawat terhadap jumlah puskesmas menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.3.

2. Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

Sumber daya manusia kesehatan memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Badan PPSDM Kesehatan, jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit sebesar 276.611 tenaga kesehatan dan 160.548 tenaga penunjang (tenaga non kesehatan). Jumlah sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit pada tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut ini.

GAMBAR 3.8
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
TAHUN 2014

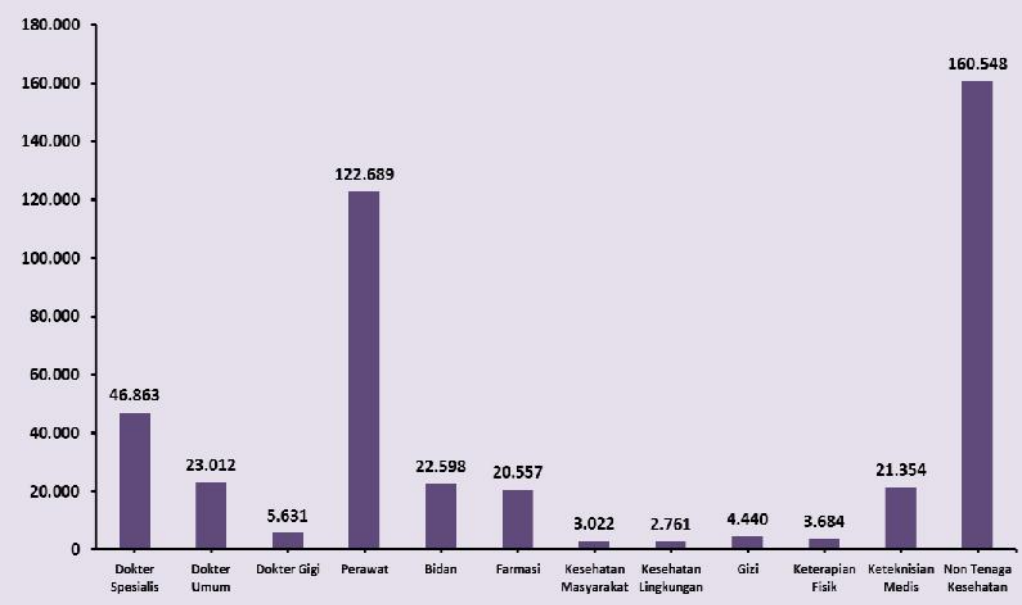

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Jumlah seluruh rumah sakit pada tahun 2014 sebanyak 2.406. Jumlah tenaga kesehatan terbanyak pada posisi perawat dan dokter spesialis. Jumlah dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit sebanyak 46.863 orang. Apabila di perbandingkan dengan jumlah rumah sakit, maka rata-rata terdapat sembilan belas dokter spesialis per rumah sakit. Jumlah dokter umum

yang bertugas di rumah sakit sebanyak 23.012 orang, dengan rata-rata sepuluh dokter umum per rumah sakit, sedangkan dokter gigi yang bertugas di rumah sakit sebanyak 5.631 orang dengan rata-rata dua dokter gigi per rumah sakit.

Jumlah perawat yang bertugas di rumah sakit sebanyak 122.689 orang, dengan rata-rata 51 perawat per rumah sakit dan bidan yang bertugas di rumah sakit sebanyak 22.598 orang, dengan rata-rata sembilan bidan per rumah sakit. Total tenaga penunjang (non tenaga kesehatan) sebanyak 160.548, dengan rata-rata 67 tenaga penunjang untuk setiap rumah sakit. Rincian lengkap jumlah sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 3.4.

B. RASIO TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan data jumlah tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan estimasi jumlah penduduk, dapat disusun rasio tenaga kesehatan di Indonesia. Jumlah tenaga kesehatan yang digunakan adalah jumlah tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan fungsinya. Hal ini dianggap lebih baik apabila dibandingkan dengan data tenaga kesehatan yang hanya mempunyai STR, karena lebih mencerminkan data tenaga yang didayagunakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan lebih mencerminkan pada lokasi tenaga kesehatan tersebut bekerja. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025, telah ditetapkan sejumlah target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2014, rasio dokter spesialis ditetapkan sebesar 10 dokter spesialis per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 40 dokter umum per 100.000 penduduk, rasio perawat sebesar 158 perawat per 100.000 penduduk dan bidan sebesar 100 bidan per 100.000 penduduk.

Gambar 3.9 menunjukkan rasio dokter spesialis di Indonesia sebesar 18,64 dokter spesialis per 100.000 penduduk, lebih tinggi dari target tahun 2014. Sebanyak 22 provinsi di Indonesia telah mencapai target rasio dokter spesialis terhadap 100.000 penduduk dan dua belas provinsi lainnya belum mencapai target rasio dokter spesialis yang telah ditetapkan. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa rasio dokter spesialis terbesar berada di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali. Rasio dokter spesialis di DKI Jakarta sebesar 69,92 per 100.000 penduduk, DI Yogyakarta sebesar per 100.000 penduduk dan Bali sebesar 32,61 per 100.000 penduduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan dokter umum untuk mencapai target pembangunan kesehatan pada tahun tertentu. Gambar 3.10 menunjukkan rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk di Indonesia.

GAMBAR 3.9
RASIO DOKTER SPESIALIS TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA
TAHUN 2014

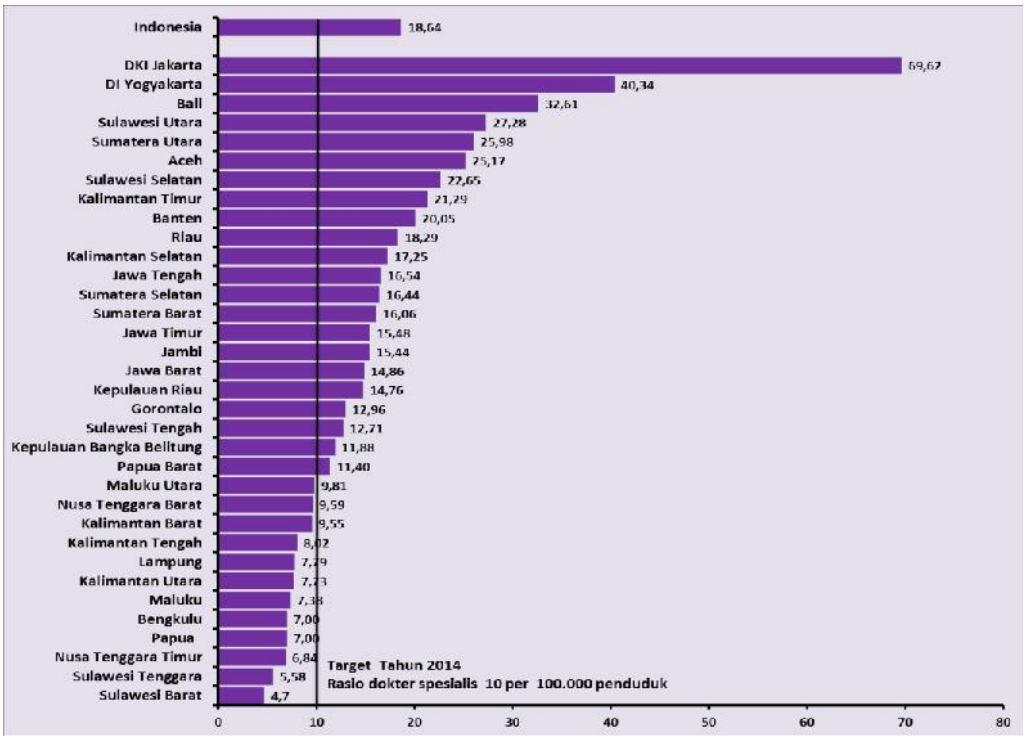

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015; Kemenkes RI, 2014

GAMBAR 3.10
RASIO DOKTER UMUM TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA
TAHUN 2014

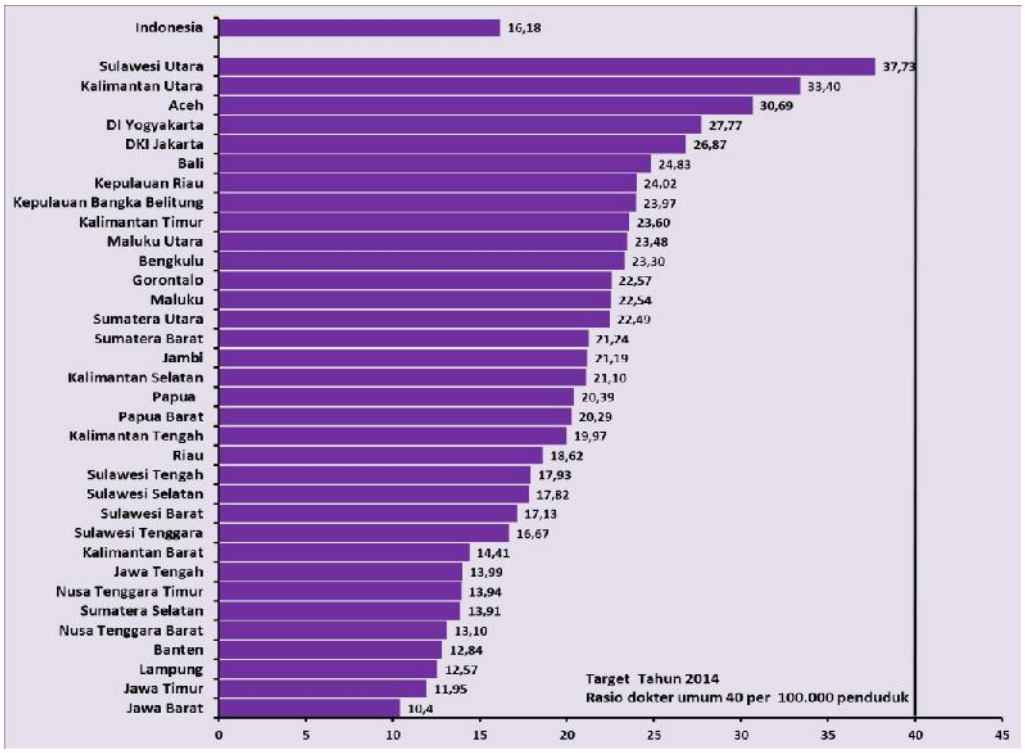

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015; Pusdatin, Kemenkes RI, 2014

Pada tahun 2014, rasio dokter umum sebesar 16,18 per 100.000 penduduk lebih rendah dari target yang telah ditetapkan, yaitu empat puluh dokter umum per 100.000 penduduk. Belum ada satupun provinsi di Indonesia yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Provinsi dengan rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan Aceh. Sedangkan rasio dokter umum per 100.000 penduduk terendah terdapat di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Lampung.

Jenis tenaga kesehatan berikutnya adalah tenaga keperawatan, yang terdiri dari tenaga perawat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rasio perawat terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan perawat untuk mencapai target pembangunan kesehatan pada tahun tertentu.

GAMBAR 3.11
RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA
TAHUN 2014

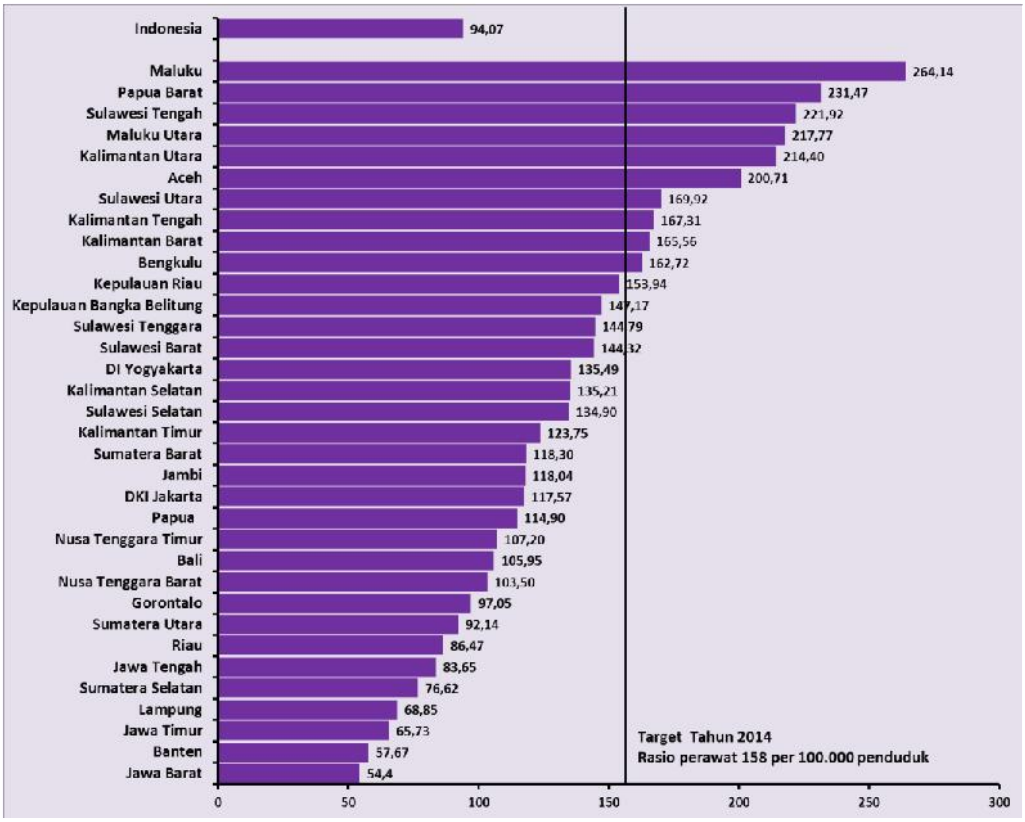

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015; Pusdatin, Kemenkes RI, 2014

Rasio perawat terhadap jumlah penduduk menurut provinsi pada tahun 2014 terlihat pada Gambar 3.11. Pada tahun 2014, rasio perawat terhadap penduduk sebesar 94,07 perawat per 100.000 penduduk, lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan.Sebanyak10 provinsi telah memenuhi target rasio perawat terhadap penduduk dan 24 provinsi lainnya belum memenuhi target.

Provinsi dengan rasio tertinggi terdapat di Maluku sebesar 264,14 perawat per 100.000 penduduk, Papua Barat sebesar 231,47 perawat per 100.000 penduduk, dan Sulawesi Tengah sebesar 221,77 perawat per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio perawat terendah

terdapat di Jawa Barat sebesar 54,4 perawat per 100.000 penduduk, Banten sebesar 57,67 perawat per 100.000 penduduk dan Jawa Timur sebesar 65,73 perawat per 100.000 penduduk.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelanggaraan Praktek Bidan, bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mengetahui ketersediaan bidan dapat digunakan rasio bidan terhadap penduduk. Rasio bidan terhadap jumlah penduduk menurut provinsi pada tahun 2014 terlihat pada Gambar 3.12 berikut ini.

GAMBAR 3.12
RASIO BIDAN TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA
TAHUN 2014

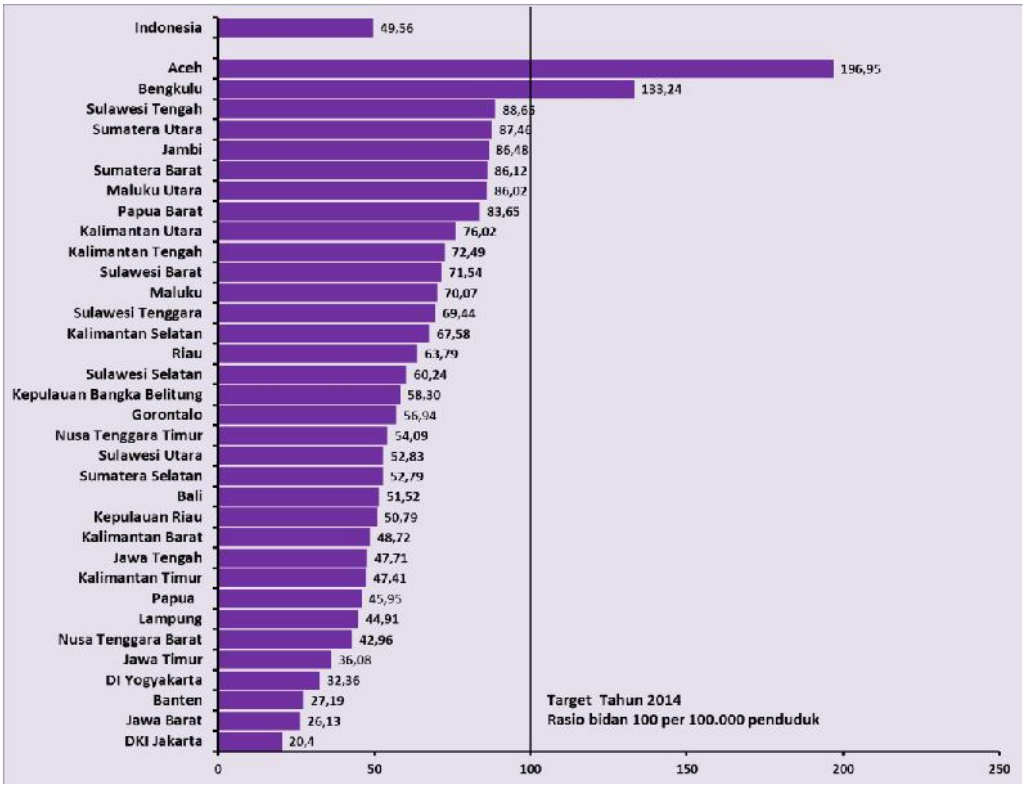

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015; Kemenkes RI, 2014

Pada tahun 2014, rasio bidan terhadap penduduk sebesar 49,56, lebih rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 100 bidan per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, baru ada dua provinsi yang telah mencapai target rasio bidan terhadap penduduk, sedangkan 32 provinsi lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Provinsi dengan rasio bidan terhadap penduduk tertinggi terdapat di Aceh sebesar 196,95 bidan per 100.000 penduduk, Bengkulu sebesar 133,24 bidan per 100.000 penduduk dan Sulawesi Tengah sebesar 88,66 bidan per 100.000 penduduk. Rasio bidan terhadap penduduk terendah terdapat di DKI Jakarta sebesar 20,4 bidan per 100.000 penduduk, Jawa Barat sebesar 26,13 bidan per 100.000 penduduk dan Banten sebesar 27,19 bidan per 100.000 penduduk.

C. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PEGAWAI TIDAK TETAP

Permasalahan tentang distribusi tenaga kesehatan masih merupakan isu yang sampai saat ini masih menjadi masalah utama dalam sistem kesehatan di Indonesia. Hal ini disebakan oleh lokasi geografis di Indonesia yang menunjukkan perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya, keadaan sosial ekonomi yang menunjukkan perbedaan cukup tinggi. Selain itu desentralisasi yang belum mampu menunjukkan hasil yang diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan pemerataan tenaga kesehatan, terutama pada daerah perbatasan, terpencil, dan sangat terpencil.

Penempatan dokter dan bidan sebagai pegawai tidak tetap diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pengangkatan dan penempatan PTT oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri kesehatan melalui kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kementerian kesehatan dan pengangkatan dan penempatan PTT oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota.

Pengangkatan dan penempatan dokter sebagai PTT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:

a. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan;
b. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil di provinsi dan kabupaten/kota yang berada dalam situasi konflik atau berpotensi rawan konflik;
c. Rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana dengan kriteria biasa;
d. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan pada wilayah kerja dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil.

Masa penugasan dokter sebagai PTT terdiri dari:

a. Satu tahun untuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil;
b. Dua tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil;
c. Tiga tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa.

Menteri dapat mengangkat kembali dokter sebagi PTT paling banyak untuk satu kali masa penugasan.

Pengangkatan dan penempatan bidan sebagai PTT hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil. Penetapan desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota. Penetapan desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil berdasarkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di desa tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidan sebagai PTT ditugaskan selama tiga tahun dan menteri dapat mengangkat kembali atau memperpanjang bidan sebagai PTT paling banyak untuk dua kali masa penugasan.

Pemenuhan tenaga kesehatan dengan status PTT terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan bidan. Konstribusi yang diberikan cukup besar pengaruhnya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Sampai dengan 31 Desember 2014 tercatat sebanyak 46.468 tenaga kesehatan PTT Pusat yang masih aktif bertugas dengan komposisi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sejumlah 57 orang, dokter umum sejumlah 3.108 orang, dokter gigi sejumlah 1.270 orang dan bidan sejumlah 42.033 orang.

GAMBAR 3.13
JUMLAH DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER TAHUN 2014

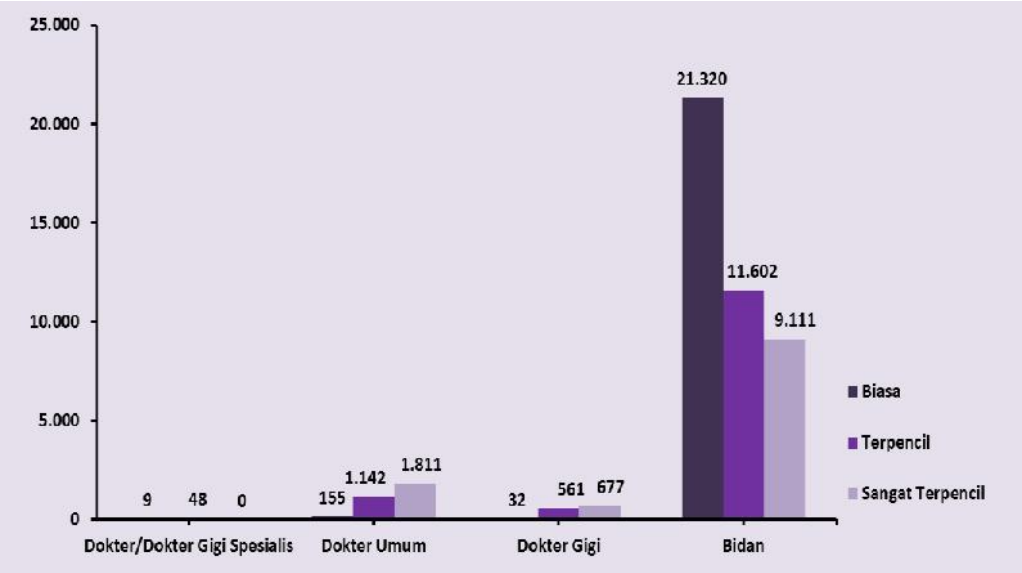

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Pada Gambar 3.13, tahun 2014 dapat dilihat jumlah tenaga PTT terutama untuk dokter umum dan dokter gigi terbesar terdapat pada daerah dengan kriteria sangat terpencil dan terpencil. Dokter PTT di di daerah sangat terpencil berjumlah 1.811 orang, daerah terpencil berjumlah 1.142 orang sedangkan dokter PTT di daerah biasa hanya 155 orang. Jumlah dokter gigi PTT aktif di daerah sangat terpencil dan terpencil juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan di daerah biasa. Jumlah dokter gigi di daerah sangat terpencil berjumlah 677 orang, daerah terpencil berjumlah 561 orang sedangkan di daerah biasa hanya berjumlah 32 orang.

Hal berbeda terjadi pada tenaga bidan PTT aktif. Jumlah bidan PTT di daerah biasa lebih besar jika dibandingkan dengan daerah terpencil atau daerah sangat terpencil. Jumlah bidan di daerah biasa berjumlah 21.320 orang, sedangkan jumlah bidan di daerah terpencil berjumlah 11.602 orang dan daerah sangat terpencil berjumlah 9.111 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter/dokter gigi spesialis PTT, dokter umum PTT, dokter gigi PTT, bidan PTT aktif menurut kriteria wilayah dan provinsi di Indonesia per 31 Desember tahun 2014 dapat dilihat di Lampiran 3.8 s.d. 3.11.

Pada tahun 2014 telah diangkat tenaga kesehatan PTT untuk daerah dengan kriteria biasa, terpencil, dan sangat terpencil sebanyak 14.582, lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 15.931 orang. Pengangkatan tenaga PTT terdiri dari dokter spesialis dan dokter gigi spesialis PTT sejumlah 59 orang, dokter umum PTT sejumlah 745 orang, dokter gigi PTT sebanyak 322 orang dan bidan PTT sejumlah 14.582 orang.

GAMBAR 3.14
JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2014

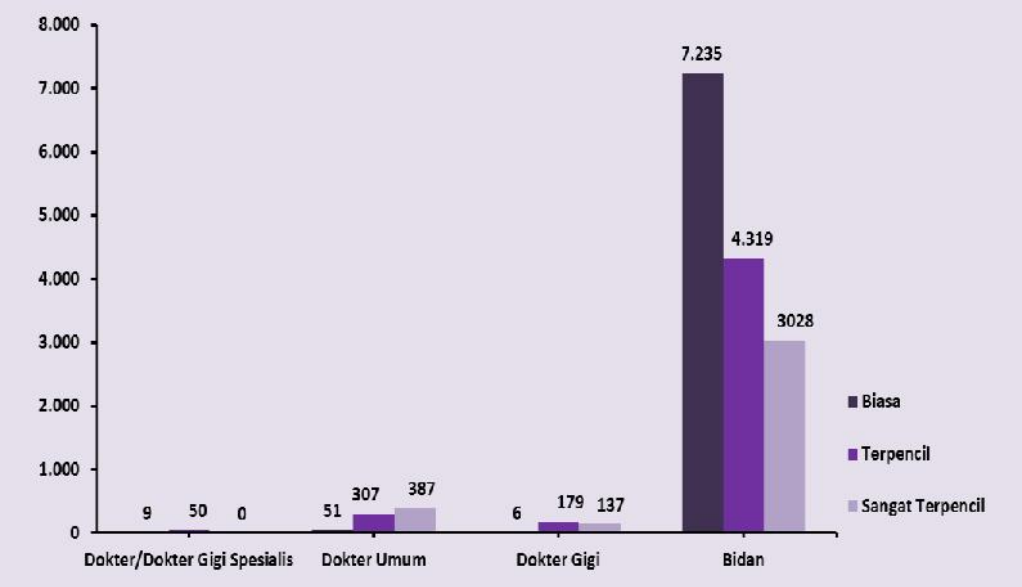

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Gambar 3.14 menunjukkan jumlah pengangkatan tenaga kesehatan PTT tenaga dokter/dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi dan bidan di daerah biasa, terpencil dan sangat terpencil pada tahun 2014. Jumlah pengangkatan dokter/dokter gigi spesialis pada daerah biasa sebesar 9 orang, pada daerah terpencil sebesar 50 orang. Jumlah pengangkatan dokter umum dan dokter gigi terbesar pada daerah sangat terpencil. Pada pengangkatan bidan, lebih banyak di daerah biasa dibandingkan dengan daerah terpencil dan sangat terpencil. Rincian lengkap mengenai jumlah pengangkatan dokter/dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi dan bidan dapat dilihat pada Lampiran 3.12 s.d. 3.15.

D. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PENUGASAN KHUSUS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, penugasan khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan serta rumah sakit kelas C dan kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Penempatan tenaga khusus di daerah yang tertinggal, yaitu daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal serta daerah yang bermasalah kesehatan, yaitu daerah kabupaten/kota yang mempunyai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dibawah rerata dan proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi dari retata atau kabupaten/kota yang memiliki masalah kesehatan khusus.

Jenis tenaga kesehatan yang dapat diangkat dalam penugasan khusus pada fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari residen dan tenaga kesehatan dengan pendidikan Diploma III. Residen merupakan dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Tenaga kesehatan dengan pendidikan diploma III terdiri dari

bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, dan analis kesehatan. Tenaga kesehatan penugasan khusus ditempatkan pada:

1. Puskesmas dan jejaringnya;
2. Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D yang telah memiliki peralatan kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi serta fasilitas lain sesuai kebutuhan medik spesialistik (tidak termasuk Rumah Sakit Bergerak);
3. Rumah Sakit yang membutuhkan jenis pelayanan medik spesialistik tertentu.

Gambar 3.15 menunjukkan tentang jumlah keberadaan aktif tenaga residen dan tenaga penugasan khusus Diploma III kesehatan pada kabupaten prioritas DBK dan DTPK.

GAMBAR 3.15
JUMLAH KEBERADAAN AKTIF TENAGA RESIDEN DAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS DIPLOMA III KESEHATAN DI KABUPATEN PRIORITAS DTPK DAN DBK PER 31 DESEMBER TAHUN 2014

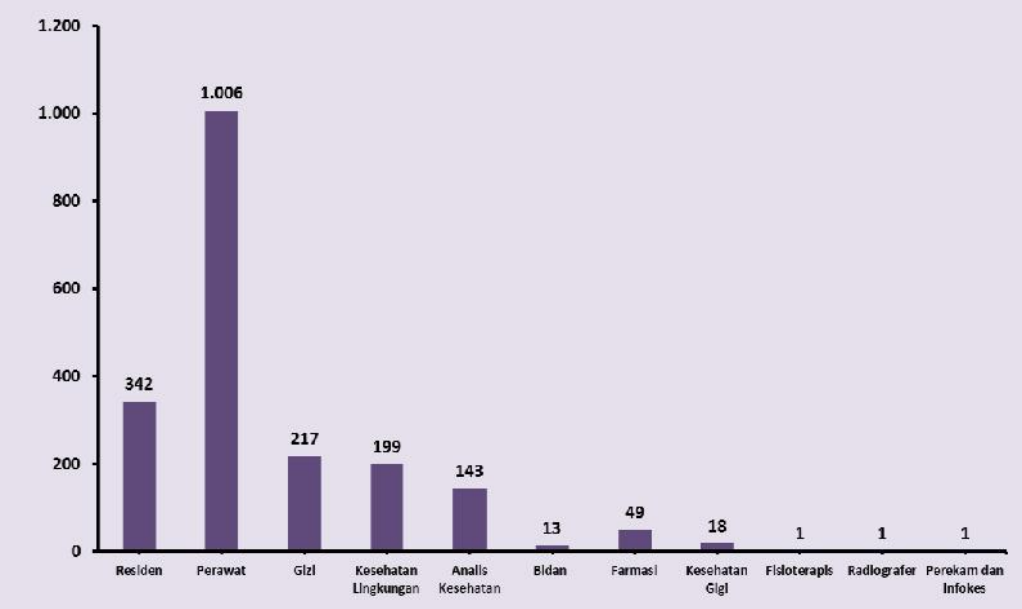

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Jumlah keberadaan aktif tenaga residen dan tenaga penugasan khusus Diploma III kesehatan di kabupaten prioritas DTPK dan DBK sampai tahun 2014 berjumlah 1.990 tenaga kesehatan, yang terdiri dari 342 residen, 1.006 perawat, 217 tenaga gizi, 199 tenaga kesehatan lingkungan, 143 analis kesehatan, 13 bidan, 49 farmasi, 18 tenaga kesehatan gigi, 1 fisioterapis, 1 radiografer dan 1 perekam dan info kesehatan. Secara lengkap, jumlah keberadaan aktif tenaga residen dan tenaga penugasan khusus di kabupaten DBK dan DTPK sampai tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 3.16.

Selama tahun 2014 telah dilakukan pengangkatan penugasan khusus sebanyak 2.404 orang tenaga kesehatan, yang terdiri dari 756 residen, 1.006 perawat, 217 tenaga gizi, 199 tenaga kesehatan lingkungan, 143 analis kesehatan, 13 bidan, 49 farmasi, 18 tenaga kesehatan gigi, 1 fisioterapis, 1 radiografer dan 1 perekam dan info kesehatan, selengkapnya pada Gambar 3.16 berikut ini:

GAMBAR 3.16
JUMLAH PENGANGKATAN TENAGA RESIDEN DAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS
D-III KESEHATAN DIKABUPATEN PRIORITAS DTPK DAN DBK TAHUN 2014

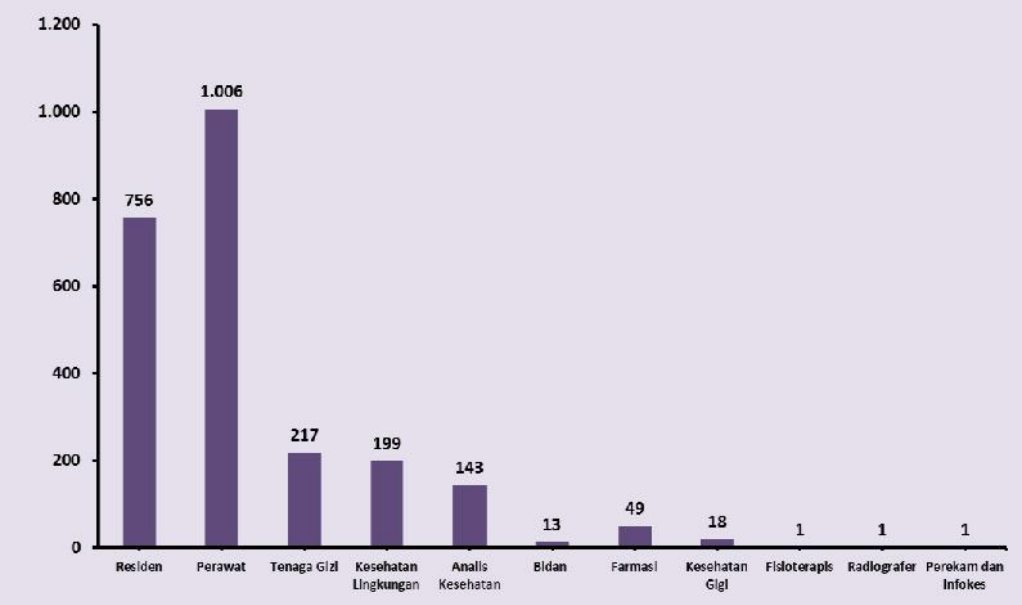

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Jumlah penugasan khusus tenaga kesehatan terbesar terdapat di Provinsi Aceh sebanyak 290 orang, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 311 orang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 255 orang dan Provinsi Aceh sebanyak 251. Sedangkan jumlah penugasan khusus tenaga kesehatan tidak terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Secara lengkap, jumlah pengangkatan tenaga residen dan tenaga penugasan khusus dapat dilihat pada Lampiran 3.17.

E. JUMLAH LULUSAN POLITEKNIK KESEHATAN

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan adalah meningkatkan jumlah produksi tenaga kesehatan dengan membentuk Politeknik Kesehatan (Poltekkes) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di bawah Badan PPSDM Kesehatan.

Peserta didik yang telah selesai menempuh pendidikan akan menjadi lulusan Poltekkes. Jumlah lulusan program Diploma III dan Diploma IV pada tahun 2014 adalah sebanyak 21.166 lulusan pada program Diploma III dan 1.964 lulusan pada porgram Diploma IV.

GAMBAR 3.17
JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLTEKKES DI INDONESIA
TAHUN 2014

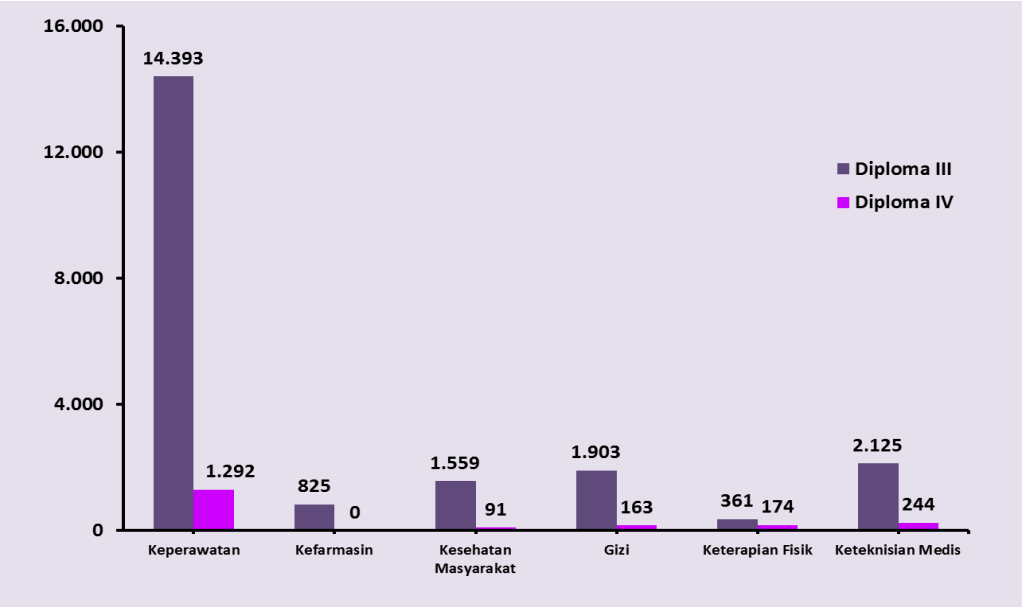

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Sesuai dengan jumlah peserta didik yang memiliki jumlah terbesar dari program studi keperawatan, hal serupa juga terjadi pada jumlah lulusan dengan jumlah lulusan terbanyak adalah program studi keperawatan sebanyak 14.393 lulusan pada program Diploma III dan 1.292 lulusan pada program Diploma IV. Jumlah lulusan terendah adalah keterapian fisik sebanyak 361 lulusan pada program Diploma III dan kesehatan masyarakat sebanyak 91 orang pada program Diploma IV.

***

IV

PEMBIAYAAN KESEHATAN

IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakarat. Salah satu sub sistem kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Secara umum sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan bersumber dari anggaran pemerintah dan pembiayaan bersumber dari anggaran masyarakat. Salah satu anggaran pemerintah disalurkan dalam bidang kesehatan, yang akan dibahas dalam bab ini.

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Alokasi anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 sebesar 50,35 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 47,58 trilyun rupiah. Besar alokasi maupun realisasi anggaran mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014, yaitu alokasi sebesar 38,64 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 35,42 trilyun rupiah. Selain peningkatan dalam hal besaran anggaran, peningkatan juga terjadi pada persentase realisasi tahun 2014 dibandingkan tahun 2013, yaitu 91,66% pada tahun 2013 menjadi 94,49% pada tahun 2014.

GAMBAR 4.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2009 – 2014

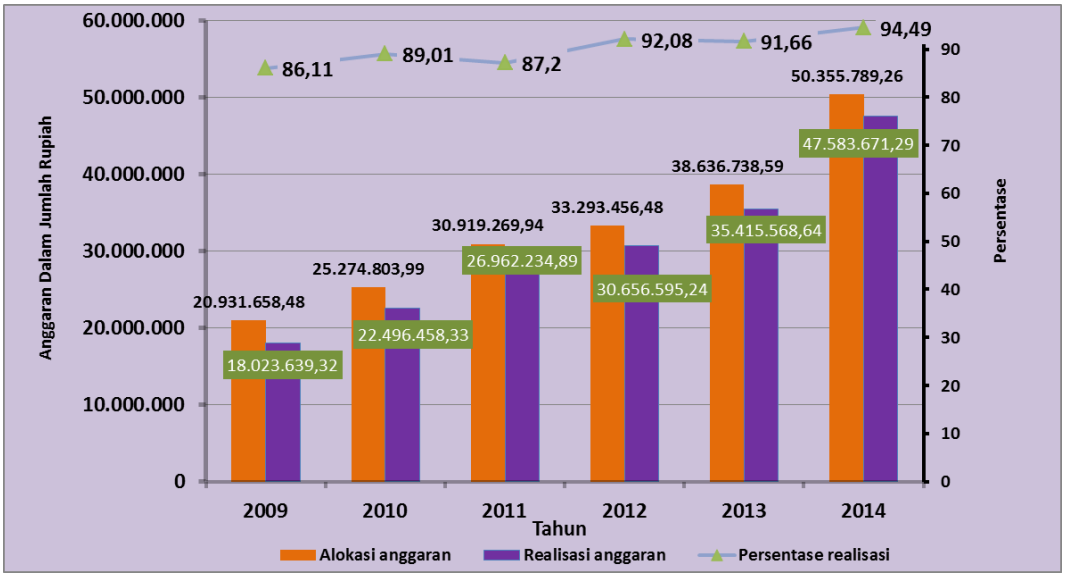

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2015

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2009 Kementerian Kesehatan RI memiliki alokasi anggaran sebesar 20,93 trilyun rupiah dengan realisasi 18,05 trilyun rupiah dan persentase realisasi sebesar 86,11%, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2014 menjadi 50,35 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 47,58 trilyun rupiah dan persentase realisasi sebesar 95,49%.

Distribusi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit kerja eselon I menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar 27,20 trilyun rupiah, sedangkan alokasi terendah untuk Inspektorat Jenderal sebesar 92,92 miliar rupiah. Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PPPL) sebesar 100,33%, sedangkan realisasi terendah adalah Inspektorat Jenderal dengan persentase realisasi sebesar 77,73%. Data dan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2014 terdapat pada Lampiran 4.1.

B. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KESEHATAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 terdapat sembilan bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dimana salah satunya adalah reformasi pembangunan kesehatan.

Pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin kesinambungan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga pembangunan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terlaksana. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.

Sesuai Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki alokasi minimal sepuluh persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji (belanja pegawai). Persentase anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi terhadap total APBD di 34 provinsi di Indonesia disajikan pada gambar 4.6.

Persentase anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi terhadap total APBD di atas termasuk dengan gaji pegawai. Pada gambar di atas terdapat tujuh provinsi dengan persentase melebihi sepuluh persen. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 ketika hanya 7 provinsi dengan persentase anggaran kesehatan di atas sepuluh persen. Tiga belas provinsi dengan persentase anggaran kesehatan di atas sepuluh persen pada tahun 2014 yaitu Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Bali, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Banten. Sedangkan 20 provinsi lainnya memiliki anggaran kesehatan pada APBD provinsinya kurang dari sepuluh persen. Data dan informasi lebih rinci mengenai APBD provinsi pada tahun 2014 terdapat pada Lampiran 4.6.

GAMBAR 4.2
PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP APBD
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2014

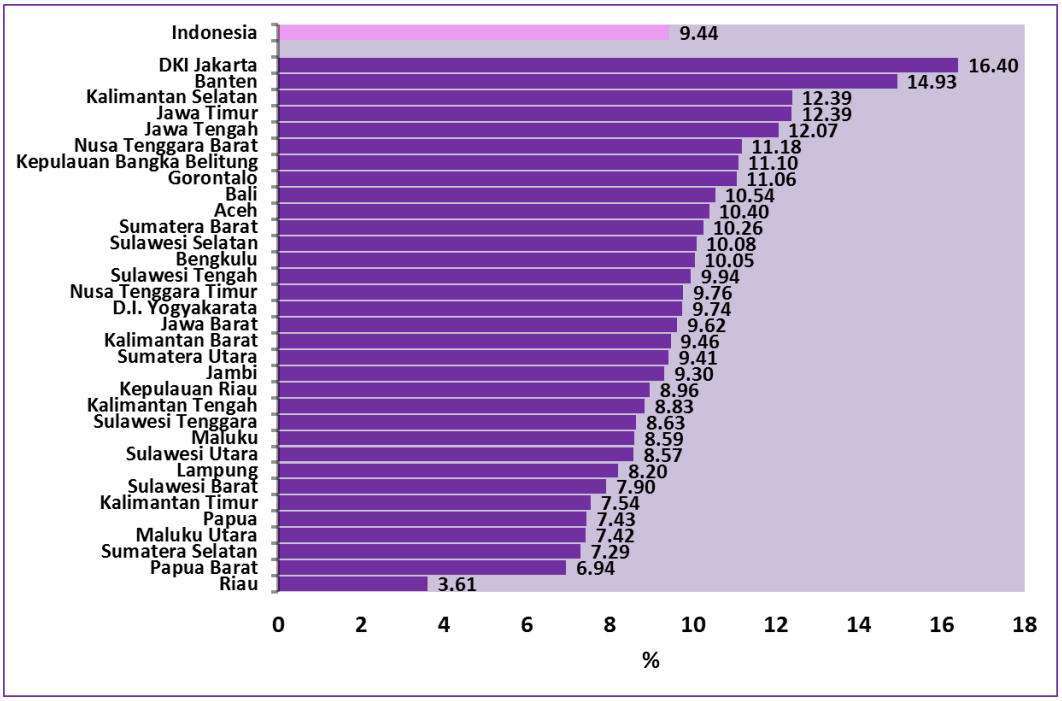

Sumber: Direktorat Ditjen Perimbangan Keuangan; Kemenkeu diolah Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemkes, Desember 2014, sumber data dari web : http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006

C. ALOKASI DAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan dan PMK No. 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah disempurnakan dengan PMK No. 248/PMK.07/2010 dalam rangka pelaksanaan pelimpahan wewenang dan penugasan kepada kepala daerah yang didanai oleh pemerintah, untuk mendukung pencapaian pembangunan yang menjadi fokus/ prioritas nasional, serta meningkatkan peran provinsi dalam kerangka *good governance* dalam mengawal pelaksanaan program K/L di daerah dan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut maka pemerintah melalui K/L mengatur pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Prinsip pendanaan dekon adalah untuk mendanai pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah di daerah, sifat kegiatan non-fisik berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan,serta pengendalian. Data dan informasi lebih rinci mengenai alokasi dan realisasi dana dekonsentrasi pada tahun 2014 terdapat pada Lampiran 4.4.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya.

Pada tahun Anggaran 2014 Anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp. 50,355,789,266,000 dari alokasi tersebut sebesar 1.82% atau senilai Rp. 913,526,447,000 dialokasikan untuk dekonsentrasi yang tersebar di 33 dinas kesehatan provinsi di seluruh Indonesia dalam enam program. Enam program tersebut adalah : (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, (2) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, (3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan, (4) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, (5) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan (6) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dana dekonsentrasi dialokasikan untuk mencapai sasaran program yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dan daerah dengan memperhatikan menu wajib dan pilihan.

Untuk alokasi dana Tugas Pembantuan tahun (TP) 2014 Kementerian Kesehatan mengalokasikan dana sebesar 6.76% atau Rp. 3,399,563,200,000 yang tersebar di berbagai daerah dalam 3 program yaitu : (1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, (2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan, dan (3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Alokasi dana dekonsentrasi yang ada di Kementerian Kesehatan didistribusikan ke seluruh dinas kesehatan provinsi di Indonesia.

Realisasi dana dekonsentrasi kesehatan menurut provinsi tahun 2014 disajikan pada gambar berikut:

GAMBAR 4.3
REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2014

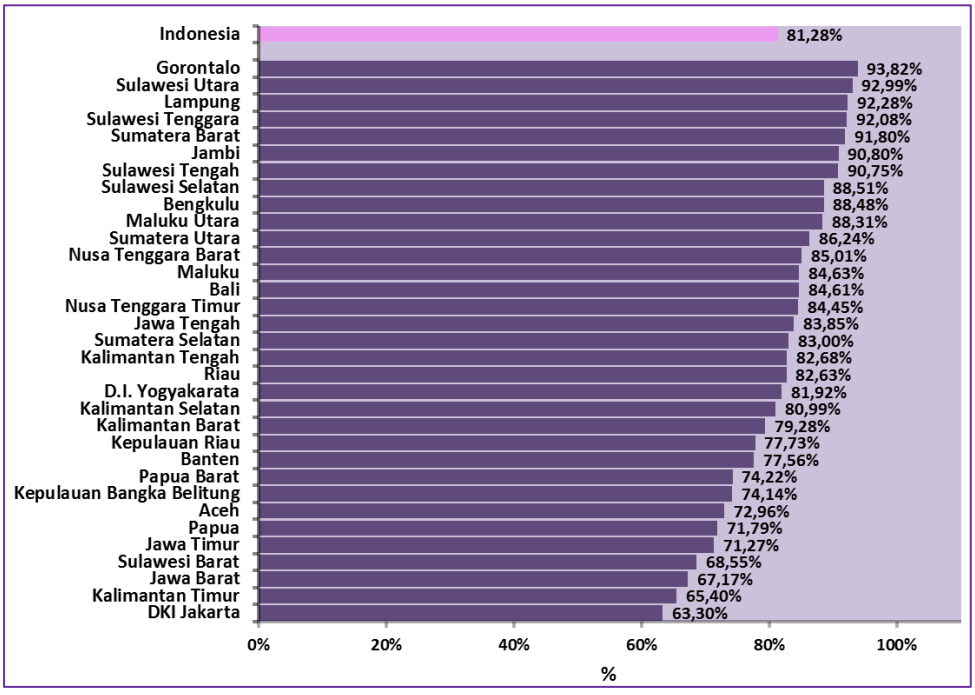

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2015

Berdasarkan grafik di atas, realisasi dana dekonsentrasi paling rendah pada Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 63,30%. Sedangkan propinsi yang realisasinya paling tinggi yaitu Gorontalo sebesar 93,82%. Hal ini perlu dilakukan pengkajian serta *reward and punishment*, agar daerah yang tidak mampu menyerap/ merealisasikan dana dekonsentrasi diberikan *punishment*, misal pengurangan anggaran ditahun berikutnya begitu pula sebaliknya diberikan *reward* untuk daerah yang mampu merealisasikan anggaran tinggi.

Realisasi dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kesehatan sebesar Rp. 2.832.639.001.830 dari total alokasi Rp. 3.399.563.200.000. Alokasi dana TP yang ada di Kementerian Kesehatan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota yang ada di seluruh provinsi di Indonesia.

GAMBAR 4.4
REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN KESEHATAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2014

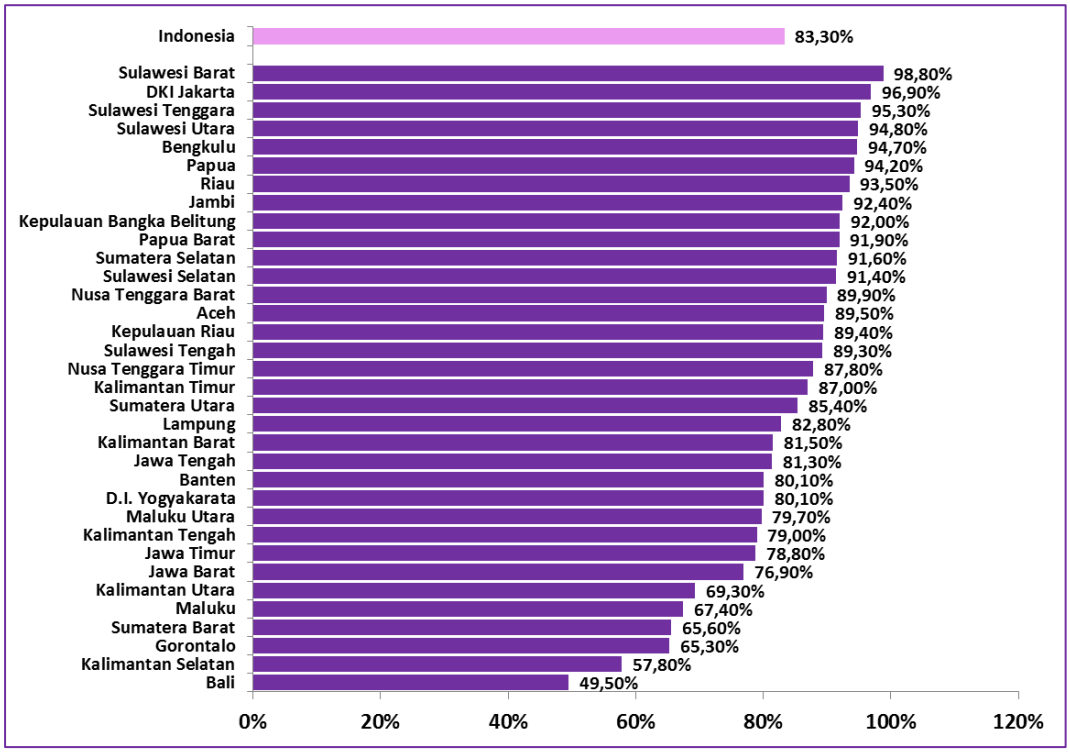

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2015

Dari data di atas realisasi persentase dana TP tertinggi yaitu provinsi Sulawesi Barat sebesar 98,80% sedangkan realisasi terendah terdapat pada provinsi Bali. Hal ini dikarenakan DIPA khusus dana TP terbitnya di akhir tahun (triwulan ke IV) yaitu pada akhir bulan Oktober. Selain itu, pada beberapa provinsi sering terjadi kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif yang membuat satker harus melakukan revisi baik di Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Kanwil Provinsi maupun Ditjen Anggaran (DJA) Pusat. Belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pengelola/pelaksana kegiatan oleh KPA, proses lelang yang membutuhkan waktu yang cukup lama, dan ketersediaan barang (pengadaan alat kesehatan) yang belum *ready stock* pada saat pelaksanaan tender mengakibatkan realisasi penyerapan dana TP ini menjadi rendah. Data dan informasi lebih rinci mengenai alokasi dan realisasi dana TP pada tahun 2014 terdapat pada Lampiran 4.5.

D. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi WHA ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara mengembangkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes dan PT Jamsostek yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah pusat memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan pemerintah daerah dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi sehingga biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program JKN.

JKN diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Manfaat JKN terdiri atas dua jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulans. Manfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan,dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter.

Pelaksanaan program JKN ini meliputi penyelenggaraan, peserta dan kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan, badan penyelenggara dan hubungan antar lembaga, monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan penanganan keluhan.

Menurut PMK No.28 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN, peserta dalam program JKN meliputi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah. Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri atas dua kelompok yaitu: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta PBI jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Pada tahap awal kepersertaan program JKN yang dimulai 1 Januari 2014 terdiri dari peserta PBI JKN (pengalihan dari program Jamkesmas), anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya, anggota POLRI dan PNS di lingkungan

POLRI, dan anggota keluarganya, peserta asuransi kesehatan sosial dari PT. Askes (Persero) beserta anggota keluarganya, peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari PT. (Persero) Jamsostek dan anggota keluarganya, peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang telah berintegrasi dan peserta mandiri (pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah). Tahap selanjutnya sampai dengan tahun 2019 seluruh penduduk menjadi peserta JKN.

Sampai dengan Desember 2014 kepersertaan program JKN berjumlah 133.423.653 peserta yang terdiri dari peserta PBI yang berjumlah 95.167.229 dan peserta non PBI berjumlah 38.256.424 peserta. Peserta PBI terdiri dari peserta dengan iuran bersumber dari APBN berjumlah 86.400.000 peserta dan yang bersumber dari ABPD berjumlah 8.767.229 peserta. Sedangkan peserta non PBI terdiri atas pekerja penerima upah berjumlah 24.327.149 peserta, pekerja bukan penerima upah berjumlah 9.052.859 peserta, dan bukan pekerja berjumlah 4.876.416 peserta.

GAMBAR 4.5
CAKUPAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2014

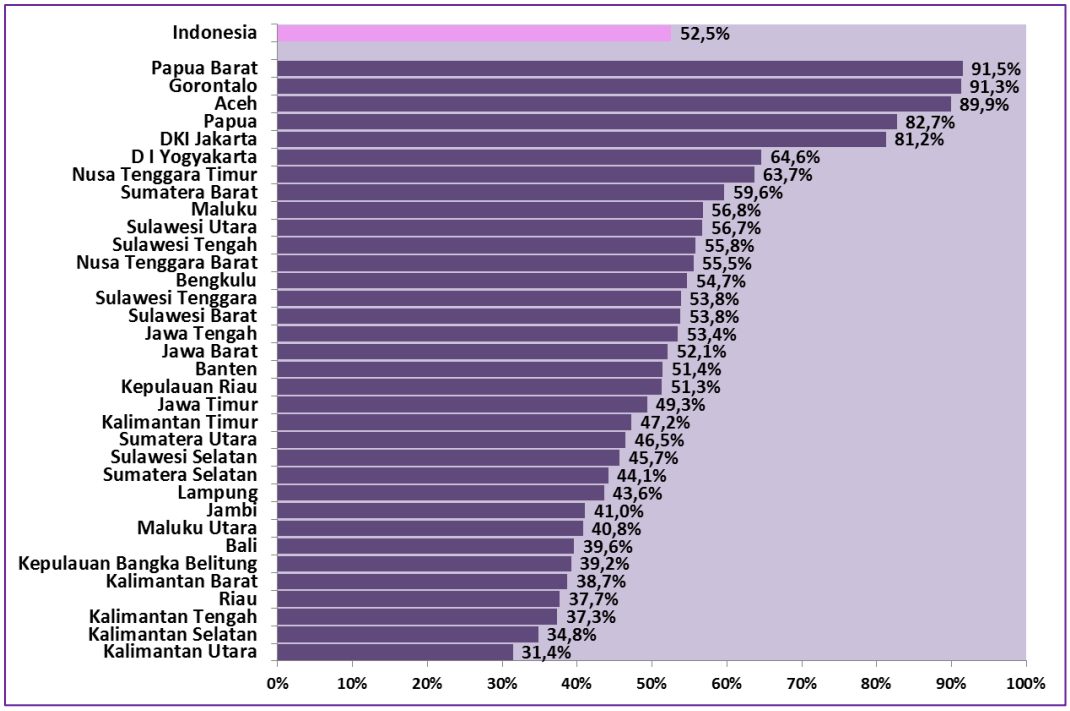

Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Dari gambar diatas diketahui cakupan kepersertaan JKN adalah sebesar 52,5%. Provinsi dengan cakupan kepesertaan tertinggi adalah Papua Barat dengan 91,5%. Sedangkan provinsi dengan cakupan kepesertaan terendah adalah Kalimantan Utara dengan 31,4%. Data dan informasi rinci mengenai cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan pada tahun 2014 terdapat pada lampiran 4.8.

Setiap peserta JKN mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi: pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL); pelayanan gawat darurat; dan pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.

Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari

pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas. Gambar berikut ini menyajikan jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

GAMBAR 4.6
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER DESEMBER 2014

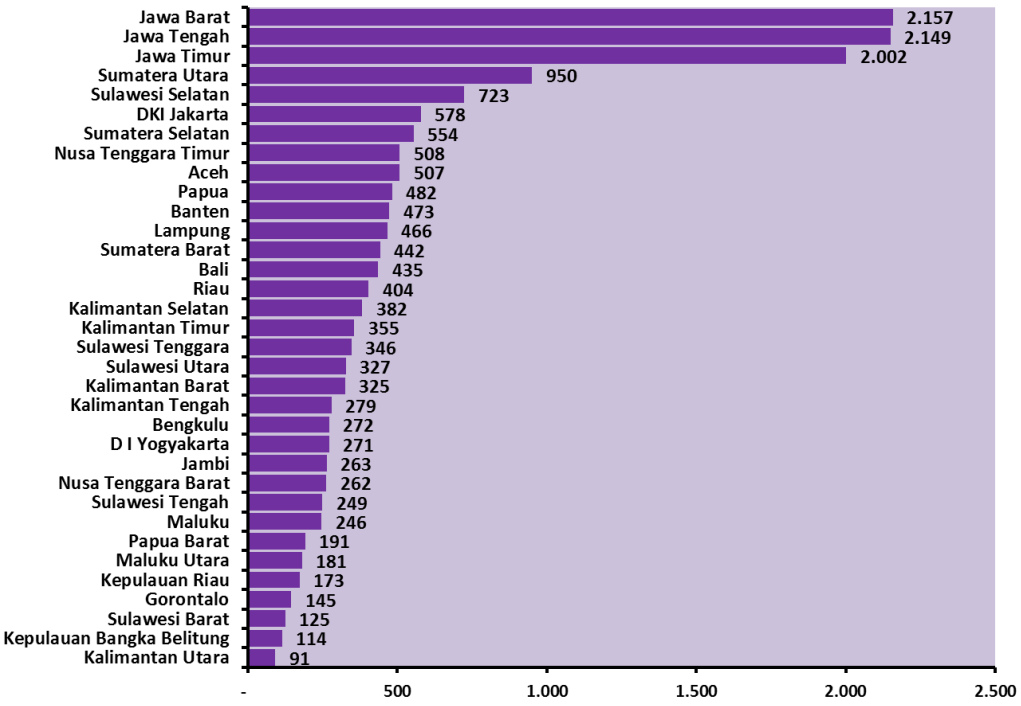

Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Dari gambar diatas diketahui jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan tertinggi ada pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 2157. Sedangkan jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan terendah berada di provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 91. Data dan informasi mengenai FKTP yang bekerja sama dengan BPJS pada tahun 2014 terdapat pada Lampiran 4.9.

GAMBAR 4.7
JUMLAH FKTP DAN JUMLAH FKRTL YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER DESEMBER 2014

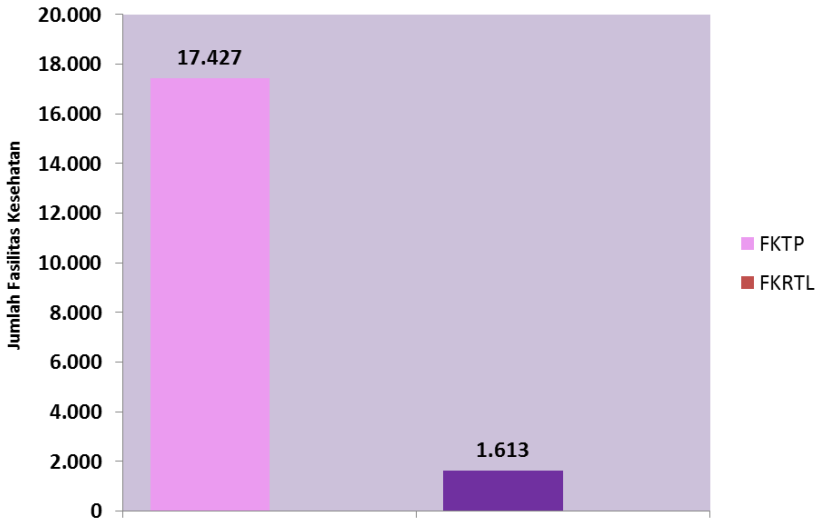

Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah FKTP yang bekerja sama dengan FKTP sebesar 17.427, sedangkan jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS sebesar 1.613.

GAMBAR 4.8
PERSENTASE JENIS FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER DESEMBER 2014

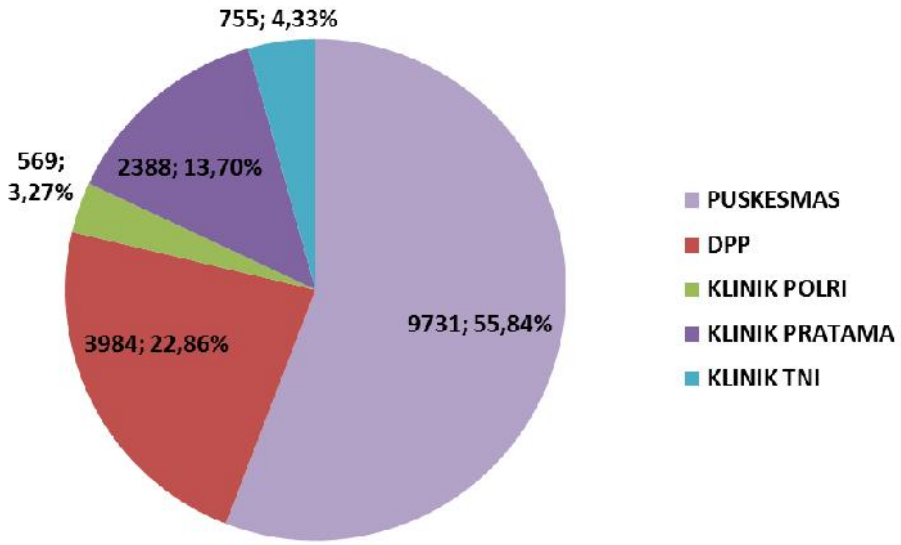

Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Dari gambar di atas diketahui jenis FKTP yang paling banyak bekerja sama dengan BPJS per Desember 2015 adalah Puskesmas yakni berjumlah 9.731, kemudian diikuti oleh Dokter

Praktik Perorangan (DPP) sebanyak 3.984. Lalu klinik TNI sejumlah 755, dan yang terendah adalah klinik TNI sejumlah 569.

FKRTL penerima rujukan wajib merujuk kembali peserta JKN disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang merujuk. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang bekerja sama dengan BPJS di Indonesia disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 4.9
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL) YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER DESEMBER 2014

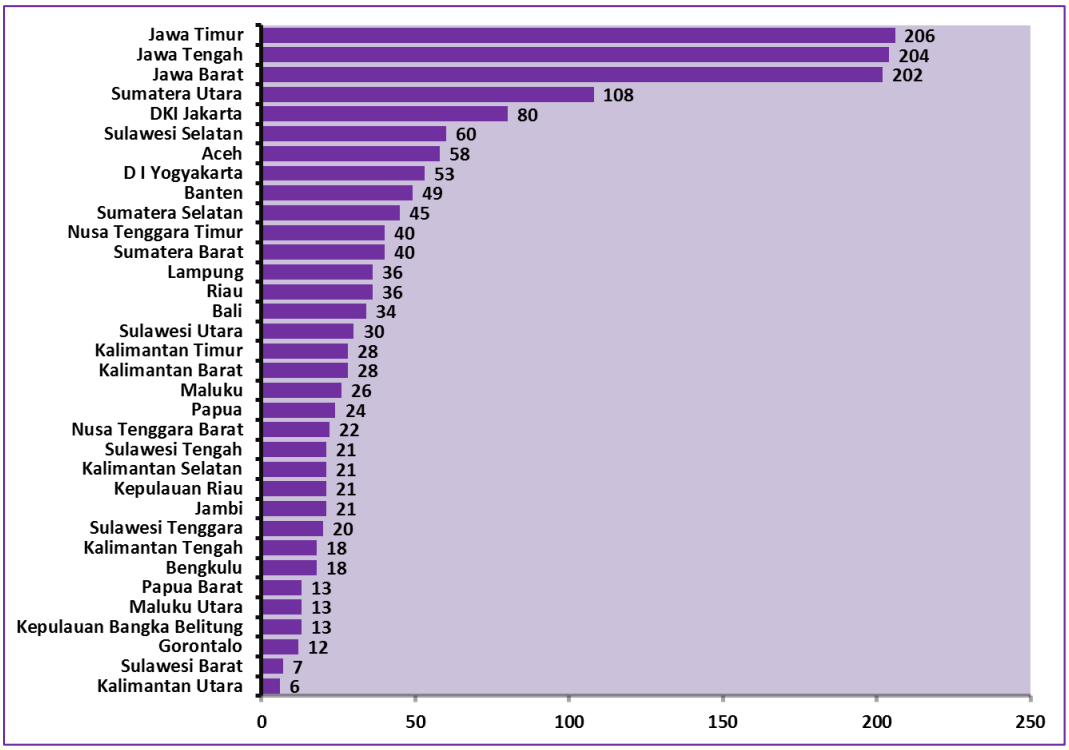

Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Dari gambar diatas diketahui jumlah FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan tertinggi ada pada Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 206. Sedangkan jumlah FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan yang terendah berada di provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 6. Data dan informasi mengenai FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS pada tahun 2014 terdapat pada Lampiran 4.10.

Dari gambar diatas diketahui FKRTL yang paling banyak bekerja sama dengan BPJS per Desember 2015 adalah rumah sakit swasta yakni berjumlah 46,44%, sedangkan jenis FKRTL yang paling sedikit bekerja sama dengan BPJS adalah rumah sakit Tipe A.

GAMBAR 4.10
PERSENTASE JENIS FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL)
YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
PER DESEMBER 2014

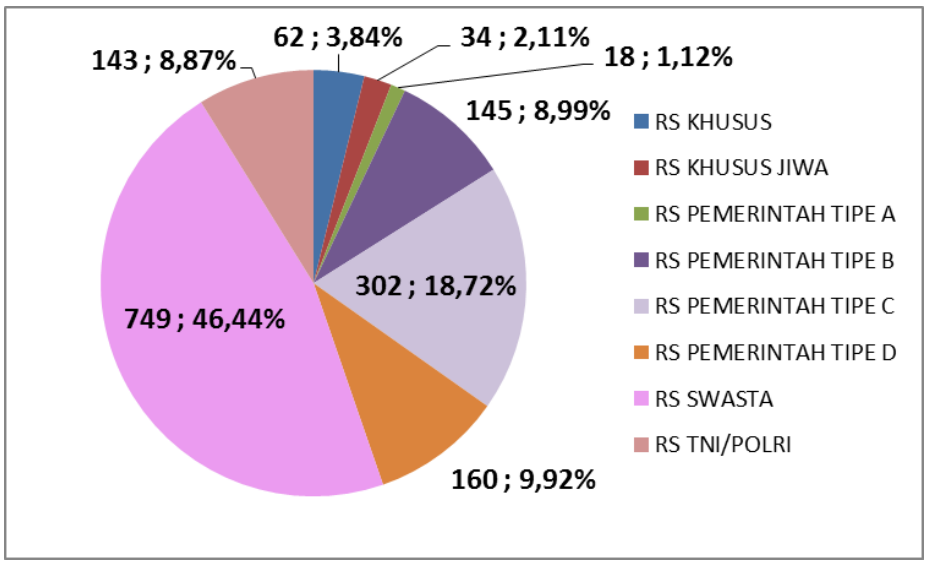

Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Seperti misalnya untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif), peserta JKN akan mendapatkan pelayanan: penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat; imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), difteri pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak; keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi; skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu, jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

E. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pencapaian MDGs bidang kesehatan tahun 2015, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme Tugas Pembantuan. Selain itu diharapkan dengan bantuan ini dapat meningkatkan kualitas manajemen puskesmas, terutama dalam perencanaan tingkat puskesmas dan lokakarya mini puskesmas, meningkatkan upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh puskesmas dan jaringannya serta poskesdes dan posyandu.

Pemanfaatan dana BOK difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promotif dan preventif meliputi KIA, KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, dan upaya kesehatan lain sesuai risiko dan masalah utama kesehatan di wilayah setempat dengan tetap mengacu pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan serta target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015.

Pada proses pelaksanaan, penyaluran dana BOK melalui Tugas Pembantuan telah dilakukan berbagai upaya penyempurnaan. Realisasi pemanfaatan dana BOK pada tahun 2014 sebesar Rp 1.147.963.867.391 dari alokasi sebesar Rp 1.171.688.390.000 dengan persentase realisasi 97,98%. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 98,45%.

GAMBAR 4.11
PERSENTASE PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

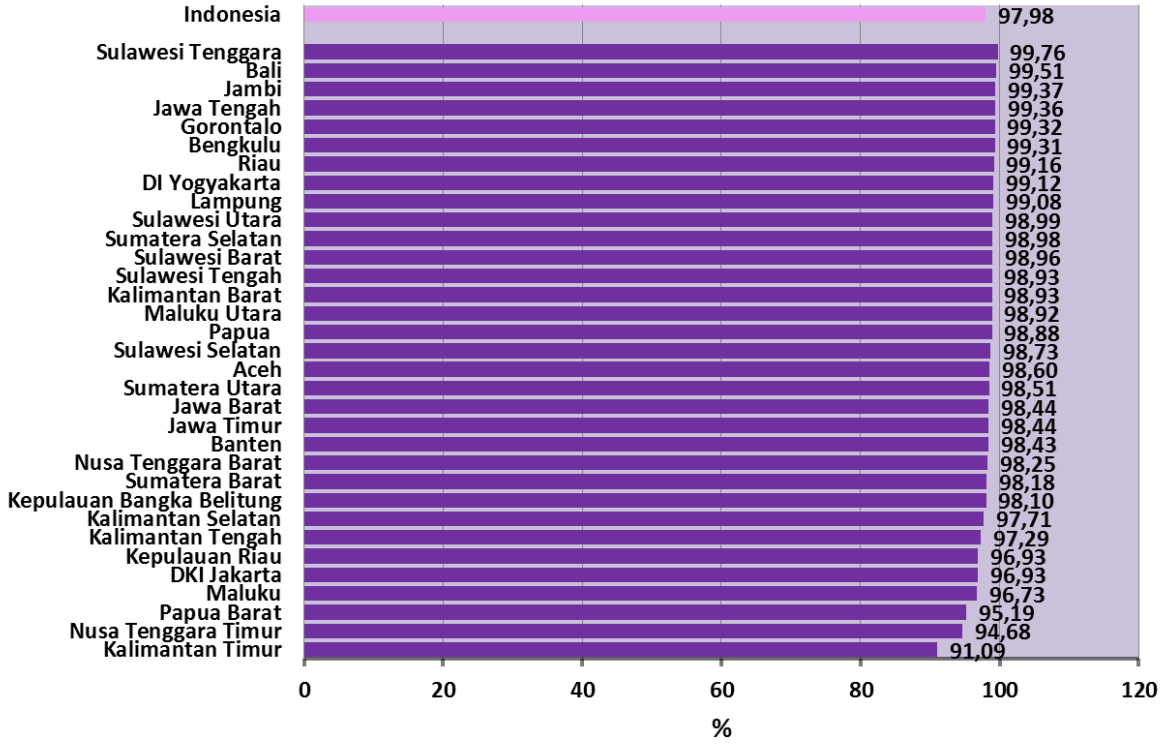

Sumber : Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Dari gambar grafik diatas dapat diketahui provinsi yang memiliki penyerapan dana BOK tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan angka 99,76% dan Provinsi Kalimantan Timur memiliki penyerapan terendah sebesar 91,09%. Pada tahun 2014, terdapat 8 provinsi dengan realisasi lebih rendah dari persentase penyerapan nasional. Data dan informasi mengenai alokasi serta realisasi dana BOK menurut provinsi tahun 2013 terdapat pada Lampiran 4.7.

Tahun 2014 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014 dimana BOK merupakan salah satu indikator Kementerian Kesehatan untuk penilaian pembangunan kesehatan. BOK sebagai suplemen pembiayaan operasional puskesmas diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian indikator pembangunan kesehatan secara nasional melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas. Dinas kesehatan provinsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan juga memiliki peran serta yaitu melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan BOK di kabupaten/kota. Dengan kehadiran BOK diharapkan petugas kesehatan/kader kesehatan tidak lagi mengalami kendala dalam melakukan kegiatan untuk mendekatkan akses kesehatan pada masyarakat.

BOK tidak merupakan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di puskesmas dan jaringannya, namun hanya dana tambahan yang bersifat bantuan. Pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana operasional untuk puskesmas.

BOK tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp. 1.171.688.390.000 untuk 9655 Puskesmas, 500 kabupaten/kota (495 satuan kerja). Mekanisme penyaluran dana BOK tahun 2014 masih tetap menggunakan mekanisme Tugas Pembantuan.

Dana APBN Kementerian Kesehatan, termasuk Dana BOK, baru bisa digunakan setelah tanggal 13 Februari 2014, karena DIPA Kementerian Kesehatan baru disetujui DPR pada tanggal tersebut, sehingga pencairan dana BOK baru dilakukan setelah itu. Pencairan dana BOK pada bulan Februari baru sebesar 0,15%. Pencairan dana BOK meningkat mulai bulan April sebesar 11,58% dan terus meningkat cukup hingga Desember. Namun sampai dengan triwulan 3 masih terdapat 6 satker yang belum menyerap dana BOK. Berdasarkan data SAI per 18 Februari 2015, penyerapan dana BOK Tahun 2014 sebesar 97,98 % (Rp. 1.147.963.867.391).

BOK berkontribusi dalam peningkatan kinerja petugas kesehatan di Puskesmas dalam pelaksanaan program bersifat promotif dan preventif terutama kegiatan operasional di lapangan. Sebagian besar dana BOK di puskesmas digunakan untuk mendukung program KIA, diikuti dengan program Gizi, Promosi Kesehatan, Imunisasi dan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Sesuai dengan Petunjuk Teknis BOK Tahun 2014, dana BOK minimal 60% digunakan untuk mendukung program kesehatan prioritas nasional khususnya target MDGs. Hasil evaluasi tahun 2014 secara umum terjadi peningkatan capaian target indikator program, khususnya untuk Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Pengendalian Penyakit (HIV AIDS,TB dan Malaria) serta Kesehatan Lingkungan (khususnya sanitasi). Hasil evaluasi di beberapa kabupaten juga menunjukkan adanya peningkatan cakupan program dibandingkan tahun sebelumnya.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan BOK adalah kurangnya jumlah tenaga keuangan dan kemampuan petugas puskesmas dalam menyusun pertanggung jawaban keuangan, kurangnya motivasi tim pengelola Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kurangnya koordinasi antar program di Dinkes dalam melakukan verifikasi POA dan pertanggung jawaban keuangan, kualitas POA yang disusun Puskesmas masih belum optimal. Permasalahan program terutama adalah jumlah, distribusi dan kualitas SDM kesehatan; dan kurangnya sarana prasarana serta alat kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program. Selain itu yang harus menjadi perhatian adalah kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan dana operasional program kesehatan di puskesmas. Umumnya puskesmas, mengalami pengurangan dana operasional sejak adanya BOK.

Pengaruh dana BOK terhadap cakupan program peningkatan kesehatan dapat dilihat berdasarkan data capaian program yang diberikan dinas kesehatan kab/kota dari tahun 2013 sampai 2014. Tampak peningkatan setelah adanya kontribusi dana BOK, terutama program pelayanan kesehatan dasar, misalnya Kota Cirebon. Berdasarkan data capaian program untuk indikator cakupan KN Lengkap 90,21% menjadi 93,83%; kunjungan bumil (K4) mengalami peningkatan dari 89,38% (tahun 2013) menjadi 90,51% (tahun 2014). Kabupaten Lampung Utara capaian K4 pada tahun 80,25% menjadi 84,33%. Kab Lampung Tengah KN Lengkap capaian 88,67% pada tahun 2013 menjadi 95,33% pada tahun 2014.

Berdasarkan masukan daerah pada saat monitoring evaluasi permasalahan dalam pelaksanaan BOK dapat diatasi dengan 3 kata kunci yaitu : **PROAKTIF, VERIFIKASI** lebih cepat, **KOORDINASI** antara KPPN, dinas kesehatan, puskesmas baik dari segi program maupun keuangan.

***

V

KESEHATAN KELUARGA

V

KESEHATAN KELUARGA

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga, pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, masih menurut peraturan pemerintah tersebut, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri juga merupakan salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas.

Keluarga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mempengaruhi status kesehatan anggotanya. Diantara fungsi keluarga dalam tatanan masyarakat yaitu memenuhi kebutuhan gizi dan merawat serta melindungi kesehatan para anggotanya. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mengoptimalkan pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya, oleh karena keadaan kondisi kesehatan salah satu anggota keluarga dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya.

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan.

A. KESEHATAN IBU

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan ibu pada suatu wilayah, salah satunya yaitu angka kematian ibu (AKI). AKI merupakan salah satu indikator yang peka terhadap kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara–negara tetangga di Kawasan ASEAN. Pada tahun 2007, ketika AKI di Indonesia mencapai 228, AKI di Singapura hanya 6 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 33 per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 112 per 100.000 kelahiran hidup, serta Malaysia dan Vietnam sama-sama mencapai 160 per 100.000 kelahiran hidup. Tren mengenai AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga 2012 hasil SDKI dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut.

GAMBAR 5.1
ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA
TAHUN 1991 – 2012

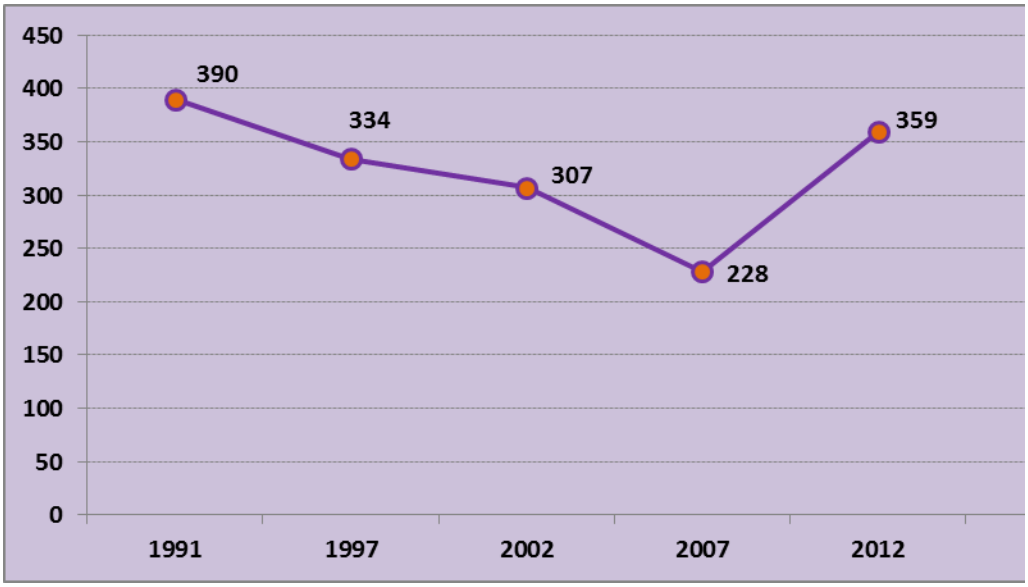

Sumber: BPS, SDKI 1991-2012

Dari Gambar 5.1 tersebut dapat dilihat bahwa AKI di Indonesia sejak tahun 1991 hingga 2007 mengalami penurunan dari 390 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup. Pemerintah sejak tahun 1990 telah melakukan upaya strategis dalam upaya menekan AKI dengan pendekatan *safe motherhood* yaitu memastikan semua wanita mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sehingga selamat dan sehat selama kehamilan dan persalinannya. Di Indonesia, *Safe Motherhood Initiative* ditindaklanjuti dengan peluncuran program Gerakan Sayang Ibu di tahun 1996 oleh presiden yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan disamping sektor kesehatan. Salah satu program utama yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu adalah penempatan bidan di tingkat desa secara besar-besaran yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir ke masyarakat. Pada tahun 2000 Kementerian Kesehatan RI memperkuat strategi intervensi sektor kesehatan untuk mengatasi kematian ibu dengan mencanangkan strategi *Making Pregnancy Safer*.

Namun, pada tahun 2012 SDKI kembali mencatat kenaikan AKI yang signifikan, yakni dari 228 menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu, pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS) dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Program ini dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi tersebut dikarenakan 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Sehingga dengan menurunkan angka kematian ibu di enam provinsi tersebut diharapkan akan dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara signifikan.

Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal melalui program EMAS dilakukan dengan cara:

- Meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 rumah sakit (PONEK) dan 300 puskesmas/balkesmas (PONED).
- Memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit.

Selain itu, pemerintah bersama masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjamin setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, memperoleh cuti hamil dan melahirkan, serta akses terhadap keluarga berencana. Di samping itu, pentingnya melakukan intervensi lebih ke hulu, yakni kepada kelompok remaja dan dewasa muda dalam upaya percepatan penurunan AKI.

Upaya pelayanan kesehatan ibu meliputi: (1) Pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin, (3) Pelayanan kesehatan ibu nifas, (4) Pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan, dan (5) Pelayanan kontrasepsi.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya empat kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Pelayanan antenatal yang dilakukan diupayakan memenuhi standar kualitas, yaitu:

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;
2. Pengukuran tekanan darah;
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA);
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi;
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
7. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);
8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana);
9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya); dan
10. Tatalaksana kasus.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Gambaran kecenderungan cakupan K1 dan K4 sejak tahun 2005 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 5.2.

GAMBAR 5.2
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 DI INDONESIA
TAHUN 2005 – 2014

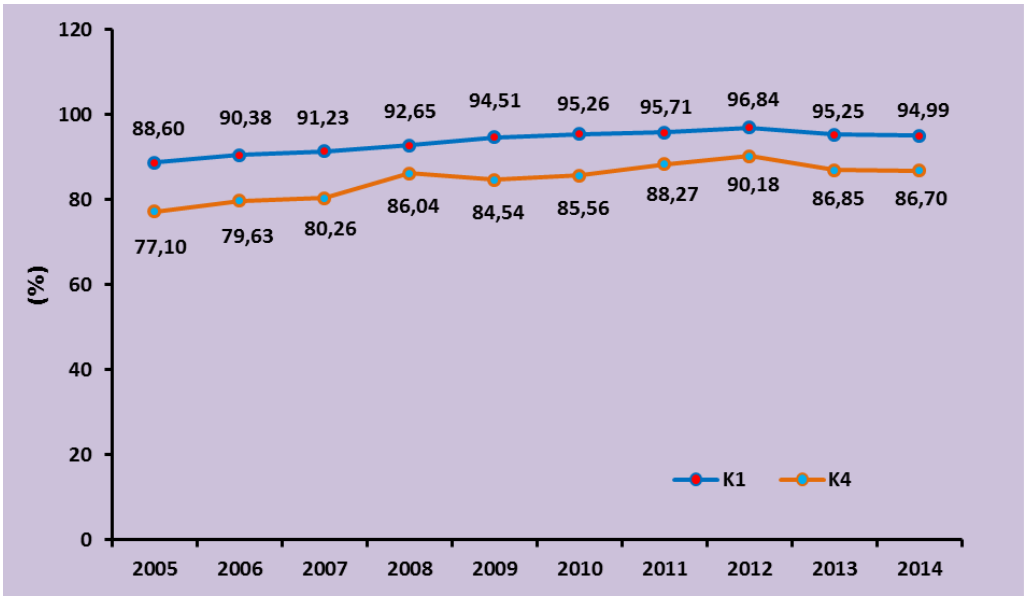

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Pada Gambar 5.2 terlihat bahwa secara umum cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 mengalami kenaikan. Cakupan K1 dan K4 yang secara umum mengalami kenaikan tersebut menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa kenaikan cakupan K1 dari tahun ke tahun relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan cakupan K4. Cakupan K1 hampir selalu mengalami peningkatan, kecuali pada dua tahun terakhir. Hal itu sedikit berbeda dengan cakupan K4 yang tidak selalu mengalami kenaikan, meski selama kurun waktu 10 tahun terakhir tetap memiliki kecenderungan meningkat.

Secara nasional, indikator kinerja cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 2014 belum mencapai target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan di tahun yang sama, yakni sebesar 95%. Meski demikian, terdapat dua provinsi yang telah mencapai target tersebut. Kedua provinsi tersebut yaitu Sulawesi Utara dan DKI Jakarta. Dari Gambar 5.3 juga dapat diketahui bahwa terdapat tiga provinsi yang memiliki cakupan pelayanan ibu hamil K4 yang kurang dari 50%, yakni Papua Barat (39,74%), Maluku (47,87%), dan Papua (49,67%). Secara nasional, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 2014 sebesar 86,70%. Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 2014 dari masing-masing provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.3 berikut.

GAMBAR 5.3
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI
TAHUN 2014

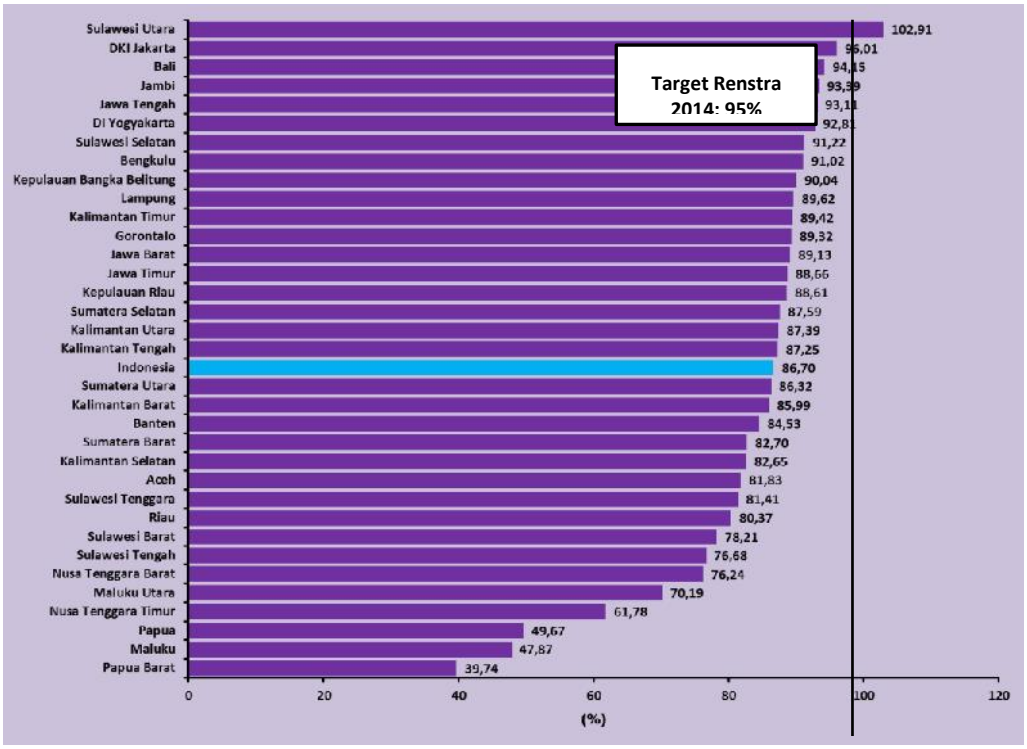

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk untuk meningkatkan cakupan pelayanan antenatal. Dari segi sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga bulan Desember 2014, tercatat terdapat 9.731 puskesmas di seluruh Indonesia dengan rasio 1,08 puskesmas per 30.000 penduduk. Dengan demikian, rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk sudah mencapai rasio ideal 1:30.000 penduduk, namun penyebarannya masih belum merata. Demikian pula dengan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) seperti poskesdes dan posyandu. Sampai dengan tahun 2014, tercatat terdapat 55.517 poskesdes yang beroperasi dan 289.635 posyandu di Indonesia.

Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal juga makin diperkuat dengan adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010 dan diluncurkannya Jaminan Persalinan (Jampersal) sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, dimana keduanya saling bersinergi dalam memperkuat upaya penurunan AKI di Indonesia. Selain digunakan untuk kegiatan di dalam puskesmas, BOK juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan luar gedung, seperti pendataan, pelayanan di posyandu, kunjungan rumah, *sweeping* kasus *drop out*, penyuluhan, pelaksanaan kelas ibu hamil, serta penguatan kemitraan bidan dan dukun. Sementara itu, Jampersal mendukung paket pelayanan antenatal, termasuk yang dilakukan pada saat kunjungan rumah atau *sweeping*, baik pada kehamilan normal maupun kehamilan dengan risiko tinggi.

Semakin kuatnya kerja sama dan sinergi berbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk sektor swasta, diharapkan dapat mendorong tercapainya target cakupan pelayanan antenatal yang berkualitas dan sekaligus menurunkan AKI di Indonesia. Data kesehatan mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.1.

Pemberian zat besi pada ibu hamil merupakan salah satu syarat pelayanan kesehatan K4 pada ibu hamil. Dimana jumlah suplemen zat besi yang diberikan selama kehamilan ialah sebanyak 90 tablet (Fe3). Zat besi merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin). Selain digunakan untuk pembentukan sel darah merah, zat besi juga berperan sebagai salah satu komponen dalam membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim. Zat besi juga berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh.

Pada ibu hamil, zat besi memiliki peranan yang cukup penting untuk pertumbuhan janin. Selama hamil, asupan zat besi harus ditambah mengingat selama kehamilan, volume darah pada tubuh ibu meningkat. Sehingga, untuk dapat tetap memenuhi kebutuhan ibu dan menyuplai makanan serta oksigen pada janin melalui plasenta, dibutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak. Asupan zat besi yang diberikan oleh ibu hamil kepada janinnya melalui plasenta akan digunakan janin untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, termasuk untuk perkembangan otaknya, sekaligus menyimpannya dalam hati sebagai cadangan hingga bayi berusia 6 bulan. Selain itu, zat besi juga membantu dalam mempercepat proses penyembuhan luka khususnya luka yang timbul dalam proses persalinan.

Kekurangan zat besi sejak sebelum kehamilan bila tidak diatasi dapat mengakibatkan ibu hamil menderita anemia. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kematian pada saat melahirkan, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, janin dan ibu mudah terkena infeksi, keguguran, dan meningkatkan risiko bayi lahir prematur.

Secara nasional cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe tahun 2014 sebesar 85,1%, data tersebut belum mencapai target program tahun 2014 sebesar 95%. Provinsi di Indonesia pada tahun 2014 dengan cakupan Fe3 tertinggi terdapat di Provinsi Bali (95%), DKI Jakarta (94,8%), dan Jawa Tengah (92,5%). Sedangkan cakupan terendah terdapat di Provinsi Papua Barat (38,3%), Papua (49,1%), dan Banten (61,4%). Data dan informasi mengenai cakupan pemberian 90 tablet tambah darah pada ibu hamil dapat dilihat di Lampiran 5.2. Selain itu, gambar cakupan Fe3 pada tiap provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.4.

GAMBAR 5.4
CAKUPAN PEMBERIAN 90 TABLET TAMBAH DARAH (ZAT BESI) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

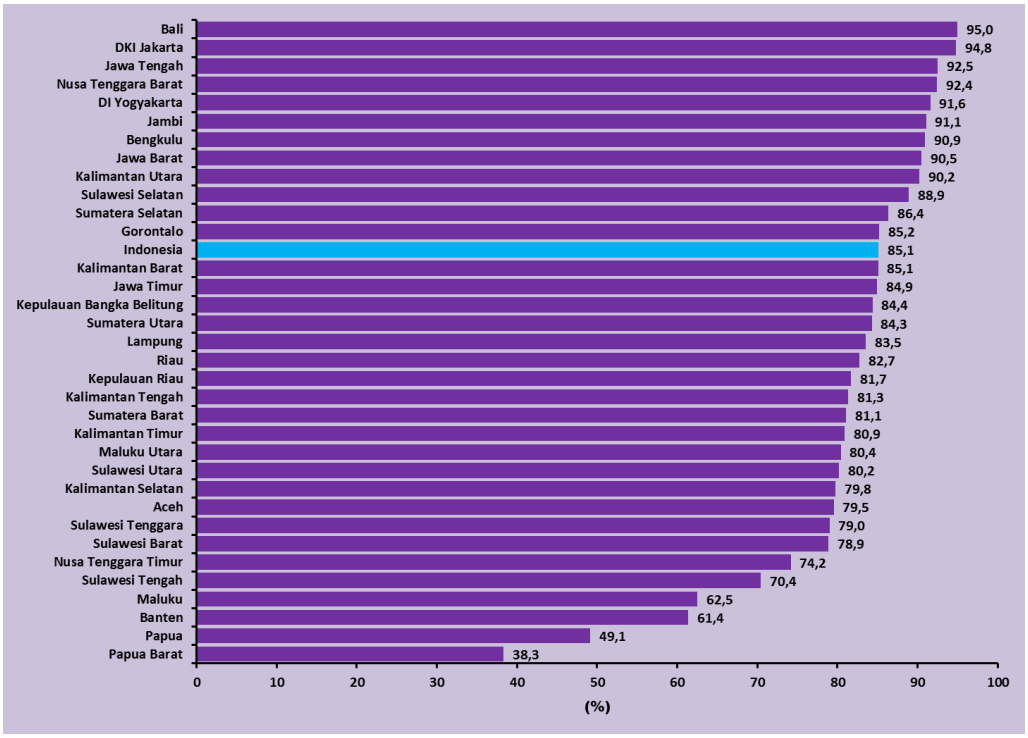

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

Dari Gambar 5.5 dapat diketahui bahwa secara umum cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Cakupan secara nasional pada tahun 2014 yaitu sebesar 88,68% dimana angka ini belum dapat memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014 yakni sebesar 90%. Namun demikian, Di Indonesia, sebanyak empat belas provinsi telah dapat mencapai target renstra tersebut, dan selebihnya yakni sebanyak dua puluh provinsi belum dapat mencapai target. Tiga provinsi dengan cakupan tertinggi yaitu DI Yogyakarta (99,96%), Jawa Tengah (99,17%), dan Bali (97,66%). Sedangkan tiga provinsi dengan cakupan terendah yaitu Papua Barat (44,73%), Maluku (46,90%), dan Papua (63,15%). Selengkapnya tentang cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia menurut provinsi tahun 2014 disajikan pada Gambar 5.6.

GAMBAR 5.5
CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2005 – 2014

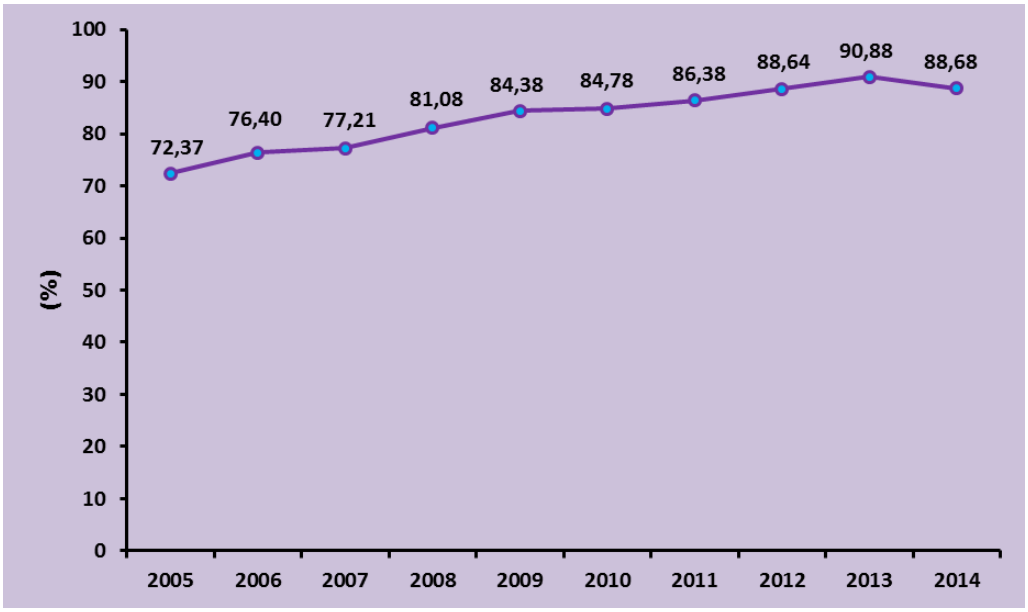

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

GAMBAR 5.6
CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2014

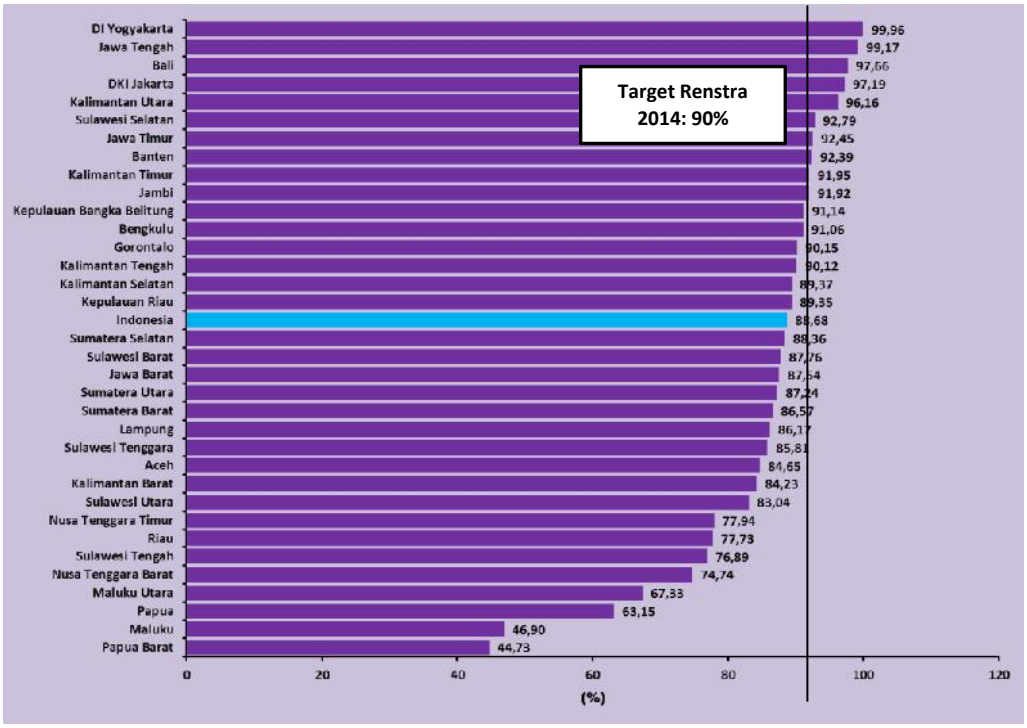

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/ fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya

risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan tetap konsisten dalam menerapkan kebijakan bahwa seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan didorong untuk dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan menggariskan bahwa pembangunan puskesmas harus satu paket dengan rumah dinas tenaga kesehatan. Demikian pula dengan pembangunan poskesdes yang harus bisa sekaligus menjadi rumah tinggal bagi bidan di desa. Dengan disediakan rumah tinggal, maka tenaga kesehatan termasuk bidan akan siaga di tempat tugasnya dan dapat memberikan pertolongan persalinan setiap saat.

Untuk daerah dengan akses sulit, kebijakan Kementerian Kesehatan adalah dengan mengembangkan program Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran. Para dukun diupayakan bermitra dengan bidan dengan hak dan kewajiban yang jelas. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakan oleh dukun, namun dirujuk ke bidan.

Bagi ibu hamil yang di daerah tempat tinggalnya tidak ada bidan atau jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, maka menjelang hari taksiran persalinan diupayakan sudah berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu di Rumah Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahiran tersebut dapat berupa rumah tunggu khusus yang dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat maupun di rumah sanak saudara yang letak rumahnya berdekatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Gambaran mengenai persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.7 berikut ini.

GAMBAR 5.7
PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

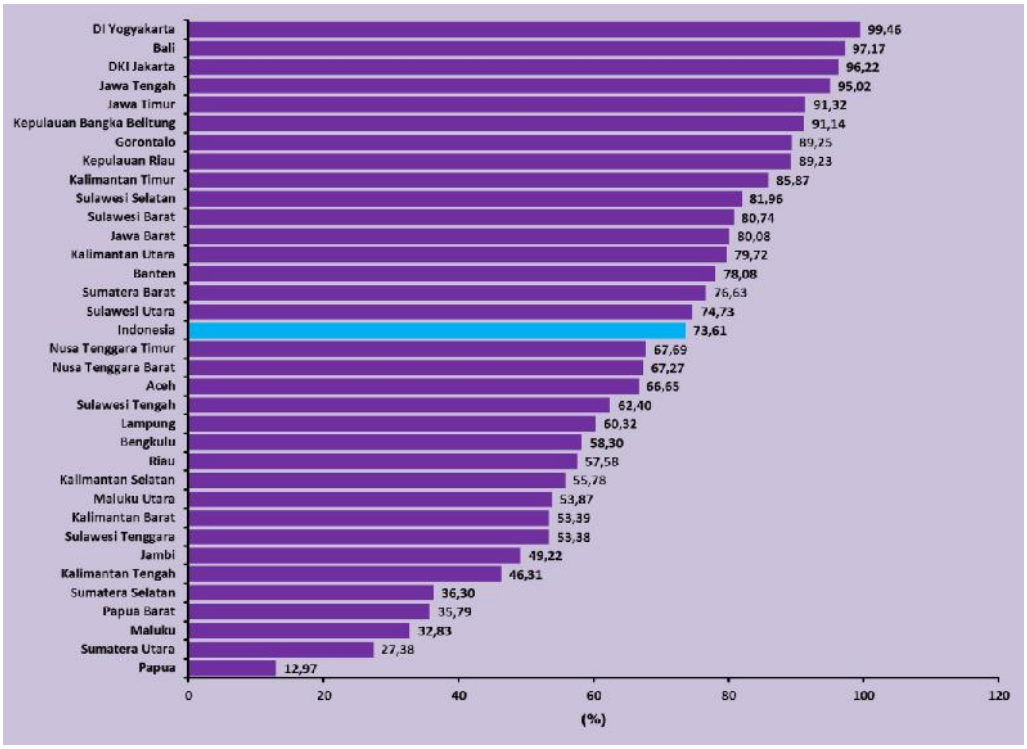

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Seperti terlihat pada Gambar 5.7, di Indonesia dapat diketahui bahwa sebesar 73,61% ibu hamil melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Provinsi DI Yogyakarta memiliki cakupan tertinggi (99,46%) dan Provinsi Papua memiliki cakupan terendah (12,97%) untuk persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Data dan informasi mengenai cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 5.5.

GAMBAR 5.8
CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K4 DAN CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN (PN) DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2014

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Dari Gambar 5.8 dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan ibu hamil K4 tidak berbeda jauh dengan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Diasumsikan bahwa ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K4 kemungkinan persalinannya akan ditolong tenaga kesehatan. Diharapkan dengan meningkatkan cakupan pelayananan ibu hamil K4 akan meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Dalam analisis Riskesdas, penolong persalinan dinyatakan dalam penolong persalinan kualifikasi tertinggi dan kualifikasi terendah. Penolong persalinan dengan kualifikasi tertinggi yakni apabila terdapat lebih dari satu penolong, maka dipilih yang kualifikasinya paling tinggi. Begitu juga dengan kualifikasi yang terendah. Dari Gambar 5.9 terlihat bahwa penolong persalinan terbanyak dilakukan oleh bidan (68,6%), kemudian oleh dokter (18,5%), lalu non tenaga kesehatan (11,8%). Namun sebanyak 0,8% kelahiran dilakukan tanpa ada penolong, dan hanya 0,3% kelahiran saja yang ditolong oleh perawat.

GAMBAR 5.9
PROPORSI PENOLONG PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERTINGGI
DI INDONESIA, RISKESDAS TAHUN 2013

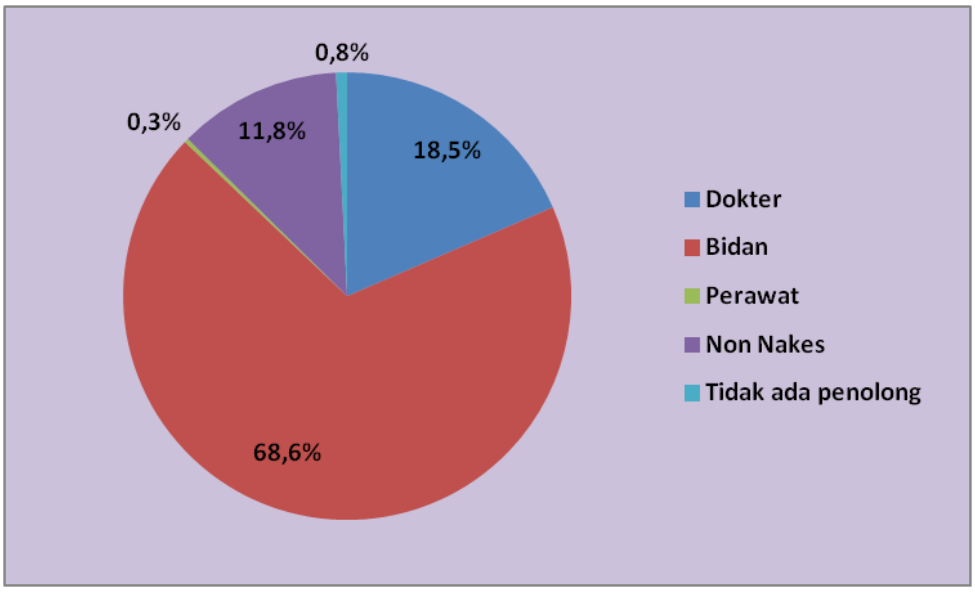

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kemenkes RI 2013

Selain melalui persalinan normal, persalinan juga dapat dilakukan dengan cara bedah perut/sesar. Pada Riskesdas 2013 ditanyakan mengenai proses persalinan yang dialami. Gambar 5.10 menyajikan proporsi persalinan dengan bedah sesar menurut karakteristik. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa secara umum pola persalinan melalui bedah sesar menurut karakteristik menunjukkan proporsi tertinggi pada ibu yang menyelesaikan D1-D3/perguruan tinggi (PT) nya (25,1%), pekerjaannya sebagai pegawai (20,9%), tinggal di perkotaan (13,8%), dan kuintil indeks kepemilikannya teratas (18,9%).

GAMBAR 5.10
PROPORSI PERSALINAN SESAR DARI KELAHIRAN PERIODE 1 JANUARI 2010
SAMPAI SAAT WAWANCARA MENURUT KARAKTERISTIK DI INDONESIA, RISKESDAS 2013

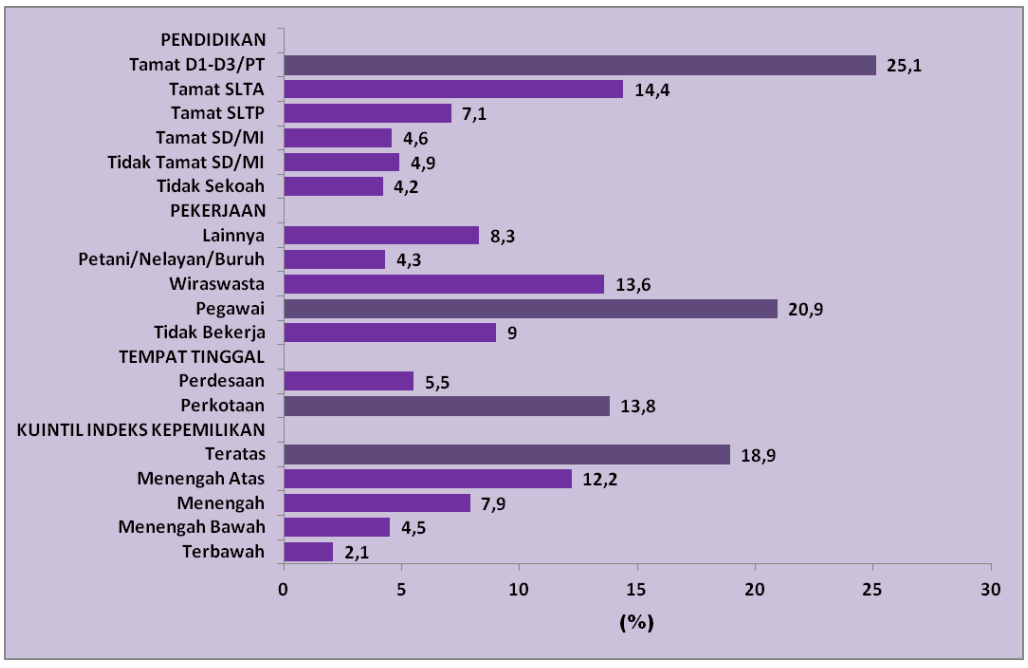

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kemenkes RI 2013

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Nifas adalah periode mulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan.
Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :

a) Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);
b) Pemeriksaan tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
c) Pemeriksaan lokhia dan cairan *per vaginam* lain;
d) Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;
e) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;
f) Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan KF3). Indikator ini menilai kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

GAMBAR 5.11
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA
TAHUN 2008 – 2014

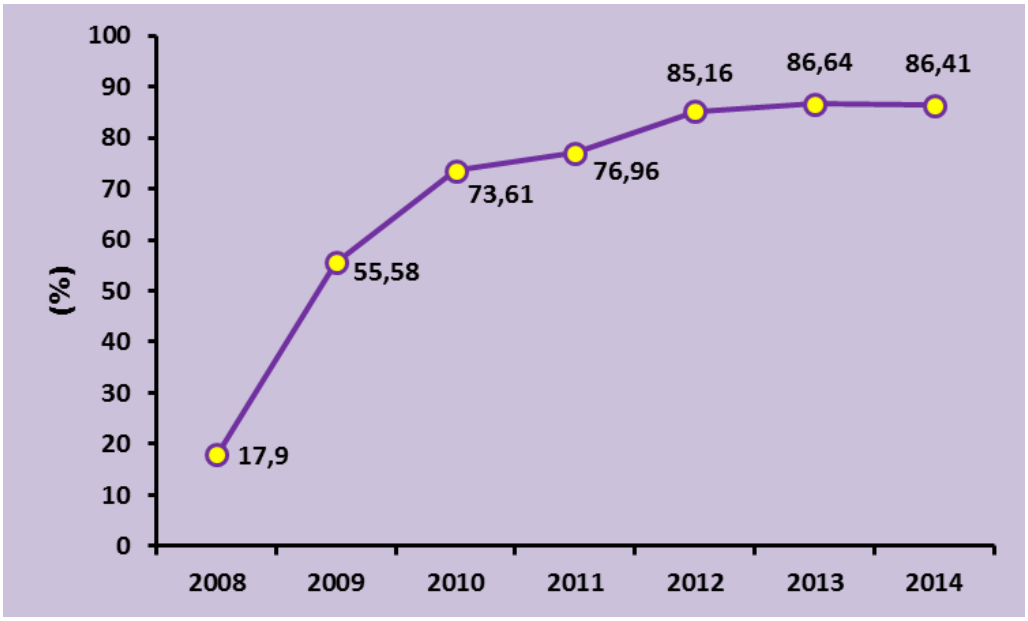

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Dari Gambar 5.11 dapat dilihat bahwa capaian cakupan kunjungan nifas (KF3) di Indonesia dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir secara umum mengalami kenaikan. Capaian indikator KF3 yang meningkat dalam 7 tahun terakhir merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat termasuk sektor swasta. Program penempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk dokter dan bidan terus dilaksanakan. Selain itu, dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010, puskesmas, poskesdes, dan posyandu lebih terbantu dalam mengintensifkan implementasi upaya kesehatan termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan ibu nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas termasuk di antaranya kegiatan *sweeping* atau kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan Pemerintah makin meningkat sejak diluncurkannya Jampersal

pada tahun 2011 hingga 2013, dimana pelayanan nifas termasuk paket manfaat yang dijamin oleh Jampersal. Dalam paket Jampersal tersebut, pelayanan persalinan didorong untuk menggunakan KB pasca persalinan. Gambaran mengenai cakupan kunjungan nifas lengkap di Indonesia menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.12.

GAMBAR 5.12
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2014

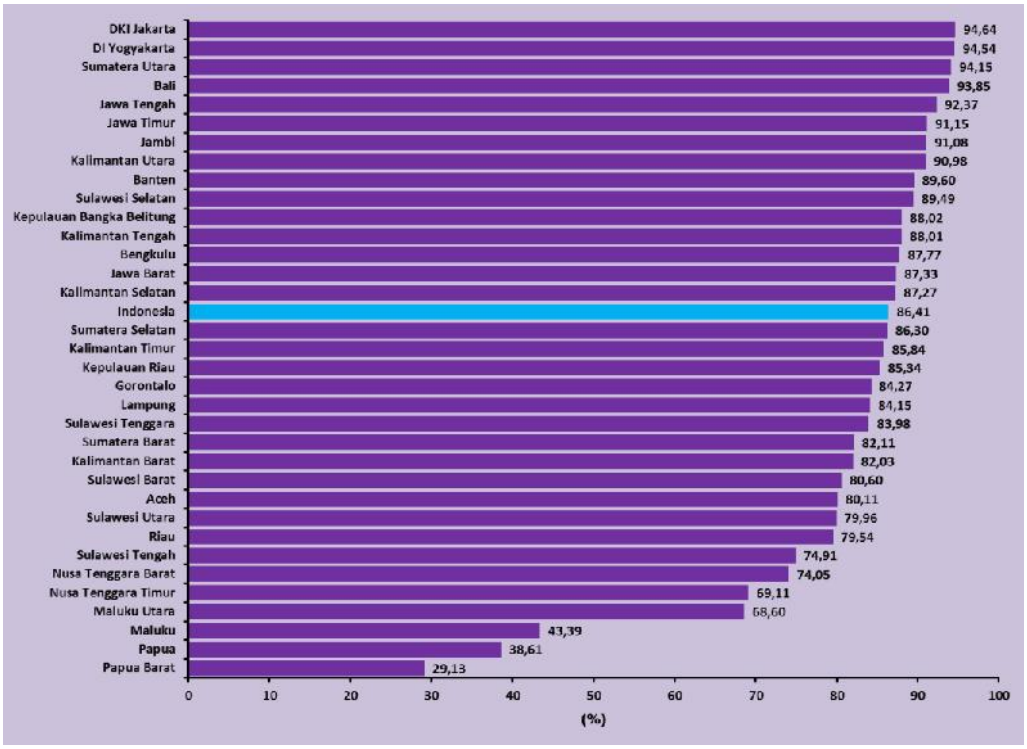

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Pada Gambar 5.12 digambarkan bahwa tiga provinsi yang memiliki cakupan kunjungan nifas lengkap tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta (94,64%), DI Yogyakarta (94,54%), dan Sumatera Utara (94,15%). Sedangkan tiga provinsi dengan cakupan kunjungan nifas lengkap terendah ialah Papua Barat (29,13%), Papua (38,61%), dan Maluku (43,39%).

Gambar 5.13 memperlihatkan bahwa pada tahun 2008 hingga tahun 2011 terdapat perbedaan cakupan yang cukup besar antara persalinan ditolong tenaga kesehatan (Pn) dan kunjungan nifas (KF3). Hal tersebut menunjukkan bahwa meski proses kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan, namun banyak ibu bersalin yang tidak melakukan kunjungan nifas ke fasilitas kesehatan. Namun, sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 cakupan indikator tersebut secara nasional tidak menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Hal itu menunjukkan bahwa ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan sebagian besar telah melakukan kunjungan nifas ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemampuan petugas kesehatan dalam menjaring ibu bersalin untuk mendapatkan pelayanan nifas merupakan faktor yang sangat penting.

GAMBAR 5.13
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN (PN)
DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2014

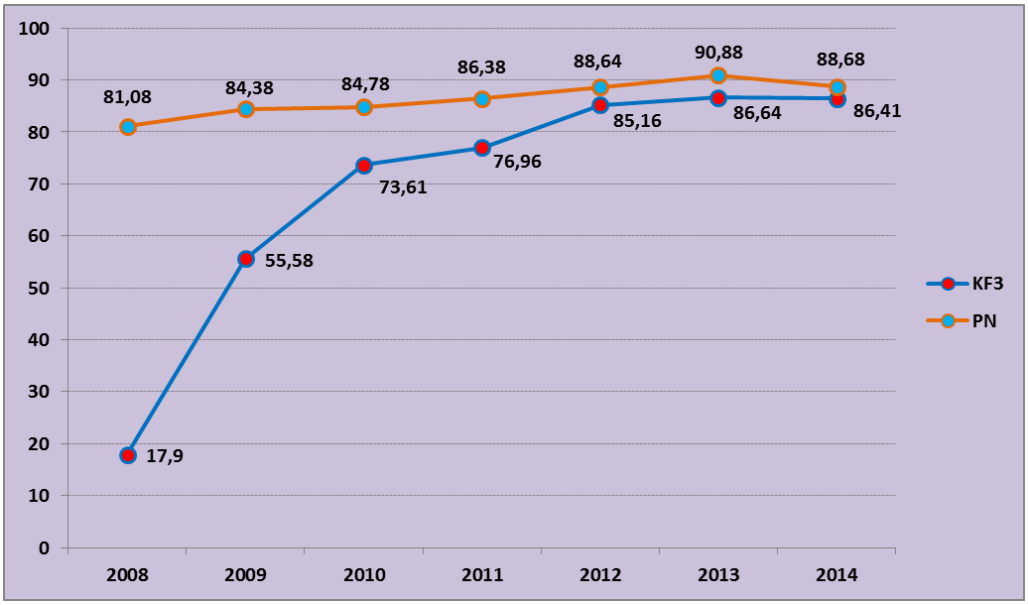

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

4. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Kebidanan

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (Cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi.

Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan di Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2014 disajikan pada Gambar 5.14 berikut.

Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa secara umum, cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Indonesia selama kurun waktu tujuh tahun terakhir cenderung meningkat. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan secara nasional pada tahun 2014 sebesar 74,56%. Gambaran mengenai cakupan penanganan komplikasi kebidanan menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.15 berikut ini.

GAMBAR 5.14
CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DI INDONESIA
TAHUN 2008 – 2014

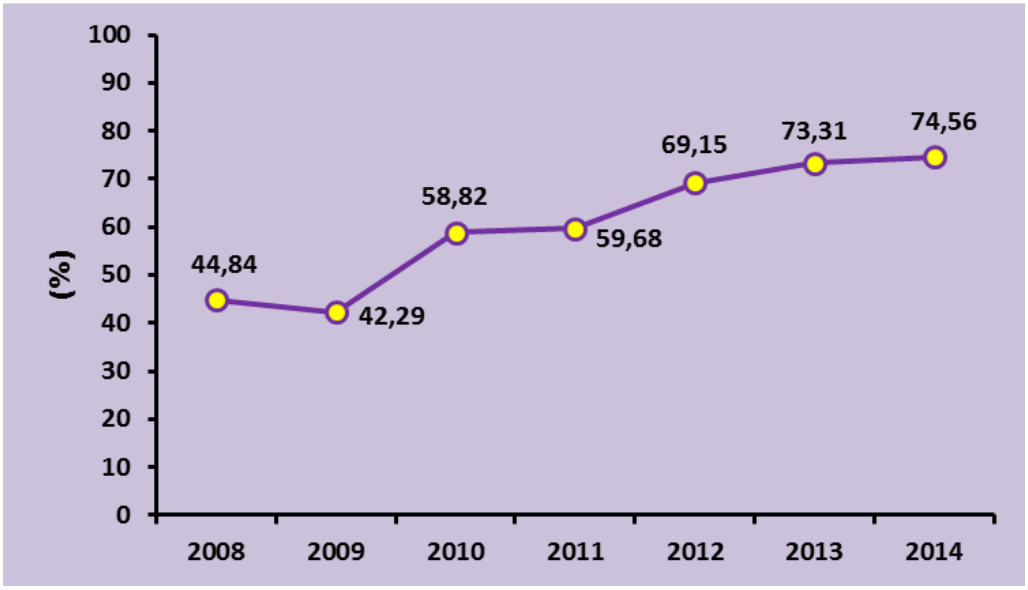

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

GAMBAR 5.15
CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2014

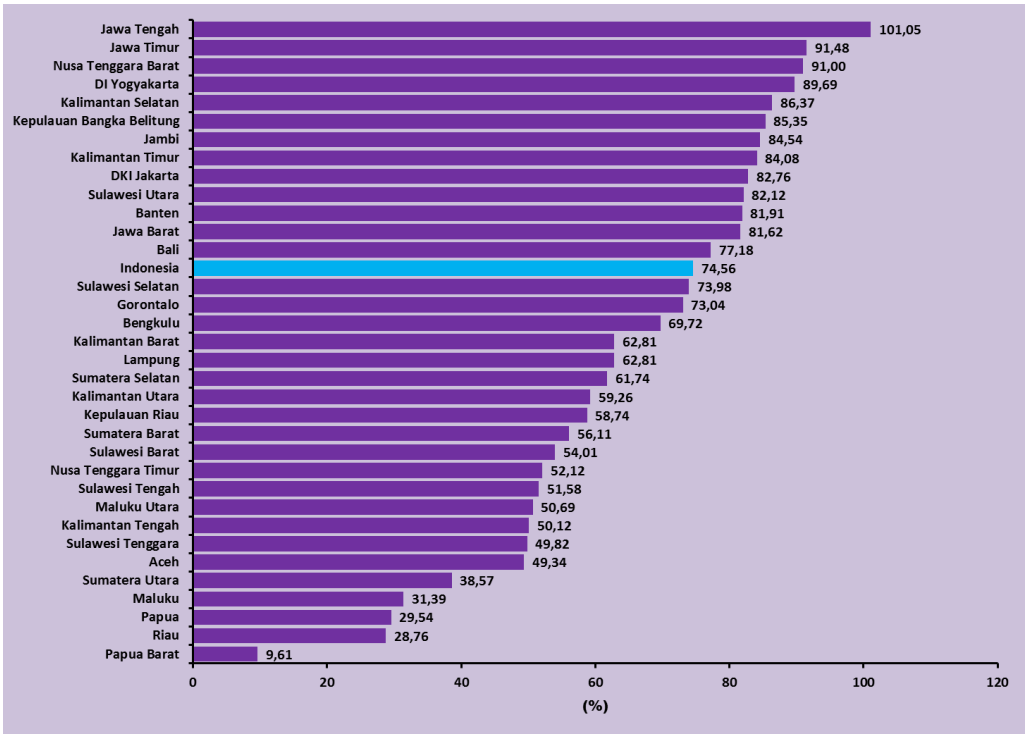

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Gambar 5.15 menunjukkan bahwa cakupan penanganan komplikasi kebidanan tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah (101,05%), Jawa Timur (91,48%), dan Nusa Tenggara Barat (91%). Sedangkan cakupan terendah berturut-turut yaitu Provinsi Papua Barat (9,61%), Riau (28,76%), dan Papua (29,54%). Data dan informasi mengenai cakupan penanganan komplikasi kebidanan dapat dilihat di Lampiran 5.6.

Lima penyebab kematian ibu terbesar yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet, dan abortus. Kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi. Namun proporsinya telah berubah, dimana perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan sedangkan HDK proporsinya semakin meningkat. Lebih dari 25% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2013 disebabkan oleh HDK. Lebih jelasnya mengenai hal itu dapat dilihat pada Gambar 5.16.

GAMBAR 5.16
PENYEBAB KEMATIAN IBU DI INDONESIA
TAHUN 2010 - 2013

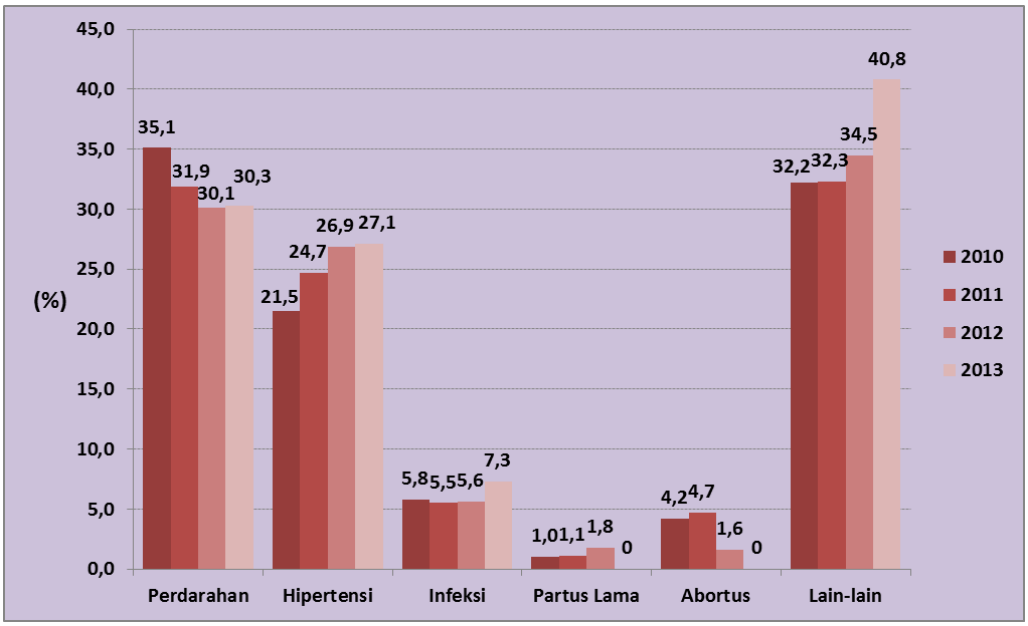

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Diperkirakan 20% dari kehamilan akan mengalami komplikasi. Sebagian komplikasi ini dapat mengancam jiwa, tetapi sebagian besar komplikasi dapat dicegah dan ditangani bila : 1) ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan; 2) tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai, antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan persalinan, dan pelaksanaan manajemen aktif kala III (MAK III) untuk mencegah perdarahan pasca-salin; 3) tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini komplikasi; 4) apabila komplikasi terjadi, tenaga kesehatan dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan; 5) proses rujukan efektif; 6) pelayanan di RS yang cepat dan tepat guna.

Terdapat tiga jenis area intervensi yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan neonatal yaitu melalui : 1) peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai; 2) pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran; serta 3) pelayanan emergensi obstetrik dan neonatal dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK) yang dapat dijangkau secara tepat waktu oleh masyarakat yang membutuhkan.

Upaya terobosan dalam penurunan AKI dan AKB di Indonesia salah satunya dilakukan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Program tersebut menitikberatkan kepedulian dan peran keluarga dan masyarakat dalam melakukan upaya deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil, serta menyediakan akses dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar di tingkat Puskesmas (PONED) dan

pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK). Dalam implementasinya, P4K merupakan salah satu unsur dari Desa Siaga. P4K mulai diperkenalkan oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2007. Pelaksanaan P4K di desa-desa tersebut perlu dipastikan agar mampu membantu keluarga dalam membuat perencanaan persalinan yang baik dan meningkatkan kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas agar dapat mengambil tindakan yang tepat.

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, ditargetkan pada akhir tahun 2014 di setiap kabupaten/kota terdapat minimal empat puskesmas rawat inap mampu PONED dan satu Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan PONEK. Melalui pengelolaan pelayanan PONED dan PONEK, puskesmas dan rumah sakit diharapkan bisa menjadi institusi terdepan dimana kasus komplikasi dan rujukan dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

Standardisasi PONEK untuk rumah sakit dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan bekerja sama dengan organisasi profesi yang terkait (POGI, IDAI dan IBI) serta Badan PPSDMKes Kemenkes. Lokakarya PONEK dilakukan selama lima hari, meliputi materi manajemen dan klinik PONEK. Kegiatan ini kemudian diikuti dengan latihan *on the job training* PONEK untuk mengenalkan cara melakukan bimbingan teknis perbaikan kinerja Tim PONEK rumah sakit. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, jumlah rumah sakit dengan PONEK di Indonesia sampai dengan Desember 2014 sebanyak 476 rumah sakit dari 771 rumah sakit umum milik Pemerintah, sedangkan jumlah Puskesmas PONED sampai dengan Desember tahun 2014 adalah 2.855 puskesmas. Data dan informasi selengkapnya mengenai rumah sakit siap PONEK dan Puskesmas PONED disajikan pada Lampiran 2.3.

Dilakukan pula kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP), yang merupakan upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kegiatan ini dilakukan melalui pembahasan kasus kematian ibu atau bayi baru lahir sejak di level masyarakat sampai di level fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu hasil kajian yang didapat dari AMP adalah kendala yang timbul dalam upaya penyelamatan ibu pada saat terjadi kegawatdaruratan maternal dan bayi baru lahir. Kajian tersebut juga menghasilkan rekomendasi intervensi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi di masa mendatang.

5. Pelayanan Kontrasepsi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga, yang dimaksud dengan program keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga, program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

KB merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB menyediakan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak.

Baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk menetapkan berapa jumlah anak yang akan dimiliki dan kapan akan memiliki anak. Melalui tahapan konseling pelayanan KB, pasangan usia subur (PUS) dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah mereka pahami, termasuk keuntungan dan kerugian, risiko metode kontrasepsi dari petugas kesehatan.

Program Keluarga Berencana (KB) dilakukan diantaranya dalam rangka mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititikberatkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) yang berada pada kisaran usia 15-49 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. PUS bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB. Gambaran mengenai tempat pelayanan KB di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.17 berikut.

GAMBAR 5.17
PRESENTASE TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA
TAHUN 2014

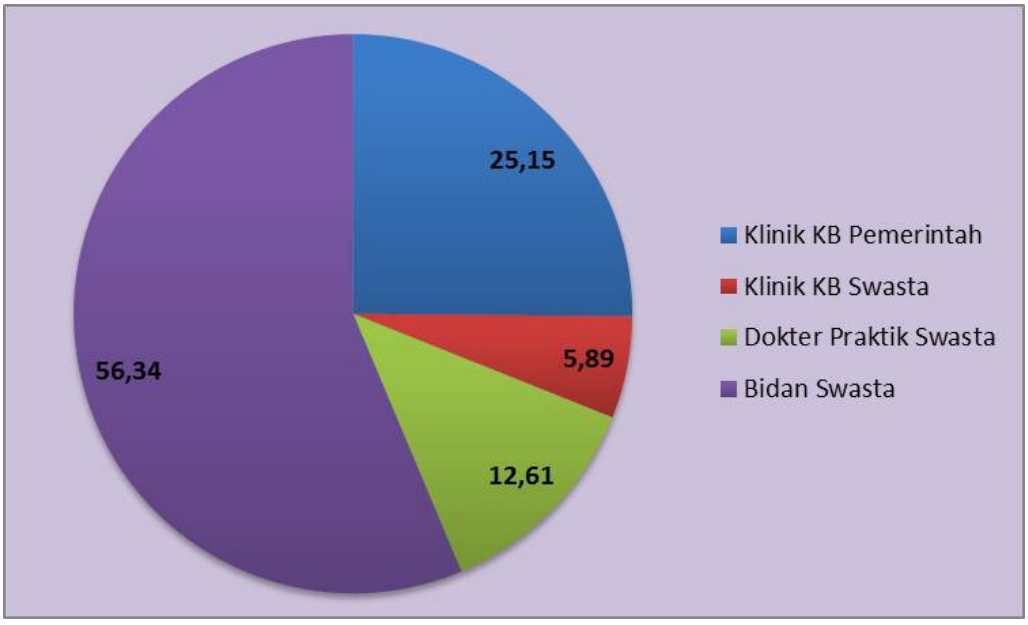

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Saat ini, tempat pelayanan KB di Indonesia didominasi oleh bidan swasta (56,34%). Tempat pelayanan KB terbanyak selanjutnya ialah klinik KB pemerintah (25,15%) dan dokter praktik swasta (12,61%). Sedangkan, tempat pelayanan KB yang paling sedikit ialah klinik KB swasta (5,89%). Data dan informasi tentang tempat pelayanan kontrasepsi di Indonesia tahun 2014 dapat dilihat di Lampiran 5.11.

GAMBAR 5.18
PERSENTASE PEMAKAIAN ALAT/CARA KB PADA WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN) YANG BERSTATUS KAWIN DI INDONESIA, RISKESDAS 2013

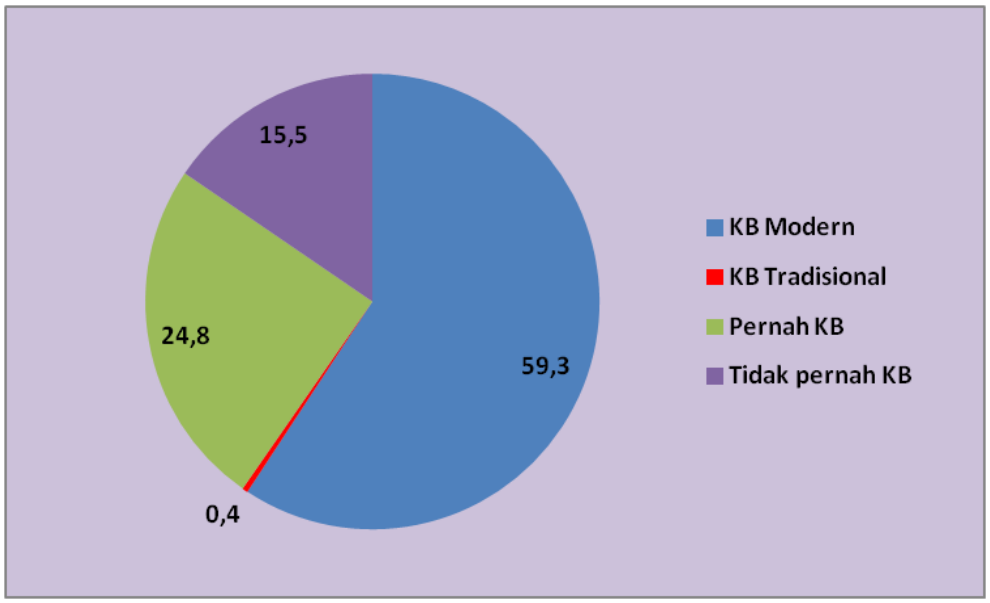

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2013

Dari Gambar 5.18 dapat kita lihat bahwa sebagian besar WUS saat ini menggunakan kontrasepsi, yakni sebanyak 59,7%. Sebanyak 59,3% wanita usia subur menggunakan kontrasepsi modern, dan hanya 0,4% lainnya menggunakan kontrasepsi cara tradisional. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa sebanyak 24,8% dari wanita usia subur mengaku pernah menggunakan kontrasepsi, meski saat ini tidak sedang menggunakannya. Sedangkan 15,5% wanita usia subur mengaku tidak pernah menggunakan kontrasepsi.

GAMBAR 5.19
PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI DI INDONESIA TAHUN 2014

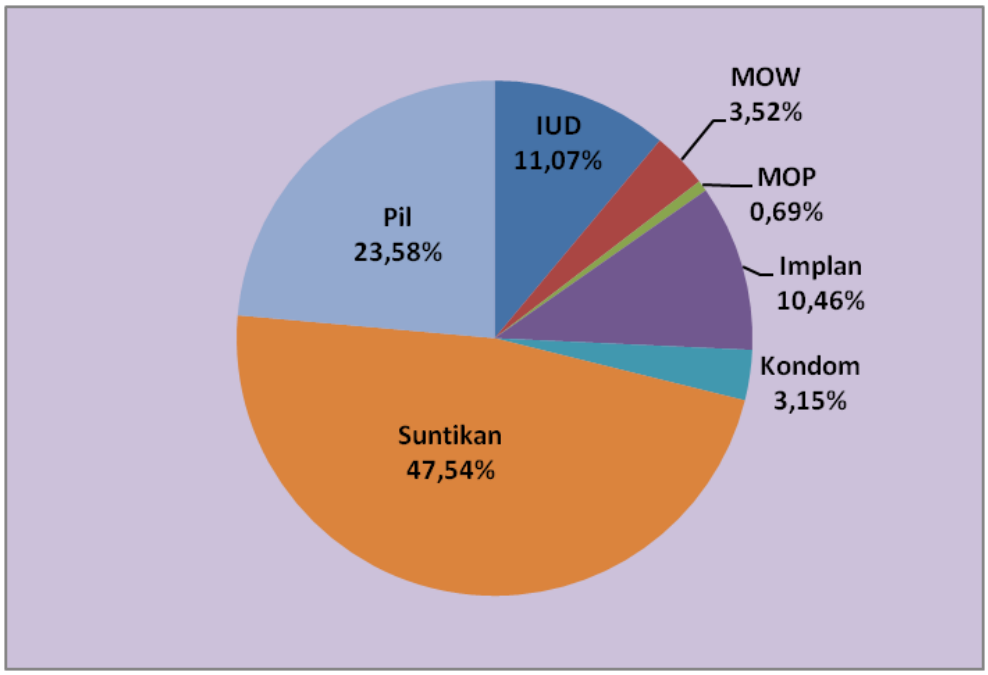

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

Dari Gambar 5.19 dapat dilihat bahwa metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB aktif adalah suntikan (47,54%) dan terbanyak ke dua adalah pil (23,58%). Sedangkan metode kontrasepsi yang paling sedikit dipilih oleh peserta KB aktif yaitu Metoda Operasi Pria (MOP) sebanyak 0,69%, kemudian kondom sebanyak 3,15%. Data dan informasi mengenai KB aktif di Indonesia tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 5.9.

Sedangkan pada peserta KB baru, persentase metode kontrasepsi yang terbanyak digunakan yaitu suntikan sebesar 49,67%. Metode terbanyak ke dua yaitu pil, sebesar 25,14%. Metode yang paling sedikit dipilih oleh para peserta KB baru adalah metode operasi pria (MOP) sebanyak 0,21%, kemudian metode operasi wanita (MOW) sebanyak 1,50%, dan kondom (5,68%). Gambaran mengenai persentase peserta KB baru menurut metode kontrasepsi tahun 2014 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.20.

GAMBAR 5.20
PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI
TAHUN 2014

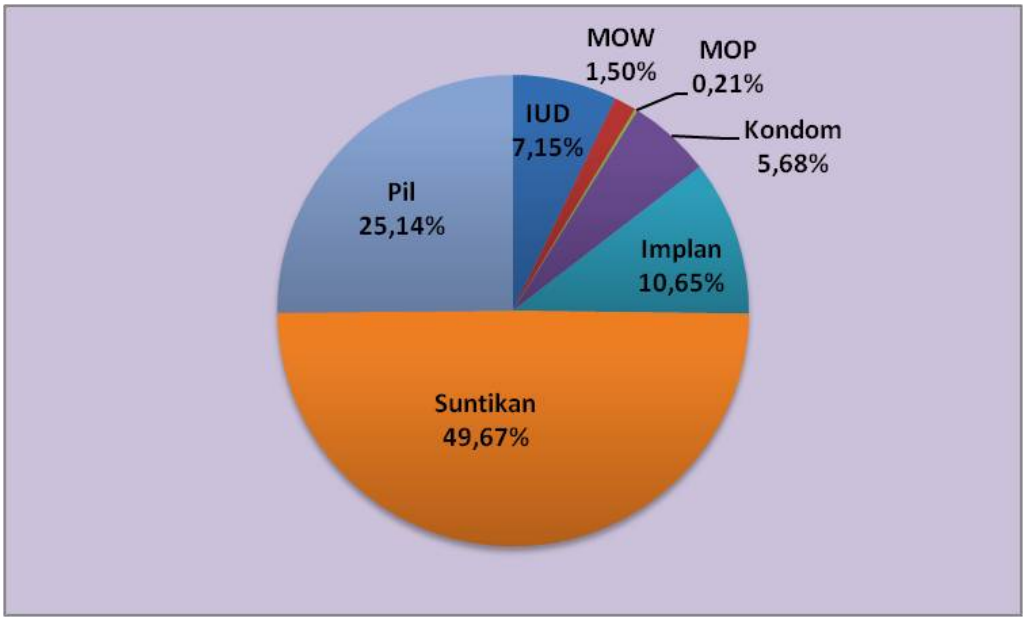

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Pada Gambar 5.21 dapat dilihat bahwa provinsi dengan persentase peserta KB baru tertinggi ialah Provinsi DKI Jakarta (32,02%), kemudian Papua (29,74%), dan Bengkulu (27,34%). Sedangkan provinsi dengan persentase peserta KB baru terendah ialah Provinsi Bali (9,90%), DI Yogyakarta (9,99%), dan Jawa Timur (13,27%). Secara nasional, persentase peserta KB baru pada tahun 2014 sebesar 16,51%. Data dan informasi mengenai KB baru di Indonesia tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 5.8.

GAMBAR 5.21
CAKUPAN PESERTA KB BARU MENURUT PROVINSI
TAHUN 2014

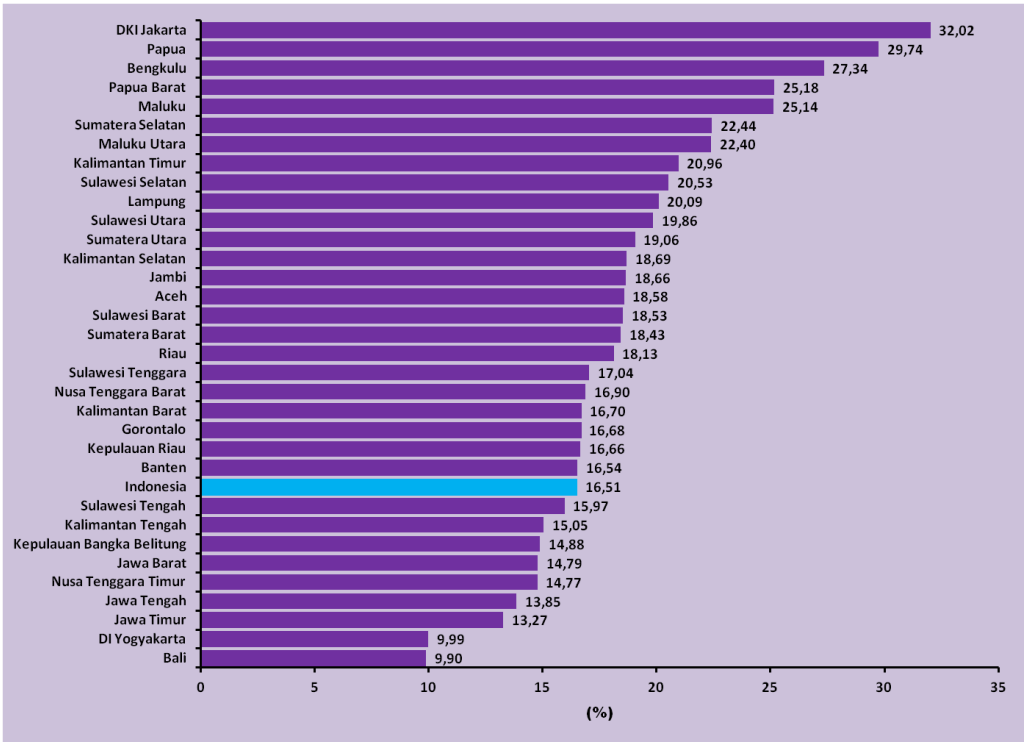

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

GAMBAR 5.22
CAKUPAN PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI
TAHUN 2014

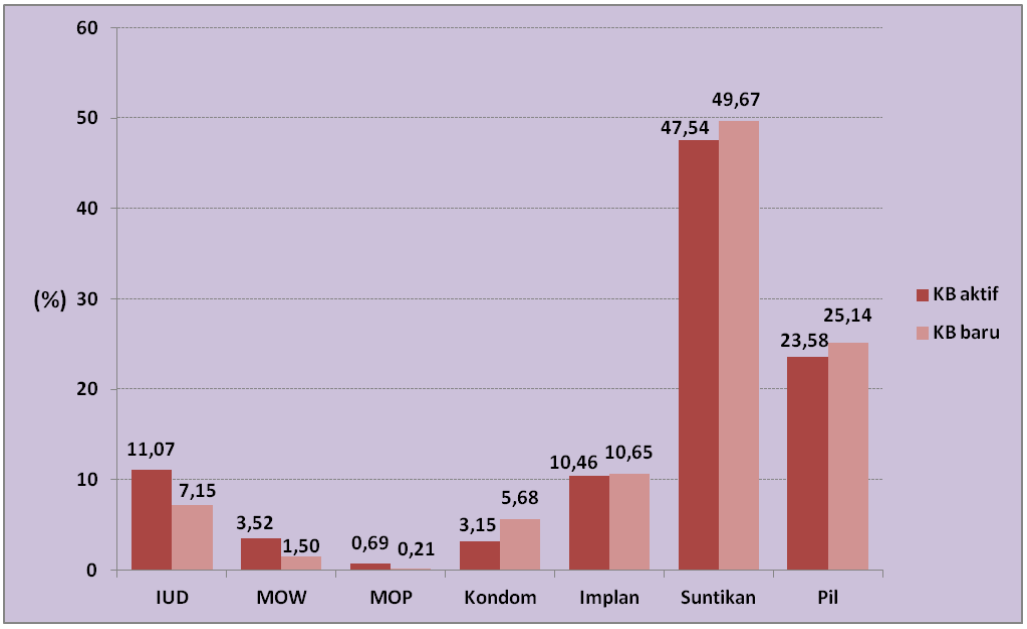

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Dari Gambar 5.22 dapat kita lihat bahwa terdapat tiga metode kontrasepsi dengan persentase peserta KB baru yang lebih rendah daripada persentase KB aktif, yakni *intrauterine device* (IUD), MOW, dan MOP. Sedangkan pada metode lainnya persentase peserta KB baru nya lebih banyak daripada persentase KB aktif.

GAMBAR 5.23
PERSENTASE PUS BUKAN PESERTA KB (*UNMET NEED*) MENURUT PROVINSI
HASIL PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2014

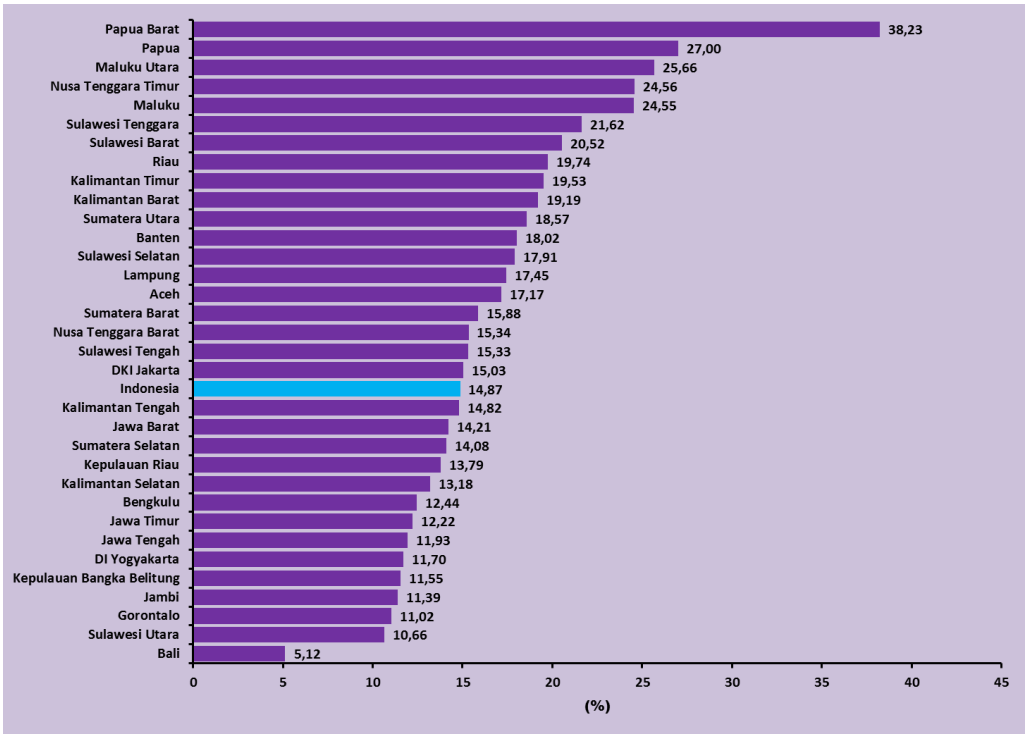

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Unmet need diartikan sebagai wanita yang tidak ingin memiliki anak lagi tetapi wanita tersebut tidak menggunakan alat kontrasepsi. Di Indonesia, *unmet need* diidentifikasikan sebagai Pasangan usia subur yang bukan merupakan peserta keluarga berencana. Saat ini, persentase *unmet need* di Indonesia tertinggi di Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 38,23%. Sedangkan persentase *unmet need* yang terendah yaitu di provinsi Bali sebesar 5,12%. Persentase *unmet need* secara nasional sendiri pada tahun 2014 sebesar 14,87%. Sebanyak 7,13% PUS tidak menggunakan alat kontrasepsi namun ingin menunda memiliki anak, dan 7,73% PUS tidak menggunakan alat kontrasepsi meski sebenarnya tidak menginkan anak lagi. Data dan informasi mengenai situasi pelayanan kontrasepsi di Indonesia selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.7 hingga Lampiran 5.13.

B. KESEHATAN ANAK

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini sama dengan AKN berdasarkan SDKI tahun

2007 dan hanya menurun 1 point dibanding SDKI tahun 2002-2003 yaitu 20 per 1.000 kelahiran hidup.

GAMBAR 5.24
TREN ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA

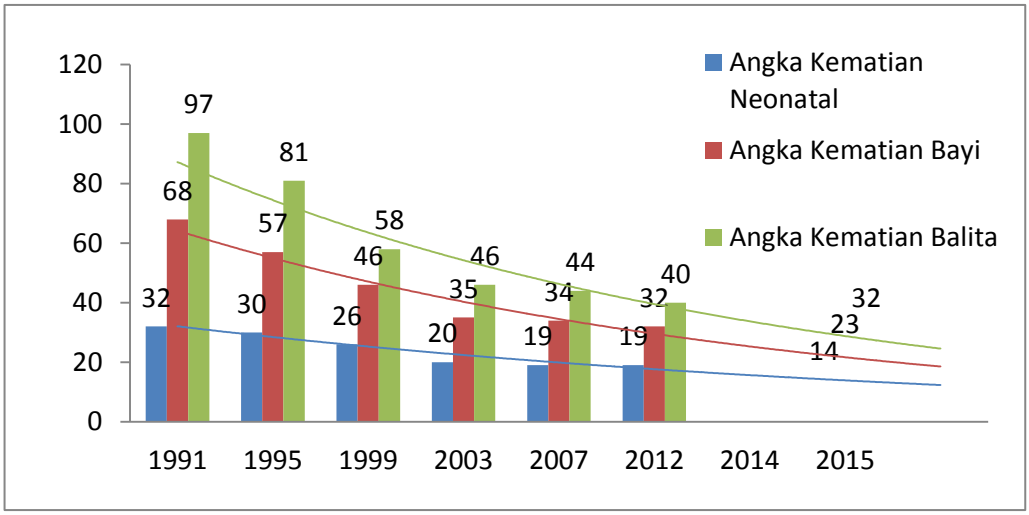

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Untuk mencapai target penurunan AKB pada MDG 2015 yaitu sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir (neonatal) menjadi prioritas utama. Komitmen global dalam MDGs menetapkan target terkait kematian anak yaitu menurunkan angka kematian anak hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015.

Data dan informasi yang akan disajikan berikut ini menerangkan berbagai indikator kesehatan anak yang meliputi prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR), penanganan komplikasi neonatal, pelayanan kesehatan neonatal, pelayanan kesehatan bayi, pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A, penimbangan balita di Posyandu, imunisasi dasar, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada siswa SD/setingkat, pelayanan kesehatan peduli remaja, pelayanan kesehatan pada kasus kekerasan anak, dan pelayanan kesehatan anak terlantar dan anak jalanan di panti.

1. Berat Badan Lahir Bayi

Berat badan lahir bayi adalah berat badan bayi yang di timbang dalam waktu satu jam pertama setelah lahir. Jika dilihat dari hubungan antara waktu kelahiran dengan umur kehamilan, kelahiran bayi dapat dikelompokan menjadi tiga. Pertama yakni kelompok bayi kurang bulan (prematur), yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi (kehamilan) <37 minggu (<259 hari). Kedua, bayi cukup bulan, yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi antara 37-42 minggu (259 - 293 hari). Kelompok ke tiga adalah bayi lebih bulan, ialah bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi >42 minggu (>294 hari).

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. BBLR tidak hanya dapat terjadi pada bayi prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama kehamilan. Persentase berat bayi lahir rendah disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.25
PERSENTASE BERAT BAYI LAHIR RENDAH
MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

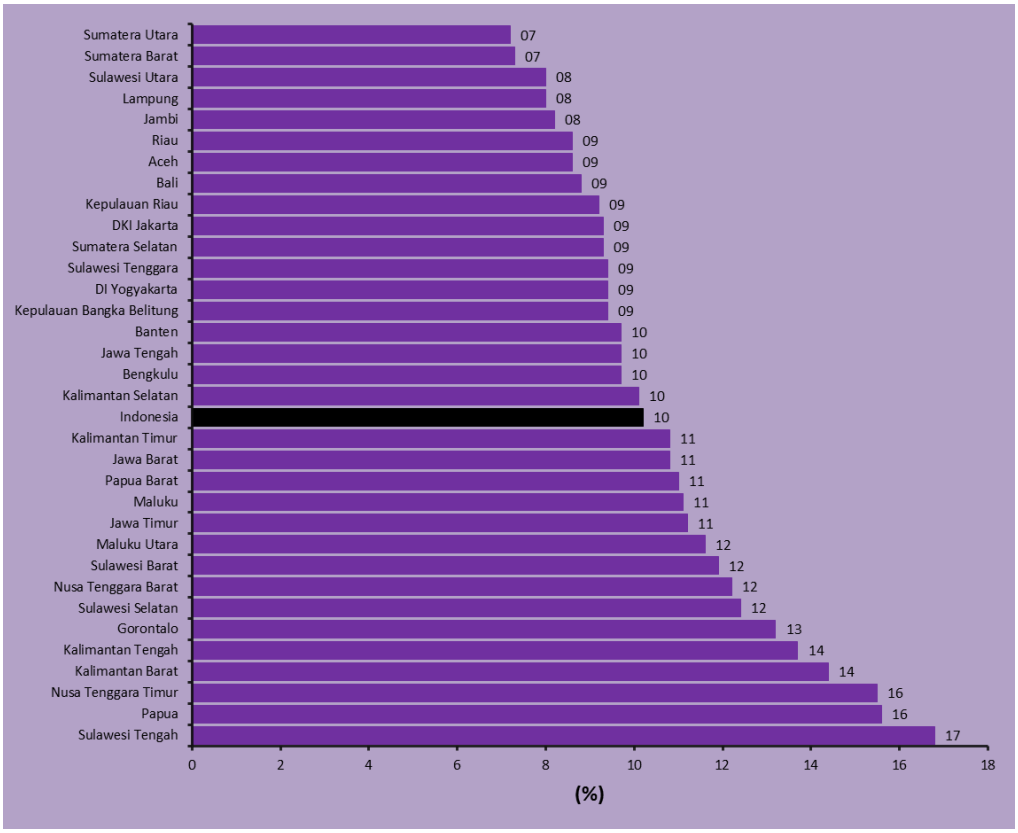

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Hasil Riskesdas tahun 2013 menyatakan bahwa persentase balita (0-59 bulan) dengan BBLR sebesar 10,2%. Persentase BBLR tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah (16,8%) dan terendah di Sumatera Utara (7,2%).

Masalah BBLR terutama pada kelahiran prematur terjadi karena ketidakmatangan sistem organ pada bayi tersebut. Bayi berat lahir rendah mempunyai kecenderungan ke arah peningkatan terjadinya infeksi dan mudah terserang komplikasi. Masalah pada BBLR yang sering terjadi adalah gangguan pada sistem pernafasan, susunan saraf pusat, kardiovaskular, hematologi, gastro intestinal, ginjal, dan termoregulasi.

2. Penanganan Komplikasi Neonatal

Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti *asfiksia*, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).

Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak yaitu asfiksia, bayi berat lahir rendah, dan infeksi (Riskesdas, 2007). Komplikasi ini sebetulnya dapat dicegah dan ditangani, namun terkendala oleh akses ke pelayanan kesehatan, kemampuan tenaga kesehatan, keadaan sosial ekonomi, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik, terlambatnya deteksi dini, dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan kesehatan.

Penanganan neonatal dengan komplikasi adalah penanganan terhadap neonatal sakit dan atau neonatal dengan kelainan atau komplikasi/kegawatdaruratan yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) terlatih baik di rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan standar MTBM, manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, manajemen Bayi Berat Lahir Rendah, pedoman pelayanan neonatal essensial di tingkat pelayanan kesehatan dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya.

Pada gambar berikut disajikan gambaran cakupan penanganan neonatal dengan komplikasi menurut provinsi tahun 2014.

GAMBAR 5.26
CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

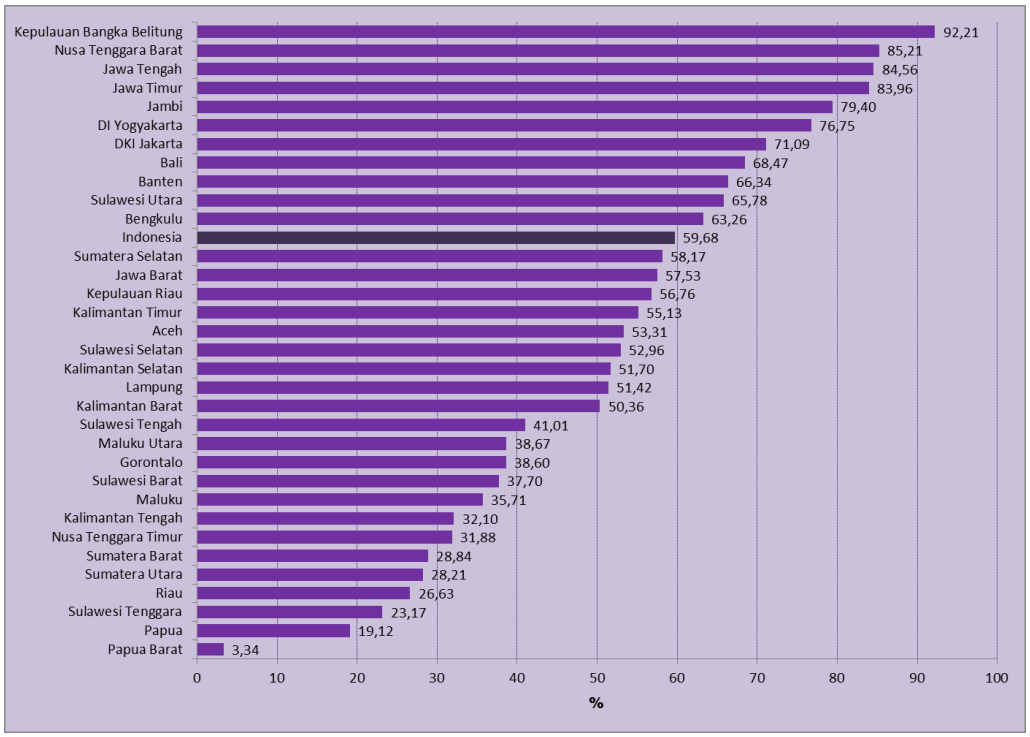

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Capaian penanganan neonatal dengan komplikasi mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang sebesar 51,47% menjadi 59,68 pada tahun 2014. Meskipun terjadi peningkatan capaian, namun masih terdapat disparitas yang cukup besar antar provinsi. Capaian tertinggi diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka sebesar 92,21% diikuti Nusa Tenggara Barat sebesar 85,21%, dan Jawa Tengah sebesar 84,56%. Tiga provinsi dengan capaian terendah ialah Provinsi Papua Barat (3,34%), Papua (19,12%), dan Sulawesi Tenggara (23,17%). Informasi lebih rinci menurut provinsi tentang penanganan komplikasi neonatal terdapat pada Lampiran 5.16.

3. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai dengan 28 hari. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi, berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan

dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Kejadian kematian tertinggi pada bayi dan balita terjadi pada masa neonatus. Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa 78,5% dari kematian neonatal terjadi pada umur 0-6 hari. Dengan melihat adanya risiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama kelahiran, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering, minimal dua kali dalam minggu pertama. Langkah ini dilakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir.

Terkait hal tersebut, pada tahun 2008 ditetapkan perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kunjungan neonatal, dari dua kali (satu kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8-28 hari) menjadi tiga kali (dua kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8–28 hari). Dengan demikian, jadwal kunjungan neonatal yang dilaksanakan saat ini yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu Anak (KIA) dalam menyelenggarakan pelayanan neonatal yang komprehensif.

GAMBAR 5.27
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

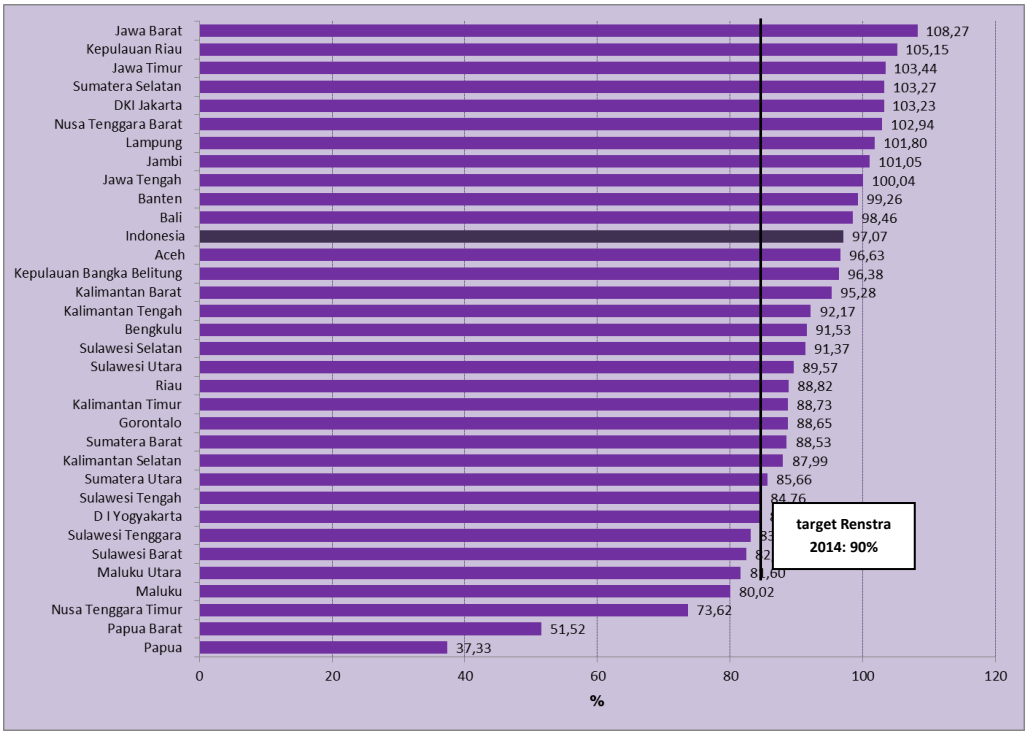

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam-48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal yaitu pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan

tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis B0 (bila belum diberikan pada saat lahir). Cakupan indikator kunjungan neonatal pertama menurut provinsi digambarkan pada gambar 5.27.

Capaian KN1 Indonesia pada tahun 2014 sebesar 97,07%. Capaian ini telah memenuhi target Renstra tahun 2014 yang sebesar 90%. Terdapat 17 provinsi yang telah memenuhi target tersebut.

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah Kunjungan Neonatal Lengkap (KN lengkap) yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan Kunjungan Neonatal minimal tiga kali sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Gambaran cakupan kunjungan KN lengkap menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Gambar 5.28 berikut ini.

GAMBAR 5.28
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

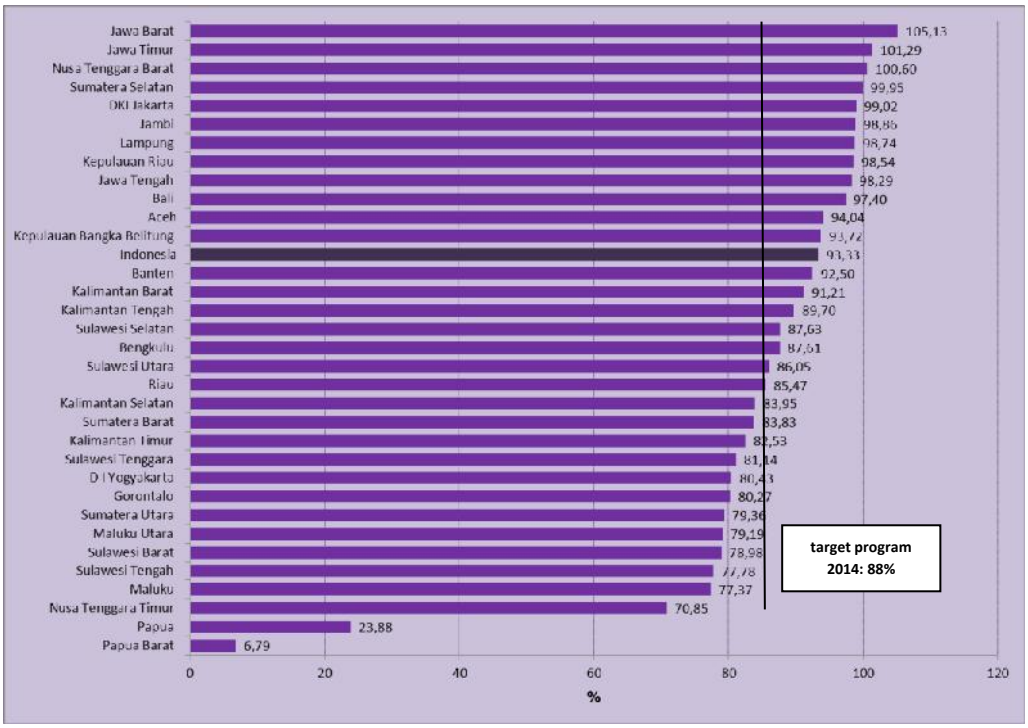

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Capaian KN lengkap di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 93,33%. Pada gambar di atas terlihat bahwa pencapaian indikator KN lengkap di Indonesia cukup baik yang dapat dilihat dari capaian yang cukup tinggi di sebagian besar provinsi. Terdapat 16 provinsi telah mencapai target program tahun 2014 yaitu 88%, dimana capaian tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat, diikuti oleh Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan dua provinsi dengan capaian terendah yaitu Papua Barat (6,79%) dan Papua (23,88%). Gambar berikut ini menampilkan cakupan KN lengkap dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

GAMBAR 5.29
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP
DI INDONESIA TAHUN 2009-2014

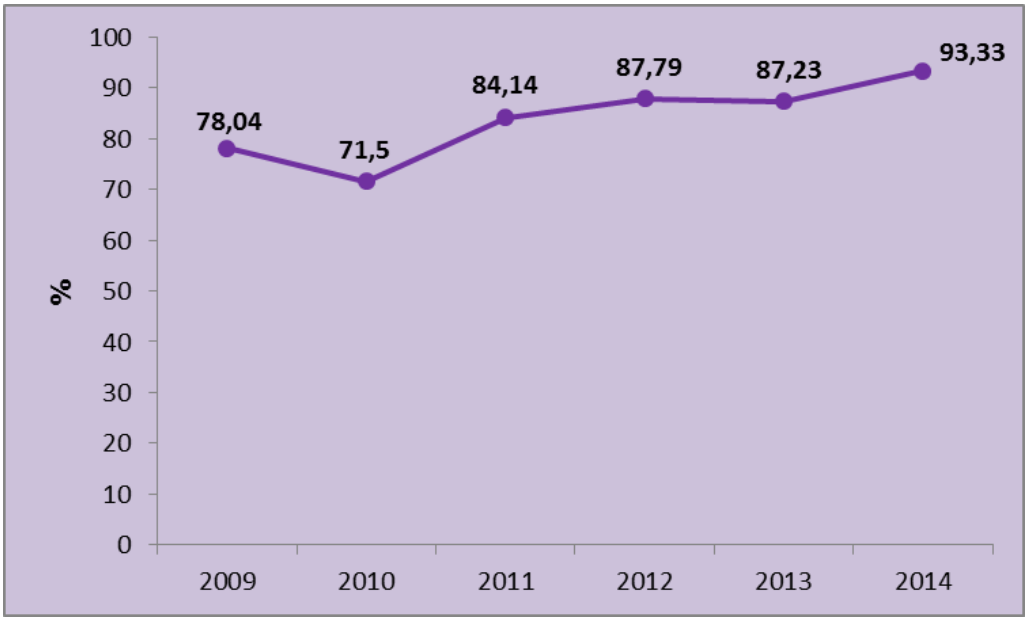

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Selama periode enam tahun terakhir cakupan KN lengkap menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 78,04% pada tahun 2009 menjadi 93,33% pada tahun 2014. Informasi lebih lanjut mengenai kunjungan neonatal dapat dilihat pada Lampiran 5.15.

4. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi

Kesehatan bayi dan balita harus selalu dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita. Pelayanan kesehatan pada bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) minimal empat kali, yaitu pada usia 29 hari–2 bulan, usia 3–5 bulan, usia 6–8 bulan dan usia 9–12 bulan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pelayanan ini terdiri dari penimbangan berat badan, pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI).

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit, serta peningkatan kualitas hidup bayi. Gambaran capaian indikator ini di 33 provinsi menunjukkan bahwa sebanyak 13 provinsi (39,39%) telah memenuhi target Renstra tahun 2014 yaitu sebesar 90 % seperti yang disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.30
CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2014

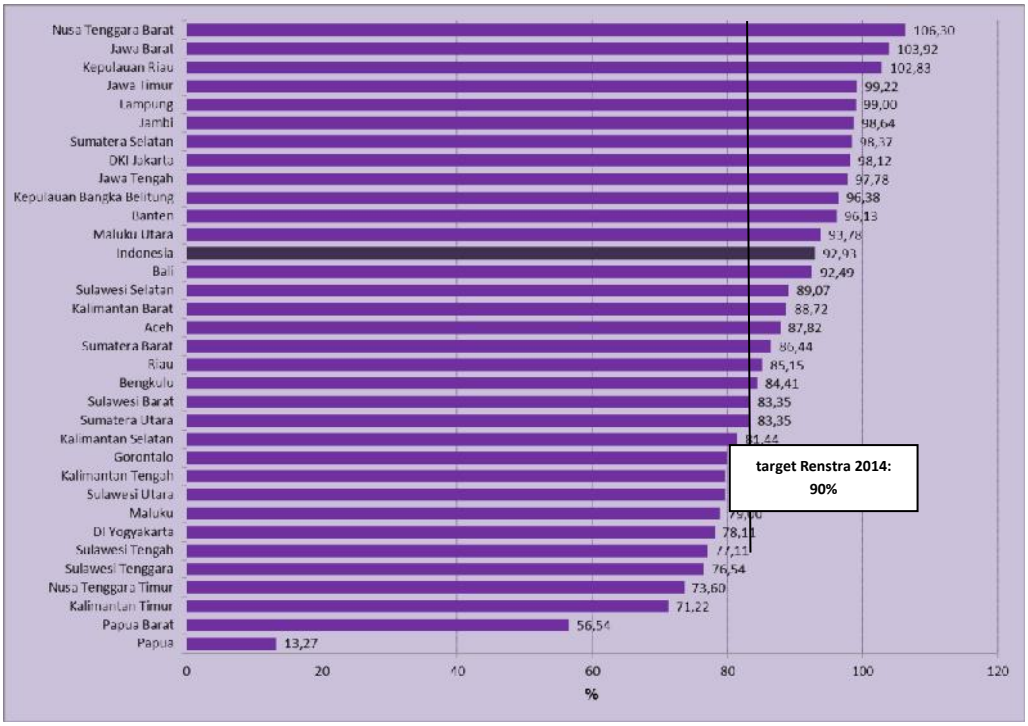

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Tiga provinsi dengan capaian tertinggi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau. Dua provinsi dengan capaian terendah ialah Papua (13,27%) dan Papua Barat (56,54%). Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait pelayanan kesehatan pada bayi tahun 2014 terdapat pada Lampiran 5.20.

5. Pemberian ASI Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin dan mineral). Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk :

a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia enam bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan
c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah terhadap ASI eksklusif.

ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Kolostrum berwarna kekuningan dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung immunoglobulin, protein, dan laktosa lebih sedikit dibandingkan kolostrum tetapi lemak dan kalori lebih tinggi dengan warna susu lebih putih. Selain mengandung zat-zat makanan, ASI juga mengandung zat penyerap berupa enzim tersendiri yang tidak akan menganggu enzim di usus.

Susu formula tidak mengandung enzim sehingga penyerapan makanan tergantung pada enzim yang terdapat di usus bayi.

Mengacu pada target program pada tahun 2014 sebesar 80%, maka secara nasional cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 52,3% belum mencapai target. Menurut provinsi, hanya terdapat satu provinsi yang berhasil mencapai target yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 84,7%. Provinsi Jawa Barat, Papua Barat, dan Sumatera Utara merupakan tiga provinsi dengan capaian terendah.

GAMBAR 5.31
CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

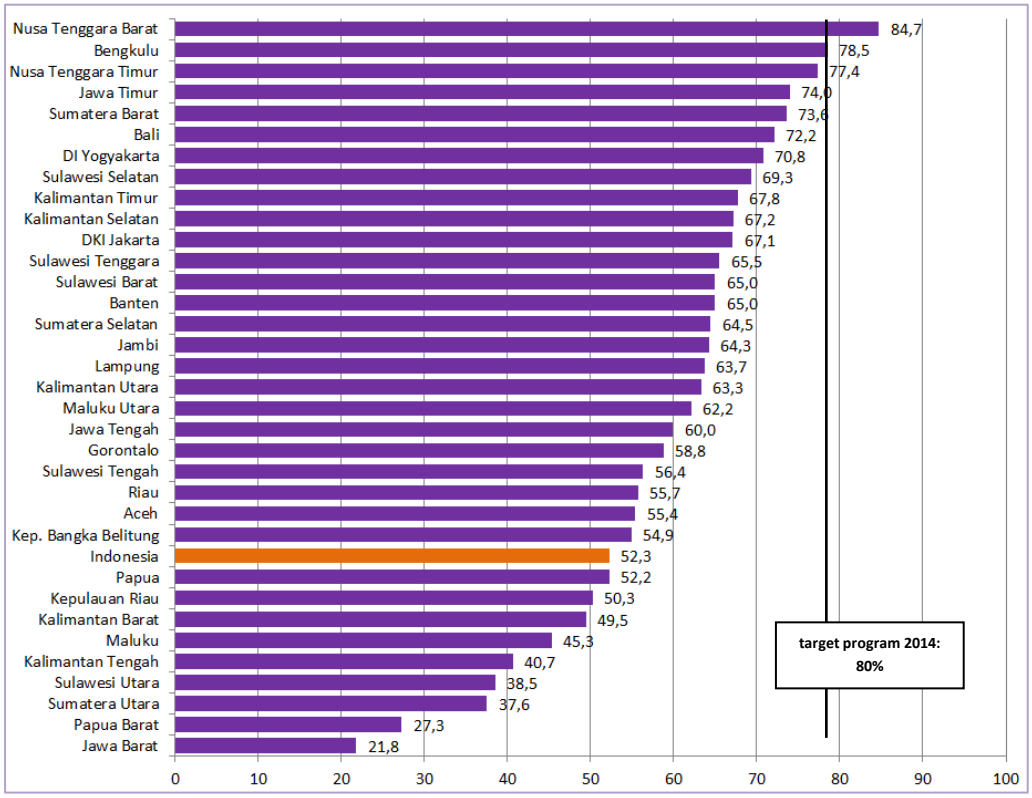

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA Kemenkes RI, 2015

Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.23.

6. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6–59 Bulan

Vitamin A adalah salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak, disimpan dalam hati, dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar tubuh.

Manfaat vitamin A diantaranya (1) meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare, (2) membantu proses penglihatan dalam adaptasi terang ke tempat yang gelap, (3) mencegah kelainan pada sel–sel epitel termasuk selaput lendir mata, (4) mencegah terjadinya proses metaplasi sel–sel epitel sehingga kelenjar tidak memproduksi cairan yang dapat menyebabkan kekeringan mata, (5) mencegah terjadinya kerusakan mata hingga kebutaan, dan (6) vitamin A esensial untuk membantu proses pertumbuhan.

Suplementasi kapsul vitamin A pada balita usia 6-59 bulan bertujuan tidak hanya untuk mencegah kebutaan tetapi juga untuk penanggulangan Kurang Vitamin A (KVA) yaitu suatu

kondisi dimana simpanan vitamin A dalam tubuh berkurang, akan berdampak kelainan pada mata yang umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 4 tahun yang menjadi penyebab utama kebutaan. KVA biasa terjadi pada anak yang menderita kurang energi protein atau gizi buruk tetapi dapat juga terjadi karena gangguan penyerapan pada usus. Tahap awal KVA ditandai dengan gejala rabun senja atau kurang jelas melihat pada malam hari atau menurunnya kadar serum retinol dalam darah. Selanjutnya terdapat kelainan jaringan epitel pada paru-paru, usus, kulit, dan mata.

Penanggulangan masalah KVA pada anak balita sudah dilaksanakan secara intensif sejak tahun 1970-an, melalui distribusi kapsul vitamin A di posyandu setiap enam bulan yaitu bulan Februari dan Agustus dan peningkatan promosi konsumsi makanan sumber vitamin A. Ada dua jenis vitamin A yang diberikan, yaitu yang berwarna biru (100.000 IU) untuk bayi usia 6-11 bulan dan yang berwarna merah (200.000 IU) untuk anak usia 12-59 bulan.

Berdasarkan target program pada tahun 2014 sebesar 90%, maka cakupan pemberian vitamin A secara nasional (85,4%) belum mencapai target namun ada tujuh provinsi telah mencapai target program yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Bengkulu, Jawa Timur. Cakupan pemberian vitamin A pada balita 6-59 bulan tertinggi yaitu DI Yogyakarta sebesar 99,2% dan terendah di Provinsi Papua sebesar 40,5%. Terdapat seperti yang terlihat pada Gambar 5.32 berikut ini.

GAMBAR 5.32
CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

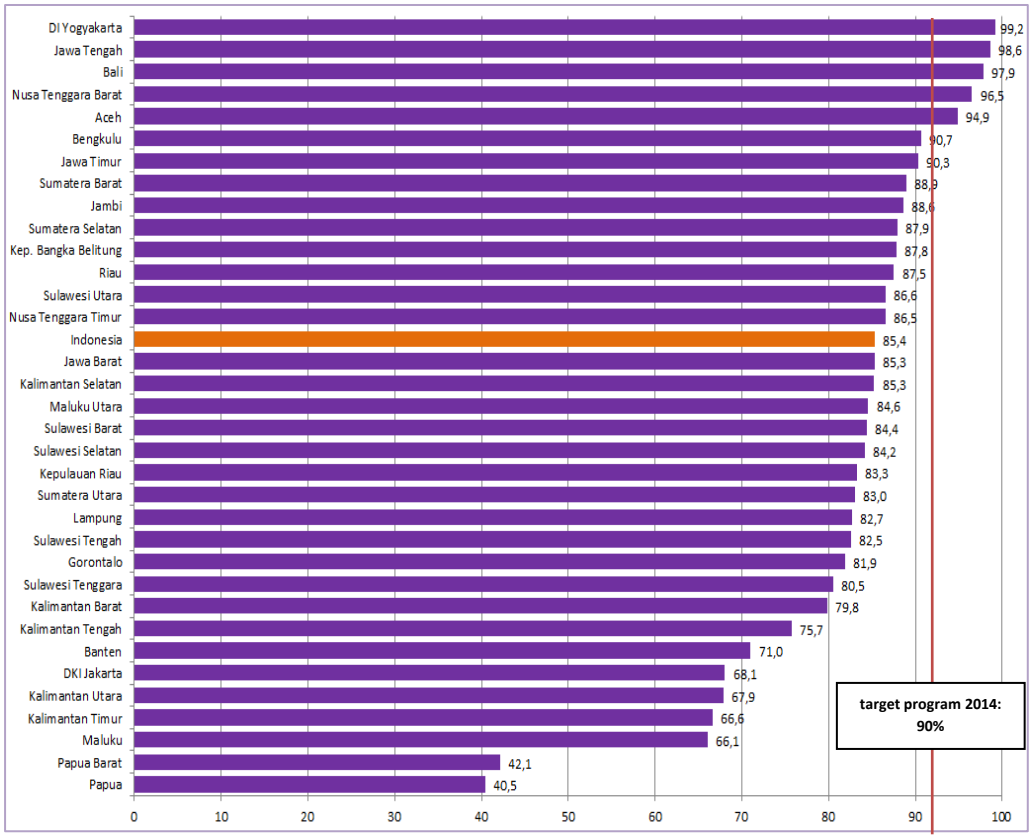

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Besarnya cakupan vitamin A antara lain disebabkan kondisi geografis dan keterjangkauan akses menuju lokasi posyandu dalam pendistribusian vitamin A. Provinsi yang memiliki cakupan vitamin A yang tinggi, cakupan penimbangan balita di posyandu nya juga

tinggi. Begitu pula sebaliknya, provinsi yang memiliki cakupan vitamin A yang rendah seperti Papua dan Papua Barat disebabkan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam penimbangan balita di posyandu (D/S) juga rendah karena kendala geografis.

Capaian pemberian vitamin A pada bayi, anak balita, dan balita menurut provinsi secara rinci dapat dilihat di Lampiran 5.22.

7. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S)

Cakupan penimbangan balita di posyandu (D/S) adalah jumlah balita yang ditimbang di seluruh posyandu yang melapor di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh balita yang ada di seluruh posyandu yang melapor di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Manfaat penimbangan balita diantaranya untuk (1) mengetahui kesehatan, (2) mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan, (3) mengetahui balita sakit atau berat badan dua bulan tidak naik, berat badannya berada di bawah garis merah di kartu menuju sehat, (4) mengetahui balita gizi buruk sehingga dapat dirujuk ke puskesmas, (5) mengetahui kelengkapan imunisasi, dan (6) mendapatkan penyuluhan tentang gizi. Tindak lanjut dari hasil penimbangan selain penyuluhan juga pemberian makanan tambahan dan pemberian suplemen gizi.

Keadaan gizi yang buruk akan menurunkan daya tahan anak sehingga anak mudah sakit hingga berakibat pada kematian. Gizi buruk dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan adalah pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (*golden period*) terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus.

Semakin banyak balita yang ditimbang di posyandu, maka akan semakin mudah mendeteksi adanya balita gizi kurang atau gizi buruk dan semakin cepat dilakukan upaya untuk penanggulangannya.

GAMBAR 5.33
TREN CAKUPAN PENIMBANGAN BALITA (D/S) DI INDONESIA
TAHUN 2010-2014

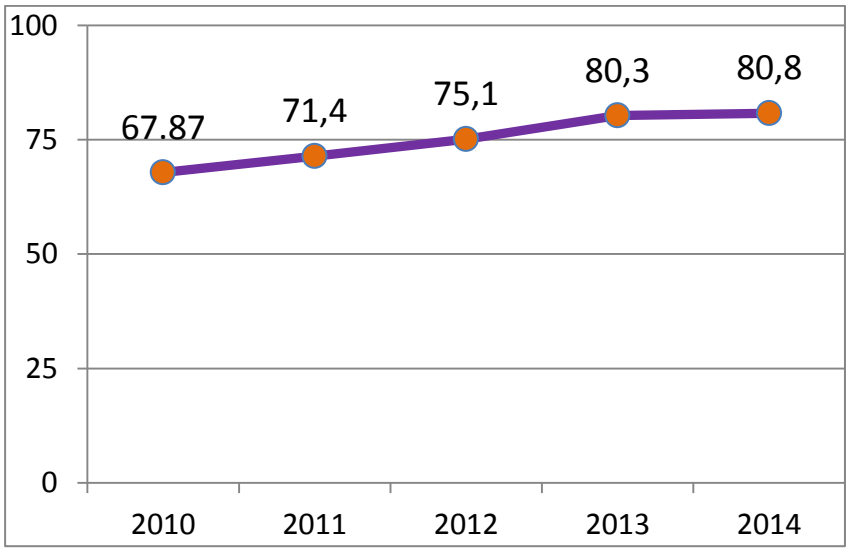

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Cakupan penimbangan balita dari tahun 2010 sampai tahun 2014 di Indonesia cenderung meningkat. Cakupan balita ditimbang pada tahun 2014 di Indonesia sebesar 80,8%. Sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 cakupan penimbangan balita telah mencapai target Renstra 2010-2013, namun pada tahun 2014 target Renstra sebesar 85% tidak tercapai.

Cakupan tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan cakupan 91,2% dan Jawa Barat sebesar 90,2%. Sedangkan cakupan penimbangan balita terendah terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Cakupan penimbangan balita di posyandu per provinsi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 5.24.

8. Imunisasi

Setiap tahun lebih dari 1,4 juta anak di dunia meninggal karena berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain: TBC, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Pertusis, Campak, Polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian.

Proses perjalanan penyakit diawali ketika virus/bakteri/protozoa/jamur, masuk ke dalam tubuh. Setiap makhluk hidup yang masuk ke dalam tubuh manusia akan dianggap benda asing oleh tubuh atau yang disebut dengan antigen. Secara alamiah sistem kekebalan tubuh akan membentuk zat anti yang disebut antibodi untuk melumpuhkan antigen. Pada saat pertama kali antibodi berinteraksi dengan antigen, respon yang diberikan tidak terlalu kuat. Hal ini disebabkan antibodi belum mengenali antigen. Pada interaksi antibodi-antigen yang kedua dan seterusnya, sistem kekebalan tubuh sudah mengenali antigen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga antibodi yang terbentuk lebih banyak dan dalam waktu yang lebih cepat.

Proses pembentukan antibodi untuk melawan antigen secara alamiah disebut imunisasi alamiah. Sedangkan program imunisasi melalui pemberian vaksin adalah upaya stimulasi terhadap sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam upaya melawan penyakit dengan melumpuhkan antigen yang telah dilemahkan yang berasal dari vaksin.

Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, balita, anak-anak, wanita usia subur, dan ibu hamil.

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Seorang anak diimunisasi dengan vaksin yang disuntikkan pada lokasi tertentu atau diteteskan melalui mulut.

Sebagai salah satu kelompok yang menjadi sasaran program imunisasi, setiap bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar Lengkap yang terdiri dari : 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB dan atau DPT-HB-Hib, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak. Dari imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai komitmen Indonesia pada global untuk mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90% secara tinggi dan merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak adalah salah satu penyebab utama kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita.

Indonesia memiliki cakupan imunisasi campak pada tahun 2014 sebesar 94,67% yang berarti telah memenuhi target 90% dari yang telah ditetapkan secara nasional. Menurut provinsi, terdapat 16 provinsi yang telah berhasil mencapai target 90% seperti yang disajikan pada Gambar 5.34 berikut.

GAMBAR 5.34
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

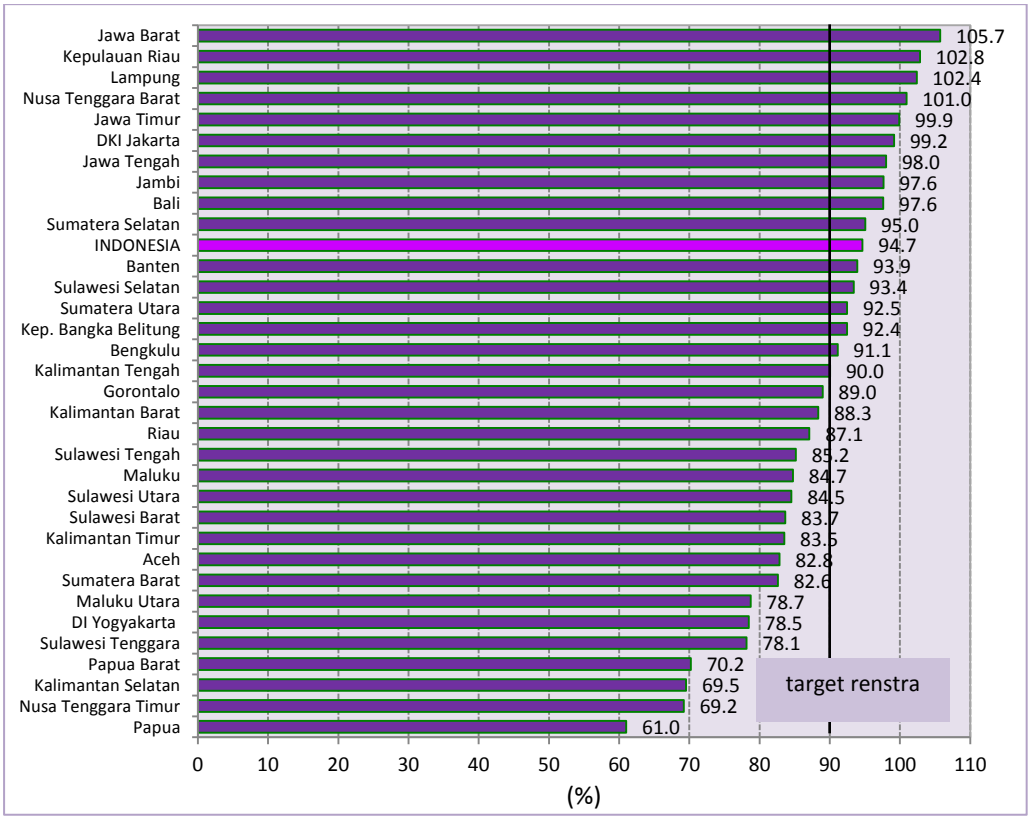

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2015

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa seluruh bayi di Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Riau, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan imunisasi campak. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah yaitu Papua sebesar 61%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 69,20% dan Kalimantan Selatan sebesar 69,55%.

Sedangkan berdasarkan laporan Riskesdas 2013, persentase imunisasi campak pada anak 12–23 bulan secara nasional sebesar 82,1%. Capaian tersebut belum memenuhi target 90% dari yang ditetapkan secara nasional. Menurut Riskesdas 2013, pada tingkat provinsi, hanya delapan provinsi yang telah berhasil mencapai target 90% yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Bali, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, NTB, dan Bengkulu.

b. Imunisasi Lengkap pada Bayi

Program imunisasi pada bayi mengharapkan agar setiap bayi mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan imunisasi dasar tersebut diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap. Capaian indikator ini di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 86,9%. Angka ini belum mencapai target Renstra pada tahun 2014 yang sebesar 90%. Sedangkan menurut provinsi, terdapat sembilan provinsi (27,27%) yang mencapai target Renstra tahun 2014.

GAMBAR 5.35
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

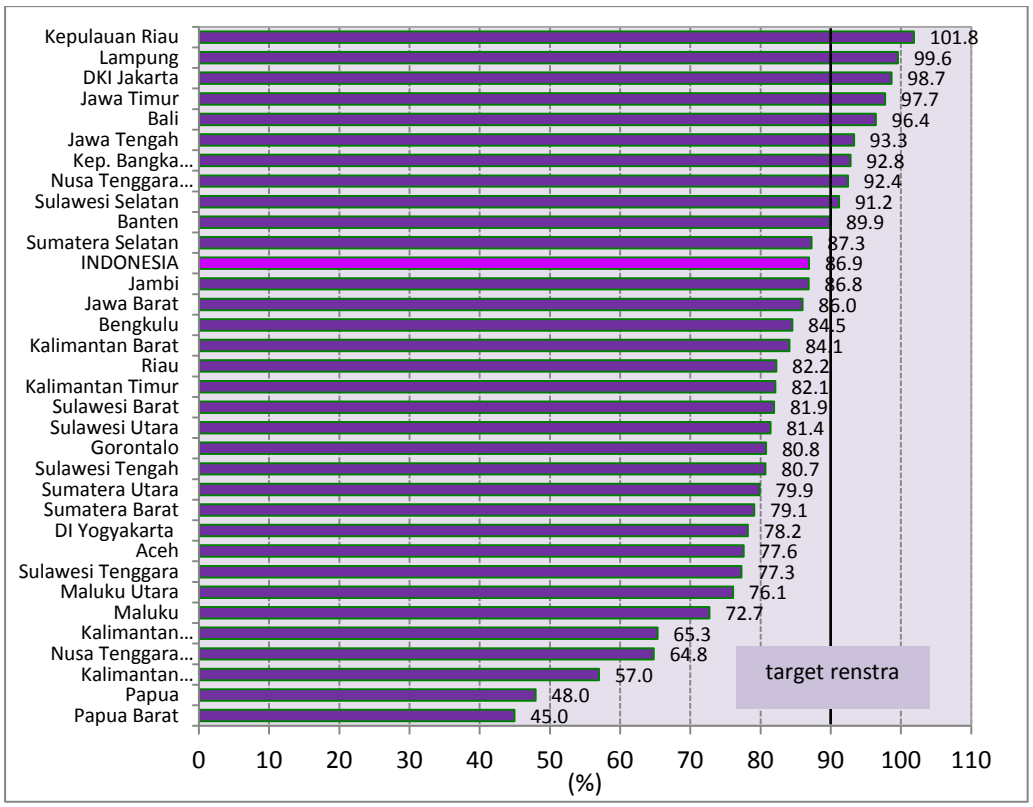

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2015

Tiga provinsi dengan capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi yang tertinggi pada tahun 2014 yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, dan DKI Jakarta. Sedangkan tiga provinsi dengan capaian terendah yaitu Papua Barat sebesar 44,95%, diikuti oleh Papua sebesar 47,95%, dan Kalimantan Tengah sebesar 57,01%. Data dan informasi terkait imunisasi dasar pada bayi yang dirinci menurut provinsi tahun 2014 terdapat pada Lampiran 5.17.

c. Angka D*rop Out* Cakupan Imunisasi DPT/HB1-Campak

Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Namun demikian, pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut dengan *drop out* (DO) imunisasi. Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak, disebut angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak. Indikator ini diperoleh dengan menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi Campak terhadap cakupan imunisasi DPT/HB1.

Angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak pada tahun 2014 sebesar 3,1%. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 3,3%. Angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak menunjukkan kecenderungan penurunan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 yang asumsinya semakin sedikit bayi yang tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kecenderungan penurunan tersebut dijelaskan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.36
ANGKA *DROP OUT* CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB1-CAMPAK PADA BAYI
TAHUN 2007-2014

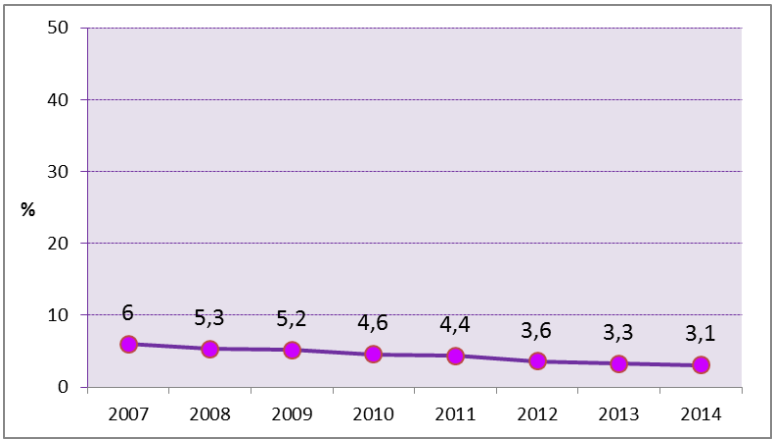

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2015

DO rate DPT/HB1-Campak diharapkan agar tidak melebihi 5%. Batas maksimal tersebut telah berhasil dipenuhi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Data dan informasi lebih rinci mengenai angka *drop out* cakupan imunisasi DPT/HB1-Campak dan DPT/HB(1)-DPT/HB(3) pada tahun 2012 -2014 terdapat pada Lampiran 5.18.

d. Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi yaitu *Universal Child Immunization* (UCI) desa/kelurahan. UCI desa/kelurahan adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Target Renstra Kementerian Kesehatan untuk cakupan desa/ kelurahan UCI pada tahun 2014 sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2014 cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 81,82% yang berarti belum mencapai target yang telah ditetapkan. Cakupan desa/kelurahan UCI menurut provinsi terdapat pada Gambar 5.37.

Pada tahun 2014 terdapat lima provinsi memiliki capaian sebesar 100% yang berarti mencapai target Renstra tahun 2014, yaitu Lampung, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Sedangkan Provinsi Papua memiliki capaian terendah sebesar 13,66%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 34,55%, dan Kalimantan Tengah sebesar 66,93%. Informasi terkait capaian desa UCI pada tahun 2011-2013 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.19.

GAMBAR 5.37
CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

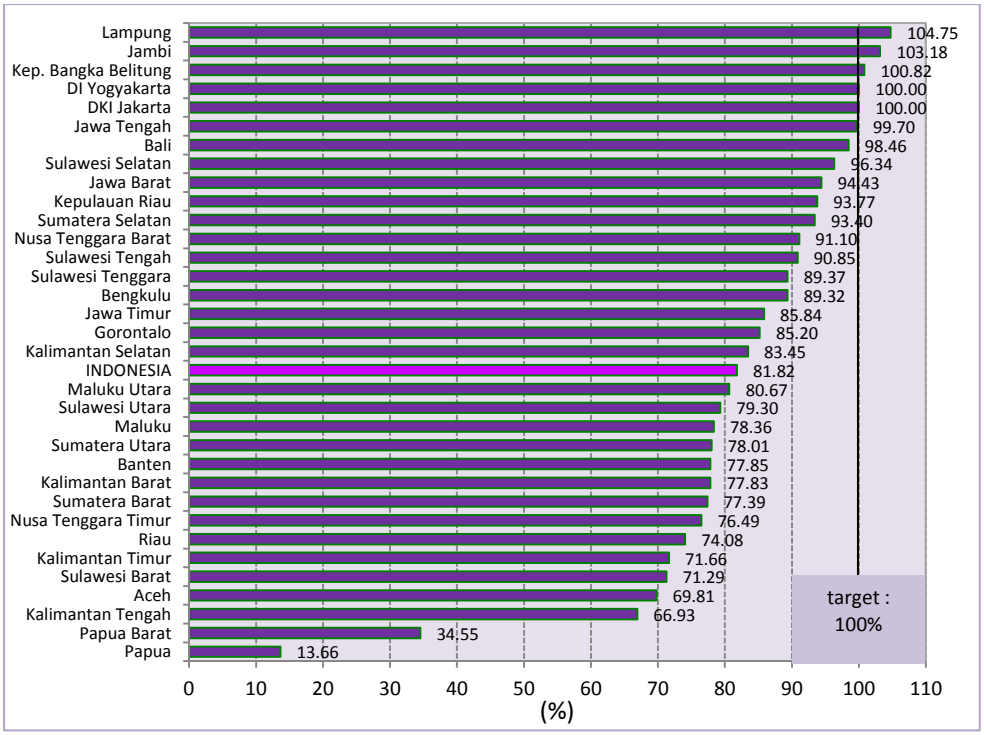

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2015

9. Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Kehidupan anak, usia dibawah lima tahun merupakan bagian yang sangat penting. Usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan, perkembangan, dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan secara umum.

Kesehatan bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Untuk itu dipakai indikator-indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah satu diantaranya adalah pelayanan kesehatan anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12-59 bulan.

Pelayanan kesehatan pada anak balita yang dilakukan oleh tenaga kesehatan meliputi :

1. Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal delapan kali setahun (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan minimal delapan kali dalam setahun).
2. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus
3. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang balita minimal dua kali dalam setahun.
4. Pelayanan Anak Balita Sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Capaian Indikator pelayanan kesehatan anak balita pada tahun 2014 sebesar 75,82% yang berarti belum mencapai target Renstra pada tahun 2014 yang sebesar 85%. Namun, meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 70,12%. Capaian indikator menurut provinsi

menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki capaian di bawah 85% seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.38
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

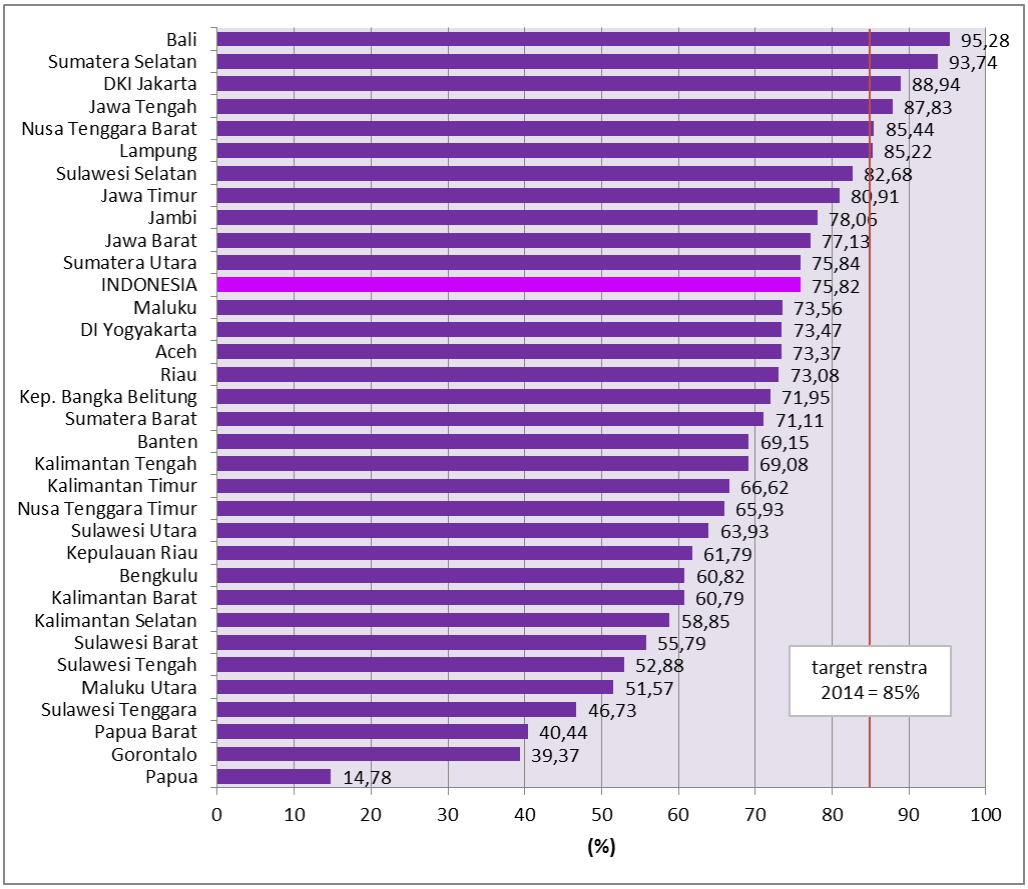

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Pada tahun 2014 terdapat enam provinsi yang mencapai target 85%, yaitu Bali, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.38 diatas. Provinsi Bali memiliki capaian tertinggi yaitu sebesar 95,28%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Papua sebesar 14,78%. Data dan informasi menurut provinsi terkait upaya pelayanan kesehatan anak balita disajikan pada Lampiran 5.20

10. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat

Mulai masuk sekolah merupakan hal penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah, seperti misalnya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi/ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah.

Anak usia sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/sederajat kelas satu. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil). Tenaga

kesehatan yang dimaksud yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKGS. Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil.

Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan pada umumnya.

Upaya kesehatan pada kelompok ini yang dilakukan melalui penjaringan kesehatan terhadap murid SD/MI kelas satu juga menjadi salah satu indikator yang dievaluasi keberhasilannya melalui Renstra Kementerian Kesehatan. Kegiatan penjaringan kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah, maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Penjaringan kesehatan diukur dengan menghitung persentase SD/MI yang melakukan penjaringan kesehatan terhadap seluruh SD/MI yang menjadi sasaran penjaringan. Cakupan SD atau sederajat yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk siswa kelas satu pada tahun 2014 di Indonesia sebesar 82,17%, mengalami peningkatan dibandingkan cakupan tahun 2013 yang sebesar 73,91%. Namun, belum mencapai target Renstra 2014 sebesar 95%.

GAMBAR 5.39
CAKUPAN SEKOLAH DASAR/SETINGKAT YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/SETINGKAT KELAS 1 MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

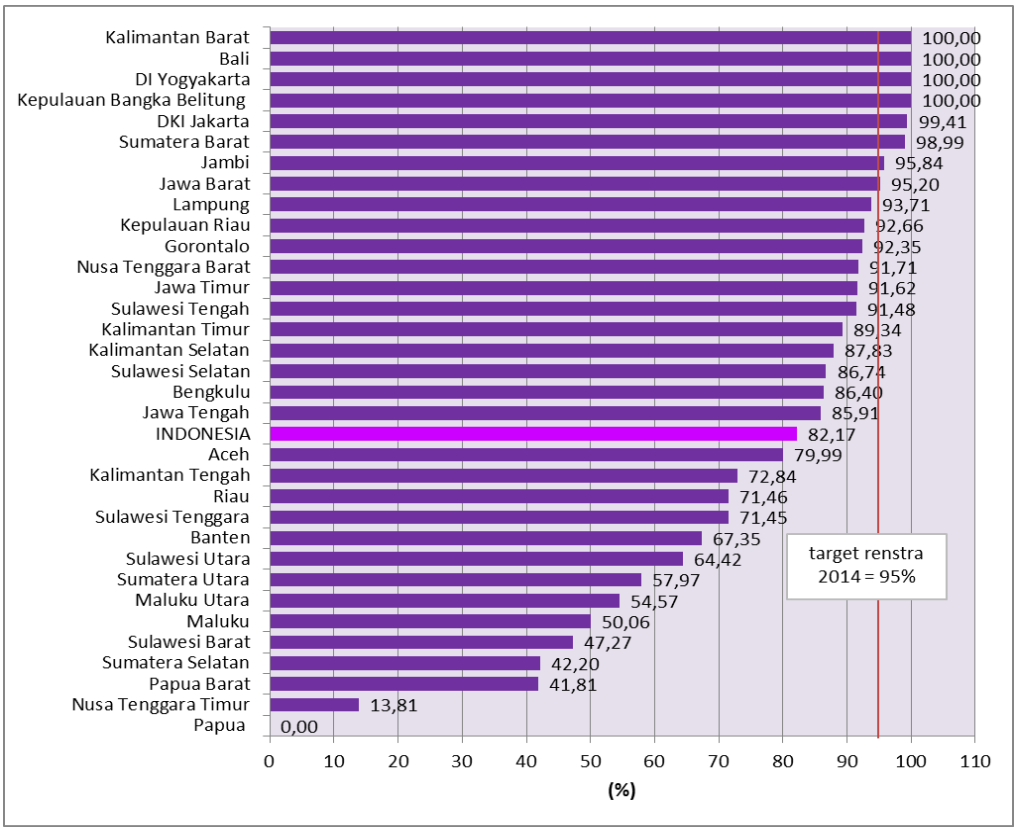

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Dari Gambar 5.39 diketahui bahwa sebagian besar provinsi belum memenuhi target Renstra 2014 yang sebesar 95%, hanya delapan provinsi yang telah mencapai target. Terdapat empat provinsi dengan capaian 100%, yakni Provinsi Kalimantan Barat, Bali, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung. Capaian terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 0%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 13,51%, dan Papua Barat sebesar 41,81%.

Sulitnya memenuhi target penjaringan SD/MI dapat disebabkan oleh beberapa masalah. Masalah utama yang sering ditemukan di daerah yaitu kurangnya tenaga di puskesmas sedangkan jumlah SD/MI cukup banyak, sehingga untuk melaksanakan penjaringan kesehatan membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu juga manajemen pelaporan belum terintegrasi dengan baik. Walaupun kegiatan penjaringan kesehatan telah dilaksanakan di puskesmas namun di beberapa provinsi, pengelola program UKS di kabupaten/kota berada pada struktur organisasi yang berbeda sehingga menjadi penyebab koordinasi pencatatan dan pelaporan tidak berjalan dengan baik. Data dan informasi tentang cakupan penjaringan siswa SD/sederajat kelas satu menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.29.

11. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Salah satu upaya kesehatan anak yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden yaitu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di puskesmas. Program ini mulai dikembangkan pada tahun 2003 yang bertujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada remaja.

Puskesmas yang memiliki program PKPR memberikan layanan baik di dalam maupun di luar gedung yang ditujukan bagi kelompok remaja berbasis sekolah ataupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar layanan yang diberikan dapat menjangkau semua kelompok remaja (usia 10-18 tahun). Kriteria yang ditetapkan bagi puskesmas yang mampu laksana PKPR yaitu :

1) Melakukan pembinaan pada minimal satu sekolah (sekolah umum, sekolah berbasis agama) dengan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di sekolah binaan minimal dua kali dalam setahun;
2) Melatih kader kesehatan remaja di sekolah minimal sebanyak 10% dari jumlah murid di sekolah binaan; dan
3) Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang memerlukan konseling yang kontak dengan petugas PKPR.

Layanan PKPR merupakan pendekatan yang komprehensif dan menekankan pada upaya promotif/preventif berupa pembekalan kesehatan dan peningkatan keterampilan psikososial dengan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS). Layanan konseling menjadi ciri dari PKPR mengingat permasalahan remaja yang tidak hanya berhubungan dengan fisik tetapi juga psikososial. Upaya penjangkauan terhadap kelompok remaja juga dilakukan melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), *Focus Group Discussion* (FGD), dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kelompok remaja lainnya.

Fenomena *peer groups* (kelompok sebaya) juga menjadi perhatian pada program PKPR. Oleh karena itu, program ini juga memberdayakan remaja sebagai konselor sebaya yang diharapkan mampu menjadi agen pengubah (*agent of change*) di kelompoknya. Konselor sebaya ini sangat potensial karena adanya kecenderungan pada remaja untuk memilih teman sebaya sebagai tempat berdiskusi dan rujukan informasi.

Selain pemberian informasi, edukasi, dan kegiatan seperti disebutkan di atas, pelayanan kesehatan sekolah ini meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan perkembangan kecerdasan, pemberian imunisasi, penemuan kasus-kasus dini yang mungkin terjadi, pengobatan sederhana,

pertolongan pertama serta rujukan bila menemukan kasus yang tidak dapat ditanggulangi di sekolah.

Persentase kabupaten/kota dengan minimal empat puskesmas mampu tata laksana PKPR menurut provinsi pada tahun 2014 terdapat pada Gambar 5.40.

GAMBAR 5.40
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA PKPR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

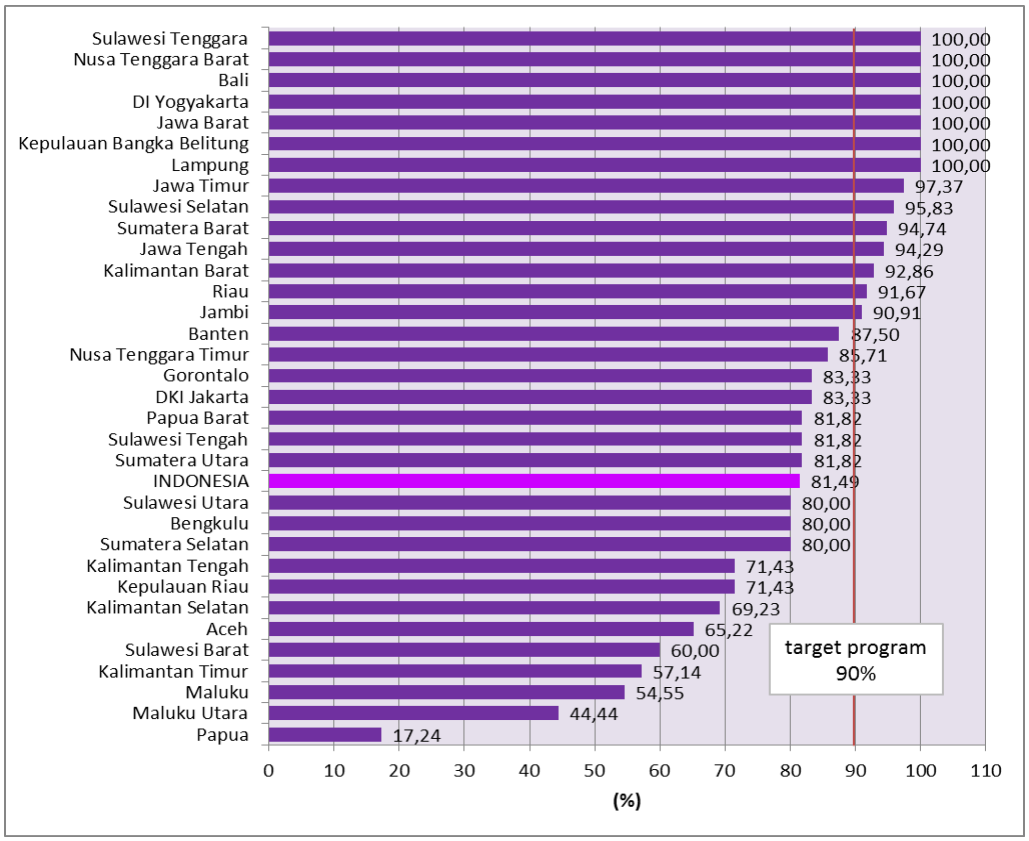

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Terdapat empat belas provinsi (42,4%) telah mencapai target program tahun 2014 yang sebesar 90%. Persentase kabupaten/kota dengan minimal empat puskesmas mampu tata laksana PKPR di Indonesia tahun 2014 sebesar 81,49%, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 81,6%.

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal empat puskesmas PKPR pada tahun 2014 sebanyak 405 kabupaten/kota. Sedangkan jumlah puskesmas PKPR tahun 2014 sebanyak 2.995 puskesmas yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi terkait persentase kabupaten/kota dengan puskesmas mampu laksana PKPR disajikan pada Lampiran 5.27.

12. Pelayanan Kesehatan pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari jutaan anak di dunia yang tidak mendapat perlindungan penuh, banyak diantara mereka terlibat dalam kekerasan, terbuang, terlantar, dijadikan pekerja, terabaikan dan dilecehkan. Berbagai bentuk kekerasan membatasi kesempatan anak-anak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan mewujudkan impian mereka.

Menurut KOMNAS Perlindungan Anak (2006), pemicu kekerasan terhadap anak diantaranya adalah : 1) Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua, 2) Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi, 3) Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua. Disamping itu, kekerasan pada anak terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar dilingkungan masyarakat.

Organisasi Kesehatan Dunia/WHO mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi, komersial atau lainnya yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk penyediaan akses pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan pada anak yang terdiri dari pelayanan di tingkat dasar melalui puskesmas. Pendekatan pelayanan kesehatan KtA di puskesmas dilakukan melalui tiga aspek yaitu meliputi aspek medis (pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang), medikolegal (visum et repertum) dan psikososial (rumah aman). Penatalaksanaan kasus merupakan multidisiplin dengan melibatkan lembaga pelayanan kesehatan, lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum dan lembaga sosial lainnya, yang terbentuk dalam mekanismes kerja jejaring.

Pelayanan kesehatan lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif seperti penyuluhan mengenai dampak KtA terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis di sekolah melalui program UKS dan di tingkat masyarakat memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK dan lain-lain. Selain itu, puskesmas juga memberikan pelayanan kuratif yaitu penanganan darurat medis, pelayanan rehabilitatif dengan memberikan konseling. pelayanan rujukan medikolegal dan psikososial.

Program KtA diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan secara komprehensif di pelayanan tingkat dasar dan rujukan. Target puskesmas mampu tata laksana KtA adalah setiap kabupaten/kota memiliki minimal dua puskesmas mampu tata laksana KtA. Kriterianya adalah memiliki tenaga terlatih tata laksana kasus KtA (dokter atau dokter gigi dan perawat atau bidan) dan melakukan pelayanan rujukan kasus KtA.

Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyiapan fasilitator pusat dan daerah serta tenaga pemberi pelayanan di puskesmas yang dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan (training of trainer) secara berjenjang dalam rangka menyediakan puskesmas mampu tata laksana KtA dengan menggunakan dana APBN maupun dekonsentrasi. Selain itu, pada tahun 2012–2013 telah dilaksanakan penguatan pelayanan rujukan di rumah

sakit. Jumlah puskesmas mampu tata laksana KtA pada tahun 2014 sebanyak 1.694 puskesmas. Persentase kabupaten/kota dengan minimal dua puskesmas mampu tata laksana KtA yaitu 78,07%, meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 76,26%. Saat ini, sudah tersedia 71 RS Umum/RS Bhayangkara di 28 provinsi yang memiliki PPT/PKT (menjadi Pusat Pelayanan Terpadu untuk korban KtA) dan 39 RS di 33 provinsi yang melakukan pelayanan KtA di IGD oleh tenaga kesehatan terlatih. Pada tahun 2014 target program perlindungan kesehatan anak yaitu puskesmas mampu tata laksana KtA dengan indikator tiap kabupaten/kota memiliki minimal dua puskesmas yang mampu tata laksana kasus KtA sebesar 90% belum tercapai. Hal itu disebabkan karena program tersebut bukan merupakan program prioritas. Akibatnya dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap program KtA dirasakan kurang. Hal itu dapat dilihat dari dukungan anggaran yang belum memadai dan sebagian besar tenaga kesehatan yang telah dilatih penanganan KtA dimutasi khususnya dokter.

Dalam Pasal 108 KUHAP ayat (3) dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Untuk itu, telah dibuat Permenkes Nomor 68 tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Diharapkan dengan Permenkes ini, tenaga kesehatan dapat bekerja lebih profesional.

GAMBAR 5.41
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA KTA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

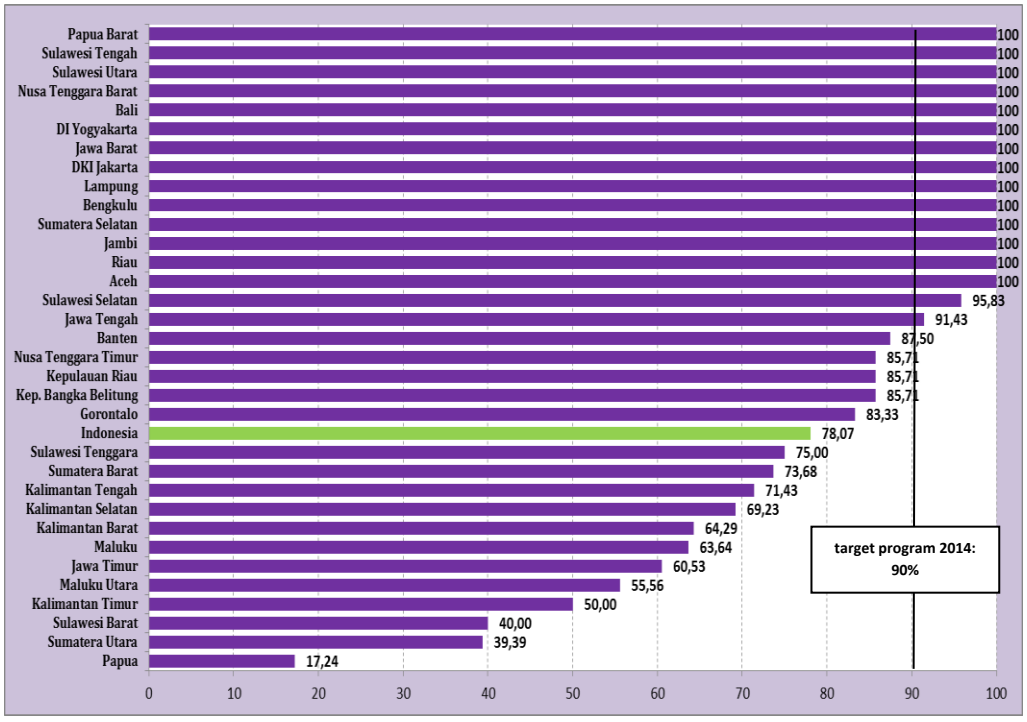

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Pada Gambar 5.41 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapat 78,07% kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki dua puskesmas mampu tata laksana KtA. Pada tahun 2014 terdapat empat belas provinsi dengan persentase 100%. Jumlah tersebut sama dengan kondisi pada tahun 2013. Provinsi dengan persentase 100% artinya seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut telah memiliki sedikitnya dua puskesmas mampu tata laksana KtA. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat enam provinsi yang mengalami

penurunan dari 100% yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Penurunan ini disebabkan karena dukungan anggaran yang kurang sebagai dampak efisiensi.

Sebanyak enam belas provinsi sudah memenuhi target program tahun 2014 sebesar 90%. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi terkait persentase kabupaten/kota dengan puskesmas mampu tata laksana KtA disajikan pada Lampiran 5.26.

13. Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar dan Anak Jalanan di Panti

Upaya kesehatan anak juga dilakukan untuk menjangkau kelompok anak terlantar dan anak jalanan. Kelompok umur remaja (usia 14–18 tahun) merupakan bagian terbesar dari kelompok anak jalanan. Salah satu masalah kesehatan yang dihadapi anak jalanan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini tidak terlepas dari kondisi anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal yang sehat. Anak jalanan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, diare, kulit, dan lain sebagainya.

Anak jalanan secara psikologis memiliki konsep diri negatif, tidak atau kurang percaya diri, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, dan emosi yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh orang lain dan cenderung berperilaku antisosial (berkelahi, mencuri, merampas, menggunakan dan menjalankan bisnis NAPZA, dan perilaku seks bebas). Selain itu, anak dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, dan seksual. Mereka juga dapat mengalami eksploitasi fisik dan seksual terutama oleh orang dewasa hingga kehilangan nyawa, sehingga timbul masalah kesehatan yang terkait kesehatan reproduksi seperti Infeksi Menular Seksual (IMS/PMS) dan HIV/AIDS.

Upaya kesehatan bagi anak terlantar dilakukan pada kelompok-kelompok sasaran seperti di panti/LKSA anak terlantar/anak jalanan, *shelter*, rumah singgah dan lain-lain. Upaya kesehatan yang dilakukan mencakup aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas bekerjasama dengan unsur dari sektor terkait dan LSM memberikan pelayanan kesehatan bagi anak terlantar dan anak jalanan.

Puskesmas melakukan pembinaan kesehatan bagi bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja di panti (LKSA) adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan terhadap anak dipanti/LKSA serta diberikan berdasarkan paket-paket pelayanan yang disesuaikan dengan kelompok usia anak yang meliputi: Pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan anak balita dan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengobatan, pelayanan imunisasi, pelayanan gizi, promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, pengendalian penyakit, kesehatan jiwa dan pemeriksaan serta pemeliharaan kebersihan diri.

Pada tahun 2014 terdapat 3.315 panti anak terlantar yang berada di wilayah kerja 1.738 puskesmas. Rata-rata puskesmas mempunyai dua panti anak terlantar di wilayah kerjanya. Dari seluruh puskesmas yang memiliki panti anak terlantar, terdapat 1.370 (78,83%) puskesmas yang telah melakukan pembinaan. Angka ini meningkat dari tahun 2013 yakni sebesar 1.270 (72,53%) puskesmas yang membina panti anak terlantar.

Target pembinaan kesehatan anak di panti/LKSA yaitu setiap puskesmas membina panti/LKSA yang berada di wilayah kerjanya dan melakukan pelayanan rujukan di rumah sakit. Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pada tahun 2014 yaitu melalui kegiatan pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan perlindungan anak lintas program/lintas sektor tingkat pusat di Jakarta, pertemuan peningkatan akses pelayanan kesehatan ABH, panti dan anak jalanan serta asistensi terpadu pelayanan kesehatan

perlindungan anak yang melibatkan pengelola program perlindungan anak di dinkes provinsi, dinkes kabupaten/kota, puskesmas yang membina panti, lintas sektor, organisasi profesi dan LSM. Data dan informasi berdasarkan provinsi terkait puskesmas yang melakukan pembinaan di panti anak terlantar dapat dilihat pada Lampiran 5.28.

14. Pelayanan Kesehatan Anak Dengan Disabilitas (ADD)

Sesuai amanat dari Undang–undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, anak dengan disabilitas merupakan bagian dari anak Indonesia yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Upaya perlindungan bagi anak dengan disabilitas sama dengan anak lainnya yaitu upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan dasar anak tersebut meliputi asah, asih, dan asuh yang dapat diperoleh melalui upaya di bidang kesehatan maupun pendidikan dan sosial. Sebagai salah satu negara yang melakukan ratifikasi terhadap konvensi hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2011, Indonesia menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Indonesia harus melaporkan perkembangan program kesehatan bagi ADD oleh Kementerian Kesehatan melalui Kementerian Luar Negeri di tingkat internasional

Prinsip umum konvensi yaitu meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk dalam hal aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Terkait anak dengan disabilitas, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya diantaranya deteksi dini, stimulasi dan intervensi tumbuh kembang anak, skrining hipotiroid kongenital dan melibatkan anak dengan disabilitas untuk menjadi kader kesehatan di Sekolah Luar Biasa (SLB) melalui Upaya Kesehatan Sekolah (UKS).

Program yang dilakukan bagi ADD selain melalui program UKS di SLB, juga melalui pembinaan kesehatan ADD di tingkat keluarga. Pembinaan kesehatan ADD di tingkat keluarga dikembangkan, mengingat sebagian besar ADD berada di masyarakat sehingga perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (*community awareness)* tentang hak-hak anak dengan disabilitas dan upaya pemberdayaan masyarakat/keluarga/orangtua, agar dapat melakukan pengasuhan yang benar apabila memiliki anak dengan disabilitas. Diharapkan program ini dapat menumbuhkan kemandirian orangtua/keluarga untuk mampu membimbing dan melatih anak tentang aktivitas hidup sehari-hari seperti *toilet training*, kebersihan diri termasuk menyikat gigi sendiri, memperhatikan tumbuh kembang anak dengan memberikan asupan gizi yang memadai, mengenal tanda-tanda penyakit dan upaya pencegahannya serta memberikan latihan sederhana bagi anak agar dapat mencapai kemampuan optimal sesuai potensi yang dimiliki.

Target pembinaan SLB oleh puskesmas adalah puskesmas yang melakukan satu atau lebih pelayanan kesehatan melalui UKS di SLB, antara lain penyuluhan tentang kesehatan anak, penyuluhan tentang kesehatan lingkungan, penjaringan kesehatan, pemberantasan sarang nyamuk, imunisasi, pengobatan, dan lain-lain.

Tahun 2014 target pembinaan pelayanan kesehatan oleh puskesmas melalui UKS di SLB dilaksanakan di 27 provinsi yaitu 22 provinsi di tahun 2013 ditambah lima provinsi pengembangan baru yaitu Nusa Tenggara Timur, Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Pembinaan pelayanan kesehatan oleh puskesmas melalui UKS di SLB di lima provinsi pengembangan baru, sudah berjalan di empat provinsi dengan capaian 100% sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dilaksanakan pembinaan.

Tahun 2014 capaian Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN HAM) untuk pembinaan kesehatan anak di SLB melalui program UKS dengan target dilakukan di 27 Provinsi hanya 18 provinsi yang capaiannya 100%. Dari sebanyak 501 puskesmas yang memiliki SLB di wilayah kerjanya, hanya 89,62 % (449 puskesmas) yang membina kesehatan anak penyandang cacat di SLB. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 498 puskesmas. Penyebab turunnya capaian dan belum dilaksanakannya pembinaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah karena program tersebut bukan merupakan program prioritas sehingga sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan masih kurang sehingga perlu ditingkatkan koordinasi dan sosialisasi internal terkait Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN HAM). Kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2014 yaitu, Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Perlindungan Anak LP/LS Tingkat Pusat, Asistensi terpadu yankes perlindungan anak dan orientasi pedoman yankes anak dengan disabilitas (untuk petugas dan keluarga) dan pedoman pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja penyandang disabilitas.

15. Pelayanan Kesehatan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH)

Data tentang ABH setiap tahun diperkirakan sekitar 5000-7000 anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di lapas/rutan anak maupun dewasa. ABH di lapas/rutan mayoritas anak usia remaja (12-18 tahun) dengan berbagai masalah kesehatan. Alasan utama yang menyebabkan anak terpaksa menjalani hukuman pidana di lapas, yaitu terkait kasus narkoba (NAPZA), perbuatan asusila (pencabulan, perkosaan), dan masalah kriminal lainnya (pencurian, pembunuhan). ABH dengan kasus asusila dan narkoba sangat erat terkait dengan masalah kesehatan reproduksi remaja; hal ini berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis. Masalah kesehatan pada ABH, pada umumnya yaitu infeksi kulit (seperti scabies), infeksi saluran pernafasan (ISPA, TB), masalah kesehatan reproduksi remaja (infeksi menular seksual termasuk HIV & AIDS), masalah narkoba (NAPZA termasuk rokok), dan masalah kesehatan yang disebabkan kondisi sanitasi lingkungan lapas masih kurang.

Kebijakan dan strategi dalam program kesehatan bagi ABH dikembangkan sesuai dengan indikator pada Inpres No. 3 Tahun 2010-2011 dilanjutkan pada tahun 2012–2014 sebagai RAN HAM, yaitu pembinaan kesehatan bagi ABH di lapas/rutan dan rujukan di rumah sakit. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyuluhan PHBS, penyuluhan kesehatan anak, penyuluhan kesehatan lingkungan, penjaringan kesehatan, pemberantasan sarang nyamuk, imunisasi, pengobatan, dan lain–lain.

Target program puskesmas membina lapas yaitu puskesmas yang melakukan satu atau lebih pelayanan kesehatan di lapas. Tahun 2014 capaian RAN HAM untuk pembinaan kesehatan oleh puskesmas terhadap ABH di lapas/rutan dilaksanakan di 29 provinsi. Dari 29 provinsi tersebut ada empat provinsi yang merupakan daerah pengembangan baru yaitu Provinsi Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo dan Maluku Utara. Pembinaan pelayanan kesehatan oleh puskesmas terhadap ABH di lapas/rutan di empat provinsi pengembangan baru hanya berjalan di Provinsi Gorontalo dengan capaian 100% sedangkan di provinsi Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Maluku Utara belum dilaksanakan pembinaaan. Menurut laporan pengelola program di ketiga dinkes tersebut hal ini disebabkan program tersebut bukan merupakan program prioritas sehingga sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan masih kurang sehingga perlu ditingkatkan koordinasi dan sosialisasi internal terkait RAN HAM.

Kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2014 yaitu pertemuan peningkatan akses pelayanan kesehatan ABH, panti dan anak jalanan serta asistensi terpadu pelayanan kesehatan perlindungan anak. yang melibatkan pengelola program perlindungan anak di dinkes provinsi, dinkes kabupaten/Kota, puskesmas yang membina lapas/rutan, lintas sektor, organisasi profesi dan LSM.

***

VI

PENGENDALIAN PENYAKIT

VI PENGENDALIAN PENYAKIT

Angka kesakitan dan kematian penyakit merupakan indikator dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat. Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit perlu upaya pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan penyakit yang ditularkan melalui binatang.

Selain membahas pengendalian penyakit yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan nasional, pada subbab ini juga dibahas pengendalian penyakit di daerah tropis yang salah satunya disebabkan oleh nyamuk, juga penyakit *neglected disease* seperti filariasis.

A. TUBERKULOSIS

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis.* Penyakit ini menyebar melalui *droplet* orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis.

Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan *Case Notification Rate* (CNR), prevalensi (didefinisikan sebagai jumlah kasus tuberkulosis pada suatu titik waktu tertentu), dan mortalitas/kematian (didefinisikan sebagai jumlah kematian akibat tuberkulosis dalam jangka waktu tertentu).

1. Kasus Baru BTA Positif (BTA+)

Pada tahun 2014 ditemukan jumlah kasus baru BTA+ sebanyak 176.677 kasus, menurun bila dibandingkan kasus baru BTA+ yang ditemukan tahun 2013 yang sebesar 196.310 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus baru BTA+ di tiga provinsi tersebut sebesar 40% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia.

Menurut jenis kelamin, kasus BTA+ pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu 1,5 kali dibandingkan kasus BTA+ pada perempuan. Pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia kasus BTA+ lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Disparitas paling tinggi antara laki-laki dan perempuan terjadi di Kep. Bangka Belitung, kasus pada laki-laki hampir dua kali lipat dari kasus pada perempuan.

Menurut kelompok umur, kasus baru paling banyak ditemukan pada kelompok umur 25-34 tahun yaitu sebesar 20,76% diikuti kelompok umur 45-54 tahun sebesar 19,57% dan pada kelompok umur 35-44 tahun sebesar 19,24%. Proporsi kasus baru BTA+ menurut kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 6.1 berikut ini.

GAMBAR 6.1
PROPORSI KASUS BARU BTA+ MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2014

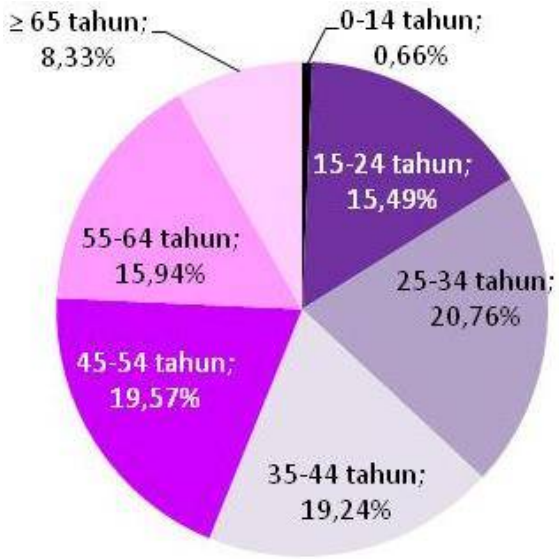

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Kasus baru BTA+ pada kelompok umur 0-14 tahun merupakan proporsi yang paling rendah. Dengan demikian terlihat bahwa kasus baru BTA+ rata-rata terjadi pada kelompok umur dewasa.

2. Proporsi pasien baru BTA positif di antara semua kasus TB

Proporsi pasien baru BTA+ di antara semua kasus TB menggambarkan prioritas penemuan pasien TB yang menular di antara seluruh pasien TB paru yang diobati. Angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65%. Apabila proporsi pasien baru BTA+ di bawah 65% maka hal itu menunjukkan mutu diagnosis yang rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang menular (pasien BTA+).

GAMBAR 6.2
PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU
DI INDONESIA TAHUN 2008-2014

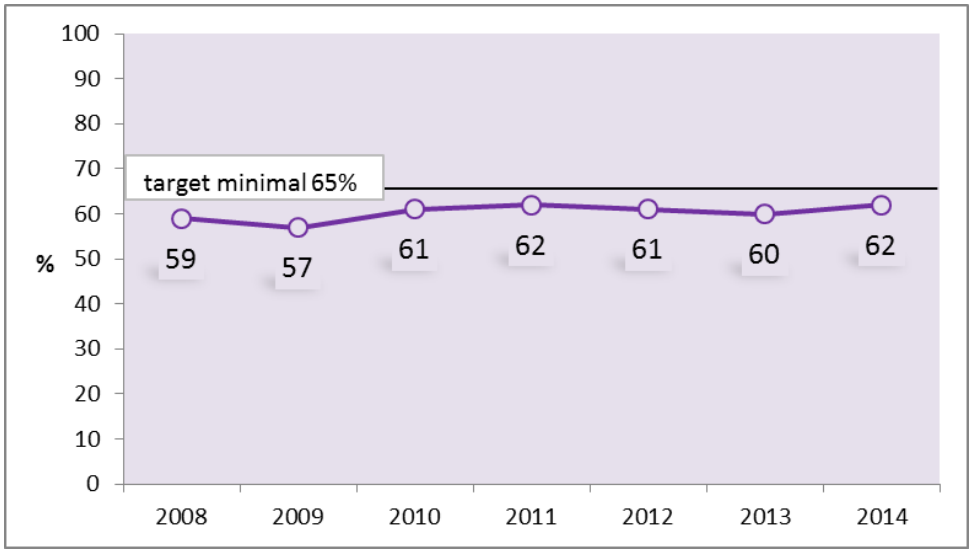

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Gambar 6.2 memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2014 proporsi pasien baru BTA+ di antara seluruh kasus belum mencapai target yang diharapkan. Hal itu mengindikasikan mutu diagnosis yang rendah dan kurangnya prioritas menemukan kasus BTA+ di Indonesia. Namun, sebanyak 63,6% provinsi telah mencapai target tersebut. Papua Barat merupakan provinsi dengan proporsi pasien baru BTA+ di antara seluruh kasus yang terendah yaitu 38%.

GAMBAR 6.3
PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

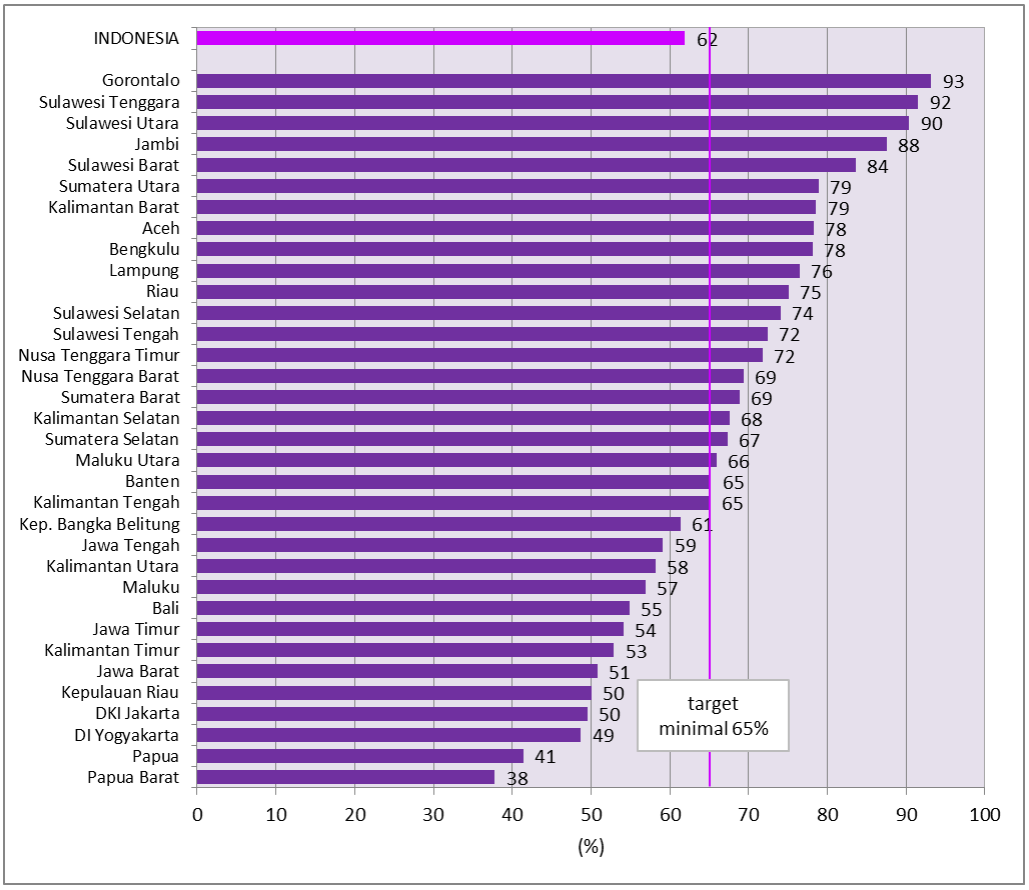

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

3. Angka notifikasi kasus atau *case notification rate* (CNR)

Angka notifikasi kasus adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (*trend)* meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut.

Gambar 6.4 menunjukkan angka notifikasi kasus baru TB paru BTA+ dan angka notifikasi seluruh kasus TB per 100.000 penduduk dari tahun 2008-2014. Angka notifikasi kasus BTA+ pada tahun 2014 di Indonesia sebesar 70 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 81 per 100.000 penduduk. Begitu juga dengan angka notifikasi seluruh kasus TB per 100.000 penduduk yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 113 per 100.000 penduduk.

GAMBAR 6.4
ANGKA NOTIFIKASI KASUS BTA+ DAN SELURUH KASUS
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2014

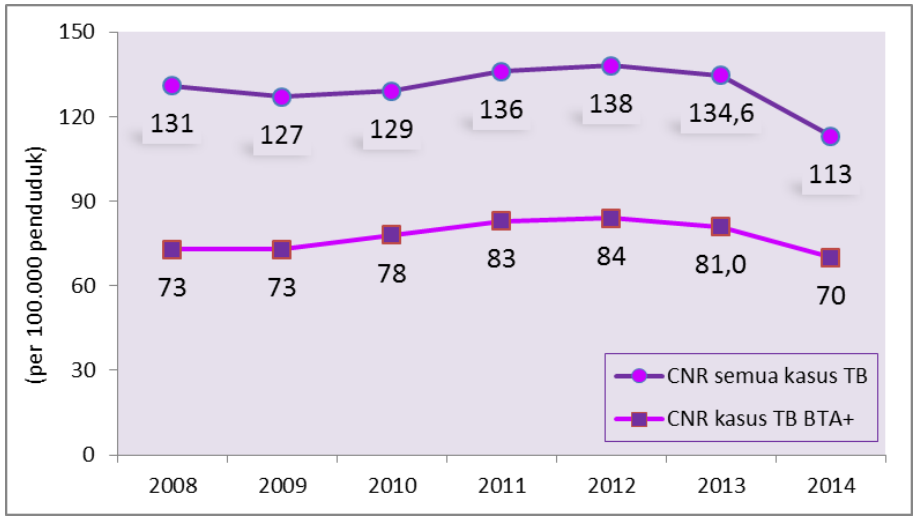

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Gambar 6.5 berikut memperlihatkan besarnya angka notifikasi atau *case notification rate* (CNR) BTA+ menurut provinsi tahun 2014.

GAMBAR 6.5
ANGKA NOTIFIKASI KASUS TB PARU BTA+ PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

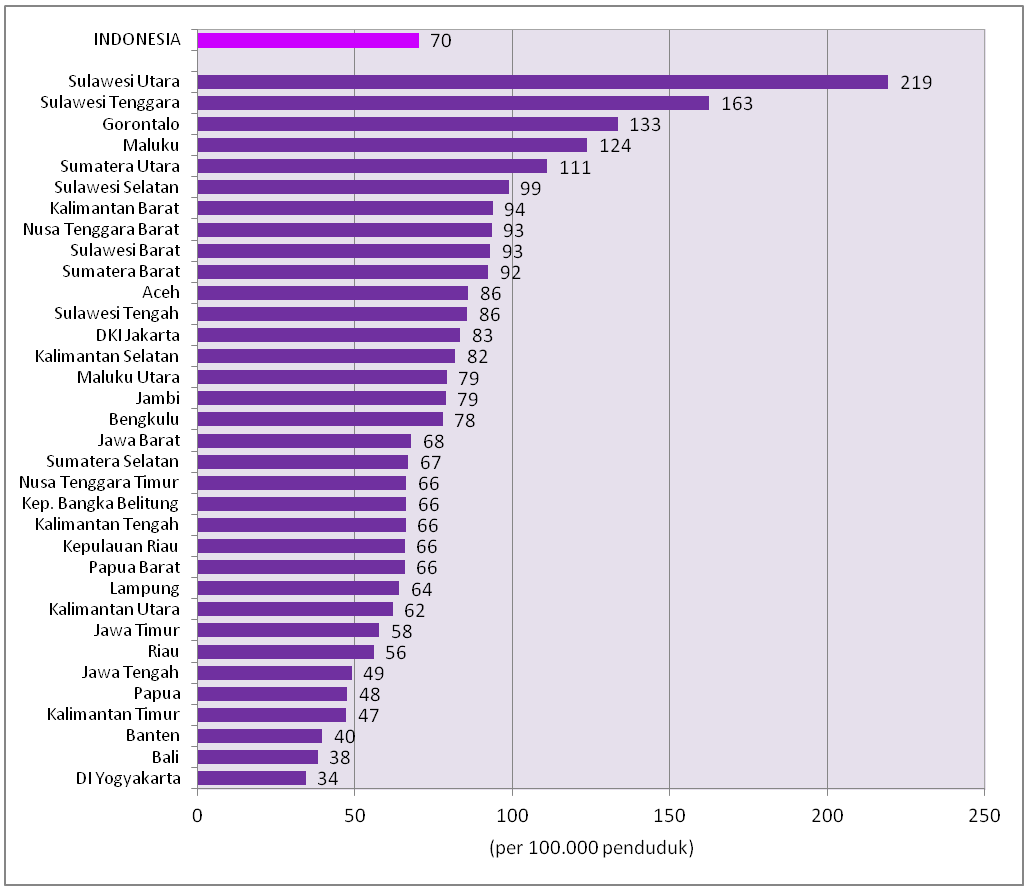

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Provinsi dengan CNR BTA+ tertinggi yaitu Sulawesi Utara (219), Sulawesi Tenggara (163), dan Gorontalo (133). Sedangkan CNR BTA+ terendah yaitu DI Yogyakarta (34), Bali (38), dan Banten (40). CNR dianggap baik jika terjadi peningkatan minimal 5% dibandingkan dengan sebelumnya.

4. Angka Keberhasilan Pengobatan

Salah satu upaya untuk mengendalikan TB yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan yaitu angka keberhasilan pengobatan *(success rate)*. Angka keberhasilan pengobatan ini dibentuk dari angka kesembuhan *(cure rate)* dan angka pengobatan lengkap. Berikut ini digambarkan angka kesembuhan dan keberhasilan pengobatan tahun 2008-2014.

GAMBAR 6.6
ANGKA KESEMBUHAN DAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TB BTA+
DI INDONESIA TAHUN 2008-2014

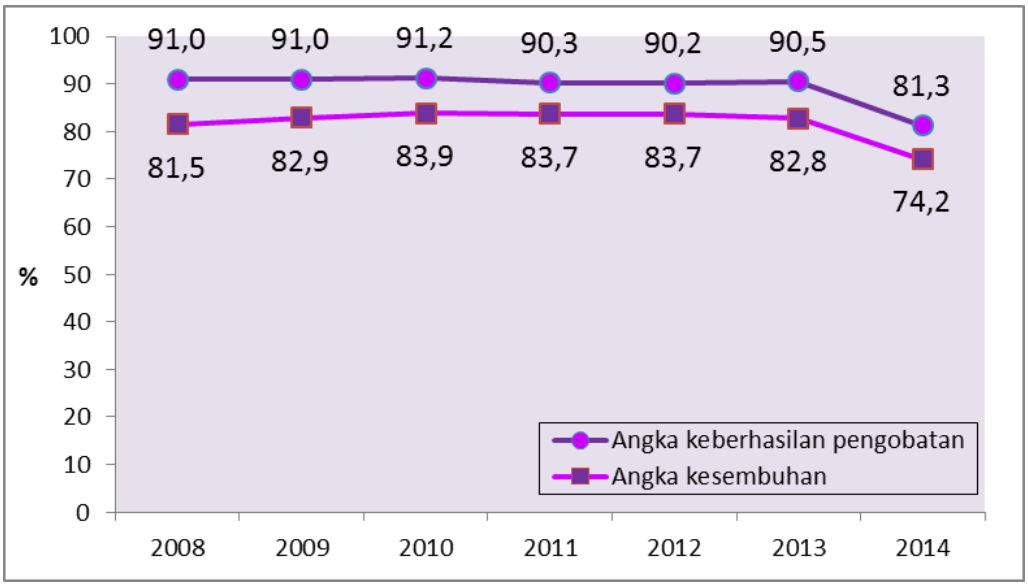

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Pada Gambar 6.6 terlihat penurunan angka keberhasilan pengobatan pada tahun 2014 dibandingkan 6 tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 angka keberhasilan pengobatan sebesar 81,3%. WHO menetapkan standar angka keberhasilan pengobatan sebesar 85%. Dengan demikian pada tahun 2014, Indonesia tidak mencapai standar tersebut.

Sementara Kementerian Kesehatan menetapkan target Renstra minimal 88% untuk angka keberhasilan pengobatan pada tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, capaian angka keberhasilan pengobatan tahun 2013 yang sebesar 81,3% juga tidak memenuhi target Renstra tahun 2014.

5. Prevalensi tuberkulosis

Menurut hasil Riskesdas 2013, prevalensi TB berdasarkan diagnosis sebesar 0,4% dari jumlah penduduk. Menurut provinsi, prevalensi TB paru tertinggi berdasarkan diagnosis yaitu Jawa Barat sebesar 0,7%, DKI Jakarta dan Papua masing-masing sebesar 0,6%. Sedangkan Provinsi Riau, Lampung, dan Bali merupakan provinsi dengan prevalensi TB paru terendah berdasarkan diagnosis yaitu masing-masing sebesar 0,1%.

Sedangkan menurut *Global Tuberculosis Control*, estimasi insidens semua tipe TB tahun 2013 yang sebesar 183 per 100.000 penduduk mengalami penurunan dibandingkan tahun 1990

yang sebesar 343 per 100.000 penduduk. Begitu juga dengan prevalensi TB dan mortalitas yang mengalami penurunan pada tahun 2013 seperti yang terlihat pada Tabel 6.1. Hal tersebut memperlihatkan bahwa program pengendalian TB di Indonesia telah berhasil menurunkan insidens, prevalensi, dan mortalitas akibat penyakit TB.

TABEL 6.1
ESTIMASI INSIDENS, PREVALENSI, DAN MORTALITAS TB PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 1990 DAN 2013

Kasus Tb	Tahun 1990	Tahun 2013
Insidens tuberkulosis	343	183
Prevalensi tuberkulosis	423	272
Mortalitas	51	25

Sumber : Global Tuberculosis Control WHO Report

Menurut jenis kelamin, prevalensi TB paru pada laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 0,4% dibandingkan pada perempuan yang sebesar 0,3%. Sedangkan menurut tipe daerah, prevalensi TB paru pada penduduk di perkotaan sebesar 0,4%, lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di perdesaan yang sebesar 0,3%.

Informasi mengenai tuberkulosis menurut indikator, jenis kelamin, dan provinsi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 6.1-6.4.

B. HIV & AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan *Voluntary, Counseling, and Testing (VCT), sero survey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

1. Jumlah kasus HIV positif dan AIDS

Setelah 3 tahun berturut-turut (2010-2012) cukup stabil, perkembangan jumlah kasus baru HIV positif pada tahun 2013 dan 2014 kembali mengalami peningkatan secara signifikan. Perkembangan HIV positif sampai tahun 2014 disajikan pada Gambar 6.7.

GAMBAR 6.7
JUMLAH KASUS BARU HIV POSITIF
SAMPAI TAHUN 2014

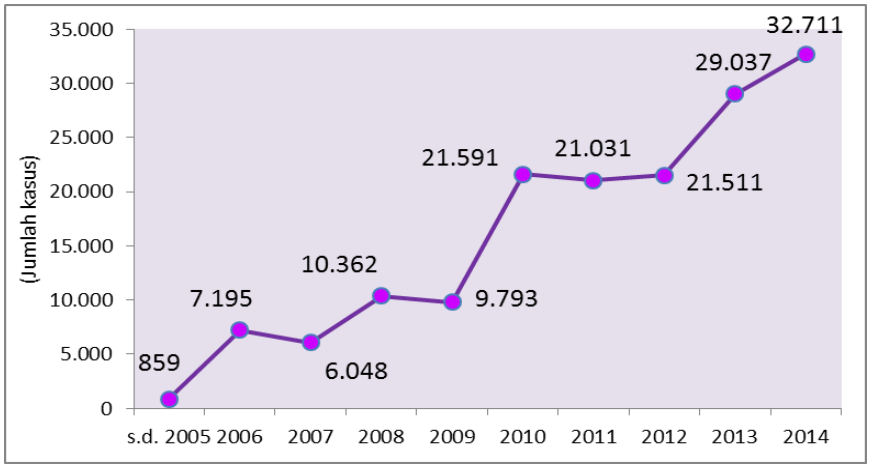

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Pemetaan epidemi HIV di Indonesia dibagi menjadi lima kategori, yaitu <90 kasus, 90-206 kasus, 207-323 kasus, 324-440 kasus, dan >440 kasus. Gambar 6.8 berikut ini memperlihatkan distribusi HIV di Indonesia.

GAMBAR 6.8
PETA EPIDEMI HIV DI INDONESIA
TAHUN 2014

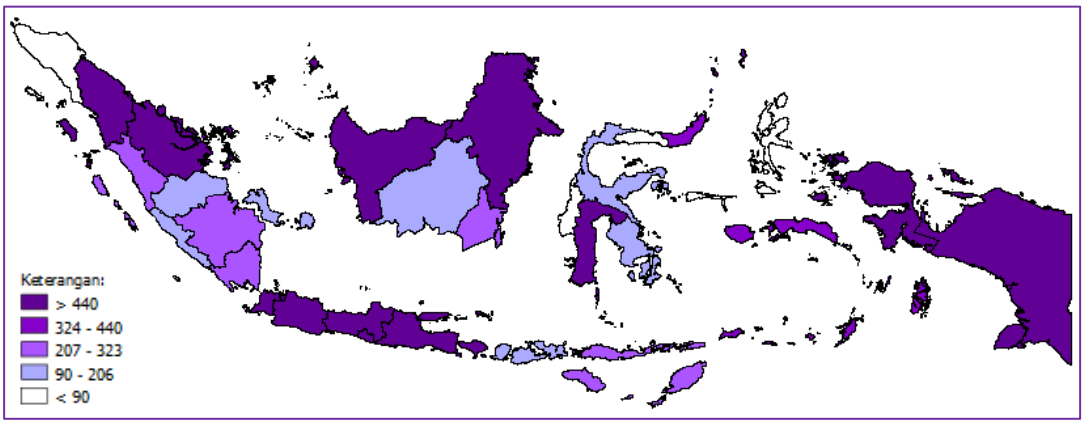

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Berdasarkan gambar di atas, sebanyak 15 provinsi di Indonesia memiliki jumlah kasus HIV > 440, meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Pulau Papua serta beberapa provinsi di Sumatera (Sumatera Utara dan Riau), Kalimantan (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), dan satu provinsi di Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan. Jumlah kasus HIV di lima belas provinsi tersebut menyumbang hampir 90% dari seluruh jumlah kasus HIV di Indonesia. Provinsi dengan jumlah HIV tertinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sebanyak empat provinsi memiliki jumlah kasus HIV kurang dari 90 kasus yaitu Gorontalo, Sulawesi Barat, Aceh, dan Maluku Utara.

Gambar 6.9 menampilkan kasus baru penderita AIDS yang terjadi sampai dengan tahun 2014.

GAMBAR 6.9
JUMLAH KASUS BARU AIDS
SAMPAI TAHUN 2014

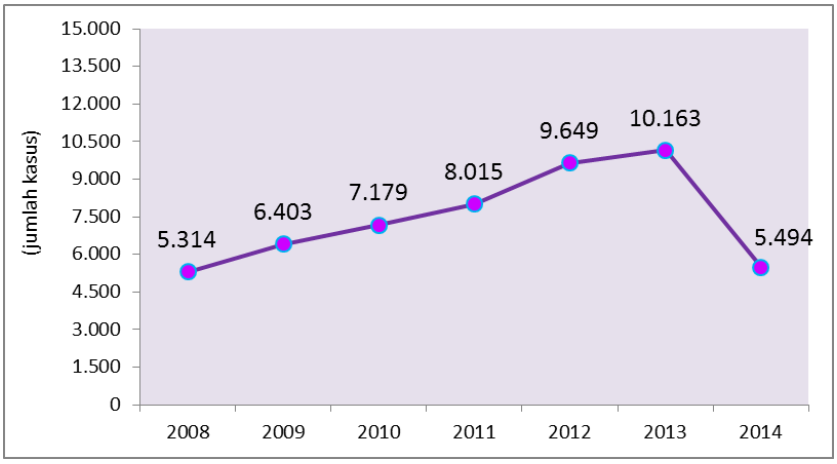

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Pada gambar di atas terlihat adanya kecenderungan peningkatan penemuan kasus baru sampai tahun 2013. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan kasus AIDS menjadi sebesar 5.494 kasus. Diperkirakan hal tersebut terjadi karena jumlah pelaporan kasus AIDS dari daerah masih rendah. Secara kumulatif, kasus AIDS sampai dengan tahun 2014 sebesar 65.790 kasus.

Menurut jenis kelamin, persentase kasus baru AIDS tahun 2014 pada kelompok laki-laki 1,8 kali lebih besar dibandingkan pada kelompok perempuan seperti digambarkan di bawah ini.

GAMBAR 6.10
PROPORSI KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN
DI INDONESIA TAHUN 2014

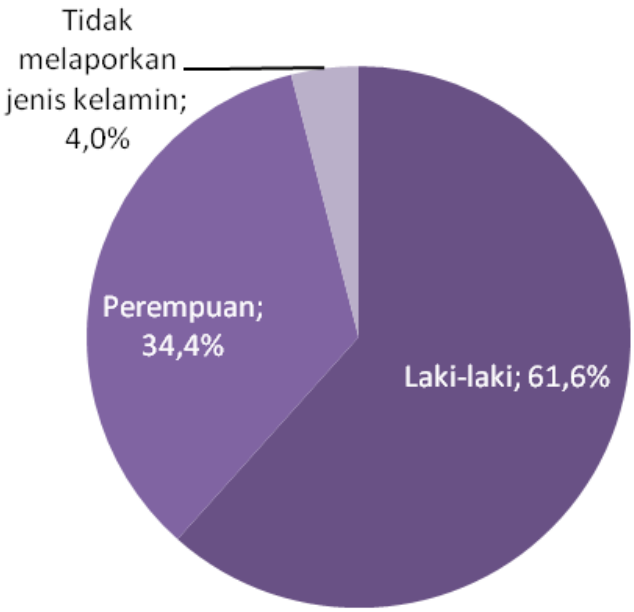

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Penderita AIDS pada laki-laki sebesar 61,6% dan pada perempuan sebesar 34,4%. Sebesar 4% penderita AIDS tidak diketahui jenis kelaminnya. Beberapa kasus baru AIDS dari Provinsi DKI Jakarta dan Papua Barat tidak dilaporkan jenis kelaminnya.

Gambar 6.11 berikut ini disajikan penderita AIDS menurut kelompok umur.

GAMBAR 6.11
PERSENTASE KASUS BARU AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2014

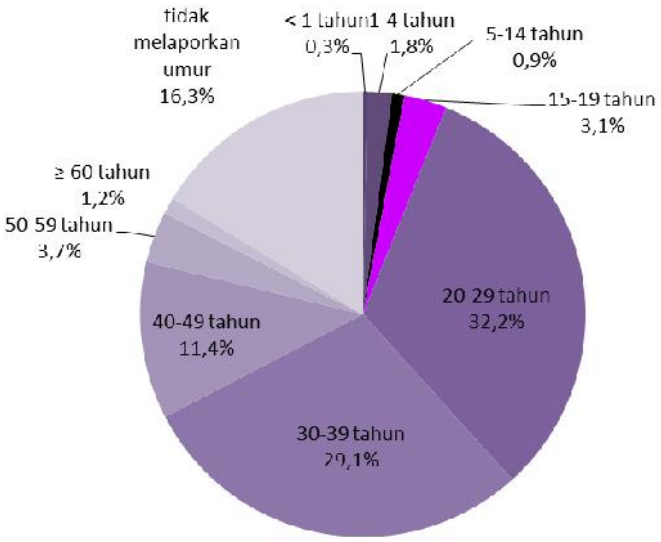

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Gambaran kasus baru AIDS menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sebagian besar kasus baru AIDS terdapat pada usia 20-29 tahun, 30-39 tahun, dan 40-49 tahun. Kelompok umur tersebut masuk ke dalam kelompok usia produktif yang aktif secara seksual dan termasuk kelompok umur yang menggunakan NAPZA suntik.

HIV/AIDS dapat ditularkan melalui beberapa cara penularan, yaitu hubungan seksual lawan jenis (heteroseksual), hubungan sejenis homoseksual/biseksual, penggunaan alat suntik (penasun) secara bergantian, transfusi darah, dan penularan dari ibu ke anak (perinatal). Berikut ini disajikan persentase kasus AIDS menurut cara penularan tersebut.

GAMBAR 6.12
PERSENTASE KASUS AIDS MENURUT FAKTOR RISIKO
DI INDONESIA TAHUN 2014

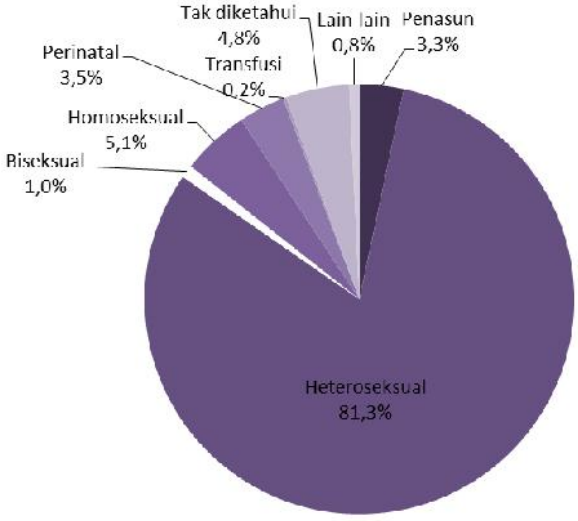

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Pada gambar di atas terlihat bahwa hubungan heteroseksual merupakan cara penularan dengan persentase tertinggi pada kasus AIDS yaitu sebesar 81,3%, diikuti oleh homoseksual sebesar 5,1% dan perinatal sebesar 3,5%. Sedangkan penasun yang biasanya cara penularan tertinggi kedua, pada tahun 2014 turun secara signifikan menjadi 3,3% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 9,3%.

Penyakit AIDS dilaporkan bersamaan dengan penyakit penyerta. Pada tahun 2014 penyakit kandidiasis, tuberkulosis, dan diare merupakan penyakit penyerta AIDS tertinggi masing-masing sebesar 1.316 kasus, 1.085 kasus, dan 1.036 kasus.

2. Angka kematian akibat AIDS

Angka kematian atau *Case Fatality Rate* (CFR) akibat AIDS sejak 2004 cenderung menurun seperti Gambar 6.13 berikut ini. Pada tahun 2014 CFR AIDS di Indonesia sebesar 1,22%.

GAMBAR 6.13
ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN
TAHUN 2004-2014

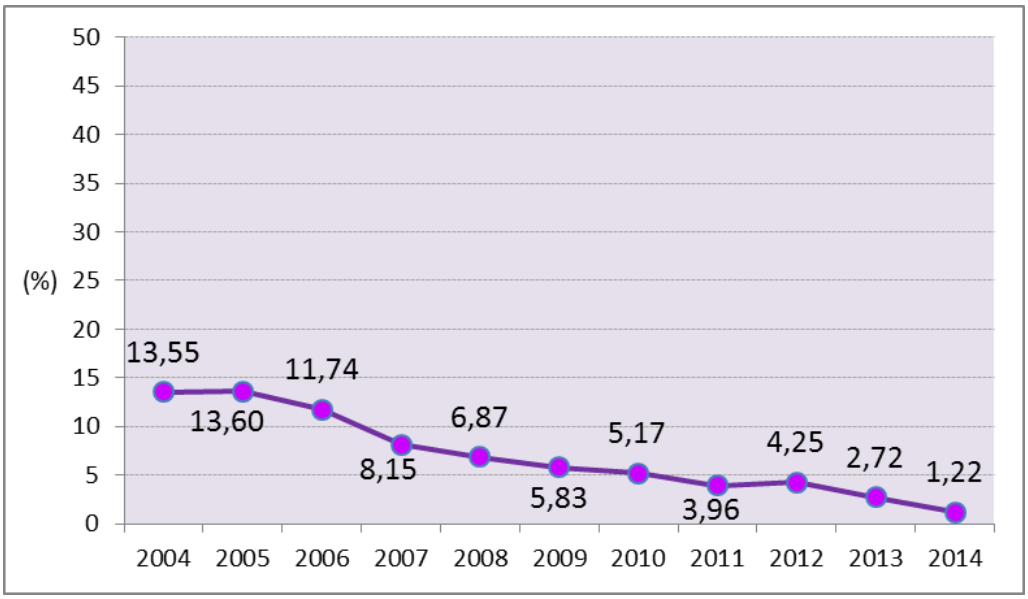

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

C. PNEUMONIA

Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan kuman *Pneumococcus, Staphylococcus, Streptococcus*, dan virus. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak, dan sesak napas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi).

Menurut hasil Riskesdas 2013, *period prevalence* pneumonia berdasarkan diagnosis selama 1 bulan sebelum wawancara sebesar 0,2%. Sedangkan berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 1,8%.

Dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2007 yang sebesar 2,13%, *period prevalence* pneumonia pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,8%. Pada balita, *period prevalence* berdasarkan diagnosis sebesar 2,4 per 1.000 balita dan berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 18,5 per 1.000 balita.

GAMBAR 6.14
***PERIOD PREVALENCE* PNEUMONIA MENURUT PROVINSI**
RISKESDAS 2007 DAN 2013

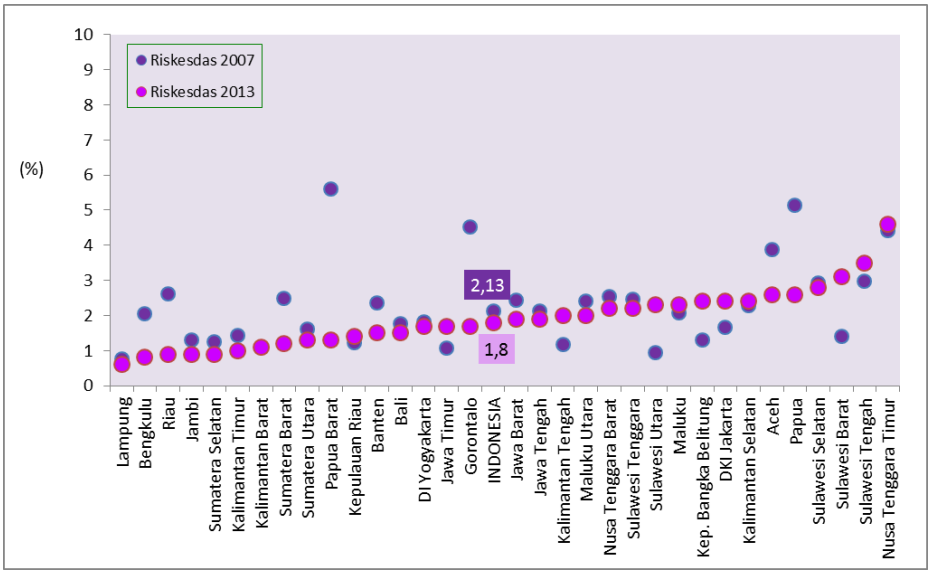

Sumber: Balitbangkes Kemenkes RI, Riskesdas 2007 & 2013

Pada Gambar 6.14 terlihat bahwa sebagian besar provinsi mengalami penurunan *period prevalence* pneumonia pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2007. Terdapat sebelas provinsi (33,3%) yang mengalami kenaikan *period prevalence* pneumonia pada tahun 2013.

Menurut umur, *period prevalence* pneumonia tertinggi terjadi pada kelompok umur balita terutama usia <1 tahun. Menurut daerah tempat tinggal, *period prevalence* pneumonia di perdesaan (2,0%) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (1,6%). Sedangkan menurut status ekonomi dengan menggunakan indeks kepemilikan, semakin rendah status ekonomi semakin tinggi *period prevalence* pneumonia.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Perkiraan kasus pneumonia pada balita di suatu wilayah sebesar 10% dari jumlah balita di wilayah tersebut. Berikut ini gambaran penemuan pneumonia pada balita tahun 2008-2014.

GAMBAR 6.15
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
DI INDONESIA TAHUN 2008-2014

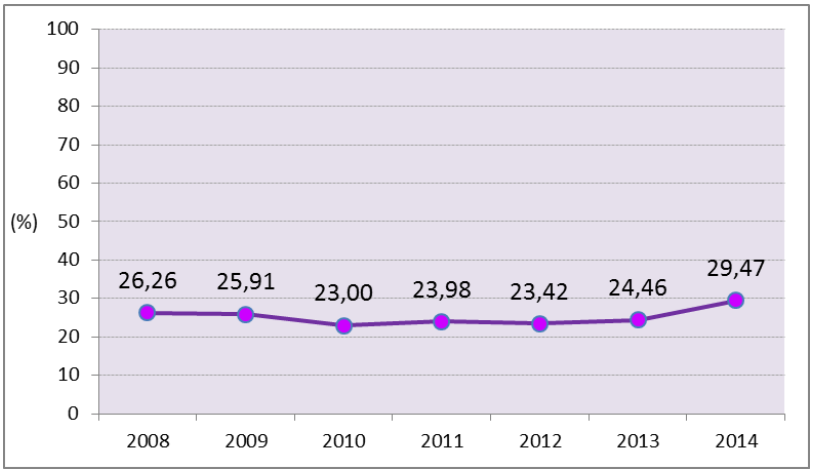

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Sampai dengan tahun 2014, angka cakupan penemuan pneumonia balita tidak mengalami perkembangan berarti yaitu berkisar antara 20%-30%. Selama beberapa tahun terakhir cakupan penemuan pneumonia tidak pernah mencapai target nasional, termasuk target tahun 2014 sebesar 80%.

Angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,08%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 1,19%. Pada kelompok bayi angka kematian lebih tinggi yaitu sebesar 0,11% dibandingkan pada kelompok umur 1-4 tahun yang sebesar 0,06%. Cakupan penemuan pneumonia dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 6.9 dan 6.10.

D. KUSTA

Penyakit Kusta disebut juga sebagai penyakit Lepra atau penyakit Hansen disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium leprae*. Bakteri ini mengalami proses pembelahan cukup lama antara 2–3 minggu. Daya tahan hidup kuman kusta mencapai 9 hari di luar tubuh manusia. Kuman kusta memiliki masa inkubasi 2–5 tahun bahkan juga dapat memakan waktu lebih dari 5 tahun. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

1. Angka prevalensi dan angka penemuan kasus baru

Sejak tercapainya status eliminasi kusta pada tahun 2000, situasi kusta di Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif statis. Hal tersebut dapat terlihat dari angka penemuan kasus baru kusta selama lebih dari dua belas tahun yang menunjukkan kisaran angka antara enam hingga delapan per 100.000 penduduk dan angka prevalensi yang berkisar antara delapan hingga sepuluh per 100.000 penduduk per tahunnya. Namun, sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 angka tersebut menunjukkan penurunan.

Target prevalensi kusta sebesar <1 per 10.000 penduduk (<10 per 100.000 penduduk). Situasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.16. Dengan demikian prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2014 yang sebesar 0,79 per 10.000 penduduk telah mencapai target program.

Pada tahun 2014 dilaporkan 17.025 kasus baru kusta dengan 83,5% kasus di antaranya merupakan tipe *Multi Basiler* (MB). Sedangkan menurut jenis kelamin, 62,6% penderita baru kusta berjenis kelamin laki-laki dan sebesar 37,4% lainnya berjenis kelamin perempuan.

GAMBAR 6.16
ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR)
TAHUN 2008-2014

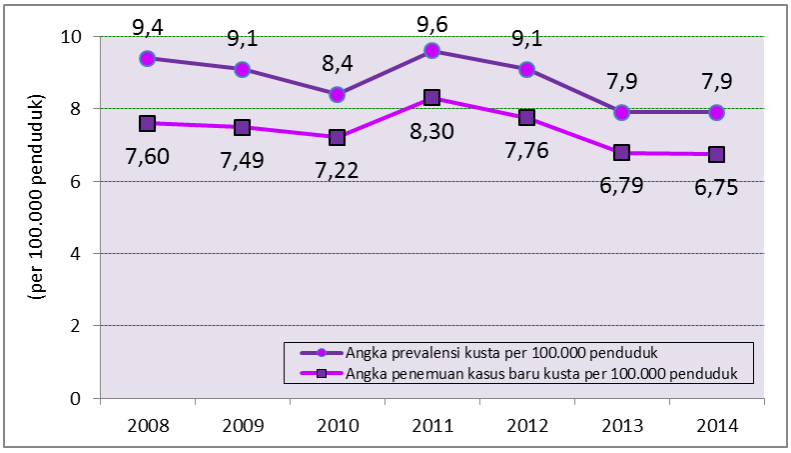

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Berdasarkan bebannya, kusta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu beban kusta tinggi (*high burden*) dan beban kusta rendah (*low burden*). Provinsi disebut *high burden* jika NCDR (*new case detection rate*: angka penemuan kasus baru) ≥ 10 per 100.000 penduduk dan atau jumlah kasus baru lebih dari 1.000, sedangkan *low burden* jika NCDR < 10 per 100.000 penduduk dan atau jumlah kasus baru kurang dari 1.000 kasus.

Pada Gambar 6.17 terlihat bahwa dari 33 provinsi, sebanyak 13 provinsi (39,4%) termasuk dalam beban kusta tinggi. Sedangkan 20 provinsi lainnya (60,6%) termasuk dalam beban kusta rendah. Seluruh provinsi di bagian timur Indonesia merupakan daerah dengan beban kusta tinggi.

GAMBAR 6.17
ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2014

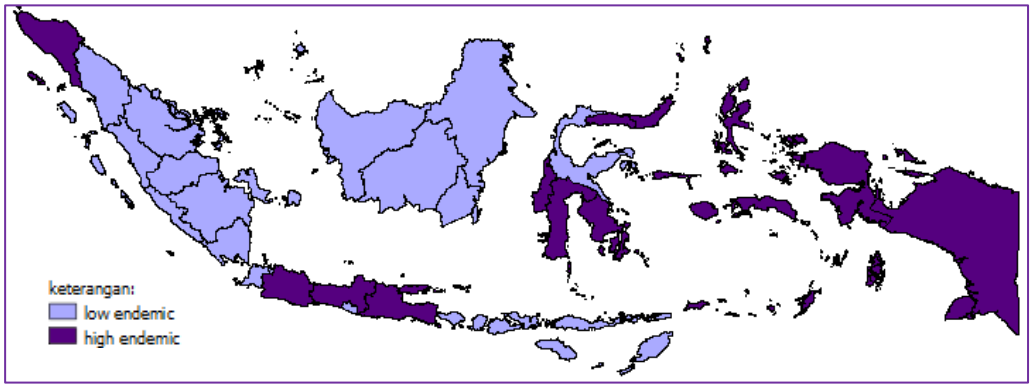

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah walaupun memiliki NCDR <10 per 100.000 penduduk namun jumlah kasus baru melebihi 1.000 kasus sehingga dikategorikan sebagai daerah dengan beban kusta tinggi.

2. Angka cacat tingkat II

Pengendalian kasus kusta antara lain dengan meningkatkan deteksi kasus sejak dini. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta yaitu angka cacat tingkat II. Angka cacat tingkat II pada tahun 2014 sebesar 6,33 per 1 juta penduduk, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 6,82 per 1 juta penduduk. Berikut ini grafik angka cacat tingkat 2 selama tujuh tahun terakhir.

GAMBAR 6.18
ANGKA CACAT TINGKAT II PER 1.000.000 PENDUDUK
TAHUN 2008-2014

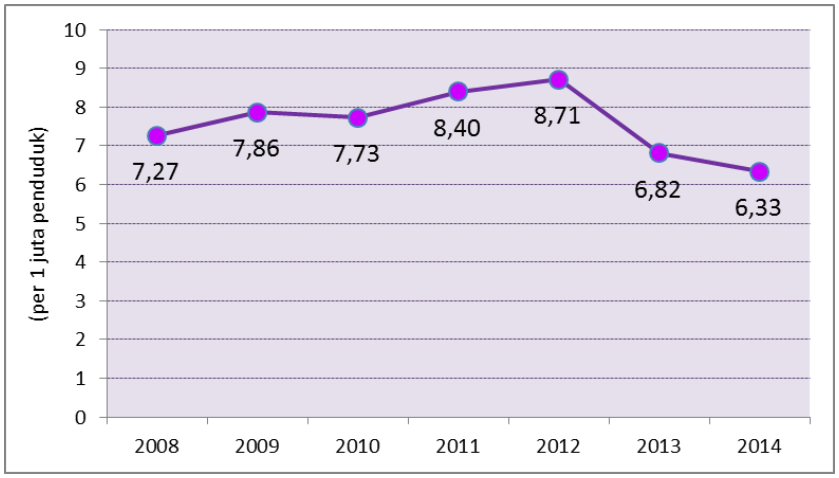

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Provinsi dengan angka cacat tingkat II per 1.000.000 penduduk tertinggi pada tahun 2014 yaitu Maluku Utara (27,16), Aceh (14,37), dan Jawa Timur (13,7). Hal itu menunjukkan kemampuan mendeteksi kasus baru kusta di provinsi tersebut masih rendah.

GAMBAR 6.19
ANGKA CACAT TINGKAT II KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK
PER PROVINSI TAHUN 2014

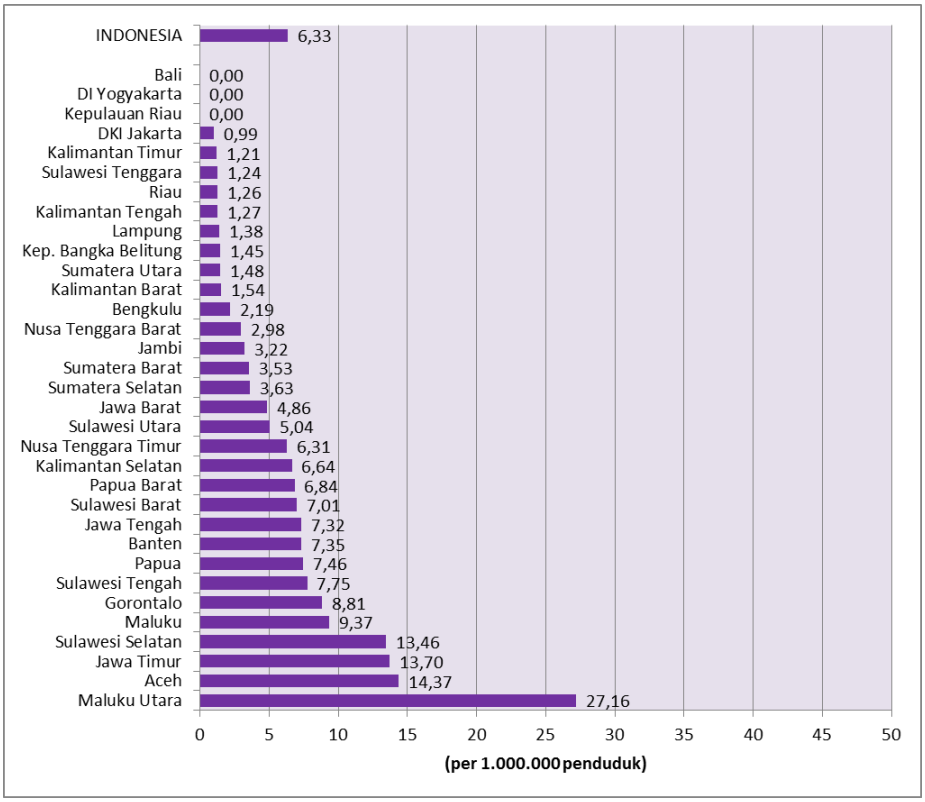

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

3. Proporsi kusta MB dan proporsi penderita kusta pada anak

Indikator lain yang digunakan pada penyakit kusta yaitu proporsi kusta MB dan proporsi penderita kusta pada anak (0-14 tahun) di antara penderita baru yang memperlihatkan sumber utama dan tingkat penularan di masyarakat. Proporsi kusta MB dan proporsi pada anak periode 2008-2014 ditunjukkan pada grafik berikut ini.

GAMBAR 6.20
PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK
TAHUN 2008-2014

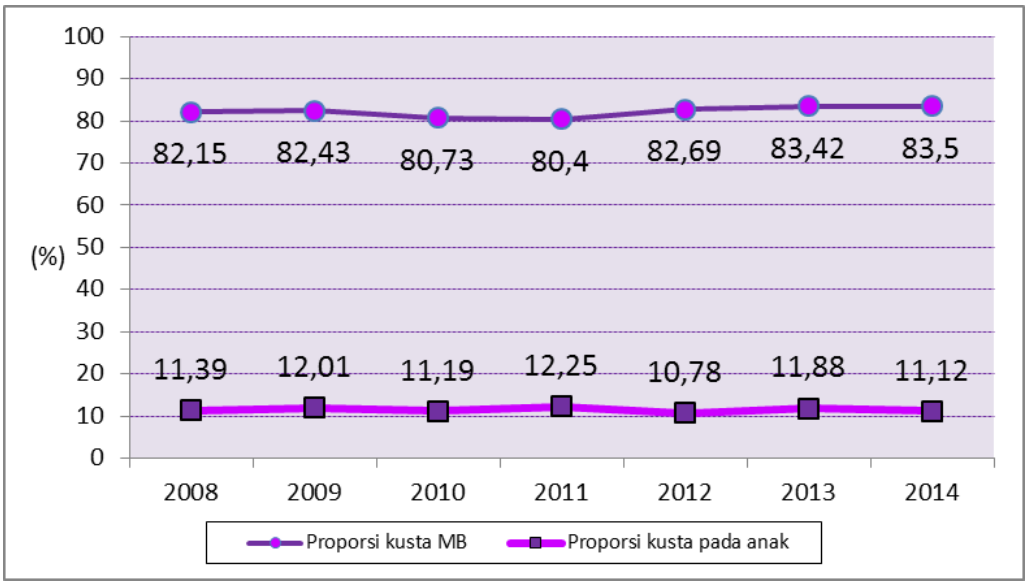

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Proporsi kusta MB periode 2008-2014 relatif statis yaitu antara 80%-84%. Provinsi dengan proporsi kusta MB tertinggi pada tahun 2014 yaitu Bengkulu (100%), Kalimantan Timur (95,7%), dan Kalimantan Selatan (95,1%).

Sedangkan proporsi kusta anak pada periode yang sama yaitu sekitar 10%-13%. Provinsi dengan proporsi kusta pada anak tertinggi yaitu Papua Barat (33,49%), Papua (24,6%), dan Kepulauan Riau (23,53%). Data/informasi terkait penyakit kusta menurut provinsi terdapat pada Lampiran 6.12 sampai Lampiran 6.14.

E. DIARE

Penyakit diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian. Menurut hasil Riskesdas 2007, diare merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%), sedangkan pada golongan semua umur merupakan penyebab kematian yang ke-empat (13,2%). Pada tahun 2012 angka kesakitan diare pada semua umur sebesar 214 per 1.000 penduduk dan angka kesakitan diare pada balita 900 per 1.000 penduduk (Kajian Morbiditas Diare 2012).

Menurut Riskesdas 2013, insiden diare (≤ 2 minggu terakhir sebelum wawancara) berdasarkan gejala sebesar 3,5% (kisaran provinsi 1,6%-6,3%) dan insiden diare pada balita sebesar 6,7% (kisaran provinsi 3,3%-10,2%). Sedangkan *period prevalence* diare (>2 minggu-1 bulan terakhir sebelum wawancara) berdasarkan gejala sebesar 7%. Gambar 6.21 berikut ini menggambarkan *period prevalence* diare menurut provinsi.

GAMBAR 6.21
***PERIOD PREVALENCE* DIARE (> 2 MINGGU – 1 BULAN SEBELUM WAWANCARA)**
MENURUT GEJALA, RISKESDAS 2013

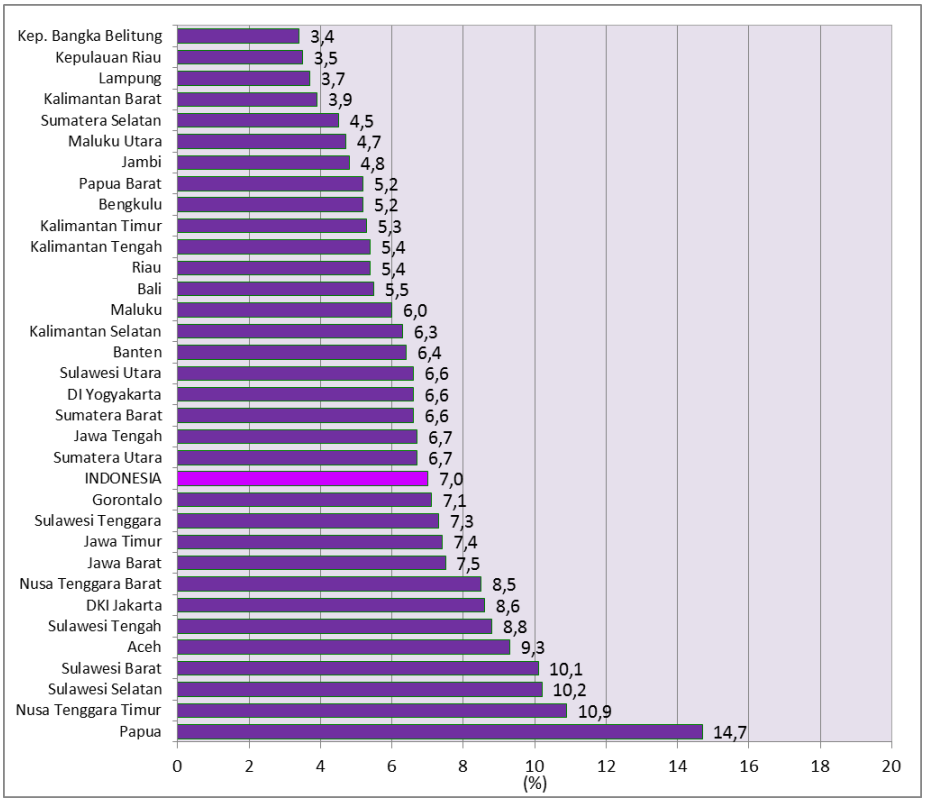

Sumber: Balitbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2013

Pada tahun 2013 terjadi 8 KLB yang tersebar di 6 Propinsi, 8 kabupaten dengan jumlah penderita 646 orang dengan kematian 7 orang (CFR 1,08%). Sedangkan pada tahun 2014 terjadi 6 KLB Diare yang tersebar di 5 propinsi, 6 kabupaten/kota, dengan jumlah penderita 2.549 orang dengan kematian 29 orang (CFR 1,14%).

TABEL 6.2
SITUASI KLB DIARE TAHUN 2014

No	Provinsi	Kabupaten	Kasus	Meninggal	CFR (%)
1	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	79	2	3,57
		Padang Lawas Utara	78	2	0,00
2	Sulawesi Selatan	Enrekang	44	1	0,00
3	Lampung	Pesawaran	1	1	100
4	NTT	Timor Tengah Selatan	2.089	23	1,10
5	Jawa Timur	Pasuruan	258	0	0,00
TOTAL			2.549	29	1,14

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Secara nasional angka kematian (CFR) pada KLB diare pada tahun 2014 sebesar 1,14%. Sedangkan target CFR pada KLB Diare diharapkan <1%. Dengan demikian secara nasional, CFR KLB diare tidak mencapai target program.

F. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

1. Tetanus Neonatorum

Tetanus neonatorum disebabkan oleh basil *Clostridium tetani*, yang masuk ke tubuh melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang salah satunya disebabkan oleh pemotongan tali pusat dengan alat yang tidak steril. Kasus tetanus neonatorum banyak ditemukan di negara berkembang khususnya negara dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah.

Pada tahun 2014, dilaporkan terdapat 84 kasus dari 15 provinsi dengan jumlah meninggal 54 kasus. Dengan demikian CFR tetanus neonatorum pada tahun 2014 sebesar 64,3%, meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 53,8%.

Gambaran kasus menurut faktor risiko status imunisasi menunjukkan bahwa sebanyak 54 kasus (74%) terjadi pada kelompok yang tidak diimunisasi. Sebanyak 51 kasus (68,9%) melakukan pemeriksaan kehamilan dengan dokter/bidan/perawat. Menurut faktor penolong persalinan, 50 kasus (68,5%) ditolong oleh penolong persalinan tradisional, misalnya dukun. Menurut alat yang digunakan untuk pemotongan tali pusat, sebagian besar kasus dilakukan pemotongan tali pusat dengan gunting yaitu 46 kasus (59%). Rincian kasus tetanus neonatorum beserta persentase kasus menurut faktor risiko dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.15.

2. Campak

Penyakit campak disebabkan oleh virus campak golongan *Paramyxovirus*. Penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh droplet (ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Pada tahun 2014, dilaporkan terdapat 12.943 kasus campak, lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 11.521 kasus. Jumlah kasus meninggal sebanyak 8 kasus, yang dilaporkan dari 5 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. *Incidence rate* (IR) campak pada tahun 2014 sebesar 5,13 per 100.000 penduduk, meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 4,64 per 100.000 penduduk.

Gambar 6.22 menyajikan IR campak menurut provinsi. Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan IR campak terendah. Sedangkan Aceh, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan IR campak tertinggi.

GAMBAR 6.22
***INCIDENCE RATE (IR)* CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK**
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2014

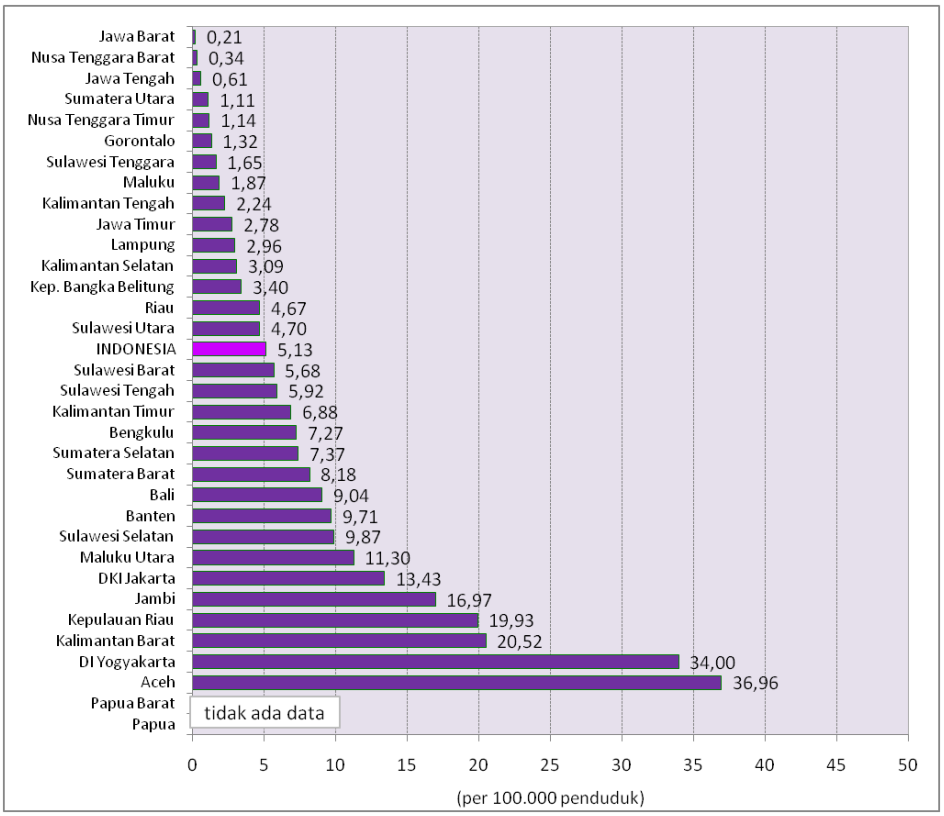

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Menurut kelompok umur, proporsi kasus campak terbesar terdapat pada kelompok umur 5-9 tahun dan kelompok umur 1-4 tahun dengan proporsi masing-masing sebesar 30% dan 27,6%. Namun jika dihitung rata-rata umur tunggal, kasus campak pada bayi <1 tahun merupakan kasus yang tertinggi, yaitu sebanyak 1.117 kasus (8,6%). Gambar 6.23 berikut memperlihatkan proporsi kasus campak per kelompok umur.

GAMBAR 6.23
PROPORSI KASUS CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2014

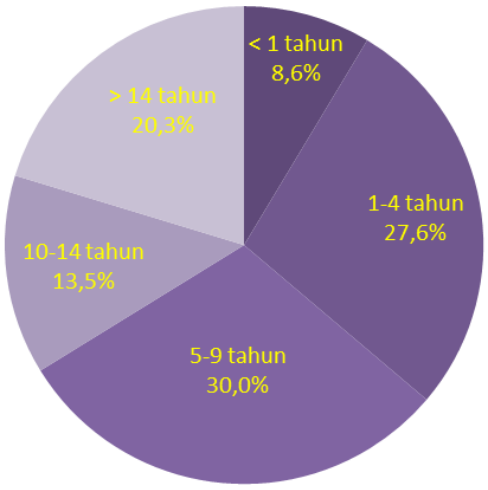

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Campak dinyatakan sebagai KLB apabila terdapat 5 atau lebih kasus klinis dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi secara mengelompok dan dibuktikan adanya hubungan epidemiologis. Pada tahun 2014, jumlah KLB campak yang terjadi sebanyak 173 KLB dengan jumlah kasus sebanyak 2.104 kasus.

Frekuensi KLB campak tertinggi terjadi di Jawa Timur sebanyak 41 kejadian dengan 187 kasus. Diikuti Banten sebanyak 18 KLB dan Jambi serta Sumatera Selatan masing-masing 14 KLB. Namun jumlah kasus terbanyak terjadi di Maluku yaitu sebesar 326 kasus. Jumlah kasus yang meninggal pada KLB campak tersebut sebanyak 21 kasus yang dilaporkan dari Jawa Timur dan Sumatera Selatan, jauh meningkat dibandingkan tahun 2013 dengan kematian hanya 1 kasus.

3. Difteri

Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Penyakit difteri pada umumnya menyerang anak-anak usia 1-10 tahun.

Jumlah kasus difteri pada tahun 2014 sebanyak 396 kasus dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 16 kasus sehingga CFR difteri sebesar 4,04%. Dari 22 provinsi yang melaporkan adanya kasus difteri, kasus tertinggi terjadi di Jawa Timur yaitu sebanyak 295 kasus yang berkontribusi sebesar 74% dari total kasus. Jumlah kasus difteri di Jawa Timur pada tahun 2014 menurun setengahnya dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 610 kasus. Dari seluruh kasus tersebut, sebesar 37% tidak mendapatkan vaksin campak.

GAMBAR 6.24
PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2014

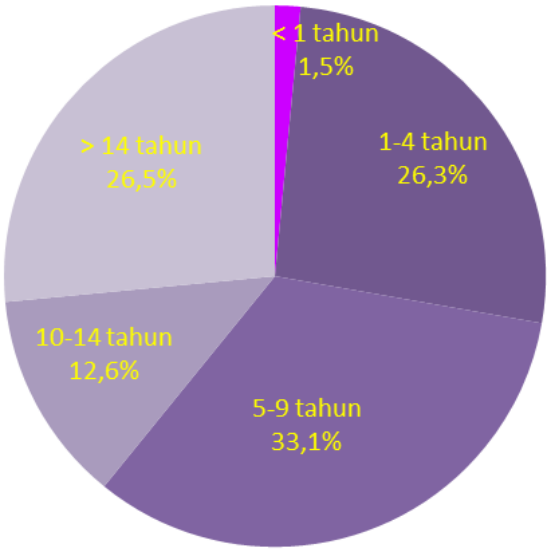

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Gambaran kasus menurut kelompok umur pada tahun 2014 menunjukkan jumlah distribusi kasus tertinggi terjadi pada kelompok umur 5-9 tahun, >14 tahun, dan 1-4 tahun. Namun kelompok umur ≥ 14 tahun memiliki rentang usia yang panjang dibanding kelompok umur lainnya sehingga jika dihitung per umur tunggal, kelompok ini memiliki jumlah kasus yang rendah.

4. Polio dan AFP (*Acute Flaccid Paralysis*/Lumpuh Layu Akut)

Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Penyakit yang pada umumnya menyerang anak berusia 0-3 tahun ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan.

AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya *flaccid* yang bersifat lunglai, lemas atau layuh, atau terjadi penurunan kekuatan otot, dan terjadi secara akut (mendadak). Sedangkan *non polio AFP* adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Kementerian Kesehatan menetapkan *non polio AFP rate* minimal 2/100.000 populasi anak usia <15 tahun. Pada tahun 2014, secara nasional *non polio AFP rate* sebesar 2,38/100.000 populasi anak <15 tahun yang berarti telah mencapai standar minimal penemuan.

GAMBAR 6.25
***NON POLIO AFP RATE* PER 100.000 ANAK < 15 TAHUN**
DI INDONESIA TAHUN 2014

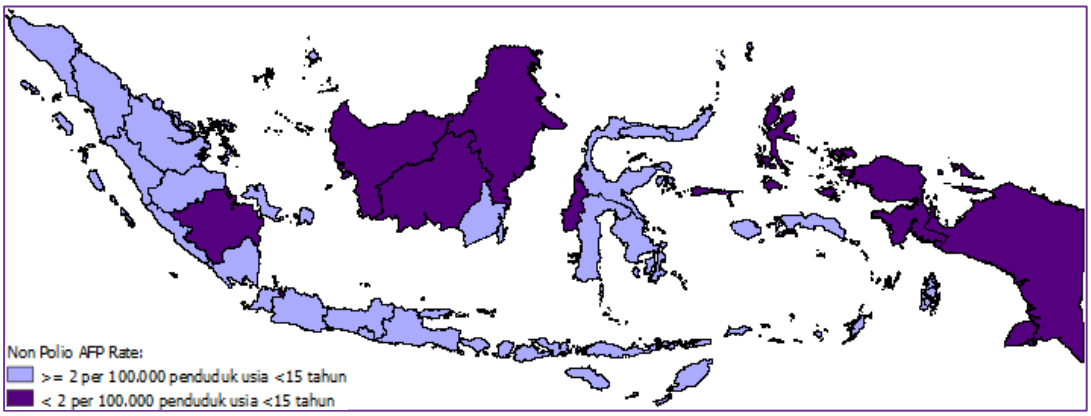

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Dari 34 provinsi, 24 di antaranya (70,6%) telah mencapai target *non polio AFP rate* ≥2 per 100.000 penduduk kurang dari 15 tahun pada tahun 2014.

Setiap kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan intensifikasi surveilans, akan dilakukan pemeriksaan spesimen tinja untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar. Untuk itu diperlukan spesimen adekuat yang sesuai dengan persyaratan yaitu diambil ≤14 hari setelah kelumpuhan dan suhu spesimen 0°C - 8°C sampai di laboratorium.

GAMBAR 6.26
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

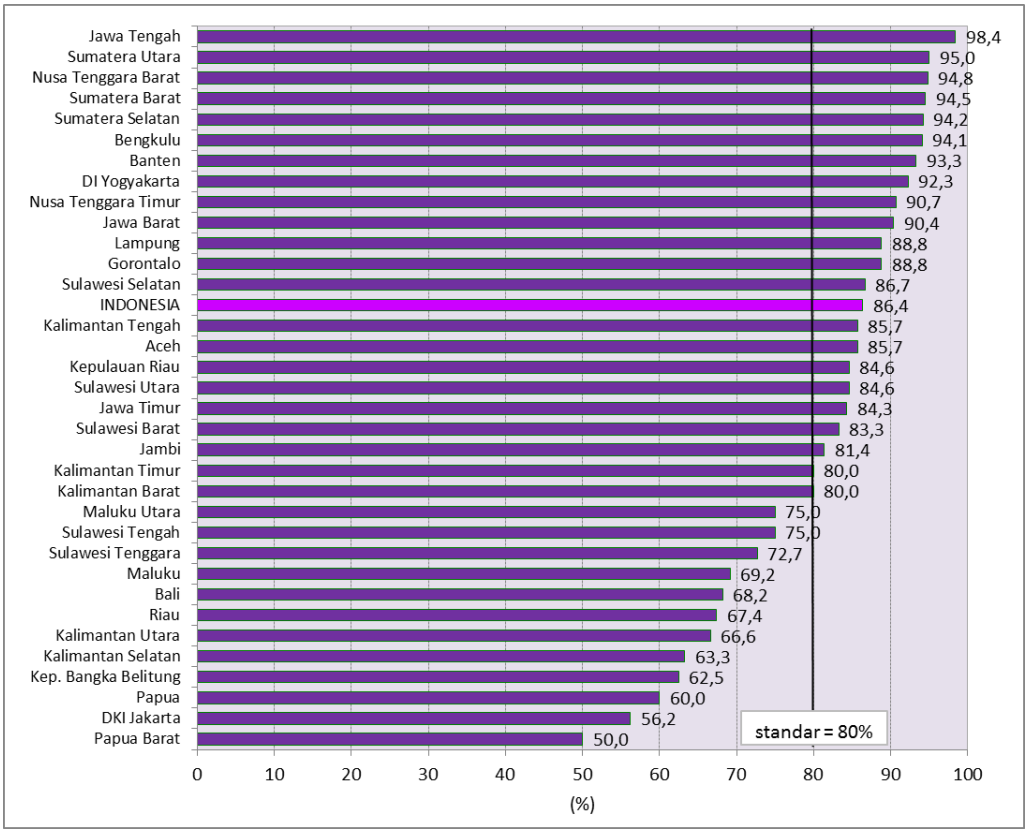

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Standar spesimen adekuat yaitu ≥ 80%. Pada tahun 2014 spesimen adekuat di Indonesia sebesar 86,4%. Dengan demikian spesimen adekuat secara nasional telah sesuai standar.

Sebanyak 22 provinsi (64,7%) telah mencapai standar spesimen adekuat pada tahun 2014. Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 6.15 - 6.21.

G. DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

1. Incidence Rate dan Case Fatality Rate

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong *Arthropod-Borne Virus*, genus *Flavivirus,* dan famili *Flaviviridae*. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, terutama *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus.* Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Pada tahun 2014 jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 100.347 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 907 orang (*IR*/Angka kesakitan= 39,8 per 100.000 penduduk dan CFR/angka kematian= 0,9%). Dibandingkan tahun 2013 dengan kasus sebanyak 112.511 serta IR 45,85 terjadi penurunan kasus pada tahun 2014. Target Renstra Kementerian Kesehatan untuk angka kesakitan DBD tahun 2014 sebesar ≤ 51 per 100.000 penduduk, dengan demikian Indonesia telah mencapai target Renstra 2014. Berikut tren angka kesakitan DBD selama kurun waktu 2008-2014.

GAMBAR 6.27
ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2014

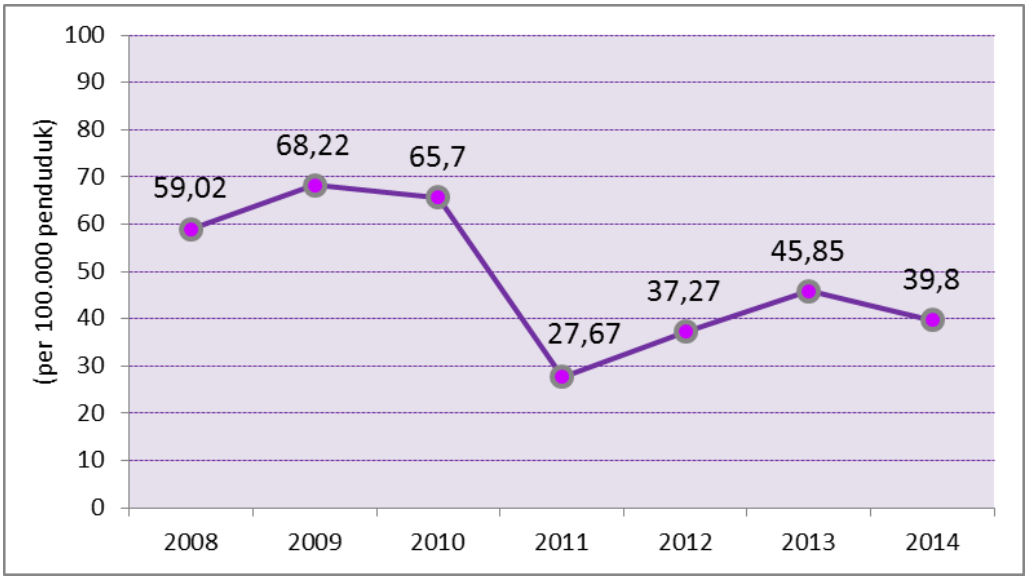

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Gambaran angka kesakitan DBD menurut provinsi tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 6.28. Pada tahun 2014 terdapat sebanyak 26 provinsi (76,5%) yang telah mencapai target renstra 2014. Provinsi dengan angka kesakitan DBD tertinggi tahun 2014 yaitu Bali sebesar 204,22, Kalimantan Timur sebesar 135,46, dan Kalimantan Utara sebesar 128,51 per 100.000 penduduk.

GAMBAR 6.28
ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

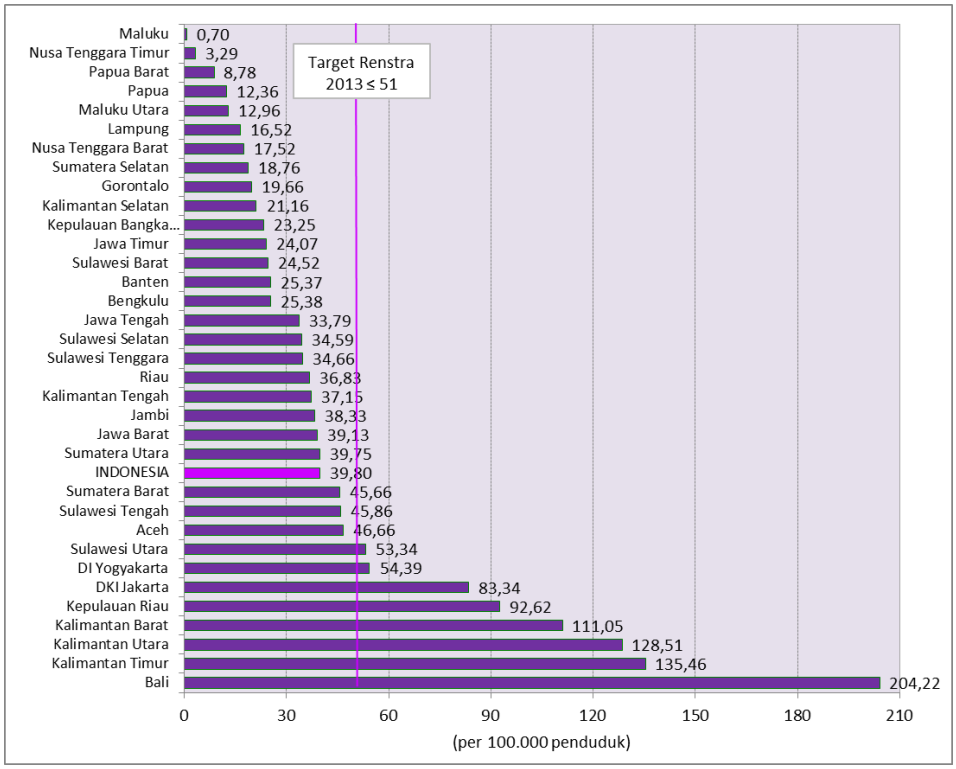

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Selama tahun 2014 terdapat 7 kabupaten/kota di 5 provinsi yang melaporkan terjadinya KLB DBD yaitu Kabupaten Dumai (Provinsi Riau), Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat (Provinsi Bangka Belitung), Kabupaten Karimun (Provinsi Kepulauan Riau), Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang (Provinsi Kalimantan Barat) serta Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah).

Kematian akibat DBD dikategorikan tinggi jika CFR > 2%. Dengan demikian pada tahun 2014 terdapat 5 provinsi yang memiliki CFR tinggi yaitu Provinsi Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Maluku. Pada provinsi tersebut masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat dan lain-lain) termasuk peningkatan sarana-sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di sarana-sarana pelayanan kesehatan.

Sedangkan menurut jumlah kematian, jumlah kematian tertinggi terjadi di Jawa Barat sebanyak 178 kematian, diikuti oleh Jawa Tengah (159 kematian) dan Jawa Timur (107 kematian).

2. Kabupaten/kota terjangkit DBD

Berbeda dengan jumlah/angka kesakitan yang mengalami penurunan, jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD pada tahun 2014 justru mengalami peningkatan, dari 412 (82,9%) pada tahun 2013 menjadi 433 Kabupaten/Kota (84,74%) pada tahun 2014. Berikut ini gambaran jumlah kabupaten/kota terjangkit tahun 2008-2014. Selama periode tahun 2008 sampai tahun 2014 jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD cenderung meningkat.

GAMBAR 6.29
JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2008-2014

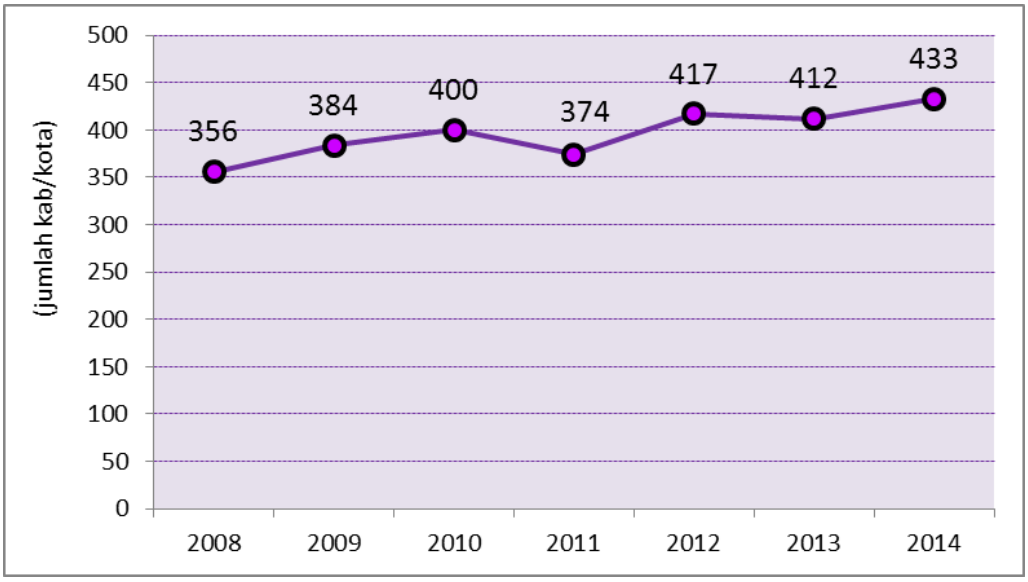

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

3. Angka Bebas Jentik

Indikator lain yang digunakan untuk upaya pengendalian penyakit DBD yaitu angka bebas jentik (ABJ). Sampai tahun 2014 ABJ secara nasional belum mencapai target program yang sebesar ≥ 95%.

GAMBAR 6.30
ANGKA BEBAS JENTIK
DI INDONESIA TAHUN 2010-2014

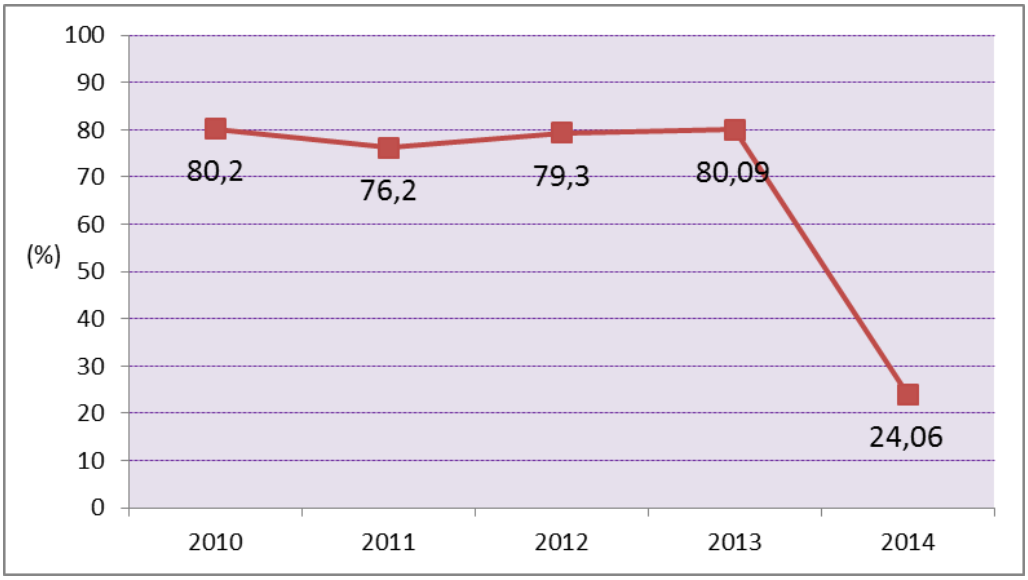

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Pada tahun 2014 ABJ di Indonesia sebesar 24,06%, menurun secara signifikan dibandingkan dengan rata-rata capaian selama 4 tahun sebelumnya. Namun validitas data ABJ di atas belum dapat dijadikan ukuran pasti untuk menggambarkan kepadatan jentik secara nasional. Hal tersebut dikarenakan pelaporan data ABJ belum mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Sebagian besar puskesmas tidak melaksanakan kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) secara rutin, disamping itu kegiatan kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) tidak berjalan di sebagian besar wilayah dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran di daerah untuk kedua kegiatan tersebut.

Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait dengan penyakit DBD dapat dilihat pada Lampiran 6.24 dan Lampiran 6.25.

H. CHIKUNGUNYA

Demam chikungunya (demam chik) adalah suatu penyakit menular dengan gejala utama demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki dan tangan serta tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ditularkan oleh nyamuk *Aedes albopictus* dan *Aedes aegypty* yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD.

Demam chik dijumpai terutama di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan.

Selama tahun 2014 terdapat 8 kabupaten/kota dari 4 provinsi yang melaporkan terjadinya KLB Chikungunya yaitu: Kabupaten Tulungagung, Kab. Pamekasan, Kab Ngawi (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Tapanuli Selatan (Provinsi Sumatera Utara), Kabupaten Banggai (Provinsi Sulawesi Tengah), Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kotamobagu (Provinsi Sulawesi Utara). Pada tahun 2014 kejadian KLB lebih banyak dan terjadi di 3 pulau di Indonesia dibandingkan tahun 2013 dengan kejadian KLB hanya terjadi di 2 kabupaten/kota dari 1 provinsi.

GAMBAR 6.31
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA
TAHUN 2010-2014

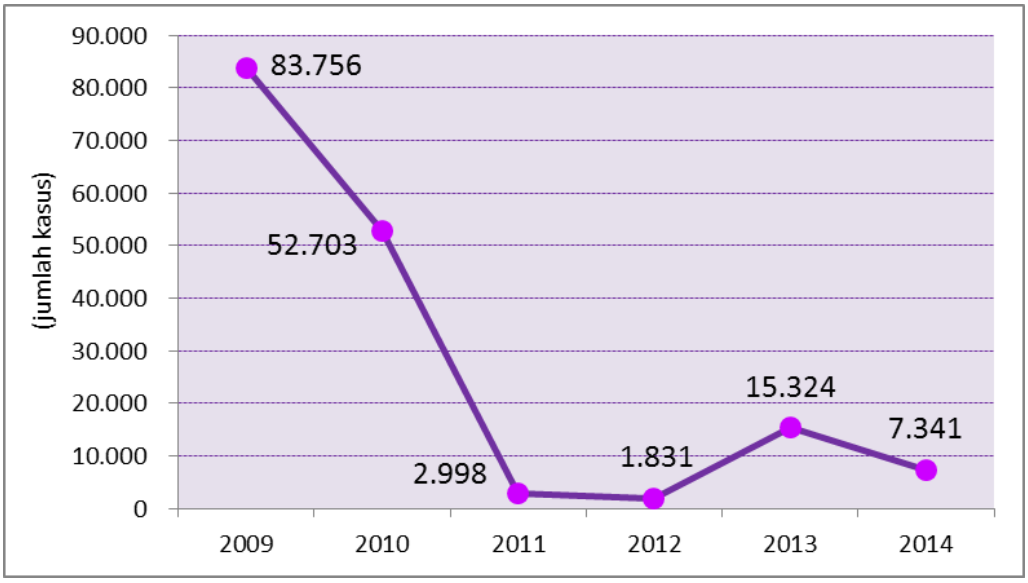

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Kejadian Demam Chikungunya mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan pada tahun 2009-2012, namun kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2013 dan turun lebih dari setengahnya pada tahun 2014. Hingga saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat Chikungunya. Faktor penyebab turunnya kasus antara lain kondisi cuaca yang relatif kering dengan curah hujan yang rendah, adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit, sebagian daerah tidak melaporkan kasus Chikungunya dan lain-lain.

I. FILARIASIS

Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh parasit berupa cacing filaria, yang terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori.* Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital.

WHO menetapkan kesepakatan global untuk mengeliminasi filariasis pada tahun 2020 (*The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health problem by The Year 2020*). Di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit kaki gajah di lebih dari 83 negara dan 60% kasus berada di Asia Tenggara. Di Indonesia, pada tahun 2014 terdapat 14.932 kasus filariasis. Grafik berikut menggambarkan peningkatan kasus filariasis di Indonesia sejak tahun 2010.

GAMBAR 6.32
JUMLAH KASUS KLINIS FILARIASIS
DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2014

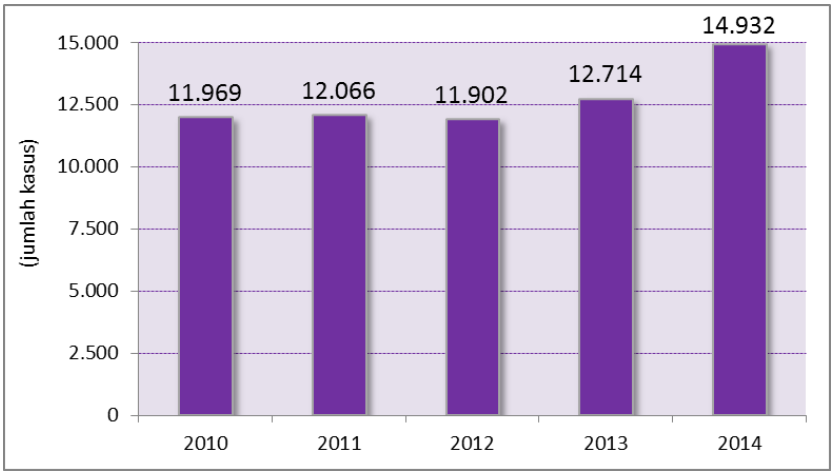

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Provinsi dengan kasus klinis filariasis tertinggi pada tahun 2014 yaitu Nusa Tenggara Timur (3.175), Aceh (2.375), dan Papua Barat (1.765).

Indonesia memberantas filariasis sebagai bagian dari eliminas filariasis global melalui dua pilar kegiatan yaitu: 1. memutuskan mata rantai penularan filariasis dengan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis di daerah endemis sekali setahun selama lima tahun berturut-turut; 2. mencegah dan membatasi kecacatan dengan penatalaksanaan kasus filariasis mandiri.

Sampai tahun 2014 berdasarkan survei darah jari, sebanyak 235 kabupaten/kota telah dipetakan sebagai daerah endemis filariasis. Namun, baru 142 kabupaten/kota yang melaksanakan POPM filariasis. Sebanyak 42 kabupaten/kota telah melaksanakan POPM filariasis minimal lima tahun berturut-turut dengan cakupan pengobatan diatas 65%.

Cakupan POPM filariasis selama empat tahun terakhir terus meningkat, dari 37,7% pada tahun 2011 menjadi 73,9% pada tahun 2014 seperti terlihat pada Gambar 6.33 berikut ini.

GAMBAR 6.33
CAKUPAN POPM FILARIASIS
TAHUN 2010 – 2014

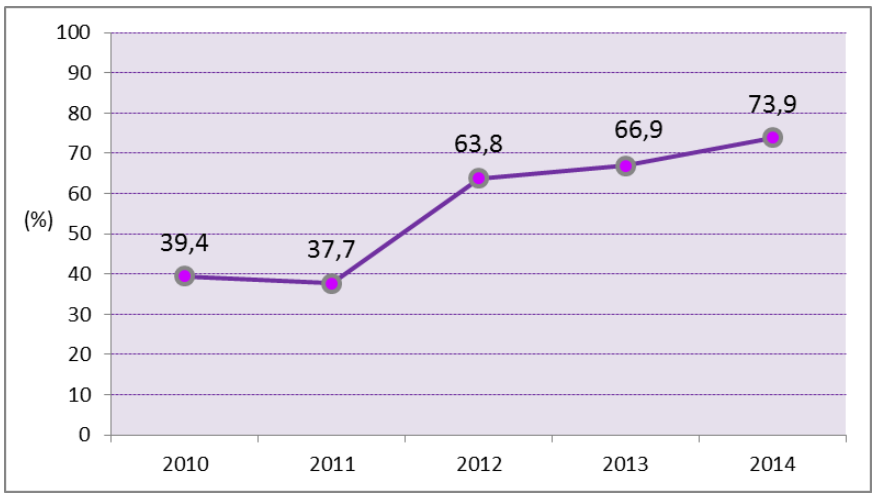

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Untuk meningkatkan cakupan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya minum obat pencegahan filariasis yang diberikan setahun sekali pada daerah endemis

J. MALARIA

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa. Berikut gambaran peta endemisitas malaria per kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013 dan 2014.

GAMBAR 6.34
PETA ENDEMISITAS MALARIA DI INDONESIA
TAHUN 2013 DAN 2014

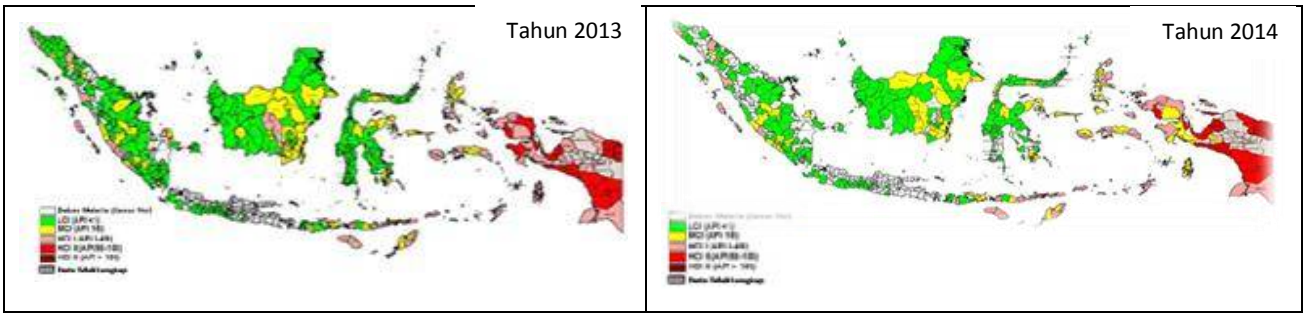

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Dari gambaran peta endemisitas malaria di kabupaten/kota terlihat penurunan jumlah daerah endemis tinggi dari 16% pada tahun 2012 menjadi 11% pada tahun 2014. Namun, kabupaten/kota endemis rendah juga menurun dari 68% tahun 2012 menjadi 67% pada tahun 2014. Gambar 6.35 berikut ini memperlihatkan perubahan persentase endemisitas malaria tahun 2012-2014.

GAMBAR 6.35
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITAS
TAHUN 2012-2014

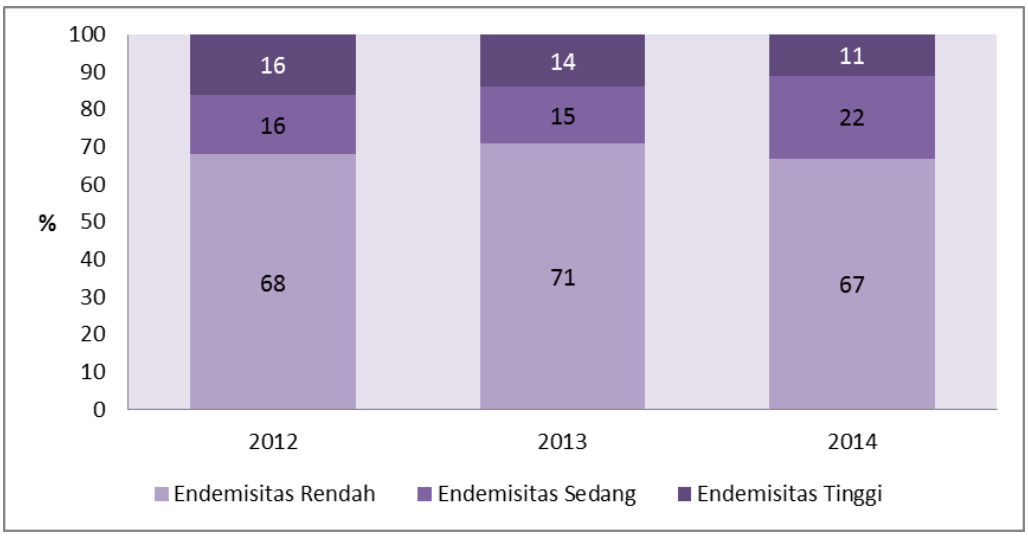

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

1. Angka Kesakitan Malaria

Secara nasional angka kesakitan malaria selama tahun 2005–2014 cenderung menurun yaitu dari 4,1 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2005 menjadi 0,99 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2014. Sementara target Rencana Strategi Kementerian Kesehatan untuk angka kesakitan malaria (API/*annual parasite incidence*) tahun 2014 <1 per 1.000 penduduk berisiko. Dengan demikian cakupan API 2014 mencapai target Renstra 2014. Penurunan API tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 6.36
ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE* /API)
PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO TAHUN 2005-2014

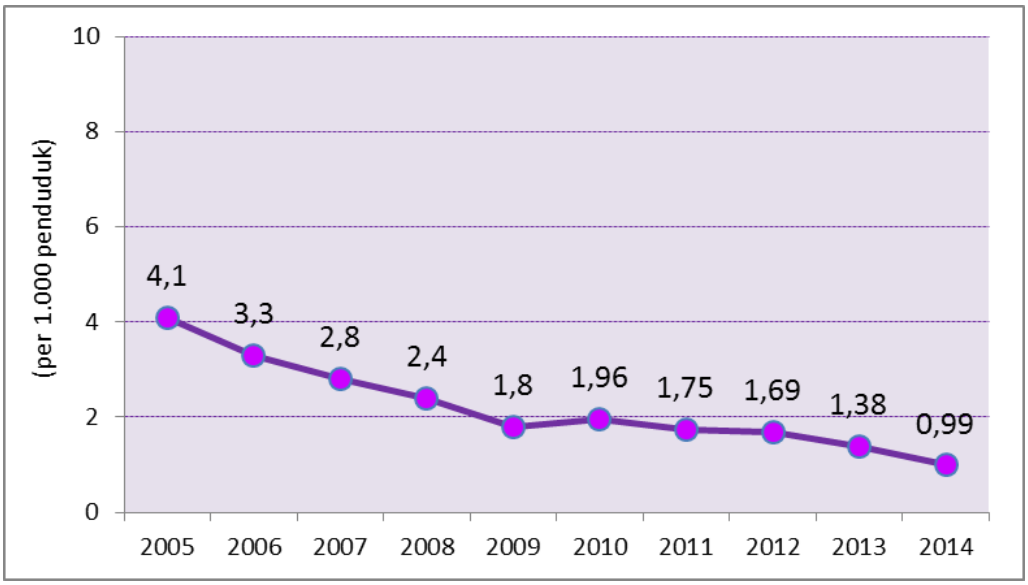

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Tiga provinsi dengan API per 1.000 penduduk tertinggi yaitu Papua (29,57), Papua Barat (20,85) dan Nusa Tenggara Timur (12,81). Sedangkan provinsi dengan API terendah yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Bali masing-masing sebesar 0,00. Sebanyak 80% kasus berasal dari NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Secara nasional, sebesar 84% sediaan darah dites dengan pemeriksaan mikroskopis dan 16% lainnya dites dengan *Rapid Diagnostic Test*. Hanya di Provinsi Kalimantan Tengah dengan proporsi *Rapid Diagnostic Test* lebih tinggi dibandingkan dengan pemeriksaan mikroskopik. Informasi lengkap mengenai jumlah kasus malaria dan jenis tes sediaan darah menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.22 dan Lampiran 6.23.

Menurut Riset Kesehatan Dasar 2013, insiden malaria berdasarkan diagnosis sebesar 0,35% atau 3,5 per 1.000 penduduk. Pada survei ini tiga provinsi dengan insiden tertinggi sama dengan hasil laporan rutin yaitu Papua (6,1%), Papua Barat (4,5%), dan Nusa Tenggara Timur (2,6%). Sementara insiden malaria berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 1,9% atau 19 per 1.000 penduduk.

2. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria harus dilakukan secara efektif. Pemberian jenis obat harus benar dan cara meminumnya harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan efektif adalah pemberian ACT (*Artemicin-based Combination Therapy*) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis dalam tiga hari. Hasil Riskesdas

2013 menyatakan bahwa proporsi pengobatan efektif Indonesia sebesar 45,5%. Lima provinsi tertinggi dalam mengobati malaria secara efektif yaitu Kep. Bangka Belitung (59,2%), Sumatera Utara (55,7%), Bengkulu (53,6%), Kalimantan Tengah (50,5%), dan Papua (50,0%).

K. RABIES

Rabies merupakan penyakit mematikan baik pada manusia maupun hewan yang disebabkan oleh infeksi virus (golongan Rabdovirus) yang ditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala yang di dalam tubuhnya mengandung virus.

Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam memantau upaya pengendalian rabies, yaitu: GHPR (kasus Gigitan Hewan Penular Rabies), PET/*Post Exposure Treatment* (penatalaksanaan kasus gigitan), dan kasus yang positif rabies dan mati berdasarkan uji *Lyssa*.

Tahun 2014 terdapat 25 provinsi tertular rabies dari 34 provinsi di Indonesia (Kementerian Pertanian). Sebanyak sembilan provinsi lainnya bebas rabies, lima diantaranya provinsi bebas historis (Papua, Papua Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan NTB), dan enpat provinsi dibebaskan (Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta).

Kasus kematian karena rabies *(Lyssa)* di tahun 2014 secara signifikan mengalami penurunan dari 195 pada tahun 2009 menjadi 81 kasus *Lyssa* pada tahun 2014. Demikian juga dengan jumlah kasus GHPR pada tahun 2014 mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 6.37 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan PET dari 78,5% pada tahun 2013 menjadi 79,4% pada tahun 2014.

GAMBAR 6.37
SITUASI RABIES DI INDONESIA
TAHUN 2009 - 2014

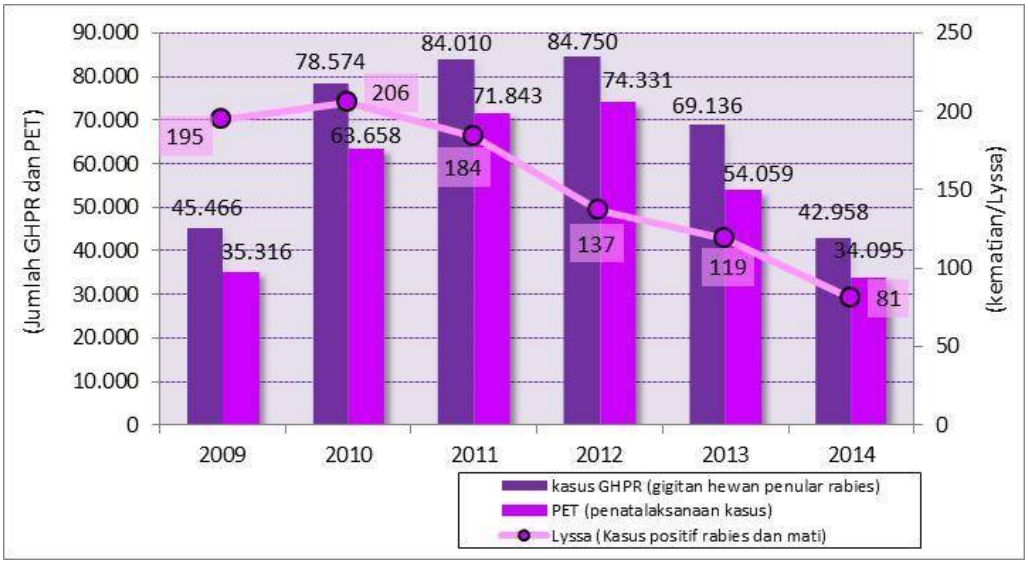

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Gambar 6.38 berikut ini merupakan sebaran kasus rabies di Indonesia selama tahun 2014.

GAMBAR 6.38
SEBARAN KASUS GHPR DAN KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA
TAHUN 2014

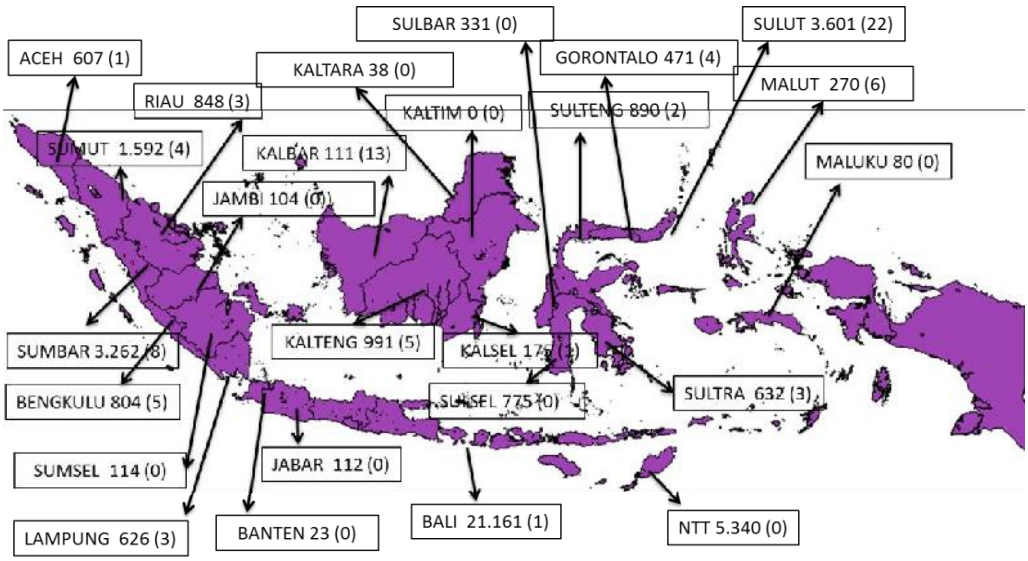

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Pada tahun 2014 terdapat 42.958 kasus gigitan hewan penular rabies. Kasus GHPR paling banyak terjadi di Bali yaitu sebanyak 21.161 kasus dengan kasus meninggal berdasarkan tes *lyssa* yang positif rabies berjumlah satu orang. Diikuti oleh Nusa Tenggara Timur dengan 5.340 kasus GHPR serta Sulawesi Utara sebanyak 3.601 kasus GHPR dengan 22 positif rabies. Sebanyak enam belas provinsi yang terdapat positif rabies tersebar di lima puluh kabupaten/kota.

L. LEPTOSPIROSIS

Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan bakteri *Leptospira sp*. Sumber infeksi pada manusia biasanya akibat kontak secara langsung atau tidak langsung dengan urine hewan yang terinfeksi. Penyakit ini bersifat musiman, di daerah yang beriklim sedang masa puncak insiden dijumpai pada musim panas dan musim gugur karena temperatur merupakan faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup *Leptospira*, sedangkan di daerah tropis insiden tertinggi selama musim hujan. Namun, dikarenakan sulitnya diagnosa klinis dan mahalnya biaya pemeriksaan laboratorium, banyak kasus leptospirosis yang tidak terlaporkan.

Terdapat empat provinsi yang melaporkan adanya kasus leptopirosis tahun 2014 yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Dibandingkan tahun 2013, terdapat penurunan jumlah kasus dari 640 kasus menjadi 519 kasus pada tahun 2014. Penurunan kasus leptospirosis secara signifikan terjadi di Jawa Timur dengan penurunan sekitar dua pertiga dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di DKI Jakarta dan Jawa Tengah terjadi kenaikan kasus bahkan merupakan kasus tertinggi di kedua provinsi tersebut dalam lima tahun terakhir.

TABEL 6.3
DISTRIBUSI KASUS LEPTOSPIROSIS DI 6 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2014

Provinsi	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sumatera Selatan	0	0	0	0	1	0
DKI Jakarta	8	15	11	10	66	106
Jawa Barat	0	1	29	0	1	0
Jawa Tengah	232	133	184	129	156	198
DI Yogyakarta	95	230	626	72	163	154
Jawa Timur	0	19	5	28	244	61
Banten	0	0	0	0	10	0
Kalimantan Timur	0	0	2	0	0	0
Sulawesi Selatan	0	11	0	0	0	0
Total	335	409	857	239	641	519

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Angka kematian akibat leptospirosis tertinggi terjadi di DKI Jakarta dengan CFR sebesar 16,98%. Gambar 6.39 berikut ini merupakan gambaran jumlah kasus dan jumlah kasus meninggal akibat leptospirosis selama tujuh tahun terakhir.

GAMBAR 6.39
SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2008 - 2014

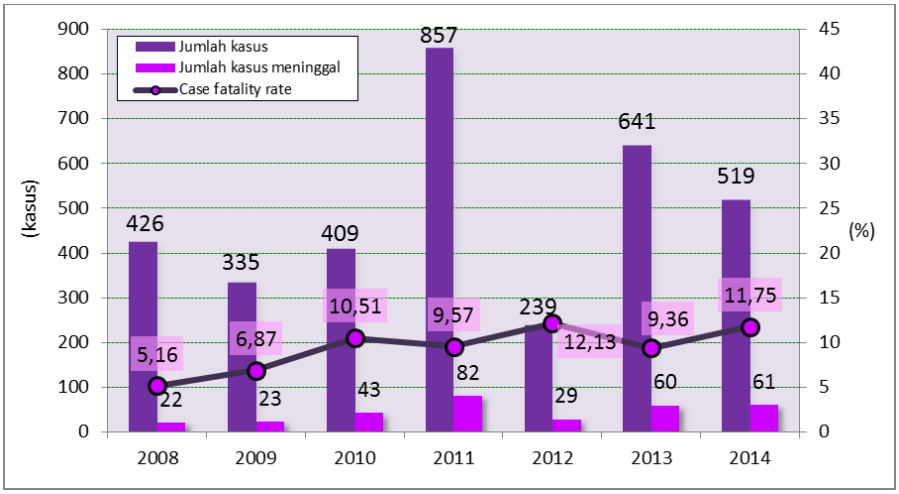

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Walaupun jumlah kasus pada tahun 2014 menurun dibandingkan tahun 2013, namun CFR akibat leptospirosis meningkat dari 9,36% pada tahun 2013 menjadi 11,75% pada tahun 2014.

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) leptospirosis dilakukan melalui upaya penemuan dini serta pengobatan segera penderita untuk mencegah kematian, intervensi lingkungan untuk mencegah munculnya sarang-sarang atau tempat persembunyaian tikus, dan vaksinasi hewan peliharaan terhadap *Leptospira*.

M. ANTRAKS

Penyakit antraks disebabkan oleh kuman antraks (*Bacillus anthracis*). Kuman ini dapat membentuk spora yang tahan terhadap perubahan lingkungan dan dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama didalam tanah, sehingga sulit dimusnahkan. Sumber penularan antraks yaitu hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing dan domba yang terinfeksi *Bacillus anthracis.*

Pada tahun 2014 telah dilaporkan sebanyak 13 kasus antraks di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan tanpa kejadian meninggal (CFR=0%). Dari gambaran kasus antraks tahun 2008-2014. Berikut ini digambarkan distribusi kasus antraks selama tujuh tahun terakhir.

GAMBAR 6.40
JUMLAH KASUS DAN CFR ANTRAKS
DI INDONESIA TAHUN 2008-2014

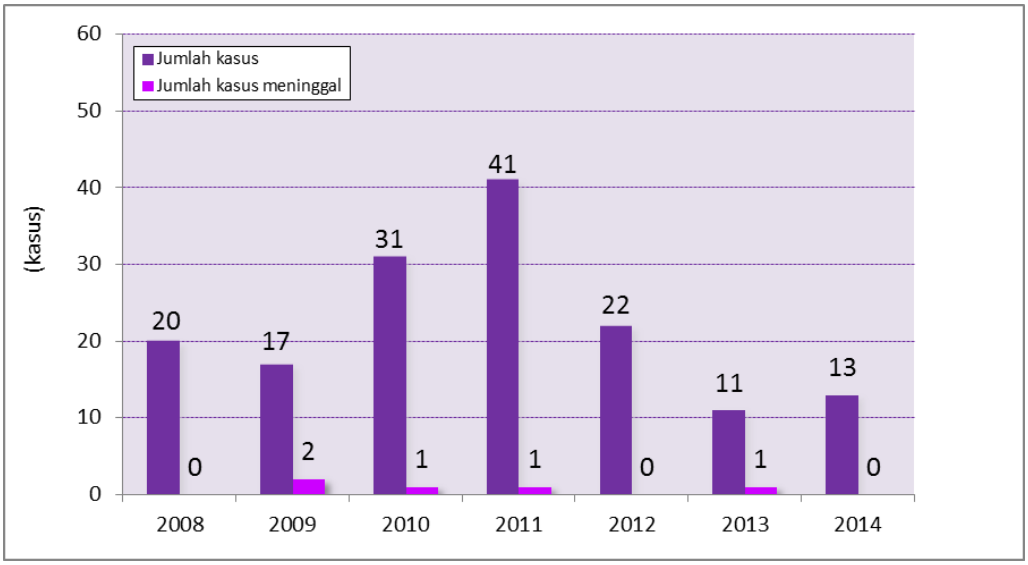

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Pengendalian kasus antraks dapat dilakukan dengan peningkatan kegiatan surveilans yang intensif terhadap kasus antraks dengan fokus daerah endemis atau daerah rawan lainnya. Kegiatan surveilans diintensifkan pada hari-hari perayaan agama seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal ataupun perayaan hari besar lainnya dan juga saat dimungkinkan konsumsi daging meningkat.

N. FLU BURUNG

Pengendalian flu burung yang dilakukan secara terpadu secara signifikan telah berhasil menurunkan jumlah kasus konfirmasi flu burung H5N1 di Indonesia pada tahun 2014. Sejak munculnya penyakit flu burung pertama kali pada tahun 2005, jumlah kasus terus menurun pada periode tahun 2006-2014 dari 55 kasus pada tahun 2006 menjadi dua kasus pada tahun 2014. Namun, keseluruhan kasus konfirmasi flu burung pada tahun 2014 tersebut meninggal (CFR=100%). Gambaran penurunan jumlah kasus konfirmasi flu burung H5N1 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

GAMBAR 6.41
JUMLAH KASUS, KEMATIAN, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) FLU BURUNG DI INDONESIA TAHUN 2005-2014

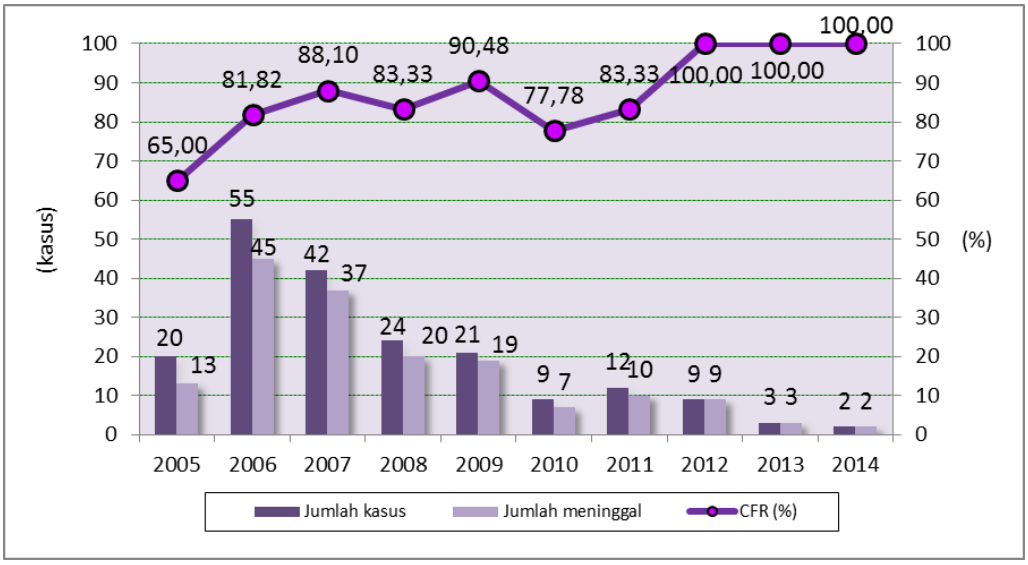

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Sejak dilaporkan kasus pertama pada tahun 2005, penyebaran kasus flu burung H5N1 pada manusia telah terjadi di 15 provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan. Secara kumulatif, jumlah kasus tertinggi ditemukan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 52 kasus, Jawa Barat sebesar 51 kasus, dan Banten sebesar 32 kasus.

Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh tim terpadu (Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tingginya CFR pada tahun 2014 yaitu:

1. Keterlambatan diagnosis;
2. Keterlambatan pemberian Oseltamivir;
3. Faktor virulensi virus dan hostnya;
4. Memiliki histori kontak secara tidak langsung dengan faktor risiko, sehingga petugas kesehatan menjadi kurang waspada terhadap gejala yang mengarah ke Flu Burung.

***

VII

KESEHATAN LINGKUNGAN

VII KESEHATAN LINGKUNGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensial untuk mempengaruhi kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

A. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang dimaksud dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dalam pelaksanaan STBM berpedoman pada lima pilar yaitu:

1. Stop buang air besar sembarangan (BABS),
2. Cuci tangan pakai sabun,
3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga,
4. Pengamanan sampah rumah tangga, dan
5. Pengamanan limbah cair rumah tangga

Desa STBM adalah desa yang sudah stop BABS minimal 1 dusun, mempunyai tim kerja STBM atau *natural leader*, dan telah mempunyai rencana kerja STBM atau rencana tindak lanjut. Jumlah desa STBM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah desa STBM adalah 11.165 desa dan meningkat menjadi 16.228 desa pada tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah desa STBM mencapai 20.497 desa, melebihi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu 20.000 desa. Jika dilihat dari jumlah desanya, maka yang terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur yaitu 4.737 desa, diikuti oleh Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pencapaian provinsi-provinsi di atas sebagai provinsi dengan desa STBM terbanyak dikarenakan provinsi-provinsi tersebut termasuk ke dalam tiga belas provinsi prioritas pertama

bersama dengan Provinsi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Provinsi-provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi dan tergolong dalam klasifikasi mudah dalam hal pemetaan wilayah dan penduduk. Dukungan dari pemerintah daerah pun menjadi salah satu faktor keberhasilan pencapaian tersebut seperti terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 440/11841/031/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Program STBM yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Bupati se Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur NTB tentang Buang Air Besar Sembarangan No (BASNO), dan sebagainya.

Jika dibandingkan dengan total desa dan kelurahan di setiap provinsi, maka persentase tertinggi desa yang melaksanakan STBM adalah Provinsi DI Yogyakarta (86,07%) dan Nusa Tenggara Barat (81,97%). Sedangkan persentase terendah desa yang melaksanakan STBM adalah Provinsi Papua sebesar 0,34% dan Kalimantan Timur sebesar 0,58% (Gambar 7.1). Rincian lengkap tentang persentase desa yang melaksanakan STBM tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 7.1.

GAMBAR 7.1
PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN 2014

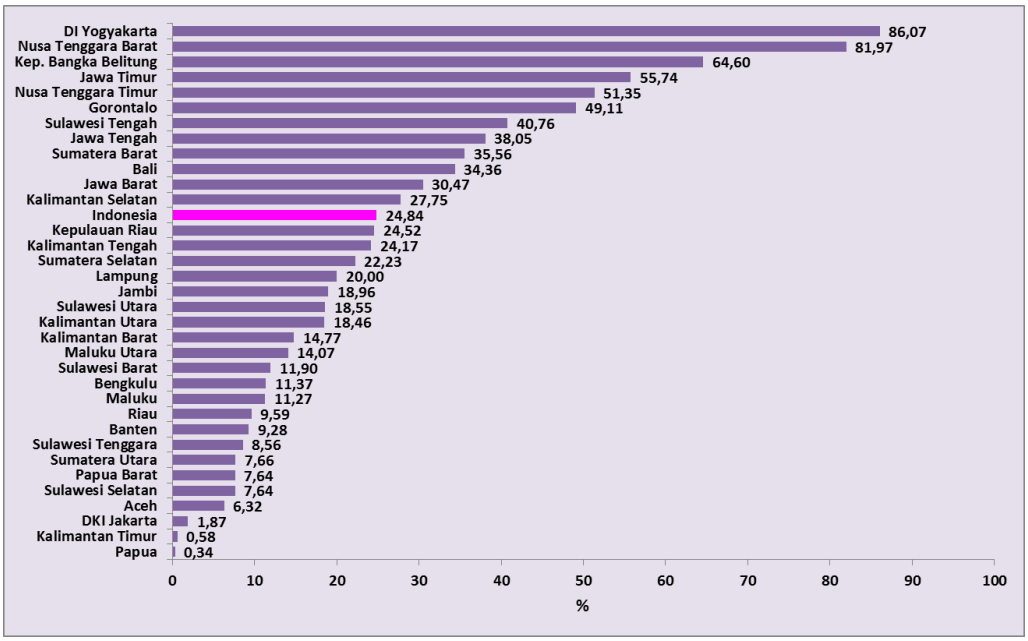

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Dalam upaya pencapaian ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya dalam hal perubahan perilaku dan kesenjangan pencapaian desa/kelurahan yang melaksanakan STBM. Proses perubahan perilaku membutuhkan waktu yang relatif lama dan tidak dapat dilakukan secara instan sehingga diperlukan pendampingan dari petugas agar masyarakat mau berubah untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dan tetap konsisten dalam menjalankannya. Kesenjangan pencapaian desa/kelurahan STBM disebabkan oleh belum semua petugas melaporkan hasil kegiatan di daerahnya. Dari total 9.738 tenaga kesehatan lingkungan yang terdaftar, hanya 4.285 tenaga kesehatan lingkungan (44%) yang melaksanakan monitoring kegiatan STBM sampai dengan tahun 2014.

Untuk mengatasi kendala ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti melakukan advokasi dan sosialisasi secara terpadu bersama lintas program dan lintas sektor serta mitra terkait (Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes, Poltekkes, Bappenas, Kemendagri,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dalam rangka internalisasi program di provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan dan memperkuat strategi kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam rangka efektivitas intervensi kegiatan, dan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi STBM menggunakan sistem monev berbasis web dan SMS *gateway* dalam skala nasional.

B. PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Promosi Kesehatan menerapkan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. PHBS merupakan suatu tindakan pencegahan agar masyarakat terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan.

PHBS dapat dilakukan di berbagai tatanan masyarakat, seperti tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja dan tempat-tempat umum. PHBS di tatanan rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.

Untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS, terdapat sepuluh upaya yang harus dilakukan, yaitu:

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
2. Memberi bayi ASI eksklusif
3. Menimbang balita setiap bulan
4. Menggunakan air bersih
5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
6. Menggunakan jamban sehat
7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu
8. Makan sayur dan buah setiap hari
9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari
10. Tidak merokok di dalam rumah

Berdasarkan Gambar 7.2 tentang pencapaian rumah tangga ber-PHBS tahun 2014, secara nasional persentase rumah tangga ber-PHBS sebesar 56,58%. Persentase tertinggi rumah tangga yang ber-PHBS adalah di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 76,61% diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 75,26%. Sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 25,50% kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 29,48%.

GAMBAR 7.2
PENCAPAIAN RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
TAHUN 2014

Sumber: Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI, 2015

C. PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan salah satu indikator pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014. Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS), KKS adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan KKS adalah kabupaten/kota yang telah memiliki atau membentuk forum kabupaten/kota sehat (forum komunikasi di tingkat kecamatan dan kelompok kerja kelurahan/desa) dan tim pembina kabupaten/kota yang aktif (melakukan pembinaan dan fasilitasi) yang ditetapkan melalui SK pemerintah daerah setempat serta memiliki tatanan sesuai dengan kriteria dalam klasifikasi Swasti Saba yaitu Padapa, Wiwerda dan Wistara.

Tatanan yang dinilai dalam KKS meliputi tatanan wajib dan pilihan. Tatanan wajib meliputi:

1. Kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum
2. Kehidupan masyarakat sehat yg mandiri

Sedangkan tatanan pilihan meliputi:

1. Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi
2. Kawasan pertambangan sehat
3. Kawasan hutan sehat
4. Kawasan industri dan perkantoran sehat
5. Kawasan pariwisata sehat
6. Kawasan pangan dan gizi

7. Kehidupan sosial yang sehat

Penghargaan tertinggi bagi kabupaten/kota yang melaksanakan KKS adalah penghargaan Swasti Saba dengan kategori Padapa, Wiwerda dan Wistara. Kategori Padapa adalah bagi kabupaten/kota yang memilih dan melaksanakan dua tatanan wajib, Wiwerda bagi kabupaten/kota yang memilih dan melaksanakan tiga sampai empat tatanan (dua tatanan wajib dan satu sampai dengan dua tatanan pilihan), dan Wistara bagi kabupaten/kota yang memilih dan melaksanakan lima tatanan atau lebih (dua tatanan wajib dan tiga sampai dengan tujuh tatanan pilihan). Pemberian penghargaan ini telah diselenggarakan sejak tahun 2005 dan dilakukan setiap dua tahun sekali.

Pada tahun 2014, jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program KKS sebanyak 331 kabupaten/kota. Provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah mencapai KKS (100%) sebanyak dua belas provinsi. Terdapat tiga provinsi yang kabupaten/kotanya belum ada yang mencapai KKS yaitu Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua Barat. Rincian lengkap tentang jumlah kabupaten/kota penyelenggara KKS tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 7.3.

GAMBAR 7.3
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS)
TAHUN 2014

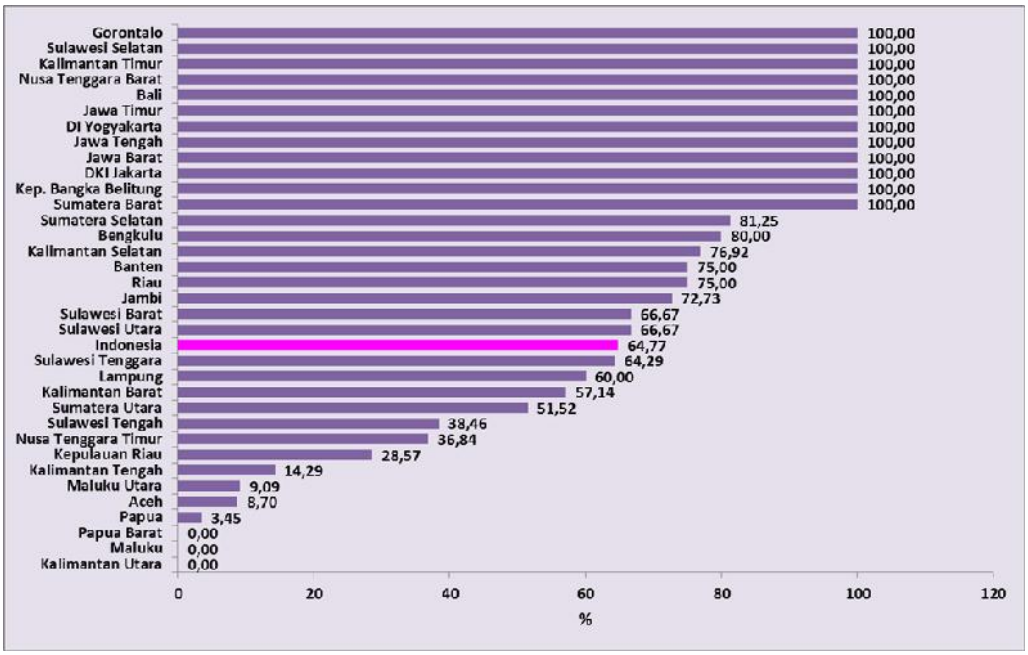

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Dalam pelaksanaan kegiatan KKS ini, masih terdapat masalah yang dihadapi, diantaranya standar indikator pelaksanaan kegiatan per tatanan dalam KKS masih belum sempurna, koordinasi lintas sektor yang masih sulit antara kementerian/lembaga terkait dalam merespon kerja sama dengan Kemenkes untuk mewujudkan KKS, kurangnya sosialisasi dan komitmen pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan akibat seringnya mutasi kepegawaian di daerah, fungsi tim pembina yang belum optimal baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan kurangnya advokasi dan sosialisasi kegiatan penyehatan kawasan yang terdiri dari KKS, pasar sehat, pelabuhan sehat dan DTPK di setiap provinsi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait dengan penyelenggaraan KKS dan menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang KKS.

D. AIR MINUM

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pada Permenkes tersebut juga disebutkan bahwa penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Dalam hal ini penyelenggara air minum diantaranya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang menyelenggarakan penyediaan air minum.

Air minum yang aman bagi kesehatan adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikrobiologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri *E.Coli* dan total bakteri koliform. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, aluminium, klor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif, kadar *gross alpha activity* tidak boleh melebihi 0,1 *becquerel* per liter (Bq/l) dan kadar *gross beta activity* tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

Pada tahun 2014, dilakukan pengambilan sampel air minum oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan untuk mengetahui air minum yang sudah memenuhi syarat. Dari 1.473 sampel yang diperiksa, secara nasional terdapat 1.137 sampel yang memenuhi syarat atau sekitar 77,19% (Gambar 7.4). Hasil ini belum memenuhi target Rentra Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu 100% sampel yang diperiksa sudah memenuhi syarat. Secara provinsi, terdapat sembilan provinsi yang sudah memenuhi target Renstra Kemenkes tahun 2014 dengan memperoleh hasil 100%. Namun masih ada enam provinsi yang belum dilakukan pengambilan sampel air minum ini. Rincian lengkap tentang persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 7.5.

GAMBAR 7.4
PERSENTASE KUALITAS AIR MINUM YANG MEMENUHI SYARAT
TAHUN 2014

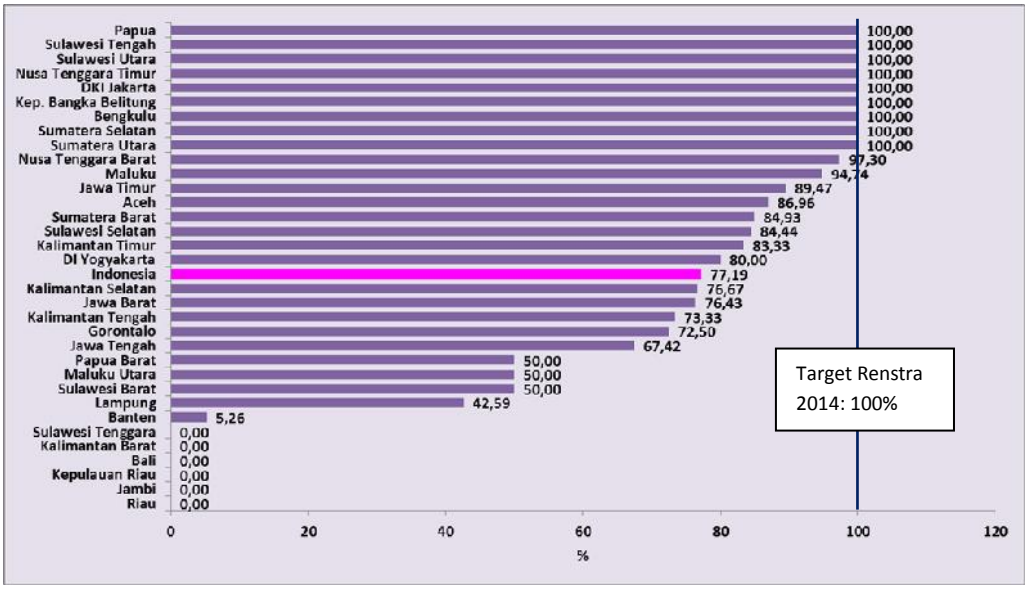

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Belum optimalnya pelaksanaan pengambilan sampel uji kualitas air minum disebabkan pengawasan kualitas air minum belum menjadi prioritas kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota sehingga dukungan kebijakan dan pendanaan masih minim. Selain itu belum semua kabupaten/kota memiliki laboratorium uji kualitas air minum, peralatan uji kualitas air yang memenuhi standar dan SDM yang kompeten. Peran aktif unit pelaksana teknis (UPT) yaitu Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKLPP) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam hal pengawasan, pembinaan, dan koordinasi dengan lintas sektor terutama PDAM juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan uji kualitas air minum.

Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan advokasi dan sosialisasi Permenkes nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Permenkes nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, meningkatkan Kemitraan Pemerintah – Swasta (KPS) serta melibatkan lintas program, lintas sektor dan lembaga Internasional seperti WHO, mendukung ketersediaan peralatan pengawasan kualitas air minum untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota, mengoptimalisasi peran UPT (B/BTKLPP), dan monitoring dan evaluasi yang berkeinambungan.

Badan Pusat Statistik setiap tahunnya melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diantaranya melakukan survei rumah tangga yang memiliki akses air minum layak. Berdasarkan kuesioner Susenas, rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding (leding meteran dan eceran), air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak ≥10 m dari penampungan kotoran/limbah, atau air hujan. Apabila sumber air minum utama tidak berasal dari leding, air terlindung dengan jarak ≥10 m dari penampungan kotoran/limbah, dan air hujan maka tetap mempunyai akses air minum layak apabila sumber air mandi/cucinya yang berasal dari leding (leding meteran dan eceran), air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung) atau air hujan.

GAMBAR 7.5
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
TAHUN 2014

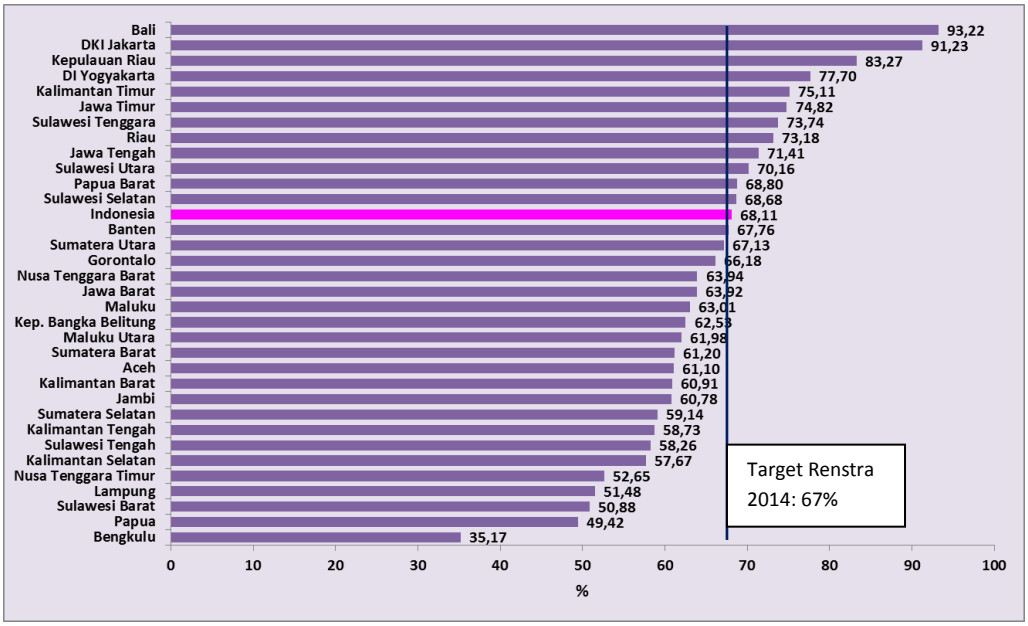

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Gambar 7.5 menunjukkan bahwa secara nasional persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak sebesar 68,11% dan sudah melebihi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu sebesar 67%. Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tertinggi yaitu Bali sebesar 93,22%, diikuti oleh DKI Jakarta dengan persentase sebesar 91,23% dan Kepulauan Riau dengan persentase sebesar 83,27%. Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak terendah yaitu Bengkulu sebesar 35,17%, diikuti Papua sebesar 49,42% dan Sulawesi Barat sebesar 50,88%. Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 7.4.

Upaya peningkatan akses air minum layak secara nasional terus menerus dilakukan melalui pengalokasian dana APBN dalam bentuk kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM). Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses penduduk terhadap sumber air dan sanitasi yang layak di 102 kabupaten pada 28 provinsi. Selain itu dilakukan juga penguatan KPS dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal/nasional/internasional, *Corporate Social Responsibility* (CSR), donor agensi internasional, seperti *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB). Kerjasama ini diimplementasikan melalui kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan *Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program* (ICWRMIP), serta kegiatan lain yang berorientasi pada pembinaan, penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar yang layak serta terbangunnya perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat dengan menggunakan pendekatan STBM.

Namun masih ada kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akses air minum layak. Adanya kecenderungan meningkatnya penggunaan air kemasan dan isi ulang sebagai sumber air minum, sementara itu air kemasan dan isi ulang tidak termasuk sebagai sumber air minum layak. Hal ini terjadi disebabkan oleh pendataan yang dilakukan saat ini hanya memotret akses terhadap sumber air yang digunakan untuk minum, belum memperhitungkan kondisi rumah tangga yang memiliki lebih dari satu sumber air yang layak untuk diminum. Penyediaan infrastruktur air minum yang ada juga belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, anggaran daerah untuk perbaikan sarana air minum yang dipakai di masyarakat belum teralokasi, termasuk sumber air minum bukan jaringan perpipaan yang tidak terlindungi.

E. SANITASI LAYAK

Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu pondasi inti dari masyarakat yang sehat. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Berdasarkan konsep dan definisi MDGs, rumah tangga memiliki akses sanitasi layak apabila fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik (*septic tank*)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama.

GAMBAR 7.6
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
TAHUN 2014

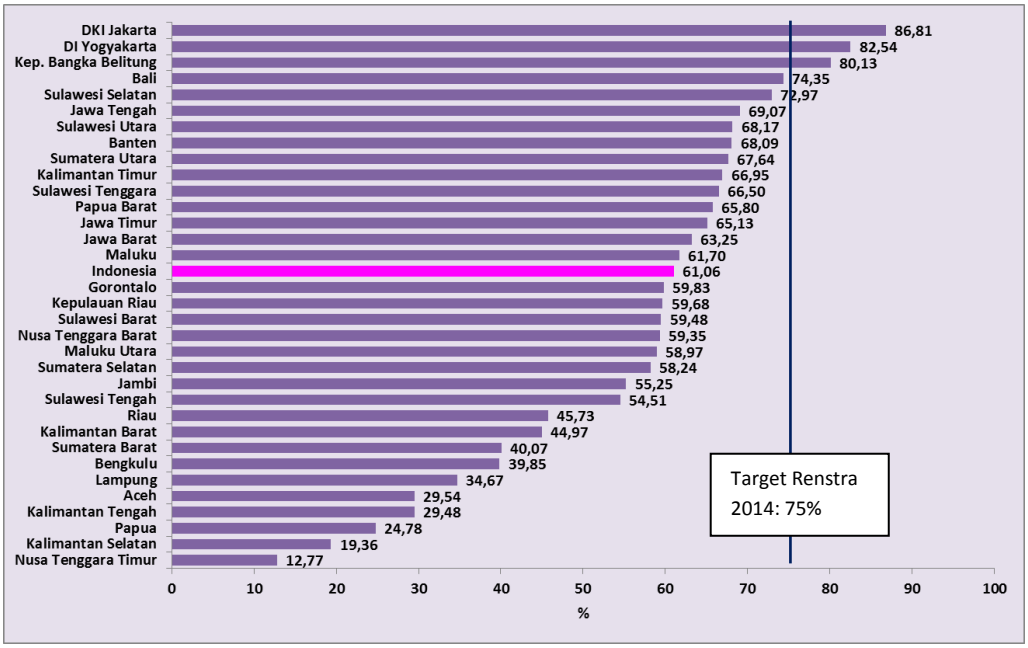

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Gambar 7.6 menunjukkan hasil Susenas 2014 mengenai persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Secara nasional, terdapat 61,06% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Hasil ini belum memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu 75%. Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 86,81%, DI Yogyakarta sebesar 82,54% dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 80,13%. Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak terendah yaitu Nusa Tenggara Timur sebesar 12,77%. Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 7.6.

Pembangunan sanitasi masih belum menjadi kegiatan prioritas di provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini berdampak pada ketersediaan sarana sanitasi yang mudah, murah, dan terjangkau oleh masyarakat. Kendala lain pada program sanitasi diantaranya kerjasama dan kemitraaan pada program sanitasi yang belum optimal dan investasi pada sektor sanitasi masih minim karena belum mempunyai nilai ekonomis secara langsung. Selain itu perubahan perilaku masyarakat terhadap PHBS yang relatif lama juga menjadi kendala tersendiri.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala di atas, yaitu dengan melakukan advokasi dan sosialisasi secara terpadu bersama lintas program dan lintas sektor, mengalokasikan anggaran APBD yang cukup untuk monitoring dan pendampingan kepada masyarakat oleh sanitarian/fasilitator/kader untuk mewujudkan perubahan perilaku higiene di masyarakat secara berkesinambungan, melakukan pelatihan dan pembinaan calon wirausaha sanitasi di provinsi dan kabupaten/kota, dan mengoptimalisasi peran UPT (B/BTKLPP) dalam menciptakan pilihan opsi teknologi sarana sanitasi untuk daerah khusus seperti daerah pasang surut, daerah sulit air, dan sebagainya.

F. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYEHATAN PEMUKIMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

1. Rumah Sehat

Rumah sehat adalah rumah yang memiliki kriteria minimal akses air minum, akses jamban sehat, lantai, pencahayaan, dan ventilasi sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Permenkes Nomor 1077/MENKES/PER/2012 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah.

Menurut Kepmenkes RI No. 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, ketentuan rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:

1. Bahan bangunan
   a. Tidak terbuat dari bahan yang dapat melepaskan bahan yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain: debu total kurang dari 150 $\mu g/m^2$, asbestos kurang dari 0,5 serat/m^3 per 24 jam, dan timah hitam (Pb) kurang dari 300 mg/kg
   b. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen
2. Komponen dan penataan ruangan rumah
   a. Lantai kedap air dan mudah dibersihkan
   b. Dinding rumah memiliki ventilasi, di kamar mandi dan kamar cuci kedap air dan mudah dibersihkan
   c. Langit-langit rumah mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan
   d. Bumbungan rumah 10 m dan ada penangkal petir
   e. Ruang ditata sesuai dengan fungsi dan peruntukannya
   f. Dapur harus memiliki sarana pembuangan asap
3. Pencahayaan
   Pencahayaan alam dan/atau buatan langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan dengan intensitas penerangan minimal 60 lux dan tidak menyilaukan mata.
4. Kualitas udara
   a. Suhu udara nyaman antara 18 –30^oC
   b. Kelembaban udara 40 –70 %
   c. Gas SO_2 kurang dari 0,10 ppm/24 jam
   d. Pertukaran udara 5 kaki^3/menit/penghuni
   e. Gas CO kurang dari 100 ppm/8 jam
   f. Gas formaldehid kurang dari 120 mg/m^3
5. Ventilasi
   Luas lubang ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% luas lantai
6. Vektor penyakit
   Tidak ada lalat, nyamuk ataupun tikus yang bersarang di dalam rumah
7. Penyediaan air
   a. Tersedia sarana penyediaan air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter/orang/hari
   b. Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan/atau air minum
8. Sarana penyimpanan makanan
   Tersedia sarana penyimpanan makanan yang aman
9. Pembuangan Limbah

a. Limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah
b. Limbah padat harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bau, tidak mencemari permukaan tanah dan air tanah

10. Kepadatan hunian
Luas kamar tidur minimal 8 m^2 dan tidak dianjurkan untuk lebih dari dua orang tidur

Persyaratan ini juga berlaku juga terhadap rumah susun atau kondominium, rumah toko, dan rumah kantor pada zona permukiman.

GAMBAR 7.7
PERSENTASE RUMAH YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
TAHUN 2014

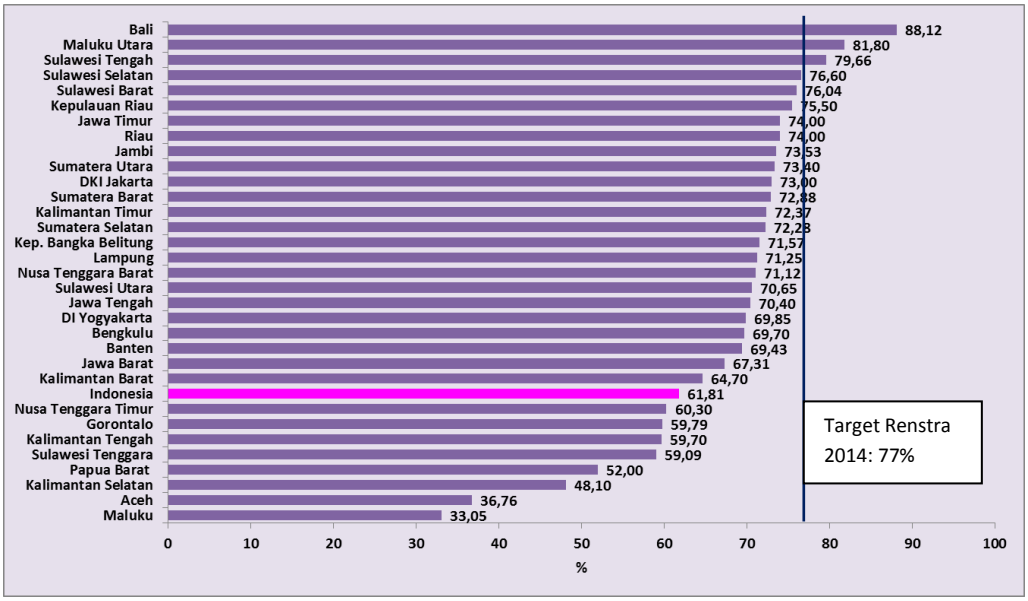

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Gambar 7.7 menunjukkan bahwa secara nasional terdapat 61,81% rumah yang memenuhi syarat kesehatan. Hasil ini belum memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu 77%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Bali yaitu 88,12% dan Maluku Utara dengan 81,80%. Sedangkan provinsi terendah adalah Maluku dengan persentase 33,05%. Pada provinsi Papua belum dilakukan penilaian rumah yang memenuhi syarat kesehatan. Rincian lengkap tentang persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 7.7.

Program penyehatan pemukiman memang belum menjadi program prioritas di daerah. Selain itu koordinasi dan kemitraan terkait penyehatan pemukiman yang belum optimal dan minimnya SDM dan dana untuk melakukan penilaian rumah sehat juga menjadi penghambat dalam program penyehatan pemukiman. Hambatan lainnya adalah tidak semua pemilik rumah mampu memperbaiki rumah sesuai rekomendasi sanitarian puskesmas.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melakukan koordinasi dan kemitraan antar stakeholder yang terkait, advokasi dan sosialisasi ke daerah untuk melakukan penilaian dan pendataan rumah sehat, menyebarluaskan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait rumah sehat, dan mengoptimalkan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan (klinik sanitasi) di puskesmas.

2. Tempat-Tempat Umum (TTU)

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan, antara lain sarana pendidikan (sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menegah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah), fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit dan Puskesmas), serta hotel bintang dan nonbintang. TTU dinyatakan sehat sesuai dengan Kepmenkes RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Kesehatan Lingkungan RS, Kepmenkes RI No 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, dan Permenkes No 80/MENKES/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel.

Beberapa hal yang menjadi ketentuan TTU sehat di lingkungan rumah sakit, sekolah, dan hotel yaitu:

1. Lokasi TTU
2. Konstruksi bangunan seperti atap, langit-langit, dinding, lantai, tangga, pintu, jendela, dan pembuangan air hujan
3. Kualitas udara
4. Pencahayaan
5. Ventilasi
6. Kebisingan
7. Fasilitas air bersih, air minum, dan sarana pembuangan limbah
8. Kondisi ruangan dan penggunaan sesuai peruntukkannya

GAMBAR 7.8
PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
TAHUN 2014

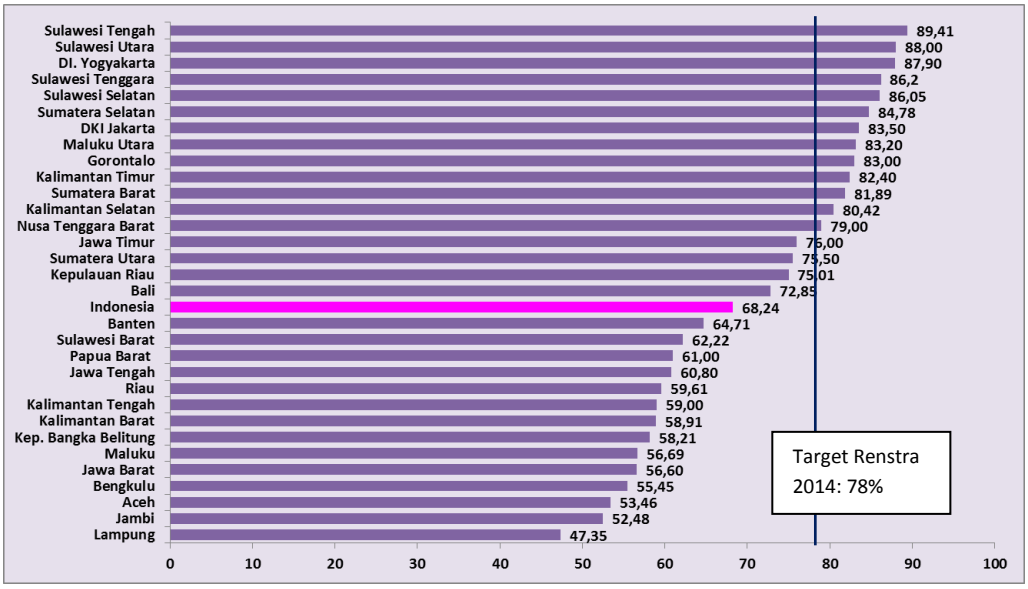

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Pada gambar 7.8, secara nasional TTU yang telah memenuhi syarat belum sesuai dengan target Renstra Kementerian Kesehatan yaitu hanya sebesar 68,24%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Sulawesi Tengah dengan persentase 89,41%. Provinsi dengan persentase terendah adalah Lampung (47,35%), sedangkan provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua belum melakukan penilaian TTU sehat. Rincian lengkap tentang persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 7.8.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan jumlah TTU yang memenuhi syarat diantaranya adalah koordinasi antar program dan lintas sektor yang belum optimal, alokasi dana dalam anggaran daerah untuk kegiatan penyehatan dan pengawasan TTU yang masih terbatas, mekanisme pendataan dan pelaporan yang belum efektif, dan peralatan pengukuran parameter kualitas lingkungan yang belum lengkap. Oleh karena itu, dapat dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan melakukan advokasi dan sosialisasi terpadu antar program dan lintas sektor, memenuhi kebutuhan peralatan pengukuran parameter kesehatan lingkungan, meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi, dan meningkatkan kapasitas pemilik/penyelenggara TTU agar ikut serta dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.

G. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYEHATAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN

Tempat pengelolaan makanan (TPM) adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasaboga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. TPM dinyatakan sehat sesuai dengan Kepmenkes Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran, persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi meliputi:

1. Persyaratan lokasi dan bangunan
2. Persyaratan fasilitas sanitasi
3. Persyaratan dapur, rumah makan, dan gudang makanan
4. Persyaratan bahan makanan dan makanan jadi
5. Persyaratan pengolahan makanan
6. Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi
7. Persyaratan penyajian makanan jadi
8. Persyaratan peralatan yang digunakan

Gambar 7.9 menunjukkan bahwa secara nasional terdapat 75,21% TPM yang memenuhi syarat kesehatan. Hasil ini sudah memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu sebesar 75%. Provinsi dengan persentase tertinggi TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah Maluku yaitu sebesar 93,58%, diikuti dengan Provinsi Papua Barat (93,18%) dan Bali (93,18%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah Sulawesi Tenggara (55,65%) diikuti oleh Sulawesi Barat (60,45%) dan Lampung (62,46%). Rincian lengkap tentang persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 7.9.

GAMBAR 7.9
PERSENTASE TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
TAHUN 2014

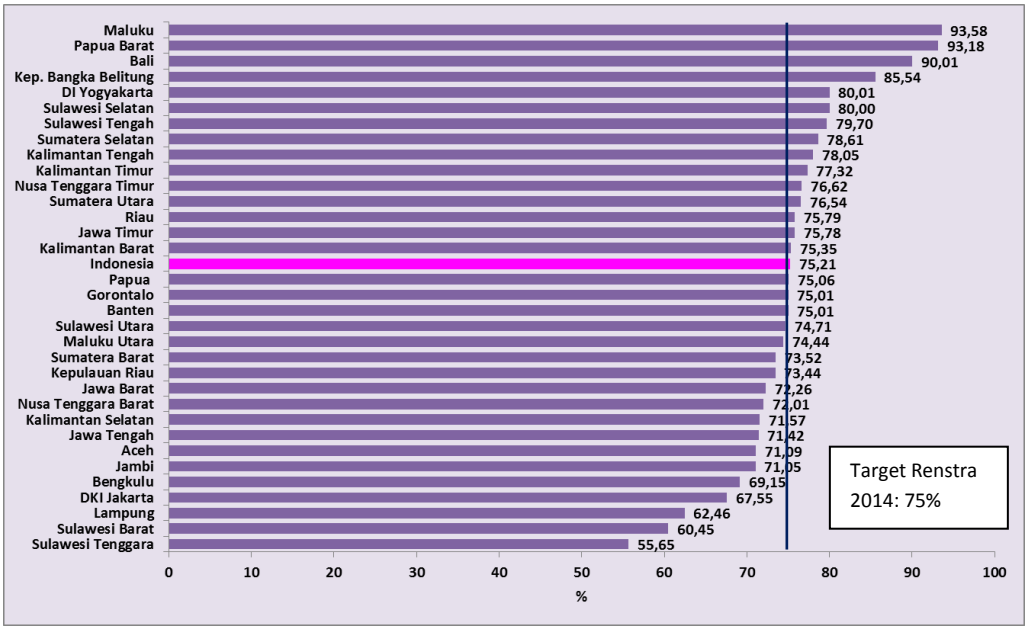

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah TPM yang memenuhi syarat diantaranya dengan memberikan dukungan aspek legal untuk operasionalisasi pembinaan dan pengawasan TPM dan Tempat Pengolahan Pangan (TPP), meningkatkan jejaring kemitraan, meningkatkan kapasitas SDM, menyediakan sarana dan prasarana seperti media KIE tentang higiene sanitasi pangan dan alat deteksi cepat sistem kewaspadaan dini KLB keracunan pangan, menyediakan pengelolaan data dan informasi yang *up to date* dan *real time* dengan e monev Higiene Sanitasi Pangan (HSP), mengembangkan daerah intervensi kabupaten/kota yang berkomitmen untuk pelaksanaan pembinaan dan pengendalian TPM terstandar, dan memfasilitasi tugas perbantuan sentra pangan jajanan di kabupaten/kota.

H. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Berdasarkan lampiran dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, limbah medis merupakan semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat tinggi. Limbah cair adalah semua buangan air termasuk tinja yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radiaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anastesi, dan pembuatan obat citotoksik.

Pengelolaan limbah medis tentunya berbeda dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Penempatan limbah medis dilakukan pada wadah yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia, radioaktif, dan volumenya. Limbah medis yang telah terkumpul tidak diperbolehkan untuk langsung dibuang ke tempat pembuangan limbah domestik tetapi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk limbah medis yang berbentuk gas dilengkapi

alat pereduksi emisi gas dan debu pada proses pembuangannya. Selain itu perlu dilakukan pula upaya minimalisasi limbah yaitu dengan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Penghijauan juga baik dilakukan untuk mengurangi polusi dari limbah yang berbentuk gas dan untuk menyerap debu.

GAMBAR 7.10
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN PEMBINAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT
TAHUN 2014

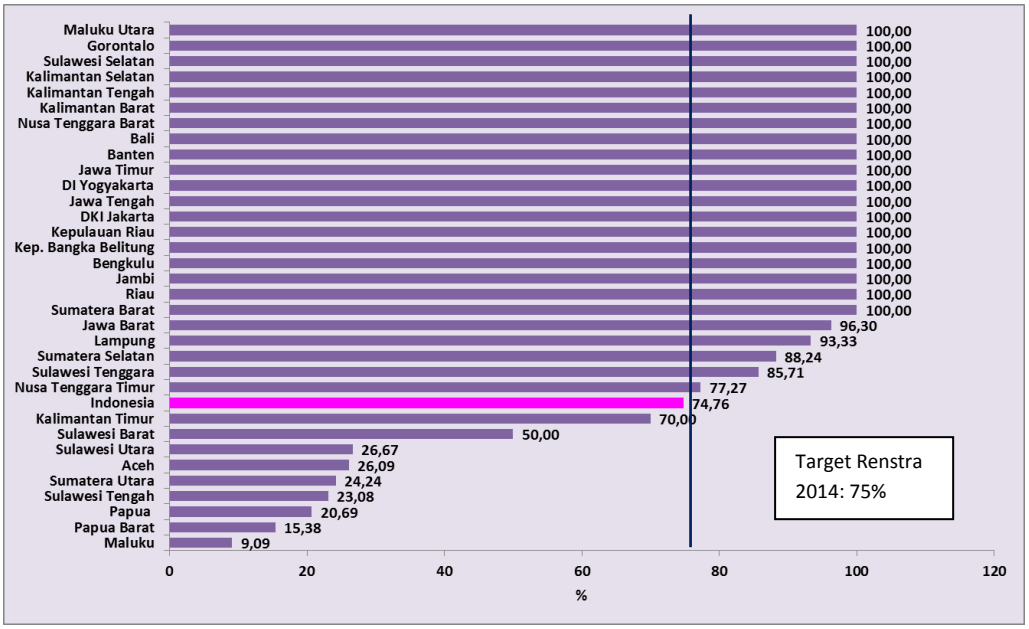

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Berdasarkan Gambar 7.10, diketahui bahwa secara nasional terdapat 74,76% kabupaten/kota yang telah melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah medis dan belum memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu sebesar 75%. Ada 19 provinsi yang seluruh kabupaten/kota di dalamnya telah melaksanakan pembinaan tersebut. Sedangkan pada Provinsi Kalimantan Utara belum dilakukan penilaian dan pembinaan pengelolaan limbah medis. Rincian lengkap tentang persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah medis di rumah sakit tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 7.10.

Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah medis diantaranya dengan membangun kemitraan dan pengembangan jejaring, pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas SDM, dan bimbingan dan evaluasi. Namun, masih ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah medis, seperti masih banyak rumah sakit yang belum melaksanakan pengelolaan limbah medis dengan tepat, penggunaan alat kesehatan yang mengandung merkuri, dan kendala teknis pada peralatan pengolahan limbah medis. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah di atas, diantaranya dengan:

1. Melakukan kegiatan percontohan limbah medis di rumah sakit misalnya dengan pemberian peralatan pengolahan limbah medis non insinerasi
2. Melaksanakan *workshop* pengelolaan limbah medis rumah sakit dan *workshop free mercury*, yang diikuti dinas kesehatan provinsi, UPT, dan lintas sektor lainnya

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan rumah sakit)

3. Melakukan pemantauan evaluasi radiasi

* * *

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. 2009. *Pedoman Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi Dengan Stiker: Dalam Rangka Mempercepat Penurunan AKI*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kementerian Dalam Negeri. 2005. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Kesehatan RI. 1999. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2006. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelanggaraan Praktek Bidan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 021/MENKES/SK/1/2011 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/MENKES/PER/2012 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. P*eraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Keuangan. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2013. *Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Konsil Kedokteran Indonesia. 2013. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA)*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.

Konsil Kedokteran Indonesia. 2014. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perkonsil Nomor 1/KKI/PER/I/2010 Tentang Registrasi Dokter*

Program Internsip dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.

Konsil Kedokteran Indonesia. 2014. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.

Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 184*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 298*. Jakarta: Sekretariat Negara.

World Health Organization. 2014. *Global Tuberculosis Report 2014.* Jenewa: WHO.

World Health Organization. 3 Juni 2015. "Environmental Health". http://www.who.int/topics/environmental_health/en/

* * *

LAMPIRAN

Lampiran 1.1

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Pembagian Wilayah					
		Kabupaten	Kota	Kabupaten + Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	18	5	23	289	0	6.474
2	Sumatera Utara	25	8	33	436	691	5.389
3	Sumatera Barat	12	7	19	179	259	880
4	Riau	10	2	12	163	243	1.592
5	Jambi	9	2	11	138	163	1.398
6	Sumatera Selatan	13	4	17	231	377	2.817
7	Bengkulu	9	1	10	126	172	1.341
8	Lampung	13	2	15	225	205	2.435
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	7	47	78	309
10	Kepulauan Riau	5	2	7	66	141	275
11	DKI Jakarta	1	5	6	44	267	0
12	Jawa Barat	18	9	27	626	641	5.319
13	Jawa Tengah	29	6	35	573	750	7.809
14	DI Yogyakarta	4	1	5	78	46	392
15	Jawa Timur	29	9	38	664	776	7.723
16	Banten	4	4	8	155	313	1.238
17	Bali	8	1	9	57	80	636
18	Nusa Tenggara Barat	8	2	10	116	142	995
19	Nusa Tenggara Timur	21	1	22	306	318	2.950
20	Kalimantan Barat	12	2	14	174	89	1.908
21	Kalimantan Tengah	13	1	14	136	138	1.434
22	Kalimantan Selatan	11	2	13	152	143	1.864
23	Kalimantan Timur	7	3	10	103	196	833
24	Kalimantan Utara	4	1	5	50	35	447
25	Sulawesi Utara	11	4	15	167	332	1.490
26	Sulawesi Tengah	12	1	13	174	168	1.839
27	Sulawesi Selatan	21	3	24	306	785	2.253
28	Sulawesi Tenggara	15	2	17	209	377	1.820
29	Gorontalo	5	1	6	77	72	657
30	Sulawesi Barat	6	0	6	69	71	576
31	Maluku	9	2	11	118	33	1.191
32	Maluku Utara	8	2	10	113	117	1.063
33	Papua Barat	12	1	13	203	87	1.628
34	Papua	28	1	29	524	107	5.118
Indonesia		**416**	**98**	**514**	**7.094**	**8.412**	**74.093**

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015

Lampiran 1.2

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN RASIO JENIS KELAMIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	2.365.626	2.366.079	4.731.705	100,0
2	Sumatera Utara	6.753.829	6.774.108	13.527.937	99,7
3	Sumatera Barat	2.527.260	2.571.530	5.098.790	98,3
4	Riau	3.273.675	3.084.961	6.358.636	106,1
5	Jambi	1.742.763	1.669.696	3.412.459	104,4
6	Sumatera Selatan	4.068.596	3.927.939	7.996.535	103,6
7	Bengkulu	932.755	895.536	1.828.291	104,2
8	Lampung	4.101.852	3.870.394	7.972.246	106,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	714.779	665.983	1.380.762	107,3
10	Kepulauan Riau	1.041.183	990.712	2.031.895	105,1
11	DKI Jakarta	5.136.173	4.998.857	10.135.030	102,7
12	Jawa Barat	23.557.049	22.743.494	46.300.543	103,6
13	Jawa Tengah	16.286.404	16.493.428	32.779.832	98,7
14	DI Yogyakarta	1.774.459	1.819.831	3.594.290	97,5
15	Jawa Timur	19.021.215	19.508.266	38.529.481	97,5
16	Banten	6.051.954	5.782.133	11.834.087	104,7
17	Bali	2.127.969	2.097.415	4.225.384	101,5
18	Nusa Tenggara Barat	2.279.683	2.422.706	4.702.389	94,1
19	Nusa Tenggara Timur	2.516.606	2.554.140	5.070.746	98,5
20	Kalimantan Barat	2.321.739	2.224.700	4.546.439	104,4
21	Kalimantan Tengah	1.233.335	1.135.319	2.368.654	108,6
22	Kalimantan Selatan	1.979.604	1.934.304	3.913.908	102,3
23	Kalimantan Timur	1.842.870	1.665.142	3.508.012	110,7
24	Kalimantan Utara	323.114	284.615	607.729	113,5
25	Sulawesi Utara	1.215.227	1.167.714	2.382.941	104,1
26	Sulawesi Tengah	1.453.503	1.385.787	2.839.290	104,9
27	Sulawesi Selatan	4.098.674	4.297.073	8.395.747	95,4
28	Sulawesi Tenggara	1.212.907	1.205.055	2.417.962	100,7
29	Gorontalo	567.181	567.317	1.134.498	100,0
30	Sulawesi Barat	642.684	641.936	1.284.620	100,1
31	Maluku	861.747	846.443	1.708.190	101,8
32	Maluku Utara	582.295	559.266	1.141.561	104,1
33	Papua Barat	462.254	415.183	877.437	111,3
34	Papua	1.850.900	1.635.532	3.486.432	113,2
Indonesia		**126.921.864**	**125.202.594**	**252.124.458**	**101,4**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 1.3

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2014

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	0-4	12.374.083	11.688.023	24.062.106
2	5-9	12.705.167	11.967.310	24.672.477
3	10-14	12.374.565	11.693.303	24.067.868
4	15-19	11.261.010	10.889.693	22.150.703
5	20-24	10.488.191	10.608.966	21.097.157
6	25-29	11.278.351	11.327.641	22.605.992
7	30-34	10.555.312	10.482.188	21.037.500
8	35-39	9.906.309	9.725.280	19.631.589
9	40-44	8.829.820	8.701.398	17.531.218
10	45-49	7.461.442	7.435.054	14.896.496
11	50-54	6.223.475	6.041.940	12.265.415
12	55-59	4.668.655	4.294.477	8.963.132
13	60-64	3.105.577	3.322.039	6.427.616
14	65-69	2.360.724	2.619.093	4.979.817
15	70-74	1.624.855	2.042.153	3.667.008
16	75+	1.704.328	2.364.036	4.068.364
Jumlah		**126.921.864**	**125.202.594**	**252.124.458**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 1.4

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, LUAS WILAYAH DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km^2)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	2.365.626	2.366.079	4.731.705	57.956,00	81,64
2	Sumatera Utara	6.753.829	6.774.108	13.527.937	72.981,23	185,36
3	Sumatera Barat	2.527.260	2.571.530	5.098.790	42.012,89	121,36
4	Riau	3.273.675	3.084.961	6.358.636	87.023,66	73,07
5	Jambi	1.742.763	1.669.696	3.412.459	50.058,16	68,17
6	Sumatera Selatan	4.068.596	3.927.939	7.996.535	91.592,43	87,31
7	Bengkulu	932.755	895.536	1.828.291	19.919,33	91,78
8	Lampung	4.101.852	3.870.394	7.972.246	34.623,80	230,25
9	Kepulauan Bangka Belitung	714.779	665.983	1.380.762	16.424,06	84,07
10	Kepulauan Riau	1.041.183	990.712	2.031.895	8.201,72	247,74
11	DKI Jakarta	5.136.173	4.998.857	10.135.030	664,01	15.263,37
12	Jawa Barat	23.557.049	22.743.494	46.300.543	35.377,76	1.308,75
13	Jawa Tengah	16.286.404	16.493.428	32.779.832	32.800,69	999,36
14	DI Yogyakarta	1.774.459	1.819.831	3.594.290	3.133,15	1.147,18
15	Jawa Timur	19.021.215	19.508.266	38.529.481	47.799,75	806,06
16	Banten	6.051.954	5.782.133	11.834.087	9.662,92	1.224,69
17	Bali	2.127.969	2.097.415	4.225.384	5.780,06	731,03
18	Nusa Tenggara Barat	2.279.683	2.422.706	4.702.389	18.572,32	253,19
19	Nusa Tenggara Timur	2.516.606	2.554.140	5.070.746	48.718,10	104,08
20	Kalimantan Barat	2.321.739	2.224.700	4.546.439	147.307,00	30,86
21	Kalimantan Tengah	1.233.335	1.135.319	2.368.654	153.564,50	15,42
22	Kalimantan Selatan	1.979.604	1.934.304	3.913.908	38.744,23	101,02
23	Kalimantan Timur	1.842.870	1.665.142	3.508.012	129.066,64	27,18
24	Kalimantan Utara	323.114	284.615	607.729	75.467,70	8,05
25	Sulawesi Utara	1.215.227	1.167.714	2.382.941	13.851,64	172,03
26	Sulawesi Tengah	1.453.503	1.385.787	2.839.290	61.841,29	45,91
27	Sulawesi Selatan	4.098.674	4.297.073	8.395.747	46.717,48	179,71
28	Sulawesi Tenggara	1.212.907	1.205.055	2.417.962	38.067,70	63,52
29	Gorontalo	567.181	567.317	1.134.498	11.257,07	100,78
30	Sulawesi Barat	642.684	641.936	1.284.620	16.787,18	76,52
31	Maluku	861.747	846.443	1.708.190	46.914,03	36,41
32	Maluku Utara	582.295	559.266	1.141.561	31.982,50	35,69
33	Papua Barat	462.254	415.183	877.437	99.671,63	8,80
34	Papua	1.850.900	1.635.532	3.486.432	319.036,05	10,93
Indonesia		**126.921.864**	**125.202.594**	**252.124.458**	**1.913.578,68**	**131,76**

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, Kemendagri, 2015

Lampiran 1.5

ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup			Jumlah Bayi (0 tahun)			Jumlah Batita (0-2 tahun)			Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun)			Jumlah Balita (0 - 4 tahun)		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	52.363	49.447	101.810	51.333	48.474	99.807	160.025	151.152	311.177	214.852	203.103	417.955	266.194	251.569	517.763
2	Sumatera Utara	156.993	150.514	307.507	150.762	144.542	295.304	457.220	435.612	892.832	622.292	589.072	1.211.364	773.059	733.606	1.506.665
3	Sumatera Barat	55.795	53.541	109.336	53.581	51.417	104.998	160.049	151.729	311.778	218.037	204.455	422.492	271.651	255.836	527.487
4	Riau	75.323	70.691	146.014	73.087	68.593	141.680	226.731	213.619	440.350	307.102	290.239	597.341	380.202	358.822	739.024
5	Jambi	36.568	34.656	71.224	35.483	33.628	69.111	108.489	102.850	211.339	146.233	138.643	284.876	181.723	172.263	353.986
6	Sumatera Selatan	85.648	81.225	166.873	82.249	78.002	160.251	251.836	238.636	490.472	339.244	320.705	659.949	421.499	398.699	820.198
7	Bengkulu	19.642	18.602	38.244	18.862	17.865	36.727	56.779	53.638	110.417	77.146	72.703	149.849	96.016	90.559	186.575
8	Lampung	84.754	79.135	163.889	81.390	75.995	157.385	241.020	226.795	467.815	315.583	298.334	613.917	396.960	374.332	771.292
9	Kepulauan Bangka Belitung	15.244	14.316	29.560	14.791	13.891	28.682	44.425	41.915	86.340	59.077	56.044	115.121	73.874	69.929	143.803
10	Kepulauan Riau	26.426	24.435	50.861	25.641	23.710	49.351	77.068	71.772	148.840	99.578	93.510	193.088	125.225	117.212	242.437
11	DKI Jakarta	88.715	88.279	176.994	86.969	86.542	173.511	268.739	257.773	526.512	362.027	336.785	698.812	448.889	423.427	872.316
12	Jawa Barat	451.417	427.730	879.147	438.018	415.034	853.052	1.334.989	1.263.690	2.598.679	1.832.754	1.732.314	3.565.068	2.270.787	2.147.339	4.418.126
13	Jawa Tengah	293.213	271.789	565.002	287.442	266.441	553.883	848.912	796.154	1.645.066	1.120.313	1.061.279	2.181.592	1.407.634	1.327.814	2.735.448
14	DI Yogyakarta	28.055	26.718	54.773	27.502	26.193	53.695	83.457	78.761	162.218	109.600	102.879	212.479	137.101	129.070	266.171
15	Jawa Timur	299.380	286.459	585.839	293.487	280.821	574.308	899.234	857.380	1.756.614	1.240.670	1.179.125	2.419.795	1.534.169	1.459.941	2.994.110
16	Banten	117.759	111.169	228.928	113.085	106.758	219.843	351.852	331.971	683.823	486.582	458.689	945.271	599.675	565.445	1.165.120
17	Bali	36.780	33.612	70.392	36.056	32.950	69.006	112.325	103.746	216.071	151.735	141.533	293.268	187.793	174.481	362.274
18	Nusa Tenggara Barat	53.747	50.459	104.206	51.614	48.457	100.071	150.037	141.589	291.626	202.751	192.322	395.073	254.369	240.771	495.140
19	Nusa Tenggara Timur	64.384	61.368	125.752	61.828	58.934	120.762	190.412	181.424	371.836	267.395	254.216	521.611	329.234	313.144	642.378
20	Kalimantan Barat	47.277	44.743	92.020	45.401	42.967	88.368	140.963	133.368	274.331	193.985	183.829	377.814	239.394	226.791	466.185
21	Kalimantan Tengah	23.781	22.467	46.248	23.312	22.026	45.338	74.380	70.329	144.709	104.392	98.717	203.109	127.715	120.736	248.451
22	Kalimantan Selatan	41.617	39.155	80.772	39.965	37.601	77.566	118.769	111.615	230.384	157.689	148.101	305.790	197.662	185.691	383.353
23	Kalimantan Timur	46.528	43.877	90.405	45.612	43.014	88.626	140.106	131.913	272.019	187.178	175.782	362.960	232.798	218.788	451.586
24	Sulawesi Utara	21.406	20.364	41.770	20.770	19.760	40.530	63.690	60.153	123.843	88.257	82.627	170.884	109.041	102.373	211.414
25	Sulawesi Tengah	30.682	29.155	59.837	29.464	27.999	57.463	92.200	87.263	179.463	130.338	123.047	253.385	159.816	151.036	310.852
26	Sulawesi Selatan	85.726	81.695	167.421	82.323	78.454	160.777	249.213	236.021	485.234	341.228	321.635	662.863	423.584	400.053	823.637
27	Sulawesi Tenggara	30.200	28.717	58.917	29.001	27.578	56.579	87.328	82.628	169.956	120.025	113.087	233.112	149.036	140.655	289.691
28	Gorontalo	11.916	11.300	23.216	11.443	10.852	22.295	35.074	33.111	68.185	48.172	45.512	93.684	59.623	56.356	115.979
29	Sulawesi Barat	15.114	14.382	29.496	14.514	13.812	28.326	45.125	42.706	87.831	63.839	60.305	124.144	78.364	74.108	152.472
30	Maluku	20.610	19.831	40.441	19.792	19.044	38.836	62.128	59.272	121.400	87.105	82.269	169.374	106.905	101.306	208.211
31	Maluku Utara	13.388	12.894	26.282	12.857	12.383	25.240	41.096	39.427	80.523	58.523	55.913	114.436	71.387	68.291	139.678
32	Papua Barat	10.996	10.403	21.399	10.559	9.990	20.549	33.001	31.065	64.066	44.982	42.226	87.208	55.547	52.210	107.757
33	Papua	28.683	26.046	54.729	27.831	25.274	53.105	106.811	96.357	203.168	174.681	156.426	331.107	202.482	181.755	384.237
Indonesia		**2.470.130**	**2.339.174**	**4.809.304**	**2.396.024**	**2.269.001**	**4.665.025**	**7.313.483**	**6.915.434**	**14.228.917**	**9.973.365**	**9.415.426**	**19.388.791**	**12.369.408**	**11.684.408**	**24.053.816**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014

Lampiran 1.6

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDUDUK USIA MUDA, USIA PRODUKTIF DAN USIA NON PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	775.602	734.645	1.510.247	1.511.535	1.526.993	3.038.528	78.489	104.441	182.930
2	Sumatera Utara	2.306.494	2.179.344	4.485.838	4.224.241	4.283.690	8.507.931	223.094	311.074	534.168
3	Sumatera Barat	836.315	786.594	1.622.909	1.573.114	1.609.726	3.182.840	117.831	175.210	293.041
4	Riau	1.082.030	1.020.454	2.102.484	2.111.844	1.979.131	4.090.975	79.801	85.376	165.177
5	Jambi	533.779	505.912	1.039.691	1.150.182	1.099.993	2.250.175	58.802	63.791	122.593
6	Sumatera Selatan	1.240.375	1.172.992	2.413.367	2.676.218	2.576.693	5.252.911	152.003	178.254	330.257
7	Bengkulu	286.507	270.810	557.317	612.670	586.541	1.199.211	33.578	38.185	71.763
8	Lampung	1.204.253	1.136.216	2.340.469	2.702.152	2.536.907	5.239.059	195.447	197.271	392.718
9	Kepulauan Bangka Belitung	207.996	197.953	405.949	483.768	439.873	923.641	23.015	28.157	51.172
10	Kepulauan Riau	306.478	288.180	594.658	713.962	680.799	1.394.761	20.743	21.733	42.476
11	DKI Jakarta	1.241.320	1.176.464	2.417.784	3.746.554	3.656.168	7.402.722	148.299	166.225	314.524
12	Jawa Barat	6.940.762	6.570.519	13.511.281	15.609.903	15.017.695	30.627.598	1.006.384	1.155.280	2.161.664
13	Jawa Tengah	4.419.211	4.179.894	8.599.105	10.815.461	10.998.332	21.813.793	1.051.732	1.315.202	2.366.934
14	DI Yogyakarta	404.987	382.445	787.432	1.218.422	1.244.184	2.462.606	151.050	193.202	344.252
15	Jawa Timur	4.845.323	4.601.517	9.446.840	13.009.267	13.325.632	26.334.899	1.166.625	1.581.117	2.747.742
16	Banten	1.821.822	1.711.438	3.533.260	4.075.955	3.885.769	7.961.724	154.177	184.926	339.103
17	Bali	564.163	527.008	1.091.171	1.434.355	1.418.997	2.853.352	129.451	151.410	280.861
18	Nusa Tenggara Barat	749.330	711.845	1.461.175	1.429.804	1.594.198	3.024.002	100.549	116.663	217.212
19	Nusa Tenggara Timur	970.262	917.155	1.887.417	1.424.414	1.503.635	2.928.049	121.930	133.350	255.280
20	Kalimantan Barat	740.601	703.980	1.444.581	1.499.677	1.436.615	2.936.292	81.461	84.105	165.566
21	Kalimantan Tengah	376.133	354.990	731.123	822.759	744.690	1.567.449	34.443	35.639	70.082
22	Kalimantan Selatan	586.103	550.659	1.136.762	1.333.290	1.300.750	2.634.040	60.211	82.895	143.106
23	Kalimantan Timur	648.085	607.635	1.255.720	1.467.305	1.292.804	2.760.109	50.594	49.318	99.912
24	Sulawesi Utara	342.454	319.621	662.075	814.136	772.378	1.586.514	58.637	75.715	134.352
25	Sulawesi Tengah	484.240	456.708	940.948	918.623	875.558	1.794.181	50.640	53.521	104.161
26	Sulawesi Selatan	1.330.840	1.256.847	2.587.687	2.571.173	2.770.589	5.341.762	196.661	269.637	466.298
27	Sulawesi Tenggara	435.384	409.718	845.102	735.311	744.034	1.479.345	42.212	51.303	93.515
28	Gorontalo	185.535	176.955	362.490	363.699	366.938	730.637	17.947	23.424	41.371
29	Sulawesi Barat	237.534	224.379	461.913	380.965	388.505	769.470	24.185	29.052	53.237
30	Maluku	318.367	297.786	616.153	510.441	511.514	1.021.955	32.939	37.143	70.082
31	Maluku Utara	208.598	196.683	405.281	357.840	344.828	702.668	15.857	17.755	33.612
32	Papua Barat	154.646	144.170	298.816	299.608	263.843	563.451	8.000	7.170	15.170
33	Papua	654.131	566.192	1.220.323	1.176.648	1.053.527	2.230.175	20.121	15.813	35.934
Indonesia		**37.439.660**	**35.337.708**	**72.777.368**	**83.775.296**	**82.831.529**	**166.606.825**	**5.706.908**	**7.033.357**	**12.740.265**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014

Lampiran 1.7

ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN), IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)	Jumlah WUS Imunisasi (15 - 39 tahun)	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Bersalin/Nifas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	1.313.901	1.051.652	111.991	106.901
2	Sumatera Utara	3.602.259	2.794.408	338.258	322.883
3	Sumatera Barat	1.310.498	1.004.139	120.270	114.803
4	Riau	1.750.304	1.412.692	160.615	153.314
5	Jambi	948.218	750.904	78.347	74.786
6	Sumatera Selatan	2.195.170	1.725.601	183.561	175.217
7	Bengkulu	505.313	398.142	42.069	40.157
8	Lampung	2.149.211	1.661.038	180.278	172.084
9	Kepulauan Bangka Belitung	372.008	295.776	32.515	31.037
10	Kepulauan Riau	616.858	524.294	55.947	53.404
11	DKI Jakarta	3.152.821	2.500.032	194.693	185.843
12	Jawa Barat	12.630.355	9.761.161	967.062	923.105
13	Jawa Tengah	8.800.984	6.405.053	621.502	593.252
14	DI Yogyakarta	979.991	711.689	60.250	57.511
15	Jawa Timur	10.646.613	7.731.799	644.423	615.131
16	Banten	3.418.977	2.735.352	251.820	240.374
17	Bali	1.155.318	858.995	77.431	73.911
18	Nusa Tenggara Barat	1.345.188	1.062.297	114.627	109.417
19	Nusa Tenggara Timur	1.250.389	967.345	138.327	132.039
20	Kalimantan Barat	1.221.830	965.071	101.222	96.621
21	Kalimantan Tengah	653.446	524.405	50.873	48.561
22	Kalimantan Selatan	1.112.543	865.982	88.849	84.810
23	Kalimantan Timur	1.138.193	900.562	99.445	94.925
24	Sulawesi Utara	622.050	462.332	45.947	43.859
25	Sulawesi Tengah	747.124	586.663	65.821	62.829
26	Sulawesi Selatan	2.293.737	1.768.809	184.163	175.792
27	Sulawesi Tenggara	639.717	514.257	64.809	61.863
28	Gorontalo	307.811	239.099	25.538	24.377
29	Sulawesi Barat	330.932	264.213	32.446	30.971
30	Maluku	431.923	342.108	44.485	42.463
31	Maluku Utara	297.279	240.789	28.911	27.597
32	Papua Barat	234.066	190.475	23.538	22.468
33	Papua	973.798	800.230	60.202	57.466
Indonesia		**69.148.825**	**53.017.364**	**5.290.235**	**5.049.771**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014

Lampiran 1.8

ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)			Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)			Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	98.496	93.249	191.745	50.946	48.237	99.183	309.893	293.411	603.304
2	Sumatera Utara	311.671	293.264	604.935	156.097	146.768	302.865	921.980	867.444	1.789.424
3	Sumatera Barat	112.631	104.921	217.552	56.583	52.781	109.364	340.996	319.530	660.526
4	Riau	150.950	142.628	293.578	74.017	69.820	143.837	421.172	396.947	818.119
5	Jambi	71.624	67.807	139.431	36.064	34.116	70.180	212.703	201.415	414.118
6	Sumatera Selatan	167.281	157.216	324.497	83.707	78.617	162.324	492.102	465.238	957.340
7	Bengkulu	38.274	35.978	74.252	19.105	17.971	37.076	114.881	108.626	223.507
8	Lampung	153.121	144.076	297.197	78.268	73.470	151.738	487.306	460.739	948.045
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.541	27.216	55.757	14.250	13.604	27.854	80.699	77.165	157.864
10	Kepulauan Riau	44.902	42.515	87.417	20.942	19.811	40.753	107.643	101.210	208.853
11	DKI Jakarta	169.736	157.664	327.400	84.963	79.782	164.745	479.659	450.941	930.600
12	Jawa Barat	924.566	872.018	1.796.584	473.970	447.126	921.096	2.824.034	2.673.704	5.497.738
13	Jawa Tengah	559.289	531.542	1.090.831	292.007	276.886	568.893	1.823.562	1.728.355	3.551.917
14	DI Yogyakarta	52.203	49.322	101.525	26.650	25.276	51.926	160.566	151.455	312.021
15	Jawa Timur	625.575	593.181	1.218.756	326.914	309.823	636.737	2.005.074	1.898.596	3.903.670
16	Banten	238.041	223.862	461.903	122.186	114.712	236.898	743.296	696.092	1.439.388
17	Bali	75.442	70.805	146.247	38.795	36.388	75.183	230.372	215.963	446.335
18	Nusa Tenggara Barat	96.056	91.364	187.420	49.885	47.383	97.268	302.519	287.191	589.710
19	Nusa Tenggara Timur	140.351	132.460	272.811	67.882	63.874	131.756	385.387	362.847	748.234
20	Kalimantan Barat	100.942	96.145	197.087	51.969	49.556	101.525	305.591	290.603	596.194
21	Kalimantan Tengah	51.953	48.997	100.950	26.466	24.929	51.395	151.898	143.223	295.121
22	Kalimantan Selatan	79.072	74.267	153.339	40.985	38.489	79.474	236.537	221.980	458.517
23	Kalimantan Timur	89.786	83.885	173.671	44.476	41.513	85.989	250.942	235.018	485.960
24	Sulawesi Utara	48.915	45.258	94.173	24.403	22.552	46.955	139.797	130.076	269.873
25	Sulawesi Tengah	70.449	66.481	136.930	35.131	33.149	68.280	198.298	186.604	384.902
26	Sulawesi Selatan	176.878	166.500	343.378	92.387	87.010	179.397	558.793	526.229	1.085.022
27	Sulawesi Tenggara	60.763	57.079	117.842	29.942	28.108	58.050	173.755	162.857	336.612
28	Gorontalo	26.887	25.684	52.571	13.052	12.519	25.571	75.308	71.995	147.303
29	Sulawesi Barat	33.487	31.758	65.245	16.873	16.010	32.883	97.176	91.503	188.679
30	Maluku	44.918	41.795	86.713	22.272	20.642	42.914	128.650	119.355	248.005
31	Maluku Utara	30.105	28.527	58.632	14.557	13.727	28.284	82.339	76.944	159.283
32	Papua Barat	22.034	20.686	42.720	10.496	9.841	20.337	59.902	55.533	115.435
33	Papua	88.406	77.986	166.392	45.638	39.779	85.417	283.933	240.838	524.771
Indonesia		**4.983.345**	**4.696.136**	**9.679.481**	**2.541.878**	**2.394.269**	**4.936.147**	**15.186.763**	**14.309.627**	**29.496.390**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014

Lampiran 1.9

JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2000 - 2014

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	2000	12,31	26,43	38,74	14,6	22,38	19,14	91.632,00	73.648,00
2	2001	8,60	29,27	37,87	9,79	24,84	18,41	100.011,00	80.382,00
3	2002	13,32	25,08	38,39	14,46	21,1	18,2	130.499,00	96.512,00
4	2003	12,26	25,08	37,34	13,57	20,23	17,42	138.803,00	105.888,00
5	2004	11,37	24,78	36,15	12,13	20,11	16,66	143.455,00	108.725,00
6	2005	12,40	22,7	35,1	11,68	19,98	15,97	165.565,00	117.365,00
7	2006	14,49	24,81	39,3	13,47	21,81	17,75	174.290,00	130.584,00
8	2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58	187.942,00	146.837,00
9	2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42	204.895,99	161.830,79
10	2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15	222.123,10	179.834,57
11	2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33	232.989,00	192.353,83
12	Maret 2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49	253.015,51	213.394,51
13	September 2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36	263.593,84	223.180,69
14	Maret 2012	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96	267.407,53	229.225,78
15	September 2012	10,51	18,09	28,59	8,6	14,7	11,66	277.381,99	240.441,35
16	Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37	289.042,00	253.273,00
17	September 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47	308.626,00	275.779,00
18	Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318.514,00	286.097,00
19	September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326.853,00	296.681,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.10

GARIS KEMISKINAN, JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2014

No	Provinsi	Maret									September								
		Perkotaan			Perdesaan			Kota+Desa			Kota			Desa			Kota+Desa		
		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Aceh	383.186	161,94	11,76	350.204	719,31	20,52	359.504	881,26	18,05	396.939	158,04	11,36	369.232	679,38	19,19	377.049	837,42	16,98
2	Sumatera Utara	338.234	632,20	9,35	299.145	654,47	9,40	318.398	1.286,67	9,38	349.372	667,47	9,81	312.493	693,13	9,89	330.663	1.360,60	9,85
3	Sumatera Barat	374.968	108,08	5,43	333.511	271,12	8,68	349.656	379,20	7,41	390.862	108,53	5,41	349.824	246,21	7,84	365.827	354,74	6,89
4	Riau	375.286	166,36	6,90	357.009	333,52	8,92	364.176	499,89	8,12	386.606	159,53	6,53	374.466	338,75	8,93	379.223	498,28	7,99
5	Jambi	379.183	100,12	9,85	291.534	163,68	7,07	318.262	263,80	7,92	390.931	109,07	10,67	302.162	172,68	7,39	329.181	281,75	8,39
6	Sumatera Selatan	336.929	367,12	12,93	277.509	733,71	14,46	298.824	1.100,83	13,91	346.238	370,86	12,96	285.791	714,94	13,99	307.488	1.085,80	13,62
7	Bengkulu	362.614	104,54	18,22	325.261	216,41	17,14	336.930	320,95	17,48	378.881	99,59	17,19	346.395	216,91	17,04	356.554	316,50	17,09
8	Lampung	336.927	230,63	11,08	295.931	912,28	15,41	306.600	1.142,92	14,28	350.024	224,21	10,68	307.818	919,73	15,46	318.822	1.143,94	14,21
9	Kepulauan Bangka Belitung	439.377	22,33	3,39	448.817	49,31	7,27	444.171	71,64	5,36	458.055	20,27	3,04	481.226	46,96	6,84	469.814	67,23	4,97
10	Kepulauan Riau	421.733	97,38	6,09	385.071	30,42	9,86	415.800	127,80	6,70	431.127	91,27	5,61	399.063	32,90	10,54	425.967	124,17	6,40
11	DKI Jakarta	447.797	393,98	3,92	-	-	-	447.797	393,98	3,92	459.560	412,79	4,09	-	-	-	459.560	412,79	4,09
12	Jawa Barat	288.742	2.578,36	8,47	277.645	1.748,71	11,35	285.013	4.327,07	9,44	294.700	2.554,06	8,32	285.076	1.684,90	10,88	291.474	4.238,96	9,18
13	Jawa Tengah	279.036	1.945,29	12,68	267.991	2.891,17	15,96	273.056	4.836,45	14,46	286.014	1.771,53	11,50	277.802	2.790,29	15,35	281.570	4.561,82	13,58
14	DI Yogyakarta	327.273	333,03	13,81	286.137	211,84	17,36	313.452	544,87	15,00	333.561	324,43	13,36	296.429	208,15	16,88	321.056	532,58	14,55
15	Jawa Timur	287.582	1.535,81	8,35	278.429	3.250,98	16,13	282.796	4.786,79	12,42	293.391	1.531,89	8,30	286.798	3.216,53	15,92	289.945	4.748,42	12,28
16	Banten	315.239	375,69	4,73	281.925	247,14	6,67	304.636	622,84	5,35	324.902	381,18	4,74	296.241	268,01	7,18	315.819	649,19	5,51
17	Bali	310.321	99,90	4,01	271.646	85,30	5,34	295.210	185,20	4,53	316.235	109,20	4,35	279.140	86,76	5,39	301.747	195,96	4,76
18	Nusa Tenggara Barat	307.147	370,18	18,54	274.136	450,64	16,31	287.987	820,82	17,25	315.470	385,31	19,17	285.205	431,31	15,52	297.907	816,62	17,05
19	Nusa Tenggara Timur	337.367	100,34	10,23	248.606	894,33	22,15	265.955	994,68	19,82	340.459	105,70	10,68	251.040	886,18	21,78	268.536	991,88	19,60
20	Kalimantan Barat	291.533	82,05	5,76	279.049	319,46	9,76	282.835	401,51	8,54	307.789	78,53	5,47	294.044	303,38	9,20	298.212	381,91	8,07
21	Kalimantan Tengah	307.382	40,78	4,98	323.556	105,55	6,57	318.094	146,32	6,03	316.683	39,45	4,75	338.130	109,37	6,74	330.869	148,82	6,07
22	Kalimantan Selatan	322.006	62,51	3,79	298.656	120,37	5,33	308.512	182,88	4,68	336.782	61,21	3,68	313.954	128,28	5,64	323.594	189,49	4,81
23	Kalimantan Timur	448.220	97,89	4,01	404.554	155,71	10,33	431.560	253,60	6,42	459.004	98,48	3,98	420.427	154,20	10,06	444.248	252,68	6,31
24	Sulawesi Utara	265.093	59,18	5,51	257.845	149,05	11,41	261.117	208,23	8,75	269.212	60,08	5,57	264.321	137,48	10,47	266.528	197,56	8,26
25	Sulawesi Tengah	336.900	67,08	9,77	303.975	325,57	15,27	311.993	392,65	13,93	349.978	71,56	10,35	321.009	315,41	14,66	328.063	387,06	13,61
26	Sulawesi Selatan	240.276	162,49	5,22	211.271	701,81	13,25	222.003	864,30	10,28	246.416	154,40	4,93	219.109	651,95	12,25	229.222	806,35	9,54
27	Sulawesi Tenggara	241.921	48,25	7,06	226.220	294,01	16,78	230.627	342,26	14,05	254.015	45,79	6,62	238.745	268,30	15,17	243.036	314,09	12,77
28	Gorontalo	246.633	25,21	6,60	241.936	168,96	23,10	243.547	194,17	17,44	250.157	23,88	6,24	246.290	171,22	23,21	247.611	195,10	17,41
29	Sulawesi Barat	235.934	26,31	9,16	233.215	127,58	13,19	233.838	153,89	12,27	245.959	29,87	9,99	246.695	124,82	12,67	246.524	154,69	12,05
30	Maluku	362.783	49,83	7,80	345.536	266,28	26,28	352.208	316,11	19,13	369.738	47,58	7,35	355.478	259,44	25,49	361.022	307,02	18,44
31	Maluku Utara	321.231	12,19	3,95	286.242	70,45	8,56	295.787	82,64	7,30	339.561	11,17	3,58	307.374	73,62	8,85	316.160	84,79	7,41
32	Papua Barat	416.158	14,78	5,86	389.812	214,65	36,16	397.662	229,43	27,13	440.241	14,06	5,52	423.701	211,40	35,01	428.608	225,46	26,26
33	Papua	404.944	35,37	4,47	338.206	889,04	38,92	355.380	924,41	30,05	408.419	35,61	4,46	340.846	828,50	35,87	358.204	864,11	27,80
Indonesia		**318.514**	**10.507,20**	**8,34**	**286.097**	**17.772,81**	**14,17**	**302.735**	**28.280,01**	**11,25**	**326.853**	**10.356,69**	**8,16**	**296.681**	**17.371,09**	**13,76**	**312.328**	**27.727,78**	**10,96**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.11

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Maret						September					
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	1,82	3,34	2,91	0,43	0,83	0,72	1,71	3,70	3,14	0,38	1,05	0,86
2	Sumatera Utara	1,24	1,69	1,47	0,30	0,44	0,37	1,56	1,86	1,71	0,39	0,51	0,45
3	Sumatera Barat	0,65	1,12	0,94	0,13	0,28	0,22	0,54	0,89	0,75	0,10	0,18	0,15
4	Riau	0,89	1,09	1,01	0,18	0,23	0,21	0,73	1,50	1,20	0,11	0,40	0,29
5	Jambi	1,35	0,91	1,05	0,32	0,19	0,23	1,19	1,10	1,12	0,27	0,22	0,23
6	Sumatera Selatan	2,11	2,33	2,25	0,55	0,61	0,59	2,34	2,44	2,41	0,62	0,62	0,62
7	Bengkulu	2,90	2,72	2,78	0,74	0,69	0,70	2,69	2,92	2,85	0,75	0,75	0,75
8	Lampung	1,85	2,36	2,23	0,44	0,56	0,53	1,90	2,43	2,30	0,51	0,58	0,56
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,65	0,81	0,73	0,16	0,15	0,16	0,48	0,72	0,60	0,10	0,13	0,12
10	Kepulauan Riau	1,00	0,61	0,94	0,31	0,09	0,27	0,67	1,09	0,74	0,17	0,24	0,18
11	DKI Jakarta	0,39	0,00	0,39	0,07	0,00	0,07	0,60	0,00	0,60	0,13	0,00	0,13
12	Jawa Barat	1,40	1,78	1,52	0,37	0,41	0,38	1,31	1,55	1,39	0,32	0,35	0,33
13	Jawa Tengah	1,85	2,59	2,25	0,45	0,66	0,57	1,69	2,42	2,09	0,42	0,58	0,51
14	DI Yogyakarta	2,22	2,11	2,19	0,53	0,40	0,48	2,03	2,98	2,35	0,52	0,79	0,61
15	Jawa Timur	1,16	2,49	1,85	0,27	0,60	0,44	1,24	2,42	1,86	0,31	0,59	0,45
16	Banten	0,76	0,98	0,83	0,18	0,19	0,19	0,65	1,08	0,79	0,13	0,27	0,18
17	Bali	0,45	0,38	0,42	0,08	0,05	0,07	0,68	1,15	0,86	0,18	0,37	0,26
18	Nusa Tenggara Barat	2,73	2,44	2,56	0,61	0,61	0,61	3,90	2,22	2,92	1,10	0,45	0,72
19	Nusa Tenggara Timur	1,82	3,71	3,34	0,56	0,89	0,83	1,66	3,64	3,25	0,34	0,90	0,79
20	Kalimantan Barat	0,83	1,05	0,98	0,16	0,19	0,18	0,85	1,44	1,26	0,19	0,42	0,35
21	Kalimantan Tengah	0,80	0,72	0,75	0,19	0,15	0,17	0,44	1,24	0,97	0,07	0,34	0,25
22	Kalimantan selatan	0,68	0,59	0,63	0,18	0,12	0,14	0,41	0,83	0,65	0,08	0,20	0,15
23	Kalimantan Timur	0,70	1,68	1,08	0,19	0,43	0,28	0,55	1,19	0,79	0,13	0,25	0,18
24	Sulawesi Utara	0,74	1,59	1,21	0,17	0,33	0,26	0,98	1,53	1,28	0,24	0,34	0,30
25	Sulawesi Tengah	1,21	2,49	2,18	0,23	0,61	0,52	2,18	2,09	2,11	0,65	0,52	0,55
26	Sulawesi Selatan	0,80	2,01	1,56	0,20	0,47	0,37	0,75	1,80	1,41	0,19	0,40	0,32
27	Sulawesi Tenggara	0,86	2,43	1,99	0,22	0,54	0,45	0,96	2,53	2,09	0,21	0,64	0,52
28	Gorontalo	0,93	4,52	3,29	0,21	1,26	0,90	1,09	4,19	3,13	0,23	1,14	0,83
29	Sulawesi Barat	0,98	1,58	1,44	0,16	0,28	0,25	2,21	1,86	1,94	0,76	0,44	0,51
30	Maluku	1,53	5,23	3,80	0,52	1,49	1,12	1,14	5,99	4,11	0,26	2,08	1,37
31	Maluku Utara	0,44	1,35	1,10	0,07	0,33	0,26	0,40	1,44	1,16	0,07	0,31	0,24
32	Papua Barat	1,30	8,28	6,20	0,40	2,75	2,05	1,00	8,00	5,92	0,29	2,54	1,88
33	Papua	0,73	8,96	6,84	0,17	3,04	2,30	0,48	8,48	6,42	0,10	2,91	2,18
Indonesia		**1,25**	**2,26**	**1,75**	**0,31**	**0,57**	**0,44**	**1,25**	**2,25**	**1,75**	**0,31**	**0,57**	**0,44**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Catatan :

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Lampiran 1.12

INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2014

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	0,30	0,33	0,32	0,34	0,34
2	Sumatera Utara	0,35	0,35	0,33	0,35	0,31
3	Sumatera Barat	0,33	0,35	0,36	0,36	0,33
4	Riau	0,33	0,36	0,40	0,37	0,38
5	Jambi	0,30	0,34	0,34	0,35	0,34
6	Sumatera Selatan	0,34	0,34	0,40	0,38	0,38
7	Bengkulu	0,37	0,36	0,35	0,39	0,36
8	Lampung	0,36	0,37	0,36	0,36	0,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,30	0,30	0,29	0,31	0,30
10	Kepulauan Riau	0,29	0,32	0,35	0,36	0,44
11	DKI Jakarta	0,36	0,44	0,42	0,43	0,44
12	Jawa Barat	0,36	0,41	0,41	0,41	0,40
13	Jawa Tengah	0,34	0,38	0,38	0,39	0,39
14	DI Yogyakarta	0,41	0,40	0,43	0,44	0,43
15	Jawa Timur	0,34	0,37	0,36	0,36	0,40
16	Banten	0,42	0,40	0,39	0,40	0,42
17	Bali	0,37	0,41	0,43	0,40	0,44
18	Nusa Tenggara Barat	0,40	0,36	0,35	0,36	0,39
19	Nusa Tenggara Timur	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35
20	Kalimantan Barat	0,37	0,40	0,38	0,40	0,40
21	Kalimantan Tengah	0,30	0,34	0,33	0,35	0,36
22	Kalimantan Selatan	0,37	0,37	0,38	0,36	0,33
23	Kalimantan Timur	0,37	0,38	0,36	0,37	0,36
24	Sulawesi Utara	0,37	0,39	0,43	0,42	0,44
25	Sulawesi Tengah	0,37	0,38	0,40	0,41	0,35
26	Sulawesi Selatan	0,40	0,41	0,41	0,43	0,45
27	Sulawesi Tenggara	0,42	0,41	0,40	0,43	0,40
28	Gorontalo	0,43	0,46	0,44	0,44	0,45
29	Sulawesi Barat	0,36	0,34	0,31	0,35	0,38
30	Maluku	0,33	0,41	0,38	0,37	0,33
31	Maluku Utara	0,34	0,33	0,34	0,32	0,32
32	Papua Barat	0,38	0,40	0,43	0,43	0,41
33	Papua	0,41	0,42	0,44	0,44	0,46
Indonesia		**0,38**	**0,41**	**0,41**	**0,41**	**0,41**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Keterangan : Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan, nilai koefisien adalah 0 - 1

Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata dan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang

Lampiran 1.13

PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2014

No	KELOMPOK BARANG	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*
I	**Makanan**	
1	Padi-padian	7,76
2	Umbi-umbian	0,46
3	Ikan	4,10
4	Daging	1,93
5	Telur dan Susu	3,08
6	Sayur-sayuran	3,87
7	Kacang-kacangan	1,33
8	Buah-buahan	2,48
9	Minyak dan Lemak	1,64
10	Bahan minuman	1,73
11	Bumbu-bumbuan	0,95
12	Konsumsi lainnya	1,01
13	Makanan dan Minuman Jadi	13,37
14	Tembakau dan sirih	6,33
	Jumlah Makanan	**50,04**
II	**Bukan Makanan**	
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,75
2	Barang dan jasa	12,35
3	Pendidikan	3,92
4	Kesehatan	3,29
5	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	1,91
6	Barang-barang tahan lama	4,45
7	Pajak dan suransi	1,78
8	Keperluan pesta dan upacara	1,51
	Jumlah Bukan Makanan	**49,96**
	Jumlah Makanan + Bukan Makanan	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Keterangan : Susenas, Maret 2014

Lampiran 1.14

PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2014

No	Provinsi	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	Aneka barang dan jasa	Pendidikan	Kesehatan	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	Barang-barang tahan lama	Pajak, pungutan dan asuransi	Keperluan pesta dan upacara	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(5)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	41,08	29,32	7,96	6,98	4,71	4,02	3,13	2,80	100
2	Sumatera Utara	41,19	29,46	8,10	6,06	5,75	3,62	3,56	2,26	100
3	Sumatera Barat	38,46	26,68	9,52	7,01	4,05	7,45	2,99	3,84	100
4	R i a u	43,12	27,12	8,90	6,60	4,09	3,82	4,20	2,15	100
5	J a m b i	43,00	27,44	5,64	5,04	3,58	7,99	3,17	4,14	100
6	Sumatera Selatan	40,29	26,71	8,72	5,76	5,72	5,90	2,93	3,97	100
7	Bengkulu	39,65	26,68	8,07	4,16	3,61	12,32	3,18	2,33	100
8	Lampung	41,23	27,05	9,49	5,22	4,30	6,73	3,71	2,27	100
9	Kepulauan Bangka Belitung	47,10	24,36	5,87	6,02	4,79	6,94	3,97	0,95	100
10	Kepulauan Riau	46,24	26,52	5,00	4,53	4,13	9,45	2,59	1,54	100
11	DKI Jakarta	47,85	22,11	6,21	5,15	3,67	7,60	3,93	3,48	100
12	Jawa Barat	44,20	23,96	8,66	5,68	3,08	7,95	3,60	2,87	100
13	Jawa Tengah	33,95	23,75	8,31	10,45	3,32	12,83	3,62	3,77	100
14	DI Yogyakarta	34,87	26,46	12,84	7,15	3,27	8,61	3,73	3,07	100
15	Jawa Timur	36,00	23,84	7,82	9,31	2,86	13,85	3,56	2,76	100
16	Banten	41,96	26,48	8,32	4,82	3,04	8,42	5,15	1,81	100
17	B a l i	41,94	20,45	7,64	5,74	3,32	8,94	4,87	7,10	100
18	Nusa Tenggara Barat	45,40	23,18	8,68	5,69	3,86	9,27	2,39	1,53	100
19	Nusa Tenggara Timur	45,69	23,66	8,94	4,37	7,85	5,64	2,15	1,70	100
20	Kalimantan Barat	42,75	25,66	7,47	5,58	5,65	8,55	2,62	1,72	100
21	Kalimantan Tengah	44,90	24,91	4,09	6,27	3,52	9,77	2,28	4,26	100
22	Kalimantan Selatan	42,04	22,01	5,56	6,93	4,06	13,53	2,89	2,98	100
23	Kalimantan Timur	49,59	25,11	6,20	6,19	3,34	4,04	3,64	1,89	100
24	Sulawesi Utara	41,54	23,58	6,58	5,50	10,42	4,17	3,70	4,51	100
25	Sulawesi Tengah	42,55	24,57	6,80	7,21	4,68	7,49	2,36	4,34	100
26	Sulawesi Selatan	36,26	26,11	8,26	5,89	4,58	12,18	3,46	3,26	100
27	Sulawesi Tenggara	42,72	23,88	6,21	3,82	4,06	14,02	2,90	2,39	100
28	Gorontalo	40,67	29,22	6,99	6,30	3,89	6,21	2,36	4,36	100
29	Sulawesi Barat	38,31	22,73	5,47	7,32	5,10	15,84	2,89	2,34	100
30	Maluku	49,09	27,32	5,69	2,47	7,59	4,96	0,99	1,89	100
31	Maluku Utara	59,71	24,02	4,79	2,14	5,01	2,24	1,02	1,07	100
32	Papua Barat	48,06	28,16	2,84	3,42	4,50	5,67	1,85	5,50	100
33	Papua	35,68	36,28	6,80	3,05	7,80	4,90	2,05	3,44	100
Indonesia		**41,54**	**24,71**	**7,84**	**6,58**	**3,82**	**8,92**	**3,57**	**3,02**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.15

PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2014

No	Provinsi	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/Paket C	PT	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	1,86	3,53	4,98	8,39	14,07	9,95	9,02
2	Sumatera Utara	1,85	2,75	2,98	5,75	9,03	8,68	6,23
3	Sumatera Barat	1,48	3,43	4,45	6,19	9,89	7,69	6,50
4	R i a u	1,53	4,13	3,83	5,36	9,35	10,84	6,56
5	J a m b i	0,77	2,29	1,79	5,10	9,43	8,44	5,08
6	Sumatera Selatan	0,79	1,82	2,17	4,34	10,78	6,16	4,96
7	Bengkulu	0,00	1,66	1,47	2,88	6,15	5,31	3,47
8	Lampung	0,70	2,08	2,45	4,37	9,66	5,85	4,79
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,78	1,89	3,71	6,06	8,44	6,66	5,14
10	Kepulauan Riau	0,90	1,74	5,36	5,90	9,20	3,11	6,69
11	DKI Jakarta	24,75	12,28	9,34	9,56	8,70	5,31	8,47
12	Jawa Barat	3,26	3,35	4,91	12,08	14,27	4,78	8,45
13	Jawa Tengah	2,47	2,99	4,13	7,77	9,67	3,42	5,68
14	DI Yogyakarta	0,00	0,60	1,38	2,26	5,65	4,48	3,33
15	Jawa Timur	0,40	1,07	2,35	5,73	8,73	3,74	4,19
16	Banten	2,24	4,12	7,19	11,99	12,35	4,85	9,07
17	B a l i	0,70	0,42	0,60	1,78	3,09	2,89	1,90
18	Nusa Tenggara Barat	1,91	1,81	3,86	6,04	12,45	6,69	5,75
19	Nusa Tenggara Timur	0,49	0,97	1,65	2,92	7,67	8,49	3,26
20	Kalimantan Barat	0,91	2,19	2,31	4,31	8,56	5,78	4,04
21	Kalimantan Tengah	1,35	1,26	1,83	3,17	6,22	4,37	3,24
22	Kalimantan Selatan	0,00	1,58	1,87	4,93	7,60	4,11	3,80
23	Kalimantan Timur	0,91	3,30	4,56	7,48	10,95	5,87	7,38
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	0,00	3,74	3,47	5,55	11,71	10,32	7,54
26	Sulawesi Tengah	0,51	1,22	2,33	2,94	7,05	5,70	3,68
27	Sulawesi Selatan	0,48	1,28	2,17	4,50	9,08	9,58	5,08
28	Sulawesi Tenggara	1,23	0,76	1,80	2,64	8,94	7,01	4,43
29	Gorontalo	0,00	1,59	1,92	5,48	10,36	7,19	4,18
30	Sulawesi Barat	1,30	2,69	2,07	0,84	2,71	1,99	2,08
31	Maluku	0,94	2,01	3,50	3,77	19,89	16,35	10,51
32	Maluku Utara	0,00	2,28	1,60	3,31	10,26	8,57	5,29
33	Papua Barat	0,00	1,19	1,25	3,56	8,05	11,36	5,02
34	Papua	0,90	1,59	2,19	3,67	8,44	9,88	3,44
Indonesia		**1,42**	**2,40**	**3,60**	**7,15**	**10,17**	**5,78**	**5,94**

Lampiran 1.16

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2014

No	Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	11,25	11,11	11,18	8,98	8,52	8,74	9,64	9,26	9,45
2	Sumatera Utara	10,63	10,33	10,47	8,64	8,09	8,36	9,65	9,23	9,44
3	Sumatera Barat	10,50	10,68	10,59	7,72	7,87	7,80	8,86	9,01	8,94
4	R i a u	10,73	10,67	10,70	8,10	7,66	7,89	9,13	8,86	9,00
5	J a m b i	10,59	10,02	10,30	8,11	7,26	7,69	8,86	8,12	8,50
6	Sumatera Selatan	10,34	9,91	10,13	7,58	6,98	7,29	8,56	8,06	8,31
7	Bengkulu	11,35	11,16	11,26	8,06	7,41	7,74	9,07	8,61	8,85
8	Lampung	10,08	9,71	9,90	7,64	7,10	7,38	8,27	7,81	8,05
9	Kepulauan Bangka Belitung	9,24	8,98	9,11	6,82	6,45	6,64	8,01	7,72	7,87
10	Kepulauan Riau	10,67	10,42	10,55	7,02	6,38	6,72	10,05	9,78	9,92
11	DKI Jakarta	11,36	10,61	10,98			.	11,36	10,61	10,98
12	Jawa Barat	9,61	8,87	9,24	6,98	6,22	6,60	8,76	8,01	8,39
13	Jawa Tengah	9,11	8,31	8,70	7,12	6,27	6,68	8,04	7,21	7,62
14	DI Yogyakarta	11,22	10,31	10,76	8,02	7,04	7,51	10,17	9,19	9,67
15	Jawa Timur	9,60	8,74	9,16	7,01	5,99	6,48	8,26	7,30	7,77
16	Banten	10,25	9,36	9,81	7,01	6,03	6,53	9,25	8,34	8,80
17	B a l i	10,63	9,28	9,96	8,02	6,26	7,13	9,64	8,11	8,88
18	Nusa Tenggara Barat	9,30	8,0	8,61	7,41	6,25	6,80	8,22	7,0	7,58
19	Nusa Tenggara Timur	10,83	10,40	10,61	6,75	6,43	6,59	7,64	7,27	7,45
20	Kalimantan Barat	9,82	9,27	9,55	6,93	6,13	6,54	7,81	7,13	7,47
21	Kalimantan Tengah	10,44	9,89	10,17	7,87	7,25	7,58	8,74	8,19	8,48
22	Kalimantan Selatan	10,08	9,38	9,73	7,48	6,67	7,08	8,59	7,82	8,21
23	Kalimantan Timur	10,75	10,18	10,48	8,52	7,66	8,13	9,92	9,29	9,62
24	Kalimantan Utara	9,83	9,33	9,59	7,94	7,18	7,59	8,97	8,39	8,70
25	Sulawesi Utara	10,23	10,39	10,31	8,32	8,41	8,36	9,19	9,34	9,26
26	Sulawesi Tengah	11,29	10,73	11,01	7,72	7,43	7,58	8,61	8,28	8,45
27	Sulawesi Selatan	10,70	10,39	10,54	7,15	6,80	6,97	8,51	8,15	8,32
28	Sulawesi Tenggara	11,39	10,83	11,11	8,21	7,51	7,86	9,15	8,51	8,83
29	Gorontalo	9,47	9,97	9,72	6,11	7,04	6,57	7,28	8,10	7,69
30	Sulawesi Barat	9,31	9,39	9,35	7,24	6,92	7,08	7,66	7,44	7,55
31	Maluku	11,26	11,24	11,25	8,73	8,24	8,49	9,76	9,48	9,62
32	Maluku Utara	11,35	10,54	10,95	8,50	7,70	8,11	9,32	8,53	8,93
33	Papua Barat	11,0	11,0	11,00	9,06	8,18	8,65	9,82	9,27	9,56
34	Papua	10,80	10,13	10,50	5,61	3,76	4,72	7,11	5,44	6,32
Indonesia		**10,05**	**9,36**	**9,70**	**7,4**	**6,66**	**7,03**	**8,76**	**8,04**	**8,40**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.17

PERSENTASE IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI (PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN) PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2014

No	Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki+Perempuan					
		Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/Paket C	PT	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/Paket C	PT	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/Paket C	PT
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*11*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Aceh	0,57	3,91	13,48	20,20	47,98	13,87	1,69	6,20	15,92	20,40	35,76	20,04	1,13	5,06	14,71	20,30	41,82	16,98
2	Sumatera Utara	0,64	4,26	16,19	24,21	44,61	10,08	1,26	6,79	18,09	23,66	38,98	11,22	0,96	5,54	17,16	23,93	41,75	10,66
3	Sumatera Barat	0,63	9,59	16,41	21,60	39,67	12,09	1,62	10,52	15,31	18,83	36,54	17,18	1,14	10,06	15,85	20,19	38,08	14,68
4	R i a u	0,62	4,30	17,46	21,11	45,77	10,74	1,87	6,67	18,53	20,07	37,54	15,33	1,22	5,45	17,98	20,61	41,80	12,95
5	J a m b i	1,12	6,51	15,91	20,78	43,13	12,55	2,84	9,20	16,97	20,10	35,87	15,02	1,97	7,83	16,43	20,45	39,55	13,77
6	Sumatera Selatan	1,07	9,26	17,29	19,44	40,16	12,79	2,46	11,64	18,22	20,01	33,24	14,43	1,76	10,45	17,75	19,73	36,70	13,61
7	Bengkulu	0,45	4,93	14,54	20,37	40,75	18,97	1,64	6,68	14,78	20,77	34,91	21,22	1,05	5,81	14,66	20,57	37,82	20,10
8	Lampung	1,14	9,95	18,48	22,18	36,43	11,82	3,74	11,35	19,61	21,02	31,46	12,81	2,44	10,65	19,04	21,60	33,96	12,31
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,58	10,93	21,60	21,51	35,28	9,10	3,73	14,53	21,56	21,01	28,92	10,24	2,62	12,68	21,58	21,27	32,19	9,66
10	Kepulauan Riau	1,21	5,76	13,95	17,71	49,55	11,82	2,26	6,06	15,39	18,66	47,01	10,61	1,73	5,91	14,66	18,18	48,30	11,23
11	DKI Jakarta	0,60	3,95	13,56	20,29	45,0	16,58	1,82	6,05	17,49	21,68	36,51	16,45	1,21	5,0	15,52	20,99	40,76	16,52
12	Jawa Barat	1,70	8,62	24,39	21,47	34,27	9,56	4,38	10,82	26,82	22,50	26,76	8,72	3,02	9,71	25,59	21,98	30,56	9,15
13	Jawa Tengah	2,69	10,87	25,28	23,13	29,48	8,55	7,97	13,32	23,91	21,81	24,68	8,30	5,39	12,13	24,58	22,46	27,02	8,42
14	DI Yogyakarta	1,67	6,30	13,53	18,98	43,99	15,53	5,86	8,43	14,36	17,24	37,67	16,44	3,78	7,38	13,95	18,10	40,80	15,99
15	Jawa Timur	2,17	10,07	22,20	21,08	34,75	9,73	7,20	12,51	23,48	20,13	26,98	9,70	4,74	11,31	22,85	20,60	30,79	9,71
16	Banten	1,58	8,19	17,73	20,39	39,53	12,59	5,09	9,94	19,26	23,53	31,47	10,70	3,31	9,06	18,48	21,94	35,56	11,66
17	B a l i	2,16	7,24	16,94	16,82	40,82	16,01	9,16	9,14	18,99	17,67	32,03	13,02	5,63	8,19	17,96	17,24	36,46	14,53
18	Nusa Tenggara Barat	5,93	12,73	20,88	17,24	31,95	11,27	12,57	13,75	23,06	17,90	24,18	8,53	9,44	13,27	22,03	17,59	27,84	9,82
19	Nusa Tenggara Timur	1,58	7,09	16,02	19,99	39,83	15,49	3,18	8,26	17,87	19,32	36,01	15,37	2,39	7,68	16,95	19,65	37,91	15,43
20	Kalimantan Barat	2,76	10,52	17,62	19,30	37,17	12,63	6,85	10,77	17,55	20,17	31,40	13,26	4,82	10,65	17,59	19,74	34,26	12,95
21	Kalimantan Tengah	0,92	7,63	20,23	20,56	37,41	13,25	2,75	10,16	21,45	21,33	31,62	12,69	1,80	8,85	20,82	20,93	34,61	12,98
22	Kalimantan Selatan	0,79	10,20	21,14	20,02	35,32	12,53	2,80	13,42	21,71	21,82	28,81	11,45	1,79	11,80	21,42	20,91	32,08	11,99
23	Kalimantan Timur	0,56	4,79	15,65	22,21	44,86	11,93	1,82	8,28	18,21	23,39	37,29	11,01	1,16	6,45	16,86	22,77	41,27	11,50
25	Sulawesi Utara	0,59	10,36	14,50	20,51	42,18	11,86	0,49	10,33	14,20	20,96	41,27	12,74	0,54	10,35	14,35	20,74	41,73	12,30
26	Sulawesi Tengah	0,63	6,24	16,14	21,87	39,44	15,69	1,37	7,12	18,33	20,51	36,29	16,39	1,0	6,68	17,24	21,19	37,85	16,04
27	Sulawesi Selatan	2,08	8,32	17,91	18,71	35,94	17,04	3,98	8,56	20,28	19,37	31,12	16,69	3,06	8,44	19,14	19,05	33,45	16,86
28	Sulawesi Tenggara	1,25	5,70	12,43	19,69	43,29	17,64	3,34	6,98	13,41	20,51	37,53	18,23	2,31	6,35	12,93	20,10	40,37	17,94
29	Gorontalo	0,82	19,0	20,92	17,69	32,12	9,45	0,95	16,41	19,29	18,24	31,55	13,57	0,89	17,67	20,09	17,97	31,83	11,56
30	Sulawesi Barat	2,28	15,25	17,88	19,25	29,84	15,51	4,79	15,36	18,95	20,41	25,90	14,58	3,57	15,31	18,43	19,84	27,82	15,03
31	Maluku	0,33	3,68	11,98	16,76	51,86	15,40	0,70	4,47	12,02	18,15	47,50	17,16	0,52	4,08	12,0	17,46	49,66	16,29
32	Maluku Utara	0,41	4,39	12,77	19,30	47,26	15,87	0,92	8,69	14,91	20,37	39,39	15,71	0,66	6,54	13,84	19,84	43,33	15,79
33	Papua Barat	0,37	3,77	14,14	21,30	44,61	15,81	1,31	5,98	15,29	23,46	38,30	15,66	0,81	4,80	14,68	22,31	41,66	15,74
34	Papua	0,94	3,10	13,22	19,73	48,12	14,89	2,49	5,66	15,94	21,97	38,16	15,78	1,65	4,27	14,46	20,76	43,56	15,30
Indonesia		**1,66**	**8,22**	**20,21**	**21,09**	**37,41**	**11,41**	**4,81**	**10,36**	**21,71**	**21,33**	**30,49**	**11,30**	**3,24**	**9,29**	**20,96**	**21,21**	**33,94**	**11,36**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.18

ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2011 - 2014

No	Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	97,62	97,88	98,32	98,41	93,69	94,25	95,06	96,45	95,63	96,04	96,66	97,42
2	Sumatera Utara	98,19	98,57	98,86	99,28	95,42	96,08	96,79	97,88	96,78	97,31	97,81	98,57
3	Sumatera Barat	97,60	97,80	98,41	98,94	94,69	95,48	96,40	97,95	96,12	96,62	97,38	98,44
4	R i a u	98,43	98,66	98,78	99,28	96,31	96,59	96,94	98,18	97,40	97,65	97,88	98,75
5	J a m b i	97,58	98,0	98,27	98,76	93,06	93,48	95,10	96,73	95,37	95,79	96,72	97,77
6	Sumatera Selatan	98,02	98,33	98,43	98,96	94,97	95,24	96,01	97,29	96,52	96,80	97,24	98,14
7	Bengkulu	97,54	97,81	98,52	99,13	92,39	93,24	94,37	95,85	95,02	95,56	96,48	97,52
8	Lampung	97,28	97,21	97,84	97,38	92,17	92,44	93,66	95,66	94,80	94,89	95,81	96,54
9	Kepulauan Bangka Belitung	97,37	97,80	97,77	98,65	93,36	93,40	94,94	96,47	95,46	95,70	96,41	97,60
10	Kepulauan Riau	98,11	98,38	98,97	99,26	96,47	96,79	96,82	98,14	97,31	97,60	97,91	98,71
11	DKI Jakarta	99,39	99,63	99,65	99,90	98,22	98,37	98,62	99,17	98,81	99,0	99,14	99,54
12	Jawa Barat	97,46	97,69	98,28	98,92	93,71	94,16	95,09	96,97	95,61	95,95	96,70	97,96
13	Jawa Tengah	94,09	94,20	95,33	95,64	85,58	85,83	87,38	90,42	89,75	89,93	91,27	92,98
14	DI Yogyakarta	95,91	95,77	96,74	96,99	86,38	88,42	89,06	91,98	91,04	92,0	92,82	94,44
15	Jawa Timur	92,77	93,26	94,42	93,89	83,08	84,62	86,07	88,96	87,80	88,82	90,14	91,36
16	Banten	97,74	98,30	98,34	98,51	93,86	94,19	94,89	95,92	95,84	96,28	96,64	97,24
17	B a l i	94,41	95,16	95,93	96,28	83,0	84,65	85,73	88,85	88,69	89,92	90,84	92,56
18	Nusa Tenggara Barat	88,14	88,31	89,22	90,56	77,73	78,12	80,60	83,76	82,65	82,92	84,67	86,96
19	Nusa Tenggara Timur	89,98	90,58	92,13	92,39	85,83	87,05	88,69	90,04	87,85	88,77	90,36	91,18
20	Kalimantan Barat	94,23	94,61	95,33	95,36	84,92	86,70	87,21	89,14	89,64	90,72	91,34	92,30
21	Kalimantan Tengah	98,13	98,44	98,84	99,46	95,02	96,31	96,91	98,12	96,66	97,43	97,93	98,82
22	Kalimantan Selatan	97,57	98,06	98,72	99,32	93,33	94,34	95,34	97,05	95,46	96,20	97,04	98,19
23	Kalimantan Timur	97,96	98,26	98,52	99,19	95,22	96,30	96,38	97,92	96,68	97,34	97,51	98,59
24	Sulawesi Utara	98,94	99,02	99,32	99,78	98,60	98,63	98,92	99,42	98,77	98,83	99,13	99,60
25	Sulawesi Tengah	95,88	95,92	96,98	97,99	92,52	93,34	94,87	96,11	94,23	94,66	95,95	97,08
26	Sulawesi Selatan	90,05	90,69	92,53	93,10	85,49	86,50	87,99	89,58	87,66	88,50	90,16	91,26
27	Sulawesi Tenggara	94,33	94,07	95,75	96,82	87,31	88,35	89,55	91,29	90,79	91,18	92,61	94,03
28	Gorontalo	94,30	94,94	96,56	97,16	94,92	95,30	97,10	98,63	94,61	95,12	96,83	97,90
29	Sulawesi Barat	91,47	91,12	93,58	93,79	84,12	86,79	88,06	90,77	87,75	88,93	90,79	92,27
30	Maluku	97,54	98,02	98,53	99,17	95,64	96,15	97,14	98,38	96,59	97,09	97,83	98,77
31	Maluku Utara	97,35	97,75	98,34	99,18	94,17	94,90	96,37	97,51	95,79	96,35	97,37	98,36
32	Papua Barat	95,17	96,02	97,51	98,72	89,65	90,94	93,41	94,49	92,58	93,62	95,59	96,75
33	Papua	71,26	71,28	73,63	76,70	56,77	58,49	60,15	64,13	64,53	65,30	67,31	70,78
Indonesia		**95,39**	**95,69**	**96,47**	**96,79**	**89,51**	**90,27**	**91,4**	**93,45**	**92,44**	**92,97**	**93,92**	**95,12**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.19

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2014

No	Provinsi	2011				2012				2013				2014			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
1	Aceh	98,99	94,37	72,14	27,68	99,36	94,34	74,59	28,55	99,66	95,23	74,70	29,18	99,84	97,38	80,89	32,93
2	Sumatera Utara	98,34	89,00	67,10	16,94	98,60	90,83	69,86	17,27	99,03	92,11	71,24	21,81	99,26	96,06	75,78	24,82
3	Sumatera Barat	98,09	90,12	68,84	23,95	98,34	90,50	71,24	27,55	98,81	92,20	74,10	30,66	99,27	95,84	81,97	32,89
4	Riau	97,68	88,28	65,41	15,34	98,13	88,01	66,55	15,81	98,59	90,35	69,79	22,04	98,67	94,36	75,30	24,48
5	Jambi	98,27	88,08	59,99	15,64	98,70	91,11	59,71	15,22	98,81	91,96	63,97	20,25	99,46	94,88	70,41	22,11
6	Sumatera Selatan	97,95	86,45	56,54	12,75	98,11	88,75	58,66	13,91	98,57	89,47	60,74	14,08	99,47	93,36	67,84	16,87
7	Bengkulu	98,41	90,97	62,86	17,02	98,97	93,22	67,76	19,64	99,50	93,16	71,21	24,12	99,45	96,71	77,92	28,14
8	Lampung	97,94	86,39	56,24	10,39	98,64	90,00	60,43	11,90	99,03	91,06	64,41	16,19	99,56	94,01	68,75	18,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	97,28	84,53	49,92	8,63	97,72	84,09	52,02	9,30	98,13	84,63	56,42	9,46	99,16	91,53	65,78	12,22
10	Kepulauan Riau	97,61	96,57	68,17	9,67	98,44	94,93	70,94	10,14	98,63	96,67	73,66	14,85	99,12	98,56	81,57	17,40
11	DKI Jakarta	98,14	92,38	59,72	17,83	99,04	94,07	61,87	18,02	99,40	95,47	66,09	19,65	99,47	96,69	70,23	22,52
12	Jawa Barat	97,89	85,97	50,36	11,15	98,36	88,68	56,30	12,25	98,85	89,40	59,98	17,34	99,30	92,84	65,48	19,27
13	Jawa Tengah	98,61	88,38	54,76	11,51	98,87	89,59	58,65	11,83	99,28	90,73	59,88	17,42	99,51	94,85	67,54	20,48
14	DI Yogyakarta	99,43	97,66	75,60	44,17	99,77	98,35	80,04	44,69	99,96	96,79	81,41	45,86	99,94	99,48	86,44	49,08
15	Jawa Timur	98,27	90,11	58,54	12,69	98,65	91,62	61,87	14,59	99,05	92,83	62,32	19,49	99,38	96,36	70,25	21,84
16	Banten	98,22	88,47	56,01	13,56	98,26	91,10	59,80	15,97	98,60	91,32	62,89	18,08	99,29	94,87	66,25	19,61
17	B a l i	98,38	92,36	68,22	18,93	99,18	95,04	71,44	18,99	99,26	95,90	74,03	19,84	99,36	97,23	81,59	23,59
18	Nusa Tenggara Barat	97,85	91,40	60,09	16,99	98,18	91,25	61,07	17,82	98,20	92,23	66,40	22,64	99,11	97,27	75,68	26,73
19	Nusa Tenggara Timur	96,03	86,01	60,06	17,40	96,15	88,62	61,92	17,92	97,34	89,43	64,81	22,88	97,99	94,26	73,96	26,22
20	Kalimantan Barat	96,28	83,94	50,17	11,94	96,66	85,52	55,13	14,17	96,91	85,94	58,80	19,27	98,18	91,76	66,48	23,18
21	Kalimantan Tengah	98,12	85,53	55,75	13,05	98,62	85,68	55,06	14,04	99,05	86,14	59,18	19,89	99,46	92,94	65,84	22,31
22	Kalimantan Selatan	97,75	83,05	53,89	13,62	97,85	85,62	58,16	16,48	98,76	86,60	60,19	16,95	99,24	91,83	67,18	20,36
23	Kalimantan Timur	98,62	92,40	69,10	16,92	99,12	96,32	71,73	20,33	99,46	96,49	73,92	25,04	99,46	97,89	80,50	27,34
24	Sulawesi Utara	98,02	87,59	60,77	15,16	98,16	88,34	65,28	16,12	98,92	90,48	66,88	16,36	98,95	94,34	71,98	20,91
25	Sulawesi Tengah	97,00	85,32	59,49	16,72	96,87	85,81	61,05	16,74	97,70	87,49	66,12	21,76	97,71	91,23	73,64	25,05
26	Sulawesi Selatan	97,22	84,67	57,15	21,46	97,62	87,85	62,16	23,17	98,24	89,66	62,67	27,80	98,91	92,57	69,38	30,23
27	Sulawesi Tenggara	97,36	86,89	62,29	21,48	97,57	88,25	65,04	23,62	98,00	89,12	65,84	24,00	99,11	93,53	72,25	28,78
28	Gorontalo	96,91	83,75	58,14	19,85	97,74	82,91	59,37	20,46	97,90	86,23	59,91	23,27	98,40	90,47	68,69	27,94
29	Sulawesi Barat	95,86	82,69	57,30	13,03	96,19	82,17	56,80	14,65	95,20	84,55	59,62	18,04	97,91	89,26	66,97	21,53
30	Maluku	98,39	92,06	67,34	26,71	98,27	94,76	68,33	28,98	98,79	94,44	70,28	33,80	99,19	96,35	77,48	36,44
31	Maluku Utara	97,15	90,11	65,12	19,33	98,31	90,83	69,01	21,79	98,02	93,40	69,04	26,42	98,89	96,24	74,83	30,85
32	Papua Barat	94,50	88,37	65,53	16,46	95,59	91,13	65,04	20,03	95,59	92,94	71,89	24,10	96,65	96,28	79,87	29,66
33	Papua	72,61	70,43	49,71	12,81	75,45	69,07	50,01	13,86	75,23	72,64	53,19	17,50	80,69	78,07	61,63	22,48
Indonesia		**97,62**	**87,99**	**57,95**	**14,82**	**98,02**	**89,76**	**61,49**	**16,05**	**98,42**	**90,81**	**63,84**	**20,14**	**98,92**	**94,44**	**70,31**	**22,82**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Keterangan : APS tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 1.20

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2014

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	99,81	96,67	79,25	30,14	99,89	98,13	82,57	36,06	99,84	97,38	80,89	32,93
2	Sumatera Utara	99,36	95,25	72,33	23,15	99,16	96,89	79,41	26,66	99,26	96,06	75,78	24,82
3	Sumatera Barat	99,26	93,69	75,73	30,48	99,29	98,00	88,00	35,45	99,27	95,84	81,97	32,89
4	Riau	98,92	94,30	73,31	25,59	98,41	94,42	77,57	23,19	98,67	94,36	75,30	24,48
5	Jambi	99,11	93,41	68,64	22,19	99,83	96,29	72,28	22,03	99,46	94,88	70,41	22,11
6	Sumatera Selatan	99,47	92,41	65,96	17,95	99,47	94,42	69,90	15,72	99,47	93,36	67,84	16,87
7	Bengkulu	99,42	97,34	75,78	26,75	99,48	96,08	80,17	29,65	99,45	96,71	77,92	28,14
8	Lampung	99,53	91,93	68,08	18,52	99,59	96,35	69,48	18,82	99,56	94,01	68,75	18,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	98,67	91,64	64,37	11,68	99,68	91,43	67,26	12,83	99,16	91,53	65,78	12,22
10	Kepulauan Riau	99,07	97,90	78,62	15,61	99,18	99,31	84,36	19,22	99,12	98,56	81,57	17,40
11	DKI Jakarta	99,42	96,88	72,53	22,26	99,51	96,48	68,16	22,77	99,47	96,69	70,23	22,52
12	Jawa Barat	99,25	91,72	66,04	19,83	99,35	93,99	64,88	18,69	99,30	92,84	65,48	19,27
13	Jawa Tengah	99,38	94,26	66,93	21,33	99,64	95,47	68,20	19,68	99,51	94,85	67,54	20,48
14	DI Yogyakarta	100,00	99,29	87,18	51,63	99,88	99,69	85,48	46,55	99,94	99,48	86,44	49,08
15	Jawa Timur	99,26	96,07	72,40	23,19	99,50	96,68	68,10	20,50	99,38	96,36	70,25	21,84
16	Banten	98,98	94,90	67,12	19,16	99,62	94,85	65,31	20,10	99,29	94,87	66,25	19,61
17	B a l i	99,58	97,18	83,99	25,32	99,12	97,27	78,97	21,76	99,36	97,23	81,59	23,59
18	Nusa Tenggara Barat	98,76	97,03	76,03	28,60	99,52	97,51	75,35	24,91	99,11	97,27	75,68	26,73
19	Nusa Tenggara Timur	97,35	93,81	73,70	26,48	98,66	94,77	74,24	25,97	97,99	94,26	73,96	26,22
20	Kalimantan Barat	97,98	90,98	63,27	22,46	98,40	92,57	69,80	23,91	98,18	91,76	66,48	23,18
21	Kalimantan Tengah	99,30	92,36	67,41	22,94	99,62	93,55	64,14	21,59	99,46	92,94	65,84	22,31
22	Kalimantan Selatan	99,00	89,54	66,99	19,32	99,49	94,39	67,38	21,55	99,24	91,83	67,18	20,36
23	Kalimantan Timur	99,48	97,70	80,23	26,13	99,45	98,13	80,78	28,70	99,46	97,89	80,50	27,34
24	Sulawesi Utara	98,80	92,82	68,78	18,53	99,11	95,99	75,44	23,60	98,95	94,34	71,98	20,91
25	Sulawesi Tengah	97,50	89,25	70,53	22,78	97,94	93,22	77,33	27,49	97,71	91,23	73,64	25,05
26	Sulawesi Selatan	98,54	91,21	67,46	29,21	99,31	93,90	71,40	31,20	98,91	92,57	69,38	30,23
27	Sulawesi Tenggara	98,94	92,49	71,32	28,29	99,27	94,77	73,22	29,25	99,11	93,53	72,25	28,78
28	Gorontalo	97,63	88,51	63,95	27,00	99,17	92,73	73,19	28,90	98,40	90,47	68,69	27,94
29	Sulawesi Barat	97,67	84,47	59,54	21,51	98,14	94,36	74,55	21,56	97,91	89,26	66,97	21,53
30	Maluku	99,41	96,35	74,15	33,92	98,95	96,35	81,11	39,04	99,19	96,35	77,48	36,44
31	Maluku Utara	98,79	95,92	74,42	30,41	99,00	96,57	75,26	31,29	98,89	96,24	74,83	30,85
32	Papua Barat	97,02	96,48	80,51	33,32	96,27	96,07	79,06	25,62	96,65	96,28	79,87	29,66
33	Papua	81,52	77,00	60,79	23,38	79,78	79,29	62,69	21,42	80,69	78,07	61,63	22,48
Indonesia		**98,82**	**93,66**	**69,91**	**22,98**	**99,02**	**95,27**	**70,73**	**22,66**	**98,92**	**94,44**	**70,31**	**22,82**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.21

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2014

No	Provinsi	2011				2012				2013				2014			
		SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	105,67	97,15	79,29	32,19	108,69	96,47	77,62	33,85	110,71	94,39	75,09	34,42	111,66	95,87	81,53	38,32
2	Sumatera Utara	104,76	89,18	78,97	17,74	106,41	88,59	80,81	18,32	110,01	86,84	77,15	24,09	110,34	90,29	82,96	26,75
3	Sumatera Barat	104,02	88,70	70,00	28,86	107,00	87,81	72,53	30,24	109,92	85,46	71,00	33,24	110,89	88,05	80,46	35,27
4	Riau	103,59	89,96	71,82	18,75	103,57	93,30	68,73	18,69	107,30	88,49	69,60	24,22	109,42	90,79	76,33	26,46
5	Jambi	105,01	87,14	66,66	19,67	106,73	88,11	65,80	20,54	109,41	85,17	65,61	24,67	110,73	87,83	73,63	26,28
6	Sumatera Selatan	103,74	90,61	64,49	16,65	106,12	86,65	69,73	15,71	110,74	86,07	63,78	16,50	112,01	88,43	72,51	19,53
7	Bengkulu	105,45	91,33	67,61	21,57	107,60	95,93	67,42	23,29	111,36	85,00	72,71	29,33	113,95	88,23	79,49	32,47
8	Lampung	104,02	89,25	61,76	12,41	106,57	93,41	62,03	13,66	110,73	85,47	63,81	18,49	112,74	86,76	68,49	21,68
9	Kepulauan Bangka Belitung	106,14	81,34	61,34	11,49	109,50	78,35	59,69	12,76	109,97	73,38	68,50	11,68	113,22	82,52	75,51	13,46
10	Kepulauan Riau	102,56	96,96	80,96	11,66	105,59	92,45	74,38	18,23	108,85	90,21	80,26	18,13	108,99	91,06	81,36	23,34
11	DKI Jakarta	98,28	91,92	72,53	21,50	98,37	94,58	75,34	22,32	103,91	86,35	72,72	24,62	104,18	90,86	74,71	27,60
12	Jawa Barat	101,09	87,96	56,09	13,87	103,28	87,44	64,90	13,83	106,75	85,26	60,12	19,62	106,98	87,50	68,55	21,70
13	Jawa Tengah	102,67	92,80	64,02	13,78	104,92	91,51	67,03	14,73	108,95	87,42	64,02	20,13	110,18	89,40	73,55	22,85
14	DI Yogyakarta	104,54	90,08	86,51	57,78	107,18	89,05	83,02	54,32	108,50	83,37	90,04	50,82	109,11	90,66	94,62	56,13
15	Jawa Timur	101,01	92,65	63,58	14,83	102,37	93,60	67,25	16,27	105,82	90,34	62,91	21,69	106,88	91,98	72,24	23,96
16	Banten	104,12	91,62	60,10	16,27	104,79	87,96	69,65	17,61	107,47	89,85	63,32	19,64	109,89	89,55	72,94	21,88
17	B a l i	99,34	92,43	82,18	25,13	98,79	94,78	86,83	24,20	105,60	93,88	79,92	23,84	105,59	95,99	85,27	27,41
18	Nusa Tenggara Barat	102,74	92,93	69,04	20,76	104,91	93,89	68,52	19,42	107,90	88,72	65,00	26,31	109,08	92,44	76,68	29,20
19	Nusa Tenggara Timur	110,90	80,23	57,92	19,39	112,29	82,05	59,96	19,15	113,44	80,25	64,85	25,10	114,68	88,66	71,86	27,75
20	Kalimantan Barat	107,07	78,44	52,75	13,04	108,16	82,24	52,57	15,94	110,61	75,68	59,02	19,08	113,75	80,15	65,72	23,76
21	Kalimantan Tengah	104,47	90,19	58,32	14,14	109,19	79,20	60,65	16,87	110,83	80,85	58,85	22,05	112,01	84,89	67,74	24,41
22	Kalimantan Selatan	103,22	88,21	56,04	17,66	104,47	84,55	66,75	20,61	108,81	79,52	62,14	20,97	110,52	82,45	71,36	23,02
23	Kalimantan Timur	104,92	97,59	73,55	20,17	107,05	92,90	81,33	22,61	107,14	90,79	83,02	27,16	110,32	92,04	85,97	29,74
24	Sulawesi Utara	102,31	92,46	75,71	21,77	104,69	94,02	74,58	23,86	107,39	84,68	80,88	22,80	108,86	87,70	83,48	28,34
25	Sulawesi Tengah	102,40	85,93	68,65	26,89	103,13	81,22	71,83	25,62	103,12	86,10	77,98	30,70	104,71	88,53	83,35	31,96
26	Sulawesi Selatan	101,87	87,69	66,68	27,94	102,81	88,30	74,87	28,73	108,48	78,72	74,71	32,70	109,06	82,77	78,51	34,96
27	Sulawesi Tenggara	103,42	93,23	71,30	33,02	108,17	89,83	71,55	31,57	110,22	81,91	72,31	32,54	112,40	85,97	82,22	37,86
28	Gorontalo	104,25	84,82	61,13	27,63	105,44	81,34	62,39	27,92	109,79	73,88	65,60	28,71	111,88	78,64	76,95	32,33
29	Sulawesi Barat	101,43	84,87	63,13	19,55	102,64	81,06	64,16	22,02	105,84	70,13	71,57	22,49	108,42	80,41	76,30	26,49
30	Maluku	104,67	94,83	87,49	34,39	107,90	91,16	83,08	36,62	109,74	87,77	85,44	40,61	111,35	90,50	86,04	45,56
31	Maluku Utara	107,75	90,48	81,85	17,62	107,85	87,57	85,45	22,65	110,55	82,08	81,19	28,77	110,75	86,06	84,23	34,19
32	Papua Barat	103,57	88,06	67,35	21,87	106,44	89,15	67,83	25,49	105,23	87,45	73,24	32,38	109,36	87,86	83,12	34,98
33	Papua	84,06	67,39	46,29	11,88	84,32	71,71	44,23	13,22	85,95	65,01	53,48	16,65	90,67	71,02	61,53	22,45
Indonesia		**102,57**	**89,83**	**64,90**	**18,06**	**104,33**	**89,49**	**68,80**	**18,85**	**107,71**	**85,96**	**66,61**	**23,06**	**108,87**	**88,63**	**74,26**	**25,76**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Keterangan : APK tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 1.22

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2014

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	111,75	95,20	80,74	34,53	111,57	96,57	82,33	42,59	111,66	95,87	81,53	38,32
2	Sumatera Utara	112,63	87,88	80,09	25,00	108,04	92,77	85,97	28,68	110,34	90,29	82,96	26,75
3	Sumatera Barat	111,38	83,61	76,31	30,98	110,36	92,50	84,48	39,83	110,89	88,05	80,46	35,27
4	Riau	111,94	88,42	72,08	27,98	106,85	93,11	81,19	24,68	109,42	90,79	76,33	26,46
5	Jambi	111,35	85,81	70,67	25,39	110,06	89,76	76,75	27,26	110,73	87,83	73,63	26,28
6	Sumatera Selatan	113,34	85,39	71,25	19,83	110,63	91,81	73,89	19,22	112,01	88,43	72,51	19,53
7	Bengkulu	114,70	90,27	74,15	29,41	113,17	86,20	85,13	35,80	113,95	88,23	79,49	32,47
8	Lampung	113,72	84,83	67,98	20,56	111,71	88,94	69,04	22,82	112,74	86,76	68,49	21,68
9	Kepulauan Bangka Belitung	114,43	80,52	71,74	12,50	111,94	84,58	79,46	14,55	113,22	82,52	75,51	13,46
10	Kepulauan Riau	109,15	88,63	81,77	20,65	108,80	93,82	80,97	26,10	108,99	91,06	81,36	23,34
11	DKI Jakarta	104,93	87,67	79,52	27,86	103,43	94,19	70,39	27,34	104,18	90,86	74,71	27,60
12	Jawa Barat	106,98	85,21	69,00	22,20	106,98	89,86	68,08	21,17	106,98	87,50	68,55	21,70
13	Jawa Tengah	109,76	88,76	72,89	22,74	110,63	90,06	74,27	22,95	110,18	89,40	73,55	22,85
14	DI Yogyakarta	108,72	94,75	96,15	57,72	109,47	85,94	92,65	54,54	109,11	90,66	94,62	56,13
15	Jawa Timur	106,56	92,58	75,80	24,23	107,21	91,32	68,71	23,70	106,88	91,98	72,24	23,96
16	Banten	111,95	89,33	71,67	20,75	107,75	89,79	74,30	23,10	109,89	89,55	72,94	21,88
17	B a l i	107,51	94,59	88,33	28,06	103,59	97,39	81,92	26,72	105,59	95,99	85,27	27,41
18	Nusa Tenggara Barat	108,70	91,59	76,89	30,69	109,53	93,29	76,48	27,74	109,08	92,44	76,68	29,20
19	Nusa Tenggara Timur	116,06	84,94	70,96	26,23	113,25	92,75	72,84	29,18	114,68	88,66	71,86	27,75
20	Kalimantan Barat	114,78	76,59	62,40	22,54	112,64	83,85	69,18	25,01	113,75	80,15	65,72	23,76
21	Kalimantan Tengah	112,28	84,13	68,69	24,09	111,71	85,69	66,71	24,78	112,01	84,89	67,74	24,41
22	Kalimantan Selatan	111,36	78,10	73,48	20,58	109,61	87,29	69,20	25,80	110,52	82,45	71,36	23,02
23	Kalimantan Timur	110,37	93,10	86,04	28,06	110,50	90,78	85,90	31,63	110,43	92,04	85,97	29,74
24	Sulawesi Utara	108,51	84,34	82,20	23,65	109,24	91,35	84,87	33,66	108,86	87,70	83,48	28,34
25	Sulawesi Tengah	105,91	84,09	78,75	27,61	103,43	92,99	88,82	36,63	104,71	88,53	83,35	31,96
26	Sulawesi Selatan	109,46	81,09	76,23	32,58	108,63	84,40	80,91	37,22	109,06	82,77	78,51	34,96
27	Sulawesi Tenggara	114,00	84,53	83,48	36,36	110,78	87,70	80,90	39,28	112,40	85,97	82,22	37,86
28	Gorontalo	111,24	77,67	70,30	29,35	112,52	79,76	83,27	35,36	111,88	78,64	76,95	32,33
29	Sulawesi Barat	107,66	78,72	68,06	25,56	109,19	82,22	84,71	27,42	108,42	80,41	76,30	26,49
30	Maluku	111,44	93,35	81,63	41,87	111,26	87,68	90,84	49,36	111,35	90,50	86,04	45,56
31	Maluku Utara	110,65	89,07	79,49	34,72	110,85	83,00	89,08	33,65	110,75	86,06	84,23	34,19
32	Papua Barat	110,01	89,32	84,17	38,27	108,68	86,34	81,79	31,34	109,36	87,86	83,12	34,98
33	Papua	92,18	72,35	59,46	21,82	88,98	69,50	64,11	23,19	90,67	71,02	61,53	22,45
Indonesia		**109,37**	**87,26**	**74,03**	**25,24**	**108,35**	**90,08**	**74,50**	**26,30**	**108,88**	**88,63**	**74,26**	**25,76**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.23

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2014

No	Provinsi	2011			2012			2013			2014		
		SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	92,51	74,87	61,37	94,66	78,61	61,82	97,09	82,57	63,43	97,80	85,20	69,20
2	Sumatera Utara	91,61	68,08	57,48	93,35	70,57	60,29	95,64	73,98	62,19	96,29	78,33	65,80
3	Sumatera Barat	93,44	67,77	54,78	95,77	70,08	55,68	97,10	72,56	61,00	97,92	75,61	66,52
4	Riau	91,63	66,26	53,31	92,62	70,18	53,06	95,33	74,23	58,74	96,42	77,67	62,31
5	Jambi	92,36	67,43	49,46	94,10	69,56	46,09	96,43	73,23	52,13	97,15	77,34	59,22
6	Sumatera Selatan	89,57	64,74	45,79	92,79	67,94	49,34	95,12	72,06	51,67	96,13	75,87	57,92
7	Bengkulu	92,60	68,81	50,78	94,10	71,97	50,83	97,37	73,07	60,32	98,03	76,44	64,61
8	Lampung	91,63	67,06	46,05	93,50	72,08	46,14	97,41	74,96	53,48	97,98	77,98	57,64
9	Kepulauan Bangka Belitung	90,92	60,85	41,92	94,12	63,28	42,93	95,72	63,83	50,80	96,49	71,83	56,93
10	Kepulauan Riau	92,24	74,29	56,85	94,50	78,67	63,53	97,64	83,31	67,62	98,22	83,36	70,52
11	DKI Jakarta	90,26	69,66	49,91	90,48	70,31	54,25	96,07	75,46	55,40	96,84	79,61	58,79
12	Jawa Barat	92,26	69,89	42,45	93,41	73,54	51,24	97,08	76,76	52,25	97,60	79,30	56,48
13	Jawa Tengah	90,20	69,92	47,17	92,05	72,52	51,11	95,68	74,94	51,81	96,45	78,57	58,11
14	DI Yogyakarta	92,04	69,48	59,25	96,11	72,44	63,54	98,75	75,64	64,86	98,98	82,20	68,46
15	Jawa Timur	91,90	71,78	49,29	92,93	74,42	52,36	96,10	77,36	53,30	96,98	80,94	60,00
16	Banten	92,41	71,01	46,24	93,67	73,79	53,00	96,24	78,17	53,28	96,69	79,56	56,87
17	B a l i	90,08	69,53	59,48	91,01	74,46	63,55	94,11	80,69	67,04	95,29	84,58	70,83
18	Nusa Tenggara Barat	92,61	76,56	53,41	93,61	77,44	53,81	96,71	80,21	58,00	97,62	82,29	64,11
19	Nusa Tenggara Timur	91,97	56,51	40,33	92,16	55,83	38,19	93,53	59,32	47,30	94,56	65,86	52,15
20	Kalimantan Barat	92,30	59,05	36,86	92,93	59,72	37,44	94,39	59,53	44,79	95,75	64,23	50,06
21	Kalimantan Tengah	92,15	66,62	44,99	96,03	65,11	43,55	97,41	68,15	45,43	98,13	75,40	51,75
22	Kalimantan Selatan	92,24	66,35	43,36	93,16	66,94	49,39	96,74	69,57	50,05	97,44	72,40	55,04
23	Kalimantan Timur	92,29	72,50	55,52	94,06	74,12	60,34	95,76	75,79	62,91	96,92	78,96	67,41
24	Sulawesi Utara	85,88	60,94	50,15	87,78	62,39	51,15	91,61	64,55	57,26	93,42	72,32	61,69
25	Sulawesi Tengah	90,08	62,99	48,50	90,79	62,36	52,25	90,27	63,72	58,38	91,77	70,62	63,13
26	Sulawesi Selatan	89,48	65,87	48,17	90,61	69,68	54,20	95,67	69,79	54,26	96,39	73,18	59,10
27	Sulawesi Tenggara	88,55	64,22	51,32	92,54	68,84	50,67	95,15	69,68	55,50	95,97	74,77	61,91
28	Gorontalo	90,03	60,43	44,46	92,00	60,48	45,47	95,93	64,26	48,91	96,74	68,29	56,07
29	Sulawesi Barat	89,18	62,76	48,41	91,29	61,75	44,54	93,52	62,00	52,22	94,97	68,37	56,65
30	Maluku	88,38	63,19	52,78	90,05	66,03	50,20	92,25	67,06	55,59	93,74	73,10	62,60
31	Maluku Utara	89,83	65,99	52,36	92,59	64,43	56,76	95,47	70,73	59,54	96,21	75,03	63,10
32	Papua Barat	87,77	56,68	48,33	88,84	57,90	44,98	89,71	60,90	53,80	92,76	68,18	62,29
33	Papua	69,60	44,44	30,82	70,78	43,61	29,16	72,57	45,76	36,73	78,36	53,68	43,11
Indonesia		**91,07**	**68,36**	**48,07**	**92,54**	**70,93**	**51,88**	**95,59**	**73,88**	**54,25**	**96,45**	**77,53**	**59,35**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Keterangan : APM tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 1.24

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 - 2013

No.	Provinsi	2012						2013					
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Pengeluaran Riil / Kapita (Rp.000)	IPM	Peringkat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Pengeluaran Riil / Kapita (Rp.000)	IPM	Peringkat
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	68,94	8,93	96,99	618,79	72,51	19	69,40	9,02	97,04	621,40	73,05	20
2	Sumatera Utara	69,81	9,07	97,51	643,63	75,13	8	69,90	9,13	97,84	646,83	75,55	8
3	Sumatera Barat	70,02	8,60	97,23	641,85	74,70	9	70,09	8,63	97,38	644,59	75,01	9
4	Riau	71,69	8,64	98,45	654,48	76,90	3	71,73	8,78	98,48	657,26	77,25	5
5	Jambi	69,44	8,20	96,20	640,82	73,78	13	69,61	8,32	96,85	644,05	74,35	13
6	Sumatera Selatan	70,05	7,99	97,50	637,47	73,99	10	70,10	8,04	97,55	641,35	74,36	12
7	Bengkulu	70,39	8,48	95,69	634,74	73,93	11	70,44	8,55	96,55	637,50	74,41	11
8	Lampung	70,05	7,87	95,13	625,52	72,45	20	70,09	7,89	95,92	628,24	72,87	21
9	Kepulauan Bangka Belitung	69,21	7,68	95,88	648,49	73,78	12	69,46	7,73	96,44	651,22	74,29	14
10	Kepulauan Riau	69,91	9,81	97,80	648,92	76,20	6	69,97	9,91	98,07	651,37	76,56	6
11	DKI Jakarta	73,49	10,98	99,21	635,29	78,33	1	73,56	11,00	99,22	637,92	78,59	1
12	Jawa Barat	68,60	8,08	96,39	638,90	73,11	16	68,84	8,11	96,87	641,63	73,58	17
13	Jawa Tengah	71,71	7,39	90,45	643,53	73,36	15	71,97	7,43	91,71	646,44	74,05	16
14	DI Yogyakarta	73,33	9,21	92,02	653,78	76,75	4	73,62	9,33	92,86	656,19	77,37	2
15	Jawa Timur	70,09	7,45	89,28	651,04	72,83	17	70,37	7,53	90,49	654,02	73,54	18
16	Banten	65,23	8,61	96,51	636,73	71,49	23	65,47	8,61	96,87	639,28	71,90	24
17	Bali	70,84	8,57	90,17	640,86	73,49	14	71,20	8,58	91,03	643,78	74,11	15
18	Nusa Tenggara Barat	62,73	7,19	83,68	645,72	66,89	32	63,21	7,20	85,19	648,66	67,73	33
19	Nusa Tenggara Timur	68,04	7,09	89,23	610,29	68,28	31	68,05	7,16	90,34	612,88	68,77	32
20	Kalimantan Barat	66,92	7,14	91,13	638,82	70,31	28	67,40	7,17	91,70	641,41	70,93	29
21	Kalimantan Tengah	71,41	8,15	97,88	644,21	75,46	7	71,47	8,17	97,99	646,01	75,68	7
22	Kalimantan Selatan	64,52	7,89	96,43	643,66	71,08	25	64,82	8,01	97,18	646,77	71,74	26
23	Kalimantan Timur	71,58	9,22	97,55	649,85	76,71	5	71,78	9,39	97,95	653,70	77,33	4
24	Kalimantan Utara							69,70	8,52	96,40	647,51	74,72	10
25	Sulawesi Utara	72,44	9,0	99,53	643,20	76,95	2	72,62	9,09	99,56	646,19	77,36	3
26	Sulawesi Tengah	67,11	8,13	96,16	637,34	72,14	22	67,21	8,22	96,22	640,69	72,54	23
27	Sulawesi Selatan	70,45	7,95	88,73	643,59	72,70	18	70,60	8,01	89,69	646,71	73,28	19
28	Sulawesi Tenggara	68,21	8,25	92,04	625,81	71,05	26	68,56	8,44	92,59	628,77	71,73	27
29	Gorontalo	67,47	7,49	96,16	630,01	71,31	24	67,54	7,52	96,87	633,14	71,77	25
30	Sulawesi Barat	68,27	7,32	88,79	639,56	70,73	27	68,34	7,35	90,54	642,66	71,41	28
31	Maluku	67,84	9,15	98,17	620,08	72,42	21	67,88	9,20	98,25	622,59	72,70	22
32	Maluku Utara	66,65	8,71	96,43	606,22	69,98	30	66,97	8,72	97,45	609,26	70,63	30
33	Papua Barat	69,14	8,45	93,74	601,56	70,22	29	69,14	8,53	94,14	604,82	70,62	31
34	Papua	69,12	6,87	75,83	611,99	65,86	33	69,13	6,87	75,92	616,76	66,25	34
Indonesia		**69,87**	**8,08**	**93,25**	**641,04**	**73,29**		**70,07**	**8,14**	**94,14**	**643,36**	**73,81**	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Tabel 2.1

JUMLAH PUSKESMAS DAN RASIONYA TERHADAP PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2014

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas					Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	315	325	330	334	337	2,10	2,14	2,15	2,14	2,14
2	Sumatera Utara	506	542	555	570	570	1,17	1,24	1,26	1,28	1,26
3	Sumatera Barat	246	254	260	262	264	1,52	1,55	1,57	1,56	1,55
4	Riau	193	203	207	207	211	1,05	1,06	1,05	1,01	1,00
5	Jambi	169	174	176	176	176	1,64	1,65	1,63	1,59	1,55
6	Sumatera Selatan	293	304	317	319	321	1,18	1,20	1,23	1,22	1,20
7	Bengkulu	170	178	178	180	180	2,97	3,06	3,01	3,00	2,95
8	Lampung	265	269	276	280	290	1,04	1,05	1,06	1,07	1,09
9	Kepulauan Bangka Belitung	58	58	60	60	61	1,42	1,38	1,38	1,34	1,33
10	Kepulauan Riau	66	67	69	70	73	1,18	1,14	1,12	1,08	1,08
11	DKI Jakarta	341	340	340	340	340	1,06	1,05	1,03	1,02	1,01
12	Jawa Barat	1.028	1.046	1.046	1.050	1.050	0,72	0,72	0,70	0,69	0,68
13	Jawa Tengah	867	867	873	873	875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	DI Yogyakarta	121	121	121	121	121	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01
15	Jawa Timur	946	956	960	960	960	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75
16	Banten	217	226	228	230	231	0,61	0,62	0,61	0,60	0,59
17	Bali	114	114	118	120	120	0,88	0,86	0,87	0,87	0,85
18	Nusa Tenggara Barat	150	152	157	158	158	1,00	1,00	1,02	1,02	1,01
19	Nusa Tenggara Timur	309	342	349	362	370	1,98	2,15	2,15	2,18	2,19
20	Kalimantan Barat	231	235	237	237	238	1,58	1,59	1,59	1,58	1,57
21	Kalimantan Tengah	174	179	190	194	195	2,36	2,39	2,49	2,50	2,47
22	Kalimantan Selatan	214	224	226	228	228	1,77	1,82	1,80	1,78	1,75
23	Kalimantan Timur	217	215	217	222	174	1,83	1,75	1,70	1,68	1,49
24	Kalimantan Utara					48					2,37
25	Sulawesi Utara	170	170	177	183	187	2,25	2,22	2,28	2,33	2,35
26	Sulawesi Tengah	160	173	176	183	184	1,82	1,93	1,93	1,97	1,94
27	Sulawesi Selatan	416	421	425	440	446	1,55	1,55	1,55	1,59	1,59
28	Sulawesi Tenggara	233	249	258	264	269	3,13	3,28	3,33	3,34	3,34
29	Gorontalo	76	86	87	91	93	2,19	2,43	2,40	2,46	2,46
30	Sulawesi Barat	81	86	91	92	94	2,10	2,17	2,24	2,20	2,20
31	Maluku	156	170	178	190	197	3,05	3,24	3,30	3,43	3,46
32	Maluku Utara	100	115	119	125	127	2,89	3,24	3,28	3,36	3,34
33	Papua Barat	106	126	128	143	149	4,18	4,80	4,70	5,07	5,09
34	Papua	297	334	381	391	394	3,14	3,36	3,64	3,54	3,39
Indonesia		**9.005**	**9.321**	**9.510**	**9.655**	**9.731**	**1,14**	**1,16**	**1,17**	**1,17**	**1,16**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Tabel 2.2

JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2014

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Rawat Inap					Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	116	137	144	149	143	199	188	186	185	194
2	Sumatera Utara	140	153	157	164	164	366	389	398	406	406
3	Sumatera Barat	85	86	89	88	91	161	168	171	174	173
4	Riau	53	55	63	75	79	140	148	144	132	132
5	Jambi	59	62	62	68	68	110	112	114	108	108
6	Sumatera Selatan	82	86	106	95	95	211	218	211	224	226
7	Bengkulu	39	43	43	45	45	131	135	135	135	135
8	Lampung	58	60	69	91	101	207	209	207	189	189
9	Kepulauan Bangka Belitung	18	19	20	20	20	40	39	40	40	41
10	Kepulauan Riau	26	26	26	26	29	40	41	43	44	44
11	DKI Jakarta	52	52	52	30	30	289	288	288	310	310
12	Jawa Barat	237	220	220	176	176	791	826	826	874	874
13	Jawa Tengah	252	265	268	309	318	615	602	605	564	557
14	DI Yogyakarta	42	40	42	42	42	79	81	79	79	79
15	Jawa Timur	396	400	441	504	518	550	556	519	456	442
16	Banten	50	53	56	56	56	167	173	172	174	175
17	Bali	28	28	29	34	34	86	86	89	86	86
18	Nusa Tenggara Barat	81	84	84	109	109	69	68	73	49	49
19	Nusa Tenggara Timur	110	123	128	128	137	199	219	221	234	233
20	Kalimantan Barat	93	94	96	94	95	138	141	141	143	143
21	Kalimantan Tengah	69	69	70	73	73	105	110	120	121	122
22	Kalimantan Selatan	48	48	49	45	45	166	176	177	183	183
23	Kalimantan Timur	93	94	94	127	95	124	121	123	95	79
24	Kalimantan Utara					32					16
25	Sulawesi Utara	84	85	88	88	92	86	85	89	95	95
26	Sulawesi Tengah	68	72	72	78	78	92	101	104	105	106
27	Sulawesi Selatan	208	218	225	225	228	208	203	200	215	218
28	Sulawesi Tenggara	70	74	74	79	78	163	175	184	185	191
29	Gorontalo	23	23	23	25	25	53	63	64	66	68
30	Sulawesi Barat	35	35	35	43	44	46	51	56	49	50
31	Maluku	56	56	61	63	64	100	114	117	127	133
32	Maluku Utara	27	28	28	27	27	73	87	91	98	100
33	Papua Barat	36	39	39	39	43	70	87	89	104	106
34	Papua	86	92	99	102	104	211	242	282	289	290
Indonesia		**2.920**	**3.019**	**3.152**	**3.317**	**3.378**	**6.085**	**6.302**	**6.358**	**6.338**	**6.353**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Tabel 2.3

JUMLAH PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Puskesmas							Rumah Sakit denga Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)	Rumah Sakit yang dilatih Akupuntur dan Herbal
		Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Upaya Kesehatan Kerja	Upaya Kesehatan Olahraga	Upaya Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	Pembinaan Panti Anak Terlantar	Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	89	92	38	31	41	52	62	17	3
2	Sumatera Utara	155	241	0	13	70	19	130	25	5
3	Sumatera Barat	101	85	0	0	24	67	45	19	6
4	Riau	70	83	40	26	30	31	30	14	5
5	Jambi	58	54	47	25	9	31	33	8	4
6	Sumatera Selatan	119	134	0	25	56	48	33	16	4
7	Bengkulu	54	71	4	127	32	4	53	12	3
8	Lampung	82	68	11	18	50	55	43	6	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	24	39	33	30	9	9	17	7	3
10	Kepulauan Riau	25	40	24	6	9	22	31	11	3
11	DKI Jakarta	17	22	0	41	44	31	12	18	
12	Jawa Barat	232	356	112	156	25	85	122	32	8
13	Jawa Tengah	293	265	0	31	54	29	225	40	9
14	DI Yogyakarta	68	76	8	20	48	32	28	8	2
15	Jawa Timur	283	277	164	91	49	324	160	51	7
16	Banten	72	54	181	49	85	32	76	12	3
17	Bali	54	50	120	57	103	27	18	10	2
18	Nusa Tenggara Barat	61	40	74	0	13	28	20	10	2
19	Nusa Tenggara Timur	94	146	0	0	11	85	76	7	2
20	Kalimantan Barat	66	124	0	0	38	53	72	11	3
21	Kalimantan Tengah	63	57	23	4	15		32	12	3
22	Kalimantan Selatan	60	85	36	24	9	44	40	14	2
23	Kalimantan Timur	81	51	16	0	13	45	47	20	1
24	Kalimantan Utara	25	0	0	7	0	0	0	3	0
25	Sulawesi Utara	87	78	0	0	25	20	59	10	2
26	Sulawesi Tengah	90	41	26	12	10	39	22	9	2
27	Sulawesi Selatan	153	101	127	86	110	67	59	32	2
28	Sulawesi Tenggara	73	49	0	0	28	47	25	8	2
29	Gorontalo	24	22	24	0	20	18	10	6	3
30	Sulawesi Barat	39	18	4	0	33		9	3	2
31	Maluku	55	92	0	0	62	16	34	9	1
32	Maluku Utara	34	22	0	0	12	10	14	4	1
33	Papua Barat	21	41	0	0	7	0	40	4	1
34	Papua	33	25	0	0	23	0	19	8	2
Indonesia		**2.855**	**2.999**	**1.112**	**879**	**1.167**	**1.370**	**1.696**	**476**	**101**

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Ditjen Bina Gizi dan KIA, Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2015

Tabel 2.4

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PUSKESMAS YANG NAKESNYA DILATIH KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Tenaga Kesehatan Puskesmas Terlatih	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Tenaga Kesehatan Puskesmas Terlatih	Jumlah Puskesmas Dengan Tenaga Kesehatan Terlatih
(1)	*(2)*	*(3)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	14	60,9	41
2	Sumatera Utara	33	23	69,7	70
3	Sumatera Barat	19	10	52,6	24
4	Riau	12	10	83,3	30
5	Jambi	11	3	27,3	9
6	Sumatera Selatan	17	16	94,1	56
7	Bengkulu	10	10	100,0	32
8	Lampung	15	14	93,3	50
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	57,1	9
10	Kepulauan Riau	7	4	57,1	9
11	DKI Jakarta	6	5	83,3	44
12	Jawa Barat	27	11	40,7	25
13	Jawa Tengah	35	20	57,1	54
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0	48
15	Jawa Timur	38	15	39,5	49
16	Banten	8	8	100,0	85
17	Bali	9	9	100,0	103
18	Nusa Tenggara Barat	10	5	50,0	13
19	Nusa Tenggara Timur	22	4	18,2	11
20	Kalimantan Barat	14	13	92,9	38
21	Kalimantan Tengah	14	5	35,7	15
22	Kalimantan Selatan	13	4	30,8	9
23	Kalimantan Timur	10	3	30,0	13
24	Kalimantan Utara	5	0	0,0	0
25	Sulawesi Utara	15	7	46,7	25
26	Sulawesi Tengah	13	3	23,1	10
27	Sulawesi Selatan	24	23	95,8	110
28	Sulawesi Tenggara	17	12	70,6	28
29	Gorontalo	6	6	100,0	20
30	Sulawesi Barat	6	6	100,0	33
31	Maluku	11	9	81,8	62
32	Maluku Utara	10	3	30,0	12
33	Papua Barat	13	3	23,1	7
34	Papua	29	2	6,9	23
Indonesia		**514**	**289**	**56,2**	**1.167**

Sumber: Direktorat Bina Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer; Ditjen Bina Gizi dan KIA, Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014

Tabel 2.5

JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA
MENURUT PENGELOLA DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Rumah Sakit Publik															Rumah Sakit Privat					
		Kemenkes			Pemda			TNI/POLRI			Kementerian Lain			Swasta Non Profit			Swasta			BUMN		
		RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Aceh	0	0	0	25	2	27	4	0	4	0	0	0	15	0	15	13	1	14	4	0	4
2	Sumatera Utara	1	0	1	34	3	37	9	0	9	0	0	0	67	9	76	34	5	39	14	1	15
3	Sumatera Barat	1	1	2	19	1	20	4	0	4	0	0	0	11	9	20	2	13	15	1	0	1
4	Riau	0	0	0	16	3	19	4	0	4	0	0	0	5	1	6	22	8	30	3	0	3
5	Jambi	0	0	0	13	1	14	2	0	2	0	0	0	1	1	2	12	3	15	0	0	0
6	Sumatera Selatan	1	1	2	21	4	25	4	0	4	0	0	0	8	3	11	6	2	8	5	0	5
7	Bengkulu	0	0	0	12	1	13	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	13	1	14	2	0	2	0	0	0	13	3	16	14	7	21	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	8	1	9	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	1	4	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	11	0	11	2	0	2	0	0	0	4	2	6	3	1	4	2	0	2
11	DKI Jakarta	3	7	10	7	2	9	9	3	12	3	0	3	31	22	53	37	29	66	4	1	5
12	Jawa Barat	1	4	5	40	4	44	13	0	13	0	0	0	53	20	73	103	50	153	4	1	5
13	Jawa Tengah	2	3	5	50	6	56	12	0	12	1	1	2	104	43	147	50	25	75	3	0	3
14	DI Yogyakarta	1	0	1	6	2	8	4	0	4	0	0	0	26	13	39	13	5	18	0	1	1
15	Jawa Timur	0	1	1	55	10	65	29	2	31	1	0	1	84	33	117	70	49	119	11	2	13
16	Banten	0	1	1	10	0	10	2	0	2	0	0	0	11	5	16	35	20	55	1	0	1
17	Bali	1	0	1	9	2	11	3	0	3	0	0	0	17	5	22	15	5	20	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	12	1	13	2	0	2	0	0	0	4	0	4	5	0	5	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	19	0	19	5	0	5	0	0	0	13	4	17	3	0	3	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	16	3	19	6	0	6	0	0	0	7	1	8	7	4	11	1	0	1
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	15	1	16	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	14	2	16	5	0	5	0	0	0	3	5	8	3	2	5	2	0	2
23	Kalimantan Timur	0	0	0	11	2	13	4	0	4	0	0	0	4	1	5	12	8	20	2	0	2
24	Kalimantan Utara	0	0	0	5	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	0	2	15	1	16	4	0	4	0	1	1	14	0	14	3	2	5	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	16	1	17	2	0	2	0	0	0	4	4	8	1	3	4	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	1	1	2	28	7	35	8	1	9	0	0	0	12	12	24	10	6	16	1	1	2
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	13	1	14	2	0	2	0	0	0	4	0	4	0	4	4	1	0	1
29	Gorontalo	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	15	1	16	4	0	4	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	13	0	13	2	0	2	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	10	0	10	3	0	3	0	0	0	1	0	1	3	0	3	1	0	1
34	Papua	0	0	0	21	2	23	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	1	3	0	0	0
Indonesia		**14**	**19**	**33**	**589**	**65**	**654**	**163**	**6**	**169**	**5**	**2**	**7**	**539**	**197**	**736**	**485**	**255**	**740**	**60**	**7**	**67**

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015
Keterangan : 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Tabel 2.6

JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN TEMPAT TIDUR
MENURUT PENGELOLA TAHUN 2010 - 2014

No	Pengelola	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		RS	TT	RS	TT	RS	TT	RS	TT	RS	TT
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Kementerian Kesehatan	13	8.873	14	9.724	14	10.832	14	11.028	14	10.673
2	Pemerintah Provinsi	45	13.854	47	14.065	49	16.292	53	18.526	52	17.030
3	Pemerintah Kab/Kota	445	43.341	472	52.536	508	74.741	525	84.694	537	81.954
4	TNI/POLRI	129	11.771	132	12.272	151	19.830	155	20.832	163	20.312
5	Kementerian Lain dan BUMN	72	6.925	73	8.535	71	8.040	63	7.444	65	7.285
6	Swasta dan Swasta Non Profit	591	52.306	634	52.694	815	74.033	915	102.816	1.024	99.356
Jumlah		**1.295**	**137.070**	**1.372**	**149.826**	**1.608**	**203.768**	**1.725**	**245.340**	**1.855**	**236.610**

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015
Keterangan : Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Tabel 2.7

JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS DAN TEMPAT TIDUR
MENURUT JENIS RUMAH SAKIT TAHUN 2010 - 2014

No	Jenis Rumah Sakit	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		RS	TT	RS	TT	RS	TT	RS	TT	RS	TT
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	RS Jiwa	52	8.760	52	7.541	53	8.542	51	10.349	51	10.585
2	RS Kusta	23	2.326	23	1.854	22	1.989	18	2.048	16	1.807
3	RS Tuberkulosa Paru	10	757	10	778	12	915	11	919	12	933
4	RS Mata	12	448	13	519	14	520	15	647	18	637
5	RS Bersalin	62	2.453	65	2.334	94	3.150	99	3.457	113	3.631
6	RS Ibu dan Anak	106	4.809	114	5.267	169	7.697	159	8.147	233	10.761
7	RS Khusus Lainnya	72	2.521	72	2.537	111	4.851	150	7.543	108	4.779
Jumlah		**337**	**22.074**	**349**	**20.830**	**475**	**27.664**	**503**	**33.110**	**551**	**33.133**

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015
Keterangan : Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Tabel 2.8

JUMLAH RUMAH SAKIT, TEMPAT TIDUR, DAN RASIO TEMPAT TIDUR PER 1.000 PENDUDUK MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Kelas A			Kelas B			Kelas C			Kelas D			Belum Ditetapkan Kelas			Total		
		RS	TT	Persentase RS	RS	TT	Persentase RS	RS	TT	Persentase RS	RS	TT	Persentase RS	RS	TT	Persentase RS	RS	TT	Rasio TT
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Aceh	3	813	4,69	6	1.428	9,38	25	3.046	39,06	8	536	12,50	22	1.295	34,38	64	7.118	1,50
2	Sumatera Utara	1	721	0,56	23	5.572	12,99	58	6.526	32,77	28	2.122	15,82	67	5.069	37,85	177	20.010	1,48
3	Sumatera Barat	1	264	1,61	4	1.564	6,45	22	2.818	35,48	16	552	25,81	19	796	30,65	62	5.994	1,18
4	Riau	1	182	1,61	8	1.874	12,90	27	2.510	43,55	14	906	22,58	12	420	19,35	62	5.892	0,93
5	Jambi	0	0	0,00	3	684	9,09	12	1.466	36,36	6	425	18,18	12	615	36,36	33	3.190	0,93
6	Sumatera Selatan	3	1.682	5,45	5	1.031	9,09	24	3.351	43,64	11	715	20,00	12	788	21,82	55	7.567	0,95
7	Bengkulu	0	0	0,00	2	696	10,53	4	400	21,05	10	583	52,63	3	202	15,79	19	1.881	1,03
8	Lampung	0	0	0,00	4	1.262	7,55	25	2.621	47,17	7	482	13,21	17	1.320	32,08	53	5.685	0,71
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0,00	1	120	6,25	6	811	37,50	6	392	37,50	3	125	18,75	16	1.448	1,05
10	Kepulauan Riau	0	0	0,00	5	1.008	20,00	11	977	44,00	5	212	20,00	4	122	16,00	25	2.319	1,14
11	DKI Jakarta	13	5.028	8,23	43	9.044	27,22	40	2.983	25,32	12	847	7,59	50	3.523	31,65	158	21.425	2,11
12	Jawa Barat	7	2.181	2,39	47	11.963	16,04	111	11.157	37,88	52	3.470	17,75	76	4.370	25,94	293	33.141	0,72
13	Jawa Tengah	8	3.951	2,67	31	9.952	10,33	110	12.575	36,67	95	6.064	31,67	56	2.766	18,67	300	35.308	1,08
14	DI Yogyakarta	3	992	4,23	11	2.364	15,49	11	4.335	15,49	28	1.494	39,44	18	950	25,35	71	10.135	2,82
15	Jawa Timur	6	3.563	1,73	42	10.239	12,10	107	11.841	30,84	69	4.263	19,88	123	6.799	35,45	347	36.705	0,95
16	Banten	2	275	2,35	16	3.946	18,82	27	2.380	31,76	7	555	8,24	33	2.204	38,82	85	9.360	0,79
17	Bali	3	1.167	5,26	7	1.397	12,28	17	1.891	29,82	12	690	21,05	18	727	31,58	57	5.872	1,39
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0,00	3	679	12,50	8	1.319	33,33	11	925	45,83	2	99	8,33	24	3.022	0,64
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0,00	1	361	2,27	12	1.510	27,27	22	1.616	50,00	9	603	20,45	44	4.090	0,81
20	Kalimantan Barat	1	486	2,22	3	947	6,67	14	1.660	31,11	9	825	20,00	18	1.256	40,00	45	5.174	1,14
21	Kalimantan Tengah	0	0	0,00	2	505	10,53	7	746	36,84	6	378	31,58	4	160	21,05	19	1.789	0,76
22	Kalimantan Selatan	2	1.064	5,56	2	491	5,56	17	2.101	47,22	4	294	11,11	11	367	30,56	36	4.317	1,10
23	Kalimantan Timur	2	983	4,55	6	1.246	13,64	14	1.868	31,82	18	702	40,91	4	246	9,09	44	5.045	1,44
24	Kalimantan Utara	0	0	0,00	1	271	14,29	3	431	42,86	3	107	42,86	0	0	0,00	7	809	1,33
25	Sulawesi Utara	1	278	2,38	2	1.182	4,76	16	2.265	38,10	10	550	23,81	13	733	30,95	42	5.008	2,10
26	Sulawesi Tengah	0	0	0,00	3	1.012	9,68	9	1.347	29,03	4	245	12,90	15	829	48,39	31	3.433	1,21
27	Sulawesi Selatan	3	1.495	3,41	18	3.803	20,45	33	4.544	37,50	9	523	10,23	25	1.192	28,41	88	11.557	1,38
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0,00	2	526	8,00	7	579	28,00	8	397	32,00	8	403	32,00	25	1.905	0,79
29	Gorontalo	0	0	0,00	2	591	16,67	3	330	25,00	4	222	33,33	3	149	25,00	12	1.292	1,14
30	Sulawesi Barat	0	0	0,00	0	0	0,00	2	351	20,00	1	138	10,00	7	449	70,00	10	938	0,73
31	Maluku	0	0	0,00	2	461	7,41	5	519	18,52	15	762	55,56	5	402	18,52	27	2.144	1,26
32	Maluku Utara	0	0	0,00	1	284	5,26	3	270	15,79	9	654	47,37	6	142	31,58	19	1.350	1,18
33	Papua Barat	0	0	0,00	0	0	0,00	4	636	22,22	7	434	38,89	7	312	38,89	18	1.382	1,58
34	Papua	0	0	0,00	2	452	5,26	9	1.623	23,68	11	747	28,95	16	616	42,11	38	3.438	0,99
Indonesia		**60**	**25.125**	**2,49**	**308**	**76.955**	**12,80**	**803**	**93.787**	**33,37**	**537**	**33.827**	**22,32**	**698**	**40.049**	**29,01**	**2.406**	**269.743**	**1,07**

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Keterangan : 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Tabel 2.9

JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT
MENURUT KELAS PERAWATAN DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Total Tempat Tidur*	Kelas Perawatan												Ruang Non Rawat Inap ***	
			V V I P		V I P		Kelas I		Kelas II		Kelas III		Ruang Rawat Inap Lainnya**			
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	7.118	137	1,92	513	7,21	677	9,51	923	12,97	4.033	56,66	835	11,73	769	10,80
2	Sumatera Utara	20.010	416	2,08	1.494	7,47	2.928	14,63	4.432	22,15	8.357	41,76	2.383	11,91	1.509	7,54
3	Sumatera Barat	5.994	130	2,17	451	7,52	792	13,21	1.358	22,66	2.608	43,51	655	10,93	563	9,39
4	R i a u	5.892	196	3,33	549	9,32	770	13,07	1.019	17,29	2.450	41,58	908	15,41	540	9,16
5	J a m b i	3.190	74	2,32	306	9,59	435	13,64	540	16,93	1.411	44,23	424	13,29	349	10,94
6	Sumatera Selatan	7.567	159	2,10	508	6,71	1.009	13,33	1.543	20,39	3.514	46,44	834	11,02	551	7,28
7	Bengkulu	1.881	21	1,12	127	6,75	211	11,22	398	21,16	860	45,72	264	14,04	246	13,08
8	Lampung	5.685	144	2,53	422	7,42	634	11,15	1.109	19,51	2.561	45,05	815	14,34	503	8,85
9	Bangka Belitung	1.448	46	3,18	85	5,87	169	11,67	329	22,72	647	44,68	172	11,88	171	11,81
10	Kepulauan Riau	2.319	26	1,12	165	7,12	248	10,69	455	19,62	1.113	47,99	312	13,45	238	10,26
11	DKI Jakarta	21.425	722	3,37	2.271	10,60	3.033	14,16	4.354	20,32	8.036	37,51	3.009	14,04	1.663	7,76
12	Jawa Barat	33.141	514	1,55	2.616	7,89	4.408	13,30	7.170	21,63	13.401	40,44	5.032	15,18	3.201	9,66
13	Jawa Tengah	35.308	622	1,76	3.438	9,74	4.956	14,04	6.285	17,80	15.230	43,13	4.777	13,53	2.993	8,48
14	D.I. Yogyakarta	10.135	176	1,74	608	6,00	855	8,44	1.584	15,63	6.078	59,97	834	8,23	485	4,79
15	Jawa Timur	36.705	602	1,64	3.115	8,49	5.022	13,68	7.689	20,95	15.230	41,49	5.047	13,75	3.091	8,42
16	Banten	9.360	116	1,24	730	7,80	1.420	15,17	2.162	23,10	3.623	38,71	1.309	13,99	1.099	11,74
17	B a l i	5.872	152	2,59	784	13,35	707	12,04	977	16,64	2.448	41,69	804	13,69	637	10,85
18	Nusa Tenggara Barat	3.022	34	1,13	258	8,54	401	13,27	383	12,67	1.496	49,50	450	14,89	333	11,02
19	Nusa Tenggara Timur	4.090	35	0,86	234	5,72	391	9,56	709	17,33	2.201	53,81	520	12,71	466	11,39
20	Kalimantan Barat	5.174	27	0,52	270	5,22	556	10,75	967	18,69	2.674	51,68	680	13,14	480	9,28
21	Kalimantan Tengah	1.789	21	1,17	189	10,56	181	10,12	345	19,28	762	42,59	291	16,27	183	10,23
22	Kalimantan Selatan	4.317	77	1,78	437	10,12	505	11,70	836	19,37	1.904	44,10	558	12,93	356	8,25
23	Kalimantan Timur	5.045	138	2,74	578	11,46	706	13,99	1.047	20,75	1.954	38,73	622	12,33	508	10,07
24	Kalimantan Utara	809	15	1,85	59	7,29	54	6,67	149	18,42	360	44,50	172	21,26	106	13,10
25	Sulawesi Utara	5.008	96	1,92	270	5,39	542	10,82	1.030	20,57	2.419	48,30	651	13,00	392	7,83
26	Sulawesi Tengah	3.433	6	0,17	247	7,19	380	11,07	505	14,71	1.746	50,86	549	15,99	391	11,39
27	Sulawesi Selatan	11.557	301	2,60	1.246	10,78	1.448	12,53	1.912	16,54	4.932	42,68	1.718	14,87	1.215	10,51
28	Sulawesi Tenggara	1.905	14	0,73	135	7,09	204	10,71	303	15,91	1.014	53,23	235	12,34	329	17,27
29	Gorontalo	1.292	31	2,40	125	9,67	109	8,44	221	17,11	650	50,31	156	12,07	131	10,14
30	Sulawesi Barat	938	18	1,92	55	5,86	101	10,77	196	20,90	422	44,99	146	15,57	124	13,22
31	Maluku	2.144	15	0,70	116	5,41	206	9,61	355	16,56	1.215	56,67	237	11,05	241	11,24
32	Maluku Utara	1.350	32	2,37	141	10,44	155	11,48	228	16,89	608	45,04	186	13,78	171	12,67
33	Papua Barat	1.382	6	0,43	56	4,05	97	7,02	282	20,41	824	59,62	117	8,47	177	12,81
34	Papua	3.438	21	0,61	126	3,66	319	9,28	698	20,30	1.910	55,56	364	10,59	483	14,05
Indonesia		**269.743**	**5.140**	**1,91**	**22.724**	**8,42**	**34.629**	**12,84**	**52.493**	**19,46**	**118.691**	**44,00**	**36.066**	**13,37**	**24.694**	**9,15**

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Keterangan :

* Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Tempat tidur di ruang rawat inap lainnya

** Tempat tidur di ruang rawat inap lainnya mencakup ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi

*** Tempat tidur di ruang non rawat inap mencakup tempat tidur di IGD, Kamar Bersalin dan Ruang Operasi. Persentase terhadap total tempat tidur perawatan

Tabel 2.10

JUMLAH LAYANAN HIV AIDS DAN INFEKSI PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (IMS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Rumah Sakit Rujukan ODHA	Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA)	Konseling dan Tes HIV	Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan	Layanan Program Terapi Rumatan Metadon	Layanan TB HIV	Layanan Infeksi Menular Seksual (IMS)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	13	1	14	8	0	3	5
2	Sumatera Utara	22	2	49	16	4	14	31
3	Sumatera Barat	8	4	23	5	1	2	18
4	Riau	9	2	40	12	1	4	30
5	Jambi	10	2	11	10	1	2	10
6	Sumatera Selatan	13	2	23	10	2	5	10
7	Bengkulu	6	1	12	2	0	2	9
8	Lampung	10	1	16	2	1	5	8
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	2	4	3	0	4	7
10	Kepulauan Riau	10	3	17	7	1	7	7
11	DKI Jakarta	25	15	77	53	18	19	53
12	Jawa Barat	50	21	380	42	15	19	340
13	Jawa Tengah	48	23	174	46	7	16	96
14	DI Yogyakarta	10	1	39	8	5	8	26
15	Jawa Timur	43	11	211	48	10	20	168
16	Banten	11	21	66	11	7	5	160
17	Bali	11	3	48	12	6	6	21
18	Nusa Tenggara Barat	11	9	21	7	0	6	29
19	Nusa Tenggara Timur	19	2	4	8	0	2	5
20	Kalimantan Barat	11	4	25	9	3	6	19
21	Kalimantan Tengah	4	1	15	6	0	3	16
22	Kalimantan Selatan	7	2	9	3	0	4	7
23	Kalimantan Timur	15	4	35	9	2	5	36
24	Kalimantan Utara	3	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	6	3	25	6	0	5	10
26	Sulawesi Tengah	9	7	8	10	0	2	12
27	Sulawesi Selatan	17	4	89	20	6	10	27
28	Sulawesi Tenggara	5	1	3	2	0	3	25
29	Gorontalo	4	0	1	1	0	1	10
30	Sulawesi Barat	4	0	6	0	0	2	2
31	Maluku	7	1	21	3	0	3	9
32	Maluku Utara	2	1	1	3	0	2	3
33	Papua Barat	6	30	40	15	0	7	26
34	Papua	17	30	76	68	0	21	55
Indonesia		**450**	**214**	**1.583**	**465**	**90**	**223**	**1.290**

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 2.11

JUMLAH UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Desa	Kelurahan	Desa, Kelurahan dan Nagari	Nagari, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif	Persentase Nagari, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif	Poskesdes yang Beroperasi	Posyandu	Kader / Toma / Toga Terlatih	Rasio Posyandu terhadap Desa/Kelurahan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	6.474	0	6.474	2.577	39,81	2.298	6.914	14.957	1,07
2	Sumatera Utara	5.389	691	6.080	3.680	60,53	3.953	15.307		2,52
3	Sumatera Barat	880	259	3.283	2.611	79,53	2.493	6.956	11.949	2,12
4	Riau	1.592	243	1.835	1.259	68,61	1.152	5.134	26.804	2,80
5	Jambi	1.398	163	1.561	1.092	69,96	954	3.324	8.195	2,13
6	Sumatera Selatan	2.817	377	3.194	2.808	87,91	2.497	6.584	8.216	2,06
7	Bengkulu	1.341	172	1.513	1.467	96,96	1.559	1.983	2.928	1,31
8	Lampung	2.435	205	2.640	2.376	90,00	1.467	8.018	10.508	3,04
9	Kepulauan Bangka Belitung	309	78	387	257	66,41	312	1.027		2,65
10	Kepulauan Riau	275	141	416	377	90,63	202	1.246	2.438	3,00
11	DKI Jakarta	0	267	267	207	77,53	1.176	4.212	27.305	15,78
12	Jawa Barat	5.319	641	5.960	5.865	98,41	5.529	54.709	-	9,18
13	Jawa Tengah	7.809	750	8.578	8.577	99,99	7.720	48.293	115.496	5,63
14	DI Yogyakarta	392	46	438	433	98,86	421	5.703	3.738	13,02
15	Jawa Timur	7.723	776	8.499	8.135	95,72	8.618	46.179	190.466	5,43
16	Banten	1.238	313	1.551	1.416	91,30	524	10.281	34.513	6,63
17	Bali	636	80	716	610	85,20	490	4.783	9.211	6,68
18	Nusa Tenggara Barat	995	142	1.137	1.085	95,43	826	6.910	8.753	6,08
19	Nusa Tenggara Timur	2.950	318	3.268	502	15,36	672	8.573	600	2,62
20	Kalimantan Barat	1.908	89	1.997	974	48,77	1.386	4.626	957	2,32
21	Kalimantan Tengah	1.434	138	1.572	609	38,74	538	2.210	-	1,41
22	Kalimantan Selatan	1.864	143	2.007	1.424	70,95	1.732	3.865	11.811	1,93
23	Kalimantan Timur	833	196	1.029	545	52,96	655	4.116	10.509	4,00
24	Kalimantan Utara	447	35	482	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	1.490	332	1.822	1.024	56,20	1.064	2.199		1,21
26	Sulawesi Tengah	1.839	168	2.007	1.313	65,42	1.177	3.267	17.616	1,63
27	Sulawesi Selatan	2.253	785	3.038	2.752	90,59	2.887	9.184	33.585	3,02
28	Sulawesi Tenggara	1.820	377	2.197	1.829	83,25	1.073	3.207	0	1,46
29	Gorontalo	657	72	729	357	48,97	310	1.302	612	1,79
30	Sulawesi Barat	576	71	647	216	33,38	123	1.731	1.227	2,68
31	Maluku	1.191	33	1.224	509	41,58	605	2.153	605	1,76
32	Maluku Utara	1.063	117	1.180	916	77,63	276	1.526	3.148	1,29
33	Papua Barat	1.628	87	1.715	31	1,81	90	1.122	360	0,65
34	Papua	5.118	107	5.225	1.016	19,44	738	2.991	12.970	0,57
Indonesia		**74.093**	**8.412**	**84.668**	**58.849**	**69,51**	**55.517**	**289.635**	**569.477**	**3,42**

Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan per April 2015; Kementerian Dalam Negeri

Lampiran 2.12

JUMLAH RW, DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF SERTA POSYANDU MENURUT PROVINSI DAN TINGKATAN (STRATA) DI INDONESIA TAHUN 2014

No	Provinsi	RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif					Posyandu				
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	2.049	491	35	2	2.577	1.306	4.494	1.001	113	6.914
2	Sumatera Utara	3.286	209	185	0	3.680	1.750	7.322	5.878	357	15.307
3	Sumatera Barat	2.116	398	88	9	2.611	573	1.979	3.180	1.224	6.956
4	Riau	692	312	183	72	1.259	775	1.977	1.894	488	5.134
5	Jambi	564	355	90	83	1.092	441	1.462	1.112	309	3.324
6	Sumatera Selatan	1.274	838	223	473	2.808	588	2.062	3.319	615	6.584
7	Bengkulu	961	403	96	7	1.467	408	1.057	421	97	1.983
8	Lampung	1.246	624	393	113	2.376	474	2.895	3.557	1.092	8.018
9	Kepulauan Bangka Belitung	211	22	17	7	257	50	349	499	129	1.027
10	Kepulauan Riau	201	94	30	52	377	172	538	425	111	1.246
11	DKI Jakarta	0	5	47	155	207	11	311	1.391	2.499	4.212
12	Jawa Barat	-	-	-	-	5.865	-	-	-	-	54.709
13	Jawa Tengah	3.105	3.287	1.609	576	8.577	4.365	14.778	19.156	9.994	48.293
14	DI Yogyakarta	117	126	115	75	433	135	930	2.486	2.152	5.703
15	Jawa Timur	4.736	2.667	635	97	8.135	1.850	13.795	27.992	2.542	46.179
16	Banten	972	349	91	4	1.416	1.957	5.056	2.748	520	10.281
17	Bali	392	159	57	2	610	113	1.359	3.065	246	4.783
18	Nusa Tenggara Barat	715	308	58	4	1.085	937	3.250	2.430	293	6.910
19	Nusa Tenggara Timur	502	0	0	0	502	8.573	0	0	0	8.573
20	Kalimantan Barat	961	10	3	0	974	1.278	2.391	848	109	4.626
21	Kalimantan Tengah	483	76	38	12	609	995	936	217	62	2.210
22	Kalimantan Selatan	1.105	178	29	112	1.424	1.191	1.803	771	100	3.865
23	Kalimantan Timur	443	60	26	16	545	784	1.611	1.367	354	4.116
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	706	226	89	3	1.024	283	1.100	779	37	2.199
26	Sulawesi Tengah	1.180	112	15	6	1.313	953	1.455	782	77	3.267
27	Sulawesi Selatan	1.570	729	389	64	2.752	1.289	3.062	3.791	1.042	9.184
28	Sulawesi Tenggara	1.248	316	219	46	1.829	645	1.320	999	243	3.207
29	Gorontalo	246	84	26	1	357	32	975	286	9	1.302
30	Sulawesi Barat	133	83	0	0	216	777	696	239	19	1.731
31	Maluku	485	24	0	0	509	1.026	716	365	46	2.153
32	Maluku Utara	625	222	57	12	916	416	557	392	161	1.526
33	Papua Barat	31	0	0	0	31	1.122	0	0	0	1.122
34	Papua	1.016	0	0	0	1.016	2.560	116	128	187	2.991
Indonesia		**33.371**	**12.767**	**4.843**	**2.003**	**58.849**	**37.829**	**80.352**	**91.518**	**25.227**	**289.635**

Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan per April 2015

Keterangan : Jumlah desa siaga di Provinsi DKI Jakarta merupakan jumlah RW Siaga Aktif dan jumlah Desa Siaga Aktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan jumlah Desa Siaga Aktif ditambah Nagari Siaga Aktif

Lampiran 2.13

JUMLAH PROGRAM STUDI DIPLOMA IV INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)
SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2014

No	Poltekkes	Jurusan/Program Studi														Total
		Keperawatan			Kefarmasian	Kesehatan Masyarakat	Gizi	Keterapian Fisik				Keteknisian Medis				
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analis Kesehatan	Teknik Elektromedik	Teknik Radiodiagnostik	Ortotik Prostetik	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	Medan	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	Padang		1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	Riau	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Jambi	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	Palembang	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	Bengkulu	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	Tanjung Karang	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
9	Tanjung Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Jakarta II	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4
13	Jakarta III	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
14	Bandung	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6
15	Tasikmalaya	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
16	Semarang	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	8
17	Surakarta	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	7
18	DI Yogyakarta	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6
19	Surabaya	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6
20	Malang	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21	Banten	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Denpasar	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
23	Mataram	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5
24	Kupang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
25	Pontianak	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6
26	Palangkaraya	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
27	Banjarmasin	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6
28	Kalimantan Timur	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29	Manado	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
30	Palu	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
31	Makassar	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	8
32	Kendari	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
33	Gorontalo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
34	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ternate	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37	Jayapura	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38	Sorong	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Jumlah		**34**	**36**	**9**	**1**	**13**	**19**	**3**	**1**	**1**	**1**	**9**	**2**	**2**	**2**	**133**

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 2.14

JUMLAH JURUSAN/PROGRAM STUDI DIPLOMA III INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)
MENURUT JURUSAN DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Poltekkes	Jurusan / Program Studi																		Total
		Keperawatan			Kefarmasian			Kesmas	Gizi	Keterapian Fisik				Keteknisian Medis						
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Analis Farmasi & Makanan	Jamu	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analis Kesehatan	Teknik Elektromedik	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Teknik Gigi	Ortotik Prostetik	Perekam Informasi Kesehatan	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
1	Aceh	3	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	Medan	1	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
3	Padang	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
4	Riau	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	Jambi	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6	Palembang	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
7	Bengkulu	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
8	Tanjung Karang	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10
9	Tanjung Pinang	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	Pangkal Pinang	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
11	Jakarta I	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
12	Jakarta II	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	7
13	Jakarta III	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
14	Bandung	2	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10
15	Tasikmalaya	2	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10
16	Semarang	5	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	16
17	Surakarta	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	8
18	DI Yogyakarta	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
19	Surabaya	4	3	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	13
20	Malang	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
21	Banten	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
22	Denpasar	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
23	Mataram	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
24	Kupang	3	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
25	Pontianak	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
26	Palangkaraya	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
27	Banjarmasin	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
28	Kalimantan Timur	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
29	Manado	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
30	Palu	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
31	Makassar	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
32	Kendari	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
33	Gorontalo	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
34	Mamuju	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
35	Maluku	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
36	Ternate	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
37	Jayapura	7	4	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16
38	Sorong	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Jumlah		**71**	**62**	**18**	**12**	**1**	**1**	**25**	**32**	**2**	**1**	**1**	**1**	**22**	**2**	**3**	**2**	**2**	**4**	**262**

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 2.15

JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN AJARAN 2012/2013 SAMPAI DENGAN 2014/2015

No	Institusi Poltekkes	Peserta Didik Poltekkes			Jumlah
		2012	2013	2014*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	KEPERAWATAN				
	1 Keperawatan	22.931	22.250	20.524	65.705
	2 Kebidanan	16.959	19.278	15.503	51.740
	3 Keperawatan Gigi	4.920	5.870	3.248	14.038
	Sub Total	**44.810**	**47.398**	**39.275**	**131.483**
B	KEFARMASIAN				
	1 Analis Farmasi dan Makanan	285	222	148	655
	2 Farmasi	2.305	2.490	2.602	7.397
	3 Jamu	64	75	76	215
	Sub Total	**2.654**	**2.787**	**2.826**	**8.267**
C	KESEHATAN MASYARAKAT				
	1 Kesehatan Lingkungan	7.000	5.945	5.158	18.103
	Sub Total	**7.000**	**5.945**	**5.158**	**18.103**
D	GIZI				
	1 Akademi Gizi (AKZI)	7.570	6.097	6.009	19.676
	Sub Total	**7.570**	**6.097**	**6.009**	**19.676**
E	KETERAPIAN FISIK				
	1 Fisioterapi	760	944	335	2.039
	2 Okupasi Terapi	300	334	94	728
	3 Terapi Wicara	220	259	89	568
	4 Akupunktur	220	191	45	456
	Sub Total	**1.500**	**1.728**	**563**	**3.791**
F	KETEKNISIAN MEDIS				
	1 Analis Kesehatan	4.730	4.766	4.763	14.259
	2 Teknik Gigi	440	294	164	898
	3 Teknik Radiologi & Radioterapi	915	910	579	2.404
	4 Rekam Medis dan Info Kes	180	119	421	720
	5 Teknik Elektro Medik	715	503	332	1.550
	6 Ortetik Prostetik	440	201	68	709
	Sub Total	**7.420**	**6.793**	**6.327**	**20.540**
Total		**70.954**	**70.748**	**60.158**	**201.860**

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 2.16

JUMLAH PESERTA DIDIK PRORAM DIPLOMA III POLTEKKES BERDASARKAN JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2014

No	Poltekkes	Keperawatan			Kefarmasian			Kesmas	Gizi	Keterapian Fisik				Keteknisian Medis						Jumlah
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Analis Farmasi dan Makanan	Jamu	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Teknik Gigi	Analis Kesehatan	Teknik Radio Diagnostik	Teknik Elektromedik	Ortotik Prostetik	PIKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(24)
1	Aceh	855	588	190	252	0	0	171	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.307
2	Medan	332	903	335	304	0	0	295	300	0	0	0	0	0	297	0	0	0	0	2.766
3	Padang	607	706	241	0	0	0	377	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.336
4	Riau	167	167	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572
5	Jambi	281	301	160	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891
6	Palembang	975	242		221	0	0	0	193	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	1.776
7	Bengkulu	444	460	0	0	0	0	215	243	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	1.573
8	Tanjung Karang	398	458	118	129	0	0	244	163	0	0	0	0	96	275	0	0	0	0	1.881
9	Tanjung Pinang	240	249	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
10	Pangkal Pinang	143	144	0	129	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544
11	Jakarta I	224	225	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	596
12	Jakarta II	0	0	0	190	148	0	95	111	0	0	0	0	68	0	127	107	0	0	846
13	Jakarta III	616	552	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	248	0	0	0	0	1.416
14	Bandung	565	567	156	204	0	0	183	223	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	2.159
15	Tasikmalaya	565	338	150	83	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	1.589
16	Semarang	1.374	871	246	0	0	0	230	218	0	0	0	0	0	239	452	0	0	104	3.734
17	Surakarta	203	117	0	0	0	76	0	0	48	94	89	45	0	0	0	0	25	0	697
18	DI Yogyakarta	230	244	200	0	0	0	229	191	0	0	0	0	0	295	0	0	0	0	1.389
19	Surabaya	843	519	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	1.957
20	Malang	914	799	0	0	0	0	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	2.168
21	Banten	376	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	849
22	Denpasar	295	175	119	0	0	0	128	148	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	998
23	Mataram	511	333	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	1.155
24	Kupang	1.059	604	199	247	0	0	268	223	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	2.828
25	Pontianak	337	288	199	0	0	0	204	216	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	1.455
26	Palangkaraya	230	233	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581
27	Banjarmasin	193	219	154	0	0	0	122	129	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	938
28	Kalimantan Timur	425	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	1.075
29	Manado	332	309	174	198	0	0	198	170	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	1.655
30	Palu	490	416	0	0	0	0	310	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.381
31	Makassar	868	299	329	324	0	0	268	283	287	0	0	0	0	296	0	0	0	0	2.954
32	Kendari	281	290	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	881
33	Gorontalo	425	423	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067
34	Mamuju	332	309	174	198	0	0	198	170	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	1.655
35	Maluku	1.036	564	0	0	0	0	315	277	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	2.398
36	Ternate	381	382	0	0	0	0	136	113	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	1.174
37	Jayapura	2.255	1.045	0	123	0	0	225	118	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	3.935
38	Sorong	722	499	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265
Total		**20.524**	**15.503**	**3.248**	**2.602**	**148**	**76**	**5.158**	**6.009**	**335**	**94**	**89**	**45**	**164**	**4.763**	**579**	**332**	**68**	**421**	**60.158**

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 2.17

JUMLAH PESERTA DIDIK PRORAM DIPLOMA IV POLTEKKES BERDASARKAN JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2014

No	Poltekkes	Keperawatan			Kefarmasian	Keterapian Fisik			Keteknisian Medis				Jumlah
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analis Kesehatan	Teknik Elektromedik	Teknik Radio Diagnostik	Ortotik Prostetik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)	(13)	(14)	(16)	(18)	(19)	(20)	(24)
1	Aceh	78	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	427
2	Medan	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271
3	Padang	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315
4	Riau	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
5	Jambi	66	79	46	0	0	0	0	0	0	0	0	191
6	Palembang	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
7	Bengkulu	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
8	Tanjung Karang	81	158	0	0	0	0	0	80	0	0	0	392
9	Tanjung Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
12	Jakarta II	0	0	0	0	0	0	0	0	296	260	0	912
13	Jakarta III	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	273
14	Bandung	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	67
15	Tasikmalaya	0	144	57	0	0	0	0	0	0	0	0	201
16	Semarang	139	155	113	0	0	0	0	0	0	155	0	756
17	Surakarta	130	77	0	0	98	94	78	0	0	0	90	748
18	DI Yogyakarta	76	80	40	0	0	0	0	40	0	0	0	434
19	Surabaya	37	78	66	0	0	0	0	86	75	0	0	431
20	Malang	229	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778
21	Banten	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
22	Denpasar	79	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243
23	Mataram	242	148	0	0	0	0	0	139	0	0	0	647
24	Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pontianak	215	118	0	0	0	0	0	91	0	0	0	737
26	Palangkaraya	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
27	Banjarmasin	78	80	79	0	0	0	0	77	0	0	0	551
28	Kalimantan Timur	84	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
29	Manado	178	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
30	Palu	117	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
31	Makassar	51	50	49	0	0	0	0	100	0	0	0	544
32	Kendari	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
33	Gorontalo	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
36	Ternate	41	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
37	Jayapura	89	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293
38	Sorong	116	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
Total		**2.466**	**2.893**	**604**	**0**	**98**	**94**	**78**	**688**	**371**	**415**	**115**	**11.591**

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 2.18

JUMLAH SARANA PRODUKSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Industri Farmasi	Industri Obat Tradisional (IOT)	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Produksi Alat Kesehatan	Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT)	Industri Kosmetika
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	0	0	9	0	0	0
2	Sumatera Utara	5	94	6	8	13	47
3	Sumatera Barat	0	0	22	1	0	12
4	Riau	0	0	0	0	1	0
5	Jambi	0	0	2	0	0	1
6	Sumatera Selatan	1	0	0	1	1	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	5	5	0	2	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	2	5	2	0
11	DKI Jakarta	37	11	105	41	48	67
12	Jawa Barat	94	190	222	46	59	151
13	Jawa Tengah	23	12	283	19	20	45
14	DI Yogyakarta	2	73	73	3	0	10
15	Jawa Timur	47	15	216	23	48	116
16	Banten	30	58	63	17	48	104
17	Bali	0	1	10	0	1	24
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	8	1	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	9	7	1	0	1
21	Kalimantan Tengah	0	2	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	1	13	0	0	21
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
24	Sulawesi Utara	0	0	8	0	1	0
25	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Selatan	0	1	33	0	2	2
27	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	0	0	1	0	0	0
29	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
30	Maluku	0	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**239**	**473**	**1.088**	**166**	**246**	**605**

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Lampiran 2.19

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Pedagang Besar Farmasi	Apotek	Toko Obat	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	26	292	569	32
2	Sumatera Utara	133	1.265	934	56
3	Sumatera Barat	53	509	324	32
4	Riau	89	480	249	19
5	Jambi	34	298	172	19
6	Sumatera Selatan	65	418	134	54
7	Bengkulu	18	210	73	20
8	Lampung	55	465	95	30
9	Kepulauan Bangka Belitung	15	148	88	3
10	Kepulauan Riau	34	244	282	14
11	DKI Jakarta	432	2.329	326	840
12	Jawa Barat	513	3.677	1.105	204
13	Jawa Tengah	333	2.681	297	100
14	DI Yogyakarta	50	560	51	24
15	Jawa Timur	367	3.250	404	227
16	Banten	96	1.152	192	87
17	Bali	75	606	249	30
18	Nusa Tenggara Barat	29	265	82	29
19	Nusa Tenggara Timur	24	198	104	24
20	Kalimantan Barat	46	224	336	36
21	Kalimantan Tengah	4	242	181	4
22	Kalimantan Selatan	41	356	405	21
23	Kalimantan Timur	44	486	213	27
24	Sulawesi Utara	39	186	105	15
25	Sulawesi Tengah	27	326	211	8
26	Sulawesi Selatan	102	675	368	85
27	Sulawesi Tenggara	14	254	137	8
28	Gorontalo	7	119	37	0
29	Sulawesi Barat	1	69	46	0
30	Maluku	17	139	113	4
31	Maluku Utara	7	103	21	4
32	Papua Barat	10	122	52	1
33	Papua	46	286	54	20
Indonesia		**2.846**	**22.634**	**8.009**	**2.077**

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Lampiran 2.20

PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI INDONESIA
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2014

No	Nama Obat	Kemasan	Kebutuhan	Ketersediaan	Ketersediaan (%)	No	Nama Obat	Kemasan	Kebutuhan	Ketersediaan	Ketersediaan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Alopurinol tablet 100 mg	tablet	28.833.065	36.575.040	126,85%	38	Fenitoin Natriun Injeksi 50 mg/ml	ampul	80.408	54.443	67,71%
2	Aminofilin tablet 200 mg	tablet	17.677.729	20.857.886	117,99%	39	Fenobarbital Injeksi I.m/I.v 50 mg/ml	ampul	645.877	378.569	58,61%
3	Aminofilin injeksi 24 mg/ml	tablet	571.563	595.150	104,13%	40	Fenobarbital tablet 30 mg	tablet	13.113.450	16.712.573	127,45%
4	Amitripilin tablet salut 25 mg (HCL)	tablet	4.568.173	6.906.233	151,18%	41	Fenoksimetil Penisilin tablet 250 mg	tablet	1.140.951	1.614.179	141,48%
5	Amoksisilin kapsul 250 mg	kapsul	51.917.170	89.691.325	172,76%	42	Fenoksimetil Penisilin tablet 500 mg	tablet	2.744.017	3.623.214	132,04%
6	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	337.967.423	398.719.963	117,98%	43	Fenol Gliserol tetes telinga 10%	botol	791.242	621.896	78,60%
7	Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 mg	botol	13.848.877	14.327.775	103,46%	44	Fitomenadion (Vit. K1) injeksi 10 mg/ml	ampul	2.577.450	2.690.431	104,38%
8	Metampiron tablet 500 mg	tablet	120.673.705	110.581.051	91,64%	45	Fitomenadion (Vit. K1) tablet salut gula 10 mg	tablet	11.057.849	12.190.269	110,24%
9	Metampiron injeksi 250 mg	ampul	8.117.790	6.839.474	84,25%	46	Furosemid tablet 40 mg	tablet	10.917.942	14.922.937	136,68%
10	Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi:	tablet	223.634.801	275.267.066	123,09%	47	Gameksan lotion 1 %	botol	625.420	601.458	96,17%
	Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium					48	Garam Oralit I serbuk Kombinasi : Natrium 0,70 g ,	sach	25.935.711	34.224.978	131,96%
	Hidroksida 200 mg						Kalium klorida 0,30 g, Tribatrium Sitrt dihidrat 0,58 g				
11	Anti Bakteri DOEN saleb kombinasi : Basitrasin 500	tube	3.787.829	3.713.773	98,04%	49	Gentian Violet Larutan 1 %	botol	1.621.037	1.759.402	108,54%
	IU/g + polimiksin 10.000 IU/g					50	Glibenklamida tablet 5 mg	tablet	32.543.776	44.095.436	135,50%
12	Antihemoroid DOEN kombinasi : Bismut Subgalat 150	supp	939.540	698.333	74,33%	51	Gliseril Gualakolat tablet 100 mg	tablet	226.260.560	296.660.968	131,11%
	mg + Heksaklorofen 250 mg					52	Gliserin	botol	1.060.287	799.810	75,43%
13	Antifungi DOEN Kombinasi : Asam Benzoat 6% +	pot	1.053.584	1.026.869	97,46%	53	Glukosa larutan infus 5%	botol	1.509.353	1.947.984	129,06%
	Asam Salisilat 3%					54	Glukosa larutan infus 10%	botol	186.811	207.153	110,89%
14	Antimigren : Ergotamin tartrat 1 mg + Kofein 50 mg	tablet	3.310.065	3.167.607	95,70%	55	Glukosa larutan infus 40% steril (produk lokal)	ampul	593.866	521.730	87,85%
15	Antiparkinson DOEN tablet kombinasi : Karbidopa	tablet	1.174.247	426.067	36,28%	56	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	tablet	17.748.244	23.996.981	135,21%
	mg + Levodopa 250 mg					57	Haloperidol tablet 0,5 mg	tablet	2.915.361	4.416.234	151,48%
16	Aqua Pro Injeksi Steril, bebas pirogen	vial	6.348.633	3.924.770	61,82%	58	Haloperidol tablet 1,5 mg	tablet	7.425.414	10.965.395	147,67%
17	Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg	tablet	198.882.276	198.760.714	99,94%	59	Haloperidol tablet 5 mg	tablet	4.825.271	8.174.296	169,41%
18	Asam Asetisalisilat tablet 100 mg (Asetosal)	tablet	2.609.773	4.275.935	163,84%	60	Hidroklorotiazida tablet 25 mg	tablet	23.692.590	23.702.500	100,04%
19	Asam Asetisalisilat tablet 500 mg (Asetosal)	tablet	1.301.791	2.016.900	154,93%	61	Hidrkortison krim 2,5%	tube	4.597.228	4.765.435	103,66%
20	Atropin sulfat tablet 0,5 mg	tablet	886.806	860.323	97,01%	62	Ibuprofen tablet 200 mg	tablet	35.540.861	37.417.635	105,28%
21	Atropin tetes mata 0,5%	botol	15.155	10.786	71,17%	63	Ibuprofen tablet 400 mg	tablet	67.679.571	75.917.983	112,17%
22	Atropin injeksi I.m/Iv/s.k. 0,25 mg/mL - 1 mL (sulfat)	ampul	524.733	415.530	79,19%	64	Isosorbid Dinitrat Tablet Sublingual 5 mg	tablet	9.920.490	9.157.086	92,30%
23	Betametason krim 0,1 %	krim	3.293.832	3.913.102	118,80%	65	Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg	tablet	118.206.808	135.498.291	114,63%
24	Deksametason Injeksi I.v. 5 mg/ml	ampul	9.866.067	10.283.859	104,23%	66	Kaptopril tablet 12,5 mg	tablet	43.612.125	53.280.289	122,17%
25	Deksametason tablet 0,5 mg	tablet	194.131.328	216.789.453	111,67%	67	Kaptopril tablet 25 mg	tablet	74.541.751	96.972.466	130,09%
26	Dekstran 70-larutan infus 6% steril	botol	623.272	413.690	66,37%	68	Karbamazepim tablet 200 mg	tablet	4.329.070	5.310.429	122,67%
27	Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (HBr)	botol	3.781.159	2.561.722	67,75%	69	Ketamin Injeksi 10 mg/ml	vial	1.491.916	479.822	32,16%
28	Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr)	tablet	52.588.427	41.814.499	79,51%	70	Klofazimin kapsul 100 mg microzine	kapsul	1.645.894	1.260.788	76,60%
29	Diazepam Injeksi 5mg/ml	ampul	2.069.444	1.682.937	81,32%	71	Kloramfenikol kapsul 250 mg	kapsul	35.008.527	29.638.149	84,66%
30	Diazepam tablet 2 mg	tablet	20.238.220	22.054.276	108,97%	72	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	botol	12.961.762	11.166.134	86,15%
31	Diazepam tablet 5 mg	tablet	5.366.743	3.344.338	62,32%	73	Kloraniramina mealeat (CTM) tablet 4 mg	tablet	377.694.059	399.938.909	105,89%
32	Difenhidramin Injeksi I.M. 10 mg/ml (HCL)	ampul	3.580.184	4.527.897	126,47%	74	Klorpromazin injeksi i.m 5 mg/ml-2ml (HCL)	ampul	2.203.838	2.128.917	96,60%
33	Diagoksin tablet 0,25 mg	tablet	5.685.574	6.495.937	114,25%	75	Klorpromazin injeksi i.m 25 mg/ml (HCL)	ampul	479.556	338.205	70,52%
34	Efedrin tablet 25 mg (HCL)	tablet	23.417.268	19.562.060	83,54%	76	Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCL)	tablet	4.409.260	4.741.711	107,54%
35	Ekstrks belladona tablet 10 mg	tablet	11.994.418	15.200.893	126,73%	77	Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg (HCL)	tablet	9.139.604	12.663.839	138,56%
36	Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL)	ampul	5.144.653	3.319.374	64,52%	78	Anti Malaria DOEN Kombinasi Pirimetamin 25 mg +	tablet	2.932.013	1.454.048	49,59%
37	Etakridin larutan 0,1%	botol	544.419	423.105	77,72%		Sulfadoxin 500 mg				

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 2.21

PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI INDONESIA
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2014

No	Nama Obat	Kemasan	Kebutuhan	Ketersediaan	Ketersediaan (%)	No	Nama Obat	Kemasan	Kebutuhan	Ketersediaan	Ketersediaan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
79	Kotrimosazol Suspensi Kombinasi:	botol	9.253.499	9.310.180	100,61%	112	Primakuin tablet 15 mg	tablet	12.800.074	14.135.092	110,43%
	Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/ 5 ml					113	Propillitiourasil tablet 100 mg	tablet	3.540.343	3.814.752	107,75%
80	Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi:	tablet	73.871.815	87.079.179	117,88%	114	Propanol tablet 40 mg (HCL)	tablet	3.715.197	5.161.195	138,92%
	Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg					115	Reserpin tablet 0,10 mg	tablet	826.823	410.900	49,70%
81	Kotrimosazol DOEN II (pediatrik) Kombinasi:	tablet	13.456.732	16.125.507	119,83%	116	Reserpin tablet 0,25 mg	tablet	7.212.127	6.395.428	88,68%
	Sulfametoksazol 100 mg, Trimetoprim 20 mg					117	Ringer Laktat larutan infus	botol	7.036.941	9.042.060	128,49%
82	Kuinin (kina) tablet 200 mg	tablet	5.762.052	3.363.586	58,37%	118	Salep 2-4, kombinasi: Asam Salisilat 2% +	tube	1.444.330	1.479.854	102,46%
83	Kuinin Dihidrokklorida injeksi 25%-2 ml	ampul	316.277	358.480	113,34%		Belerang endap 4%				
84	Lidokain injeksi 2% (HCL) + Epinefrin 1 : 80.000-2 ml	vial	4.921.903	5.307.618	107,84%	119	Salisil bedak 2%	kotak	2.646.810	2.836.597	107,17%
85	Magnesium Sulfat inj (IV) 20%-25 ml	vial	209.837	107.989	51,46%	120	Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I)	vial	63.208	65.685	103,92%
86	Magnesium Sulfat inj (IV) 40%-25 ml	vial	209.227	151.330	72,33%	121	Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 50 ml (ABU II)	vial	15.946	11.541	72,38%
87	Magnesium Sulfat serbuk 30 gram	sach	42.341	37.254	87,99%	122	Serum Anti Difteri Injeksi 20.000 IU/vial (A.D.S.)	vial	8.427	4.072	48,32%
88	Mebendazol sirup 100 mg / 5 ml	botol	66.838	58.974	88,23%	123	Serum Anti Tetanus Injeksi 1.500 IU/ampul	ampul	247.747	75.474	30,46%
89	Mebendazol tablet 100 mg	tablet	884.689	781.490	88,33%		(A.T.S.)				
90	Metilergometrin Maleat (Metilergometrin) tablet	tablet	7.969.107	7.748.766	97,24%	124	Serum Anti Tetanus Injeksi 20.000 IU/vial (A.T.S.)	vial	137.146	217.460	158,56%
	salut 0,125 mg					125	Sianokobalamin (Vitamin B12) injeksi 500 mcg	ampul	6.090.463	6.529.048	107,20%
91	Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg -1 ml	ampul	2.104.247	2.384.798	113,33%	126	Sulfasetamida Natrium tetes mata 15 %	botol	2.085.308	1.251.119	60,00%
92	Metronidazol tablet 250 mg	tablet	22.497.982	26.241.413	116,64%	127	Tetrakain HCL tetes mata 0,5%	botol	1.682.126	1.406.893	83,64%
93	Natrium Bikarbonat tablet 500 mg	tablet	18.972.799	19.119.110	100,77%	128	Tetrasiklin kapsul 250 mg	kapsul	38.632.511	39.808.511	103,04%
94	Natrium Fluoresein tetes mata 2 %	botol	435.429	593.847	136,38%	129	Tetrasiklin kapsul 500 mg	kapsul	17.258.505	16.111.414	93,35%
95	Natrium Klorida larutan infus 0,9 %	botol	1.527.304	2.048.740	134,14%	130	Tiamin (vitamin B1) injeksi 100 mg/ml	ampul	6.635.814	10.141.671	152,83%
96	Natrium Thiosulfat injeksi I.v. 25 %	ampul	159.095	93.014	58,46%	131	Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCL/Nitrat)	tablet	170.289.980	159.072.228	93,41%
97	Nistatin tablet salut 500.000 IU/g	tablet	1.534.252	2.305.084	150,24%	132	Tiopental Natrium serbuk injeksi 1000 mg/amp	ampul	1.838.614	1.853.689	100,82%
98	Nistatin Vaginal tablet salut 100.000 IU/g	tablet	2.090.428	2.795.828	133,74%	133	Triheksifenidil tablet 2 mg	tablet	14.172.161	14.549.048	102,66%
99	Obat Batuk hitam (O.B.H.)	botol	5.607.316	3.773.631	67,30%	134	Vaksin Rabies Vero	vial	7.757.286	7.212.875	92,98%
100	Oksitetrasiklin HCL salep mata 1 %	tube	2.453.717	2.646.619	107,86%	135	Vitamin B Kompleks tablet	tablet	307.566.554	292.546.158	95,12%
101	Oksitetrasiklin injeksi I.m. 50 mg/ml-10 ml	vial	278.661	253.838	91,09%						
102	Oksitosin injeksi 10 UI/ml-1 ml	ampul	2.782.262	2.424.875	87,15%	136	BCG	vial	2.369.743	1.038.422	43,82%
103	Paracetamol sirup 120 mg / 5 ml	botol	9.706.534	11.717.486	120,72%	137	T T	vial	2.076.888	906.375	43,64%
104	Paracetamol tablet 100 mg	tablet	22.699.315	23.589.472	103,92%	138	D T	vial	621.323	400.758	64,50%
105	Paracetamol tablet 500 mg	tablet	500.270.213	587.721.593	117,48%	139	CAMPAK 10 Dosis	vial	2.134.807	1.357.531	63,59%
106	Pilokarpin tetes mata 2 % (HCL/Nitrat)	botol	6.180.002	7.679.805	124,27%	140	POLIO 10 Dosis	vial	3.303.649	2.006.741	60,74%
107	Pirantel tab. Score (base) 125 mg	tablet	12.445.482	15.149.711	121,73%	141	DTP-HB	vial	2.940.847	1.520.162	51,69%
108	Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCL)	tablet	140.460.490	146.272.031	104,14%	142	HEPATITIS B 0,5 ml ADS	vial	2.726.460	1.967.082	72,15%
109	Povidon Iodida larutan 10 %	botol	4.983.561	5.107.492	102,49%	143	POLIO 20 Dosis	vial	197.061	274.392	139,24%
110	Povidon Iodida larutan 10 %	botol	5.703.359	6.247.443	109,54%	144	CAMPAK 20 Dosis	vial	175.996	130.823	74,33%
111	Prednison tablet 5 mg	tablet	117.628.116	102.076.187	86,78%						

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 2.22

PENGGUNAAN OBAT GENERIK PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Penggunaan di Puskesmas (%)	Penggunaan di Rumah Sakit (%)	Rata-Rata Penggunaan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	99,59	72,91	86,25
2	Sumatera Utara	96,94	84,47	90,71
3	Sumatera Barat	98,16	73,12	85,64
4	Riau	94,50	75,25	84,88
5	Kepulauan Riau	97,00	89,33	93,17
6	Bengkulu	92,00	78,00	85,00
7	Jambi	97,96	65,69	81,83
8	Sumatera Selatan	87,55	80,18	83,87
9	Lampung	96,49	79,63	88,06
10	Kepuluan Bangka Belitung	97,27	86,35	91,81
11	Banten	94,42	65,82	80,12
12	DKI Jakarta	95,50	66,31	80,91
13	Jawa Tengah	82,07	64,32	73,20
14	Jawa Barat	98,67	73,53	86,10
15	DI Yogyakarta	98,22	68,84	83,53
16	Jawa Timur	88,13	84,39	86,26
17	Bali	96,14	51,66	73,90
18	Nusa Tenggara Barat	98,66	76,32	87,49
19	Nusa Tenggara Timur	86,61	73,22	79,92
20	Kalimantan Barat	96,44	73,77	85,11
21	Kalimantan Timur	93,40	61,20	77,30
22	Kalimantan Tengah	95,52	67,75	81,64
23	Kalimantan Selatan	97,71	61,15	79,43
24	Sulawesi Utara	100,00	94,96	97,48
25	Sulawesi Barat	100,00	92,47	96,24
26	Sulawesi Tenggara	95,00	87,00	91,00
27	Sulawesi Selatan	99,56	78,31	88,94
28	Sulawesi Tengah	88,54	93,67	91,11
29	Gorontalo	100,00	84,07	92,04
30	Maluku	97,28	81,23	89,26
31	Maluku Utara	94,50	80,50	87,50
32	Papua	100,00	71,13	85,57
33	Papua Barat	91,04	87,25	89,15
Indonesia		**95,30**	**76,48**	**85,89**

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.1

REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan												Tenaga Non Kesehatan	Total SDM Kesehatan
		Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Keterapian Fisik	Keteknisian Medis	Jumlah		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Aceh	1.191	1.452	278	9.497	9.319	1.193	2.121	880	618	378	1.355	28.282	4.777	33.059
2	Sumatera Utara	3.514	3.042	846	12.465	11.832	1.760	1.437	534	903	279	1.104	37.716	5.738	43.454
3	Sumatera Barat	819	1.083	386	6.032	4.391	899	973	375	429	129	1.123	16.639	3.971	20.610
4	Riau	1.163	1.184	373	5.498	4.056	947	552	220	233	80	618	14.924	4.140	19.064
5	Jambi	527	723	182	4.028	2.951	533	523	286	174	68	463	10.458	2.653	13.111
6	Sumatera Selatan	1.315	1.112	242	6.127	4.221	932	1.651	519	382	120	1.026	17.647	5.924	23.571
7	Bengkulu	128	426	107	2.975	2.436	505	760	194	214	31	305	8.081	1.182	9.263
8	Lampung	621	1.002	274	5.489	3.580	468	757	412	240	82	627	13.552	3.746	17.298
9	Kepulauan Bangka Belitung	164	331	65	2.032	805	212	145	97	124	37	295	4.307	1.535	5.842
10	Kepulauan Riau	300	488	131	3.128	1.032	234	164	73	97	32	260	5.939	2.113	8.052
11	DKI Jakarta	7.056	2.723	1.205	11.916	2.069	2.779	506	259	302	236	1.509	30.560	18.505	49.065
12	Jawa Barat	6.882	4.828	1.789	25.181	12.098	3.371	1.126	1.066	1.231	378	3.126	61.076	25.769	86.845
13	Jawa Tengah	5.422	4.587	1.324	27.421	15.639	3.706	1.870	1.183	1.509	666	4.182	67.509	29.850	97.359
14	DI Yogyakarta	1.450	998	336	4.870	1.163	763	118	247	279	138	1.083	11.445	5.757	17.202
15	Jawa Timur	5.963	4.606	1.590	25.324	13.903	3.600	1.144	1.113	1.469	420	3.086	62.218	31.796	94.014
16	Banten	2.373	1.520	606	6.825	3.218	1.056	747	177	333	198	1.113	18.166	6.780	24.946
17	Bali	1.378	1.049	292	4.477	2.177	510	457	310	296	70	538	11.554	6.249	17.803
18	Nusa Tenggara Barat	451	616	161	4.867	2.020	346	368	419	448	52	610	10.358	3.304	13.662
19	Nusa Tenggara Timur	347	707	156	5.436	2.743	640	529	576	382	85	569	12.170	4.125	16.295
20	Kalimantan Barat	434	655	146	7.527	2.215	517	581	336	374	51	622	13.458	3.179	16.637
21	Kalimantan Tengah	190	473	96	3.963	1.717	345	388	197	342	24	290	8.025	1.727	9.752
22	Kalimantan Selatan	675	826	202	5.292	2.645	616	837	434	431	43	595	12.596	2.948	15.544
23	Kalimantan Timur	747	828	273	4.341	1.663	550	482	187	206	81	545	9.903	4.244	14.147
24	Kalimantan Utara	47	203	61	1.303	462	106	189	48	53	7	95	2.574	386	2.960
25	Sulawesi Utara	650	899	102	4.049	1.259	394	247	356	322	85	140	8.503	2.272	10.775
26	Sulawesi Tengah	361	509	112	6.301	2.517	537	991	417	153	47	211	12.156	1.537	13.693
27	Sulawesi Selatan	1.902	1.496	629	11.326	5.058	1.287	2.225	701	831	279	1.533	27.267	5.063	32.330
28	Sulawesi Tenggara	135	403	107	3.501	1.679	362	634	385	472	32	201	7.911	842	8.753
29	Gorontalo	147	256	43	1.101	646	218	434	162	198	18	87	3.310	1.338	4.648
30	Sulawesi Barat	60	220	83	1.854	919	180	301	169	181	41	159	4.167	406	4.573
31	Maluku	126	385	120	4.512	1.197	147	321	224	269	21	108	7.430	974	8.404
32	Maluku Utara	112	268	52	2.486	982	218	494	77	163	29	130	5.011	663	5.674
33	Papua Barat	100	178	35	2.031	734	150	70	101	126	15	126	3.666	670	4.336
34	Papua	244	711	98	4.006	1.602	327	212	175	280	31	370	8.056	1.281	9.337
Indonesia		**46.994**	**40.787**	**12.502**	**237.181**	**124.948**	**30.408**	**24.354**	**12.909**	**14.064**	**4.283**	**28.204**	**576.634**	**195.444**	**772.078**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.2

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PUSKESMAS
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Teregistrasi	Jumlah Tenaga Kesehatan													Tenaga Non Kesehatan	Total SDM Kesehatan
			Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Perawat Gigi	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Keterapian Fisik	Keteknisian Medis	Jumlah		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
1	Aceh	337	1	774	156	4.925	394	7.987	748	1.956	710	484	159	370	18.664	1.257	19.921
2	Sumatera Utara	570	6	1.459	530	6.872	472	11.228	665	1.096	423	753	47	317	23.868	717	24.585
3	Sumatera Barat	264	3	585	287	2.590	365	3.838	417	906	299	284	39	357	9.970	707	10.677
4	Riau	211	6	578	217	2.672	176	3.078	298	492	170	154	3	203	8.047	543	8.590
5	Jambi	176	0	338	106	2.149	285	2.593	256	447	234	122	15	190	6.735	386	7.121
6	Sumatera Selatan	321	7	457	93	3.375	308	3.551	340	1.583	427	268	20	282	10.711	794	11.505
7	Bengkulu	180	0	254	66	1.650	96	2.091	355	636	160	137	2	67	5.514	270	5.784
8	Lampung	290	4	518	193	3.158	394	3.028	251	726	320	164	0	189	8.945	608	9.553
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	0	140	38	964	65	617	62	88	64	81	1	68	2.188	349	2.537
10	Kepulauan Riau	73	3	307	87	1.620	181	764	90	149	63	61	3	66	3.394	381	3.775
11	DKI Jakarta	340	34	645	484	2.333	235	1.029	245	386	189	144	6	119	5.849	1.181	7.030
12	Jawa Barat	1.050	9	1.889	806	8.398	1.251	9.667	602	926	886	795	10	426	25.665	3.910	29.575
13	Jawa Tengah	875	7	1.931	738	7.213	927	12.714	1.004	1.751	826	906	83	911	29.011	5.618	34.629
14	DI Yogyakarta	121	1	365	177	863	245	776	165	93	163	165	17	278	3.308	1.265	4.573
15	Jawa Timur	960	31	1.833	945	10.104	980	11.379	1.056	973	831	887	47	663	29.729	8.371	38.100
16	Banten	231	0	475	273	1.804	203	2.436	174	468	134	217	3	225	6.412	747	7.159
17	B a l i	120	0	320	170	1.057	213	1.296	120	409	212	129	5	90	4.021	512	4.533
18	Nusa Tenggara Barat	158	0	254	105	2.583	186	1.645	158	348	375	366	8	255	6.283	1.187	7.470
19	Nusa Tenggara Timur	370	0	370	109	2.994	370	2.361	325	485	491	294	18	187	8.004	692	8.696
20	Kalimantan Barat	238	3	314	79	5.397	651	1.845	244	543	267	291	3	253	9.890	690	10.580
21	Kalimantan Tengah	195	2	274	58	2.553	212	1.502	150	370	178	231	0	113	5.643	385	6.028
22	Kalimantan Selatan	228	3	446	134	2.638	392	2.266	289	795	325	311	3	268	7.870	524	8.394
23	Kalimantan Timur	174	1	342	158	1.961	114	1.200	184	447	143	130	6	91	4.777	901	5.678
24	Kalimantan Utara	48	0	137	51	739	37	359	64	175	41	46	0	36	1.685	90	1.775
25	Sulawesi Utara	187	1	479	26	1.852	223	1.025	188	176	274	242	23	2	4.511	209	4.720
26	Sulawesi Tengah	184	0	244	63	3.567	201	1.880	206	863	339	98	1	49	7.511	364	7.875
27	Sulawesi Selatan	446	3	690	386	4.744	538	3.874	488	1.907	541	560	38	458	14.227	909	15.136
28	Sulawesi Tenggara	269	0	265	66	2.298	106	1.416	192	588	346	387	0	41	5.705	228	5.933
29	Gorontalo	93	0	121	21	652	46	453	138	382	140	132	1	4	2.090	291	2.381
30	Sulawesi Barat	94	0	153	65	1.164	57	787	90	278	151	156	22	54	2.977	177	3.154
31	Maluku	197	1	219	91	3.492	93	981	48	257	155	196	7	16	5.556	257	5.813
32	Maluku Utara	127	0	145	33	1.766	155	801	82	422	68	148	6	27	3.653	123	3.776
33	Papua Barat	149	2	61	14	1.215	26	530	42	46	79	96	1	10	2.122	48	2.170
34	Papua	394	3	393	46	2.911	22	1.353	115	165	124	189	2	165	5.488	205	5.693
Indonesia		**9.731**	**131**	**17.775**	**6.871**	**104.273**	**10.219**	**102.350**	**9.851**	**21.332**	**10.148**	**9.624**	**599**	**6.850**	**300.023**	**34.896**	**334.919**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.3

RASIO DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Rasio Dokter Umum terhadap Puskesmas	Rasio Dokter Gigi terhadap Puskesmas	Rasio Perawat terhadap Puskesmas	Rasio Bidan terhadap Puskesmas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	337	774	156	4.925	7.987	2,30	0,46	14,61	23,70
2	Sumatera Utara	570	1.459	530	6.872	11.228	2,56	0,93	12,06	19,70
3	Sumatera Barat	264	585	287	2.590	3.838	2,22	1,09	9,81	14,54
4	Riau	211	578	217	2.672	3.078	2,74	1,03	12,66	14,59
5	Jambi	176	338	106	2.149	2.593	1,92	0,60	12,21	14,73
6	Sumatera Selatan	321	457	93	3.375	3.551	1,42	0,29	10,51	11,06
7	Bengkulu	180	254	66	1.650	2.091	1,41	0,37	9,17	11,62
8	Lampung	290	518	193	3.158	3.028	1,79	0,67	10,89	10,44
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	140	38	964	617	2,30	0,62	15,80	10,11
10	Kepulauan Riau	73	307	87	1.620	764	4,21	1,19	22,19	10,47
11	DKI Jakarta	340	645	484	2.333	1.029	1,90	1,42	6,86	3,03
12	Jawa Barat	1.050	1.889	806	8.398	9.667	1,80	0,77	8,00	9,21
13	Jawa Tengah	875	1.931	738	7.213	12.714	2,21	0,84	8,24	14,53
14	DI Yogyakarta	121	365	177	863	776	3,02	1,46	7,13	6,41
15	Jawa Timur	960	1.833	945	10.104	11.379	1,91	0,98	10,53	11,85
16	Banten	231	475	273	1.804	2.436	2,06	1,18	7,81	10,55
17	Bali	120	320	170	1.057	1.296	2,67	1,42	8,81	10,80
18	Nusa Tenggara Barat	158	254	104	2.583	1.645	1,61	0,66	16,35	10,41
19	Nusa Tenggara Timur	370	370	109	2.994	2.361	1,00	0,29	8,09	6,38
20	Kalimantan Barat	238	314	79	5.397	1.845	1,32	0,33	22,68	7,75
21	Kalimantan Tengah	195	274	58	2.553	1.502	1,41	0,30	13,09	7,70
22	Kalimantan Selatan	228	446	134	2.638	2.266	1,96	0,59	11,57	9,94
23	Kalimantan Timur	174	342	158	1.961	1.200	1,97	0,91	11,27	6,90
24	Kalimantan Utara	48	137	51	739	359	2,85	1,06	15,40	7,48
25	Sulawesi Utara	187	479	26	1.852	1.025	2,56	0,14	9,90	5,48
26	Sulawesi Tengah	184	244	63	3.567	1.880	1,33	0,34	19,39	10,22
27	Sulawesi Selatan	446	690	386	4.744	3.874	1,55	0,87	10,64	8,69
28	Sulawesi Tenggara	269	265	66	2.298	1.416	0,99	0,25	8,54	5,26
29	Gorontalo	93	121	21	652	453	1,30	0,23	7,01	4,87
30	Sulawesi Barat	94	153	65	1.164	787	1,63	0,69	12,38	8,37
31	Maluku	197	219	91	3.492	981	1,11	0,46	17,73	4,98
32	Maluku Utara	127	145	33	1.766	801	1,14	0,26	13,91	6,31
33	Papua Barat	149	61	14	1.215	530	0,41	0,09	8,15	3,56
34	Papua	394	393	46	2.911	1.353	1,00	0,12	7,39	3,43
Indonesia		**9.731**	**17.775**	**6.870**	**104.273**	**102.350**	**1,83**	**0,71**	**10,72**	**10,52**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.4

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Tenaga Kesehatan												Tenaga Non Kesehatan	Total SDM Kesehatan
			Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Keterapian Fisik	Keteknisian Medis	Jumlah		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	64	1.190	678	122	4.178	1.332	445	165	170	134	219	985	9.618	3.520	13.138
2	Sumatera Utara	177	3.508	1.583	316	5.121	604	1.095	341	111	150	232	787	13.848	5.021	18.869
3	Sumatera Barat	62	816	498	99	3.077	553	482	67	76	145	90	766	6.669	3.264	9.933
4	Riau	62	1.157	606	156	2.650	978	649	60	50	79	77	415	6.877	3.597	10.474
5	Jambi	33	527	385	76	1.594	358	277	76	52	52	53	273	3.723	2.267	5.990
6	Sumatera Selatan	55	1.308	655	149	2.444	670	592	68	92	114	100	744	6.936	5.130	12.066
7	Bengkulu	19	128	172	41	1.229	345	150	124	34	77	29	238	2.567	912	3.479
8	Lampung	53	617	484	81	1.937	552	217	31	92	76	82	438	4.607	3.138	7.745
9	Kepulauan Bangka Belitung	16	164	191	27	1.003	188	150	57	33	43	36	227	2.119	1.186	3.305
10	Kepulauan Riau	25	297	181	44	1.327	268	144	15	10	36	29	194	2.545	1.732	4.277
11	DKI Jakarta	158	7.022	2.078	721	9.348	1.040	2.534	120	70	158	230	1.390	24.711	17.324	42.035
12	Jawa Barat	293	6.873	2.939	983	15.532	2.431	2.769	200	180	436	368	2.700	35.411	21.859	57.270
13	Jawa Tengah	300	5.415	2.656	586	19.281	2.925	2.702	119	357	603	583	3.271	38.498	24.232	62.730
14	DI Yogyakarta	71	1.449	633	159	3.762	387	598	25	84	114	121	805	8.137	4.492	12.629
15	Jawa Timur	347	5.932	2.773	645	14.240	2.524	2.544	171	282	582	373	2.423	32.489	23.425	55.914
16	Banten	85	2.373	1.045	333	4.818	782	882	279	43	116	195	888	11.754	6.033	17.787
17	Bali	57	1.378	729	122	3.207	881	390	48	98	167	65	448	7.533	5.737	13.270
18	Nusa Tenggara Barat	24	451	362	56	2.098	375	188	20	44	82	44	355	4.075	2.117	6.192
19	Nusa Tenggara Timur	44	347	337	47	2.072	382	315	44	85	88	67	382	4.166	3.433	7.599
20	Kalimantan Barat	45	431	341	67	1.479	370	273	38	69	83	48	369	3.568	2.489	6.057
21	Kalimantan Tengah	19	188	199	38	1.198	215	195	18	19	111	24	177	2.382	1.342	3.724
22	Kalimantan Selatan	36	672	380	68	2.262	379	327	42	109	120	40	327	4.726	2.424	7.150
23	Kalimantan Timur	45	746	486	115	2.266	463	366	35	44	76	75	454	5.126	3.343	8.469
24	Kalimantan Utara	6	47	66	10	527	103	42	14	7	7	7	59	889	296	1.185
25	Sulawesi Utara	42	649	420	76	1.974	234	206	71	82	80	62	138	3.992	2.063	6.055
26	Sulawesi Tengah	31	361	265	49	2.533	637	331	128	78	55	46	162	4.645	1.173	5.818
27	Sulawesi Selatan	88	1.899	806	243	6.044	1.184	799	318	160	271	241	1.075	13.040	4.154	17.194
28	Sulawesi Tenggara	25	135	138	41	1.097	263	170	46	39	85	32	160	2.206	614	2.820
29	Gorontalo	12	147	135	22	403	193	80	52	22	66	17	83	1.220	1.047	2.267
30	Sulawesi Barat	10	60	67	18	633	132	90	23	18	25	19	105	1.190	229	1.419
31	Maluku	27	125	166	29	927	216	99	64	69	73	14	92	1.874	717	2.591
32	Maluku Utara	19	112	123	19	565	181	136	72	9	15	23	103	1.358	540	1.898
33	Papua Barat	18	98	117	21	790	204	108	24	22	30	14	116	1.544	622	2.166
34	Papua	38	241	318	52	1.073	249	212	47	51	91	29	205	2.568	1.076	3.644
Indonesia		**2.406**	**46.863**	**23.012**	**5.631**	**122.689**	**22.598**	**20.557**	**3.022**	**2.761**	**4.440**	**3.684**	**21.354**	**276.611**	**160.548**	**437.159**

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes, 2015

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.5

JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2014

No	Provinsi	Dokter Umum	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang				Spesialis Lain	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis Dasar								Total
			Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anestesiologi	Spesialis Radiologi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi			Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	Spesialis Konservasi Gigi	Spesialis Periodonsia	Spesialis Ortodonsia	Spesialis Prostodonsia	Spesialis Kedokteran Gigi Anak	Spesialis Penyakit Mulut	Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Aceh	2.525	59	60	37	54	25	11	9	5	160	262	2	3	3	2	3	2	1	0	3.223
2	Sumatera Utara	7.933	199	218	147	236	80	40	80	41	570	1.696	13	5	4	34	3	5	1	2	11.307
3	Sumatera Barat	2.658	92	60	63	68	20	10	21	12	226	641	2	3	1	4	1	2	0	0	3.884
4	Riau	2.590	50	65	43	87	24	12	11	9	150	622	3	3	1	10	2	0	0	0	3.682
5	Jambi	962	23	17	20	34	11	4	4	5	49	194	0	0	0	1	1	0	0	0	1.325
6	Sumatera Selatan	2.510	119	88	67	128	22	12	7	24	213	369	2	3	1	4	2	2	0	0	3.573
7	Bengkulu	531	10	10	10	15	2	2	4	2	16	104	0	0	0	1	0	0	0	0	707
8	Lampung	1.738	37	36	38	46	13	15	12	6	81	252	3	1	0	3	2	2	0	0	2.285
9	Kepulauan Bangka Belitung	356	11	11	7	14	4	4	2	2	18	79	1	2	0	0	0	1	0	0	512
10	Kepulauan Riau	709	14	33	15	34	14	7	3	6	48	199	2	0	1	1	2	2	0	0	1.090
11	DKI Jakarta	16.092	553	665	338	717	356	213	153	73	2.544	5.269	89	186	59	193	98	91	31	1	27.721
12	Jawa Barat	15.892	406	564	291	498	259	172	148	54	1.472	3.982	83	70	23	113	55	74	11	4	24.171
13	Jawa Tengah	9.756	366	285	252	313	178	123	79	38	1.027	1.639	20	35	7	30	14	13	0	0	14.175
14	DI Yogyakarta	3.061	154	134	91	119	61	50	43	21	364	992	26	48	10	43	21	32	1	1	5.272
15	Jawa Timur	12.738	398	412	281	447	238	204	170	74	1.678	3.850	35	163	43	112	80	77	18	4	21.022
16	Banten	4.857	105	157	68	143	77	36	30	9	401	1.556	15	24	7	17	17	24	3	0	7.546
17	Bali	3.122	112	121	89	165	87	31	15	21	332	915	3	8	2	6	6	6	1	1	5.043
18	Nusa Tenggara Barat	805	21	19	12	23	8	5	5	2	55	169	1	1	0	2	1	2	1	0	1.132
19	Nusa Tenggara Timur	581	17	13	13	17	2	7	5	3	19	170	0	0	0	1	0	0	1	0	849
20	Kalimantan Barat	819	25	23	22	28	10	12	9	3	58	173	2	0	0	0	1	2	1	0	1.188
21	Kalimantan Tengah	549	21	9	9	15	4	8	9	2	26	95	1	0	1	0	0	2	0	0	751
22	Kalimantan Selatan	1.060	35	31	22	35	17	8	18	6	89	198	1	3	1	1	0	1	1	0	1.527
23	Kalimantan Timur	1.486	41	38	34	62	24	14	14	6	133	372	6	6	0	8	2	3	0	0	2.249
24	Kalimantan Utara	189	7	6	4	7	1	2	3	0	11	51	1	1	0	0	0	2	0	0	285
25	Sulawesi Utara	2.329	67	61	31	61	15	8	4	7	137	121	2	3	0	2	0	1	0	0	2.849
26	Sulawesi Tengah	451	19	12	15	19	6	11	4	1	48	92	1	1	0	0	0	0	0	0	680
27	Sulawesi Selatan	3.767	136	111	108	143	84	71	47	22	432	1.341	11	6	3	7	12	7	0	1	6.309
28	Sulawesi Tenggara	398	12	9	12	21	5	6	6	2	29	154	0	0	0	0	0	1	0	0	655
29	Gorontalo	274	8	9	8	10	6	4	3	0	21	40	1	1	0	0	0	1	0	0	386
30	Sulawesi Barat	111	4	5	3	6	0	1	1	0	7	63	0	0	0	0	0	0	0	0	201
31	Maluku	263	6	4	6	9	0	2	1	2	19	58	0	2	0	0	0	1	0	0	373
32	Maluku Utara	181	7	5	5	5	0	0	2	0	7	38	0	2	0	1	0	0	0	0	253
33	Papua Barat	210	6	7	8	9	2	4	2	0	4	34	0	0	0	0	0	0	0	0	286
34	Papua	677	11	23	19	13	5	3	6	1	30	91	1	0	1	0	0	0	1	0	882
Indonesia		**102.180**	**3.151**	**3.321**	**2.188**	**3.601**	**1.660**	**1.112**	**930**	**459**	**10.474**	**25.881**	**327**	**580**	**168**	**596**	**323**	**356**	**72**	**14**	**157.393**

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2015

Lampiran 3.6

JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI
MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2014

No	Provinsi	Perawat	Bidan	Fisioterapi	Perawat Gigi	Refraksionis Optisien	Terapis Wicara	Radiografer	Okupasi Terapis	Gizi	Rekam Medis	Teknisi Gigi	Kesehatan Lingkungan	Elektromedis	Teknologi Laboratorium	Perawat Anestesi	Tenaga Akupunktur	Fisika Medis	Ortotis Prostetis	Teknisi Transfusi Darah	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
1	Aceh	16.690	18.643	528	914	55	1	305	1	844	243	16	171	186	1.055	34	0	5	3	14	39.708
2	Sumatera Utara	15.666	34.443	352	638	163	6	398	5	1.187	95	6	430	172	488	83	0	31	6	9	54.178
3	Sumatera Barat	8.194	12.455	249	672	252	8	299	4	783	594	18	50	110	464	91	0	3	2	10	24.258
4	Riau	11.258	17.079	191	254	60	10	127	5	423	255	46	15	30	698	104	0	1	2	11	30.569
5	Jambi	4.601	3.408	79	374	12	3	57	0	381	6	7	607	14	398	30	0	1	0	6	9.984
6	Sumatera Selatan	11.439	11.188	282	600	177	9	323	8	627	180	3	946	25	725	40	0	3	0	8	26.583
7	Bengkulu	3.116	4.476	16	56	11	0	41	0	409	0	8	126	16	229	29	0	1	0	0	8.534
8	Lampung	7.743	9.864	77	237	42	4	237	8	521	36	44	756	22	1.037	83	0	0	0	23	20.734
9	Kepulauan Bangka Belitung	3.088	1.648	39	108	3	1	65	0	233	4	20	121	18	155	11	0	0	0	2	5.516
10	Kepulauan Riau	2.375	2.149	26	64	30	0	61	10	79	2	5	85	26	138	7	0	0	0	7	5.064
11	DKI Jakarta	21.495	13.550	913	1.037	758	397	1.169	200	1.033	592	135	587	658	2.133	251	0	34	39	394	45.375
12	Jawa Barat	19.327	21.845	828	1.623	278	108	698	101	1.522	880	36	415	175	2.450	425	0	10	5	116	50.842
13	Jawa Tengah	45.403	34.556	1.476	1.556	713	165	1.057	189	2.582	1.856	12	951	361	3.820	354	33	80	117	51	95.332
14	DI Yogyakarta	5.014	4.763	212	616	57	13	437	14	504	631	0	718	58	930	175	0	13	1	416	14.572
15	Jawa Timur	9.413	21.961	316	810	510	45	510	58	521	757	196	773	325	2.173	486	192	13	8	97	39.164
16	Banten	5.901	7.596	238	223	57	7	248	0	322	73	11	228	49	691	57	0	1	2	57	15.761
17	Bali	3.523	3.969	58	498	36	7	180	14	513	18	10	18	45	249	122	0	6	1	6	9.273
18	Nusa Tenggara Barat	4.540	3.811	7	185	24	1	84	1	842	68	7	51	43	579	42	0	1	0	11	10.297
19	Nusa Tenggara Timur	6.931	3.503	104	596	21	1	45	0	618	89	1	384	11	449	52	0	1	0	19	12.825
20	Kalimantan Barat	6.772	1.576	79	596	20	1	22	0	544	25	2	655	17	633	28	0	0	0	4	10.974
21	Kalimantan Tengah	3.708	3.765	39	176	3	2	29	2	421	7	4	30	27	6	27	0	3	0	2	8.251
22	Kalimantan Selatan	5.311	4.504	46	668	30	1	224	6	738	48	9	363	24	634	38	0	4	0	15	12.663
23	Kalimantan Timur	5.330	3.177	114	139	7	3	94	8	411	57	13	300	45	630	67	0	0	0	29	10.424
24	Sulawesi Utara	4.048	723	123	311	9	2	21	5	413	1	1	575	17	13	11	0	1	2	11	6.287
25	Sulawesi Tengah	2.082	1.185	54	55	3	2	54	1	173	0	0	10	15	12	24	0	0	0	1	3.671
26	Sulawesi Selatan	27.778	23.798	232	845	17	5	485	12	1.504	488	108	1.307	235	1.313	71	0	38	1	15	58.252
27	Sulawesi Tenggara	5.290	3.892	25	116	4	0	0	0	933	1	4	708	10	263	23	0	0	0	6	11.275
28	Gorontalo	979	1.318	20	56	6	0	24	0	461	3	0	10	19	51	10	0	0	0	7	2.964
29	Sulawesi Barat	3.313	1.720	11	34	0	0	24	0	34	9	4	30	8	20	0	0	0	0	0	5.207
30	Maluku	3.150	1.883	10	37	4	0	4	0	641	5	1	77	31	63	19	0	0	0	3	5.928
31	Maluku Utara	1.142	13	15	1	0	0	31	0	271	0	2	0	0	62	7	0	0	0	4	1.548
32	Papua Barat	2.277	574	13	38	0	0	11	0	208	8	0	27	10	249	6	0	0	0	5	3.426
33	Papua	4.214	1.228	41	74	0	0	18	1	396	8	5	55	5	558	18	0	0	0	9	6.630
Indonesia		**281.111**	**280.263**	**6.813**	**14.207**	**3.362**	**802**	**7.382**	**653**	**21.092**	**7.039**	**734**	**11.579**	**2.807**	**23.368**	**2.825**	**225**	**250**	**189**	**1.368**	**666.069**

Sumber: Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.7

JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Perawat	Bidan	Fisioterapi	Perawat Gigi	Refraksionis Optisien	Terapis Wicara	Radiografer	Okupasi Terapis	Gizi	Rekam Medis	Teknisi Gigi	Kesehatan Lingkungan	Elektromedis	Teknologi Laboratorium	Perawat Anestesi	Tenaga Akupunktur	Fisika Medis	Ortotis Prostetis	Teknisi Transfusi Darah	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
1	Aceh	10.581	3.165	57	1	2	0	0	0	2	9	0	68	28	81	2	0	0	0	0	13.996
2	Sumatera Utara	7.862	15.771	200	321	42	0	61	0	205	35	5	6	156	357	5	0	11	0	0	25.037
3	Sumatera Barat	3.730	5.554	95	376	12	0	66	0	0	2	0	12	0	64	1	0	0	0	0	9.912
4	Riau	3.127	2.083	2	22	4	0	1	4	8	8	10	4	3	13	4	0	0	0	0	5.293
5	Jambi	2.375	2.066	15	32	8	0	5	0	38	6	0	81	0	10	0	0	0	0	0	4.636
6	Sumatera Selatan	6.136	4.016	64	82	7	0	66	0	68	67	1	26	1	243	1	0	1	0	0	10.779
7	Bengkulu	570	1.061	16	13	0	0	0	0	61	0	5	2	3	70	3	0	0	0	0	1.804
8	Lampung	858	950	0	68	9	0	58	0	45	2	15	9	0	53	6	0	0	0	0	2.073
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.255	374	7	0	0	0	1	0	37	4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1.681
10	Kepulauan Riau	539	1.050	26	0	3	0	0	0	44	2	0	44	0	16	7	0	0	0	0	1.731
11	DKI Jakarta	7.192	3.978	291	108	111	36	277	0	11	17	6	105	92	344	8	0	0	0	145	12.721
12	Jawa Barat	4.303	7.023	236	38	63	0	31	0	1	144	0	232	0	88	84	0	0	0	0	12.243
13	Jawa Tengah	11.796	8.797	1.106	500	81	44	481	0	275	572	5	108	0	982	96	0	45	43	0	24.931
14	DI Yogyakarta	0	1.569	1	155	0	0	203	0	107	267	0	158	0	0	79	0	6	0	162	2.707
15	Jawa Timur	2.664	8.790	154	0	102	0	0	0	16	250	16	9	0	253	21	10	0	0	0	12.285
16	Banten	2.417	1.478	65	32	0	0	41	0	2	18	0	23	0	48	5	0	0	0	0	4.129
17	Bali	623	1.905	58	21	9	0	7	0	28	0	0	5	0	1	9	0	0	0	0	2.666
18	Nusa Tenggara Barat	1.390	1.069	7	30	8	0	15	0	126	10	0	41	6	382	4	0	0	0	0	3.088
19	Nusa Tenggara Timur	2.525	258	38	7	0	0	1	0	12	9	0	373	0	270	0	0	1	0	0	3.494
20	Kalimantan Barat	898	258	3	56	5	0	11	0	30	0	0	26	0	2	2	0	0	0	0	1.291
21	Kalimantan Tengah	177	1.162	6	69	1	0	5	0	54	7	0	20	0	6	8	0	0	0	0	1.515
22	Kalimantan Selatan	1.829	1.224	2	60	7	0	123	0	130	17	0	6	2	79	0	0	0	0	0	3.479
23	Kalimantan Timur	4.352	2.410	104	22	1	0	90	0	40	7	2	42	4	160	8	0	0	0	0	7.242
24	Sulawesi Utara	1.992	393	123	38	2	0	0	5	55	0	0	29	0	13	0	0	0	0	0	2.650
25	Sulawesi Tengah	1.767	371	54	0	1	0	10	0	63	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	2.278
26	Sulawesi Selatan	6.911	7.118	232	1	2	0	54	0	401	152	0	144	1	322	23	0	12	0	0	15.373
27	Sulawesi Tenggara	3.253	3.009	25	38	1	0	0	0	208	0	0	17	0	125	17	0	0	0	0	6.693
28	Gorontalo	569	202	2	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	840
29	Sulawesi Barat	1.634	219	0	0	0	0	4	0	13	6	0	14	0	13	0	0	0	0	0	1.903
30	Maluku	429	206	10	0	0	0	2	0	71	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	728
31	Maluku Utara	470	0	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	488
32	Papua Barat	1.004	441	13	11	0	0	11	0	62	3	0	27	2	69	0	0	0	0	1	1.644
33	Papua	1.026	587	19	6	0	0	9	0	64	4	1	21	0	498	0	0	0	0	2	2.237
Indonesia		**96.254**	**88.557**	**3.046**	**2.107**	**481**	**80**	**1.634**	**9**	**2.339**	**1.618**	**66**	**1.662**	**298**	**4.581**	**396**	**10**	**76**	**43**	**310**	**203.567**

Sumber: Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 201

Lampiran 3.8

JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2014

No	Provinsi	Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai PTT			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	0	1	0	1
2	Sumatera Utara	1	1	0	2
3	Sumatera Barat	0	0	0	0
4	Riau	0	2	0	2
5	Jambi	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0
8	Lampung	2	3	0	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	3	0	3
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	3	0	0	3
13	Jawa Tengah	1	0	0	1
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0	0
16	Banten	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	0	1
19	Nusa Tenggara Timur	0	3	0	3
20	Kalimantan Barat	0	3	0	3
21	Kalimantan Tengah	0	12	0	12
22	Kalimantan Selatan	2	0	0	2
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	3	0	3
26	Sulawesi Tengah	0	2	0	2
27	Sulawesi Selatan	0	5	0	5
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	4	0	4
34	Papua	0	5	0	5
Indonesia		**9**	**48**	**0**	**57**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.9

JUMLAH DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2014

No	Provinsi	Jumlah Dokter Umum Sebagai PTT			Total
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	12	181	107	300
2	Sumatera Utara	25	112	57	194
3	Sumatera Barat	1	43	24	68
4	Riau	27	58	17	102
5	Jambi	4	57	35	96
6	Sumatera Selatan	0	39	2	41
7	Bengkulu	0	41	29	70
8	Lampung	10	45	14	69
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	5	1	6
10	Kepulauan Riau	1	8	6	15
11	DKI Jakarta	7	0	0	7
12	Jawa Barat	10	0	0	10
13	Jawa Tengah	12	0	0	12
14	DI Yogyakarta	11	0	0	11
15	Jawa Timur	19	0	0	19
16	Banten	1	0	0	1
17	Bali	10	0	0	10
18	Nusa Tenggara Barat	0	27	11	38
19	Nusa Tenggara Timur	0	56	265	321
20	Kalimantan Barat	0	25	88	113
21	Kalimantan Tengah	0	41	51	92
22	Kalimantan Selatan	0	44	29	73
23	Kalimantan Timur	0	15	6	21
24	Kalimantan Utara	0	11	17	28
25	Sulawesi Utara	2	47	101	150
26	Sulawesi Tengah	0	61	95	156
27	Sulawesi Selatan	3	87	32	122
28	Sulawesi Tenggara	0	30	160	190
29	Gorontalo	0	30	31	61
30	Sulawesi Barat	0	14	23	37
31	Maluku	0	9	169	178
32	Maluku Utara	0	16	75	91
33	Papua Barat	0	18	133	151
34	Papua	0	22	233	255
Indonesia		**155**	**1.142**	**1.811**	**3.108**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.10

JUMLAH DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2014

No	Provinsi	Jumlah Dokter Gigi Sebagai PTT			Total
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	0	45	37	82
2	Sumatera Utara	5	54	21	80
3	Sumatera Barat	1	40	9	50
4	Riau	0	46	9	55
5	Jambi	0	36	21	57
6	Sumatera Selatan	0	24	3	27
7	Bengkulu	0	12	19	31
8	Lampung	0	24	11	35
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	4	3	7
10	Kepulauan Riau	0	5	9	14
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	1	0	0	1
14	DI Yogyakarta	4	0	0	4
15	Jawa Timur	18	0	0	18
16	Banten	0	0	0	0
17	Bali	1	0	0	1
18	Nusa Tenggara Barat	0	12	8	20
19	Nusa Tenggara Timur	0	15	87	102
20	Kalimantan Barat	0	10	29	39
21	Kalimantan Tengah	0	20	21	41
22	Kalimantan Selatan	0	20	12	32
23	Kalimantan Timur	0	12	11	23
24	Kalimantan Utara	0	6	11	17
25	Sulawesi Utara	1	17	16	34
26	Sulawesi Tengah	0	17	36	53
27	Sulawesi Selatan	0	79	27	106
28	Sulawesi Tenggara	0	25	105	130
29	Gorontalo	0	11	12	23
30	Sulawesi Barat	1	8	19	28
31	Maluku	0	2	64	66
32	Maluku Utara	0	4	28	32
33	Papua Barat	0	3	15	18
34	Papua	0	10	34	44
Indonesia		**32**	**561**	**677**	**1.270**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.11

JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2014

No	Provinsi	Jumlah Bidan Sebagai PTT			Total
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	341	2.390	1.584	4.315
2	Sumatera Utara	3.036	2.439	500	5.975
3	Sumatera Barat	1.203	488	171	1.862
4	Riau	561	640	267	1.468
5	Jambi	513	545	235	1.293
6	Sumatera Selatan	645	249	5	899
7	Bengkulu	164	491	152	807
8	Lampung	1.425	526	188	2.139
9	Kepulauan Bangka Belitung	49	38	1	88
10	Kepulauan Riau	85	74	45	204
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	2.004	437	0	2.441
13	Jawa Tengah	4.900	59	0	4.959
14	DI Yogyakarta	273	0	0	273
15	Jawa Timur	3.227	58	84	3.369
16	Banten	732	194	0	926
17	Bali	416	25	0	441
18	Nusa Tenggara Barat	359	239	68	666
19	Nusa Tenggara Timur	3	167	941	1.111
20	Kalimantan Barat	29	232	460	721
21	Kalimantan Tengah	18	166	174	358
22	Kalimantan Selatan	46	230	125	401
23	Kalimantan Timur	81	113	80	274
24	Kalimantan Utara	1	27	45	73
25	Sulawesi Utara	47	34	63	144
26	Sulawesi Tengah	1	370	603	974
27	Sulawesi Selatan	973	511	229	1.713
28	Sulawesi Tenggara	19	317	880	1.216
29	Gorontalo	76	128	130	334
30	Sulawesi Barat	87	196	249	532
31	Maluku	0	0	300	300
32	Maluku Utara	0	71	437	508
33	Papua Barat	0	55	516	571
34	Papua	6	93	579	678
Indonesia		**21.320**	**11.602**	**9.111**	**42.033**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.12

JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Pengangkatan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai PTT			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	0	1	0	1
2	Sumatera Utara	1	1	0	2
3	Sumatera Barat	0	0	0	0
4	Riau	0	2	0	2
5	Jambi	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0
8	Lampung	2	3	0	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	3	0	3
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	3	0	0	3
13	Jawa Tengah	1	0	0	1
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0	0
16	Banten	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	0	1
19	Nusa Tenggara Timur	0	3	0	3
20	Kalimantan Barat	0	3	0	3
21	Kalimantan Tengah	0	12	0	12
22	Kalimantan Selatan	2	0	0	2
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	3	0	3
26	Sulawesi Tengah	0	3	0	3
27	Sulawesi Selatan	0	5	0	5
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	5	0	5
34	Papua	0	5	0	5
Indonesia		**9**	**50**	**0**	**59**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.13

JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Pengangkatan Dokter Umum Sebagai PTT			Total
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	9	37	17	63
2	Sumatera Utara	6	15	17	38
3	Sumatera Barat	0	16	10	26
4	Riau	19	10	4	33
5	Jambi	0	17	5	22
6	Sumatera Selatan	0	6	0	6
7	Bengkulu	0	15	3	18
8	Lampung	6	10	4	20
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	1	2	3
10	Kepulauan Riau	0	3	2	5
11	DKI Jakarta	3	0	0	3
12	Jawa Barat	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	2	0	0	2
14	DI Yogyakarta	5	0	0	5
15	Jawa Timur	1	0	0	1
16	Banten	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	19	4	23
19	Nusa Tenggara Timur	0	15	85	100
20	Kalimantan Barat	0	9	9	18
21	Kalimantan Tengah	0	6	6	12
22	Kalimantan Selatan	0	14	10	24
23	Kalimantan Timur	0	8	5	13
24	Kalimantan Utara	0	5	4	9
25	Sulawesi Utara	0	13	14	27
26	Sulawesi Tengah	0	11	12	23
27	Sulawesi Selatan	0	26	14	40
28	Sulawesi Tenggara	0	14	47	61
29	Gorontalo	0	14	4	18
30	Sulawesi Barat	0	8	3	11
31	Maluku	0	0	32	32
32	Maluku Utara	0	3	13	16
33	Papua Barat	0	9	16	25
34	Papua	0	3	45	48
Indonesia		**51**	**307**	**387**	**745**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.14

JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Pengangkatan Dokter Gigi Sebagai PTT			Total
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	0	14	10	24
2	Sumatera Utara	0	17	5	22
3	Sumatera Barat	0	15	2	17
4	Riau	0	20	4	24
5	Jambi	0	11	2	13
6	Sumatera Selatan	0	4	0	4
7	Bengkulu	0	9	9	18
8	Lampung	0	9	4	13
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	4	1	5
10	Kepulauan Riau	0	3	1	4
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0
15	Jawa Timur	6	0	0	6
16	Banten	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	6	1	7
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	18	19
20	Kalimantan Barat	0	2	7	9
21	Kalimantan Tengah	0	1	5	6
22	Kalimantan Selatan	0	3	1	4
23	Kalimantan Timur	0	6	3	9
24	Kalimantan Utara	0	0	2	2
25	Sulawesi Utara	0	11	7	18
26	Sulawesi Tengah	0	4	6	10
27	Sulawesi Selatan	0	27	9	36
28	Sulawesi Tenggara	0	7	17	24
29	Gorontalo	0	1	1	2
30	Sulawesi Barat	0	2	5	7
31	Maluku	0	1	7	8
32	Maluku Utara	0	0	6	6
33	Papua Barat	0	0	1	1
34	Papua	0	1	3	4
Indonesia		**6**	**179**	**137**	**322**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.15

JUMLAH PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Pengangkatan Bidan Sebagai PTT			Total
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	110	836	540	1.486
2	Sumatera Utara	1.214	1.122	109	2.445
3	Sumatera Barat	211	81	55	347
4	Riau	208	258	122	588
5	Jambi	143	185	88	416
6	Sumatera Selatan	110	64	4	178
7	Bengkulu	43	239	59	341
8	Lampung	509	188	61	758
9	Kepulauan Bangka Belitung	11	24	5	40
10	Kepulauan Riau	30	19	26	75
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	669	139	0	808
13	Jawa Tengah	1.682	6	0	1.688
14	DI Yogyakarta	136	0	0	136
15	Jawa Timur	1.334	21	22	1.377
16	Banten	206	50	0	256
17	Bali	202	18	0	220
18	Nusa Tenggara Barat	91	96	29	216
19	Nusa Tenggara Timur	0	29	255	284
20	Kalimantan Barat	11	26	93	130
21	Kalimantan Tengah	5	83	78	166
22	Kalimantan Selatan	17	110	34	161
23	Kalimantan Timur	21	48	56	125
24	Kalimantan Utara	1	20	29	50
25	Sulawesi Utara	0	9	11	20
26	Sulawesi Tengah	0	189	160	349
27	Sulawesi Selatan	252	146	56	454
28	Sulawesi Tenggara	1	116	356	473
29	Gorontalo	9	57	65	131
30	Sulawesi Barat	9	35	39	83
31	Maluku	0	0	89	89
32	Maluku Utara	0	24	118	142
33	Papua Barat	0	42	199	241
34	Papua	0	39	270	309
Indonesia		**7.235**	**4.319**	**3.028**	**14.582**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.16

JUMLAH KEBERADAAN AKTIF TENAGA RESIDEN DAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS D-III KESEHATAN DI KABUPATEN PRIORITAS DTPK DAN DBK MENURUT PROVINSI PER 31 DESEMBER TAHUN 2014

No	Provinsi	Residen	Perawat	Gizi	Kesehatan Lingkungan	Analis Kesehatan	Bidan	Farmasi	Kesehatan Gigi	Fisioterapis	Radiografer	Perekam dan Infokes	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	20	91	45	35	20	2	10	6	0	1	1	231
2	Sumatera Utara	18	19	3	3	0	4	3	0	0	0	0	50
3	Sumatera Barat	15	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	20
4	Riau	19	23	3	1	3	0	3	0	0	0	0	52
5	Jambi	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	Sumatera Selatan	7	4	3	4	4	0	0	0	0	0	0	22
7	Bengkulu	6	13	5	1	4	0	0	0	0	0	0	29
8	Lampung	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
10	Kepulauan Riau	15	28	3	7	3	0	0	0	0	0	0	56
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	16	17	1	2	1	0	0	4	0	0	0	41
13	Jawa Tengah	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	19	6	3	4	5	2	1	1	0	0	0	41
16	Banten	7	25	0	2	0	0	0	0	0	0	0	34
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	9	46	12	10	17	3	2	0	0	0	0	99
19	Nusa Tenggara Timur	17	131	25	26	20	0	20	0	1	0	0	240
20	Kalimantan Barat	11	92	4	6	0	1	1	7	0	0	0	122
21	Kalimantan Tengah	7	26	4	1	4	0	1	0	0	0	0	43
22	Kalimantan Selatan	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
23	Kalimantan Timur	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
24	Kalimantan Utara	9	45	5	10	10	0	0	0	0	0	0	79
25	Sulawesi Utara	1	26	5	2	3	0	0	0	0	0	0	37
26	Sulawesi Tengah	12	38	16	19	11	0	2	0	0	0	0	98
27	Sulawesi Selatan	17	10	3	1	0	0	1	0	0	0	0	32
28	Sulawesi Tenggara	16	174	32	31	30	0	5	0	0	0	0	288
29	Gorontalo	6	29	6	4	0	0	0	0	0	0	0	45
30	Sulawesi Barat	0	48	5	4	0	0	0	0	0	0	0	57
31	Maluku	10	14	8	11	1	0	0	0	0	0	0	44
32	Maluku Utara	13	22	3	3	2	0	0	0	0	0	0	43
33	Papua Barat	9	29	18	7	4	0	0	0	0	0	0	67
34	Papua	18	43	4	3	0	1	0	0	0	0	0	69
Indonesia		**342**	**1.006**	**217**	**199**	**143**	**13**	**49**	**18**	**1**	**1**	**1**	**1.990**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.17

JUMLAH PENGANGKATAN TENAGA RESIDEN DAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS D-III KESEHATAN DI KABUPATEN PRIORITAS DTPK DAN DBK MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Residen	Perawat	Tenaga Gizi	Kesehatan Lingkungan	Analis Kesehatan	Bidan	Farmasi	Kesehatan Gigi	Fisioterapis	Radiografer	Perekam dan Infokes	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	40	91	45	35	20	2	10	6	0	1	1	251
2	Sumatera Utara	55	19	3	3	0	4	3	0	0	0	0	87
3	Sumatera Barat	32	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	37
4	Riau	35	23	3	1	3	0	3	0	0	0	0	68
5	Jambi	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
6	Sumatera Selatan	13	4	3	4	4	0	0	0	0	0	0	28
7	Bengkulu	19	13	5	1	4	0	0	0	0	0	0	42
8	Lampung	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
10	Kepulauan Riau	35	28	3	7	3	0	0	0	0	0	0	76
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	22	17	1	2	1	0	0	4	0	0	0	47
13	Jawa Tengah	17	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	20
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	41	6	3	4	5	2	1	1	0	0	0	63
16	Banten	16	25	0	2	0	0	0	0	0	0	0	43
17	Bali	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
18	Nusa Tenggara Barat	17	46	12	10	17	3	2	0	0	0	0	107
19	Nusa Tenggara Timur	32	131	25	26	20	0	20	0	1	0	0	255
20	Kalimantan Barat	24	92	4	6	0	1	1	7	0	0	0	135
21	Kalimantan Tengah	15	26	4	1	4	0	1	0	0	0	0	51
22	Kalimantan Selatan	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
23	Kalimantan Timur	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
24	Kalimantan Utara	18	45	5	10	10	0	0	0	0	0	0	88
25	Sulawesi Utara	4	26	5	2	3	0	0	0	0	0	0	40
26	Sulawesi Tengah	34	38	16	19	11	0	2	0	0	0	0	120
27	Sulawesi Selatan	48	10	3	1	0	0	1	0	0	0	0	63
28	Sulawesi Tenggara	39	174	32	31	30	0	5	0	0	0	0	311
29	Gorontalo	13	29	6	4	0	0	0	0	0	0	0	52
30	Sulawesi Barat	5	48	5	4	0	0	0	0	0	0	0	62
31	Maluku	20	14	8	11	1	0	0	0	0	0	0	54
32	Maluku Utara	38	22	3	3	2	0	0	0	0	0	0	68
33	Papua Barat	17	29	18	7	4	0	0	0	0	0	0	75
34	Papua	34	43	4	3	0	1	0	0	0	0	0	85
Indonesia		**756**	**1.006**	**217**	**199**	**143**	**13**	**49**	**18**	**1**	**1**	**1**	**2.404**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.18

JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2012-2014

No	Institusi Diknakes	2012	2013	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
A	KEPERAWATAN			
	1 Keperawatan	7.183	6.608	6.909
	2 Kebidanan	5.652	7.604	6.112
	3 Keperawatan Gigi	1.641	1.569	1.372
	Sub Total	**14.476**	**15.781**	**14.393**
B	KEFARMASIAN			
	1 Analisa Farmasi dan Makanan	125	72	68
	2 Farmasi	885	672	726
	3 Jamu	0	0	31
	Sub Total	**1.010**	**744**	**825**
C	KESEHATAN MASYARAKAT			
	1 Kesehatan Lingkungan	2.089	1.676	1.559
	2 Promkes		10	
	Sub Total	**2.089**	**1.686**	**1.559**
D	GIZI			
	1 Gizi	2.068	2.034	1.903
	Sub Total	**2.068**	**2.034**	**1.903**
E	KETERAPIAN FISIK			
	1 Fisioterapi	123	243	133
	2 Okupasi Terapi	52	99	94
	3 Terapi Wicara	36	46	89
	4 Akupunktur	33	42	45
	Sub Total	**244**	**430**	**361**
F	KETEKNISIAN MEDIS			
	1 Analis Kesehatan	1.125	1.384	1.561
	2 Teknik Gigi	92	80	79
	3 Teknik Radiologi & Radioterapi	285	346	243
	4 Rekam Medis dan Infokes	0	38	40
	5 Teknik Elektro Medik	225	230	162
	6 Ortetik Prostetik	16	44	40
	Sub Total	**1.743**	**2.122**	**2.125**
Total		**21.630**	**22.797**	**21.166**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.19

JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES
MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2014

No	Nama Poltekkes	PROGRAM STUDI																			Total
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Farmasi	Analis Kesehatan	Teknik Elektro Medik	Teknik Radio Diagnostik	Teknik Gigi	Analis Farmasi Dan Makanan	Fisioterapi	Okupasi Etrapi	Ortetik Prostetik	Terapi Wicara	Akupunktur	Jamu	Perekam dan Informasi Kesehatan	Promkes	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
1	Aceh	289	224	90	73	95	72	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916
2	Medan	112	316	148	84	96	80	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920
3	Padang	166	191	85	99	86	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726
4	Pekanbaru	60	103	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
5	Jambi	74	130	33	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
6	Bengkulu	243	157	43	0	73	133	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698
7	Palembang	145	156	0	39	75	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454
8	T.Karang	204	156	27	65	58	30	72	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629
9	Gorontalo	69	69	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212
10	Jakarta I	39	38	0	0	34	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
11	Jakarta II	77	38	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	163
12	Jakarta III	0	0	0	82	87	139	0	102	81	62	68	0	0	0	0	0	0	0	0	621
13	Bandung	120	160	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361
14	Tasikmalaya	145	247	75	62	59	17	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723
15	Semarang	155	104	38	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	416
16	Surakarta	507	329	83	89	89	0	82	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341
17	Yogyakarta	203	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	94	25	89	45	31	0	0	652
18	Malang	40	83	103	112	98	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
19	Surabaya	269	223	104	137	34	0	82	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909
20	Denpasar	311	295	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721
21	Mataram	76	76	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
22	Kupang	187	59	78	80	47	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536
23	Pontianak	129	218	0	0	43	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440
24	Palangkaraya	330	350	57	59	75	84	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003
25	Banjarmasin	184	132	90	25	49	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561
26	Samarinda	143	88	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273
27	Manado	40	45	46	34	45	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257
28	Palu	184	155	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410
29	Makassar	71	94	70	75	48	45	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469
30	Kendari	265	253	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591
31	Ambon	224	90	169	77	78	91	147	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	961
32	Ternate	149	102	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308
33	Jayapura	176	124	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349
34	T. Pinang	36	51	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
35	Pangkal Pinang	394	210	0	61	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721
36	Banten	135	201	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377
37	Mamuju	612	394	0	82	37	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147
38	Sorong	346	334	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727
Total		**6.909**	**6.112**	**1.372**	**1.559**	**1.903**	**726**	**1.561**	**162**	**243**	**79**	**68**	**133**	**94**	**40**	**89**	**45**	**31**	**40**	**0**	**21.166**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 3.20

JUMLAH LULUSAN PRORAM DIPLOMA IV POLTEKKES BERDASARKAN JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2014

No	Poltekkes	Keperawatan			Kefarmasian	Kesmas	Gizi	Keterapian Fisik				Keteknisian Medis				Jumlah
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analis Kesehatan	Teknik Elektromedik	Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi	Ortotik Prostetik	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(24)*
1	Aceh	24	9	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	41
2	Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	18	45	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	104
8	Tanjung Karang	0	1	0	0	14	0	0	0	0	0	2	0	0	0	17
9	Tanjung Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jakarta II	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	36	95	0	132
13	Jakarta III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tasikmalaya	0	73	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
16	Semarang	45	160	3	0	1	17	0	0	0	0	0	0	43	0	269
17	Surakarta	62	204	0	0	0	0	144	30	0	0	0	0	0	0	440
18	Di Yogyakarta	82	5	40	0	38	34	0	0	0	0	43	0	0	0	242
19	Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
20	Malang	6	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
21	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Denpasar	19	109	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	154
23	Mataram	77	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	79
24	Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pontianak	0	61	0	0	25	17	0	0	0	0	23	0	0	0	126
26	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Banjarmasin	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
28	Kalimantan Timur	22	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
29	Manado	0	26	0	0	10	17	0	0	0	0	0	0	0	0	53
30	Palu	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
31	Makassar	0	1	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
32	Kendari	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
33	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ternate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Sorong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**358**	**727**	**207**	**0**	**91**	**163**	**144**	**30**	**0**	**0**	**70**	**36**	**138**	**0**	**1.964**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 4.1

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT ESELON I TAHUN 2014

No	Unit Eselon I	Anggaran Kementerian Kesehatan														
		Kantor Pusat			Kantor Daerah			Dekonsentrasi			Tugas Pembantuan			Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Sekretariat Jenderal	26.975.518.359.000	26.537.666.581.547	98,38				234.339.765.000	194.615.509.369	83,05	0			27.209.858.124.000	26.732.282.090.916	98,24
2	Inspektorat Jenderal	92.926.900.000	72.233.409.205	77,73							0			92.926.900.000	72.233.409.205	77,73
3	Ditjen Bina Gizi dan KIA	387.657.919.000	250.001.347.336	64,49	33.683.335.000	27.461.925.170	81,53	368.451.305.000	300.377.859.360	81,52	1.171.688.390.000	1.148.069.467.391	98,36	1.961.480.949.000	1.725.910.599.257	87,99
4	Ditjen Bina Upaya Kesehatan	386.200.000.000	203.680.589.408	52,74	11.351.581.972.000	10.748.754.431.647	94,69	36.517.280.000	32.127.567.948	87,98	2.138.017.690.000	1.607.396.342.624	87,06	13.912.316.942.000	12.591.958.931.627	90,51
5	Ditjen Pengendaliaan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1.465.726.181.000	1.635.998.794.170	111,62	676.626.523.000	580.718.741.083	85,83	213.968.055.000	160.823.978.117	75,16	89.857.120.000	76.811.545.815	78,82	2.446.177.879.000	2.454.353.059.185	100,33
6	Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.719.029.366.000	1.429.401.763.716	83,15				54.486.889.000	49.246.081.458	90,38	0			1.773.516.255.000	1.478.647.845.174	83,37
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	272.016.836.000	219.703.845.303	80,77	255.316.036.000	219.052.563.001	85,80				0			527.332.872.000	438.756.408.304	83,20
8	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	926.571.524.000	760.531.756.385	82,08	1.499.844.668.000	1.324.016.695.710	88,28	5.763.153.000	4.980.500.650	86,42	0			2.432.179.345.000	2.089.528.952.745	85,91
Kementerian Kesehatan		32.225.647.085.000	31.109.218.087.070	96,54	13.817.052.534.000	12.900.004.356.611	93,36	913.526.447.000	742.171.496.902	81,24	3.399.563.200.000	2.832.277.355.830	83,31	50.355.789.266.000	47.583.671.296.413	94,49

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2014

Lampiran 4.2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KONDISI PER 31 DESEMBER 2014
BERDASARKAN JENIS BELANJA

NO	JENIS BELANJA	UNIT ESELON 1								
		SETJEN	ITJEN	BINA GIZI	BUK	PP dan PL	BINA FARMASI	LITBANGKES	BADAN PPSDM	T O T A L
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A.	BELANJA PEGAWAI									
	Anggaran	2.751.745.744.000	14.893.290.000	27.983.405.000	1.867.900.433.000	237.075.104.000	13.292.615.000	82.613.323.000	698.121.256.000	5.693.625.170.000
	Realisasi	2.482.404.192.086	13.854.979.578	24.356.441.829	1.823.675.223.366	203.162.881.449	11.985.764.119	76.264.928.484	650.484.358.945	5.286.188.769.856
	%	98,53	95,21	85,33	92,56	89,57	84,90	94,10	86,75	92,84
B.	BELANJA BARANG									
	Anggaran	1.066.336.393.000	75.459.893.000	1.911.519.303.000	8.462.592.695.000	1.892.286.690.000	1.752.842.258.000	388.525.352.000	1.641.810.800.000	17.191.373.384.000
	Realisasi	891.717.789.615	56.201.296.064	1.683.943.484.228	7.981.979.283.488	1.974.038.332.768	1.460.397.547.755	320.901.067.225	1.356.722.192.340	15.725.900.993.483
	%	83,78	75,09	93,00	91,82	104,32	92,62	95,05	81,64	91,48
C.	BELANJA MODAL									
	Anggaran	90.295.987.000	2.573.717.000	21.978.241.000	3.581.823.814.000	316.816.085.000	7.381.382.000	56.194.197.000	92.247.289.000	4.169.310.712.000
	Realisasi	66.058.130.555	2.177.133.563	17.610.673.200	2.786.304.424.773	277.151.844.968	6.264.533.300	41.590.412.595	82.322.401.460	3.279.479.554.414
	%	74,85	99,49	95,61	82,97	88,28	68,05	95,67	79,67	78,66
D.	BELANJA BANSOS									
	Anggaran	23.301.480.000.000							0	23.301.480.000.000
	Realisasi	23.292.101.978.660							0	23.292.101.978.660
	%	99,91								99,96
	TOTAL									
	Anggaran	27.209.858.124.000	92.926.900.000	1.961.480.949.000	13.912.316.942.000	2.446.177.879.000	1.773.516.255.000	527.332.872.000	2.432.179.345.000	50.355.789.266.000
	Realisasi	26.732.282.090.916	72.233.409.205	1.725.910.599.257	12.591.958.931.627	2.454.353.059.185	1.478.647.845.174	438.756.408.304	2.089.528.952.745	47.583.671.296.413
%		**98,24**	**77,73**	**87,99**	**90,51**	**100,33**	**83,37**	**83,20**	**85,91**	**94,49**

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2014

Lampiran 4.3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2014
KONDISI PER 31 DESEMBER
BERDASARKAN SUMBER DANA

NO	SUMBER DANA	UNIT ESELON 1								
		SETJEN	ITJEN	BINA GIZI	BUK	PP dan PL	BINA FARMASI	LITBANGKES	BADAN PPSDM	T O T A L
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A.	RUPIAH MURNI									
	Anggaran	27.185.015.464.000	92.926.900.000	1.926.030.250.000	5.826.600.099.000	1.645.694.552.000	1.755.529.568.000	508.411.400.000	1.876.658.350.000	40.816.866.583.000
	Realisasi	26.708.709.916.959	72.233.409.205	1.698.477.227.925	4.966.636.865.133	1.381.148.534.412	1.462.081.150.774	420.165.572.874	1.637.106.826.695	38.346.559.503.977
	%	98,25	77,73	88,19	85,24	83,92	83,28	82,64	87,24	93,95
B.	PINJAMAN LUAR NEGERI									
	Anggaran				32.820.429.000	1.261.000.000				34.081.429.000
	Realisasi				18.467.772.928	840.964.294				19.308.737.222
	%				56,27	66,69				56,65
C.	RUPIAH MURNI PENDAMPING									
	Anggaran					30.907.677.000				30.907.677.000
	Realisasi					21.333.150.471				21.333.150.471
	%					69,02				69,02
D.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK									
	Anggaran	4.940.980.000		495.603.000	34.688.681.000	105.635.656.000	9.151.695.000	1.181.202.000	241.219.365.000	397.313.182.000
	Realisasi	4.851.878.670		372.723.413	17.261.657.282	85.981.338.376	7.731.702.400	1.028.083.580	195.257.348.703	312.484.732.424
	%	98,20		75,21	49,76	81,39	84,48	87,04	80,95	78,65
E.	BADAN LAYANAN UMUM									
	Anggaran				8.016.411.919.000				314.301.630.000	8.330.713.549.000
	Realisasi				7.588.348.359.284				256.879.360.165	7.845.227.719.449
	%									
F.	HIBAH									
	Anggaran	19.901.680.000		34.955.096.000	1.795.814.000	662.678.994.000	8.834.992.000	17.740.270.000	0	745.906.846.000
	Realisasi	18.720.295.287		27.060.647.919	1.244.277.000	965.049.071.632	8.834.992.000	17.562.751.850	285.417.182	1.038.757.452.870
	%	94,06		77,42	69,29	145,63	100,00	99,00		139,26
	TOTAL									
	Anggaran	27.209.858.124.000	92.926.900.000	1.961.480.949.000	13.912.316.942.000	2.446.177.879.000	1.773.516.255.000	527.332.872.000	2.432.179.345.000	50.355.789.266.000
	Realisasi	26.732.282.090.916	72.233.409.205	1.725.910.599.257	12.591.958.931.627	2.454.353.059.185	1.478.647.845.174	438.756.408.304	2.089.528.952.745	47.583.671.296.413
%		**98,24**	**77,73**	**87,99**	**90,51**	**100,33**	**83,37**	**83,20**	**85,91**	**94,49**

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2014

Lampiran 4.4

REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	PAGU RKA-KL DIPA (Rp)	REALISASI-DIPA (Rp)	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	32.895.976.000	24.000.611.471	72,96
2	Sumatera Utara	39.761.762.000	34.290.521.640	86,24
3	Sumatera Barat	27.450.112.000	25.199.722.827	91,80
4	Riau	23.407.072.000	19.342.141.484	82,63
5	Jambi	21.413.345.000	19.444.166.967	90,80
6	Sumatera Selatan	31.059.452.000	25.778.696.286	83,00
7	Bengkulu	20.540.594.000	18.174.051.494	88,48
8	Lampung	27.772.732.000	25.628.708.375	92,28
9	Kepulauan Bangka Belitung	18.079.624.000	13.404.820.481	74,14
10	Kepulauan Riau	19.438.826.000	15.109.076.890	77,73
11	DKI Jakarta	17.949.792.000	11.361.613.810	63,30
12	Jawa Barat	43.760.085.000	29.393.056.670	67,17
13	Jawa Tengah	49.695.171.000	41.669.929.607	83,85
14	D.I. Yogyakarata	17.628.516.000	14.442.087.992	81,92
15	Jawa Timur	50.327.188.000	35.868.214.720	71,27
16	Banten	23.365.627.000	18.122.088.460	77,56
17	Bali	20.513.313.000	17.356.012.730	84,61
18	Nusa Tenggara Barat	24.011.888.000	20.412.808.237	85,01
19	Nusa Tenggara Timur	35.798.816.000	30.232.596.856	84,45
20	Kalimantan Barat	25.236.144.000	20.008.150.009	79,28
21	Kalimantan Tengah	23.860.247.000	19.726.839.180	82,68
22	Kalimantan Selatan	25.094.649.000	20.325.377.895	80,99
23	Kalimantan Timur	24.389.316.000	15.950.059.491	65,40
24	Sulawesi Utara	24.647.681.000	22.919.012.829	92,99
25	Sulawesi Tengah	26.065.613.000	23.654.588.040	90,75
26	Sulawesi Selatan	38.657.797.000	34.217.466.446	88,51
27	Sulawesi Tenggara	25.787.817.000	23.745.149.340	92,08
28	Gorontalo	19.270.057.000	18.078.777.108	93,82
29	Sulawesi Barat	17.713.519.000	12.142.696.500	68,55
30	Maluku	26.318.152.000	22.272.271.942	84,63
31	Maluku Utara	23.087.621.000	20.389.241.283	88,31
32	Papua Barat	26.748.142.000	19.852.707.716	74,22
33	Papua	41.779.801.000	29.992.197.051	71,79
Indonesia		**913.526.447.000**	**742.505.461.827**	**81,28**

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2015

Keterangan : dalam juta rupiah

*RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga

Lampiran 4.5

ALOKASI DAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	PAGU RKA-KL DIPA (Rp)	REALISASI-DIPA (Rp)	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	47.125.835.000	42.196.589.732	89,54
2	Sumatera Utara	77.915.975.000	66.532.829.219	85,39
3	Sumatera Barat	97.135.470.000	63.769.094.957	65,65
4	Riau	39.016.114.000	36.490.325.887	93,53
5	Jambi	106.365.760.000	98.313.562.070	92,43
6	Sumatera Selatan	58.731.690.000	53.771.634.431	91,55
7	Bengkulu	30.354.400.000	28.731.946.473	94,65
8	Lampung	115.568.640.000	95.682.531.607	82,79
9	Kepulauan Bangka Belitung	47.330.683.000	43.528.609.530	91,97
10	Kepulauan Riau	51.008.467.000	45.606.339.300	89,41
11	DKI Jakarta	31.036.200.000	30.083.049.140	96,93
12	Jawa Barat	228.360.165.000	175.636.002.871	76,91
13	Jawa Tengah	292.876.810.000	238.178.764.551	81,32
14	D.I. Yogyakarata	56.671.055.000	45.409.259.151	80,13
15	Jawa Timur	340.961.581.000	268.544.361.786	78,76
16	Banten	34.701.585.000	27.782.600.100	80,06
17	Bali	84.698.300.000	41.953.251.974	49,53
18	Nusa Tenggara Barat	75.529.355.000	67.882.507.462	89,88
19	Nusa Tenggara Timur	171.104.685.000	150.231.540.513	87,80
20	Kalimantan Barat	108.590.000.000	88.541.147.105	81,54
21	Kalimantan Tengah	57.419.428.000	45.377.041.450	79,03
22	Kalimantan Selatan	68.798.257.000	39.750.546.100	57,78
23	Kalimantan Timur	41.280.620.000	35.908.001.088	86,99
24	Kalimantan Utara	12.000.000.000	8.319.102.736	69,33
25	Sulawesi Utara	81.420.138.000	77.204.711.859	94,82
26	Sulawesi Tengah	64.156.115.000	57.282.705.098	89,29
27	Sulawesi Selatan	296.598.277.000	271.183.550.104	91,43
28	Sulawesi Tenggara	65.254.050.000	62.177.214.350	95,28
29	Gorontalo	71.405.900.000	46.629.897.415	65,30
30	Sulawesi Barat	102.674.340.000	101.394.100.638	98,75
31	Maluku	75.334.880.000	50.808.599.810	67,44
32	Maluku Utara	123.446.130.000	98.332.927.924	79,66
33	Papua Barat	48.753.100.000	44.804.764.205	91,90
34	Papua	195.939.195.000	184.599.891.194	94,21
Indonesia		**3.399.563.200.000**	**2.832.639.001.830**	**83,32**

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2015

Keterangan : dalam juta rupiah

*RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga

Lampiran 4.6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH PROVINSI MENURUT FUNGSI KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Fungsi		% Kesehatan
		Kesehatan (Rp)	Total (Rp)	
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	3.541.295.818.529	34.059.953.035.110	10,40
2	Sumatera Utara	3.754.411.925.591	39.911.575.856.308	9,41
3	Sumatera Barat	2.058.155.193.235	20.060.280.747.416	10,26
4	Riau	2.428.557.707.569	67.354.625.288.413	3,61
5	Jambi	1.342.354.334.034	14.427.176.545.319	9,30
6	Sumatera Selatan	2.133.028.048.922	29.253.454.585.061	7,29
7	Bengkulu	873.323.392.511	8.693.584.808.440	10,05
8	Lampung	1.637.561.073.613	19.981.120.296.744	8,20
9	Kepulauan Bangka Belitung	781.911.340.845	7.042.171.375.143	11,10
10	Kepulauan Riau	1.111.423.220.184	12.406.671.135.126	8,96
11	DKI Jakarta	6.208.631.460.265	37.764.668.506.597	16,44
12	Jawa Barat	7.796.452.668.179	81.021.730.843.123	9,62
13	Jawa Tengah	7.970.070.643.353	66.010.569.134.834	12,07
14	D.I. Yogyakarata	888.530.465.855	9.121.732.882.986	9,74
15	Jawa Timur	9.366.472.939.406	75.622.283.450.357	12,39
16	Banten	3.194.821.757.554	21.403.736.402.512	14,93
17	Bali	840.678.749.627	7.973.078.272.309	10,54
18	Nusa Tenggara Barat	980.499.910.696	8.766.902.727.455	11,18
19	Nusa Tenggara Timur	1.233.233.394.809	12.641.954.287.887	9,76
20	Kalimantan Barat	1.556.990.354.505	16.452.555.325.857	9,46
21	Kalimantan Tengah	1.319.001.101.432	14.932.033.164.563	8,83
22	Kalimantan Selatan	2.496.802.696.540	20.277.535.609.339	12,39
23	Kalimantan Timur	3.344.741.288.380	44.336.340.232.618	7,54
24	Sulawesi Utara	955.461.868.414	11.155.329.991.256	8,57
25	Sulawesi Tengah	1.165.869.993.186	11.727.681.030.167	9,94
26	Sulawesi Selatan	2.702.444.198.949	26.807.042.542.141	10,08
27	Sulawesi Tenggara	742.766.174.886	8.606.551.791.281	8,63
28	Gorontalo	580.521.243.473	5.247.388.452.277	11,06
29	Sulawesi Barat	390.199.492.546	4.937.035.201.105	7,90
30	Maluku	492.261.663.562	5.733.888.608.642	8,59
31	Maluku Utara	397.649.601.788	5.359.036.180.390	7,42
32	Papua Barat	999.533.614.964	14.395.504.511.901	6,94
33	Papua	2.759.315.808.862	37.112.846.561.046	7,43
Indonesia		**78.044.973.146.265**	**800.598.039.383.722**	9,75

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2015 ; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, 2015

Keterangan : dalam juta rupiah

Lampiran 4.7

ALOKASI DAN REALISASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	29.584.700.000	29.169.790.017	98,60
2	Sumatera Utara	54.796.030.000	53.981.583.299	98,51
3	Sumatera Barat	23.759.230.000	23.325.894.050	98,18
4	Riau	18.207.850.000	18.055.116.000	99,16
5	Jambi	15.521.600.000	15.424.194.620	99,37
6	Sumatera Selatan	29.782.250.000	29.477.989.800	98,98
7	Bengkulu	15.902.000.000	15.792.586.854	99,31
8	Lampung	25.981.320.000	25.743.489.777	99,08
9	Kepulauan Bangka Belitung	5.553.000.000	5.447.299.730	98,10
10	Kepulauan Riau	6.799.350.000	6.590.542.500	96,93
11	DKI Jakarta	31.036.200.000	30.083.049.140	96,93
12	Jawa Barat	96.417.900.000	94.914.854.385	98,44
13	Jawa Tengah	81.012.150.000	80.491.998.100	99,36
14	DI Yogyakarta	10.681.460.000	10.587.967.250	99,12
15	Jawa Timur	89.104.400.000	87.710.067.130	98,44
16	Banten	20.375.595.000	20.056.393.100	98,43
17	Bali	10.485.700.000	10.434.715.400	99,51
18	Nusa Tenggara Barat	42.940.100.000	42.188.799.438	98,25
19	Nusa Tenggara Timur	98.681.300.000	93.426.858.513	94,68
20	Kalimantan Barat	28.470.000.000	28.165.053.840	98,93
21	Kalimantan Tengah	22.775.028.000	22.158.808.550	97,29
22	Kalimantan Selatan	26.064.000.000	25.468.079.750	97,71
23	Kalimantan Timur	27.132.800.000	24.714.128.188	91,09
24	Sulawesi Utara	22.117.200.000	21.893.788.900	98,99
25	Sulawesi Tengah	21.344.635.000	21.117.227.280	98,93
26	Sulawesi Selatan	51.941.952.000	51.281.057.750	98,73
27	Sulawesi Tenggara	29.578.240.000	29.506.806.550	99,76
28	Gorontalo	10.753.000.000	10.680.015.315	99,32
29	Sulawesi Barat	10.444.200.000	10.335.832.000	98,96
30	Maluku	41.153.200.000	39.805.569.810	96,73
31	Maluku Utara	27.528.600.000	27.232.002.200	98,92
32	Papua Barat	38.803.100.000	36.935.356.205	95,19
33	Papua	106.960.300.000	105.766.951.950	98,88
Indonesia		**1.171.688.390.000**	**1.147.963.867.391**	**97,98**

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Keterangan : Data kumulatif sampai dengan 24 Februari 2015

Lampiran 4.8

CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PER 31 DESEMBER 2014

No.	Provinsi	umlah Pendudu	PBI		Non PBI			Total	%
			APBN	APBD	Pekerja Penerima Upah	Pekerja Bukan Penerima Upah	Bukan Pekerja		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Aceh	5.046.182	2.170.963	1.652.085	593.138	10.010	110.909	4.537.105	90
2	Sumatera Utara	14.510.668	4.192.296	534.496	1.280.672	494.926	238.802	6.741.192	46
3	Sumatera Barat	5.366.763	1.533.170	744.933	561.877	231.913	127.765	3.199.658	60
4	Riau	5.831.888	1.304.716	-	605.949	244.416	41.732	2.196.813	38
5	Jambi	3.375.079	821.556	46.243	335.135	140.617	41.247	1.384.798	41
6	Sumatera Selatan	7.975.149	2.433.664	-	701.160	271.052	114.618	3.520.494	44
7	Bengkulu	1.909.986	628.605	88.706	228.572	70.787	27.177	1.043.847	55
8	Lampung	9.499.116	3.087.543	191.996	540.054	227.975	90.347	4.137.915	44
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.269.381	212.827	71.948	130.627	72.283	9.903	497.588	39
10	Kepulauan Riau	1.802.229	333.636	11.411	432.499	133.790	12.778	924.114	51
11	DKI Jakarta	9.768.250	1.271.293	2.747.462	2.589.612	987.961	338.046	7.934.374	81
12	Jawa Barat	42.223.484	14.758.325	733.179	3.515.978	2.126.142	861.236	21.994.860	52
13	Jawa Tengah	34.798.486	14.151.033	146.366	2.560.361	977.936	753.364	18.589.060	53
14	D I Yogyakarta	3.535.644	1.572.154	-	441.852	113.087	155.947	2.283.040	65
15	Jawa Timur	38.999.837	14.001.869	388.230	3.071.184	958.067	819.596	19.238.946	49
16	Banten	9.916.848	3.221.967	78.019	1.077.637	594.171	125.757	5.097.551	51
17	Bali	4.151.630	904.863	-	540.242	101.735	96.610	1.643.450	40
18	Nusa Tenggara Barat	5.128.563	2.259.556	127.002	334.647	68.440	57.700	2.847.345	56
19	Nusa Tenggara Timur	5.240.337	2.671.319	132.983	385.874	64.759	81.240	3.336.175	64
20	Kalimantan Barat	5.281.941	1.343.862	81.125	381.034	172.732	63.369	2.042.122	39
21	Kalimantan Tengah	2.425.226	449.376	87.500	256.615	72.680	38.647	904.818	37
22	Kalimantan Selatan	3.805.002	753.528	9.535	378.938	103.368	77.632	1.323.001	35
23	Kalimantan Timur	3.185.555	639.937	-	656.140	161.981	46.351	1.504.409	47
24	Kalimantan Utara	1.054.238	144.076	29.003	105.511	45.562	7.081	331.233	31
25	Sulawesi Utara	2.559.223	790.857	156.721	304.016	113.568	86.376	1.451.538	57
26	Sulawesi Tengah	2.795.470	1.131.065	26.554	293.940	63.694	45.304	1.560.557	56
27	Sulawesi Selatan	9.414.387	2.944.923	47.934	820.528	249.555	238.599	4.301.539	46
28	Sulawesi Tenggara	2.482.921	984.912	16.719	257.433	43.304	34.664	1.337.032	54
29	Gorontalo	1.132.510	504.293	378.399	119.212	13.242	18.403	1.033.549	91
30	Sulawesi Barat	1.514.837	504.423	171.921	93.400	24.336	20.588	814.668	54
31	Maluku	1.785.652	754.627	-	206.539	18.408	34.368	1.013.942	57
32	Maluku Utara	1.239.677	328.965	15.998	130.639	14.238	15.516	505.356	41
33	Papua Barat	1.060.142	760.422	38.634	133.513	21.431	15.674	969.674	91
34	Papua	3.847.747	2.833.379	12.127	262.621	44.693	29.070	3.181.890	83
Total		**253.934.048**	**86.400.000**	**8.767.229**	**24.327.149**	**9.052.859**	**4.876.416**	**133.423.653**	**53**

Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Keterangan : Data kumulatif sampai dengan Data per Desember 2014, Data Jumlah Penduduk: BPS, 2014

Lampiran 4.9

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER DESEMBER 2014

NO	PROVINSI	FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA					TOTAL
		PUSKESMAS	DOKTER PRAKTEK PRIBADI	KLINIK POLRI	KLINIK PRATAMA	KLINIK TNI	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	337	63	26	55	26	507
2	Sumatera Utara	570	83	35	231	31	950
3	Sumatera Barat	264	91	22	49	16	442
4	Riau	211	75	14	89	15	404
5	Jambi	176	56	12	14	5	263
6	Sumatera Selatan	321	135	18	59	21	554
7	Bengkulu	180	65	13	9	5	272
8	Lampung	290	83	11	68	14	466
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	34	8	7	4	114
10	Kepulauan Riau	73	8	7	68	17	173
11	DKI Jakarta	340	3	22	129	84	578
12	Jawa Barat	1.050	424	44	568	71	2.157
13	Jawa Tengah	875	944	42	234	54	2.149
14	D I Yogyakarta	121	100	6	35	9	271
15	Jawa Timur	960	564	45	330	103	2.002
16	Banten	231	6	14	206	16	473
17	Bali	120	243	12	45	15	435
18	Nusa Tenggara Barat	158	76	12	6	10	262
19	Nusa Tenggara Timur	370	85	21	12	20	508
20	Kalimantan Barat	238	38	16	10	23	325
21	Kalimantan Tengah	195	50	18	8	8	279
22	Kalimantan Selatan	228	106	17	11	20	382
23	Kalimantan Timur	174	104	13	42	22	355
24	Kalimantan Utara	48	25	4	2	12	91
25	Sulawesi Utara	187	107	15	5	13	327
26	Sulawesi Tengah	184	34	12	11	8	249
27	Sulawesi Selatan	446	156	31	51	39	723
28	Sulawesi Tenggara	269	48	13	8	8	346
29	Gorontalo	93	29	7	8	8	145
30	Sulawesi Barat	94	21	5	2	3	125
31	Maluku	197	27	9	1	12	246
32	Maluku Utara	127	34	9	3	8	181
33	Papua Barat	149	25	5	6	6	191
34	Papua	394	42	11	6	29	482
TOTAL		**9.731**	**3.984**	**569**	**2.388**	**755**	**17.427**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2015

Keterangan : * Sumber Data Puskesmas berdasarkan Surat Kapusdatin No.IR.02.02/2/0044/2015, Tanggal 8 Januari 2015

Lampiran 4.10

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN PER DESEMBER 2014

No	PROVINSI	FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN								TOTAL
		RS KHUSUS	RS KHUSUS JIWA	RS PEMERINTAH TIPE A	RS PEMERINTAH TIPE B	RS PEMERINTAH TIPE C	RS PEMERINTAH TIPE D	RS SWASTA	RS TNI/POLRI	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh		1	1	5	14	7	26	4	58
2	Sumatera Utara	2	1	1	10	21	8	57	8	108
3	Sumatera Barat	2	1		3	17	1	12	4	40
4	Riau		1		2	11	3	16	3	36
5	Jambi		1		1	10	2	5	2	21
6	Sumatera Selatan	3	1	1	1	11	13	11	4	45
7	Bengkulu		1		1	4	7	3	2	18
8	Lampung		1		2	11	1	19	2	36
9	Kepulauan Bangka Belitung		1			3	4	5		13
10	Kepulauan Riau				2	7	3	8	1	21
11	DKI Jakarta	12	3	4	6	3	1	43	8	80
12	Jawa Barat	12	1	2	21	15	7	132	12	202
13	Jawa Tengah	8	5	2	21	20	9	129	10	204
14	D I Yogyakarta	6	1	1	4	1	2	35	3	53
15	Jawa Timur	10	2	2	26	32	9	100	25	206
16	Banten	1			5	3	3	35	2	49
17	Bali	1	1	1	6	3	1	18	3	34
18	Nusa Tenggara Barat		1		2	7	2	8	2	22
19	Nusa Tenggara Timur	1			1	9	9	17	3	40
20	Kalimantan Barat	1	2		2	9	5	4	5	28
21	Kalimantan Tengah		1		2	6	6	1	2	18
22	Kalimantan Selatan	1	1	1	2	11	1		4	21
23	Kalimantan Timur	1	1	1	3	9		9	4	28
24	Kalimantan Utara				1	3	1		1	6
25	Sulawesi Utara		1		1	6	7	11	4	30
26	Sulawesi Tengah		1		2	8	3	5	2	21
27	Sulawesi Selatan	1	1	1	7	20	2	20	8	60
28	Sulawesi Tenggara		1		1	8	4	4	2	20
29	Gorontalo				2	3	4	3		12
30	Sulawesi Barat					2	4	1		7
31	Maluku		1		1	3	10	6	5	26
32	Maluku Utara				1	2	6	3	1	13
33	Papua Barat					4	6	1	2	13
34	Papua		1		1	6	9	2	5	24
TOTAL		**62**	**34**	**18**	**145**	**302**	**160**	**749**	**143**	**1613**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2015

Lampiran 5.1

CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K1, K4, DAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Ibu Hamil					Ibu Bersalin			Ibu Nifas	
		Jumlah	K1	% K1	K4	% K4	Jumlah	Ditolong Nakes	% Ditolong Nakes	Kunjungan Nifas 3 kali	% Kf-3
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	117.907	106.750	90,54	96.479	81,83	112.547	95.272	84,65	90.166	80,11
2	Sumatera Utara	321.670	297.879	92,60	277.675	86,32	306.863	267.706	87,24	288.897	94,15
3	Sumatera Barat	111.897	106.070	94,79	92.539	82,70	106.285	92.012	86,57	87.272	82,11
4	Riau	147.717	130.945	88,65	118.725	80,37	140.997	109.592	77,73	112.143	79,54
5	Jambi	79.489	78.604	98,89	74.236	93,39	76.110	69.963	91,92	69.319	91,08
6	Sumatera Selatan	188.609	171.470	90,91	165.207	87,59	178.793	157.985	88,36	154.296	86,30
7	Bengkulu	38.556	37.398	97,00	35.095	91,02	37.018	33.708	91,06	32.490	87,77
8	Lampung	189.876	181.865	95,78	170.165	89,62	180.671	155.676	86,17	152.036	84,15
9	Kepulauan Bangka Belitung	31.811	30.587	96,15	28.643	90,04	30.344	27.655	91,14	26.708	88,02
10	Kepulauan Riau	62.518	58.821	94,09	55.397	88,61	59.665	53.313	89,35	50.921	85,34
11	DKI Jakarta	194.693	194.545	99,92	186.918	96,01	185.844	180.622	97,19	175.879	94,64
12	Jawa Barat	1.091.854	1.057.400	96,84	973.201	89,13	1.040.974	911.262	87,54	909.080	87,33
13	Jawa Tengah	613.243	610.771	99,60	570.965	93,11	565.013	560.323	99,17	521.912	92,37
14	DI Yogyakarta	50.133	50.133	100,00	46.526	92,81	45.575	45.556	99,96	43.085	94,54
15	Jawa Timur	675.789	650.057	96,19	599.162	88,66	645.071	596.376	92,45	588.013	91,15
16	Banten	250.935	235.267	93,76	212.119	84,53	232.143	214.483	92,39	208.009	89,60
17	Bali	73.201	72.171	98,59	68.919	94,15	69.853	68.219	97,66	65.557	93,85
18	Nusa Tenggara Barat	120.837	101.110	83,67	92.131	76,24	114.422	85.524	74,74	84.734	74,05
19	Nusa Tenggara Timur	127.010	109.134	85,93	78.467	61,78	120.351	93.797	77,94	83.174	69,11
20	Kalimantan Barat	104.762	99.300	94,79	90.080	85,99	99.825	84.085	84,23	81.888	82,03
21	Kalimantan Tengah	50.610	48.398	95,63	44.155	87,25	46.715	42.099	90,12	41.113	88,01
22	Kalimantan Selatan	80.837	79.467	98,31	66.809	82,65	76.969	68.789	89,37	67.173	87,27
23	Kalimantan Timur	74.638	76.315	102,25	66.740	89,42	71.038	65.317	91,95	60.976	85,84
24	Kalimantan Utara	13.112	13.085	99,79	11.459	87,39	12.516	12.036	96,16	11.387	90,98
25	Sulawesi Utara	44.358	45.650	102,91	45.650	102,91	46.461	38.580	83,04	37.148	79,96
26	Sulawesi Tengah	65.821	57.879	87,93	50.473	76,68	62.829	48.312	76,89	47.066	74,91
27	Sulawesi Selatan	166.131	164.665	99,12	151.537	91,22	158.632	147.189	92,79	141.960	89,49
28	Sulawesi Tenggara	55.221	53.089	96,14	44.957	81,41	52.771	45.284	85,81	44.319	83,98
29	Gorontalo	22.638	22.729	100,40	20.221	89,32	21.203	19.115	90,15	17.867	84,27
30	Sulawesi Barat	29.253	27.545	94,16	22.879	78,21	24.880	21.834	87,76	20.053	80,60
31	Maluku	43.050	24.077	55,93	20.609	47,87	41.480	19.455	46,90	17.998	43,39
32	Maluku Utara	28.035	22.507	80,28	19.677	70,19	26.826	18.063	67,33	18.402	68,60
33	Papua Barat	22.720	17.192	75,67	9.030	39,74	21.687	9.701	44,73	6.317	29,13
34	Papua	57.203	45.265	79,13	28.415	49,67	54.601	34.480	63,15	21.080	38,61
Indonesia		**5.346.133**	**5.078.140**	**94,99**	**4.635.260**	**86,70**	**5.066.973**	**4.493.383**	**88,68**	**4.378.437**	**86,41**

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 5.2

CAKUPAN PEMBERIAN 90 TABLET TAMBAH DARAH PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Ibu Hamil Mendapat 90 Tablet Tambah Darah	
			Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	117.923	93.783	79,53
2	Sumatera Utara	321.057	270.611	84,29
3	Sumatera Barat	112.252	90.996	81,06
4	Riau	155.885	128.946	82,72
5	Jambi	79.402	72.304	91,06
6	Sumatera Selatan	223.576	193.117	86,38
7	Bengkulu	38.703	35.190	90,92
8	Lampung	191.610	160.061	83,53
9	Kepulauan Bangka Belitung	31.744	26.783	84,37
10	Kepulauan Riau	64.063	52.321	81,67
11	DKI Jakarta	194.693	184.553	94,79
12	Jawa Barat	1.039.921	940.967	90,48
13	Jawa Tengah	613.243	567.162	92,49
14	DI Yogyakarta	50.133	45.918	91,59
15	Jawa Timur	675.789	573.989	84,94
16	Banten	240.936	147.830	61,36
17	Bali	73.176	69.521	95,01
18	Nusa Tenggara Barat	120.744	111.591	92,42
19	Nusa Tenggara Timur	126.228	93.633	74,18
20	Kalimantan Barat	104.762	89.132	85,08
21	Kalimantan Tengah	52.145	42.403	81,32
22	Kalimantan Selatan	81.017	64.642	79,79
23	Kalimantan Timur	79.002	63.892	80,87
24	Kalimantan Utara	13.112	11.830	90,22
25	Sulawesi Utara	46.410	37.227	80,21
26	Sulawesi Tengah	65.656	46.235	70,42
27	Sulawesi Selatan	166.442	148.009	88,93
28	Sulawesi Tenggara	55.395	43.768	79,01
29	Gorontalo	22.580	19.241	85,21
30	Sulawesi Barat	29.009	22.884	78,89
31	Maluku	43.933	27.463	62,51
32	Maluku Utara	26.837	21.579	80,41
33	Papua Barat	23.539	7.640	32,46
34	Papua	30.498	14.982	49,12
Indonesia		**5.311.415**	**4.520.203**	**85,10**

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 5.3

CAKUPAN IMUNISASI TT PADA WANITA USIA SUBUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

NO	PROVINSI	JUMLAH WANITA USIA SUBUR (WUS)	JUMLAH WANITA USIA SUBUR DIIMUNISASI									
			TT1		TT2		TT3		TT4		TT5	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Aceh	1.051.652	30.958	2,9	26.493	2,5	16.267	1,5	11.537	1,1	12.286	1,2
2	Sumatera Utara	2.794.408	61.346	2,2	52.536	1,9	26.050	0,9	16.930	0,6	14.148	0,5
3	Sumatera Barat	1.004.139	23.003	2,3	19.447	1,9	17.556	1,7	15.122	1,5	17.551	1,7
4	Riau	1.412.692	19.956	1,4	19.954	1,4	23.198	1,6	21.630	1,5	19.648	1,4
5	Jambi	750.904	29.249	3,9	25.068	3,3	11.410	1,5	7.521	1,0	6.160	0,8
6	Sumatera Selatan	1.725.601	44.267	2,6	38.969	2,3	1.479	0,1	1.067	0,1	681	0,0
7	Bengkulu	398.142	19.738	5,0	17.291	4,3	2.565	0,6	2.654	0,7	2.713	0,7
8	Lampung	1.661.038	13.725	0,8	14.359	0,9	13.606	0,8	13.565	0,8	12.618	0,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	295.776	3.286	1,1	4.051	1,4	6.415	2,2	5.663	1,9	4.421	1,5
10	Kepulauan Riau	524.294	20.371	3,9	18.692	3,6	11.312	2,2	8.472	1,6	7.471	1,4
11	DKI Jakarta	2.500.032	48.041	1,9	45.539	1,8	25.912	1,0	31.991	1,3	33.925	1,4
12	Jawa Barat	9.761.161	501.643	5,1	453.179	4,6	118.168	1,2	72.215	0,7	54.965	0,6
13	Jawa Tengah	6.405.053	433.791	6,8	406.248	6,3	358.769	5,6	244.462	3,8	219.638	3,4
14	DI Yogyakarta	711.689	1.301	0,2	2.272	0,3	24.040	3,4	14.549	2,0	17.786	2,5
15	Jawa Timur	7.731.799	71.386	0,9	55.195	0,7	92.036	1,2	152.416	2,0	533.381	6,9
16	Banten	2.735.352	92.489	3,4	87.334	3,2	56.184	2,1	47.085	1,7	50.756	1,9
17	Bali	858.995	61	0,0	103	0,0	2.497	0,3	11.622	1,4	32.820	3,8
18	Nusa Tenggara Barat	1.062.297	22.325	2,1	23.179	2,2	11.329	1,1	7.850	0,7	6.083	0,6
19	Nusa Tenggara Timur	967.345	16.681	1,7	13.871	1,4	9.779	1,0	6.917	0,7	6.725	0,7
20	Kalimantan Barat	965.071	23.505	2,4	19.068	2,0	12.281	1,3	8.954	0,9	8.512	0,9
21	Kalimantan Tengah	524.405	10.141	1,9	7.858	1,5	1.888	0,4	1.062	0,2	864	0,2
22	Kalimantan Selatan	865.982	28.580	3,3	23.805	2,7	8.137	0,9	5.149	0,6	2.904	0,3
23	Kalimantan Timur	780.607	13.637	1,7	11.722	1,5	8.935	1,1	7.982	1,0	8.639	1,1
24	Kalimantan Utara	119.955	835	0,7	981	0,8	1.029	0,9	1.054	0,9	915	0,8
25	Sulawesi Utara	462.332	27.641	6,0	23.437	5,1	2.760	0,6	1.357	0,3	1.142	0,2
26	Sulawesi Tengah	586.663	15.406	2,6	13.735	2,3	5.916	1,0	3.939	0,7	3.338	0,6
27	Sulawesi Selatan	1.768.809	65.126	3,7	61.154	3,5	16.684	0,9	9.516	0,5	7.808	0,4
28	Sulawesi Tenggara	514.257	12.457	2,4	10.751	2,1	4.817	0,9	3.388	0,7	5.864	1,1
29	Gorontalo	239.099	17.692	7,4	15.820	6,6	2.322	1,0	1.364	0,6	971	0,4
30	Sulawesi Barat	264.213	8.765	3,3	7.019	2,7	2.735	1,0	1.120	0,4	898	0,3
31	Maluku	342.108	29.749	8,7	24.964	7,3	14.723	4,3	6.515	1,9	5.620	1,6
32	Maluku Utara	240.789	11.509	4,8	10.173	4,2	3.584	1,5	2.366	1,0	2.381	1,0
33	Papua Barat	190.475	2.188	1,1	2.602	1,4	2.493	1,3	2.060	1,1	1.507	0,8
34	Papua	800.230	3.943	0,5	2.750	0,3	1.205	0,2	687	0,1	924	0,1
INDONESIA		**53.017.364**	**1.724.791**	**3,3**	**1.559.619**	**2,9**	**918.081**	**1,7**	**749.781**	**1,4**	**1.106.063**	**2,1**

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2015

Update sampai dengan 30 April 2015 (data sasaran menggunakan data Sekjen)

Lampiran 5.4

CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

NO	PROVINSI	JUMLAH IBU HAMIL	JUMLAH IBU HAMIL DIIMUNISASI										TT 2+	
			TT1		TT2		TT3		TT4		TT5			
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Aceh	111.991	22.227	19,8	20.897	18,7	10.610	9,5	6.937	6,2	7.310	6,5	45.754	40,9
2	Sumatera Utara	338.258	38.689	11,4	35.548	10,5	15.984	4,7	11.127	3,3	8.991	2,7	71.650	21,2
3	Sumatera Barat	120.270	16.948	14,1	16.329	13,6	12.350	10,3	10.792	9,0	9.615	8,0	49.086	40,8
4	Riau	160.615	16.868	10,5	17.895	11,1	19.802	12,3	19.648	12,2	18.184	11,3	75.529	47,0
5	Jambi	78.347	23.385	29,8	21.534	27,5	10.181	13,0	6.431	8,2	4.372	5,6	42.518	54,3
6	Sumatera Selatan	183.561	44.224	24,1	38.956	21,2	1.479	0,8	1.067	0,6	681	0,4	42.183	23,0
7	Bengkulu	42.069	19.037	45,3	16.867	40,1	1.969	4,7	1.972	4,7	2.107	5,0	22.915	54,5
8	Lampung	180.278	11.017	6,1	11.574	6,4	10.251	5,7	11.029	6,1	10.062	5,6	42.916	23,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	32.515	3.124	9,6	3.741	11,5	5.516	17,0	4.984	15,3	3.776	11,6	18.017	55,4
10	Kepulauan Riau	55.947	13.816	24,7	12.342	22,1	8.308	14,8	6.024	10,8	5.258	9,4	31.932	57,1
11	DKI Jakarta	194.693	44.003	22,6	41.471	21,3	22.413	11,5	25.352	13,0	23.944	12,3	113.180	58,1
12	Jawa Barat	967.062	501.643	51,9	453.179	46,9	118.168	12,2	72.215	7,5	54.965	5,7	698.527	72,2
13	Jawa Tengah	621.502	127.874	20,6	135.889	21,9	99.223	16,0	81.139	13,1	71.500	11,5	387.751	62,4
14	DI Yogyakarta	60.250	830	1,4	1.894	3,1	13.859	23,0	13.108	21,8	16.734	27,8	45.595	75,7
15	Jawa Timur	644.423	16.869	2,6	18.442	2,9	31.868	4,9	52.107	8,1	95.193	14,8	197.610	30,7
16	Banten	251.820	79.447	31,5	70.133	27,9	32.426	12,9	24.117	9,6	21.111	8,4	147.787	58,7
17	Bali	77.431	57	0,1	103	0,1	2.487	3,2	11.309	14,6	32.449	41,9	46.348	59,9
18	Nusa Tenggara Barat	114.627	22.325	19,5	23.179	20,2	11.329	9,9	7.850	6,8	6.083	5,3	48.441	42,3
19	Nusa Tenggara Timur	138.327	12.958	9,4	10.556	7,6	6.633	4,8	4.191	3,0	4.127	3,0	25.507	18,4
20	Kalimantan Barat	101.222	21.904	21,6	17.958	17,7	9.149	9,0	7.023	6,9	6.589	6,5	40.719	40,2
21	Kalimantan Tengah	50.873	8.140	16,0	6.828	13,4	1.392	2,7	933	1,8	768	1,5	9.921	19,5
22	Kalimantan Selatan	88.849	17.626	19,8	17.985	20,2	6.163	6,9	4.238	4,8	2.421	2,7	30.807	34,7
23	Kalimantan Timur	84.827	9.297	11,0	8.588	10,1	5.468	6,4	4.466	5,3	4.798	5,7	23.320	27,5
24	Kalimantan Utara	14.618	558	3,8	645	4,4	603	4,1	459	3,1	381	2,6	2.088	14,3
25	Sulawesi Utara	45.947	26.064	56,7	23.282	50,7	2.029	4,4	867	1,9	627	1,4	26.805	58,3
26	Sulawesi Tengah	65.821	14.538	22,1	13.062	19,8	5.233	8,0	3.433	5,2	3.035	4,6	24.763	37,6
27	Sulawesi Selatan	184.163	56.732	30,8	57.498	31,2	15.104	8,2	8.831	4,8	7.515	4,1	88.948	48,3
28	Sulawesi Tenggara	64.809	12.457	19,2	10.751	16,6	4.817	7,4	3.388	5,2	5.864	9,0	24.820	38,3
29	Gorontalo	25.538	17.334	67,9	15.653	61,3	2.098	8,2	1.313	5,1	905	3,5	19.969	78,2
30	Sulawesi Barat	32.446	8.693	26,8	6.933	21,4	2.675	8,2	1.092	3,4	880	2,7	11.580	35,7
31	Maluku	44.485	15.983	35,9	13.677	30,7	4.665	10,5	2.241	5,0	2.426	5,5	23.009	51,7
32	Maluku Utara	28.911	9.789	33,9	8.852	30,6	2.095	7,2	1.046	3,6	1.221	4,2	13.214	45,7
33	Papua Barat	23.538	1.555	6,6	1.315	5,6	1.045	4,4	735	3,1	624	2,7	3.719	15,8
34	Papua	60.202	3.162	5,3	2.351	3,9	1.023	1,7	594	1,0	682	1,1	4.650	7,7
INDONESIA		**5.290.235**	**1.239.173**	**23,4**	**1.155.907**	**21,8**	**498.415**	**9,4**	**412.058**	**7,8**	**435.198**	**8,2**	**2.501.578**	**47,3**

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2015

Update sampai dengan 30 April 2015 (data sasaran menggunakan data Sekjen)

Lampiran 5.5

CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Ibu Bersalin	Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan (PN)					
			PN		PN di Fasyankes		PN di Non Fasyankes	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	112.547	95.272	84,65	75.008	66,65	20.264	18,00
2	Sumatera Utara	306.863	267.706	87,24	84.011	27,38	183.695	59,86
3	Sumatera Barat	106.285	92.012	86,57	81.445	76,63	10.567	9,94
4	Riau	140.997	109.592	77,73	81.181	57,58	28.411	20,15
5	Jambi	76.110	69.963	91,92	37.460	49,22	32.503	42,71
6	Sumatera Selatan	178.793	157.985	88,36	64.907	36,30	93.078	52,06
7	Bengkulu	37.018	33.708	91,06	21.581	58,30	12.127	32,76
8	Lampung	180.671	155.676	86,17	108.973	60,32	46.703	25,85
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.344	27.655	91,14	27.655	91,14	0	0,00
10	Kepulauan Riau	59.665	53.313	89,35	53.239	89,23	74	0,12
11	DKI Jakarta	185.844	180.622	97,19	178.816	96,22	1.806	0,97
12	Jawa Barat	1.040.974	911.262	87,54	833.581	80,08	77.681	7,46
13	Jawa Tengah	565.013	560.323	99,17	536.871	95,02	23.452	4,15
14	DI Yogyakarta	45.575	45.556	99,96	45.328	99,46	228	0,50
15	Jawa Timur	645.071	596.376	92,45	589.054	91,32	7.322	1,14
16	Banten	232.143	214.483	92,39	181.269	78,08	33.214	14,31
17	Bali	69.853	68.219	97,66	67.878	97,17	341	0,49
18	Nusa Tenggara Barat	114.422	85.524	74,74	76.972	67,27	8.552	7,47
19	Nusa Tenggara Timur	120.351	93.797	77,94	81.465	67,69	12.332	10,25
20	Kalimantan Barat	99.825	84.085	84,23	53.292	53,39	30.793	30,85
21	Kalimantan Tengah	46.715	42.099	90,12	21.635	46,31	20.464	43,81
22	Kalimantan Selatan	76.969	68.789	89,37	42.935	55,78	25.854	33,59
23	Kalimantan Timur	71.038	65.317	91,95	60.999	85,87	4.318	6,08
24	Kalimantan Utara	12.516	12.036	96,16	9.978	79,72	2.058	16,44
25	Sulawesi Utara	46.461	38.580	83,04	34.722	74,73	3.858	8,30
26	Sulawesi Tengah	62.829	48.312	76,89	39.206	62,40	9.106	14,49
27	Sulawesi Selatan	158.632	147.189	92,79	130.018	81,96	17.171	10,82
28	Sulawesi Tenggara	52.771	45.284	85,81	28.169	53,38	17.115	32,43
29	Gorontalo	21.203	19.115	90,15	18.924	89,25	191	0,90
30	Sulawesi Barat	24.880	21.834	87,76	20.089	80,74	1.745	7,01
31	Maluku	41.480	19.455	46,90	13.619	32,83	5.837	14,07
32	Maluku Utara	26.826	18.063	67,33	14.450	53,87	3.613	13,47
33	Papua Barat	21.687	9.701	44,73	7.761	35,79	1.940	8,95
34	Papua	54.601	34.480	63,15	7.083	12,97	27.397	50,18
Indonesia		**5.066.973**	**4.493.383**	**88,68**	**3.729.573**	**73,61**	**763.810**	**15,07**

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 5.6

CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Perkiraan Komplikasi Kebidanan	Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	117.907	23.581	11.635	49,34
2	Sumatera Utara	321.670	64.334	24.815	38,57
3	Sumatera Barat	111.897	22.379	12.556	56,11
4	Riau	147.717	29.543	8.498	28,76
5	Jambi	79.489	15.898	13.440	84,54
6	Sumatera Selatan	188.609	37.722	23.288	61,74
7	Bengkulu	38.556	7.711	5.376	69,72
8	Lampung	189.876	37.975	23.851	62,81
9	Kepulauan Bangka Belitung	31.811	6.362	5.430	85,35
10	Kepulauan Riau	62.518	12.504	7.345	58,74
11	DKI Jakarta	194.693	38.939	32.227	82,76
12	Jawa Barat	1.091.854	218.371	178.244	81,62
13	Jawa Tengah	613.243	122.649	123.942	101,05
14	DI Yogyakarta	50.133	10.027	8.993	89,69
15	Jawa Timur	675.789	135.158	123.640	91,48
16	Banten	250.935	50.187	41.107	81,91
17	Bali	73.201	14.640	11.300	77,18
18	Nusa Tenggara Barat	120.837	24.167	21.992	91,00
19	Nusa Tenggara Timur	127.010	25.402	13.239	52,12
20	Kalimantan Barat	104.762	20.952	13.161	62,81
21	Kalimantan Tengah	50.610	10.122	5.073	50,12
22	Kalimantan Selatan	80.837	16.167	13.964	86,37
23	Kalimantan Timur	74.638	14.928	12.551	84,08
24	Kalimantan Utara	13.112	2.622	1.554	59,26
25	Sulawesi Utara	44.358	8.872	7.285	82,12
26	Sulawesi Tengah	65.821	13.164	6.790	51,58
27	Sulawesi Selatan	166.131	33.226	24.582	73,98
28	Sulawesi Tenggara	55.221	11.044	5.502	49,82
29	Gorontalo	22.638	4.528	3.307	73,04
30	Sulawesi Barat	29.253	5.851	3.160	54,01
31	Maluku	43.050	8.610	2.703	31,39
32	Maluku Utara	28.035	5.607	2.842	50,69
33	Papua Barat	22.720	4.544	437	9,61
34	Papua	57.203	11.441	3.380	29,54
Indonesia		**5.346.133**	**1.069.227**	**797.209**	**74,56**

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 5.7

CAKUPAN PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah PUS	Peserta KB Baru		Peserta KB Aktif	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	839.048	155.861	18,58	639.409	76,21
2	Sumatera Utara	2.201.509	419.691	19,06	1.525.388	69,29
3	Sumatera Barat	852.342	157.096	18,43	628.473	73,73
4	Riau	1.055.439	191.373	18,13	767.316	72,70
5	Jambi	701.995	130.992	18,66	563.566	80,28
6	Sumatera Selatan	1.637.066	367.324	22,44	1.263.556	77,18
7	Bengkulu	354.628	96.964	27,34	316.095	89,13
8	Lampung	1.708.325	343.200	20,09	1.208.590	70,75
9	Kepulauan Bangka Belitung	252.481	37.576	14,88	206.608	81,83
10	Kepulauan Riau	313.272	52.199	16,66	228.418	72,91
11	DKI Jakarta	1.376.384	440.694	32,02	1.108.841	80,56
12	Jawa Barat	9.562.623	1.414.608	14,79	6.998.177	73,18
13	Jawa Tengah	6.745.397	934.305	13,85	5.299.177	78,56
14	DI Yogyakarta	551.676	55.107	9,99	441.663	80,06
15	Jawa Timur	8.064.939	1.070.195	13,27	6.115.178	75,82
16	Banten	2.121.049	350.759	16,54	1.458.473	68,76
17	Bali	685.450	67.834	9,90	572.937	83,59
18	Nusa Tenggara Barat	1.085.847	183.473	16,90	804.252	74,07
19	Nusa Tenggara Timur	686.397	101.381	14,77	409.743	59,69
20	Kalimantan Barat	733.013	122.446	16,70	528.238	72,06
21	Kalimantan Tengah	462.048	69.533	15,05	353.322	76,47
22	Kalimantan Selatan	812.521	151.867	18,69	643.738	79,23
23	Kalimantan Timur	432.434	90.641	20,96	311.097	71,94
24	Sulawesi Utara	399.028	79.253	19,86	328.562	82,34
25	Sulawesi Tengah	489.323	78.142	15,97	385.315	78,74
26	Sulawesi Selatan	1.387.345	284.814	20,53	1.012.913	73,01
27	Sulawesi Tenggara	431.255	73.477	17,04	324.069	75,15
28	Gorontalo	218.562	36.458	16,68	182.548	83,52
29	Sulawesi Barat	201.068	37.249	18,53	141.477	70,36
30	Maluku	245.539	61.740	25,14	162.726	66,27
31	Maluku Utara	178.342	39.950	22,40	122.171	68,50
32	Papua Barat	75.199	18.933	25,18	71.075	94,52
33	Papua	157.458	46.826	29,74	79.797	50,68
Indonesia		**47.019.002**	**7.761.961**	**16,51**	**35.202.908**	**74,87**

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Lampiran 5.8

PERSENTASE PESERTA KB BARU
MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	IUD		MOW		MOP		Kondom		Implan		Suntikan		Pil		Total
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	4,935	3.17	1,577	1.01	34	0.02	14,952	9.59	5,274	3.38	70,278	45.09	58,811	37.73	155,861
2	Sumatera Utara	30,612	7.29	10,176	2.42	3,671	0.87	49,431	11.78	58,034	13.83	135,252	32.23	132,515	31.57	419,691
3	Sumatera Barat	10,983	6.99	2,576	1.64	491	0.31	11,550	7.35	19,410	12.36	79,250	50.45	32,836	20.90	157,096
4	Riau	6,820	3.56	2,600	1.36	360	0.19	10,987	5.74	13,687	7.15	100,689	52.61	56,230	29.38	191,373
5	Jambi	4,327	3.30	999	0.76	51	0.04	6,055	4.62	12,458	9.51	64,927	49.57	42,175	32.20	130,992
6	Sumatera Selatan	10,354	2.82	2,355	0.64	652	0.18	35,203	9.58	55,386	15.08	154,263	42.00	109,111	29.70	367,324
7	Bengkulu	4,229	4.36	633	0.65	87	0.09	6,865	7.08	14,977	15.45	43,655	45.02	26,518	27.35	96,964
8	Lampung	21,121	6.15	2,498	0.73	86	0.03	20,068	5.85	36,838	10.73	144,697	42.16	117,892	34.35	343,200
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,511	4.02	682	1.81	99	0.26	1,854	4.93	2,708	7.21	20,503	54.56	10,219	27.20	37,576
10	Kepulauan Riau	2,623	5.03	894	1.71	79	0.15	9,270	17.76	2,158	4.13	23,747	45.49	13,428	25.72	52,199
11	DKI Jakarta	61,991	14.07	5,496	1.25	918	0.21	29,232	6.63	24,598	5.58	204,055	46.30	114,404	25.96	440,694
12	Jawa Barat	124,625	8.81	17,916	1.27	2,381	0.17	38,552	2.73	110,835	7.84	760,140	53.74	360,159	25.46	1,414,608
13	Jawa Tengah	69,738	7.46	20,731	2.22	1,404	0.15	39,102	4.19	129,951	13.91	526,909	56.40	146,470	15.68	934,305
14	DI Yogyakarta	15,203	27.59	1,630	2.96	334	0.61	5,415	9.83	5,190	9.42	23,412	42.48	3,923	7.12	55,107
15	Jawa Timur	81,273	7.59	20,219	1.89	2,343	0.22	35,565	3.32	115,042	10.75	586,520	54.80	229,233	21.42	1,070,195
16	Banten	19,710	5.62	2,211	0.63	253	0.07	22,657	6.46	41,926	11.95	168,974	48.17	95,028	27.09	350,759
17	Bali	21,313	31.42	3,046	4.49	216	0.32	4,836	7.13	3,710	5.47	28,224	41.61	6,489	9.57	67,834
18	Nusa Tenggara Barat	14,887	8.11	1,057	0.58	498	0.27	5,583	3.04	25,164	13.72	108,547	59.16	27,737	15.12	183,473
19	Nusa Tenggara Timur	6,621	6.53	3,161	3.12	65	0.06	4,433	4.37	26,852	26.49	48,501	47.84	11,748	11.59	101,381
20	Kalimantan Barat	6,594	5.39	2,336	1.91	708	0.58	6,005	4.90	7,720	6.30	62,362	50.93	36,721	29.99	122,446
21	Kalimantan Tengah	1,255	1.80	896	1.29	27	0.04	2,884	4.15	5,163	7.43	37,322	53.68	21,986	31.62	69,533
22	Kalimantan Selatan	1,694	1.12	922	0.61	249	0.16	4,779	3.15	8,787	5.79	70,009	46.10	65,427	43.08	151,867
23	Kalimantan Timur	7,300	8.05	2,543	2.81	74	0.08	4,247	4.69	4,074	4.49	51,024	56.29	21,379	23.59	90,641
24	Sulawesi Utara	4,545	5.73	1,337	1.69	61	0.08	5,438	6.86	10,206	12.88	38,900	49.08	18,766	23.68	79,253
25	Sulawesi Tengah	4,771	6.11	1,305	1.67	125	0.16	3,270	4.18	7,334	9.39	35,314	45.19	26,023	33.30	78,142
26	Sulawesi Selatan	6,935	2.43	3,278	1.15	265	0.09	24,397	8.57	31,702	11.13	131,984	46.34	86,253	30.28	284,814
27	Sulawesi Tenggara	1,366	1.86	402	0.55	86	0.12	5,861	7.98	8,337	11.35	30,637	41.70	26,788	36.46	73,477
28	Gorontalo	2,682	7.36	500	1.37	56	0.15	1,383	3.79	8,295	22.75	15,091	41.39	8,451	23.18	36,458
29	Sulawesi Barat	871	2.34	342	0.92	66	0.18	2,525	6.78	2,782	7.47	18,525	49.73	12,138	32.59	37,249
30	Maluku	1,815	2.94	512	0.83	188	0.30	7,023	11.38	9,397	15.22	26,555	43.01	16,250	26.32	61,740
31	Maluku Utara	1,237	3.10	391	0.98	65	0.16	3,974	9.95	12,513	31.32	16,832	42.13	4,938	12.36	39,950
32	Papua Barat	686	3.62	286	1.51	46	0.24	1,074	5.67	2,550	13.47	9,167	48.42	5,124	27.06	18,933
33	Papua	614	1.31	877	1.87	24	0.05	16,671	35.60	3,569	7.62	18,989	40.55	6,082	12.99	46,826
Indonesia		**555,241**	**7.15**	**116,384**	**1.50**	**16,062**	**0.21**	**441,141**	**5.68**	**826,627**	**10.65**	**3,855,254**	**49.67**	**1,951,252**	**25.14**	**7,761,961**

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Lampiran 5.9

PERSENTASE PESERTA KB AKTIF
MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif		Metode Kontrasepsi													
					IUD		MOW		MOP		Implan		Kondom		Suntikan		Pil	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*
1	Aceh	839.048	639.409	76,21	21.448	3,35	6.521	1,02	226	0,04	22.245	3,48	56.755	8,88	280.585	43,88	251.629	39,35
2	Sumatera Utara	2.201.509	1.525.388	69,29	165.584	10,86	107.242	7,03	13.297	0,87	201.913	13,24	116.271	7,62	475.944	31,20	445.137	29,18
3	Sumatera Barat	852.342	628.473	73,73	61.223	9,74	20.976	3,34	2.398	0,38	87.852	13,98	30.895	4,92	314.069	49,97	111.060	17,67
4	Riau	1.055.439	767.316	72,70	44.972	5,86	12.308	1,60	1.593	0,21	72.650	9,47	33.946	4,42	339.582	44,26	262.265	34,18
5	Jambi	701.995	563.566	80,28	36.210	6,43	4.662	0,83	1.347	0,24	80.165	14,22	13.751	2,44	234.289	41,57	193.142	34,27
6	Sumatera Selatan	1.637.066	1.263.556	77,18	62.807	4,97	41.808	3,31	6.691	0,53	259.761	20,56	78.522	6,21	497.900	39,40	316.067	25,01
7	Bengkulu	354.628	316.095	89,13	21.155	6,69	6.547	2,07	1.147	0,36	56.880	17,99	10.975	3,47	139.284	44,06	80.107	25,34
8	Lampung	1.708.325	1.208.590	70,75	168.967	13,98	16.659	1,38	13.773	1,14	207.198	17,14	33.580	2,78	409.351	33,87	359.062	29,71
9	Kepulauan Bangka Belitung	252.481	206.608	81,83	9.318	4,51	5.290	2,56	448	0,22	22.290	10,79	7.846	3,80	95.085	46,02	66.331	32,10
10	Kepulauan Riau	313.272	228.418	72,91	17.433	7,63	6.534	2,86	962	0,42	16.928	7,41	15.220	6,66	95.410	41,77	75.931	33,24
11	DKI Jakarta	1.376.384	1.108.841	80,56	237.392	21,41	40.922	3,69	13.120	1,18	87.966	7,93	51.441	4,64	406.389	36,65	271.611	24,50
12	Jawa Barat	9.562.623	6.998.177	73,18	854.301	12,21	189.860	2,71	59.239	0,85	386.529	5,52	108.182	1,55	3.708.615	52,99	1.691.451	24,17
13	Jawa Tengah	6.745.397	5.299.177	78,56	463.036	8,74	282.094	5,32	52.234	0,99	608.505	11,48	123.127	2,32	3.003.259	56,67	766.922	14,47
14	DI Yogyakarta	551.676	441.663	80,06	105.952	23,99	20.930	4,74	3.412	0,77	29.643	6,71	29.085	6,59	201.994	45,73	50.647	11,47
15	Jawa Timur	8.064.939	6.115.178	75,82	839.686	13,73	301.939	4,94	29.027	0,47	625.434	10,23	106.978	1,75	2.976.918	48,68	1.235.196	20,20
16	Banten	2.121.049	1.458.473	68,76	126.229	8,65	28.144	1,93	14.718	1,01	147.935	10,14	40.499	2,78	768.463	52,69	332.485	22,80
17	Bali	685.450	572.937	83,59	252.357	44,05	21.889	3,82	3.261	0,57	13.886	2,42	21.660	3,78	206.707	36,08	53.177	9,28
18	Nusa Tenggara Barat	1.085.847	804.252	74,07	102.094	12,69	16.971	2,11	4.507	0,56	135.705	16,87	19.168	2,38	394.883	49,10	130.924	16,28
19	Nusa Tenggara Timur	686.397	409.743	59,69	47.484	11,59	24.503	5,98	2.730	0,67	81.553	19,90	8.172	1,99	198.037	48,33	47.264	11,54
20	Kalimantan Barat	733.013	528.238	72,06	41.950	7,94	7.632	1,44	3.884	0,74	38.052	7,20	14.501	2,75	234.457	44,38	187.762	35,54
21	Kalimantan Tengah	462.048	353.322	76,47	6.825	1,93	3.995	1,13	716	0,20	40.242	11,39	10.815	3,06	170.020	48,12	120.709	34,16
22	Kalimantan Selatan	812.521	643.738	79,23	12.094	1,88	7.881	1,22	2.666	0,41	50.067	7,78	14.283	2,22	237.604	36,91	319.143	49,58
23	Kalimantan Timur	432.434	311.097	71,94	40.133	12,90	8.582	2,76	786	0,25	17.762	5,71	9.737	3,13	131.754	42,35	102.343	32,90
24	Sulawesi Utara	399.028	328.562	82,34	35.143	10,70	6.940	2,11	900	0,27	60.305	18,35	9.167	2,79	135.505	41,24	80.602	24,53
25	Sulawesi Tengah	489.323	385.315	78,74	25.218	6,54	7.301	1,89	1.181	0,31	36.509	9,48	9.490	2,46	168.099	43,63	137.517	35,69
26	Sulawesi Selatan	1.387.345	1.012.913	73,01	44.653	4,41	18.306	1,81	1.904	0,19	121.442	11,99	62.971	6,22	461.639	45,58	301.998	29,81
27	Sulawesi Tenggara	431.255	324.069	75,15	9.394	2,90	7.011	2,16	1.634	0,50	45.452	14,03	19.160	5,91	125.988	38,88	115.430	35,62
28	Gorontalo	218.562	182.548	83,52	20.960	11,48	3.213	1,76	991	0,54	37.919	20,77	5.350	2,93	67.944	37,22	46.171	25,29
29	Sulawesi Barat	201.068	141.477	70,36	6.548	4,63	2.377	1,68	536	0,38	15.357	10,85	12.332	8,72	52.744	37,28	51.583	36,46
30	Maluku	245.539	162.726	66,27	6.912	4,25	4.155	2,55	1.052	0,65	27.932	17,17	8.595	5,28	75.548	46,43	38.532	23,68
31	Maluku Utara	178.342	122.171	68,50	3.988	3,26	2.202	1,80	833	0,68	25.492	20,87	9.797	8,02	53.271	43,60	26.588	21,76
32	Papua Barat	75.199	71.075	94,52	2.959	4,16	1.896	2,67	377	0,53	6.311	8,88	6.718	9,45	31.094	43,75	21.720	30,56
33	Papua	157.458	79.797	50,68	1.656	2,08	1.459	1,83	52	0,07	12.936	16,21	11.352	14,23	42.486	53,24	9.856	12,35
Indonesia		**47.019.002**	**35.202.908**	**74,87**	**3.896.081**	**11,07**	**1.238.749**	**3,52**	**241.642**	**0,69**	**3.680.816**	**10,46**	**1.110.341**	**3,15**	**16.734.917**	**47,54**	**8.300.362**	**23,58**

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Lampiran 5.10

PERSENTASE PESERTA KB BARU
MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Tempat Pelayanan KB								Jumlah Peserta
		Klinik KB Pemerintah		Klinik KB Swasta		Dokter Praktik Swasta		Bidan Swasta		
		Peserta	%	Peserta	%	Peserta	%	Peserta	%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	102.734	65,91	17.537	11,25	685	0,44	34.905	22,39	155.861
2	Sumatera Utara	328.950	78,38	56.568	13,48	1.940	0,46	32.233	7,68	419.691
3	Sumatera Barat	100.193	63,78	2.099	1,34	3.042	1,94	51.762	32,95	157.096
4	Riau	106.799	55,81	18.131	9,47	5.883	3,07	60.560	31,65	191.373
5	Jambi	81.576	62,28	4.060	3,10	3.525	2,69	41.831	31,93	130.992
6	Sumatera Selatan	247.083	67,27	43.426	11,82	2.826	0,77	73.989	20,14	367.324
7	Bengkulu	66.065	68,13	4.873	5,03	921	0,95	25.105	25,89	96.964
8	Lampung	259.140	75,51	8.265	2,41	3.725	1,09	72.070	21,00	343.200
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.234	72,48	2.522	6,71	163	0,43	7.657	20,38	37.576
10	Kepulauan Riau	21.876	41,91	9.815	18,80	1.560	2,99	18.948	36,30	52.199
11	DKI Jakarta	164.489	37,32	30.763	6,98	43.139	9,79	202.303	45,91	440.694
12	Jawa Barat	800.503	56,59	215.379	15,23	18.768	1,33	379.958	26,86	1.414.608
13	Jawa Tengah	461.267	49,37	79.041	8,46	24.613	2,63	369.384	39,54	934.305
14	DI Yogyakarta	20.580	37,35	16.152	29,31	718	1,30	17.657	32,04	55.107
15	Jawa Timur	704.278	65,81	57.456	5,37	7.538	0,70	300.923	28,12	1.070.195
16	Banten	218.673	62,34	38.631	11,01	6.141	1,75	87.314	24,89	350.759
17	Bali	27.209	40,11	5.920	8,73	1.718	2,53	32.987	48,63	67.834
18	Nusa Tenggara Barat	169.814	92,56	6.553	3,57	169	0,09	6.937	3,78	183.473
19	Nusa Tenggara Timur	98.107	96,77	2.151	2,12	24	0,02	1.099	1,08	101.381
20	Kalimantan Barat	85.199	69,58	18.726	15,29	244	0,20	18.277	14,93	122.446
21	Kalimantan Tengah	48.917	70,35	8.008	11,52	803	1,15	11.805	16,98	69.533
22	Kalimantan Selatan	89.682	59,05	4.148	2,73	2.517	1,66	55.520	36,56	151.867
23	Kalimantan Timur	49.651	54,78	15.324	16,91	1.935	2,13	23.731	26,18	90.641
24	Sulawesi Utara	53.686	67,74	18.414	23,23	1.415	1,79	5.738	7,24	79.253
25	Sulawesi Tengah	68.587	87,77	2.276	2,91	632	0,81	6.647	8,51	78.142
26	Sulawesi Selatan	246.909	86,69	12.316	4,32	1.240	0,44	24.349	8,55	284.814
27	Sulawesi Tenggara	68.331	93,00	1.390	1,89	379	0,52	3.377	4,60	73.477
28	Gorontalo	31.243	85,70	3.072	8,43	127	0,35	2.016	5,53	36.458
29	Sulawesi Barat	31.632	84,92	1.281	3,44	135	0,36	4.201	11,28	37.249
30	Maluku	53.956	87,39	2.653	4,30	990	1,60	4.141	6,71	61.740
31	Maluku Utara	32.053	80,23	6.523	16,33	243	0,61	1.131	2,83	39.950
32	Papua Barat	18.104	95,62	448	2,37	15	0,08	366	1,93	18.933
33	Papua	45.583	97,35	1.142	2,44	8	0,02	93	0,20	46.826
Indonesia		**4.930.103**	**63,52**	**715.063**	**9,21**	**137.781**	**1,78**	**1.979.014**	**25,50**	**7.761.961**

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Lampiran 5.11

JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Klinik KB	Tempat Pelayanan KB							
			Klinik KB Pemerintah		Klinik KB Swasta		Dokter Praktik Swasta		Bidan Swasta	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	2.628	706	26,86	142	5,40	282	10,73	1.498	57,00
2	Sumatera Utara	3.140	1.239	39,46	334	10,64	241	7,68	1.326	42,23
3	Sumatera Barat	3.374	781	23,15	18	0,53	433	12,83	2.142	63,49
4	Riau	2.420	389	16,07	91	3,76	389	16,07	1.551	64,09
5	Jambi	2.202	839	38,10	45	2,04	276	12,53	1.042	47,32
6	Sumatera Selatan	3.741	1.097	29,32	288	7,70	332	8,87	2.024	54,10
7	Bengkulu	1.534	365	23,79	26	1,69	162	10,56	981	63,95
8	Lampung	3.839	956	24,90	54	1,41	380	9,90	2.449	63,79
9	Kepulauan Bangka Belitung	468	281	60,04	14	2,99	52	11,11	121	25,85
10	Kepulauan Riau	494	165	33,40	47	9,51	73	14,78	209	42,31
11	DKI Jakarta	2.110	424	20,09	102	4,83	416	19,72	1.168	55,36
12	Jawa Barat	12.688	2.218	17,48	1.438	11,33	1.781	14,04	7.251	57,15
13	Jawa Tengah	14.963	1.243	8,31	614	4,10	2.319	15,50	10.787	72,09
14	DI Yogyakarta	1.152	166	14,41	174	15,10	145	12,59	667	57,90
15	Jawa Timur	14.060	3.569	25,38	453	3,22	1.637	11,64	8.401	59,75
16	Banten	2.394	415	17,34	348	14,54	339	14,16	1.292	53,97
17	Bali	2.166	546	25,21	47	2,17	360	16,62	1.213	56,00
18	Nusa Tenggara Barat	1.938	1.046	53,97	79	4,08	188	9,70	625	32,25
19	Nusa Tenggara Timur	632	539	85,28	39	6,17	22	3,48	32	5,06
20	Kalimantan Barat	1.409	302	21,43	131	9,30	148	10,50	828	58,77
21	Kalimantan Tengah	1.252	649	51,84	106	8,47	101	8,07	396	31,63
22	Kalimantan Selatan	2.460	369	15,00	30	1,22	310	12,60	1.751	71,18
23	Kalimantan Timur	1.254	418	33,33	150	11,96	173	13,80	513	40,91
24	Sulawesi Utara	702	231	32,91	138	19,66	107	15,24	226	32,19
25	Sulawesi Tengah	1.268	986	77,76	49	3,86	61	4,81	172	13,56
26	Sulawesi Selatan	1.922	755	39,28	79	4,11	272	14,15	816	42,46
27	Sulawesi Tenggara	584	414	70,89	14	2,40	56	9,59	100	17,12
28	Gorontalo	464	140	30,17	39	8,41	54	11,64	231	49,78
29	Sulawesi Barat	347	162	46,69	16	4,61	48	13,83	121	34,87
30	Maluku	441	290	65,76	45	10,20	24	5,44	82	18,59
31	Maluku Utara	282	191	67,73	43	15,25	14	4,96	34	12,06
32	Papua Barat	226	164	72,57	14	6,19	11	4,87	37	16,37
33	Papua	422	326	77,25	36	8,53	13	3,08	47	11,14
Indonesia		**88.976**	**22.381**	**25,15**	**5.243**	**5,89**	**11.219**	**12,61**	**50.133**	**56,34**

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Lampiran 5.12

HASIL PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN/PASCA KEGUGURAN (PP/PK) MENURUT METODE KONTRASEPSI TAHUN 2014

No	Nama Provinsi	Metode Kontrasepsi														Jumlah
		IUD		MOW		MOP		Kondom		Implan		Suntikan		Pil		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	1.051	3,94	491	1,84	7	0,03	1.942	7,28	1.170	4,38	12.214	45,76	9.815	36,77	26.690
2	Sumatera Utara	2.052	9,09	1.947	8,63	56	0,25	2.343	10,38	2.536	11,24	7.851	34,80	5.778	25,61	22.563
3	Sumatera Barat	3.531	20,86	1.134	6,70	4	0,02	576	3,40	2.269	13,40	7.520	44,42	1.896	11,20	16.930
4	Riau	898	3,42	705	2,68	6	0,02	963	3,67	1.859	7,08	14.980	57,02	6.861	26,12	26.272
5	Jambi	1.078	4,48	498	2,07	5	0,02	1.241	5,15	1.655	6,87	13.791	57,26	5.815	24,15	24.083
6	Sumatera Selatan	2.258	3,99	1.171	2,07	59	0,10	3.755	6,63	6.554	11,58	27.979	49,43	14.827	26,19	56.603
7	Bengkulu	879	5,48	60	0,37	6	0,04	844	5,26	2.475	15,43	8.046	50,17	3.727	23,24	16.037
8	Lampung	4.220	15,30	1.074	3,89	6	0,02	857	3,11	2.616	9,48	12.605	45,70	6.205	22,50	27.583
9	Kepulauan Bangka Belitung	273	1,86	196	1,33	37	0,25	395	2,69	866	5,89	9.249	62,95	3.677	25,03	14.693
10	Kepulauan Riau	202	3,04	174	2,62	-	0,00	355	5,35	280	4,22	3.981	59,95	1.649	24,83	6.641
11	Dki Jakarta	4.681	41,41	461	4,08	9	0,08	459	4,06	789	6,98	3.180	28,13	1.726	15,27	11.305
12	Jawa Barat	33.992	14,92	5.015	2,20	184	0,08	4.151	1,82	22.799	10,01	119.839	52,61	41.786	18,35	227.766
13	Jawa Tengah	19.621	14,98	5.952	4,54	43	0,03	2.677	2,04	19.617	14,97	73.127	55,82	9.970	7,61	131.007
14	Di Yogyakarta	6.251	53,48	680	5,82	13	0,11	506	4,33	814	6,96	3.016	25,80	409	3,50	11.689
15	Jawa Timur	21.828	14,18	7.342	4,77	73	0,05	2.868	1,86	11.997	7,80	89.977	58,47	19.812	12,87	153.897
16	Banten	4.495	12,77	729	2,07	7	0,02	1.107	3,14	5.495	15,61	16.671	47,36	6.700	19,03	35.204
17	Bali	8.084	43,98	958	5,21	28	0,15	1.127	6,13	723	3,93	6.387	34,75	1.072	5,83	18.379
18	Nusa Tenggara Barat	3.659	13,69	416	1,56	13	0,05	460	1,72	3.452	12,92	16.587	62,07	2.138	8,00	26.725
19	Nusa Tenggara Timur	1.674	8,83	1.509	7,96	2	0,01	496	2,62	4.193	22,11	9.374	49,43	1.718	9,06	18.966
20	Kalimantan Barat	1.736	8,90	933	4,79	-	0,00	440	2,26	685	3,51	11.667	59,84	4.035	20,70	19.496
21	Kalimantan Tengah	331	2,46	312	2,32	3	0,02	274	2,04	875	6,50	7.631	56,70	4.032	29,96	13.458
22	Kalimantan Selatan	399	1,42	331	1,18	-	0,00	545	1,94	1.123	4,00	15.884	56,54	9.809	34,92	28.091
23	Kalimantan Timur	1.763	11,88	909	6,12	9	0,06	981	6,61	697	4,70	7.740	52,15	2.742	18,48	14.841
24	Sulawesi Utara	1.271	8,62	726	4,93	22	0,15	535	3,63	1.591	10,80	8.552	58,03	2.040	13,84	14.737
25	Sulawesi Tengah	1.440	9,38	654	4,26	2	0,01	232	1,51	984	6,41	7.611	49,58	4.427	28,84	15.350
26	Sulawesi Selatan	1.647	4,30	1.538	4,01	13	0,03	1.528	3,99	2.459	6,41	22.560	58,84	8.594	22,42	38.339
27	Sulawesi Tenggara	267	2,14	135	1,08	-	0,00	567	4,54	697	5,58	6.130	49,03	4.706	37,64	12.502
28	Gorontalo	466	7,58	256	4,16	6	0,10	109	1,77	1.312	21,34	2.690	43,75	1.309	21,29	6.148
29	Sulawesi Barat	100	3,48	17	0,59	-	0,00	161	5,61	183	6,38	1.578	54,98	831	28,95	2.870
30	Maluku	454	5,56	107	1,31	25	0,31	280	3,43	1.428	17,48	4.265	52,22	1.609	19,70	8.168
31	Maluku Utara	261	4,88	104	1,94	-	0,00	81	1,51	1.067	19,94	3.505	65,50	333	6,22	5.351
32	Papua Barat	112	3,65	85	2,77	35	1,14	270	8,79	502	16,34	1.469	47,82	599	19,50	3.072
33	Papua	21	3,72	88	15,60	-	0,00	2	0,35	73	12,94	319	56,56	61	10,82	564
Indonesia		**130.995**	**12,40**	**36.707**	**3,48**	**673**	**0,06**	**33.127**	**3,14**	**105.835**	**10,02**	**557.975**	**52,84**	**190.708**	**18,06**	**1.056.020**

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Lampiran 5.13

JUMLAH DAN PERSENTASE PUS BUKAN PESERTA KB (*UNMET NEED*)
HASIL PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2014

No	Provinsi	Alasan *Unmet Need*				Jumlah *Unmet Need*	
		Ingin Anak Ditunda	% Terhadap PUS	Tdk Ingin Anak Lagi	% Terhadap PUS	Jumlah	% Terhadap PUS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	72.364	9,03	65.198	8,14	137.562	17,17
2	Sumatera Utara	200.674	8,90	218.039	9,67	418.713	18,57
3	Sumatera Barat	60.619	7,37	70.011	8,51	130.630	15,88
4	Riau	96.827	10,40	87.057	9,35	183.884	19,74
5	Jambi	36.936	5,67	37.281	5,72	74.217	11,39
6	Sumatera Selatan	114.792	7,19	110.167	6,90	224.959	14,08
7	Bengkulu	22.215	6,00	23.836	6,44	46.051	12,44
8	Lampung	146.229	8,80	143.728	8,65	289.957	17,45
9	Kepulauan Bangka Belitung	11.754	4,47	18.611	7,08	30.365	11,55
10	Kepulauan Riau	17.372	6,15	21.581	7,64	38.953	13,79
11	DKI Jakarta	76.164	6,14	110.444	8,90	186.608	15,03
12	Jawa Barat	574.636	6,31	719.822	7,90	1.294.458	14,21
13	Jawa Tengah	352.484	5,34	434.994	6,59	787.478	11,93
14	DI Yogyakarta	22.677	4,94	31.033	6,76	53.710	11,70
15	Jawa Timur	466.114	5,89	501.470	6,34	967.584	12,22
16	Banten	178.821	8,51	199.958	9,51	378.779	18,02
17	Bali	19.001	2,85	15.199	2,28	34.200	5,12
18	Nusa Tenggara Barat	91.519	8,56	72.351	6,77	163.870	15,34
19	Nusa Tenggara Timur	94.492	13,84	73.238	10,72	167.730	24,56
20	Kalimantan Barat	82.141	9,24	88.445	9,95	170.586	19,19
21	Kalimantan Tengah	33.224	7,34	33.836	7,48	67.060	14,82
22	Kalimantan Selatan	45.475	6,29	49.824	6,89	95.299	13,18
23	Kalimantan Timur	58.320	8,98	68.448	10,54	126.768	19,53
24	Sulawesi Utara	21.093	4,74	26.367	5,92	47.460	10,66
25	Sulawesi Tengah	37.095	7,36	40.185	7,97	77.280	15,33
26	Sulawesi Selatan	131.226	9,55	114.793	8,35	246.019	17,91
27	Sulawesi Tenggara	53.382	11,71	45.170	9,91	98.552	21,62
28	Gorontalo	11.287	5,37	11.880	5,65	23.167	11,02
29	Sulawesi Barat	24.775	11,79	18.357	8,73	43.132	20,52
30	Maluku	34.429	12,65	32.401	11,90	66.830	24,55
31	Maluku Utara	32.455	15,09	22.733	10,57	55.188	25,66
32	Papua Barat	29.613	16,98	37.045	21,24	66.658	38,23
33	Papua	66.162	15,28	50.765	11,72	116.927	27,00
Indonesia		**3.316.367**	**7,13**	**3.594.267**	**7,73**	**6.910.634**	**14,87**

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

Lampiran 5.14

PERSENTASE BALITA (0-59 BULAN) MENURUT BERAT BADAN LAHIR DAN PROVINSI, RISKESDAS 2013

No	Provinsi	Persentase Berat Badan Lahir Balita (0-59 bulan)		
		<2500 gram	2500-3999 gram	≥ 4000 gram
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	8,6	83,1	8,3
2	Sumatera Utara	7,2	82,2	10,6
3	Sumatera Barat	7,3	86,8	5,9
4	Riau	8,6	85,0	6,4
5	Jambi	8,2	86,3	5,5
6	Sumatera Selatan	9,3	86,0	4,7
7	Bengkulu	9,7	81,9	8,4
8	Lampung	8,0	89,0	3,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	9,4	85,8	4,8
10	Kepulauan Riau	9,2	87,4	3,4
11	DKI Jakarta	9,3	87,0	3,7
12	Jawa Barat	10,8	85,5	3,8
13	Jawa Tengah	9,7	86,9	3,4
14	DI Yogyakarta	9,4	89,3	1,3
15	Jawa Timur	11,2	85,2	3,6
16	Banten	9,7	83,6	6,7
17	Bali	8,8	86,7	4,6
18	Nusa Tenggara Barat	12,2	80,8	7,0
19	Nusa Tenggara Timur	15,5	80,6	3,9
20	Kalimantan Barat	14,4	82,5	3,1
21	Kalimantan Tengah	13,7	80,6	5,8
22	Kalimantan Selatan	10,1	85,5	4,5
23	Kalimantan Timur	10,8	84,0	5,2
24	Sulawesi Utara	8,0	85,7	6,2
25	Sulawesi Tengah	16,8	75,6	7,7
26	Sulawesi Selatan	12,4	82,4	5,2
27	Sulawesi Tenggara	9,4	81,3	9,3
28	Gorontalo	13,2	80,3	6,5
29	Sulawesi Barat	11,9	80,6	7,5
30	Maluku	11,1	74,1	14,8
31	Maluku Utara	11,6	78,4	10,0
32	Papua Barat	11,0	83,2	5,8
33	Papua	15,6	77,1	7,3
Indonesia		**10,2**	**85,0**	**4,8**

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Lampiran 5.15

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Bayi	Kunjungan Neonatus			
			KN1	% KN1	KN Lengkap	%KN Lengkap
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	99.807	96.445	96,63	93.861	94,04
2	Sumatera Utara	295.304	252.946	85,66	234.360	79,36
3	Sumatera Barat	104.998	92.959	88,53	88.024	83,83
4	Riau	141.680	125.834	88,82	121.096	85,47
5	Jambi	69.111	69.839	101,05	68.322	98,86
6	Sumatera Selatan	160.251	165.490	103,27	160.175	99,95
7	Bengkulu	36.727	33.616	91,53	32.175	87,61
8	Lampung	157.385	160.225	101,80	155.406	98,74
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.682	27.645	96,38	26.881	93,72
10	Kepulauan Riau	49.351	51.894	105,15	48.632	98,54
11	DKI Jakarta	173.511	179.113	103,23	171.812	99,02
12	Jawa Barat	853.052	923.574	108,27	896.788	105,13
13	Jawa Tengah	553.883	554.127	100,04	544.417	98,29
14	D I Yogyakarta	53.695	45.424	84,60	43.185	80,43
15	Jawa Timur	574.308	594.044	103,44	581.712	101,29
16	Banten	219.843	218.224	99,26	203.346	92,50
17	Bali	69.006	67.945	98,46	67.210	97,40
18	Nusa Tenggara Barat	100.071	103.010	102,94	100.672	100,60
19	Nusa Tenggara Timur	120.762	88.904	73,62	85.565	70,85
20	Kalimantan Barat	88.368	84.197	95,28	80.604	91,21
21	Kalimantan Tengah	45.338	41.786	92,17	40.669	89,70
22	Kalimantan Selatan	77.566	68.249	87,99	65.116	83,95
23	Kalimantan Timur	88.626	78.634	88,73	73.140	82,53
24	Sulawesi Utara	40.530	36.302	89,57	34.877	86,05
25	Sulawesi Tengah	57.463	48.704	84,76	44.695	77,78
26	Sulawesi Selatan	160.777	146.900	91,37	140.895	87,63
27	Sulawesi Tenggara	56.579	47.000	83,07	45.907	81,14
28	Gorontalo	22.295	19.765	88,65	17.897	80,27
29	Sulawesi Barat	28.326	23.345	82,42	22.372	78,98
30	Maluku	38.836	31.076	80,02	30.048	77,37
31	Maluku Utara	25.240	20.597	81,60	19.987	79,19
32	Papua Barat	20.549	10.586	51,52	1.395	6,79
33	Papua	53.105	19.823	37,33	12.680	23,88
Indonesia		**4.665.025**	**4.528.222**	**97,07**	**4.353.921**	**93,33**

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 10 Maret 2015)

Lampiran 5.16

CAKUPAN PENANGANAN NEONATAL DENGAN KOMPLIKASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Bayi	Neonatal Komplikasi	Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	99.807	14.971	7.981	53,31
2	Sumatera Utara	295.304	44.296	12.495	28,21
3	Sumatera Barat	104.998	15.750	4.543	28,84
4	Riau	141.680	21.252	5.659	26,63
5	Jambi	69.111	10.367	8.231	79,40
6	Sumatera Selatan	160.251	24.038	13.982	58,17
7	Bengkulu	36.727	5.509	3.485	63,26
8	Lampung	157.385	23.608	12.138	51,42
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.682	4.302	3.967	92,21
10	Kepulauan Riau	49.351	7.403	4.202	56,76
11	DKI Jakarta	173.511	26.027	18.502	71,09
12	Jawa Barat	853.052	127.958	73.613	57,53
13	Jawa Tengah	553.883	83.082	70.256	84,56
14	DI Yogyakarta	53.695	8.054	6.182	76,75
15	Jawa Timur	574.308	86.146	72.329	83,96
16	Banten	219.843	32.976	21.876	66,34
17	Bali	69.006	10.351	7.087	68,47
18	Nusa Tenggara Barat	100.071	15.011	12.791	85,21
19	Nusa Tenggara Timur	120.762	18.114	5.774	31,88
20	Kalimantan Barat	88.368	13.255	6.675	50,36
21	Kalimantan Tengah	45.338	6.801	2.183	32,10
22	Kalimantan Selatan	77.566	11.635	6.015	51,70
23	Kalimantan Timur	88.626	13.294	7.329	55,13
24	Sulawesi Utara	40.530	6.080	3.999	65,78
25	Sulawesi Tengah	57.463	8.619	3.535	41,01
26	Sulawesi Selatan	160.777	24.117	12.771	52,96
27	Sulawesi Tenggara	56.579	8.487	1.966	23,17
28	Gorontalo	22.295	3.344	1.291	38,60
29	Sulawesi Barat	28.326	4.249	1.602	37,70
30	Maluku	38.836	5.825	2.080	35,71
31	Maluku Utara	25.240	3.786	1.464	38,67
32	Papua Barat	20.549	3.082	103	3,34
33	Papua	53.105	7.966	1.523	19,12
Indonesia		**4.665.025**	**699.754**	**417.629**	**59,68**

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 10 Maret 2015)

Lampiran 5.17

CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	BCG		HB0		DPT/HB1		DPT/HB3		Polio 4		Campak		Imunisasi Dasar Lengkap	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Aceh	87.173	85,6	85.978	84,4	86.236	86,4	81.657	81,8	83.842	84,0	82.656	82,8	77.425	77,6
2	Sumatera Utara	273.977	89,1	245.209	79,7	200.888	68,0	211.970	71,8	272.615	92,3	273.041	92,5	235.855	79,9
3	Sumatera Barat	92.010	84,2	83.232	76,1	92.535	88,1	88.185	84,0	87.948	83,8	86.721	82,6	83.040	79,1
4	Riau	127.022	87,0	104.285	71,4	105.408	74,4	102.567	72,4	124.492	87,9	123.393	87,1	116.499	82,2
5	Jambi	65.531	92,0	65.993	92,7	68.103	98,5	67.364	97,5	67.400	97,5	67.481	97,6	60.014	86,8
6	Sumatera Selatan	154.017	92,3	140.095	84,0	97.752	61,0	110.866	69,2	152.131	94,9	152.294	95,0	139.855	87,3
7	Bengkulu	34.343	89,8	30.454	79,6	30.823	83,9	31.707	86,3	32.848	89,4	33.466	91,1	31.041	84,5
8	Lampung	161.332	98,4	142.165	86,7	74.335	47,2	95.882	60,9	161.152	102,4	161.126	102,4	156.728	99,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.033	91,5	26.987	91,3	27.288	95,1	26.125	91,1	25.945	90,5	26.515	92,4	26.621	92,8
10	Kepulauan Riau	51.774	101,8	49.743	97,8	50.857	103,1	50.584	102,5	51.074	103,5	50.750	102,8	50.257	101,8
11	DKI Jakarta	178.543	100,9	156.296	88,3	110.891	63,9	121.558	70,1	173.620	100,1	172.058	99,2	171.197	98,7
12	Jawa Barat	935.737	106,4	873.792	99,4	0	0,0	0	0,0	903.962	106,0	901.925	105,7	733.611	86,0
13	Jawa Tengah	552.167	97,7	530.973	94,0	147.148	26,6	217.013	39,2	564.909	102,0	542.966	98,0	516.807	93,3
14	DI Yogyakarta	42.510	77,6	42.567	77,7	3.378	6,3	3.001	5,6	0	0,0	42.135	78,5	41.991	78,2
15	Jawa Timur	576.605	98,4	555.156	94,8	307.305	53,5	346.432	60,3	571.757	99,6	573.773	99,9	561.335	97,7
16	Banten	215.365	94,1	208.340	91,0	130.724	59,5	153.074	69,6	209.606	95,3	206.439	93,9	197.688	89,9
17	Bali	66.363	94,3	66.004	93,8	0	0,0	0	0,0	66.180	95,9	67.355	97,6	66.545	96,4
18	Nusa Tenggara Barat	98.637	94,7	95.987	92,1	0	0,0	0	0,0	102.828	102,8	101.029	101,0	92.506	92,4
19	Nusa Tenggara Timur	85.485	68,0	66.532	52,9	90.497	74,9	85.857	71,1	81.628	67,6	83.562	69,2	78.246	64,8
20	Kalimantan Barat	81.495	88,6	61.526	66,9	56.607	64,1	62.689	70,9	79.293	89,7	78.060	88,3	74.324	84,1
21	Kalimantan Tengah	43.455	94,0	32.997	71,3	36.348	80,2	34.634	76,4	40.019	88,3	40.822	90,0	25.847	57,0
22	Kalimantan Selatan	57.440	71,1	51.466	63,7	46.461	59,9	47.052	60,7	54.038	69,7	53.944	69,5	50.666	65,3
23	Kalimantan Timur	76.988	85,2	59.795	66,1	63.699	71,9	62.605	70,6	73.713	83,2	74.019	83,5	72.780	82,1
24	Sulawesi Utara	36.067	86,3	26.228	62,8	36.097	89,1	35.025	86,4	35.213	86,9	34.263	84,5	32.993	81,4
25	Sulawesi Tengah	51.713	86,4	37.120	62,0	27.642	48,1	34.650	60,3	49.412	86,0	48.930	85,2	46.381	80,7
26	Sulawesi Selatan	153.749	91,8	142.536	85,1	69.702	43,4	77.848	48,4	152.415	94,8	150.155	93,4	146.607	91,2
27	Sulawesi Tenggara	47.333	80,3	34.009	57,7	33.987	60,1	36.747	64,9	43.943	77,7	44.215	78,1	43.722	77,3
28	Gorontalo	20.126	86,7	18.835	81,1	19.943	89,5	19.764	88,6	19.805	88,8	19.838	89,0	18.013	80,8
29	Sulawesi Barat	23.438	79,5	21.118	71,6	23.758	83,9	23.409	82,6	23.499	83,0	23.698	83,7	23.205	81,9
30	Maluku	31.706	78,4	21.314	52,7	30.728	79,1	27.598	71,1	31.887	82,1	32.912	84,7	28.249	72,7
31	Maluku Utara	21.345	81,2	17.378	66,1	14.780	58,6	16.581	65,7	19.845	78,6	19.868	78,7	19.200	76,1
32	Papua Barat	16.093	75,2	9.286	43,4	15.915	77,4	13.197	64,2	14.344	69,8	14.424	70,2	9.238	45,0
33	Papua	35.403	64,7	23.523	43,0	36.945	69,6	31.418	59,2	30.793	58,0	32.393	61,0	25.465	48,0
Indonesia		**4.521.975**	**94,0**	**4.126.919**	**85,8**	**2.136.780**	**45,8**	**2.317.059**	**49,7**	**4.402.156**	**94,4**	**4.416.226**	**94,7**	**4.053.949**	**86,9**

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 30 April 2015)

Catatan : sejak tahun 2013 sesuai kebijakan nasional, Provinsi DI Yogyakarta hanya memberikan tiga dosis polio secara suntik melalui pemberian IPV

Lampiran 5.18

DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB(1) - DPT/HB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012-2014

No	Provinsi	Tahun					
		2012		2013		2014	
		DPT/HB(1)-Campak	DPT/HB(1) - DPT/HB(3)	DPT/HB(1)-Campak	DPT/HB(1) - DPT/HB(3)	DPT/HB(1)-Campak	DPT/HB(1) - DPT/HB(3)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	5,0	5,3	5,7	5,8	4,2	5,3
2	Sumatera Utara	5,1	3,1	3,3	2,7	-1,6	4,4
3	Sumatera Barat	7,7	5,0	6,4	3,7	6,3	4,7
4	Riau	3,9	3,4	4,2	2,4	3,1	2,3
5	Jambi	0,0	0,4	2,6	1,1	0,9	1,1
6	Sumatera Selatan	2,5	2,1	3,1	1,8	3,7	1,3
7	Bengkulu	1,5	2,9	4,6	4,7	5,9	4,6
8	Lampung	1,5	0,0	0,5	-0,9	2,5	11,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	5,9	5,8	2,9	3,6	2,5	4,0
10	Kepulauan Riau	6,9	2,7	2,9	0,3	0,2	0,5
11	DKI Jakarta	7,1	1,0	3,5	2,0	4,0	0,7
12	Jawa Barat	2,4	1,5	3,9	1,0	3,1	2,3
13	Jawa Tengah	1,7	0,2	0,4	-0,2	3,8	2,0
14	DI Yogyakarta	1,4	2,0	2,2	5,1	0,8	0,3
15	Jawa Timur	2,6	0,3	1,9	0,8	-0,7	0,0
16	Banten	5,6	3,5	5,2	3,6	10,3	5,0
17	Bali	3,2	2,9	1,7	2,5	0,5	2,3
18	Nusa Tenggara Barat	1,7	0,6	-0,9	0,2	1,9	-0,3
19	Nusa Tenggara Timur	7,3	5,9	7,5	5,7	7,7	5,1
20	Kalimantan Barat	6,7	4,0	6,6	4,1	7,5	4,9
21	Kalimantan Tengah	7,7	3,3	5,8	4,0	7,9	7,4
22	Kalimantan Selatan	7,0	5,5	7,5	5,2	2,1	4,2
23	Kalimantan Timur	4,9	3,4	5,7	3,0	5,4	4,5
24	Sulawesi Utara	4,2	2,6	5,5	1,2	4,6	2,9
25	Sulawesi Tengah	6,0	5,1	6,8	3,6	5,5	4,7
26	Sulawesi Selatan	3,5	1,9	3,1	1,8	10,7	5,7
27	Sulawesi Tenggara	5,2	3,6	7,5	7,6	-26,0	-26,7
28	Gorontalo	5,1	2,7	0,5	-1,8	0,5	0,9
29	Sulawesi Barat	4,1	3,0	0,8	-11,4	0,3	1,5
30	Maluku	6,7	7,2	5,8	5,0	6,6	8,5
31	Maluku Utara	7,8	4,0	5,6	3,7	-21,9	0,3
32	Papua Barat	10,6	11,1	0,5	-1,7	9,4	17,1
33	Papua	7,6	11,1	7,9	13,9	12,3	15,0
Indonesia		**3,6**	**2,1**	**3,3**	**1,8**	**3,1**	**2,8**

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 30 April 2015)

Lampiran 5.19

CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (UCI) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012-2014

No	Provinsi	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
		Jumlah Desa	Desa UCI	%	Jumlah Desa	Desa UCI	%	Jumlah Desa	Desa UCI	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	6.497	4.508	69,39	6.489	4.622	71,23	6.489	4.530	69,81
2	Sumatera Utara	5.823	3.991	68,54	5.797	4.393	75,78	5.797	4.522	78,01
3	Sumatera Barat	3.827	3.483	91,01	3.959	2.817	71,15	3.959	3.064	77,39
4	Riau	1.681	1.146	68,17	1.655	1.327	80,18	1.655	1.226	74,08
5	Jambi	1.381	1.276	92,40	1.416	1.416	100,00	1.416	1.461	103,18
6	Sumatera Selatan	3.188	2.892	90,72	3.167	2.900	91,57	3.167	2.958	93,40
7	Bengkulu	1.504	1.217	80,92	1.508	1.334	88,46	1.508	1.347	89,32
8	Lampung	2.503	2.252	89,97	2.463	2.445	99,27	2.463	2.580	104,75
9	Kepulauan Bangka Belitung	367	349	95,10	366	354	96,72	366	369	100,82
10	Kepulauan Riau	356	284	79,78	353	250	70,82	353	331	93,77
11	DKI Jakarta	267	267	100,00	267	267	100,00	267	267	100,00
12	Jawa Barat	5.918	5.427	91,70	5.905	5.687	96,31	5.905	5.576	94,43
13	Jawa Tengah	8.555	8.454	98,82	8.577	8.503	99,14	8.577	8.551	99,70
14	DI Yogyakarta	438	438	100,00	438	438	100,00	438	438	100,00
15	Jawa Timur	8.515	7.298	85,71	8.503	7.215	84,85	8.503	7.299	85,84
16	Banten	1.542	1.343	87,09	1.535	1.259	82,02	1.535	1.195	77,85
17	Bali	716	675	94,27	716	689	96,23	716	705	98,46
18	Nusa Tenggara Barat	1.107	986	89,07	1.079	1.028	95,27	1.079	983	91,10
19	Nusa Tenggara Timur	2.952	2.150	72,83	2.893	2.248	77,70	2.893	2.213	76,49
20	Kalimantan Barat	1.973	1.387	70,30	1.967	1.370	69,65	1.967	1.531	77,83
21	Kalimantan Tengah	1.527	1.112	72,82	1.527	1.136	74,39	1.527	1.022	66,93
22	Kalimantan Selatan	1.979	1.330	67,21	2.000	1.628	81,40	2.000	1.669	83,45
23	Kalimantan Timur	1.348	879	65,21	1.465	1.097	74,88	1.489	1.067	71,66
24	Sulawesi Utara	1.708	1.247	73,01	1.691	1.414	83,62	1.691	1.341	79,30
25	Sulawesi Tengah	1.844	1.535	83,24	1.815	1.599	88,10	1.815	1.649	90,85
26	Sulawesi Selatan	2.984	2.598	87,06	2.982	2.720	91,21	2.982	2.873	96,34
27	Sulawesi Tenggara	2.136	1.627	76,17	2.154	1.217	56,50	2.154	1.925	89,37
28	Gorontalo	728	488	67,03	723	584	80,77	723	616	85,20
29	Sulawesi Barat	645	486	75,35	641	525	81,90	641	457	71,29
30	Maluku	1.090	774	71,01	998	733	73,45	998	782	78,36
31	Maluku Utara	1.073	752	70,08	1.071	817	76,28	1.071	864	80,67
32	Papua Barat	1.419	420	29,60	1.427	588	41,21	1.427	493	34,55
33	Papua	2.435	403	16,55	3.579	467	13,05	3.579	489	13,66
Indonesia		**80.026**	**63.474**	**79,32**	**81.126**	**65.087**	**80,23**	**81.150**	**66.393**	**81,82**

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 30 April 2015)

Lampiran 5.20

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Bayi	Jumlah Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi		Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
				Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	99.807	417.955	87.649	87,82	306.666	73,37
2	Sumatera Utara	295.304	1.211.364	246.132	83,35	918.758	75,84
3	Sumatera Barat	104.998	422.492	90.756	86,44	300.424	71,11
4	Riau	141.680	597.341	120.645	85,15	436.508	73,08
5	Jambi	69.111	284.876	68.173	98,64	222.370	78,06
6	Sumatera Selatan	160.251	659.949	157.635	98,37	618.622	93,74
7	Bengkulu	36.727	149.849	31.001	84,41	91.136	60,82
8	Lampung	157.385	613.917	155.812	99,00	523.200	85,22
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.682	115.121	27.645	96,38	82.829	71,95
10	Kepulauan Riau	49.351	193.088	50.750	102,83	119.301	61,79
11	DKI Jakarta	173.511	698.812	170.256	98,12	621.494	88,94
12	Jawa Barat	853.052	3.565.068	886.480	103,92	2.749.742	77,13
13	Jawa Tengah	553.883	2.181.592	541.580	97,78	1.916.063	87,83
14	DI Yogyakarta	53.695	212.479	41.943	78,11	156.106	73,47
15	Jawa Timur	574.308	2.419.795	569.803	99,22	1.957.912	80,91
16	Banten	219.843	945.271	211.329	96,13	653.611	69,15
17	Bali	69.006	293.268	63.826	92,49	279.436	95,28
18	Nusa Tenggara Barat	100.071	395.073	106.371	106,30	337.534	85,44
19	Nusa Tenggara Timur	120.762	521.611	88.877	73,60	343.903	65,93
20	Kalimantan Barat	88.368	377.814	78.397	88,72	229.669	60,79
21	Kalimantan Tengah	45.338	203.109	36.141	79,71	140.305	69,08
22	Kalimantan Selatan	77.566	305.790	63.173	81,44	179.946	58,85
23	Kalimantan Timur	88.626	362.960	63.123	71,22	241.805	66,62
24	Sulawesi Utara	40.530	170.884	32.273	79,63	109.249	63,93
25	Sulawesi Tengah	57.463	253.385	44.310	77,11	133.981	52,88
26	Sulawesi Selatan	160.777	662.863	143.200	89,07	548.069	82,68
27	Sulawesi Tenggara	56.579	233.112	43.303	76,54	108.939	46,73
28	Gorontalo	22.295	93.684	17.861	80,11	36.888	39,37
29	Sulawesi Barat	28.326	124.144	23.610	83,35	69.264	55,79
30	Maluku	38.836	169.374	30.680	79,00	124.584	73,56
31	Maluku Utara	25.240	114.436	23.670	93,78	59.012	51,57
32	Papua Barat	20.549	87.208	11.619	56,54	35.263	40,44
33	Papua	53.105	331.107	7.046	13,27	48.939	14,78
Indonesia		**4.665.025**	**19.388.791**	**4.335.069**	**92,93**	**14.701.528**	**75,82**

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 10 Maret 2015)

Lampiran 5.21

CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Sasaran (Siswa SD/Sederajat)					Campak (Kelas 1)		DT (Kelas 1)		Td (Kelas 2)		Td (Kelas 3)		Td (Kelas 2+3)	
		Kelas 1 Campak	Kelas 1 DT	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 2+3	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	111.119	111.119	106.945	101.365	208.310	96.079	86,5	95.404	85,9	93.742	87,7	89.205	88,0	182.947	87,8
2	Sumatera Utara	325.493	325.493	314.263	309.872	624.135	285.670	87,8	307.896	94,6	304.215	96,8	299.910	96,8	604.125	96,8
3	Sumatera Barat	113.654	115.267	115.166	112.646	227.812	104.232	91,7	105.261	91,3	106.246	92,3	104.076	92,4	210.322	92,3
4	Riau	149.627	149.627	142.070	139.348	281.418	143.597	96,0	142.283	95,1	133.551	94,0	132.297	94,9	265.848	94,5
5	Jambi	76.447	76.447	74.680	71.438	146.118	73.946	96,7	74.154	97,0	72.470	97,0	69.557	97,4	142.027	97,2
6	Sumatera Selatan	187.859	187.859	180.301	175.946	356.247	183.662	97,8	180.122	95,9	170.370	94,5	165.714	94,2	336.084	94,3
7	Bengkulu	41.105	41.219	40.397	40.324	80.721	38.923	94,7	39.094	94,8	38.648	95,7	38.793	96,2	77.441	95,9
8	Lampung	169.515	169.353	166.804	161.413	328.217	164.471	97,0	162.242	95,8	159.620	95,7	155.044	96,1	314.664	95,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	29.353	29.531	28.723	27.474	56.197	28.980	98,7	29.133	98,7	28.340	98,7	27.036	98,4	55.376	98,5
10	Kepulauan Riau	42.521	42.521	40.538	38.719	79.257	38.179	89,8	38.388	90,3	36.407	89,8	35.252	91,0	71.659	90,4
11	DKI Jakarta	151.054	156.021	155.745	153.396	309.141	139.975	92,7	145.971	93,6	146.019	93,8	143.303	93,4	289.322	93,6
12	Jawa Barat	855.845	857.978	858.185	845.947	1.704.132	738.449	86,3	750.690	87,5	748.206	87,2	738.905	87,3	1.487.111	87,3
13	Jawa Tengah	591.069	599.540	601.658	585.721	1.187.379	585.568	99,1	592.628	98,8	590.261	98,1	590.241	100,8	1.181.531	99,5
14	DI Yogyakarta	51.429	52.024	53.988	49.489	103.477	50.697	98,6	51.161	98,3	53.119	98,4	48.576	98,2	101.695	98,3
15	Jawa Timur	605.839	605.839	588.934	575.602	1.164.536	559.927	92,4	560.313	92,5	552.202	93,8	525.435	91,3	1.077.637	92,5
16	Banten	234.965	234.965	227.749	220.755	448.504	223.956	95,3	205.548	87,5	218.226	95,8	211.608	95,9	429.834	95,8
17	Bali	72.249	72.249	70.444	68.919	139.363	71.529	99,0	71.482	98,9	69.546	98,7	68.306	99,1	137.852	98,9
18	Nusa Tenggara Barat	97.229	97.162	95.217	94.289	189.506	87.676	90,2	87.291	89,8	84.464	88,7	83.188	88,2	167.652	88,5
19	Nusa Tenggara Timur	149.531	149.531	137.243	137.231	274.474	135.427	90,6	141.434	94,6	126.978	92,5	126.969	92,5	253.947	92,5
20	Kalimantan Barat	121.909	121.909	114.481	113.883	228.364	115.684	94,9	114.501	93,9	109.046	95,3	107.896	94,7	216.942	95,0
21	Kalimantan Tengah	49.605	59.129	55.706	53.757	109.463	46.383	93,5	54.715	92,5	52.241	93,8	50.532	94,0	102.773	93,9
22	Kalimantan Selatan	82.423	83.068	78.684	78.679	157.367	79.739	96,7	78.674	94,7	74.824	95,1	74.818	95,1	149.642	95,1
23	Kalimantan Timur	89.447	89.447	85.696	80.202	165.898	83.263	93,1	83.001	92,8	78.285	91,4	72.969	91,0	151.254	91,2
24	Sulawesi Utara	57.375	57.375	56.134	55.496	111.630	30.213	52,7	22.124	38,6	22.028	39,2	26.216	47,2	48.244	43,2
25	Sulawesi Tengah	65.412	65.412	63.317	64.015	127.332	50.711	77,5	57.922	88,5	56.602	89,4	57.097	89,2	113.699	89,3
26	Sulawesi Selatan	171.533	171.533	171.617	168.788	340.405	156.927	91,5	161.854	94,4	161.459	94,1	159.568	94,5	321.027	94,3
27	Sulawesi Tenggara	57.905	57.905	58.428	57.794	116.222	53.446	92,3	53.010	91,5	52.955	90,6	53.111	91,9	106.066	91,3
28	Gorontalo	16.973	16.973	16.819	16.662	33.481	16.025	94,4	16.072	94,7	16.024	95,3	15.536	93,2	31.560	94,3
29	Sulawesi Barat	21.510	21.510	21.454	21.189	42.643	17.897	83,2	17.739	82,5	18.129	84,5	17.637	83,2	35.766	83,9
30	Maluku	30.798	30.798	25.388	24.423	49.811	26.195	85,1	27.426	89,1	23.922	94,2	22.912	93,8	46.834	94,0
31	Maluku Utara	29005	29.005	27.183	26.528	53.711	25.602	88,3	25.487	87,9	23.971	88,2	24.203	91,2	48.174	89,7
32	Papua Barat	13.135	13.135	10.415	9.710	20.125	10.792	82,2	10.222	77,8	8.714	83,7	8.098	83,4	16.812	83,5
33	Papua	23.605	23.605	20.489	19.576	40.065	20.003	84,7	21.380	90,6	20.143	98,3	18.392	94,0	38.535	96,2
Indonesia		**4.886.538**	**4.914.549**	**4.804.861**	**4.700.596**	**9.505.461**	**4.483.823**	**91,76**	**4.524.622**	**92,07**	**4.450.973**	**92,63**	**4.362.400**	**92,81**	**8.814.402**	**92,73**

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 30 April 2015)

Lampiran 5.22

CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA 6 - 59 BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Vitamin A Bayi 6-11 Bulan			Vitamin A Anak Balita 12-59 Bulan			Vitamin A Balita 6-59 Bulan		
		Jumlah Bayi 6-11 Bulan	Dapat Vitamin A	%	Jumlah Anak Balita 12-59 Bulan	Dapat Vitamin A	%	Jumlah Balita 6-59 Bulan	Dapat Vitamin A	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	56.035	52.436	93,6	344.941	328.022	95,1	400.976	380.458	94,9
2	Sumatera Utara	192.948	162.741	84,3	1.137.133	941.341	82,8	1.330.081	1.104.082	83,0
3	Sumatera Barat	56.537	50.667	89,6	389.229	345.727	88,8	445.766	396.394	88,9
4	Riau	140.263	121.042	86,3	570.743	501.396	87,8	711.006	622.438	87,5
5	Jambi	41.605	37.977	91,3	254.485	224.327	88,1	296.090	262.304	88,6
6	Sumatera Selatan	90.117	81.734	90,7	669.022	585.749	87,6	759.139	667.483	87,9
7	Bengkulu	40.557	37.218	91,8	121.822	109.995	90,3	162.379	147.213	90,7
8	Lampung	83.302	71.997	86,4	643.232	529.121	82,3	726.534	601.118	82,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	14.653	13.269	90,6	107.950	94.426	87,5	122.603	107.695	87,8
10	Kepulauan Riau	28.411	24.481	86,2	177.674	147.106	82,8	206.085	171.587	83,3
11	DKI Jakarta	90.404	68.671	76,0	694.751	465.765	67,0	785.155	534.436	68,1
12	Jawa Barat	482.904	432.505	89,6	3.349.301	2.838.117	84,7	3.832.205	3.270.622	85,3
13	Jawa Tengah	301.432	299.719	99,4	2.048.445	2.017.484	98,5	2.349.877	2.317.203	98,6
14	DI Yogyakarta	45.494	45.387	99,8	176.783	175.129	99,1	222.277	220.516	99,2
15	Jawa Timur	308.091	299.249	97,1	2.410.855	2.150.706	89,2	2.718.946	2.455.802	90,3
16	Banten	118.056	76.896	65,1	891.708	640.331	71,8	1.009.764	717.227	71,0
17	Bali	56.657	55.525	98,0	191.151	186.979	97,8	247.808	242.504	97,9
18	Nusa Tenggara Barat	110.076	107.745	97,9	385.892	371.007	96,1	495.968	478.752	96,5
19	Nusa Tenggara Timur	37.351	32.846	87,9	258.864	223.476	86,3	296.215	256.322	86,5
20	Kalimantan Barat	49.112	40.949	83,4	410.319	325.876	79,4	459.431	366.825	79,8
21	Kalimantan Tengah	26.042	19.422	74,6	177.456	134.709	75,9	203.498	154.131	75,7
22	Kalimantan Selatan	36.281	33.226	91,6	279.911	236.369	84,4	316.192	269.595	85,3
23	Kalimantan Timur	38.837	31.679	81,6	382.840	249.250	65,1	421.677	280.929	66,6
24	Kalimantan Utara	7.579	6.809	89,8	61.002	39.770	65,2	68.581	46.579	67,9
25	Sulawesi Utara	34.096	30.171	88,5	201.400	174.035	86,4	235.492	203.902	86,6
26	Sulawesi Tengah	171.959	138.738	80,7	23.364	19.394	83,0	139.012	114.750	82,5
27	Sulawesi Selatan	82.603	73.789	89,3	612.859	511.521	83,5	695.367	585.310	84,2
28	Sulawesi Tenggara	26.874	23.087	85,9	196.686	156.872	79,8	223.560	179.959	80,5
29	Gorontalo	11.086	9.623	86,8	81.612	65.994	80,9	92.349	75.617	81,9
30	Sulawesi Barat	13.885	11.001	79,2	100.751	85.792	85,2	114.636	96.793	84,4
31	Maluku	tad	tad	tad	tad	tad	tad	202.853	134.075	66,1
32	Maluku Utara	13.720	11.596	84,5	60.247	51.117	84,8	85.967	72.713	84,6
33	Papua Barat	10.499	6.466	61,6	84.193	33.198	39,4	94.107	39.663	42,1
34	Papua	tad	tad	tad	tad	tad	tad	226.803	91.791	40,5
Indonesia		**2.817.466**	**2.508.661**	**89,0**	**17.496.621**	**14.960.100**	**85,5**	**20.698.399**	**17.666.788**	**85,4**

Sumber: Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 5.23

CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Bayi 0-6 Bulan	Eksklusif	Persentase Mendapat ASI Eksklusif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	44.128	24.456	55,4
2	Sumatera Utara	163.522	61.416	37,6
3	Sumatera Barat	38.005	27.967	73,6
4	Riau	116.506	64.897	55,7
5	Jambi	33.544	21.565	64,3
6	Sumatera Selatan	60.356	38.910	64,5
7	Bengkulu	13.350	10.486	78,5
8	Lampung	66.589	42.427	63,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	10.246	5.630	54,9
10	Kepulauan Riau	14.196	7.136	50,3
11	DKI Jakarta	26.956	18.100	67,1
12	Jawa Barat	462.962	101.062	21,8
16	Jawa Tengah	260.419	156.124	60,0
13	DI Yogyakarta	26.879	19.028	70,8
14	Jawa Timur	247.990	183.573	74,0
15	Banten	38.185	24.817	65,0
17	Bali	35.332	25.500	72,2
18	Nusa Tenggara Barat	48.603	41.172	84,7
19	Nusa Tenggara Timur	25.139	19.446	77,4
20	Kalimantan Barat	33.608	16.641	49,5
21	Kalimantan Tengah	9.214	3.751	40,7
22	Kalimantan Selatan	28.741	19.326	67,2
23	Kalimantan Timur	17.397	11.789	67,8
24	Kalimantan Utara	3.326	2.106	63,3
25	Sulawesi Utara	19.717	7.595	38,5
26	Sulawesi Tengah	11.515	6.490	56,4
27	Sulawesi Selatan	49.350	34.214	69,3
28	Sulawesi Tenggara	21.228	13.910	65,5
29	Gorontalo	4.684	2.753	58,8
30	Sulawesi Barat	9.222	5.994	65,0
31	Maluku	18.467	8.372	45,3
32	Maluku Utara	6.724	4.179	62,2
33	Papua Barat	9.923	2.710	27,3
34	Papua	24.177	12.631	52,2
Indonesia		**2.000.200**	**1.046.173**	**52,3**

Sumber: Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 5.24

CAKUPAN BALITA DITIMBANG
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Balita	Balita Ditimbang (D/S)	
			Jumlah	Cakupan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	453.311	392.102	86,50
2	Sumatera Utara	1.558.123	1.275.911	81,89
3	Sumatera Barat	491.329	415.910	84,65
4	Riau	1.059.058	789.515	74,55
5	Jambi	306.606	256.435	83,64
6	Sumatera Selatan	763.119	607.276	79,58
7	Bengkulu	158.732	133.330	84,00
8	Lampung	812.981	665.066	81,81
9	Kepulauan Bangka Belitung	134.233	101.389	75,53
10	Kepulauan Riau	246.501	161.480	65,51
11	DKI Jakarta	836.594	556.267	66,49
12	Jawa Barat	4.306.505	3.883.233	90,17
13	Jawa Tengah	2.623.995	2.197.314	83,74
14	DI Yogyakarta	208.648	175.478	84,10
15	Jawa Timur	3.045.458	2.446.207	80,32
16	Banten	1.059.617	883.957	83,42
17	Bali	247.171	215.008	86,99
18	Nusa Tenggara Barat	487.284	444.258	91,17
19	Nusa Tenggara Timur	452.989	372.885	82,32
20	Kalimantan Barat	410.653	260.779	63,50
21	Kalimantan Tengah	200.035	146.657	73,32
22	Kalimantan Selatan	367.038	280.664	76,47
23	Kalimantan Timur	317.465	214.296	67,50
24	Kalimantan Utara	58.503	36.540	62,46
25	Sulawesi Utara	183.865	151.974	82,66
26	Sulawesi Tengah	417.085	297.292	71,28
27	Sulawesi Selatan	746.267	597.648	80,09
28	Sulawesi Tenggara	277.389	218.293	78,70
29	Gorontalo	103.452	82.668	79,91
30	Sulawesi Barat	123.970	108.786	87,75
31	Maluku	208.163	155.811	74,85
32	Maluku Utara	107.676	81.595	75,78
33	Papua Barat	70.826	41.351	58,38
34	Papua	374.959	113.912	30,38
Indonesia		**23.219.600**	**18.761.287**	**80,80**

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 5.25

KASUS GIZI BURUK PADA BALITA DITEMUKAN DAN MENDAPAT PERAWATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Kasus Gizi Buruk Mendapat Perawatan		
		Kasus Gizi Buruk Ditemukan	Kasus Gizi Buruk Dirawat	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	388	388	100
2	Sumatera Utara	1.334	1.334	100
3	Sumatera Barat	583	583	100
4	Riau	294	294	100
5	Jambi	101	101	100
6	Sumatera Selatan	310	310	100
7	Bengkulu	123	123	100
8	Lampung	138	138	100
9	Kepulauan Bangka Belitung	67	67	100
10	Kepulauan Riau	280	280	100
11	DKI Jakarta	1.448	1.448	100
12	Jawa Barat	2.953	2.953	100
13	Jawa Tengah	4.107	4.107	100
14	DI Yogyakarta	299	299	100
15	Jawa Timur	6.772	6.772	100
16	Banten	2.242	2.242	100
17	Bali	212	212	100
18	Nusa Tenggara Barat	449	449	100
19	Nusa Tenggara Timur	3.415	3.415	100
20	Kalimantan Barat	342	342	100
21	Kalimantan Tengah	92	92	100
22	Kalimantan Selatan	172	172	100
23	Kalimantan Timur	231	231	100
24	Kalimantan Utara	138	138	100
25	Sulawesi Utara	54	54	100
26	Sulawesi Tengah	463	463	100
27	Sulawesi Selatan	245	245	100
28	Sulawesi Tenggara	274	274	100
29	Gorontalo	597	597	100
30	Sulawesi Barat	283	283	100
31	Maluku	208	208	100
32	Maluku Utara	663	663	100
33	Papua Barat	570	570	100
34	Papua	2.674	2.674	100
Indonesia		**32.521**	**32.521**	**100**

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 5.26

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasasan terhadap Anak
(1)	*(2)*	*(3)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	62	23	100
2	Sumatera Utara	33	130	13	39,39
3	Sumatera Barat	19	45	14	73,68
4	Riau	12	30	12	100,00
5	Jambi	11	33	11	100
6	Sumatera Selatan	15	33	15	100,00
7	Bengkulu	10	53	10	100
8	Lampung	14	41	14	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	17	6	85,71
10	Kepulauan Riau	7	31	6	85,71
11	DKI Jakarta	6	12	6	100
12	Jawa Barat	26	122	26	100,00
13	Jawa Tengah	35	225	32	91,43
14	DI Yogyakarta	5	28	5	100,00
15	Jawa Timur	38	160	23	60,53
16	Banten	8	76	7	87,50
17	Bali	9	18	9	100
18	Nusa Tenggara Barat	10	20	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	21	76	18	85,71
20	Kalimantan Barat	14	72	9	64,29
21	Kalimantan Tengah	14	32	10	71,43
22	Kalimantan Selatan	13	40	9	69,23
23	Kalimantan Timur	14	47	7	50,00
24	Sulawesi Utara	15	59	15	100,00
25	Sulawesi Tengah	11	22	11	100
26	Sulawesi Selatan	24	59	23	95,83
27	Sulawesi Tenggara	12	25	9	75,00
28	Gorontalo	6	10	5	83,33
29	Sulawesi Barat	5	9	2	40,00
30	Maluku	11	34	7	63,64
31	Maluku Utara	9	14	5	55,56
32	Papua Barat	11	40	11	100,00
33	Papua	29	19	5	17,24
Indonesia		**497**	**1.694**	**388**	**78,07**

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 10 Maret 2015)

Lampiran 5.27

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Mampu PKPR	Jumlah Kabupaten/Kota dengan PKPR	Persentase Kabupaten/Kota dengan PKPR
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	23	92	15	65,22
2	Sumatera Utara	33	241	27	81,82
3	Sumatera Barat	19	85	18	94,74
4	Riau	12	83	11	91,67
5	Jambi	11	54	10	90,91
6	Sumatera Selatan	15	134	12	80,00
7	Bengkulu	10	71	8	80,00
8	Lampung	14	64	14	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	39	7	100
10	Kepulauan Riau	7	40	5	71,43
11	DKI Jakarta	6	22	5	83,33
12	Jawa Barat	26	356	26	100,00
13	Jawa Tengah	35	265	33	94,29
14	DI Yogyakarta	5	76	5	100,00
15	Jawa Timur	38	277	37	97,37
16	Banten	8	54	7	87,50
17	Bali	9	50	9	100
18	Nusa Tenggara Barat	10	40	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	21	146	18	85,71
20	Kalimantan Barat	14	124	13	92,86
21	Kalimantan Tengah	14	57	10	71,43
22	Kalimantan Selatan	13	85	9	69,23
23	Kalimantan Timur	14	51	8	57,14
24	Sulawesi Utara	15	78	12	80,00
25	Sulawesi Tengah	11	41	9	81,82
26	Sulawesi Selatan	24	101	23	95,83
27	Sulawesi Tenggara	12	49	12	100
28	Gorontalo	6	22	5	83,33
29	Sulawesi Barat	5	18	3	60,00
30	Maluku	11	92	6	54,55
31	Maluku Utara	9	22	4	44,44
32	Papua Barat	11	41	9	81,82
33	Papua	29	25	5	17,24
Indonesia		**497**	**2.995**	**405**	**81,49**

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 10 Maret 2015)

Lampiran 5.28

JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KESEHATAN ANAK DI PANTI ANAK TERLANTAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Puskesmas Memiliki Panti Anak Terlantar	Puskesmas Membina Panti Anak Terlantar		Jumlah Seluruh Panti di Wilayah Kerja Puskesmas
			Jumlah	Persentase (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	97	52	53,61	127
2	Sumatera Utara	20	19	95,00	22
3	Sumatera Barat	67	67	100	101
4	Riau	51	31	60,78	68
5	Jambi	31	31	100	48
6	Sumatera Selatan	60	48	80,00	115
7	Bengkulu	9	4	44,44	13
8	Lampung	59	55	93,22	117
9	Kepulauan Bangka Belitung	10	9	90,00	13
10	Kepulauan Riau	22	22	100,00	52
11	DKI Jakarta	31	31	100	80
12	Jawa Barat	85	85	100,00	130
13	Jawa Tengah	29	29	100	41
14	DI Yogyakarta	32	32	100,00	53
15	Jawa Timur	415	324	78,07	993
16	Banten	41	32	78,05	43
17	Bali	27	27	100	59
18	Nusa Tenggara Barat	97	28	28,87	227
19	Nusa Tenggara Timur	85	85	100	130
20	Kalimantan Barat	54	53	98,15	117
21	Kalimantan Tengah	tad	tad	tad	tad
22	Kalimantan Selatan	44	44	100,00	84
23	Kalimantan Timur	45	45	100	65
24	Sulawesi Utara	20	20	100,00	34
25	Sulawesi Tengah	56	39	69,64	112
26	Sulawesi Selatan	150	67	44,67	215
27	Sulawesi Tenggara	50	47	94,00	70
28	Gorontalo	18	18	100,00	29
29	Sulawesi Barat	tad	tad	tad	tad
30	Maluku	20	16	80,00	80
31	Maluku Utara	13	10	76,92	77
32	Papua Barat	tad	tad	tad	tad
33	Papua	tad	tad	tad	tad
Indonesia		**1.738**	**1.370**	**78,83**	**3.315**

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 9 Januari 2015)

Lampiran 5.29

CAKUPAN SEKOLAH DASAR (SD) YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/MI KELAS 1 MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah SD/MI	Cakupan SD/MI Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/MI Kelas 1	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	3.948	3.158	79,99
2	Sumatera Utara	9.517	5.517	57,97
3	Sumatera Barat	4.276	4.233	98,99
4	Riau	2.999	2.143	71,46
5	Jambi	2.644	2.534	95,84
6	Sumatera Selatan	4.827	2.037	42,20
7	Bengkulu	1.412	1.220	86,40
8	Lampung	5.116	4.794	93,71
9	Kepulauan Bangka Belitung	816	816	100,00
10	Kepulauan Riau	899	833	92,66
11	DKI Jakarta	3.394	3.374	99,41
12	Jawa Barat	22.932	21.832	95,20
13	Jawa Tengah	23.195	19.927	85,91
14	DI Yogyakarta	2.041	2.041	100,00
15	Jawa Timur	24.779	22.702	91,62
16	Banten	4.993	3.363	67,35
17	Bali	2.464	2.464	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	3.870	3.549	91,71
19	Nusa Tenggara Timur	2.976	411	13,81
20	Kalimantan Barat	4.326	4.326	100,00
21	Kalimantan Tengah	2.728	1.987	72,84
22	Kalimantan Selatan	3.221	2.829	87,83
23	Kalimantan Timur	1.913	1.709	89,34
24	Sulawesi Utara	2.153	1.387	64,42
25	Sulawesi Tengah	2.769	2.533	91,48
26	Sulawesi Selatan	6.877	5.965	86,74
27	Sulawesi Tenggara	2.305	1.647	71,45
28	Gorontalo	994	918	92,35
29	Sulawesi Barat	1.426	674	47,27
30	Maluku	1.658	830	50,06
31	Maluku Utara	1.061	579	54,57
32	Papua Barat	751	314	41,81
33	Papua	2.140	0	0,00
Indonesia		**161.420**	**132.646**	**82,17**

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014 (update s.d. 10 Maret 2015)

Lampiran 5.30

PUSKESMAS MEMBINA LAPAS/RUTAN ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Memiliki Lapas/Rutan	Puskesmas Membina Kesehatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Lapas/Rutan di 29 Provinsi		Jumlah Seluruh Lapas/Rutan di Wilayah Kerja Puskesmas
			Jumlah	Persentase (%)	
(1)	*(2)*	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1	1	100	1
2	Sumatera Utara	8	8	100	8
3	Sumatera Barat	2	2	100	2
4	Riau	10	10	100	10
5	Jambi	1	1	100	1
6	Sumatera Selatan	10	9	90	10
7	Bengkulu	tad	tad	tad	tad
8	Lampung	2	1	50	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	4	100	4
10	Kepulauan Riau	tad	tad	tad	tad
11	DKI Jakarta	1	1	100	1
12	Jawa Barat	7	7	100	7
13	Jawa Tengah	9	8	88,89	8
14	DI Yogyakarta	tad	tad	tad	tad
15	Jawa Timur	38	38	100	38
16	Banten	2	2	100	2
17	Bali	2	2	100	2
18	Nusa Tenggara Barat	1	1	100	1
19	Nusa Tenggara Timur	22	21	95,45	22
20	Kalimantan Barat	1	1	100	1
21	Kalimantan Tengah	tad	tad	tad	tad
22	Kalimantan Selatan	1	1	100	1
23	Kalimantan Timur	tad	tad	tad	tad
24	Sulawesi Utara	1	1	100	1
25	Sulawesi Tengah	9	4	44,44	9
26	Sulawesi Selatan	2	2	100	2
27	Sulawesi Tenggara	5	5	100	6
28	Gorontalo	2	2	100	2
29	Maluku Utara	tad	tad	tad	tad
Indonesia		**141**	**132**	**93,62**	**141**

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 9 Januari 2015)

Lampiran 5.31

PUSKESMAS MEMBINA KESEHATAN ANAK PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM UKS DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Memiliki SLB	Puskesmas MembinaKesehatan Anak Penyandang Cacat di SLB melalui Program UKS di 27 Provinsi		Jumlah Seluruh SLB di Wilayah Kerja Puskesmas
			Jumlah	Persentase (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1	1	100	1
2	Sumatera Utara	12	12	100	13
3	Sumatera Barat	67	67	100	96
4	Riau	1	1	100	1
5	Jambi	11	11	100	11
6	Sumatera Selatan	19	18	94,74	28
7	Bengkulu	7	7	100	14
8	Lampung	9	4	44,44	9
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100	7
10	Kepulauan Riau	5	5	100	5
11	DKI Jakarta	5	5	100	0
12	Jawa Barat	114	114	100	132
13	Jawa Tengah	45	45	100	49
14	DI Yogyakarta	43	43	100	47
15	Jawa Timur	1	1	100	1
16	Banten	29	21	72,41	29
17	Bali	12	12	100	12
18	Nusa Tenggara Barat	27	5	18,52	28
19	Nusa Tenggara Timur	tad	tad	tad	tad
20	Kalimantan Barat	tad	tad	tad	tad
21	Kalimantan Selatan	11	11	100	11
22	Kalimantan Timur	13	12	92,31	18
23	Sulawesi Utara	tad	tad	tad	tad
24	Sulawesi Tengah	8	8	100	9
25	Sulawesi Selatan	43	28	65,12	43
26	Gorontalo	8	8	100	11
27	Maluku Utara	3	3	100	3
Indonesia		**501**	**449**	**90**	**578**

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2015 (update s.d. 9 Januari 2015)

Lampiran 5.32

PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT UMUR (BB/U) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No	Provinsi	Status Gizi Menurut BB/U			
		Gizi Buruk (%)	Gizi Kurang (%)	Gizi Baik (%)	Gizi Lebih (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	7,9	18,4	70,7	2,9
2	Sumatera Utara	8,3	14,1	72,8	4,8
3	Sumatera Barat	6,9	14,3	76,0	2,8
4	Riau	9,0	13,5	70,8	6,7
5	Jambi	5,7	14,0	75,6	4,8
6	Sumatera Selatan	6,3	12,0	74,5	7,2
7	Bengkulu	6,0	12,7	73,3	8,0
8	Lampung	6,9	11,9	73,7	7,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,8	12,3	80,4	4,6
10	Kepulauan Riau	4,0	11,6	81,7	2,6
11	DKI Jakarta	2,8	11,2	78,5	7,5
12	Jawa Barat	4,4	11,3	79,9	4,3
13	Jawa Tengah	4,1	13,5	78,9	3,5
14	DI Yogyakarta	4,0	12,2	80,3	3,5
15	Jawa Timur	4,9	14,2	76,7	4,1
16	Banten	4,3	12,9	78,1	4,7
17	Bali	3,0	10,2	81,4	5,5
18	Nusa Tenggara Barat	6,3	19,4	71,5	2,8
19	Nusa Tenggara Timur	11,5	21,5	64,4	2,5
20	Kalimantan Barat	10,3	16,2	68,5	5,0
21	Kalimantan Tengah	6,6	16,7	72,3	4,4
22	Kalimantan Selatan	8,2	19,2	69,2	3,4
23	Kalimantan Timur	3,9	12,7	77,6	5,8
24	Sulawesi Utara	3,7	12,8	79,0	4,5
25	Sulawesi Tengah	6,6	17,5	73,5	2,5
26	Sulawesi Selatan	6,6	19,0	71,5	2,9
27	Sulawesi Tenggara	8,0	15,9	72,2	3,9
28	Gorontalo	6,9	19,2	70,9	3,0
29	Sulawesi Barat	7,0	22,1	66,9	4,0
30	Maluku	10,5	17,8	67,2	4,5
31	Maluku Utara	9,2	15,7	71,7	3,4
32	Papua Barat	11,9	19,0	66,2	2,9
33	Papua	9,2	12,6	71,9	6,3
Indonesia		**5,7**	**13,9**	**75,9**	**4,5**

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Lampiran 5.33

PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR (TB/U) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No	Provinsi	Status Gizi Menurut TB/U		
		Sangat Pendek (%)	Pendek (%)	Normal (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	20,1	21,4	58,5
2	Sumatera Utara	22,7	19,8	57,5
3	Sumatera Barat	18,4	20,8	60,8
4	Riau	20,0	16,8	63,2
5	Jambi	19,0	18,9	62,1
6	Sumatera Selatan	19,9	16,8	63,3
7	Bengkulu	22,5	17,2	60,3
8	Lampung	27,6	15,0	57,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	12,6	16,1	71,3
10	Kepulauan Riau	10,0	16,3	73,7
11	DKI Jakarta	12,1	15,4	72,5
12	Jawa Barat	16,9	18,4	64,7
13	Jawa Tengah	16,8	19,9	63,2
14	DI Yogyakarta	8,2	19,1	72,8
15	Jawa Timur	16,8	19,0	64,2
16	Banten	16,4	16,6	67,0
17	Bali	13,1	19,5	67,5
18	Nusa Tenggara Barat	20,5	24,7	54,7
19	Nusa Tenggara Timur	26,2	25,5	48,3
20	Kalimantan Barat	22,5	16,1	61,4
21	Kalimantan Tengah	18,4	22,9	58,7
22	Kalimantan Selatan	20,4	23,8	55,8
23	Kalimantan Timur	11,8	15,8	72,5
24	Sulawesi Utara	17,0	17,8	65,2
25	Sulawesi Tengah	17,7	23,3	58,9
26	Sulawesi Selatan	16,4	24,5	59,1
27	Sulawesi Tenggara	21,2	21,4	57,4
28	Gorontalo	14,7	24,2	61,1
29	Sulawesi Barat	22,3	25,7	52,0
30	Maluku	20,4	20,2	59,4
31	Maluku Utara	18,3	22,8	59,0
32	Papua Barat	21,9	22,8	55,4
33	Papua	25,0	15,1	59,9
Indonesia		**18,0**	**19,2**	**62,8**

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2013

Lampiran 5.34

PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (BB/TB) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No	Provinsi	Status Gizi Menurut BB/TB			
		Sangat Kurus (%)	Kurus (%)	Normal (%)	Gemuk (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	6,1	9,6	74,5	9,8
2	Sumatera Utara	7,5	7,4	72,2	12,8
3	Sumatera Barat	5,2	7,4	77,3	10,1
4	Riau	6,9	8,7	70,2	14,3
5	Jambi	5,8	7,7	73,3	13,1
6	Sumatera Selatan	5,9	6,4	70,9	16,7
7	Bengkulu	6,9	7,9	68,7	16,4
8	Lampung	5,6	6,2	66,8	21,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	4,0	6,2	76,1	13,6
10	Kepulauan Riau	6,0	6,3	78,7	8,9
11	DKI Jakarta	4,4	5,8	78,1	11,7
12	Jawa Barat	5,0	5,9	77,3	11,8
13	Jawa Tengah	4,5	6,6	76,9	12,0
14	DI Yogyakarta	4,7	4,7	80,2	10,3
15	Jawa Timur	4,4	7,0	76,9	11,8
16	Banten	6,5	7,3	74,4	11,8
17	Bali	3,4	5,4	78,6	12,6
18	Nusa Tenggara Barat	5,2	6,7	79,7	8,5
19	Nusa Tenggara Timur	7,4	8,1	76,6	8,0
20	Kalimantan Barat	10,4	8,3	68,9	12,5
21	Kalimantan Tengah	5,4	7,0	76,7	10,9
22	Kalimantan Selatan	4,5	8,3	77,4	9,9
23	Kalimantan Timur	3,9	7,7	75,9	12,6
24	Sulawesi Utara	3,4	6,5	79,6	10,5
25	Sulawesi Tengah	3,6	5,8	82,1	8,5
26	Sulawesi Selatan	3,8	7,2	82,2	6,8
27	Sulawesi Tenggara	5,9	5,5	79,0	9,6
28	Gorontalo	5,6	6,1	81,4	6,9
29	Sulawesi Barat	4,6	6,2	81,3	7,9
30	Maluku	6,1	10,1	77,4	6,4
31	Maluku Utara	3,9	8,3	80,5	7,3
32	Papua Barat	6,2	9,2	77,1	7,5
33	Papua	8,0	6,8	70,2	15,0
Indonesia		**5,3**	**6,8**	**76,1**	**11,8**

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2013

Lampiran 5.35

PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR DAN BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (TB/U DAN BB/TB) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No	Provinsi	Status Gizi Menurut TB/U dan BB/TB					
		Pendek-Kurus (%)	Pendek-Normal (%)	Pendek-Gemuk (%)	Normal-Kurus (%)	Normal-Normal (%)	Normal-Gemuk (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	4,13	31,00	6,16	11,54	43,48	3,69
2	Sumatera Utara	3,51	30,00	8,34	11,41	42,22	4,51
3	Sumatera Barat	2,23	30,18	7,00	10,36	47,09	3,13
4	Riau	3,58	25,19	7,88	11,97	44,97	6,41
5	Jambi	3,16	25,22	8,27	10,42	48,05	4,88
6	Sumatera Selatan	2,24	23,73	9,89	10,13	47,18	6,83
7	Bengkulu	2,00	26,08	9,87	12,84	42,66	6,55
8	Lampung	2,46	26,31	12,60	9,38	40,45	8,79
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,40	20,79	5,79	7,84	55,36	7,83
10	Kepulauan Riau	0,98	20,29	4,45	11,33	58,46	4,49
11	DKI Jakarta	1,06	20,56	4,49	9,13	57,57	7,18
12	Jawa Barat	1,98	26,35	6,65	8,91	50,93	5,18
13	Jawa Tengah	1,80	27,02	7,28	9,30	49,85	4,75
14	DI Yogyakarta	1,81	22,23	2,89	7,67	57,99	7,41
15	Jawa Timur	2,45	26,55	6,18	8,95	50,30	5,57
16	Banten	1,93	23,46	6,84	11,85	50,91	5,00
17	Bali	1,58	24,10	6,18	7,25	54,46	6,42
18	Nusa Tenggara Barat	2,96	36,88	5,32	8,91	42,77	3,15
19	Nusa Tenggara Timur	5,25	41,35	5,93	10,19	35,24	2,04
20	Kalimantan Barat	3,51	27,27	7,50	15,15	41,61	4,96
21	Kalimantan Tengah	3,31	30,73	7,42	9,06	45,98	3,51
22	Kalimantan Selatan	5,08	33,29	5,42	7,68	44,09	4,43
23	Kalimantan Timur	2,12	19,08	5,31	9,41	56,84	7,25
24	Sulawesi Utara	2,25	25,94	5,98	7,67	53,67	4,48
25	Sulawesi Tengah	2,55	32,91	5,35	6,82	49,23	3,14
26	Sulawesi Selatan	3,11	34,11	3,54	7,89	48,06	3,29
27	Sulawesi Tenggara	3,44	32,58	6,66	7,98	46,42	2,92
28	Gorontalo	3,18	32,18	3,65	8,52	49,26	3,21
29	Sulawesi Barat	2,54	40,91	4,47	8,26	40,41	3,41
30	Maluku	5,60	30,34	4,13	10,58	47,08	2,27
31	Maluku Utara	4,33	31,90	4,95	7,83	48,62	2,37
32	Papua Barat	5,73	33,65	5,25	9,70	43,44	2,23
33	Papua	2,71	27,03	9,80	12,10	43,18	5,19
Indonesia		**2,53**	**27,46**	**6,70**	**9,59**	**48,66**	**5,06**

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Lampiran 5.36

PREVALENSI STATUS GIZI PENDUDUK DEWASA (>18 TAHUN)
BERDASARKAN KATEGORI INDEKS MASSA TUBUH (IMT) DAN PROVINSI, RISKESDAS 2013

No	Provinsi	Kategori IMT			
		Kurus (%)	Normal (%)	BB Lebih (%)	Obese (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	11,07	61,08	11,57	16,28
2	Sumatera Utara	6,46	62,47	12,97	18,09
3	Sumatera Barat	11,84	64,62	10,08	13,46
4	Riau	8,89	65,39	12,05	13,68
5	Jambi	10,42	66,84	10,42	12,32
6	Sumatera Selatan	11,08	68,14	9,86	10,92
7	Bengkulu	8,77	67,53	10,84	12,86
8	Lampung	8,41	73,08	9,80	8,72
9	Kepulauan Bangka Belitung	9,20	60,34	12,50	17,96
10	Kepulauan Riau	8,58	60,94	12,30	18,18
11	DKI Jakarta	9,28	55,85	14,03	20,84
12	Jawa Barat	10,97	62,09	11,75	15,19
13	Jawa Tengah	12,22	64,20	10,77	12,81
14	DI Yogyakarta	15,15	58,26	10,82	15,76
15	Jawa Timur	11,97	59,97	11,69	16,36
16	Banten	12,46	62,72	11,18	13,64
17	Bali	8,70	62,56	13,27	15,46
18	Nusa Tenggara Barat	15,05	65,48	9,24	10,23
19	Nusa Tenggara Timur	19,50	67,54	6,72	6,23
20	Kalimantan Barat	9,93	69,91	9,72	10,45
21	Kalimantan Tengah	11,45	65,53	10,79	12,23
22	Kalimantan Selatan	15,10	60,22	10,67	14,01
23	Kalimantan Timur	7,87	56,75	14,78	20,61
24	Sulawesi Utara	5,56	53,90	16,47	24,07
25	Sulawesi Tengah	10,46	61,42	11,75	16,37
26	Sulawesi Selatan	12,74	63,05	10,65	13,56
27	Sulawesi Tenggara	10,31	66,30	10,99	12,40
28	Gorontalo	8,59	56,74	13,69	20,98
29	Sulawesi Barat	11,59	67,61	10,63	10,16
30	Maluku	12,11	62,94	10,89	14,06
31	Maluku Utara	7,73	61,66	12,30	18,30
32	Papua Barat	8,14	61,39	12,42	18,04
33	Papua	6,98	63,40	13,77	15,86
Indonesia		**11,09**	**62,68**	**11,48**	**14,76**

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Lampiran 6.1

JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIF MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jenis Kelamin				
		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan
		Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	2.641	64,9	1.429	35,1	4.070
2	Sumatera Utara	9.859	65,6	5.172	34,4	15.031
3	Sumatera Barat	3.071	65,2	1.641	34,8	4.712
4	Riau	2.308	64,8	1.256	35,2	3.564
5	Jambi	1.691	62,9	997	37,1	2.688
6	Sumatera Selatan	3.273	61,1	2.080	38,9	5.353
7	Bengkulu	925	65,0	498	35,0	1.423
8	Lampung	3.042	59,5	2.067	40,5	5.109
9	Kep. Bangka Belitung	605	66,1	310	33,9	915
10	Kepulauan Riau	876	65,4	463	34,6	1.339
11	DKI Jakarta	5.189	61,4	3.263	38,6	8.452
12	Jawa Barat	18.132	57,6	13.337	42,4	31.469
13	Jawa Tengah	9.254	57,6	6.825	42,4	16.079
14	DI Yogyakarta	721	58,2	518	41,8	1.239
15	Jawa Timur	12.653	56,9	9.591	43,1	22.244
16	Banten	2.858	61,0	1.830	39,0	4.688
17	Bali	1.001	61,9	615	38,1	1.616
18	Nusa Tenggara Barat	2.670	60,7	1.726	39,3	4.396
19	Nusa Tenggara Timur	1.957	58,2	1.407	41,8	3.364
20	Kalimantan Barat	2.787	65,3	1.478	34,7	4.265
21	Kalimantan Tengah	983	62,8	582	37,2	1.565
22	Kalimantan Selatan	2.005	62,5	1.202	37,5	3.207
23	Kalimantan Timur	1.061	63,9	599	36,1	1.660
24	Kalimantan Utara	230	61,0	147	39,0	377
25	Sulawesi Utara	3.233	61,9	1.993	38,1	5.226
26	Sulawesi Tengah	1.468	60,3	965	39,7	2.433
27	Sulawesi Selatan	4.977	60,0	3.320	40,0	8.297
28	Sulawesi Tenggara	2.345	59,6	1.587	40,4	3.932
29	Gorontalo	915	60,4	599	39,6	1.514
30	Sulawesi Barat	709	59,3	486	40,7	1.195
31	Maluku	1.219	57,6	896	42,4	2.115
32	Maluku Utara	520	57,6	383	42,4	903
33	Papua Barat	344	59,6	233	40,4	577
34	Papua	929	56,0	731	44,0	1.660
Indonesia		**106.451**	**60,3**	**70.226**	**39,7**	**176.677**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

(Per Tanggal 29 Maret 2015, kab/kota yang sudah melaporkan 91%)

Lampiran 6.2

JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIF
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	10	11	289	225	489	299	527	273	583	290	486	208	257	123	2.641	1.429	4.070
2	Sumatera Utara	21	29	1.098	953	2.059	1.181	2.045	1.061	2.205	967	1.655	689	776	292	9.859	5.172	15.031
3	Sumatera Barat	19	21	380	283	624	325	528	296	606	300	560	256	354	160	3.071	1.641	4.712
4	Riau	6	11	295	224	494	310	499	252	501	239	338	146	175	74	2.308	1.256	3.564
5	Jambi	8	13	195	157	326	236	347	198	322	199	333	143	160	51	1.691	997	2.688
6	Sumatera Selatan	16	10	384	284	683	474	678	443	633	399	568	298	311	172	3.273	2.080	5.353
7	Bengkulu	5	8	110	75	169	109	167	109	177	88	183	71	114	38	925	498	1.423
8	Lampung	30	25	307	277	555	417	605	420	616	420	539	299	390	209	3.042	2.067	5.109
9	Kep. Bangka Belitung	0	1	75	53	120	74	134	64	125	54	109	47	42	17	605	310	915
10	Kepulauan Riau	5	2	129	86	240	161	214	100	147	53	93	41	48	20	876	463	1.339
11	DKI Jakarta	22	39	858	667	1.295	828	1.091	629	1.006	638	636	333	281	129	5.189	3.263	8.452
12	Jawa Barat	91	156	3.283	3.191	4.002	3.059	3.488	2.588	3.352	2.244	2.764	1.521	1.152	578	18.132	13.337	31.469
13	Jawa Tengah	36	48	1.073	1.167	1.696	1.433	1.641	1.272	1.848	1.301	1.827	1.048	1.133	556	9.254	6.825	16.079
14	DI Yogyakarta	1	4	111	117	145	97	123	105	129	70	124	72	88	53	721	518	1.239
15	Jawa Timur	64	101	1.417	1.553	1.978	1.810	2.247	1.811	2.835	2.152	2.809	1.555	1.303	609	12.653	9.591	22.244
16	Banten	13	8	474	360	755	448	546	384	498	342	367	205	205	83	2.858	1.830	4.688
17	Bali	2	1	106	90	205	162	197	107	189	88	135	91	167	76	1.001	615	1.616
18	Nusa Tenggara Barat	12	18	327	303	484	311	455	305	530	379	570	310	292	100	2.670	1.726	4.396
19	Nusa Tenggara Timur	9	5	284	319	411	329	350	231	330	183	284	184	289	156	1.957	1.407	3.364
20	Kalimantan Barat	22	22	309	240	499	302	575	256	568	302	554	246	260	110	2.787	1.478	4.265
21	Kalimantan Tengah	12	15	110	84	218	123	195	127	206	107	149	98	93	28	983	582	1.565
22	Kalimantan Selatan	9	12	202	186	358	213	413	277	441	241	376	187	206	86	2.005	1.202	3.207
23	Kalimantan Timur	10	6	169	134	246	168	201	98	191	94	170	66	74	33	1.061	599	1.660
24	Kalimantan Utara	1	1	23	25	44	43	47	25	51	34	43	15	21	4	230	147	377
25	Sulawesi Utara	10	13	399	320	579	365	591	384	652	388	591	329	411	194	3.233	1.993	5.226
26	Sulawesi Tengah	9	8	155	164	239	224	298	182	295	183	279	125	193	79	1.468	965	2.433
27	Sulawesi Selatan	11	13	541	520	920	651	990	639	1.003	684	891	517	621	296	4.977	3.320	8.297
28	Sulawesi Tenggara	12	14	286	256	454	362	427	305	491	305	420	223	255	122	2.345	1.587	3.932
29	Gorontalo	4	5	143	107	172	103	144	129	190	100	148	95	114	60	915	599	1.514
30	Sulawesi Barat	5	2	101	84	150	102	154	110	140	98	86	50	73	40	709	486	1.195
31	Maluku	7	7	191	185	254	198	217	158	223	154	199	134	128	60	1.219	896	2.115
32	Maluku Utara	2	7	97	93	128	86	93	67	71	68	83	41	46	21	520	383	903
33	Papua Barat	4	2	89	52	98	91	61	37	43	35	42	14	7	2	344	233	577
34	Papua	21	21	271	260	281	206	153	118	110	65	60	39	33	22	929	731	1.660
Indonesia		**509**	**659**	**14.281**	**13.094**	**21.370**	**15.300**	**20.441**	**13.560**	**21.307**	**13.264**	**18.471**	**9.696**	**10.072**	**4.653**	**106.451**	**70.226**	**176.677**
		0,66%		**15,49%**		**20,76%**		**19,24%**		**19,57%**		**15,94%**		**8,33%**		**100,00%**		

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

(Per Tanggal 29 Maret 2015, kab/kota yang sudah melaporkan 91%)

Lampiran 6.3

HASIL CAKUPAN PENEMUAN KASUS PENYAKIT TB PARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah penduduk	Cakupan Penemuan							
			Semua Kasus			BTA Positif			Case Notification Rate (CNR)	
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Semua Kasus	BTA Positif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	4.731.705	3.328	1.872	5.200	2.641	1.429	4.070	110	86
2	Sumatera Utara	13.527.937	12.466	6.596	19.062	9.859	5.172	15.031	141	111
3	Sumatera Barat	5.098.790	4.323	2.520	6.843	3.071	1.641	4.712	134	92
4	Riau	6.358.636	3.029	1.719	4.748	2.308	1.256	3.564	75	56
5	Jambi	3.412.459	1.915	1.157	3.072	1.691	997	2.688	90	79
6	Sumatera Selatan	7.996.535	4.809	3.146	7.955	3.273	2.080	5.353	99	67
7	Bengkulu	1.828.291	1.172	649	1.821	925	498	1.423	100	78
8	Lampung	7.972.246	3.929	2.753	6.682	3.042	2.067	5.109	84	64
9	Kep. Bangka Belitung	1.380.762	953	538	1.491	605	310	915	108	66
10	Kepulauan Riau	2.031.895	1.692	982	2.674	876	463	1.339	132	66
11	DKI Jakarta	10.135.030	10.197	6.877	17.074	5.189	3.263	8.452	168	83
12	Jawa Barat	46.300.543	34.572	27.402	61.974	18.132	13.337	31.469	134	68
13	Jawa Tengah	32.779.832	15.404	11.779	27.183	9.254	6.825	16.079	83	49
14	DI Yogyakarta	3.594.290	1.415	1.129	2.544	721	518	1.239	71	34
15	Jawa Timur	38.529.481	22.840	18.248	41.088	12.653	9.591	22.244	107	58
16	Banten	11.834.087	4.209	2.981	7.190	2.858	1.830	4.688	61	40
17	Bali	4.225.384	1.754	1.192	2.946	1.001	615	1.616	70	38
18	Nusa Tenggara Barat	4.702.389	3.799	2.537	6.336	2.670	1.726	4.396	135	93
19	Nusa Tenggara Timur	5.070.746	2.726	1.960	4.686	1.957	1.407	3.364	92	66
20	Kalimantan Barat	4.546.439	3.525	1.904	5.429	2.787	1.478	4.265	119	94
21	Kalimantan Tengah	2.368.654	1.503	901	2.404	983	582	1.565	101	66
22	Kalimantan Selatan	3.913.908	2.881	1.866	4.747	2.005	1.202	3.207	121	82
23	Kalimantan Timur	3.508.012	1.912	1.225	3.137	1.061	599	1.660	89	47
24	Kalimantan Utara	607.729	382	266	648	230	147	377	107	62
25	Sulawesi Utara	2.382.941	3.555	2.228	5.783	3.233	1.993	5.226	243	219
26	Sulawesi Tengah	2.839.290	2.013	1.348	3.361	1.468	965	2.433	118	86
27	Sulawesi Selatan	8.395.747	6.668	4.531	11.199	4.977	3.320	8.297	133	99
28	Sulawesi Tenggara	2.417.962	2.570	1.725	4.295	2.345	1.587	3.932	178	163
29	Gorontalo	1.134.498	981	644	1.625	915	599	1.514	143	133
30	Sulawesi Barat	1.284.620	839	591	1.430	709	486	1.195	111	93
31	Maluku	1.708.190	2.063	1.655	3.718	1.219	896	2.115	218	124
32	Maluku Utara	1.141.561	794	575	1.369	520	383	903	120	79
33	Papua Barat	877.437	873	655	1.528	344	233	577	174	66
34	Papua	3.486.432	2.203	1.809	4.012	929	731	1.660	115	48
Indonesia		**252.124.458**	**167.294**	**117.960**	**285.254**	**106.451**	**70.226**	**176.677**	**113**	**70**
Case Detection Rate								**70,08%**		

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

(Per Tanggal 29 Maret 2015, kab/kota yang sudah melaporkan 91%)

Lampiran 6.4

CAKUPAN TB PARU BTA POSITIF SEMBUH, PENGOBATAN LENGKAP,
DAN ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (*SUCCESS RATE)* MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Kasus BTA Positif*	Sembuh		Pengobatan Lengkap		Keberhasilan Pengobatan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	Success Rate/ Angka Keberhasilan Pengobatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	3.424	1.511	44,1	117	3,4	1.628	47,5
2	Sumatera Utara	16.930	14.742	87,1	599	3,5	15.341	90,6
3	Sumatera Barat	4.810	3.917	81,4	330	6,9	4.247	88,3
4	Riau	3.513	2.539	72,3	426	12,1	2.965	84,4
5	Jambi	3.120	2.094	67,1	137	4,4	2.231	71,5
6	Sumatera Selatan	5.838	4.762	81,6	472	8,1	5.234	89,7
7	Bengkulu	1.703	1.331	78,2	111	6,5	1.442	84,7
8	Lampung	6.411	5.685	88,7	382	6,0	6.067	94,6
9	Kep. Bangka Belitung	980	795	81,1	19	1,9	814	83,1
10	Kepulauan Riau	1.429	613	42,9	331	23,2	944	66,1
11	DKI Jakarta	8.627	5.657	65,6	1.382	16,0	7.039	81,6
12	Jawa Barat	33.460	26.071	77,9	2.459	7,3	28.530	85,3
13	Jawa Tengah	20.446	12.928	63,2	803	3,9	13.731	67,2
14	DI Yogyakarta	1.278	513	40,1	50	3,9	563	44,1
15	Jawa Timur	23.703	20.245	85,4	1.436	6,1	21.681	91,5
16	Banten	7.985	4.764	59,7	800	10,0	5.564	69,7
17	Bali	1.475	1.111	75,3	184	12,5	1.295	87,8
18	Nusa Tenggara Barat	4.142	3.338	80,6	426	10,3	3.764	90,9
19	Nusa Tenggara Timur	4.303	3.659	85,0	414	9,6	4.073	94,7
20	Kalimantan Barat	4.555	1.988	43,6	56	1,2	2.044	44,9
21	Kalimantan Tengah	1.446	821	56,8	312	21,6	1.133	78,4
22	Kalimantan Selatan	3.424	3.044	88,9	127	3,7	3.171	92,6
23	Kalimantan Timur	2.079	1.675	80,6	206	9,9	1.881	90,5
24	Kalimantan Utara	516	331	64,1	65	12,6	396	76,7
25	Sulawesi Utara	5.175	4.944	95,5	212	4,1	5.156	99,6
26	Sulawesi Tengah	2.705	2.242	82,9	238	8,8	2.480	91,7
27	Sulawesi Selatan	8.932	6.842	76,6	500	5,6	7.342	82,2
28	Sulawesi Tenggara	4.210	2.522	59,9	328	7,8	2.850	67,7
29	Gorontalo	1.825	1.554	85,2	192	10,5	1.746	95,7
30	Sulawesi Barat	1.270	933	73,5	59	4,6	992	78,1
31	Maluku	2.242	1.461	65,2	229	10,2	1.690	75,4
32	Maluku Utara	1.049	333	31,7	223	21,3	556	53,0
33	Papua Barat	736	230	31,3	182	24,7	412	56,0
34	Papua	2.569	525	20,4	154	6,0	679	26,4
Indonesia		**196.310**	**145.720**	**74,2**	**13.961**	**7,1**	**159.681**	**81,3**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015
Keterangan: *kohort tahun 2014
(Per Tanggal 29 maret 2015, kab/kota yang sudah melaporkan lengkap dan valid 81%)

Lampiran 6.5

JUMLAH KASUS BARU AIDS DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2014

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru			Jumlah Kasus Kumulatif
		2012	2013	2014	1987-2013
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	27	47	44	209
2	Sumatera Utara	260	41	231	1.573
3	Sumatera Barat	120	150	240	1.192
4	Riau	130	172	167	1.168
5	Jambi	62	83	59	500
6	Sumatera Selatan	62	-	87	409
7	Bengkulu	25	37	19	230
8	Lampung	137	94	71	494
9	Kepulauan Bangka Belitung	28	59	16	319
10	Kepulauan Riau	99	7	-	382
11	DKI Jakarta	1.187	996	130	7.963
12	Jawa Barat	184	33	60	4.191
13	Jawa Tengah	798	524	740	4.079
14	DI Yogyakarta	243	134	-	916
15	Jawa Timur	1.778	2.583	827	12.347
16	Banten	208	253	92	1.199
17	Bali	708	682	727	4.811
18	Nusa Tenggara Barat	128	83	53	526
19	Nusa Tenggara Timur	287	335	389	1.927
20	Kalimantan Barat	98	221	21	2.131
21	Kalimantan Tengah	9	11	23	122
22	Kalimantan Selatan	88	83	76	429
23	Kalimantan Timur	53	176	206	795
24	Sulawesi Utara	144	146	163	961
25	Sulawesi Tengah	52	90	112	322
26	Sulawesi Selatan	231	328	209	1.998
27	Sulawesi Tenggara	56	51	54	266
28	Gorontalo	16	16	6	87
29	Sulawesi Barat	3	4	3	10
30	Maluku	117	142	106	365
31	Maluku Utara	79	65	57	294
32	Papua Barat	154	626	13	1.734
33	Papua	2.078	1.891	493	11.841
Indonesia		**9.649**	**10.163**	**5.494**	**65.790**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.6

JUMLAH KASUS BARU INFEKSI HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 - 2014

No	Provinsi	Jumlah infeksi HIV		
		2012	2013	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	26	46	60
2	Sumatera Utara	1.337	1.603	1.628
3	Sumatera Barat	133	222	321
4	Riau	314	412	550
5	Jambi	203	208	170
6	Sumatera Selatan	230	262	252
7	Bengkulu	40	79	92
8	Lampung	335	189	256
9	Kepulauan Bangka Belitung	132	97	113
10	Kepulauan Riau	792	926	973
11	DKI Jakarta	3.926	5.865	5.851
12	Jawa Barat	1.416	3.041	3.740
13	Jawa Tengah	1.110	2.322	2.867
14	DI Yogyakarta	272	489	614
15	Jawa Timur	2.912	3.391	4.508
16	Banten	395	502	680
17	Bali	1.737	1.690	2.129
18	Nusa Tenggara Barat	110	170	149
19	Nusa Tenggara Timur	242	259	249
20	Kalimantan Barat	465	525	699
21	Kalimantan Tengah	46	57	113
22	Kalimantan Selatan	88	174	227
23	Kalimantan Timur	392	467	539
24	Sulawesi Utara	212	264	392
25	Sulawesi Tengah	86	147	131
26	Sulawesi Selatan	524	792	839
27	Sulawesi Tenggara	71	100	160
28	Gorontalo	8	26	24
29	Sulawesi Barat	7	0	30
30	Maluku	295	236	414
31	Maluku Utara	92	54	63
32	Papua Barat	535	448	600
33	Papua	3.028	3.974	3.278
Indonesia		**21.511**	**29.037**	**32.711**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.7

JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2014

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru AIDS	Jumlah Kasus Baru AIDS pada IDU	Persentase Kasus Baru AIDS pada IDU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	44	2	4,5
2	Sumatera Utara	231	6	2,6
3	Sumatera Barat	240	17	7,1
4	Riau	167	6	3,6
5	Jambi	59	13	22,0
6	Sumatera Selatan	87	6	6,9
7	Bengkulu	19	1	5,3
8	Lampung	71	9	12,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	16	0	0,0
10	Kepulauan Riau	0	0	-
11	DKI Jakarta	130	0	0,0
12	Jawa Barat	60	3	5,0
13	Jawa Tengah	740	11	1,5
14	DI Yogyakarta	0	0	-
15	Jawa Timur	827	32	3,9
16	Banten	92	17	18,5
17	Bali	727	1	0,1
18	Nusa Tenggara Barat	53	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	389	0	0,0
20	Kalimantan Barat	21	2	9,5
21	Kalimantan Tengah	23	1	4,3
22	Kalimantan Selatan	76	0	0,0
23	Kalimantan Timur	206	8	3,9
24	Sulawesi Utara	163	2	1,2
25	Sulawesi Tengah	112	2	1,8
26	Sulawesi Selatan	209	37	17,7
27	Sulawesi Tenggara	54	0	0,0
28	Gorontalo	6	1	16,7
29	Sulawesi Barat	3	1	33,3
30	Maluku	106	0	0,0
31	Maluku Utara	57	4	7,0
32	Papua Barat	13	0	0,0
33	Papua	493	0	0,0
Indonesia		**5.494**	**182**	**3,3**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.8

JUMLAH LAYANAN DAN KUNJUNGAN KONSELING DAN TES HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Layanan	Jumlah Klien Berkunjung	Jumlah Klien Mengikuti Konseling Sebelum Tes HIV	Jumlah Klien Menjalani Tes HIV	Jumlah Klien Mengikuti Konseling Setelah Tes HIV	Jumlah Klien Positif HIV	% Klien Positif HIV
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	14	2.989	2.567	2.584	2.577	60	2,3
2	Sumatera Utara	49	40.997	40.902	40.952	40.953	1.628	4,0
3	Sumatera Barat	23	16.240	16.171	16.369	16.183	321	2,0
4	Riau	40	40.214	39.984	39.612	39.646	550	1,4
5	Jambi	11	3.869	3.667	3.765	3.694	170	4,5
6	Sumatera Selatan	23	22.021	22.021	22.021	22.021	252	1,1
7	Bengkulu	12	8.897	8.895	8.899	8.898	92	1,0
8	Lampung	16	6.221	6.220	6.216	6.200	256	4,1
9	Kep. Bangka Belitung	4	1.559	1.559	1.558	1.557	113	7,3
10	Kepulauan Riau	17	34.041	30.834	30.664	30.349	973	3,2
11	DKI Jakarta	77	125.443	121.364	120.704	120.189	5.851	4,8
12	Jawa Barat	380	246.439	246.323	246.135	245.187	3.740	1,5
13	Jawa Tengah	174	123.925	123.869	123.645	125.221	2.867	2,3
14	DI Yogyakarta	39	14.332	14.324	14.294	14.398	614	4,3
15	Jawa Timur	211	95.806	95.796	96.013	95.297	4.508	4,7
16	Banten	66	19.164	19.053	19.003	18.967	680	3,6
17	Bali	48	36.749	36.501	36.531	36.016	2.129	5,8
18	Nusa Tenggara Barat	21	19.921	19.915	19.864	19.857	149	0,8
19	Nusa Tenggara Timur	4	8.219	8.188	8.188	8.190	249	3,0
20	Kalimantan Barat	25	29.832	29.787	29.498	29.451	699	2,4
21	Kalimantan Tengah	9	5.067	4.981	5.038	4.982	227	4,5
22	Kalimantan Selatan	35	22.564	22.265	22.408	22.214	539	2,4
23	Kalimantan Timur	15	2.147	2.078	2.114	2.110	113	5,3
24	Sulawesi Utara	25	27.732	27.687	27.343	28.041	392	1,4
25	Sulawesi Tengah	8	3.153	3.151	3.146	3.127	131	4,2
26	Sulawesi Selatan	89	48.748	48.556	48.506	47.956	839	1,7
27	Sulawesi Tenggara	3	10.959	10.959	10.959	10.959	160	1,5
28	Gorontalo	1	2.035	2.033	2.035	2.035	24	1,2
29	Sulawesi Barat	6	705	705	701	703	30	4,3
30	Maluku	21	11.694	11.684	11.858	11.796	414	3,5
31	Maluku Utara	1	849	847	847	847	63	7,4
32	Papua Barat	40	19.762	19.760	19.537	19.201	600	3,1
33	Papua	76	59.538	55.853	54.141	53.175	3.278	6,1
Indonesia		**1.583**	**1.111.831**	**1.098.499**	**1.095.148**	**1.091.997**	**32.711**	**3,0**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.9

JUMLAH KASUS PNEUMONIA PADA BALITA
MENURUT PROVINSI DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2014

No	Provinsi	Target Penemuan Pneumonia Balita	Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Balita							
			Pneumonia		Pneumonia Berat		Jumlah		Jumlah	%
			< 1 Tahun	1-4 Tahun	< 1 Tahun	1-4 Tahun	< 1 Tahun	1-4 Tahun		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	30.811	311	895	56	107	367	1.002	1.369	4,44
2	Sumatera Utara	135.914	13.180	13.696	237	160	13.417	13.856	27.273	20,07
3	Sumatera Barat	49.377	3.528	9.558	157	141	3.685	9.699	13.384	27,11
4	Riau	59.526	2.513	7.638	80	136	2.593	7.774	10.367	17,42
5	Jambi	31.916	1.276	4.148	32	43	1.308	4.191	5.499	17,23
6	Sumatera Selatan	77.840	5.670	11.167	301	246	5.971	11.413	17.384	22,33
7	Bengkulu	18.350	338	851	8	10	346	861	1.207	6,58
8	Lampung	79.755	2.806	6.872	78	56	2.884	6.928	9.812	12,30
9	Kep. Bangka Belitung	13.602	2.214	5.293	95	64	2.309	5.357	7.666	56,36
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	101.350	13.372	25.628	438	426	13.810	26.054	39.864	39,33
12	Jawa Barat	457.362	67.094	122.162	4.761	3.637	71.855	125.799	197.654	43,22
13	Jawa Tengah	332.801	23.841	67.373	4.063	4.188	27.904	71.561	99.465	29,89
14	DI Yogyakarta	25.219	724	2.183	53	36	777	2.219	2.996	11,88
15	Jawa Timur	301.312	31.480	70.956	1.496	2.619	32.976	73.575	106.551	35,36
16	Banten	114.356	11.218	22.407	669	559	11.887	22.966	34.853	30,48
17	Bali	41.065	1.279	3.366	22	45	1.301	3.411	4.712	11,47
18	Nusa Tenggara Barat	46.813	8.389	13.720	860	1.209	9.249	14.929	24.178	51,65
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	46.895	681	1.692	33	37	714	1.729	2.443	5,21
21	Kalimantan Tengah	26.163	180	221	3	12	183	233	416	1,59
22	Kalimantan Selatan	37.247	6.311	8.778	1.983	1.748	8.294	10.526	18.820	50,53
23	Kalimantan Timur	22.639	215	377	18	12	233	389	622	2,75
24	Sulawesi Utara	27.780	3.617	7.244	191	156	3.808	7.400	11.208	40,35
25	Sulawesi Tengah	78.951	2.158	5.518	117	130	2.275	5.648	7.923	10,04
26	Sulawesi Selatan	24.033	1.193	2.773	64	138	1.257	2.911	4.168	17,34
27	Sulawesi Tenggara	11.370	1.883	3.003	129	66	2.012	3.069	5.081	44,69
28	Gorontalo	12.352	523	1.010	17	22	540	1.032	1.572	12,73
29	Sulawesi Barat	15.269	82	127	17	17	99	144	243	1,59
30	Maluku	11.071	287	446	19	8	306	454	760	6,86
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**2.231.138**	**206.363**	**419.102**	**15.997**	**16.028**	**222.360**	**435.130**	**657.490**	**29,47**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.10

CASE FATALITY RATE PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2014

No	Provinsi	Penderita Pneumonia			Jumlah Kematian Balita Karena Pneumonia			CFR (%)		
		< 1 Tahun	1-4 Tahun	Jumlah	< 1 Tahun	1-4 Tahun	Jumlah	< 1 Tahun	1-4 Tahun	0-4 Tahun
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	367	1.002	1.369	7	5	12	1,91	0,50	0,88
2	Sumatera Utara	13.417	13.856	27.273	7	2	9	0,05	0,01	0,03
3	Sumatera Barat	3.685	9.699	13.384	8	5	13	0,22	0,05	0,10
4	Riau	2.593	7.774	10.367	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Jambi	1.308	4.191	5.499	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Sumatera Selatan	5.971	11.413	17.384	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Bengkulu	346	861	1.207	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Lampung	2.884	6.928	9.812	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Kep. Bangka Belitung	2.309	5.357	7.666	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	13.810	26.054	39.864	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Jawa Barat	71.855	125.799	197.654	17	15	32	0,02	0,01	0,02
13	Jawa Tengah	27.904	71.561	99.465	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	DI Yogyakarta	777	2.219	2.996	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Jawa Timur	32.976	73.575	106.551	13	11	24	0,04	0,01	0,02
16	Banten	11.887	22.966	34.853	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Bali	1.301	3.411	4.712	0	10	10	0,00	0,29	0,21
18	Nusa Tenggara Barat	9.249	14.929	24.178	32	5	37	0,35	0,03	0,15
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	714	1.729	2.443	2	2	4	0,28	0,12	0,16
21	Kalimantan Tengah	183	233	416	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Kalimantan Selatan	8.294	10.526	18.820	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Kalimantan Timur	233	389	622	1	0	1	0,43	0,00	0,16
24	Sulawesi Utara	3.808	7.400	11.208	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25	Sulawesi Tengah	2.275	5.648	7.923	128	165	293	5,63	2,92	3,70
26	Sulawesi Selatan	1.257	2.911	4.168	13	37	50	1,03	1,27	1,20
27	Sulawesi Tenggara	2.012	3.069	5.081	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28	Gorontalo	540	1.032	1.572	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	Sulawesi Barat	99	144	243	8	1	9	8,08	0,69	3,70
30	Maluku	306	454	760	2	0	2	0,65	0,00	0,26
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**222.360**	**435.130**	**657.490**	**238**	**258**	**496**	**0,11**	**0,06**	**0,08**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.11

PENEMUAN KASUS DIARE DITANGANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Perkiraan Diare di Fasilitas Kesehatan	Diare Ditangani	% Diare Ditangani
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	101.258	106.791	105,46
2	Sumatera Utara	-	-	-
3	Sumatera Barat	109.114	111.804	102,47
4	Riau	134.955	125.463	93
5	Jambi	73.027	64.180	87,89
6	Sumatera Selatan	174.735	169.769	97
7	Bengkulu	39.125	10.653	27,23
8	Lampung	174.175	98.446	57
9	Kep. Bangka Belitung	26.247	8.973	34,19
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	216.890	223.579	103,08
12	Jawa Barat	999.809	1.068.685	107
13	Jawa Tengah	701.488	393.829	56,14
14	DI Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	824.531	1.015.968	123,22
16	Banten	253.249	246.077	97
17	Bali	90.423	51.447	56,90
18	Nusa Tenggara Barat	100.631	189.168	188
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	49.405	32.634	66,05
22	Kalimantan Selatan	83.758	96.098	115
23	Kalimantan Timur	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	179.669	206.494	115
27	Sulawesi Selatan	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	24.278	25.430	105
29	Gorontalo	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-
34	Papua	4.356.768	4.245.488	97
Indonesia		**8.713.537**	**8.490.976**	**97,45**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015
Data per 30 Maret 2015

Lampiran 6.12

JUMLAH KASUS BARU KUSTA DAN *CASE DETECTION RATE (CDR)* PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2014

No	Provinsi	Penduduk			Klasifikasi			Jenis Kelamin			*Case Detection Rate* per 100.000 Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	PB	MB	PB + MB	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	2.365.626	2.366.079	4.731.705	146	437	583	316	267	583	13,36	11,28	12,32
2	Sumatera Utara	6.753.829	6.774.108	13.527.937	20	156	176	107	69	176	1,58	1,02	1,30
3	Sumatera Barat	2.527.260	2.571.530	5.098.790	42	117	159	107	52	159	4,23	2,02	3,12
4	Riau	3.273.675	3.084.961	6.358.636	20	100	120	92	28	120	2,81	0,91	1,89
5	Jambi	1.742.763	1.669.696	3.412.459	9	69	78	50	28	78	2,87	1,68	2,29
6	Sumatera Selatan	4.068.596	3.927.939	7.996.535	36	268	304	192	112	304	4,72	2,85	3,80
7	Bengkulu	932.755	895.536	1.828.291	2	19	21	17	4	21	1,82	0,45	1,15
8	Lampung	4.101.852	3.870.394	7.972.246	20	122	142	95	47	142	2,32	1,21	1,78
9	Kepulauan Bangka Belitung	714.779	665.983	1.380.762	7	47	54	35	19	54	4,90	2,85	3,91
10	Kepulauan Riau	1.041.183	990.712	2.031.895	11	6	17	8	9	17	0,77	0,91	0,84
11	DKI Jakarta	5.136.173	4.998.857	10.135.030	26	232	258	156	102	258	3,04	2,04	2,55
12	Jawa Barat	23.557.049	22.743.494	46.300.543	194	1.723	1.917	1.238	679	1.917	5,26	2,99	4,14
13	Jawa Tengah	16.286.404	16.493.428	32.779.832	259	1.601	1.860	1.181	679	1.860	7,25	4,12	5,67
14	DI Yogyakarta	1.774.459	1.819.831	3.594.290	0	79	79	61	18	79	3,44	0,99	2,20
15	Jawa Timur	19.021.215	19.508.266	38.529.481	507	3.609	4.116	2.453	1.663	4.116	12,90	8,52	10,68
16	Banten	6.051.954	5.782.133	11.834.087	117	706	823	532	291	823	8,79	5,03	6,95
17	Bali	2.127.969	2.097.415	4.225.384	13	68	81	68	13	81	3,20	0,62	1,92
18	Nusa Tenggara Barat	2.279.683	2.422.706	4.702.389	70	211	281	164	117	281	7,19	4,83	5,98
19	Nusa Tenggara Timur	2.516.606	2.554.140	5.070.746	72	306	378	302	76	378	12,00	2,98	7,45
20	Kalimantan Barat	2.321.739	2.224.700	4.546.439	8	35	43	35	8	43	1,51	0,36	0,95
21	Kalimantan Tengah	1.233.335	1.135.319	2.368.654	11	51	62	59	3	62	4,78	0,26	2,62
22	Kalimantan Selatan	1.979.604	1.934.304	3.913.908	17	139	156	130	26	156	6,57	1,34	3,99
23	Kalimantan Timur	2.165.984	1.949.757	4.115.741	9	145	154	103	51	154	4,76	2,62	3,74
24	Sulawesi Utara	1.215.227	1.167.714	2.382.941	35	314	349	233	116	349	19,17	9,93	14,65
25	Sulawesi Tengah	1.453.503	1.385.787	2.839.290	51	218	269	180	89	269	12,38	6,42	9,47
26	Sulawesi Selatan	4.098.674	4.297.073	8.395.747	153	990	1.143	691	452	1.143	16,86	10,52	13,61
27	Sulawesi Tenggara	1.212.907	1.205.055	2.417.962	35	233	268	160	108	268	13,19	8,96	11,08
28	Gorontalo	567.181	567.317	1.134.498	19	133	152	107	45	152	18,87	7,93	13,40
29	Sulawesi Barat	642.684	641.936	1.284.620	62	137	199	122	77	199	18,98	11,99	15,49
30	Maluku	861.747	846.443	1.708.190	133	412	545	336	209	545	38,99	24,69	31,91
31	Maluku Utara	582.295	559.266	1.141.561	104	440	544	313	231	544	53,75	41,30	47,65
32	Papua Barat	462.254	415.183	877.437	285	348	633	374	259	633	80,91	62,38	72,14
33	Papua	1.850.900	1.635.532	3.486.432	319	742	1.061	638	423	1.061	34,47	25,86	30,43
Indonesia		**126.921.864**	**125.202.594**	**252.124.458**	**2.812**	**14.213**	**17.025**	**10.655**	**6.370**	**17.025**	**8,39**	**5,09**	**6,75**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.13

PROPORSI KECACATAN KUSTA DAN KASUS KUSTA PADA ANAK 0-14 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Penderita Baru	Cacat Tingkat 1		Cacat Tingkat 2		0 - 14 Tahun	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	583	15	2,57	68	11,66	75	12,86
2	Sumatera Utara	176	24	13,64	20	11,36	20	11,36
3	Sumatera Barat	159	5	3,14	18	11,32	17	10,69
4	Riau	120	3	2,50	8	6,67	4	3,33
5	Jambi	78	16	20,51	11	14,10	6	7,69
6	Sumatera Selatan	304	39	12,83	29	9,54	11	3,62
7	Bengkulu	21	2	9,52	4	19,05	1	4,76
8	Lampung	142	29	20,42	11	7,75	6	4,23
9	Kepulauan Bangka Belitung	54	0	0,00	2	3,70	7	12,96
10	Kepulauan Riau	17	4	23,53	0	0,00	4	23,53
11	DKI Jakarta	258	18	6,98	10	3,88	30	11,63
12	Jawa Barat	1.917	333	17,37	225	11,74	137	7,15
13	Jawa Tengah	1.860	233	12,53	240	12,90	109	5,86
14	DI Yogyakarta	79	8	10,13	0	0,00	0	0,00
15	Jawa Timur	4.116	554	13,46	528	12,83	387	9,40
16	Banten	823	110	13,37	87	10,57	111	13,49
17	Bali	81	1	1,23	0	0,00	5	6,17
18	Nusa Tenggara Barat	281	15	5,34	14	4,98	37	13,17
19	Nusa Tenggara Timur	378	22	5,82	32	8,47	43	11,38
20	Kalimantan Barat	43	2	4,65	7	16,28	2	4,65
21	Kalimantan Tengah	62	4	6,45	3	4,84	10	16,13
22	Kalimantan Selatan	156	3	1,92	26	16,67	3	1,92
23	Kalimantan Timur	154	4	2,60	5	3,25	9	5,84
24	Sulawesi Utara	349	9	2,58	12	3,44	40	11,46
25	Sulawesi Tengah	269	34	12,64	22	8,18	30	11,15
26	Sulawesi Selatan	1.143	226	19,77	113	9,89	82	7,17
27	Sulawesi Tenggara	268	6	2,24	3	1,12	34	12,69
28	Gorontalo	152	7	4,61	10	6,58	7	4,61
29	Sulawesi Barat	199	23	11,56	9	4,52	17	8,54
30	Maluku	545	79	14,50	16	2,94	73	13,39
31	Maluku Utara	544	15	2,76	31	5,70	104	19,12
32	Papua Barat	633	10	1,58	6	0,95	212	33,49
33	Papua	1.061	44	4,15	26	2,45	261	24,60
Indonesia		**17.025**	**1.897**	**11,14**	**1.596**	**9,37**	**1.894**	**11,12**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.14

JUMLAH KASUS KUSTA YANG TERCATAT DAN ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	PB		MB		PB + MB	Angka Prevalensi per 10.000 penduduk	0-14 Tahun	
			Jumlah	%	Jumlah	%			Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	4.731.705	110	16,3	565	83,7	675	1,43	106	15,7
2	Sumatera Utara	13.527.937	13	6,9	175	93,1	188	0,14	25	13,3
3	Sumatera Barat	5.098.790	36	22,8	122	77,2	158	0,31	17	10,8
4	Riau	6.358.636	34	20,1	135	79,9	169	0,27	14	8,3
5	Jambi	3.412.459	31	18,8	134	81,2	165	0,48	12	7,3
6	Sumatera Selatan	7.996.535	88	15,3	487	84,7	575	0,72	19	3,3
7	Bengkulu	1.828.291	0	0,0	25	100,0	25	0,14	1	4,0
8	Lampung	7.972.246	33	12,3	236	87,7	269	0,34	22	8,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.380.762	5	9,4	48	90,6	53	0,38	7	13,2
10	Kepulauan Riau	2.031.895	11	21,6	40	78,4	51	0,25	6	11,8
11	DKI Jakarta	10.135.030	35	5,3	623	94,7	658	0,65	70	10,6
12	Jawa Barat	46.300.543	154	6,9	2.068	93,1	2.222	0,48	207	9,3
13	Jawa Tengah	32.779.832	138	7,5	1.691	92,5	1.829	0,56	95	5,2
14	DI Yogyakarta	3.594.290	4	5,8	65	94,2	69	0,19	0	0,0
15	Jawa Timur	38.529.481	287	7,0	3.832	93,0	4.119	1,07	370	9,0
16	Banten	11.834.087	63	7,1	819	92,9	882	0,75	135	15,3
17	Bali	4.225.384	14	15,7	75	84,3	89	0,21	7	7,9
18	Nusa Tenggara Barat	4.702.389	47	16,1	245	83,9	292	0,62	33	11,3
19	Nusa Tenggara Timur	5.070.746	91	14,7	527	85,3	618	1,22	60	9,7
20	Kalimantan Barat	4.546.439	10	18,5	44	81,5	54	0,12	4	7,4
21	Kalimantan Tengah	2.368.654	14	11,9	104	88,1	118	0,50	13	11,0
22	Kalimantan Selatan	3.913.908	12	4,9	235	95,1	247	0,63	2	0,8
23	Kalimantan Timur	4.115.741	8	4,3	179	95,7	187	0,45	10	5,3
24	Sulawesi Utara	2.382.941	21	5,3	379	94,8	400	1,68	34	8,5
25	Sulawesi Tengah	2.839.290	32	11,7	241	88,3	273	0,96	35	12,8
26	Sulawesi Selatan	8.395.747	82	7,2	1.057	92,8	1.139	1,36	75	6,6
27	Sulawesi Tenggara	2.417.962	30	9,7	280	90,3	310	1,28	42	13,5
28	Gorontalo	1.134.498	17	8,2	190	91,8	207	1,82	14	6,8
29	Sulawesi Barat	1.284.620	61	24,5	188	75,5	249	1,94	27	10,8
30	Maluku	1.708.190	105	17,4	497	82,6	602	3,52	119	19,8
31	Maluku Utara	1.141.561	60	10,1	534	89,9	594	5,20	104	17,5
32	Papua Barat	877.437	238	33,9	464	66,1	702	8,00	197	28,1
33	Papua	3.486.432	372	21,1	1.389	78,9	1.761	5,05	411	23,3
Indonesia		**252.124.458**	**2.256**	**11,3**	**17.693**	**88,7**	**19.949**	**0,79**	**2.293**	**11,5**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.15

JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Total	Meninggal	*Case Fatality Rate (%)*	Faktor Risiko																							
					Pemeriksaan Kehamilan					Status Imunisasi				Penolong Persalinan				Perawatan Tali Pusat				Pemotongan Tali Pusat				Dirawat di RS		
					Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tanpa pemeriksaan	Tidak Diketahui	TT2+	TT1	Tidak Diimunisasi	Tidak Diketahui	Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tidak Diketahui	Alkohol/Iodium	Tradisional	Lain-lain	Tidak Diketahui	Gunting	Bambu	Lain-lain	Tidak Diketahui	Ya	Tidak	Tidak Diketahui
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*	*(27)*	*(28)*	*(29)*
1	Aceh	7	6	85,7	1	6	0	0	0	1	0	6	0	0	6	1	0	1	2	4	0	2	5	0	0	2	5	0
2	Sumatera Utara	1	1	100,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3	Sumatera Barat	1	0	0,0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
4	Riau	5	1	20,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	3	3	100,0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	1	2	0	2	1	0	0	0	3	0	3	0	0
6	Sumatera Selatan	2	1	50,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0
7	Bengkulu	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	3	3	100,0	0	2	1	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	2	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	2	1	50,0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
12	Jawa Barat	2	2	100,0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	17	7	41,2	1	15	0	1	0	2	3	12	0	1	5	10	1	5	0	12	0	14	2	1	0	17	0	0
16	Banten	22	19	86,4	0	16	3	3	0	6	2	14	0	0	7	15	0	4	17	1	0	17	1	4	0	20	2	0
17	Bali	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	9	1	11,1	0	5	0	4	0	0	2	7	0	0	0	8	1	0	4	5	0	2	6	1	0	6	3	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Sulawesi Utara	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Selatan	6	6	100,0	0	3	1	2	0	1	0	4	1	0	2	4	0	0	3	1	2	3	0	3	0	6	0	0
27	Sulawesi Tenggara	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	3	2	66,7	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	2	1	0	1	1	1	1	0
30	Maluku	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	1	1	100,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
32	Papua Barat	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**84**	**54**	**64,3**	**2**	**49**	**7**	**16**	**2**	**10**	**9**	**54**	**5**	**1**	**22**	**50**	**6**	**15**	**32**	**26**	**7**	**46**	**16**	**16**	**1**	**64**	**14**	**0**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

data per 31 Maret 2015

Lampiran 6.16

JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN *INCIDENCE RATE (IR)* CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus	Incidens Rate (per 100.000 Penduduk)	Meninggal
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	4.731.705	1.749	37	0
2	Sumatera Utara	13.527.937	150	1	0
3	Sumatera Barat	5.098.790	417	8	0
4	Riau	6.358.636	297	5	3
5	Jambi	3.412.459	579	17	1
6	Sumatera Selatan	7.996.535	589	7	1
7	Bengkulu	1.828.291	133	7	0
8	Lampung	7.972.246	236	3	0
9	Kep. Bangka Belitung	1.380.762	47	3	0
10	Kepulauan Riau	2.031.895	405	20	2
11	DKI Jakarta	10.135.030	1.361	13	0
12	Jawa Barat	46.300.543	95	0	0
13	Jawa Tengah	32.779.832	199	1	0
14	DI Yogyakarta	3.594.290	1.222	34	0
15	Jawa Timur	38.529.481	1.071	3	0
16	Banten	11.834.087	1.149	10	0
17	Bali	4.225.384	382	9	0
18	Nusa Tenggara Barat	4.702.389	16	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	5.070.746	58	1	0
20	Kalimantan Barat	4.546.439	933	21	0
21	Kalimantan Tengah	2.368.654	53	2	0
22	Kalimantan Selatan	3.913.908	121	3	0
23	Kalimantan Timur	4.115.741	283	7	1
24	Sulawesi Utara	2.382.941	112	5	0
25	Sulawesi Tengah	2.839.290	168	6	0
26	Sulawesi Selatan	8.395.747	829	10	0
27	Sulawesi Tenggara	2.417.962	40	2	0
28	Gorontalo	1.134.498	15	1	0
29	Sulawesi Barat	1.284.620	73	6	0
30	Maluku	1.708.190	32	2	0
31	Maluku Utara	1.141.561	129	11	0
32	Papua Barat	877.437	-	-	-
33	Papua	3.486.432	-	-	-
Indonesia		**252.124.458**	**12.943**	**5**	**8**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Data per 31 Maret 2015

Lampiran 6.17

JUMLAH KASUS CAMPAK DAN KASUS CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)										Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		≥ 15 Tahun				
		Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	141	28	408	162	538	242	263	107	399	115	1.749	654	37,39
2	Sumatera Utara	2	2	59	21	65	37	15	13	9	5	150	78	52,00
3	Sumatera Barat	44	8	142	55	112	60	64	38	55	12	417	173	41,49
4	Riau	24	6	75	47	90	46	43	20	65	23	297	142	47,81
5	Jambi	47	16	135	78	178	106	84	53	135	33	579	286	49,40
6	Sumatera Selatan	49	28	250	200	160	129	69	57	61	46	589	460	78,10
7	Bengkulu	7	2	28	24	36	28	22	19	40	39	133	112	84,21
8	Lampung	16	6	48	24	62	37	36	17	74	18	236	102	43,22
9	Kep. Bangka Belitung	7	1	12	2	14	10	3	2	11	4	47	19	40,43
10	Kepulauan Riau	51	17	138	80	133	85	44	36	39	14	405	232	57,28
11	DKI Jakarta	178	22	408	189	415	203	153	77	207	50	1.361	541	39,75
12	Jawa Barat	10	5	19	15	25	24	17	14	24	10	95	68	71,58
13	Jawa Tengah	8	3	36	17	52	20	41	26	62	16	199	82	41,21
14	DI Yogyakarta	35	13	260	157	349	214	132	68	446	206	1.222	658	53,85
15	Jawa Timur	87	28	334	130	341	118	131	44	178	35	1.071	355	33,15
16	Banten	163	13	411	147	334	107	129	43	112	24	1.149	334	29,07
17	Bali	20	5	106	74	130	79	51	34	75	21	382	213	55,76
18	Nusa Tenggara Barat	1	1	3	2	6	6	1	1	5	4	16	14	87,50
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	10	9	27	22	21	19	0	0	58	50	86,21
20	Kalimantan Barat	82	2	214	1	239	8	146	8	252	3	933	22	2,36
21	Kalimantan Tengah	2	0	17	0	14	0	8	0	12	0	53	0	0,00
22	Kalimantan Selatan	2	0	30	16	39	18	21	7	29	11	121	52	42,98
23	Kalimantan Timur	13	5	67	34	91	59	37	26	75	22	283	146	51,59
24	Sulawesi Utara	14	3	31	20	37	27	22	14	8	3	112	67	59,82
25	Sulawesi Tengah	9	2	7	5	53	47	36	17	63	2	168	73	43,45
26	Sulawesi Selatan	67	18	225	152	253	191	122	84	162	74	829	519	62,61
27	Sulawesi Tenggara	4	0	10	5	9	3	8	4	9	6	40	18	45,00
28	Gorontalo	1	0	4	2	0	1	3	3	7	0	15	6	40,00
29	Sulawesi Barat	3	1	23	6	38	7	9	2	0	0	73	16	21,92
30	Maluku	4	2	18	5	4	1	4	1	2	1	32	10	31,25
31	Maluku Utara	26	1	47	22	41	5	8	0	7	1	129	29	22,48
32	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
33	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Indonesia		**1.117**	**238**	**3.575**	**1.701**	**3.885**	**1.940**	**1.743**	**854**	**2.623**	**798**	**12.943**	**5.531**	**42,73**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015
Data per 31 Maret 2015

Lampiran 6.18

FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Laporan KLB					
		Total KLB	Frekuensi KLB dengan Spesimen > 5	Frekuensi KLB dengan Investigasi Penuh	Frekuensi KLB dengan Laporan ke Pusat	Total Kasus	Meninggal
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	3	3	3	0	29	0
2	Sumatera Utara	10	8	8	0	91	0
3	Sumatera Barat	5	5	4	0	49	0
4	Riau	1	0	0	0	0	0
5	Jambi	14	7	7	0	254	0
6	Sumatera Selatan	14	11	11	0	215	3
7	Bengkulu	4	4	4	0	81	0
8	Lampung	6	6	6	1	62	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	2	1	1	0	18	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	41	25	25	0	187	18
16	Banten	18	10	7	0	154	0
17	Bali	10	5	5	0	122	0
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	0	0	5	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	3	3	0	0	66	0
22	Kalimantan Selatan	11	10	8	0	237	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	2	2	0	34	0
26	Sulawesi Tengah	4	4	4	0	27	0
27	Sulawesi Selatan	3	2	2	1	47	0
28	Sulawesi Tenggara	6	4	3	0	58	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	3	3	2	0	42	0
31	Maluku	12	5	5	0	326	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**173**	**118**	**107**	**2**	**2.104**	**21**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Data per 31 Januari 2015

Lampiran 6.19

KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Konfirmasi Laboratorium											Tanpa Spesimen	
		Total Darah (Serum) Sampel	Campak		Rubella		Gabungan (Campak dan Rubella)		Negatif		Pending Lab.			
			Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	18	2	16	0	0	0	0	0	0	1	13	0	0
2	Sumatera Utara	60	7	67	1	19	0	0	2	5	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	26	0	0	0	0	0	0	0	0	5	49	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	Jambi	43	4	65	1	5	0	0	0	0	9	184	0	0
6	Sumatera Selatan	79	2	16	1	9	0	0	0	0	11	190	0	0
7	Bengkulu	21	4	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	40	6	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	7	1	12	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	176	28	145	1	5	2	8	3	24	7	5	0	0
16	Banten	84	8	58	1	5	1	5	1	12	7	74	0	0
17	Bali	31	2	45	1	7	0	0	0	0	7	70	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	53	1	21	0	0	0	0	0	0	10	216	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	17	1	14	0	0	0	0	0	0	1	20	0	0
26	Sulawesi Tengah	28	3	22	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	14	1	8	1	19	0	0	0	0	1	20	0	0
28	Sulawesi Tenggara	29	2	16	0	0	0	0	0	0	4	42	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	34	3	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	39	2	47	0	0	0	0	0	0	10	279	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**820**	**77**	**737**	**7**	**69**	**3**	**13**	**7**	**46**	**76**	**1.173**	**0**	**0**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Data per 30 April 2015

Lampiran 6.20

JUMLAH KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)										Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi Terhadap Total Kasus	Total Meninggal	*Case Fatality Rate* (%)
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		≥ 15 Tahun						
		Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0,00	1	20,00
2	Sumatera Utara	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	4	2	50,00	1	25,00
3	Sumatera Barat	0	0	5	5	3	2	1	1	0	0	9	8	88,89	0	0,00
4	Riau	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0,00
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
6	Sumatera Selatan	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	3	1	33,33	1	33,33
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	-
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,00	0	0,00
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0,00	0	0,00
12	Jawa Barat	0	0	2	2	6	6	2	1	6	3	16	12	75,00	1	6,25
13	Jawa Tengah	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	50,00	0	0,00
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
15	Jawa Timur	5	4	77	70	89	77	35	25	89	25	295	201	68,14	3	1,02
16	Banten	0	0	3	1	6	0	6	3	2	0	17	4	23,53	5	29,41
17	Bali	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
20	Kalimantan Barat	1	0	5	1	11	4	1	0	3	1	21	6	28,57	1	4,76
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00	1	100
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	1	33,33	0	0,00
23	Kalimantan Timur	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	100	0	0,00
24	Sulawesi Utara	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	2	66,67	0	0,00
25	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	50,00	0	0,00
26	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	3	3	2	2	0	0	5	5	100	0	0,00
27	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
28	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
29	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
30	Maluku	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00	1	100
31	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
32	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
33	Papua	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0	0,00
Indonesia		**6**	**4**	**104**	**86**	**131**	**97**	**50**	**33**	**105**	**29**	**396**	**249**	**62,88**	**16**	**4,04**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015
Data per 30 April 2015

Lampiran 6.21

***NON POLIO AFP RATE* PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2014**

No	Provinsi	Jumlah Kasus *Non Polio AFP*	*Non Polio AFP Rate* per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	Spesimen adekuat (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	49	3,16	85,7
2	Sumatera Utara	102	2,27	95,0
3	Sumatera Barat	37	2,24	94,5
4	Riau	43	2,00	67,4
5	Jambi	27	2,57	81,4
6	Sumatera Selatan	35	1,43	94,2
7	Bengkulu	17	2,83	94,1
8	Lampung	54	2,30	88,8
9	Kep. Bangka Belitung	17	3,78	62,5
10	Kepulauan Riau	13	2,17	84,6
11	DKI Jakarta	48	1,96	56,2
12	Jawa Barat	324	2,39	90,4
13	Jawa Tengah	198	2,30	98,4
14	DI Yogyakarta	26	3,25	92,3
15	Jawa Timur	255	2,70	84,3
16	Banten	75	2,11	93,3
17	Bali	41	3,73	68,2
18	Nusa Tenggara Barat	39	2,60	94,8
19	Nusa Tenggara Timur	70	3,68	90,7
20	Kalimantan Barat	37	1,90	80,0
21	Kalimantan Tengah	14	1,87	85,7
22	Kalimantan Selatan	29	2,52	63,3
23	Kalimantan Timur	15	1,30	80,0
24	Kalimantan Utara	2	0,67	66,6
25	Sulawesi Utara	26	3,71	84,6
26	Sulawesi Tengah	32	3,37	75,0
27	Sulawesi Selatan	53	2,04	86,7
28	Sulawesi Tenggara	22	2,59	72,7
29	Gorontalo	18	4,50	88,8
30	Sulawesi Barat	6	1,20	83,3
31	Maluku	13	2,00	69,2
32	Maluku Utara	8	1,78	75,0
33	Papua Barat	2	0,67	50,0
34	Papua	15	1,20	60,0
Indonesia		**1.762**	**2,38**	**86,4**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

data per 23 April 2015

Lampiran 6.22

JUMLAH KASUS DAN ANGKA KESAKITAN MALARIA PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Populasi Berisiko	Suspek	Sediaan Darah Diperiksa			Positif	Persentase persediaan darah positif	*Annual Parasite Incidence (API)* per 1.000 penduduk
				Pemeriksaan Mikroskopik	*Rapid Diagnostic Test*	Total			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Aceh	4.731.705	42.352	39.229	2.870	42.099	778	1,85	0,16
2	Sumatera Utara	13.527.937	88.205	39.093	38.212	77.305	9.357	12,10	0,69
3	Sumatera Barat	5.098.790	4.182	3.855	234	4.089	908	22,21	0,18
4	Riau	6.358.636	13.441	9.338	3.002	12.340	845	6,85	0,13
5	Jambi	3.412.459	32.484	24.052	5.899	29.951	2.855	9,53	0,84
6	Sumatera Selatan	7.996.535	36.529	22.418	4.064	26.482	2.371	8,95	0,30
7	Bengkulu	1.828.291	34.636	23.761	6.731	30.492	3.971	13,02	2,17
8	Lampung	7.972.246	24.468	17.265	6.675	23.940	4.389	18,33	0,55
9	Kep. Bangka Belitung	1.380.762	67.650	57.134	10.440	67.574	1.192	1,76	0,86
10	Kepulauan Riau	2.031.895	4.753	3.702	1.032	4.734	836	17,66	0,41
11	DKI Jakarta	10.135.030	32	32	0	32	32	-	0,00
12	Jawa Barat	46.300.543	17.125	18.847	16	18.863	282	1,49	0,01
13	Jawa Tengah	32.779.832	44.798	44.476	7	44.483	1.629	3,66	0,05
14	DI Yogyakarta	3.594.290	86	86	0	86	86	100,00	0,02
15	Jawa Timur	38.529.481	21.589	21.344	84	21.428	315	1,47	0,01
16	Banten	11.834.087	1.405	858	612	1.470	46	3,13	0,00
17	Bali	4.225.384	4.780	4.780	0	4.780	10	0,21	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	4.702.389	94.530	91.067	2.991	94.058	3.662	3,89	0,78
19	Nusa Tenggara Timur	5.070.746	296.845	295.467	16.510	311.977	64.953	20,82	12,81
20	Kalimantan Barat	4.546.439	29.295	21.132	16.303	37.435	753	2,01	0,17
21	Kalimantan Tengah	2.368.654	24.167	11.028	13.099	24.127	3.130	12,97	1,32
22	Kalimantan Selatan	3.913.908	15.898	10.354	5.544	15.898	5.303	33,36	1,35
23	Kalimantan Timur	3.508.012	9.177	5.774	5.337	11.111	1.115	10,04	0,32
24	Kalimantan Utara	607.729	4.303	4.088	1.238	5.326	57	1,07	0,09
25	Sulawesi Utara	2.382.941	18.846	16.768	6.886	23.654	2.244	9,49	0,94
26	Sulawesi Tengah	2.839.290	41.785	21.395	16.695	38.090	2.282	5,99	0,80
27	Sulawesi Selatan	8.395.747	22.641	18.499	4.077	22.576	800	3,54	0,10
28	Sulawesi Tenggara	2.417.962	16.666	8.890	7.769	16.659	1.124	6,75	0,46
29	Gorontalo	1.134.498	14.121	7.648	6.541	14.189	949	6,69	0,84
30	Sulawesi Barat	1.284.620	26.252	19.656	12.819	32.475	325	1,00	0,25
31	Maluku	1.708.190	54.212	44.396	6.572	50.968	10.249	20,11	6,00
32	Maluku Utara	1.141.561	25.986	19.603	4.850	24.453	3.790	15,50	3,32
33	Papua Barat	877.437	82.487	70.847	8.547	79.394	18.294	23,04	20,85
34	Papua	3.486.432	360.181	303.953	33.805	337.758	103.095	30,52	29,57
Indonesia		**252.124.458**	**1.575.907**	**1.300.835**	**249.461**	**1.550.296**	**252.027**	**16,26**	**0,99**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.23

ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2011-2014

No	Provinsi	API			
		2011	2012	2013	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	0,76	0,44	0,44	0,16
2	Sumatera Utara	0,85	0,84	1,30	0,69
3	Sumatera Barat	0,09	0,25	0,26	0,18
4	Riau	0,15	0,20	0,23	0,13
5	Jambi	1,08	1,29	1,11	0,84
6	Sumatera Selatan	0,22	0,20	0,39	0,30
7	Bengkulu	3,89	5,32	3,89	2,17
8	Lampung	0,49	0,18	0,34	0,55
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,66	2,66	1,28	0,86
10	Kepulauan Riau	1,91	2,47	0,49	0,41
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Jawa Barat	0,01	0,01	0,00	0,01
13	Jawa Tengah	0,01	0,03	0,04	0,05
14	DI Yogyakarta	0,00	0,06	0,02	0,02
15	Jawa Timur	0,00	0,02	0,00	0,01
16	Banten	0,01	0,02	0,01	0,00
17	Bali	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	0,93	0,82	0,57	0,78
19	Nusa Tenggara Timur	22,09	19,41	16,37	12,81
20	Kalimantan Barat	2,21	0,85	0,23	0,17
21	Kalimantan Tengah	3,74	3,48	2,00	1,32
22	Kalimantan Selatan	2,31	2,06	1,43	1,35
23	Kalimantan Timur	1,46	1,15	0,47	0,32
24	Kalimantan Utara	-	-	-	0,09
25	Sulawesi Utara	3,21	2,35	1,11	0,94
26	Sulawesi Tengah	3,35	2,49	1,13	0,80
27	Sulawesi Selatan	0,38	0,19	0,25	0,10
28	Sulawesi Tenggara	1,48	0,79	0,62	0,46
29	Gorontalo	2,14	1,64	1,08	0,84
30	Sulawesi Barat	2,22	1,23	0,40	0,25
31	Maluku	8,34	7,42	8,25	6,00
32	Maluku Utara	4,57	5,08	4,51	3,32
33	Papua Barat	73,21	52,27	38,44	20,85
34	Papua	52,80	60,56	42,65	29,57
Indonesia		**1,75**	**1,69**	**1,38**	**1,00**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.24

JUMLAH PENDERITA, *INCIDENCE RATE* PER 100.000 PENDUDUK, KASUS MENINGGAL, DAN *CASE FATALITY RATE* (%)
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD/DHF)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Demam Berdarah Dengue			
			Jumlah Kasus	*Incidence Rate* per 100.000 Penduduk	Jumlah Kasus Meninggal	*Case Fatality Rate* (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6.)*	*(7)*
1	Aceh	4.731.705	2.208	46,66	7	0,32
2	Sumatera Utara	13.527.937	5.378	39,75	30	0,56
3	Sumatera Barat	5.098.790	2.328	45,66	10	0,43
4	Riau	6.358.636	2.342	36,83	31	1,32
5	Jambi	3.412.459	1.308	38,33	16	1,22
6	Sumatera Selatan	7.996.535	1.500	18,76	3	0,20
7	Bengkulu	1.828.291	464	25,38	13	2,80
8	Lampung	7.972.246	1.317	16,52	16	1,21
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.380.762	321	23,25	11	3,43
10	Kepulauan Riau	2.031.895	1.882	92,62	13	0,69
11	DKI Jakarta	10.135.030	8.447	83,34	9	0,11
12	Jawa Barat	46.300.543	18.116	39,13	178	0,98
13	Jawa Tengah	32.779.832	11.075	33,79	159	1,44
14	DI Yogyakarta	3.594.290	1.955	54,39	11	0,56
15	Jawa Timur	38.529.481	9.273	24,07	107	1,15
16	Banten	11.834.087	3.002	25,37	37	1,23
17	Bali	4.225.384	8.629	204,22	17	0,20
18	Nusa Tenggara Barat	4.702.389	824	17,52	1	0,12
19	Nusa Tenggara Timur	5.070.746	167	3,29	0	0,00
20	Kalimantan Barat	4.546.439	5.049	111,05	68	1,35
21	Kalimantan Tengah	2.368.654	880	37,15	12	1,36
22	Kalimantan Selatan	3.913.908	828	21,16	17	2,05
23	Kalimantan Timur	3.508.012	4.752	135,46	55	1,16
24	Kalimantan Utara	607.729	781	128,51	4	0,51
25	Sulawesi Utara	2.382.941	1.271	53,34	23	1,81
26	Sulawesi Tengah	2.839.290	1.302	45,86	9	0,69
27	Sulawesi Selatan	8.395.747	2.904	34,59	24	0,83
28	Sulawesi Tenggara	2.417.962	838	34,66	8	0,95
29	Gorontalo	1.134.498	223	19,66	14	6,28
30	Sulawesi Barat	1.284.620	315	24,52	0	0,00
31	Maluku	1.708.190	12	0,70	2	16,67
32	Maluku Utara	1.141.561	148	12,96	2	1,35
33	Papua Barat	877.437	77	8,78	0	0,00
34	Papua	3.486.432	431	12,36	0	0,00
Indonesia		**252.124.458**	**100.347**	**39,80**	**907**	**0,90**

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.25

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 - 2014

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota		Kabupaten/kota terjangkit					
		2012/2013	2014	2012		2013		2014	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	23	23	22	95,65	20	86,96	21	91,30
2	Sumatera Utara	33	33	25	75,76	26	78,79	30	90,91
3	Sumatera Barat	19	19	18	94,74	17	89,47	18	94,74
4	Riau	12	12	12	100	12	100,00	12	100,00
5	Jambi	11	11	9	81,82	11	100,00	10	90,91
6	Sumatera Selatan	15	17	14	93,33	13	86,67	16	94,12
7	Bengkulu	10	10	10	100	10	100	10	100
8	Lampung	14	15	11	78,57	14	100	15	100
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	100	7	100	7	100
10	Kepulauan Riau	7	7	5	71,43	4	57,14	5	71,43
11	DKI Jakarta	6	6	6	100	6	100	5	83,33
12	Jawa Barat	26	27	26	100	26	100	27	100
13	Jawa Tengah	35	35	35	100	35	100	35	100
14	DI Yogyakarta	5	5	5	100	5	100	5	100
15	Jawa Timur	38	38	38	100	38	100	38	100
16	Banten	8	8	8	100	8	100	8	100
17	Bali	9	9	9	100	9	100	9	100
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	9	90,00	9	90,00	10	100
19	Nusa Tenggara Timur	21	22	11	52,38	7	33,33	6	27,27
20	Kalimantan Barat	14	14	14	100	12	85,71	14	100
21	Kalimantan Tengah	14	14	13	92,86	12	85,71	14	100
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	100	13	100	13	100
23	Kalimantan Timur	14	10	14	100	14	100	10	100
24	Kalimantan Utara		5					5	100
25	Sulawesi Utara	15	15	12	80,00	14	93,33	14	93,33
26	Sulawesi Tengah	11	13	11	100	11	100	13	100
27	Sulawesi Selatan	24	24	23	95,83	22	91,67	22	91,67
28	Sulawesi Tenggara	12	14	7	58,33	8	66,67	9	64,29
29	Gorontalo	6	6	6	100	6	100	6	100
30	Sulawesi Barat	5	6	4	80,00	5	100	6	100
31	Maluku	11	11	6	54,55	4	36,36	4	36,36
32	Maluku Utara	9	10	5	55,56	7	77,78	6	60,00
33	Papua Barat	11	13	3	27,27	6	54,55	3	23,08
34	Papua	29	29	6	20,69	1	3,45	7	24,14
Indonesia		**497**	**511**	**417**	**83,90**	**412**	**82,90**	**433**	**84,74**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.26

SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2012-2014

No	Provinsi	2012			2013			2014		
		GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	138	103	0	524	323	1	607	375	1
2	Sumatera Utara	4.563	3.816	18	3.468	2.721	5	1.592	1.286	4
3	Sumatera Barat	2.606	1.975	14	3.037	2.274	8	3.262	2.435	8
4	Riau	1.500	1.252	0	5.106	4.359	12	848	716	3
5	Jambi	674	516	0	778	638	0	104	94	0
6	Sumatera Selatan	982	681	1	772	234	0	114	62	0
7	Bengkulu	775	607	3	926	736	3	804	559	5
8	Lampung	450	413	1	1.102	945	0	626	461	3
9	Kep. Bangka Belitung*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	530	192	1	396	317	0	112	58	0
13	Jawa Tengah*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	14	9	0	48	18	0	23	8	0
17	Bali	55.836	52.250	8	37.066	30.359	1	21.161	18.164	1
18	Nusa Tenggara Barat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	5.564	5.176	7	5.067	4.172	6	5.340	4.582	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	111	48	13
21	Kalimantan Tengah	1.265	825	5	778	581	0	991	862	5
22	Kalimantan Selatan	119	0	0	241	201	0	175	165	1
23	Kalimantan Timur	92	74	0	141	111	2	0	0	0
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	38	15	0
25	Sulawesi Utara	3.527	1.706	35	2.795	1.331	30	3.601	1.701	22
26	Sulawesi Tengah	1.197	960	4	1.239	1.066	8	890	675	2
27	Sulawesi Selatan	1.201	841	9	2.022	997	6	775	444	0
28	Sulawesi Tenggara	413	389	3	614	541	12	632	571	3
29	Gorontalo	458	292	6	507	350	8	471	346	4
30	Sulawesi Barat	603	601	0	678	215	1	331	147	0
31	Maluku	198	152	3	1.528	1.275	11	80	57	0
32	Maluku Utara	2.045	1.501	19	303	295	5	270	264	6
33	Papua Barat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**84.750**	**74.331**	**137**	**69.136**	**54.059**	**119**	**42.958**	**34.095**	**81**
Persentase VAR/GHPR		**87,7%**			**78,2%**			**79,4%**		

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Ket : GHPR = Gigitan Hewan Penular Rabies (belum confirmed lab), VAR = Kasus digigit yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati

* daerah bebas rabies

Lampiran 6.27

JUMLAH PENDERITA FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2010-2014

No	Provinsi	Jumlah Kasus Klinis Filariasis		
		2012	2013	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	2.359	2.359	2.375
2	Sumatera Utara	186	186	141
3	Sumatera Barat	193	193	274
4	Riau	310	310	532
5	Jambi	300	300	257
6	Sumatera Selatan	185	185	232
7	Bengkulu	85	85	94
8	Lampung	74	74	74
9	Kepulauan Bangka Belitung	207	105	207
10	Kepulauan Riau	39	39	31
11	DKI Jakarta	53	53	53
12	Jawa Barat	480	877	811
13	Jawa Tengah	412	412	419
14	DI Yogyakarta	37	37	37
15	Jawa Timur	238	238	325
16	Banten	81	81	91
17	Bali	18	18	18
18	Nusa Tenggara Barat	71	71	14
19	Nusa Tenggara Timur	1.730	2.203	3.175
20	Kalimantan Barat	269	269	253
21	Kalimantan Tengah	238	238	227
22	Kalimantan Selatan	422	422	365
23	Kalimantan Timur	409	409	524
24	Kalimantan Utara	-	-	13
25	Sulawesi Utara	30	30	30
26	Sulawesi Tengah	474	517	649
27	Sulawesi Selatan	133	133	129
28	Sulawesi Tenggara	119	119	213
29	Gorontalo	224	224	227
30	Sulawesi Barat	96	96	96
31	Maluku	70	70	70
32	Maluku Utara	27	27	27
33	Papua Barat	988	988	1.765
34	Papua	1.346	1.346	1.184
Indonesia		**11.903**	**12.714**	**14.932**

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 6.28

JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN *CASE FATALITY RATE (CFR)* LEPTOSPIROSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 - 2014

No	Provinsi	2012			2013			2014		
		K	M	CFR	K	M	CFR	K	M	CFR
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	DKI Jakarta	10	0	0	66	7	10,61	106	18	16,98
2	Jawa Barat	0	-	-	1	0	0	0	-	-
3	Jawa Tengah	129	20	15,50	156	17	10,90	198	32	16,16
4	DI Yogyakarta	72	7	9,72	163	8	4,91	154	9	5,84
5	Jawa Timur	28	2	7,14	244	25	10,25	61	2	3,28
6	Banten	0	-	-	10	3	-	0	-	-
Indonesia		**239**	**29**	**12,13**	**640**	**60**	**9,38**	**519**	**61**	**11,75**

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Ket. : K= Kasus, M= Meninggal, *CFR=Case Fatality Rate*

SITUASI ANTRAKS PADA MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 - 2014

No.	Provinsi	2012			2013			2014		
		Kasus	Diobati	Meninggal	Kasus	Diobati	Meninggal	Kasus	Diobati	Meninggal
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Nusa Tenggara Timur	18	18	0	0	-	-	0	-	-
2	Sulawesi Selatan	4	4	0	11	11	1	13	13	0
Indonesia		22	22	0	11	11	1	13	13	0

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 7.1

JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN 2012-2014

No	Provinsi	2012			2013			2014		
		Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa STBM	%	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa STBM	%	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa STBM	%
(1)	*(2)*		*(3)*			*(4)*			*(5)*	
1	Aceh	6.429	87	1,35	6.464	122	1,89	6.474	409	6,32
2	Sumatera Utara	5.687	109	1,92	5.945	121	2,04	6.080	466	7,66
3	Sumatera Barat	1.014	639	63,02	1.145	647	56,51	1.139	405	35,56
4	Riau	1.629	363	22,28	1.835	387	21,09	1.835	176	9,59
5	Jambi	1.406	159	11,31	1.553	169	10,88	1.561	296	18,96
6	Sumatera Selatan	3.126	617	19,74	3.144	633	20,13	3.194	710	22,23
7	Bengkulu	1.448	112	7,73	1.524	125	8,20	1.513	172	11,37
8	Lampung	2.423	71	2,93	2.580	256	9,92	2.640	528	20,00
9	Kep. Bangka Belitung	361	91	25,21	380	95	25,00	387	250	64,60
10	Kepulauan Riau	351	35	9,97	415	96	23,13	416	102	24,52
11	DKI Jakarta	267	2	0,75	267	2	0,75	267	5	1,87
12	Jawa Barat	5.863	504	8,60	5.934	779	13,13	5.960	1.816	30,47
13	Jawa Tengah	8.589	1.423	16,57	8.578	2.817	32,84	8.559	3.257	38,05
14	DI Yogyakarta	438	34	7,76	438	63	14,38	438	377	86,07
15	Jawa Timur	8.523	2.838	33,30	8.505	3.618	42,54	8.499	4.737	55,74
16	Banten	1.535	116	7,56	1.551	149	9,61	1.551	144	9,28
17	Bali	714	10	1,40	714	672	94,12	716	246	34,36
18	Nusa Tenggara Barat	962	834	86,69	1.080	1.071	99,17	1.137	932	81,97
19	Nusa Tenggara Timur	2.925	1.084	37,06	3.200	1.531	47,84	3.268	1.678	51,35
20	Kalimantan Barat	1.958	206	10,52	1.986	252	12,69	1.997	295	14,77
21	Kalimantan Tengah	1.469	330	22,46	1.558	451	28,95	1.572	380	24,17
22	Kalimantan Selatan	1.984	342	17,24	2.009	391	19,46	2.007	557	27,75
23	Kalimantan Timur	1.460	56	3,84	1.492	56	3,75	1.029	6	0,58
24	Kalimantan Utara *	-	-	-	-	-	-	482	89	18,46
25	Sulawesi Utara	1.634	26	1,59	1.790	50	2,79	1.822	338	18,55
26	Sulawesi Tengah	1.740	298	17,13	1.936	318	16,43	2.007	818	40,76
27	Sulawesi Selatan	2.955	268	9,07	3.024	331	10,95	3.038	232	7,64
28	Sulawesi Tenggara	1.971	36	1,83	2.142	118	5,51	2.197	188	8,56
29	Gorontalo	700	111	15,86	729	319	43,76	729	358	49,11
30	Sulawesi Barat	570	132	23,16	604	192	31,79	647	77	11,90
31	Maluku	902	59	6,54	1.169	77	6,59	1.224	138	11,27
32	Maluku Utara	1.062	72	6,78	1.151	107	9,30	1.180	166	14,07
33	Papua Barat	1.373	65	4,73	1.554	100	6,44	1.715	131	7,64
34	Papua	3.997	36	0,90	4.857	113	2,33	5.225	18	0,34
Indonesia		**77.465**	**11.165**	**14,41**	**81.253**	**16.228**	**19,97**	**82.505**	**20.497**	**24,84**

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Catatan: *) Data Kalimantan Utara tahun 2012 dan 2013 masih bergabung dengan Kalimantan Timur

Lampiran 7.2

PENCAPAIAN RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) TAHUN 2014

No	Provinsi	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Yang Dipantau	Rumah Tangga Ber - PHBS	Pencapaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	1.100.855	172.878	52.439	30,33
2	Sumatera Utara	2.826.627	1.277.713	767.103	60,04
3	Sumatera Barat	1.065.762	716.709	381.888	53,28
4	Riau	1.419.169	274.735	142.458	51,85
5	Jambi	980.273	268.312	194.380	72,45
6	Sumatera Selatan	2.487.172	1.098.700	703.547	64,03
7	Bengkulu	436.300	219.655	118.273	53,84
8	Lampung	1.997.440	1.025.730	620.109	60,46
9	Kepulauan Bangka Belitung	260.270	61.555	39.961	64,92
10	Kepulauan Riau	661.179	334.714	126.390	37,76
11	DKI Jakarta	1.674.145	652.620	451.948	69,25
12	Jawa Barat	10.241.714	6.182.810	3.178.032	51,40
13	Jawa Tengah	5.862.785	3.686.050	2.621.471	71,12
14	DI Yogyakarta	1.039.995	456.272	170.918	37,46
15	Jawa Timur	11.115.604	2.101.342	1.013.984	48,25
16	Banten	3.012.974	917.588	560.707	61,11
17	Bali	976.428	138.783	103.041	74,25
18	Nusa Tenggara Barat	1.305.302	50.907	15.008	29,48
19	Nusa Tenggara Timur	1.013.882	242.617	118.942	49,02
20	Kalimantan Barat	876.869	111.336	45.336	40,72
21	Kalimantan Tengah	617.700	160.473	70.742	44,08
22	Kalimantan Selatan	894.552	222.701	110.772	49,74
23	Kalimantan Timur	870.912	264.645	199.184	75,26
24	Sulawesi Utara	634.990	406.199	311.206	76,61
25	Sulawesi Tengah	663.589	2.633	828	31,45
26	Sulawesi Selatan	1.847.825	1.247.789	666.694	53,43
27	Sulawesi Tenggara	472.315	329.813	146.818	44,52
28	Gorontalo	243.981	57.610	39.965	69,37
29	Sulawesi Barat	258.559	90.165	48.354	53,63
30	Maluku	316.597	183.048	70.268	38,39
31	Maluku Utara	196.762	37.482	20.625	55,03
32	Papua Barat	168.076	22.275	5.681	25,50
33	Papua	658.584	498.894	186.790	37,44
Indonesia		**58.199.187**	**23.514.753**	**13.303.862**	**56,58**

Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 7.3

JUMLAH KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) DI INDONESIA TAHUN 2014

No.	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota Penyelenggara KKS	KKS (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	2	8,70
2	Sumatera Utara	33	17	51,52
3	Sumatera Barat	20	20	100,00
4	Riau	12	9	75,00
5	Jambi	11	8	72,73
6	Sumatera Selatan	16	13	81,25
7	Bengkulu	10	8	80,00
8	Lampung	15	9	60,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	2	28,57
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	26	26	100,00
13	Jawa Tengah	36	36	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	6	75,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	19	7	36,84
20	Kalimantan Barat	14	8	57,14
21	Kalimantan Tengah	14	2	14,29
22	Kalimantan Selatan	13	10	76,92
23	Kalimantan Timur	13	13	100,00
24	Kalimantan Utara	5	0	0,00
25	Sulawesi Utara	15	10	66,67
26	Sulawesi Tengah	13	5	38,46
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	14	9	64,29
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	4	66,67
31	Maluku	10	0	0,00
32	Maluku Utara	11	1	9,09
33	Papua Barat	13	0	0,00
34	Papua	29	1	3,45
Indonesia		**511**	**331**	**64,77**

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 7.4

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK TAHUN 2013-2014

No.	Provinsi	2013*)	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Aceh	60,76	61,10
2	Sumatera Utara	68,00	67,13
3	Sumatera Barat	64,34	61,20
4	Riau	73,17	73,18
5	Jambi	77,90	60,78
6	Sumatera Selatan	61,73	59,14
7	Bengkulu	61,18	35,17
8	Lampung	65,72	51,48
9	Kep. Bangka Belitung	39,30	62,53
10	Kepulauan Riau	53,37	83,27
11	DKI Jakarta	92,64	91,23
12	Jawa Barat	63,50	63,92
13	Jawa Tengah	65,57	71,41
14	DI Yogyakarta	69,58	77,70
15	Jawa Timur	78,81	74,82
16	Banten	75,19	67,76
17	Bali	88,59	93,22
18	Nusa Tenggara Barat	59,45	63,94
19	Nusa Tenggara Timur	54,85	52,65
20	Kalimantan Barat	64,70	60,91
21	Kalimantan Tengah	54,10	58,73
22	Kalimantan Selatan	61,59	57,67
23	Kalimantan Timur	78,93	75,11
24	Sulawesi Utara	70,06	70,16
25	Sulawesi Tengah	56,80	58,26
26	Sulawesi Selatan	60,21	68,68
27	Sulawesi Tenggara	66,95	73,74
28	Gorontalo	47,27	66,18
29	Sulawesi Barat	69,43	50,88
30	Maluku	58,49	63,01
31	Maluku Utara	57,19	61,98
32	Papua Barat	67,03	68,80
33	Papua	47,70	49,42
Indonesia		**67,93**	**68,11**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Data Susenas triwulan III 2013-2014

Catatan: Data tahun 2013 dihitung ulang dengan pembobot yang disesuaikan dengan data tahun 2014

Lampiran 7.5

PERSENTASE KUALITAS AIR MINUM YANG MEMENUHI SYARAT
TAHUN 2014

No	Provinsi	Tahun 2014		
		Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Memenuhi Syarat	Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	20	86,96
2	Sumatera Utara	18	18	100,00
3	Sumatera Barat	73	62	84,93
4	Riau	-	-	-
5	Jambi	-	-	-
6	Sumatera Selatan	5	5	100,00
7	Bengkulu	15	15	100,00
8	Lampung	54	23	42,59
9	Kep. Bangka Belitung	8	8	100,00
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	40	40	100,00
12	Jawa Barat	140	107	76,43
13	Jawa Tengah	89	60	67,42
14	DI Yogyakarta	30	24	80,00
15	Jawa Timur	57	51	89,47
16	Banten	38	2	5,26
17	Bali	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	37	36	97,30
19	Nusa Tenggara Timur	37	37	100,00
20	Kalimantan Barat	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	120	88	73,33
22	Kalimantan Selatan	180	138	76,67
23	Kalimantan Timur	120	100	83,33
24	Sulawesi Utara	79	79	100,00
25	Sulawesi Tengah	20	20	100,00
26	Sulawesi Selatan	90	76	84,44
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-
28	Gorontalo	40	29	72,50
29	Sulawesi Barat	36	18	50,00
30	Maluku	38	36	94,74
31	Maluku Utara	80	40	50,00
32	Papua Barat	2	1	50,00
33	Papua	4	4	100,00
Indonesia		**1.473**	**1.137**	**77,19**

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 7.6

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK TAHUN 2013-2014

No	Provinsi	2013*)	2014*)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Aceh	49,81	29,54
2	Sumatera Utara	63,77	67,64
3	Sumatera Barat	45,59	40,07
4	Riau	58,44	45,73
5	Jambi	73,61	55,25
6	Sumatera Selatan	58,29	58,24
7	Bengkulu	54,48	39,85
8	Lampung	77,55	34,67
9	Kep. Bangka Belitung	35,06	80,13
10	Kepulauan Riau	46,37	59,68
11	DKI Jakarta	86,60	86,81
12	Jawa Barat	58,92	63,25
13	Jawa Tengah	68,62	69,07
14	DI Yogyakarta	65,11	82,54
15	Jawa Timur	82,03	65,13
16	Banten	59,81	68,09
17	Bali	85,15	74,35
18	Nusa Tenggara Barat	54,35	59,35
19	Nusa Tenggara Timur	24,91	12,77
20	Kalimantan Barat	48,50	44,97
21	Kalimantan Tengah	37,50	29,48
22	Kalimantan Selatan	55,16	19,36
23	Kalimantan Timur	72,61	66,95
24	Sulawesi Utara	70,99	68,17
25	Sulawesi Tengah	50,25	54,51
26	Sulawesi Selatan	54,12	72,97
27	Sulawesi Tenggara	68,87	66,50
28	Gorontalo	48,02	59,83
29	Sulawesi Barat	57,59	59,48
30	Maluku	58,17	61,70
31	Maluku Utara	57,49	58,97
32	Papua Barat	51,89	65,80
33	Papua	25,37	24,78
Indonesia		**60,55**	**61,06**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Data Susenas triwulan III 2013-2014

Catatan: Data tahun 2013 dihitung ulang dengan pembobot yang disesuaikan dengan data tahun 2014

Lampiran 7.7

PERSENTASE RUMAH YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
TAHUN 2014

No.	Provinsi	Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Aceh	36,76
2	Sumatera Utara	73,40
3	Sumatera Barat	72,88
4	Riau	74,00
5	Jambi	73,53
6	Sumatera Selatan	72,28
7	Bengkulu	69,70
8	Lampung	71,25
9	Kep. Bangka Belitung	71,57
10	Kepulauan Riau	75,50
11	DKI Jakarta	73,00
12	Jawa Barat	67,31
13	Jawa Tengah	70,40
14	DI Yogyakarta	69,85
15	Jawa Timur	74,00
16	Banten	69,43
17	Bali	88,12
18	Nusa Tenggara Barat	71,12
19	Nusa Tenggara Timur	60,30
20	Kalimantan Barat	64,70
21	Kalimantan Tengah	59,70
22	Kalimantan Selatan	48,10
23	Kalimantan Timur	72,37
24	Sulawesi Utara	70,65
25	Sulawesi Tengah	79,66
26	Sulawesi Selatan	76,60
27	Sulawesi Tenggara	59,09
28	Gorontalo	59,79
29	Sulawesi Barat	76,04
30	Maluku	33,05
31	Maluku Utara	81,80
32	Papua Barat	52,00
33	Papua	-
Indonesia		**61,81**

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 7.8

PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2014

No.	Provinsi	TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Aceh	53,46
2	Sumatera Utara	75,50
3	Sumatera Barat	81,89
4	Riau	59,61
5	Jambi	52,48
6	Sumatera Selatan	84,78
7	Bengkulu	55,45
8	Lampung	47,35
9	Kep. Bangka Belitung	58,21
10	Kepulauan Riau	75,01
11	DKI Jakarta	83,50
12	Jawa Barat	56,60
13	Jawa Tengah	60,80
14	DI. Yogyakarta	87,90
15	Jawa Timur	76,00
16	Banten	64,71
17	Bali	72,85
18	Nusa Tenggara Barat	79,00
19	Nusa Tenggara Timur	-
20	Kalimantan Barat	58,91
21	Kalimantan Tengah	59,00
22	Kalimantan Selatan	80,42
23	Kalimantan Timur	82,40
24	Sulawesi Utara	88,00
25	Sulawesi Tengah	89,41
26	Sulawesi Selatan	86,05
27	Sulawesi Tenggara	86,20
28	Gorontalo	83,00
29	Sulawesi Barat	62,22
30	Maluku	56,69
31	Maluku Utara	83,20
32	Papua Barat	61,00
33	Papua	-
Indonesia		**68,24**

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 7.9

PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2014

No.	Provinsi	TPM yang Memenuhi Syarat (%)
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Aceh	71,09
2	Sumatera Utara	76,54
3	Sumatera Barat	73,52
4	Riau	75,79
5	Jambi	71,05
6	Sumatera Selatan	78,61
7	Bengkulu	69,15
8	Lampung	62,46
9	Kep. Bangka Belitung	85,54
10	Kepulauan Riau	73,44
11	DKI Jakarta	67,55
12	Jawa Barat	72,26
13	Jawa Tengah	71,42
14	DI Yogyakarta	80,01
15	Jawa Timur	75,78
16	Banten	75,01
17	Bali	90,01
18	Nusa Tenggara Barat	72,01
19	Nusa Tenggara Timur	76,62
20	Kalimantan Barat	75,35
21	Kalimantan Tengah	78,05
22	Kalimantan Selatan	71,57
23	Kalimantan Timur	77,32
24	Sulawesi Utara	74,71
25	Sulawesi Tengah	79,70
26	Sulawesi Selatan	80,00
27	Sulawesi Tenggara	55,65
28	Gorontalo	75,01
29	Sulawesi Barat	60,45
30	Maluku	93,58
31	Maluku Utara	74,44
32	Papua Barat	93,18
33	Papua	75,06
Indonesia		**75,21**

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 7.10

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN PEMBINAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014

No.	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Limbah Fasyankes	Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Limbah Fasyankes (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	6	26,09
2	Sumatera Utara	33	8	24,24
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	15	88,24
7	Bengkulu	10	10	100,00
8	Lampung	15	14	93,33
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	26	96,30
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	17	77,27
20	Kalimantan Barat	14	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	7	70,00
24	Kalimantan Utara	5	-	-
25	Sulawesi Utara	15	4	26,67
26	Sulawesi Tengah	13	3	23,08
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	14	12	85,71
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	3	50,00
31	Maluku	11	1	9,09
32	Maluku Utara	10	10	100,00
33	Papua Barat	13	2	15,38
34	Papua	29	6	20,69
Indonesia		**511**	**382**	**74,76**

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2015

Copyright ©
PUSAT DATA DAN INFORMASI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2015